

PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN MAROS



20 25





BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa perkembangan kerangka ekonomi daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Maros.
6. Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kabupaten Maros.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah Perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2025.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun 2025.
 11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
 14. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA-Perangkat Daerah adalah Perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan dari RKPD Tahun 2025, yang disusun akibat adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
 - (2) Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah dan rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2025 dengan memperhatikan asumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan I (triwulan satu) tahun berkenan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. penutup.
- (3) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7B

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025;
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyesuaian Perubahan Renja Perangkat Daerah serta Perubahan RKA-Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- c. alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI MAROS

A.S. CHAIDIR SYAM



Diundangkan di Maros
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| PERATURAN BUPATI..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| DAFTAR GRAFIK..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | I-3 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen | I-5 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | I-6 |
| 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD | I-6 |
| BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 | II-1 |
| 2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro | II-1 |
| 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi | II-1 |
| 2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional | II-1 |
| 2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan | II-2 |
| 2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros | II-3 |
| 2.1.2 Indeks Pembangunan manusia | II-9 |
| 2.1.3 Tingkat Pengguran Terbuka | II-11 |
| 2.1.4 Tingkat Kemiskinan | II-13 |
| 2.1.2.1.6 Tingkat kemiskinan (P0) | II-13 |
| 2.1.2.1.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | II-16 |
| 2.1.2.1.8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | II-19 |
| 2.1.2.1.9 Kemiskinan Ekstrem | II-22 |
| 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI TRIWULAN I | II-23 |
| 2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 | II-24 |
| 2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025 | II-27 |
| 2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai Triwulan I Tahun 2025 | II-31 |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1 Kebijakan ekonomi Daerah | III-1 |
| 3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro | III-1 |
| 3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi | III-1 |
| A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional | III-1 |
| B. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan | III-2 |
| C. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros | III-3 |
| 3.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka | III-9 |
| 3.1.1.3 Tingkat Kemiskinan | III-10 |
| 3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia | III-14 |
| 3.2 TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH | III-16 |
| 3.2.1 Aspek Eksternal | III-16 |
| 3.2.2 Aspek Internal | III-17 |
| 3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah | III-17 |
| 3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | III-19 |
| 3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah | III-19 |
| 3.3.1.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025 | III-19 |
| 3.3.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | III-21 |
| 3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah | III-22 |

| | |
|--|--------------|
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD | |
| TAHUN 2025 | IV-1 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 | IV-1 |
| 4.2 Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 | IV-7 |
| 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2025 | IV-7 |
| 4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Tahun 2023 | IV-8 |
| 4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023 | IV-10 |
| 4.2.4 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD ... | IV-23 |
| 4.2.5 Strategi dan arah kebijakan tahun 2025 | IV-25 |
| 4.3. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 | IV-62 |
| 4.3.3 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 | IV-111 |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 . | V-1 |
| 5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | V-1 |
| 5.2 Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 | V-4 |
| 5.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 | V-21 |
| BAB VI KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH | VI-1 |
| 6.1 Indikator Makro Pembangunan | VI-1 |
| 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) | VI-1 |
| 6.3 Indikator Kinerja Kunci | VI-3 |
| 6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) | VI-23 |
| 6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) | VI-25 |
| BAB VII PENUTUP | VII-1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|--------|
| Tabel 2.1 | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros | II-7 |
| Tabel 2.2 | Perkembangan penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-13 |
| Tabel 2.3 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II-15 |
| Tabel 2.4 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II-18 |
| Tabel 2.5 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II-21 |
| Tabel 2.6 | Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Terhadap Penduduk Miskin dan Total Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-24 |
| Tabel 2.7 | Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Terakomodir Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 | II-25 |
| Tabel 2.8 | Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Maros Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I | II-27 |
| Tabel 2.9 | Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Maros | II-31 |
| Tabel 3.1 | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros | III-7 |
| Tabel 3.2 | Perkembangan penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | III-11 |
| Tabel 3.3 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | III-13 |
| Tabel 3.4 | Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Maros Tahun 2025 | III-18 |
| Tabel 3.5 | Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 | III-20 |
| Tabel 3.6 | Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 | III-22 |
| Tabel 3.7 | Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 | III-23 |
| Tabel 4.1 | Visi, pokok Visi, dan Penjelasan Visi | IV-2 |
| Tabel 4.2 | Misi dan penjelasan Misi | IV-2 |
| Tabel 4.3 | Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Dalam RPJMD | IV-4 |
| Tabel 4.4 | Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 | IV-8 |
| Tabel 4.5 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 | IV-8 |
| Tabel 4.6. | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 | IV-10 |
| Tabel 4.7 | Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 | IV-12 |
| Tabel 4.8 | Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 | IV-14 |
| Tabel 4.9 | Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD Untuk Tahun 2025 | IV-23 |
| Tabel 4.10 | Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 | IV-26 |
| Tabel 4.11 | Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 | IV-63 |
| Tabel 4.12 | Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD Untuk Tahun 2025 | IV-97 |
| Tabel 4.13 | Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Maros Tahun 2025 | IV-100 |
| Tabel 4.14 | Keselaran Sasaran Pembangunan Daerah Terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 | IV-101 |
| Tabel 4.15 | Dukungan Pemerintah Kabupaten Maros Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2025 | IV-102 |
| Tabel 4.16 | Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Kabupaten Maros Tahun 2025 | IV-112 |
| Tabel 4.17 | Keselaran Sasaran Pembangunan Daerah Terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 | IV-112 |
| Tabel 4.18 | Dukungan Pemerintah Kabupaten Maros Terhadap Kegiatan Prioritas Sulawesi Selatan Tahun 2025 | IV-114 |
| Tabel 5.1 | Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 .. | V-1 |

| | | |
|-----------|---|-------|
| Tabel 5.2 | Target Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 | V-2 |
| Tabel 5.3 | Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 | V-4 |
| Tabel 5.4 | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Maros Tahun 2025 | V-23 |
| Tabel 6.1 | Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Penetapan Perubahan Target Indikator Makro Tahun 2025 | VI-1 |
| Tabel 6.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Perubahan Target Indikator Makro Tahun 2025 | VI-2 |
| Tabel 6.3 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 dan Perubahan Target Indikator Makro Tahun 2025 | VI-3 |
| Tabel 6.4 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupata Maros Tahun 2024-2025 | VI-23 |
| Tabel 6.5 | Capaian dan Target Perubahan Indikator TPB/SDG's Tahun 2024 –2025 | VI-26 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-------------|---|--------|
| Grafik 2.1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) Sulawesi Selatan dan Nasional 2021-2025 (c to c) | II-2 |
| Grafik 2.2 | Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (yoy) Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025 | II-3 |
| Grafik 2.3 | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-3 |
| Grafik 2.4 | Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-11 |
| Grafik 2.5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-12 |
| Grafik 2.6 | Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2022 – 2024 | II-14 |
| Grafik 2.7 | Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-15 |
| Grafik 2.8 | Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-16 |
| Grafik 2.9 | Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2022-2024 | II-17 |
| Grafik 2.10 | Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-18 |
| Grafik 2.11 | Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-19 |
| Grafik 2.12 | Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-20 |
| Grafik 2.13 | Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-21 |
| Grafik 2.14 | Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022-2024 | II-23 |
| Grafik 3.1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) Sulawesi Selatan dan Nasional 2021-2025 (c to c) ... | III-2 |
| Grafik 3.2 | Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (yoy) Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025 | III-3 |
| Grafik 3.3 | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | III-3 |
| Grafik 3.4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | III-10 |
| Grafik 3.5 | Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2022 – 2024 | III-12 |
| Grafik 3.6 | Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2024 | III-12 |
| Grafik 3.7 | Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | III-14 |
| Grafik 3.8 | Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | III-16 |

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR
17 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MAROS NOMOR 6 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan perumusan keputusan dalam memanfaatkan sumber daya publik yang tersedia di daerah untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun sesuai dengan tahapan pembangunan berdasarkan dokumen jangka Panjang, menengah dan tahunan. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maros menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lain di tingkat daerah, Provinsi maupun Nasional. Rumusan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 tidak terlepas dari dinamika yang terjadi baik di Tingkat global, nasional maupun regional. Dampak berlangsungnya Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, konflik Semenanjung Korea, Ketegangan antara AS-TiongkokTaiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas dan perubahan iklim secara tidak langsung menjadi ancaman resesi ekonomi yang terjadi pada beberapa negara. Munculnya kebijakan fragmentasi global telah menciptakan disrupsi rantai pasok yang dapat meningkatkan risiko krisis pangan, energi dan keuangan dunia, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional hingga daerah. Hal ini turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan jalannya pembangunan termasuk pelaksanaan pembangunan

Kabupaten Maros secara tidak langsung. Selain itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer serta momentum Pasca Pelantikan hasil Pilkada Serentak 2024 juga mempengaruhi pada kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. Sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan rencana untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk segera menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan pada Minggu keempat Bulan Mei Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 dan memastikan sinergi program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan kondisi dinamika tersebut serta dengan mendasarkan pada hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan

pencapaian makro di tahun 2024, maka perlu dilakukan percepatan upaya yang lebih optimal agar hasil di akhir tahun dapat dicapai. Penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran diperlukan agar dapat lebih optimal dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Sebagai gambaran awal, untuk capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 3,79 persen, Tingkat Kemiskinan 9,32 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,32 persen, Indeks Pembangunan Manusia 74,04, PDRB Perkapita 69,21 juta/jiwa dan Rasio Gini 0,350.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum yang melandasi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Nomor 1619); 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa P-RKPD Kabupaten Maros 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan P-RKPD dan RKP Tahun 2025 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Kab Maros dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional;
- b) Bahwa Perubahan P-RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 dan dokumen RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan pelaksanaan Tahun Pertama RPJMD Kabupaten Maros 2025-2029.

1.4 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan khususnya tahun 2025;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahun 2025;
3. Pedoman penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 serta Perubahan APBD Kabupaten Maros Tahun 2025;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
5. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;
6. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar

Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen dan Sistematika Penyajian Dokumen.

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan, pada bab ini dijelaskan bagaimana pencapaian pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai Triwulan I serta menjelaskan kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pencapaian pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai triwulan I.

Bab III Perubahan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, menjelaskan arah kebijakan ekonomi tahun 2025 yang termuat dalam RKPD Pokok Tahun 2025 sampai triwulan I dan Perubahan target Tahun 2025 yang akan dicapai hingga akhir tahun. Kerangka Keuangan Daerah menjelaskan tentang perubahan kebijakan pendanaan/keuangan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, mmengemukakan secara eksplisit terkait kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2025.

Bab V Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025, menjelaskan tentang perubahan rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menggambarkan penetapan indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian indicator tahunan yaitu indicator makro, indicator kinerja utama, indicator kinerja kunci.

Bab VII Penutup, menyajikan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Berdasarkan pasal 343 Permendagri No 86 tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2024 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2025. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025.

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

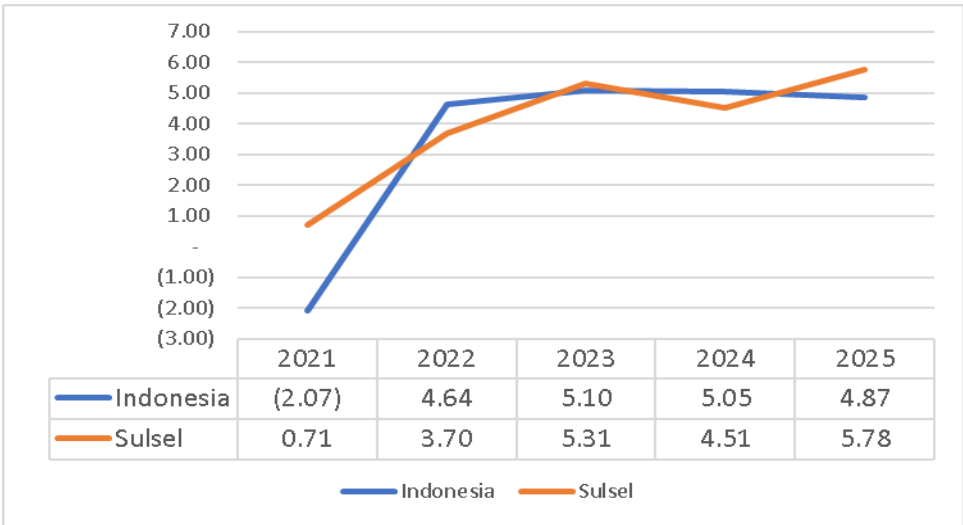
Evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros. Realisasi Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 ditingkat nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi

sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 berkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen. Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen (y-on-y).

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi (%) Sulawesi Selatan dan Nasional
2021-2025 (c to c)

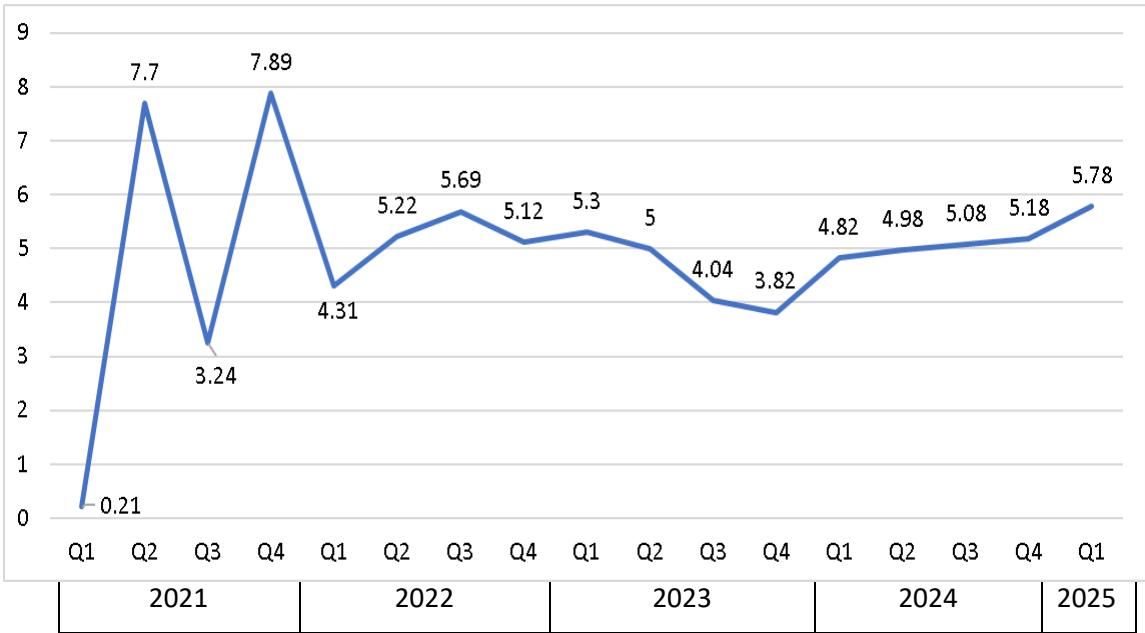


Sumber: BPS (diolah), 2025

2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulawesi Selatan triwulan 1-2025 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 173,51 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 97,36triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 1-2025 terhadap triwulan 1-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen (y-on-y). Dari Sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,56 persen. Dari Sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,61 persen. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 1-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -4,12 persen (q-to-q). Dari Sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi, sebesar -26,06 persen. Sementara dari Sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi terdalam sebesar 51,38 persen.

Grafik 2.2
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (yoy)
Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025

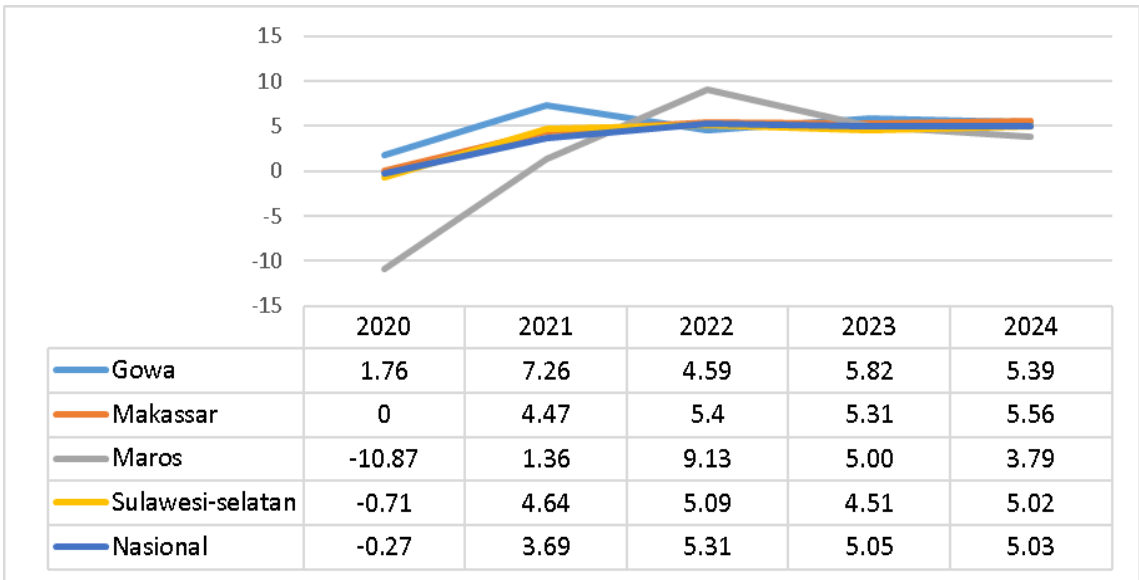


Sumber : BPS Sulsel, 2025

2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros

Setiap lapangan usaha menciptakan nilai tambah yang membentuk struktur ekonomi dari suatu daerah. Struktur ekonomi ini menggambarkan ketergantunagn suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap lapangan usaha. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perekonomian Kabupaten Maros di dominasi oleh Sektor Transportasi dan pergudangan, Industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Hal ini tergambar dari konstribusi masing-masing lapangan usaha PDRB Kabupaten Maros.

Grafik 2.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2025

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% (year-on-year), sedikit melambat dibandingkan dengan 5,05% pada tahun 2023, namun tetap menunjukkan kinerja yang solid.

Beberapa faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 antara lain: Konsumsi Rumah Tangga: Meningkatnya belanja konsumen, didorong oleh kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan program sosial pemerintah. Investasi tumbuh sebesar 4,61% secara tahunan, mencatatkan angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Peningkatan belanja pemerintah, termasuk program bantuan sosial dan subsidi, turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tantangan dan Proyeksi 2025, meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, antara lain: Gejolak Global: Ketidakpastian ekonomi global, termasuk potensi kebijakan tarif dari negara mitra dagang, dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi. Stabilitas Nilai Tukar: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi perhatian, meskipun Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter yang hati-hati.

Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan optimisme, dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 4,7% hingga 5,5%. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan global, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan ketahanan dan prospek yang positif. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan stabilitas makroekonomi, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhannya pada tahun 2025.

Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 696,252 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 43 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 652,648 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari 377,208 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 396,142 triliun rupiah di tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,02 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Sulawesi Selatan didominasi oleh 4 kategori lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan

terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 21,84%.

Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Maros pada tahun 2024 terdapat sebanyak 51 tempat. Dimana terdiri dari 21 pasar dengan bangunan permanen, 16 Kelompok pertokoan dan 14 pasar dengan bangunan semi permanen. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dikaitkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Sehingga hal tersebut yang mendorong permintaan akan barang-barang kebutuhan rumah tangga semakin meningkat juga.

Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 miliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 miliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024, Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,79 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 243.062,72 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 16.159,93 milyar dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp 226.902,79. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Dua lapangan usaha memiliki pertumbuhan di atas 5 persen. Sembilan lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif antara 3 dan 5 persen. Sedangkan, enam lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan kurang dari 3 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 5 persen antara lain: lapangan usaha Real Estate sebesar 8,18 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,09 persen. Sedangkan, enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 3 persen adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 2,12 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,29 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 2,36 persen, lapangan usaha

Informasi dan Komunikasi sebesar 2,73 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,81 persen, dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 2,05 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 140.197,90 milyar di tahun 2023 menjadi Rp 147.989,20 milyar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024, Kota Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,56 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Makassar pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarnya mencapai 20,03 persen.

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Gowa mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencatatkan angka 5,39%, yang melebihi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 5,02% . Pendapatan per Kapita: Meningkat dari Rp35,52 juta pada tahun 2023 menjadi Rp37,77 juta pada tahun 2024, mencatatkan kenaikan sebesar 6,33% .

Sektor-sektor Pendorong Pertumbuhan adalah sektor pariwisata menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Gowa. Program "Beautiful Malino" dan pembangunan destinasi wisata baru seperti Sierra Sky View, Cimory Dairy Land, dan Malino Wonderland berhasil menarik investasi sebesar Rp400 miliar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) . UMKM dan Inovasi Rumah Produktif: Inovasi "Proksi Rumah Produktif" yang diluncurkan oleh Pemkab Gowa berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Program ini telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Gowa dan 167 desa/kelurahan, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gowa berhasil masuk sepuluh besar dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 yang diselenggarakan oleh Bappenas RI. Inovasi "Proksi Rumah Produktif" menjadi salah satu faktor utama yang diakui dalam penghargaan tersebut, menunjukkan komitmen Pemkab Gowa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Meskipun perekonomian Kabupaten Gowa menunjukkan kinerja yang positif, tantangan seperti ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, Pemkab Gowa terus mendorong pengembangan sektor-sektor baru seperti pariwisata dan UMKM untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan. pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 miliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 miliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukan selama tahun 2024. Distribusi persentase PDRB berdasarkan ADHB Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros

| No. | Sektor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 18,52 | 19,74 | 16,50 | 15,25 | 14,79 | 16.96 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 8,47 | 9,01 | 7,70 | 7,43 | 6,98 | 7.92 |
| 3 | Industri Pengolahan | 18,94 | 17,62 | 15,59 | 14,94 | 14,79 | 16.38 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.05 |
| 5 | Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0.12 |
| 6 | Konstruksi | 11,55 | 11,92 | 10,47 | 9,94 | 9,51 | 10.68 |

| No. | Sektor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,53 | 3,63 | 3,15 | 2,99 | 2,93 | 3.25 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 25,79 | 24,88 | 35,56 | 39,29 | 40,92 | 33.29 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,37 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0.34 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1,49 | 1,56 | 1,29 | 1,20 | 1,14 | 1.34 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,66 | 1,73 | 1,48 | 1,33 | 1,27 | 1.49 |
| 12 | Real Estate | 1,61 | 1,63 | 1,42 | 1,33 | 1,37 | 1.47 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0.03 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,74 | 4,51 | 3,66 | 3,31 | 3,37 | 3.92 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,76 | 1,74 | 1,44 | 1,34 | 1,29 | 1.51 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,86 | 0,92 | 0,76 | 0,73 | 0,72 | 0.80 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0.45 |
| PDRB | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Maros didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Maros.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu mencapai 40,92 persen (angka ini meningkat dari 39,28 persen di tahun 2023). Selanjutnya, Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 14,79 persen (angka ini menurun dari 15,25 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,79 persen (menurun dari 14,94 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,94 persen (menurun dari 9,94 persen di tahun 2023). Dan terakhir yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,98 persen (menurun dari 7,43 persen di tahun 2023).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Transportasi dan Pergudangan cenderung mengalami peningkatan peranan. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; dan Konstruksi adalah kategori yang cenderung mengalami penurunan peranan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan Transportasi dan Pergudangan adalah bertambahnya aktivitas pada lapangan usaha tersebut sebagai pasca pandemi Covid-19. Dibukanya kembali rute penerbangan internasional dan kemudahan persyaratan penerbangan membuat jumlah penumpang utamanya sub sektor Angkutan Udara menjadi bertambah.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. sebelumnya yang sebesar 74,39. persen per tahun. Peningkatan ini termasuk dalam kategori tinggi. Peningkatan terjadi di seluruh dimensi pembentuk IPM seperti umur panjang dan hidup sehat: harapan hidup saat lahir meningkat. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah meningkat. Standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita meningkat. IPM Indonesia tahun 2024 berada di peringkat ke-112 dunia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan tahun 2024 mencapai 75,18, meningkat 0,58 poin (0,78 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (74,60). Selama 2020-2024, IPM Sulawesi Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,71 persen per tahun. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Dimensi umur panjang dan hidup sehat

serta pendidikan mengalami perlambatan sedangkan percepatan pertumbuhan terjadi pada dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 di Sulawesi Selatan memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,83 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,54 tahun menjadi 13,55 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,10 tahun, dari 8,76 tahun menjadi 8,86 tahun pada 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 434 ribu rupiah (3,67 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, jumlah kabupaten/kota pada masing-masing status pembangunan dari sedang hingga sangat tinggi masih sama dengan tahun sebelumnya. Seluruh kabupaten/kota memiliki status pembangunan manusia “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Selanjutnya, terdapat 20 kabupaten lainnya dengan status pembangunan tinggi ($70 \leq IPM < 80$). Sementara itu, hanya Jeneponto yang status pembangunan manusianya masih berada pada level sedang dengan nilai indeks 69,45. Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan IPM. Rata-rata peningkatan IPM 24 Kabupaten/Kota sebesar 0,64 poin. 4 kabupaten dengan peningkatan paling tinggi adalah Tana Toraja, Bantaeng, Kepulauan Selayar dan Soppeng dengan peningkatan sebesar 0,82 poin sampai dengan 0,93 poin. Sedangkan Kabupaten dengan peningkatan paling rendah adalah Kota Makassar sebesar 0,38 poin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 73,56% dan tahun 2024 sebesar 74,04 dengan perubahan sebesar 0,48%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

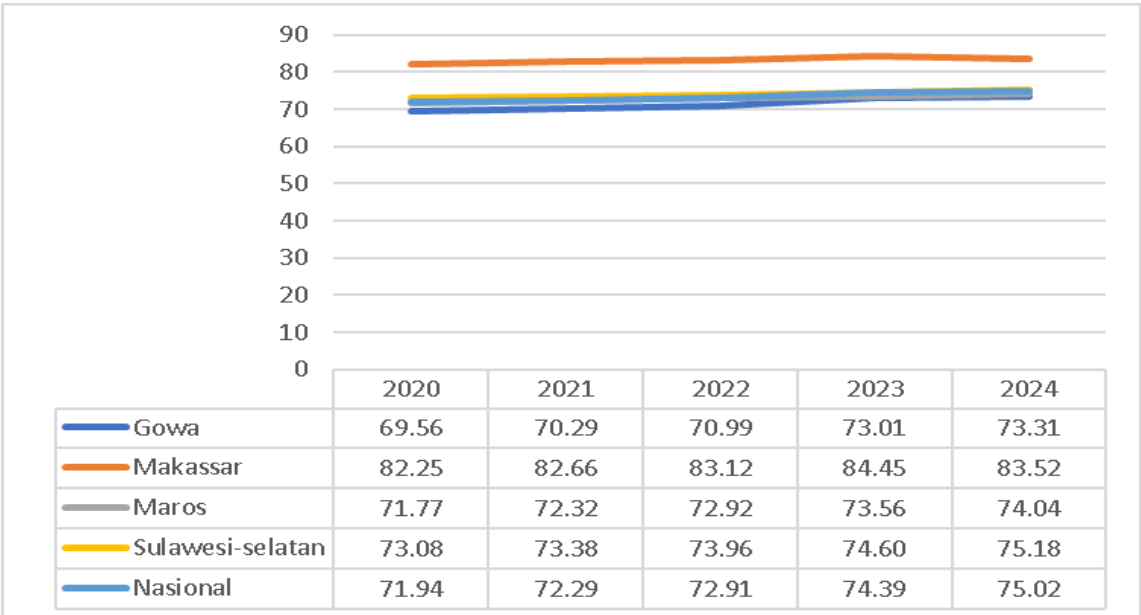
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar pada tahun 2024 mencapai 83,52, meningkat dari 83,12 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, IPM Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mencapai 75,18, juga mengalami peningkatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 mencapai 73,71. IPM ini menunjukkan sejauh mana masyarakat Gowa dapat mengakses

hasil pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Gowa berada di kategori tinggi menurut standar UNDP.

Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.4
Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

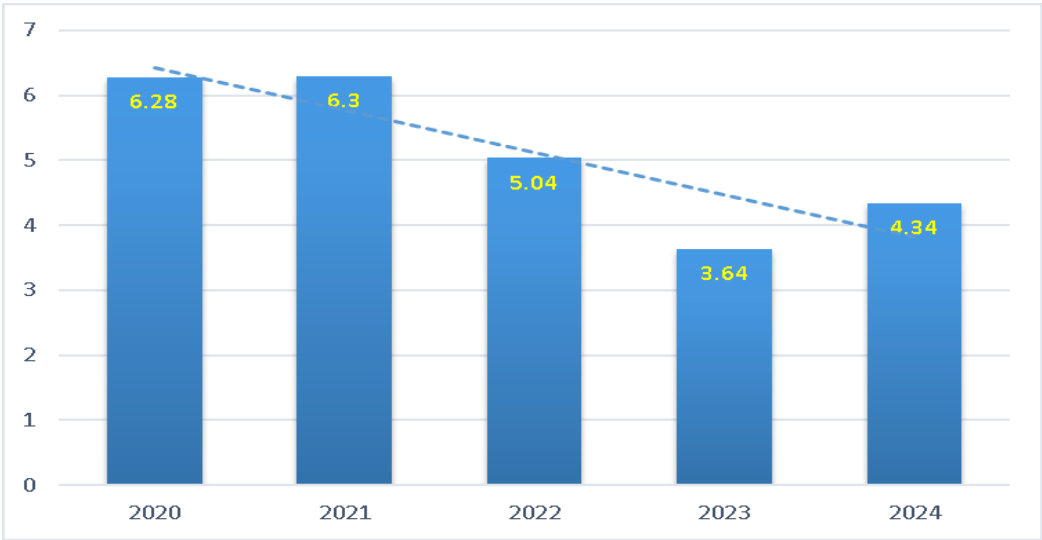
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja. TPT mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja.

TPT merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi suatu wilayah. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, TPT menunjukkan adanya perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Namun, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini.

Perkembangan TPT Kabupaten maros menunjukkan tren yang cenderung menurun selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Maros sebesar 6,28 persen, kemudian naik pada Tahun 2021 sebesar 6,28. Kemudian tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan hingga mencapai 6,3. Namun pada tahun

2023 dengan semakin mengurangnya pandemi serta percepatan akselerasi ekonomi yang digalakkan Pemerintah Daerah, TPT Kabupaten Maros mengalami penurunan hingga mencapai 5,04 persen dan Pada Tahun 2024 dengan semakin banyaknya lapangan kerja di buka baik oleh swasta maupun oleh Pemerintah, maka TPT Kabupaten Maros dapat kembali menurun hingga mencapai 4,34 persen.

Grafik 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Maros Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros berada pada posisi ke-19 tertinggi dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan, meningkat dibandingkan pada Tahun 2024 (posisi 15 dari 24 kabupaten/Kota). Kabupaten yang memiliki TPT tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar dengan capaian TPT 9,71 persen. Sedangkan capaian TPT terendah berada di Kabupaten Enrekang yaitu sebesar 1,51 persen. TPT Kabupaten Maros tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Gambaran capaian TPT kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Pada tahun 2024 TPT menunjukkan peningkatan hingga mencapai 4,34 persen. Hal ini disebabkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Selain itu tingkat Pendidikan tenaga kerja masih berada pada level menengah kebawah sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan

2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami seseorang dalam memenuhi kebutuhan dsar yang minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan berbagai karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosilogisnya. Upaya pembeberdayaan masyarakat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial - ekonomi serta memperkuat martabatnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dilaksanakan dengan menggunakan data BPS dan Dinas Sosial yang terdpat dalam aplikasi DTKS.

2.1.4.1. Tingkat kemiskinan (P0)

Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 9,89 persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2021 hingga mencapai 9,74 persen. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 9,32 persen. Data perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

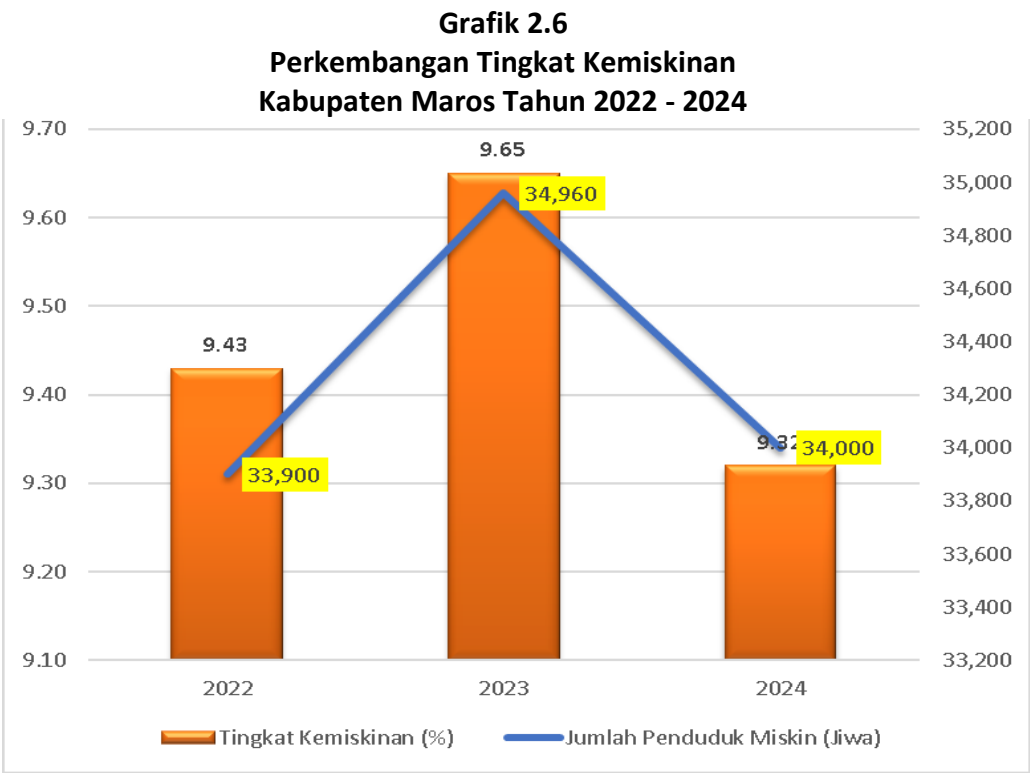
Tabel 2.2
Perkembangan penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | Tingkat Kemiskinan (Persen) |
|----|-------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2020 | 391.774 | 34.620 | 9,74 |
| 2 | 2021 | 396.924 | 34.110 | 9,57 |
| 3 | 2022 | 403.774 | 33.900 | 9,43 |
| 4 | 2023 | 410.699 | 34.960 | 9,65 |
| 5 | 2024 | 423.990 | 34.000 | 9,32 |

Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

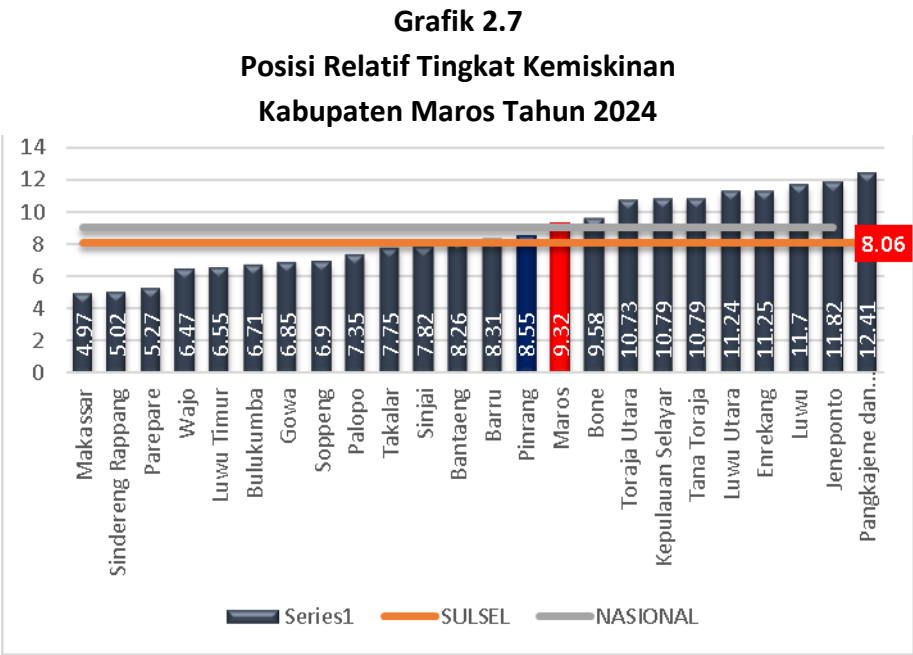
Seperti yang terlihat pada Tabel diatas, terdapat penurunan angka tingkat kemiskinan pada Tahun 2024. Penurunan tahun 2024 disebabkan kondisi cuaca cenderung normal, produksi pertanian kembali meningkat. Program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta beberapa program Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain program pemberian bantuan bibit ikan dan bibit

pertanian, pembagian alat tangkap dan alsintan, penyediaan asuransi bagi petani, pemberian baju seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin, pembangunan jalan produksi, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan pemukiman kawasan kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan.



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di urutan 15 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan,. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki capaian tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 12,41 persen. Sedangkan Kota Makassar memiliki capaian tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 4,97 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, terlihat bahwa hampir seluruh Kabupaten/Kota serta Propinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan tingkat kemiskinan.



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

Tabel 2.3
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

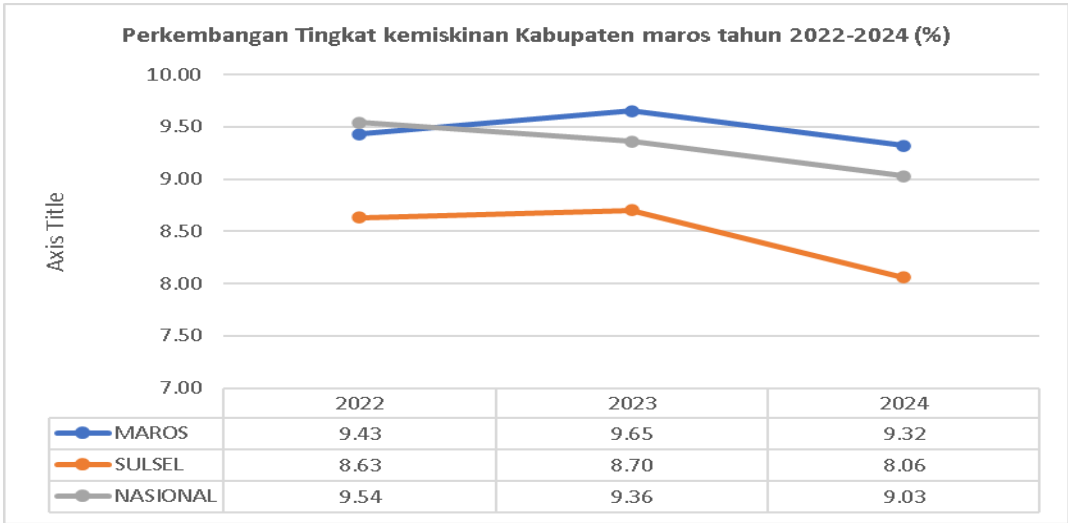
| No | Kabupaten/Kota | Tingkat Kemiskinan (%) | | | | |
|----|--------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kepulauan Selayar | 12,48 | 12,45 | 12.24 | 12,27 | 10,79 |
| 2 | Bulukumba | 7,10 | 7,43 | 7.39 | 7,22 | 6,71 |
| 3 | Bantaeng | 8,95 | 9,41 | 9.07 | 9,18 | 8,26 |
| 4 | Jeneponto | 14,58 | 14,28 | 13.73 | 13,06 | 11,82 |
| 5 | Takalar | 8,44 | 8,25 | 8.25 | 8,29 | 7,75 |
| 6 | Gowa | 7,38 | 7,54 | 7.36 | 7,42 | 6,85 |
| 7 | Sinjai | 9,00 | 8,84 | 8.80 | 8,55 | 7,82 |
| 8 | Maros | 9,74 | 9,57 | 9.43 | 9,65 | 9,32 |
| 9 | Pangkajene dan Kepulauan | 13,96 | 14,28 | 13.92 | 13,4 | 12,41 |
| 10 | Barru | 8,26 | 8,68 | 8.40 | 8,46 | 8,31 |
| 11 | Bone | 10,68 | 10,52 | 10.58 | 10,53 | 9,58 |
| 12 | Soppeng | 7,59 | 7,53 | 7.49 | 7,48 | 6,9 |
| 13 | Wajo | 6,95 | 6,46 | 6.57 | 6,73 | 6,47 |
| 14 | Sindereng Rappang | 5,05 | 5,04 | 5.11 | 5,14 | 5,02 |
| 15 | Pinrang | 8,86 | 8,81 | 8.79 | 8,9 | 8,55 |

| No | Kabupaten/Kota | Tingkat Kemiskinan (%) | | | | |
|----|----------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16 | Enrekang | 12,17 | 12,47 | 12.39 | 12,69 | 11,25 |
| 17 | Luwu | 12,65 | 12,53 | 12.49 | 12,71 | 11,7 |
| 18 | Tana Toraja | 12,10 | 12,27 | 12.18 | 12,48 | 10,79 |
| 19 | Luwu Utara | 13,41 | 13,59 | 13.22 | 12,66 | 11,24 |
| 20 | Luwu Timur | 6,85 | 6,94 | 6.81 | 6,93 | 6,55 |
| 21 | Toraja Utara | 12,01 | 11,99 | 11.65 | 12,12 | 10,73 |
| 22 | Makassar | 4,54 | 4,82 | 4.58 | 5,07 | 4,97 |
| 23 | Parepare | 5,44 | 5,40 | 5.41 | 5,34 | 5,27 |
| 24 | Palopo | 7,85 | 8,14 | 7.78 | 7,69 | 7,35 |

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025

Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros (9,32 %) berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan (8,06 %), dan capaian Nasional (9,03 %). Pada Tahun 2024, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros lebih tinggi dibandingkan Tingkat Kemiskinan Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Grafik 2.8
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

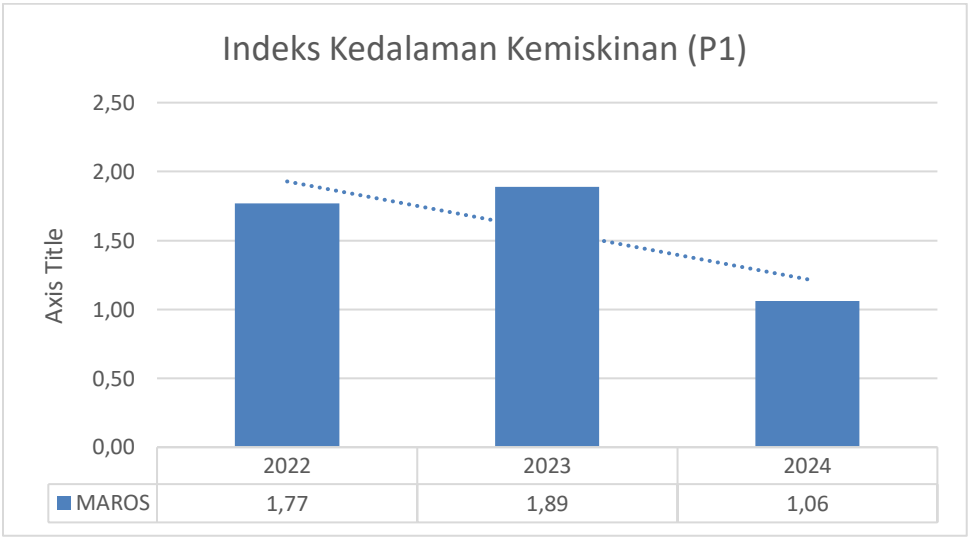
2.1.4.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk

dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah khususnya antar kabupaten/kota.

Indeks Kedalamankemiskinan (P1) Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang berfluktuatif selama tahun 2022 hingga tahun 2024, walaupun secara umum cenderung menurun. Pada tahun 2022 realisasi P1 Kabupaten Maros sebesar 1,77 poin. Pada tahun 2023 P1 Kabupaten Maros naik hingga mencapai 1,89 poin, kemudian kembali turun pada tahun 2024 hingga 1,06 poin.

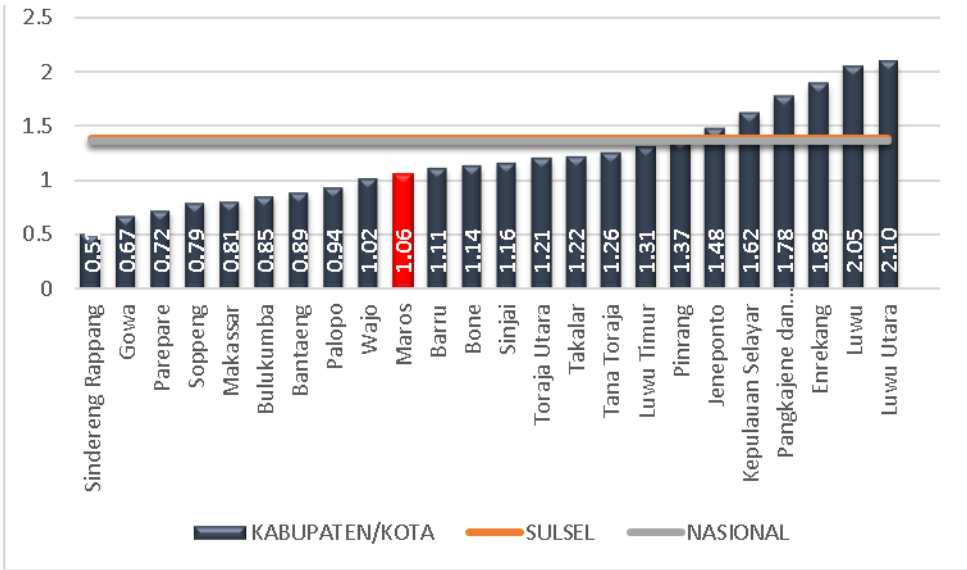
Grafik 2.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Maros Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan demikian semakin tinggi nilai P1 maka ketimpangan penduduk miskin juga semakin melebar atau dengan kata lain kesenjangan penduduk miskin semakin bertambah. Capaian P1 Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2020 hingga tahun 2023, walaupun tingkat kemiskinan (P0) terus menurun. Meningkatnya capaian P1 tersebut memperlihatkan bahwa penduduk miskin yang berkurang adalah penduduk miskin yang memiliki pengeluaran mendekati garis kemiskinan (Rp 530.070), sedangkan penduduk miskin yang pengeluarannya berada jauh dari garis kemiskinan belum tersentuh oleh program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2024 nilai P1 Kabupaten Maros berada pada posisi ke-10 dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Sidrap memiliki nilai P1 terendah, yaitu sebesar 0,51 poin, sedangkan nilai P1 tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Luwu Utara dengan capaian 2,10 poin.

Grafik 2.10
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Maros Tahun 2024



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

Tabel 2.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

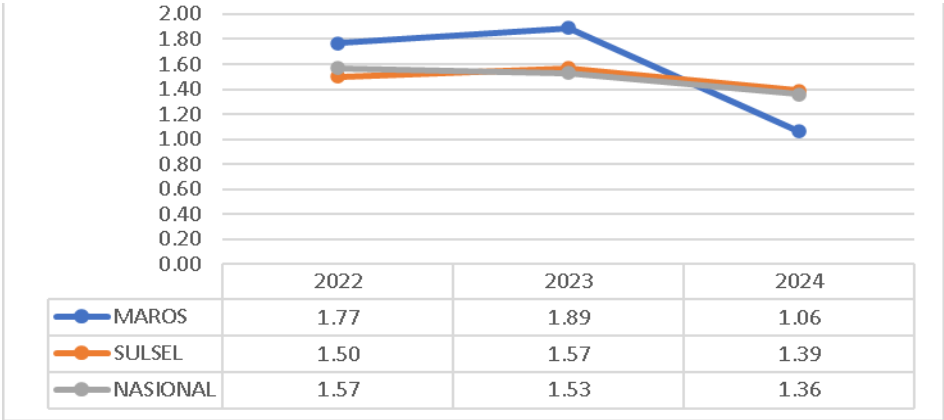
| No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Kepulauan Selayar | 2,25 | 2,09 | 2,15 | 2,36 | 1,62 |
| 2 | Bulukumba | 0,71 | 1,00 | 0,99 | 1,16 | 0,85 |
| 3 | Bantaeng | 0,97 | 1,23 | 1,32 | 1,21 | 0,89 |
| 4 | Jeneponto | 2,6 | 1,64 | 2,54 | 2,23 | 1,48 |
| 5 | Takalar | 1,09 | 1,02 | 0,88 | 0,81 | 1,22 |
| 6 | Gowa | 1,18 | 1,38 | 1,13 | 0,72 | 0,67 |
| 7 | Sinjai | 1,34 | 1,45 | 1,19 | 0,98 | 1,16 |
| 8 | Maros | 1,45 | 1,61 | 1,77 | 1,89 | 1,06 |
| 9 | Pangkajene dan Kepulauan | 2,52 | 2,78 | 2,09 | 2,15 | 1,78 |
| 10 | Barru | 1,31 | 1,52 | 0,98 | 1,48 | 1,11 |
| 11 | Bone | 1,59 | 1,67 | 1,35 | 1,23 | 1,14 |
| 12 | Soppeng | 0,83 | 1,24 | 0,91 | 1,44 | 0,79 |
| 13 | Wajo | 0,98 | 0,79 | 0,86 | 1,34 | 1,02 |

| No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-------------------|------|------|------|------|------|
| 14 | Sindereng Rappang | 0,82 | 0,64 | 0,86 | 0,54 | 0,51 |
| 15 | Pinrang | 1,27 | 1,77 | 1,06 | 1,22 | 1,37 |
| 16 | Enrekang | 1,61 | 1,35 | 1,97 | 1,96 | 1,89 |
| 17 | Luwu | 2,12 | 1,77 | 1,9 | 2,19 | 2,05 |
| 18 | Tana Toraja | 2,32 | 1,66 | 1,3 | 1,80 | 1,26 |
| 19 | Luwu Utara | 2,29 | 2,07 | 2,26 | 2,20 | 2,10 |
| 20 | Luwu Timur | 1,05 | 1,09 | 0,8 | 1,46 | 1,31 |
| 21 | Toraja Utara | 1,75 | 1,83 | 1,7 | 2,47 | 1,21 |
| 22 | Makassar | 0,58 | 0,76 | 0,8 | 0,62 | 0,81 |
| 23 | Parepare | 0,94 | 0,72 | 0,56 | 0,58 | 0,72 |
| 24 | Palopo | 0,95 | 1,17 | 1,43 | 1,10 | 0,94 |

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025

Capaian P1 Kabupaten Maros selama tahun 2022 hingga tahun 2023 berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sedangkan pada tahun 2024 capaian P1 Kabupaten Maros berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Grafik 2.11
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros, ProvinsiSulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



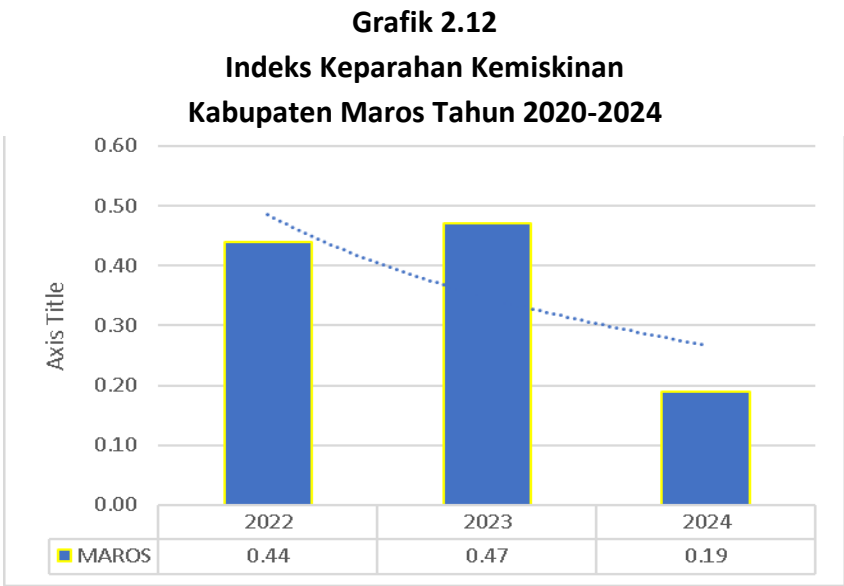
Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025

2.1.4.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros secara umum menunjukkan tren penurunan selama tahun 2022 hingga tahun 2024, walaupun dalam rentang tahun tersebut capaian indeks keparahan kemiskinan menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Pada tahun 2022 capaian P2 Kabupaten Maros sebesar 0,44 poin kemudian pada tahun 2023 menurun drastis hingga mencapai 0,47poin. Pada tahun 2024, capaian P2 sedikit meningkat menjadi 0,19 poin, dan pada tahun 2023 kembali meningkat hingga mencapai 0,47 poin. Pada Tahun 2024 P2 Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 0,19 poin.

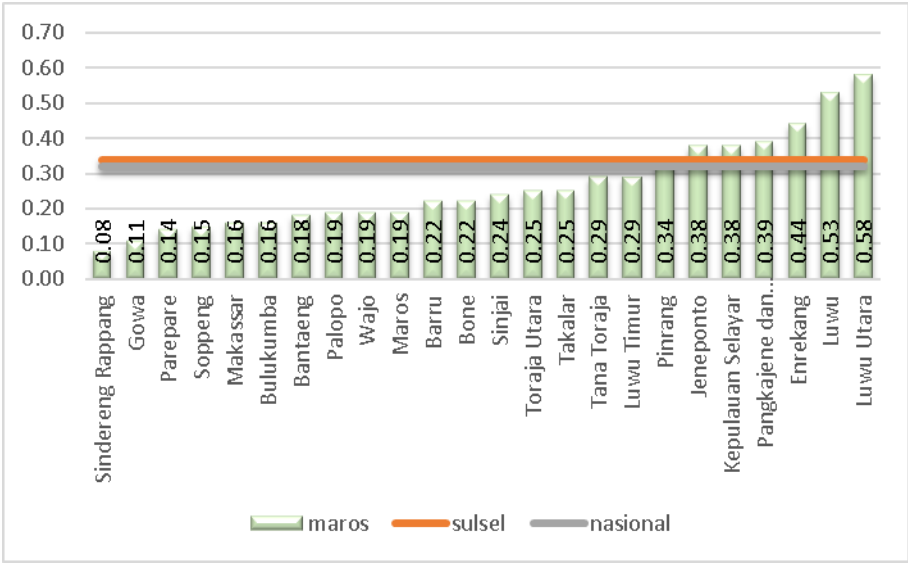
Semakin tingginya nilai P2 memperlihatkan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Maros menunjukkan jarak yang semakin jauh, dengan demikian penduduk miskin yang berada pada desill 1 (miskin ekstrem) semakin sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya.



Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025

Capaian P2 Kabupaten Maros berada pada posisi ke-10 dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan, meningkat satu tingkat dibandingkan Tahun 2023 (posisi 18). Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang memiliki capaian P2 terendah dengan nilai 0,08 poin, diikuti oleh Kabupaten Pare pare dengan nilai P2 0,14 poin dan Kabupaten Soppeng dengan capaian P2 sebesar 0,14 poin. Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng merupakan daerah yang memiliki nilai P2 tertinggi yaitu sebesar 0,16 poin, diikuti oleh Kota Makassar dengan nilai P2 sebesar 0,18 poin, dan Kabupaten Maros dengan nilai P2 sebesar 0,19 poin.

Grafik 2.13
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Maros Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025

Tabel 2.5
Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

| NO | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Kepulauan Selayar | 0,60 | 0,46 | 0,57 | 0,68 | 0,38 |
| 2 | Bulukumba | 0,14 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,16 |
| 3 | Bantaeng | 0,18 | 0,27 | 0,38 | 0,27 | 0,16 |
| 4 | Jeneponto | 0,68 | 0,29 | 0,70 | 0,62 | 0,29 |
| 5 | Takalar | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,29 |
| 6 | Gowa | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,12 | 0,11 |
| 7 | Sinjai | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,25 |
| 8 | Maros | 0,34 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,19 |
| 9 | Pangkep | 0,71 | 0,78 | 0,49 | 0,5 | 0,38 |
| 10 | Barru | 0,36 | 0,39 | 0,15 | 0,45 | 0,22 |
| 11 | Bone | 0,36 | 0,42 | 0,26 | 0,26 | 0,19 |
| 12 | Soppeng | 0,16 | 0,28 | 0,21 | 0,4 | 0,15 |
| 13 | Wajo | 0,21 | 0,15 | 0,21 | 0,43 | 0,22 |
| 14 | Sidrap | 0,19 | 0,13 | 0,20 | 0,1 | 0,08 |
| 15 | Pinrang | 0,34 | 0,50 | 0,20 | 0,28 | 0,34 |

| NO | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|----------------|------|------|------|------|------|
| 16 | Enrekang | 0,34 | 0,24 | 0,49 | 0,43 | 0,44 |
| 17 | Luwu | 0,49 | 0,46 | 0,39 | 0,55 | 0,53 |
| 18 | Tana Toraja | 0,74 | 0,36 | 0,22 | 0,4 | 0,25 |
| 19 | Luwu Utara | 0,61 | 0,49 | 0,55 | 0,63 | 0,58 |
| 20 | Luwu Timur | 0,24 | 0,26 | 0,16 | 0,41 | 0,39 |
| 21 | Toraja Utara | 0,37 | 0,39 | 0,36 | 0,7 | 0,24 |
| 22 | Makassar | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,18 |
| 23 | Pare Pare | 0,24 | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,14 |
| 24 | Palopo | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,25 | 0,19 |

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025

Capaian P2 Kabupaten Maros pada tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan (0,34) dan capaian nasional (0,32). Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Maros masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Grafik 2.14
Perbandingan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maros,
ProvinsiSulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025

2.1.4.5 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United nations, 1996).

Kondisi kemiskinan ekstrem Kabupaten Maros menunjukkan penurunan pada Tahun 2024. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Yang diperoleh dari kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang kemudian di padankan dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kabupaten Maros.

Seperti yang telah diketahui, kemiskinan ekstrem pada Tahun 2023 sebesar 1,21 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 4.979 jiwa, kemudian pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Kabupaten Maros maka kemiskinan ekstrem Kabupaten Maros sebesar 1,61 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 549 jiwa. Namun apabila dibandingkan antara penduduk miskin ekstrem dengan total penduduk miskin, maka diperoleh perbandingan sebesar 1,61 persen, dengan jumlah penduduk miskin total sebesar 34.000 orang.

Tabel 2.6
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Terhadap Penduduk Miskin dan Total Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2024

| No | Uraian | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|----|--|------------|------------|------------|
| I | Jumlah Penduduk | | | |
| 1 | Jumlah Penduduk Miskin Esktrek (Desil 1) | 8.173 | 4.979 | 549 |
| 2 | Jumlah Penduduk Miskin | 33.900 | 34.960 | 34.000 |
| 3 | Jumlah Penduduk Maros | 403.774 | 410.699 | 413.590 |
| II | Persentase | | | |
| 1 | % Miskin Ekstrem Terhadap Miskin | 24,11 | 14,24 | 1,61 |
| 2 | % Miskin ekstrem terhadap penduduk | 2,02 | 1,21 | 0,13 |

Sumber : Kemenko PMK, Dinas Sosial Kab. Maros, BPS Kab. Maros (Diolah), 2025

2.1.5 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam 6 (enam) Bidang Urusan, yaitu : Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Urusan Sosial.

2.1.5.1. Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

Realisasi target pencapaian SPM Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Inidkator Pencapaian | Jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan | Jumlah orang yang akan mendapatkan layanan | Capaian (%) |
|-----|---------------------------|---|--|--|-------------|
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | 14.764 | 14.215 | 96,28 |
| 2. | Pendidikan Dasar | Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | 67.465 | 67.465 | 100 |
| 3. | Pendidikan Kesenjangan | Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesenjangan | 273 | 273 | 100 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros, 2024

Terlihat pada table 2.7 bahwa pencapaian SPM bidang urusan pendidikan jenis pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 96,28 persen. Untuk indicator Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesenjangan sebesar 100 persen.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.8

Kendala Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2024

Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|-----|------------------------------|---|--|
| 1. | Pengumpulan Data | <ul style="list-style-type: none"> Masih belum tersedianya data By Name By NIK Belum maksimalnya Sistem Pendataan Anak Tidak Sekolah Adanya perbedaan data dari beberapa Indikator | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pendataan Peserta Didik Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada Organisasi yang terkaitdengan SPM Bidang Pendidikan. Verifikasi data berdasarkan indikator yang ada |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | <ul style="list-style-type: none"> Belum Maksimalnya Sasaran Pengampu SPM. Perhitungan Anak tidak Sekolah yang dilakukan by name by adress. Perhitungan kebutuhan biaya Pendidikan yang harus disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola OPD Perhitungan kebutuhan penanganan sosial bagi anak putus sekolah belum memadai | <ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data sasaran SPM Memaksimalkan Data yang bersumber dari Pendataan Anak Tidak Sekolah “Pasti Beraksi” melalui Aplikasi SIPBM ATS Kemendes. |
| 3. | Perencanaan dan Penganggaran | <ul style="list-style-type: none"> Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan Anak Tidak sekolah | <ul style="list-style-type: none"> Pemetaan Program Kerja prioritas Pengampu SPM |
| 4. | Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wilayah/ lokasi pemenuhan | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros, 2024

2.1.5.2. Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

Hasil Capaian atau Realisasi pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Jenis Pelayanan dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan | Capaian % |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|-----------|
| 1. | Pelayanan Kesehatan ibu hamil | jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar | 5.397 | 5.168 | 95,75 |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes) | 5.397 | 5.158 | 95,75 |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 5.397 | 5.133 | 95,11 |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 28.000 | 27.028 | 96.53 |
| 5. | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah anak usia Kesehatan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar | 57.521 | 56.044 | 97,43 |
| 6. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 179.813 | 166.441 | 92,56 |
| 7. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Kesehatan Pada Usia Lanjut Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 30.254 | 28.359 | 93,74 |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar | 11.065 | 10.938 | 98,85 |
| 9. | Pelayanan Kesehatan | Jumlah orang yang berusia 15 tahun | 2.736 | 2.719 | 99,38 |

| No. | Jenis Pelayanan dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan | Capaian % |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|-----------|
| | Penderita Diabetes Melitus | keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar | | | |
| 10. | Pelayanan Orang dengan Gangguan jiwa berat | Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 903 | 903 | 100 |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar | 3.863 | 3.857 | 99,84 |
| 12. | Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV | Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standa | 6..220 | 6.012 | 96,66 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Maros, 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Maros pada Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.10
Kendala Pencapaian SPM Urusan Capaian SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|-----|------------------|---|--|
| 1. | Pengumpulan Data | Faktor Eksternal : Data Sasaran SPM yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih terdapat perbedaan (selisih) karena tidak semua penduduk yang memiliki KTP, memilih menetap di Kabupaten Maros sehingga mempengaruhi jumlah sasaran mayarakat yang akan dilayani sementara petugas kesehatan hanya akan melayani sesuai dengan data rill yang ditemukan di lapangan. Mobiliasasi penduduk yang sangat cepat, khususnya yang berada diantara perbatasan Maros-Makassar | Faktor Eksternal : Dukungan dan pernanan aktif dari pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam Percepatan Pelayanan SPM Bidang Kesehatan, Khususnya Pengaturan Mobilitias yang memiliki hak dalam pelayanan kesehatan. Faktor Internal : Peningkatan pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan kepada Puskesmas |

| No. | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|-----|------------------------------|---|---|
| | | sehingga berpengaruh pada proses pengumpulan data sasaran SPM. Faktor Internal : Konsisten para petugas kesehatan yang belum sepenuhnya tepat waktu karena dalam pengumpulan data masih seringkali terjadi perubahan data masih seringkali terjadi perubahan data yang berulang-ulang. | |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | Kebutuhan Koordinasi terkait cara perhitungan Kebutuhan dengan Bidang Pengampu SPM dengan Bidang Lintas Program terkait Perhitungan kebutuhan untuk alat kesehatan, bahan habis medis pakai, obat, vaksin dan perlengkapan dalam pelayanan dasar kesehatan untuk SPM yang belum memiliki petunjuk teknis dalam penghitungan kebutuhan sesuai standar. | Peningkatan koordinasi Dinas Kesehatan pada setiap Bidang Pengampu SPM |
| 3. | Perencanaan dan Penganggaran | Kegiatan pelaksanaan pelayanan dasar terkait SPM di Puskesmas belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintahan Daerah yang bersumber DAU sehingga kegiatan berjalan disupporting oleh DAK Fisik dan Non Fisik berdasarkan menu yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI | Dukungan dan peranan aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam percepatan Pelayanan SPM Bidang Kesehatan, Khususnya Penganggaran |
| 4. | Pelaksanaan | Pelayanan kesehatan dasar belum terintegrasi dengan siklus hidup yang berdasarkan dengan indikator mutu SPM karena masih berdasarkan program layanan kesehatan saja. | Daerah Kabupaten Maros dalam percepatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan. |
| 5. | Pelaporan | - | - |
| 6. | Lain-lain | Faktor Eksternal : Dukungan dan peranan lintas sektor yang belum sepenuhnya aktif dalam peningkatan capaian pelayanan SPM. Deteksi dini/pemeriksaan awal yang masih kurang disadari oleh masyarakat akan pentingnya arti kesehatan. Faktor Internal : Maintenance beberapa aplikasi Kementerian Kesehatan yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penginputan pelaporan rutin setiap bulan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas kesehatan yang belum sepenuhnya mendapatkan | Dukungan dan peranan aktif dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros dalam percepatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan. |

| No. | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|-----|---------|--|--------|
| | | <p>perhatian maksimal oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Mobilisasi/perpindahan penduduk, khususnya yang usia kerja/produktif yang bersifat dinamis; aktiviatas/kesibukan penduduk yang bertepatan; Kondisi kehamilan yang mengalami Abortus/keguguran; kerjasama pihak-pihak guru di beberapa sekolah yang masih kurang aktif dalam jadwal pelayanan kesehatan; Belum semuanya masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses lokasi fasilitas kesehatan yang terdekat; Faktor sosial budaya bagi Sasaran/Populasi kunci pada indikator Orang yang terinfeksi HIV yang enggan untuk dilakukan Screening kesehatan karena jika hasil pemeriksaannya Positif maka mereka takut dijauhi masyarakat sehingga mempengaruhi pencapaian pelayanan SPM sesuai target SPM Sebesar 100%.</p> | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Maros, 2024

2.1.5.3. Pencapaian Spm Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Hasil Capaian atau Realisasi pencapaian SPM bidang urusan **Pekerjaan Umum** yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah orang yang akan mendapatkan layanan | Capaian % |
|----|--|--|--|--|-----------|
| 1. | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 627 | 627 | 100 |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik | Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan airlimbah domestik | 814 | 814 | 100 |

Sumber: Dinas PU, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kab.Maros, 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Maros pada Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.12
Kendala Pencapaian SPM Urusan Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|-----|--|--|--|
| 1. | Pengumpulan Data | Adanya perbedaan data pada saat di lapangan | Keakuratan data lapangan |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | Kurangnya dokumen perencanaan pendukung dan tidak semua data dasar tersedia serta data cenderung kurang update | Data dasar tersedia |
| | | Belum adanya data base keberfungsian dari sarana prasarana penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dibangun | Belum adanya data base keberfungsian dari sarana prasarana penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dibangun |
| 3. | Perencanaan Dan Penganggaran | Belum optimalnya system perencanaan penyediaan air minum dan terbatasnya pendanaan untuk penerapan SPM | Perencanaan lebih dioptimalkan ber banding lurus dengan pendanaannya |
| | | Perlunya penganggaran yang cukup besar untuk menuntaskan permasalahan air minum dan sanitasi | Anggaran bidang air minum dan sanitasi di optimalkan |
| 4. | Pelaksanaan | Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah | Pelatihan untuk perangkat daerah |
| | | Sarana prasarana bidang sanitasi belum berfungsi secara optimal | Pelatihan untuk kelompok pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi |
| 5. | Pelaporan | Format laporan yang selalu berubah- ubah | - |
| 6. | Penyiapan Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) | Untuk anggaran yang direncanakan berbeda dengan realisasinya | Dalam penganggaran kegiatan untuk program pendukung SPM lebih diprioritaskan |

Sumber: Dinas PU, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kab.Maros, 2024

2.1.5.4. Pencapaian Spm Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Hasil capaian atau realisasi **pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros Tahun 2024** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang yang Berhak Mendapat kan Layanan | Jumlah Orang yang Akan Mendapat kan Layanan | Capaian % |
|-----|---|--|---|---|-----------|
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 70 | 70 | 100 |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. | 3 | 3 | 100 |

Sumber: Dinas PR, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.Maros , 2024

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Kendala Pencapaian SPM Urusan Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|-----|------------------------|---|---|
| 1. | Pengumpulan Data | 1. Lokasi jauh 2. Sulitnya berkoordinasi dengan aparat desa 3. Pengumpulan data ditingkat desa masih kurang | Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | Data yang Masuk Lebih Banyak dari pada rencana Realisasiny | Perhitungan Kebutuhan Rumah Korban Bencana Harus Disesuaikan berdasarkan tingkat kerusakan Rumah Masyarakat |
| | | Perencanaan Pendataan lebih banyak dari pada usulan kegiatan | Menyesuaikan jumlah kebutuhan pemenuhan rumah korban bencana |

| No. | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|-----|------------------------------|---|--|
| 3. | Perencanaan dan Penganggaran | Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. | Memaksimalkan Program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM. |
| | | Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam Penanganan Korban Bencana | Mengalokasikan dana/ Anggaran |
| 4. | Pelaksanaan | 1. Pendistribusian material yang susah dijangkau kendaraan 4 roda 2. Pengurangan anggaran yang disebabkan ileh beberapa factor sehingga beberapa layanan tidak dapat dipenuhi 3. Minimnya sumber daya yang tersedia | Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan |

Sumber: Dinas PR, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.Maros , 2024

2.1.5.5. Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Hasil capaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Realisasi Capaian SPM Urusan Ketenraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah orang yang berhal mendapatkan layanan | Jumlah orang yang akan mendapatkan layanan | Capaian % |
|-----|--|---|--|--|-----------|
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara | 86 | 86 | 100 |
| 2. | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 246 | 246 | 100 |

Sumber: Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , 2024

Tabel 2.16
Kendala Pencapaian SPM Urusan
Ketenraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Tahapan | Permasalahan | Langkah Penyelesaian |
|-----|------------------------------|--|--|
| 1. | Pengumpulan data | a. Tidak tersedianya data (tidak terdokumentasi secara baik) sejumlah kegiatan dilaksanakan tetapi tidak tercatat; b. Kurangnya SDM yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan mahir; | Memberikan kesempatan kepada perencana dan pelaksana teknis untuk mengikuti pelatihan mengenai Standar Pelayanan Minimal |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | a. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran; b. Banyaknya jumlah tenaga honor satpol PP dan Damkar, sehingga anggaran yang ada di peruntukan untuk memenuhi jasa tenaga honor c. Kondisi sarana prasarana masih perlu di tambah utamanya mobil operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Damkar masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum memiliki Armada dan Penempatan personil Sektor di Kecamatan (Tompobulu, Mallawa, Cenrana, Simbang, Lau, Maros Baru dan Mandai). | A. Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan penambahan beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran; B. Mengajukan untuk melakukan pengangkatan khusus kepada tenaga honor Satpol PP dan Damkar serta melakukan seleksi kembali untuk mengurangi jumlah tenaga honor yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya; C. Penambahan jumlah sarana prasaran berupa armada penganggut petugas |
| 3. | Perencanaan dan penganggaran | a. Kurangnya Anggaran dalam mendukung program dan kegiatan. b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. | Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional; |
| 4. | Pelaksanaan | a. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait; b. Masih banyaknya Aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah 16 tahun 2018 tentang Satpol PP dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah | a. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan trantibumlinmas; b. Mengirim Aparatur untuk mengikuti Diklat pengembangan SDA Aparatur Satpol PP dan Damkar |

| No. | Tahapan | Permasalahan | Langkah Penyelesaian |
|-----|-----------|--|---|
| 5. | Lain-lain | a. Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadamam kebakaran; b. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran; c. Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan sulitnya pengendalian kebakaran di lokasi luar WMK; d. Biaya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran masih terpusat di bagian keuangan daerah sehingga dalam pengurusan perbaikan menjadi terhambat | a. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah pos pemadam kebakaran; b. Perbaikan jalan yang tidak bisa di jangkau oleh mobil pemadam kebakaran; c. Perlu adanya pembuatan sumur penampungan air di beberapa titik yang tersebar di WMK sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran; d. Sebaiknya biaya pemeliharaan peralatan pemadan kebakan di kelola langsung oleh instansi bersangkutan sehingga proses perbaikan menjadi cepat dan dapat di gunakan apabila terjadi kebakaran |

Sumber: Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2024

2.1.5.5. Pencapaian Spm Bidang Urusan Sosial

Hasil capaian atau realisasi pencapaian SPM bidang urusan sosial yangdilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah orang yang berhal mendapatk an layanan | Jumlah orang yang akan mendapatk an layanan | Capaian % |
|-----|--|---|---|---|-----------|
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 103 | 103 | 100 |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti | 53 | 53 | 100 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah orang yang berhal mendapatk an layanan | Jumlah orang yang akan mendapatk an layanan | Capaian % |
|-----|--|---|---|---|-----------|
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial. | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memeperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 21 | 21 | 100 |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti | 68 | 68 | 100 |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota | Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 619 | 619 | 100 |

Sumber: Dinas Sosial Kab.Maros, 2024

Tabel 2.18
Kendala Pencapaian SPM Urusan Sosial
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | Tahapan | Permasalahan | Langkah penyelesaian |
|-----|------------------------------|--|---|
| 1. | Pengumpulan data | a. Kualitas data yang buruk b. Data tidak lengkap dengan item yang dibutuhkan c. Responden tidak koopratif | 1. Mengaktifkan Tugasdan Fungsi Fasilitator pada tiap Desa/ Kelurahan 2. Menambahkan Biara atau Insentif petugas pengumpul data |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | a. Kesalahan estimasi b. Perkiraan kebutuhan yang tidak akurat c. Data tidak lengkap d. Perubahan kebutuhan yang berubah e. Kesalahan inerpretasu salah interopretasi data atau informasi f. Kurangnya komunikasi antar tim | Mengidentifikasi sumber pendanaan yang sah selain dari APBD (CSR dunia usaha, Basnas maupun bantuan dari Provinsi dan Pemerintahan Pusat. |
| 3. | Perencanaan dan penganggaran | a. Tujuan dan sasaran tidak sepesifik b. Keterbeatasan data dan informasi c. Perencanaan yang tidak realistis d. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan e. Perubahan kebutuhan dan prioritas | Menjalin kerjasama dan kordinasi dengan seluruh pihak terkait (Organisasi social, DuniaUsaha maupun OPD lain). |

| No. | Tahapan | Permasalahan | Langkah penyelesaian |
|-----|-------------|--|--|
| | | f. Keterbatasan sumber daya g. Keterbatasan dana h. Pengalokasian dana yang tidak efektif i. Kurangnya pengawasan dan evaluasi | |
| 4. | Pelaksanaan | a. Kurangnya komunikasi antar tim b. Keterbatasan SDM c. Keterbatasan Kemampuan teknis d. Keterbatasan anggaran | 1. Melakukan Pendampingan dalam pemberian Pelayanan 2. Koordinasi dengan Aparat Pemerintah di Desa /Kelurahan |
| 5. | Pelaporan | Sub kegiatan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan tidak terealisasi penyebabnya kegiatan tersebut harus dipihak ketigakan sementara tidakada rekanan yang bersedia disebabkan anggaran sangat minim | Tetap melakukan pelaporan sesuai jadwal meskipun belum ada kegiatan yang di laksanakan. |

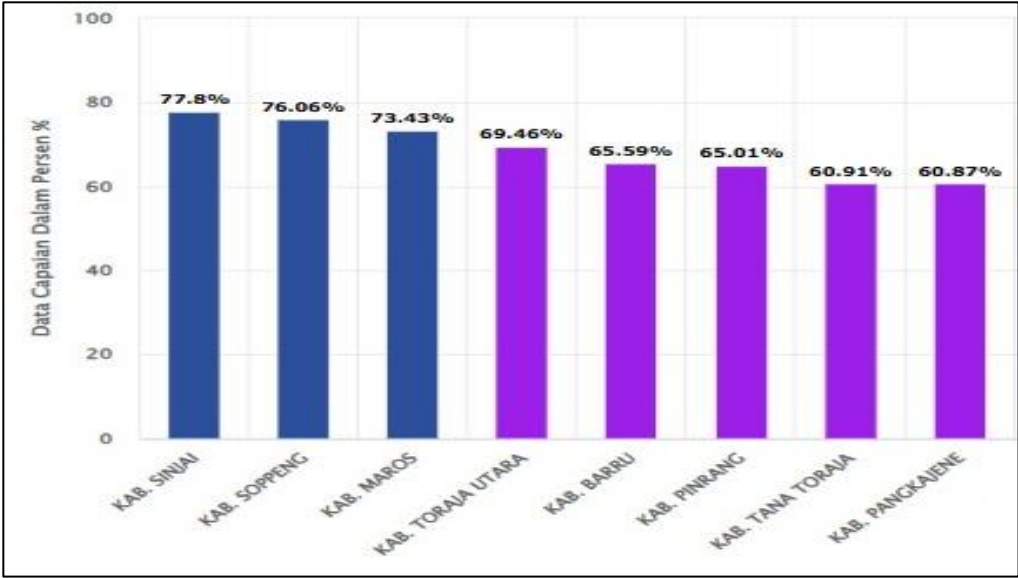
Sumber: Dinas Sosial Kab.Maros, 2024

Seperti yang telah diketahui, kemiskinan ekstrem pada Tahun 2023 sebesar 1,21 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 4.979 jiwa, kemudian pada tahun 2024 apabila dibandingkan.

2.1.5.5. Pencapaian SPM Semester I Tahun 2025

Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Data tahunan terbaru di Maros, yang merujuk pada Kementerian Dalam Negeri melalui portal spm.bangda.kemendagri.go.id. Publikasi ini berisi gambaran umum perkembangan Kabupaten Maros, termasuk data capaian untuk semua bidang hingga bulan Juni 2025.

Grafik 2.15
Capaian SPM Kabupaten Maros dan Kabupaten lainnya
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id.

Pada grafik 2.15 nilai SPM untuk semua bidang di Kabupaten Maros sebesar 7343%. Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros kembali memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan dalam APBD 2025 untuk menjaga stabilitas layanan dasar bagi masyarakat Meskipun terdapat fokus anggaran, implementasi program seperti ILP (Integrasi Layanan Primer) dan Posyandu Era Baru.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI TRIWULAN I

Evaluasi pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui sejauhmana capaian pelaksanaan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program/kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025. Untuk Perubahan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan Edaran Mendagri, maka pelaksanaan evaluasi dilaksanakan pada Triwulan I Tahun berjalan.

2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025

Gambaran terkait program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2025 yang terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2025 yang terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Yang Terakomodir Dalam APBD Tahun Anggaran 2025

| NO | PERENGKAT DAEARAH | RKPD | | | APBD | | |
|----|--|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 11 | 26 | 230 | 11 | 24 | 160 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 5 | 20 | 95 | 5 | 20 | 90 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 16 | 32 | 141 | 16 | 34 | 141 |
| 4 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 2 | 13 | 83 | 2 | 13 | 83 |

| NO | PERENGKAT DAEARAH | RKPD | | | APBD | | |
|----|---|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2 | 12 | 64 | 2 | 12 | 64 |
| 6 | DINAS SOSIAL | 6 | 15 | 54 | 6 | 15 | 52 |
| 7 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | 7 | 20 | 63 | 7 | 20 | 63 |
| 8 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 5 | 14 | 53 | 5 | 14 | 53 |
| 9 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 10 | 31 | 100 | 10 | 31 | 100 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 11 | 17 | 45 | 11 | 17 | 45 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | 16 | 50 | 5 | 16 | 50 |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN | 3 | 15 | 55 | 3 | 15 | 55 |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 5 | 12 | 93 | 5 | 12 | 93 |
| 14 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 | 11 | 85 | 2 | 11 | 85 |
| 15 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 17 | 34 | 162 | 17 | 34 | 162 |
| 16 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6 | 14 | 70 | 6 | 14 | 70 |
| 17 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 6 | 18 | 56 | 6 | 18 | 56 |
| 18 | DINAS PERIKANAN DAERAH | 4 | 16 | 53 | 4 | 16 | 52 |
| 19 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 11 | 31 | 99 | 11 | 31 | 98 |
| 20 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 8 | 22 | 62 | 8 | 22 | 62 |
| 21 | SEKRETARIAT DAERAH | 3 | 17 | 53 | 3 | 17 | 53 |
| 22 | SEKRETARIAT DPRD | 2 | 17 | 77 | 2 | 17 | 77 |
| 23 | INSPEKTORAT KABUPATEN | 3 | 11 | 40 | 3 | 11 | 40 |

| NO | PERENGKAT DAEARAH | RKPD | | | APBD | | |
|----|---|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
| 24 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 13 | 53 | 3 | 13 | 53 |
| 25 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3 | 14 | 128 | 3 | 14 | 128 |
| 26 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3 | 10 | 42 | 3 | 10 | 42 |
| 27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 4 | 19 | 60 | 4 | 19 | 60 |
| 28 | KECAMATAN BANTIMURUNG | 6 | 14 | 43 | 6 | 14 | 36 |
| 29 | KECAMATAN BONTOA | 6 | 14 | 33 | 6 | 14 | 32 |
| 30 | KECAMATAN CAMBA | 6 | 14 | 42 | 6 | 14 | 35 |
| 31 | KECAMATAN CENRANA | 6 | 13 | 33 | 6 | 13 | 33 |
| 32 | KECAMATAN LAU | 6 | 13 | 38 | 6 | 13 | 32 |
| 33 | KECAMATAN MALLAWA | 6 | 15 | 39 | 6 | 15 | 38 |
| 34 | KECAMATAN MANDAI | 6 | 14 | 40 | 6 | 14 | 34 |
| 35 | KECAMATAN MAROS BARU | 6 | 15 | 49 | 6 | 15 | 38 |
| 36 | KECAMATAN MARUSU | 6 | 13 | 32 | 6 | 13 | 32 |
| 37 | KECAMATAN MONCONGLOE | 6 | 14 | 37 | 6 | 14 | 37 |
| 38 | KECAMATAN SIMBANG | 6 | 13 | 32 | 6 | 13 | 32 |
| 39 | KECAMATAN TANRALILI | 6 | 14 | 36 | 6 | 14 | 35 |
| 40 | KECAMATAN TOMPOBULU | 6 | 13 | 32 | 6 | 13 | 32 |
| 41 | KECAMATAN TURIKALE | 6 | 14 | 73 | 5 | 14 | 40 |
| 42 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 12 | 71 | 6 | 12 | 71 |
| | | 253 | 693 | 2791 | 252 | 697 | 2649 |

Sumber : Bapperida Kabupaten Maros, data diolah

Berdasarkan table di atas, bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam RKPD Pokok Tahun 2025, telah termuat pula dalam APBD Pokok Tahun 2025.

2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Terkait informasi realisasi pencapaian pendanaan dan realisasi fisik secara persentase digambarkan seberapa besar anggaran yang telah terserap sampai dengan Triwulan I, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Kabupaten Maros Tahun 2025
Sampai dengan Triwulan I

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI KEUANGAN | PERSENTASE % | | SISA ANGGARAN RP |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------|-------|------------------|
| | | | | KEU | FISIK | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 471.083.200.658 | 92.016.062.915 | 19,53 | 19,53 | 379.067.137.743 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 201.606.873.481 | 25.781.830.416 | 12,79 | 12,79 | 175.825.043.065 |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI | 133.503.677.017 | 10.855.526.639 | 8,13 | 8,13 | 122.648.150.378 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 167.030.089.164 | 3.224.819.287 | 1,93 | 1,93 | 163.805.269.877 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 10.584.161.529 | 2.360.102.227 | 22,30 | 22,30 | 8.224.059.302 |
| 6 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 7.343.150.722 | 1.317.657.017 | 17,94 | 17,94 | 6.025.493.705 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6.466.709.177 | 1.012.909.165 | 15,66 | 15,66 | 5.453.800.012 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 7.004.904.170 | 1.211.223.459 | 17,29 | 17,29 | 5.793.680.711 |
| 9 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | 4.004.118.557 | 310.296.999 | 7,75 | 7,75 | 3.693.821.558 |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 16.679.735.462 | 1.508.899.583 | 9,05 | 9,05 | 15.170.835.879 |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 17.147.012.465 | 2.535.868.698 | 14,79 | 14,79 | 14.611.143.767 |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7.386.175.168 | 1.440.123.005 | 19,50 | 19,50 | 5.946.052.163 |

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI KEUANGAN | PERSENTASE % | | SISA ANGGARAN RP |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------|-------|------------------|
| | | | | KEU | FISIK | |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 8.693.962.865 | 1.469.594.292 | 16,90 | 16,90 | 7.224.368.573 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 16.756.950.850 | 743.735.647 | 4,44 | 4,44 | 16.013.215.203 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 13.298.009.438 | 1.869.612.831 | 14,06 | 14,06 | 11.428.396.607 |
| 16 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10.129.380.100 | 1.526.728.560 | 15,07 | 15,07 | 8.602.651.540 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 7.261.736.757 | 1.386.772.479 | 19,10 | 19,10 | 5.874.964.278 |
| 18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 8.035.674.984 | 1.183.046.572 | 14,72 | 14,72 | 6.852.628.412 |
| 19 | DINAS PERIKANAN DAERAH | 22.120.645.059 | 1.499.300.969 | 6,78 | 6,78 | 20.621.344.090 |
| 20 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 16.328.386.919 | 2.305.884.906 | 14,12 | 14,12 | 14.022.502.013 |
| 21 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 23.617.460.717 | 4.642.414.876 | 19,66 | 19,66 | 18.975.045.841 |
| 22 | SEKRETARIAT DAERAH | 45.591.005.938 | 7.228.200.801 | 15,85 | 15,85 | 38.362.805.137 |
| 23 | SEKRETARIAT DPRD | 44.412.213.187 | 9.430.014.622 | 21,23 | 21,23 | 34.982.198.565 |
| 24 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 8.173.302.940 | 1.199.880.410 | 14,68 | 14,68 | 6.973.422.530 |
| 25 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 252.427.785.821 | 29.532.642.988 | 11,70 | 11,70 | 222.895.142.833 |
| 26 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 16.421.631.051 | 5.677.654.042 | 34,57 | 34,57 | 10.743.977.009 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 8.642.001.718 | 1.488.711.307 | 17,23 | 17,23 | 7.153.290.411 |

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI KEUANGAN | PERSENTASE % | | SISA ANGGARAN RP |
|----|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------|-------------------|
| | | | | KEU | FISIK | |
| | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | |
| 28 | INSPEKTORAT KABUPATEN | 24.338.231.260 | 2.400.357.250 | 9,86 | 9,86 | 21.937.874.010 |
| 29 | KECAMATAN MAROS BARU | 6.734.386.087 | 1.354.752.714 | 20,12 | 20,12 | 5.379.633.373 |
| 30 | KECAMATAN BANTIMURUNG | 5.462.438.758 | 922.567.895 | 16,89 | 16,89 | 4.539.870.863 |
| 31 | KECAMATAN CAMBA | 5.034.979.881 | 945.817.184 | 18,78 | 18,78 | 4.089.162.697 |
| 32 | KECAMATAN MALLAWA | 3.621.212.579 | 701.309.983 | 19,37 | 19,37 | 2.919.902.596 |
| 33 | KECAMATAN TANRALILI | 4.089.363.246 | 937.505.704 | 22,93 | 22,93 | 3.151.857.542 |
| 34 | KECAMATAN BONTOA | 4.010.401.302 | 904.874.298 | 22,56 | 22,56 | 3.105.527.004 |
| 35 | KECAMATAN TURIKALE | 13.259.165.742 | 2.292.089.409 | 17,29 | 17,29 | 10.967.076.333 |
| 36 | KECAMATAN MARUSU | 2.927.140.873 | 716.556.962 | 24,48 | 24,48 | 2.210.583.911 |
| 37 | KECAMATAN LAU | 9.209.993.713 | 1.790.959.089 | 19,45 | 19,45 | 7.419.034.624 |
| 38 | KECAMATAN CENRANA | 2.562.789.632 | 585.488.808 | 22,85 | 22,85 | 1.977.300.824 |
| 39 | KECAMATAN MONCONGLOE | 2.763.566.313 | 305.601.063 | 11,06 | 11,06 | 2.457.965.250 |
| 40 | KECAMATAN TOMPOBULU | 2.955.462.943 | 699.762.926 | 23,68 | 23,68 | 2.255.700.017 |
| 41 | KECAMATAN SIMBANG | 2.824.827.811 | 614.470.334 | 21,75 | 21,75 | 2.210.357.477 |
| 42 | KECAMATAN MANDAI | 7.195.664.059 | 1.542.627.794 | 21,44 | 21,44 | 5.653.036.265 |
| 43 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.381.311.887 | 942.529.578 | 14,77 | 14,77 | 5.438.782.309 |
| | JUMLAH | 1.655.120.892.000 | 232.416.785.703 | 14,04% | 16,61 | 1.422.704.106.297 |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total anggaran dalam APBD untuk tahun pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Maros Tahun 2025 sebesar Rp **1.655.120.892.000,00** dengan total yang telah terealisasi sebesar Rp **232.416.785.703**, serapan capaian anggaran tersebut dilaksanakan oleh 42 perangkat daeah Kabupaten Maros. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebesar 14,04 persen. Realisasi serapan anggaran ini masih sangat rendah, mengingat evaluasi dilaksanakan pada triwulan I dan ditengah semangat efisiensi anggaran.

2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai Triwulan I Tahun 2025

Selain melihat kesesuaian kegiatan dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 dengan APBD Tahun Anggaran 2025, evaluasi juga dilakukan dengan melihat capaian realisasi keuangan dan pencapaian kinerja perangkat daerah yang terangkum dalam tabel Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 berikut:

Tabel 2.9
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Maros

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------|---|-----------------|--|----------------|---|-------|--|--------------------|---|--------|---------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 3.143.327.594.320 | 57 | 58.558.995.334 | 100 | 338.866.399.158 | 14 | 75.480.056.153 | 14,00 | 22,27 | 71,14 | 134.039.051.487,00 | 71,14 | 4,26 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 290.250.000 | 4 | 57.133.065.734 | 21 | 67.200.000 | 1 | 1.600.000 | 4,76 | 2,38 | 5,00 | 57.134.665.734,00 | 9 | 19.685 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 154.250.000 | 0 | 0 | 3 | 7.900.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 38.000.000 | 1 | 0 | 1 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | 20 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|------------|---|----|---|------------|--|-----------|---|------|--|--------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 19.000.000 | 0 | 0 | 1 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.500.000 | 1 | 0 | 1 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 19.750.000 | 0 | 0 | 1 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 20.500.000 | 1 | 0 | 1 | 3.950.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 2,00 | - | 40 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 18.250.000 | 1 | 0 | 12 | 3.950.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | 5 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 1.600.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PerangkatDaerah | Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------|---|-----------------|--|----------------|---|-------|--|--------------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 140 | 3.128.475.780.570 | 7 | 0 | 26 | 337.773.373.858 | | 75.406.771.153 | 0,00 | 22,32 | 7,00 | 75.406.771.153,00 | 5 | 2,4103 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ### ### | 1.564.250.140.285 | ### ## | 57.090.994.834 | 2.600 | 336.997.453.858 | 2600 | 75.232.471.153 | 100,00 | 22,32 | #### ### | 132.323.465.987,00 | 8,4071 | 8,4592 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 1.560.372.040.285 | 3 | 56.968.154.834 | 12 | 765.820.000 | 3 | 174.300.000 | 25,00 | 22,76 | 6,00 | 57.142.454.834,00 | 10 | 3,6621 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 3.829.100.000 | 0 | 122.840.000 | 1 | 5.050.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.840.000,00 | 0 | 3,2081 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 5 | 24.500.000 | 0 | 0 | 12 | 5.050.000 | 3 | 0 | 25,00 | 0,00 | 3,00 | - | 60 | 0 | | |
| | Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 277.500.000 | 0 | 0 | 2 | 56.950.000 | 1 | 6.000.000 | 50,00 | 10,54 | 1,00 | 6.000.000,00 | 20 | 2,1622 | | |
| | Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 5 | 189.500.000 | 0 | 0 | 1 | 36.600.000 | 0 | 6.000.000 | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0 | 3,1662 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------|---|--------------------|--|------------------|---|-------------|--|---------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Rekonsiliasi dan penyuluhan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 88.000.000 | 0 | 0 | 1 | 20.350.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | - | 20 | 0 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 14690 | 199.500.000 | 2.938 | 0 | 2.600 | 33.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.938,00 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 5 | 70.000.000 | 0 | 0 | 1 | 13.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 5 | 129.500.000 | 0 | 0 | 1 | 20.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 8 | 4.210.958.750 | 5 | 0 | 7 | 376.954.300 | 12 | 4.500.000 | 171,43 | 1,19 | 17,00 | 4.500.000,00 | 212,5 | 0,1069 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 55 | 2.904.145.000 | 1 | 4.000.000 | 20 | 16.061.500 | 2 | 0 | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 4.000.000,00 | 5,4545 | 0,1377 | | |
| | penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 70 | 77.776.250 | 1 | 0 | 5 | 15.840.000 | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | 2,00 | - | 2,8571 | 0 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 79.200.000 | 1 | 0 | 5 | 93.620.500 | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | 2,00 | - | 10 | 0 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15 | 435.877.500 | 1 | 0 | 5 | 37.370.300 | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | 2,00 | - | 13,333 | 0 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 267.710.000 | 0 | 0 | 12 | 33.950.000 | 3 | 0 | 25,00 | 0,00 | 3,00 | - | 60 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 50.000.000 | 0 | 0 | 12 | 162.112.000 | 3 | 0 | 25,00 | 0,00 | 3,00 | - | 5 | 0 | | |
| | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 60 | 396.250.000 | 3 | 0 | 1 | 18.000.000 | 1 | 4.500.000 | 100,00 | 25,00 | 4,00 | 4.500.000,00 | 6,6667 | 1,1356 | | |
| | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 60 | 3.709.605.000 | 0 | 4.000.000 | 3 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0 | 0,1078 | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 250 | 3.709.605.000 | 0 | 0 | 5 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 135 | 4.264.000.000 | 27 | 377.294.900 | 3 | 266.300.000 | | 61.185.000 | 0,00 | 22,98 | 27,00 | 438.479.900,00 | 20 | 10,283 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 15 | 2.177.000.000 | 3 | 14.500.000 | 12 | 22.000.000 | 3 | 2.250.000 | 25,00 | 10,23 | 6,00 | 16.750.000,00 | 40 | 0,7694 | | |
| | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 2.014.500.000 | 12 | 7.984.900 | 12 | 8.400.000 | 3 | 1.335.000 | 25,00 | 15,89 | 15,00 | 9.319.900,00 | 25 | 0,4626 | | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 72.500.000 | 12 | 354.810.000 | 12 | 235.900.000 | 3 | 57.600.000 | 25,00 | 24,42 | 15,00 | 412.410.000,00 | 25 | 568,84 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 60 | 1.900.000.000 | 12 | 125.936.900 | 3 | 192.321.000 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 125.936.900,00 | 20 | 6,6283 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|--------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|-----------------|--|---------------|---|------|--|------------------|---|---------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya | Unit | 15 | 1.100.000.000 | 3 | 29.939.400 | 3 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 29.939.400,00 | 20 | 2,7218 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 650.000.000 | 3 | 57.952.500 | 10 | 58.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 57.952.500,00 | 6 | 8,9158 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Unit | 100 | 150.000.000 | 4 | 38.045.000 | 2 | 103.721.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 38.045.000,00 | 4 | 25,363 | | |
| | Pengelolaan Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | Persen | 100 | 685.417.174.600 | #REF! | 0 | 100 | 120.593.274.800 | | 1.690.500.241 | #VALUE! | 1,40 | #### | 1.690.500.241,00 | ### | 0,25 | | |
| | Pengelolaan pendidikan dasar | Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | Orang | 231125 | 297.845.520.800 | ### | 1.425.929.600 | ### | 61.726.606.959 | | 186.000.241 | 0,00 | 0,30 | #### | 1.611.929.841,00 | 20 | 0,5412 | | |
| | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 0 | 0 | 0 | 684.988.800 | 1 | 1.155.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.988.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 50 | 1.235.000.000 | 0 | 0 | 5 | 840.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 20 | 4.132.900.000 | 0 | 0 | 3 | 577.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Rehabilitasi sedang/berta ruang guru/Kepala Sekolah/TU") | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 35 | 7.042.179.000 | 0 | 0 | 4 | 567.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.575.203.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------|---|----------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|---------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengadaan perlengkapan sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 185 | 1.590.000.000 | 1 | 0 | 20 | 2.500.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | 0,5405 | 0 | | |
| | Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Orang | 1000 | 1.865.250.000 | 200 | 0 | 100 | 900.000.000 | 100 | 186.000.000 | 100,00 | 20,67 | 300,00 | 186.000.000,00 | 30 | 9,9719 | | |
| | Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 1750 | 5.002.100.000 | 50 | 0 | 100 | 133.920.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | - | 2,8571 | 0 | | |
| | Pengelolaan dana BOS sekolah dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | 1205 | 1.131.900.000 | 241 | 0 | 241 | 42.015.168.059 | 241 | 0 | 100,00 | 0,00 | 482,00 | - | 40 | 0 | | |
| | Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Orang | 2410 | 205.428.000.000 | 482 | 0 | 482 | 116.030.000 | 482 | 0 | 100,00 | 0,00 | 964,00 | - | 40 | 0 | | |
| | Pembangunan laboratorium sekolah dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | Ruang | 25 | 556.350.000 | 0 | 23.850.000 | 2 | 294.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850.000,00 | 0 | 4,2869 | | |
| | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108.450.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 10 | 84.750.000 | 0 | 0 | 2 | 39.950.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 555.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------|---|----------------|--|------------|---|------|--|----------------|---|---------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 3 | 158.715.000 | 0 | 0 | 3 | 26.550.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | 900 | 50.850.000 | 0 | 0 | 1.000 | 54.720.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan perlengkapan peserta didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 12 | 236.250.000 | 2 | 0 | 8.000 | 2.320.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - | 16,667 | 0 | | |
| | Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 25 | 32.813.980.000 | 0 | 0 | 8 | 105.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan proses belajar mengajar bagi peserta didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | Satuan Pendidikan | 1205 | 284.146.800 | 241 | 0 | 241 | 111.350.000 | 0 | 241 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 241,00 | 20 | 8E-05 | | |
| | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 225 | 357.150.000 | 0 | 24.480.000 | 27 | 4.210.765.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.480.000,00 | 0 | 6,8543 | | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 68 | 35.876.000.000 | 0 | 0 | 5 | 520.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan pendidikan menengah pertama | Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan") | Orang | 110600 | 255.307.717.000 | ### | 68.340.000 | ### | 39.311.558.841 | | 77.700.000 | 0,00 | 0,20 | #### | 146.040.000,00 | 20 | 0,0572 | | |
| | Pembangunan unit sekolah baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun") | Unit | 3 | 140.977.338.000 | ### | 0 | 1 | 1.260.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | #### | - | 2E+12 | 0 | | |
| | Pembangunan laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun") | Ruang | 6 | 838.434.000 | ### | 0 | 2 | 630.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | #### | - | 4E+10 | 0 | | |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.600.403.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|----------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|---------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 75 | 485.700.000 | 1 | 0 | 5 | 2.545.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | 1,3333 | 0 | | |
| | Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama") | Orang | 150 | 896.910.000 | 50 | 0 | 50 | 500.000.000 | 50 | 77.700.000 | 100,00 | 15,54 | 100,00 | 77.700.000,00 | 66,667 | 8,6631 | | |
| | Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi") | Orang | 750 | 1.500.495.000 | 0 | 0 | 100 | 55.120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan") | Satuan Pendidikan | 370 | 817.200.000 | 0 | 0 | 74 | 120.013.000 | 74 | 0 | 100,00 | 0,00 | 74,00 | - | 20 | 0 | | |
| | Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS") | Satuan Pendidikan | 370 | 1.138.700.000 | 74 | 100.000.000 | 74 | 18.808.644.941 | 74 | 0 | 100,00 | 0,00 | 148,00 | 100.000.000,00 | 40 | 8,7819 | | |
| | Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama") | Orang | 444 | 57.117.300.000 | 148 | 0 | 148 | 106.142.000 | 148 | 0 | 100,00 | 0,00 | 296,00 | - | 66,667 | 0 | | |
| | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108.250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 5 | 56.750.000 | 0 | 0 | 1 | 50.250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------------|---|-----------------|---|----|--|----------------|--|---------------|---|-------------|--|------------------|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 3 | 344.385.000 | 0 | 0 | 3 | 185.375.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan proses belajar mengajar bagi peserta didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Peserta Didik | 222 | 117.600.000 | 74 | 0 | ### ## | 97.020.000 | 16000 | 0 | 100,00 | 0,00 | #### ### | - | 7240,5 | 0 | | |
| | Pembangunan ruang kelas baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 33 | 404.970.000 | 0 | 0 | 10 | 6.923.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | | | 0 | 0 | 500 | 110.240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | pengadaan perlengkapan peserta didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 9 | 85.935.000 | 0 | 0 | 10 | 2.305.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 12 | 9.900.000.000 | 0 | 0 | 4 | 735.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 50 | 40.626.000.000 | 0 | 0 | 5 | 171.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah penduduk usia 4-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | Orang | 76960 | 127.546.836.800 | ### ## | 0 | ### ## | 18.088.454.000 | 1.426.800.000 | 0,00 | 7,89 | #### ### | 1.426.800.000,00 | 20 | 1,1186 | | | |
| | Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | Unit | 57 | 62.521.213.800 | 0 | 0 | 11 | 262.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | Unit | | | 0 | 0 | 11 | 1.800.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | 2175 | 454.920.000 | 725 | 0 | 750 | 5.956.400.000 | 750 | 1.426.800.000 | 100,00 | 23,95 | 1.475,00 | 1.426.800.000,00 | 67,816 | 313,64 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|---|----|---|---------------|--|----|---|------|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 750 | 13.849.200.000 | 0 | 0 | 100 | 48.420.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | 1250 | 1.324.725.000 | 0 | 0 | 267 | 19.250.000 | 267 | 0 | 100,00 | 0,00 | 267,00 | - | 21,36 | 0 | | |
| | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Satuan Pendidikan | 1250 | 3.691.950.000 | 250 | 0 | 267 | 5.380.200.000 | 267 | 0 | 100,00 | 0,00 | 517,00 | - | 41,36 | 0 | | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | Orang | 1250 | 25.557.000.000 | 250 | 0 | 241 | 78.470.000 | 241 | 0 | 100,00 | 0,00 | 491,00 | - | 39,28 | 0 | | |
| | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 3 | 138.390.000 | 0 | 0 | 1 | 98.250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 5 | 522.913.000 | 0 | 0 | 1 | 122.085.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi komunitas belajar endidik dan tenaga kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | 42 | 636.000.000 | 0 | 0 | 14 | 134.800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan ruang kelas baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 9 | 634.725.000 | 0 | 0 | 10 | 312.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------|---|----------------------|--|----------|---|-------------|--|----------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 300 | 1.908.000.000 | 0 | 0 | 100 | 47.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Paket | 5 | 1.192.500.000 | 0 | 0 | 25 | 1.779.879.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | Peserta Didik | 75000 | 9.250.000.000 | 0 | 0 | ### ## | 103.400.000 | 13000 | 0 | 100,00 | 0,00 | #### ### | - | 17,333 | 0 | | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 72 | 5.865.300.000 | 0 | 0 | 10 | 945.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan pendidikan non formal /kesetaraan | Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan non formal/kesetaraan | Orang | 1365 | 4.717.100.000 | 0 | 0 | 369 | 1.466.655.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | 6 | 104.850.000 | 0 | 0 | 12 | 30.000.000 | 12 | 0 | 100,00 | 0,00 | 12,00 | - | 200 | 0 | | |
| | Pengelolaan dana BOP sekolah non formal/kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Satuan Pendidikan | 60 | 2.250.000.000 | 0 | 0 | 12 | 545.600.000 | 12 | 0 | 100,00 | 0,00 | 12,00 | - | 20 | 0 | | |
| | Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP sekolah non formal/kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Orang | 150 | 2.283.500.000 | 12 | 0 | 50 | 23.055.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | - | 8 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|-------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 3 | 78.750.000 | 0 | 0 | 1 | 93.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 525.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persen | 100 | 1.475.050.000 | ### | ### | 75 | 186.660.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | #### | - | 1E+08 | 0 | | |
| | Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan | Jumlah satuan pendidikan Dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | Satuan Pendidikan | 2825 | 1.475.050.000 | 565 | 190.080.000 | 725 | 186.660.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 190.080.000,00 | 20 | 12,886 | | |
| | Perhitungan dan pemetaan pendidikan dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dsar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Dokumen | 5 | 950.400.000 | 0 | 0 | 1 | 115.060.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-------------|--|----|---|------|--|----|---|------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non fromal/kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Laporan | 5 | 524.650.000 | 0 | 0 | 1 | 71.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan bahasa dan sastra | Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal | Persen | 100 | 503.000.000 | 0 | 0 | 75 | 160.985.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah Jenis Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra | Jenis | 10 | 503.000.000 | 0 | 0 | 2 | 160.985.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah kabupateb/kota | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | Bahasa | 2 | 503.000.000 | 0 | 0 | 2 | 160.985.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan kebudayaan | Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan | Persen | 100 | 1.400.100.000 | 0 | 0 | 50 | 222.915.000 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,00 | #### | - | ### | 0,00 | | |
| | Pelestarian kesenian tradisional yang maysarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesenian tradisional yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat | Objek | 10 | 753.525.000 | 0 | 0 | 2 | 135.755.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | 10 | 753.525.000 | 0 | 0 | 2 | 135.755.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|---------|---|-----------------|---|----|--|-----------------|--|----|---|------|--|----|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah lembaga adat yang dikelola, dilesatirkan dan dikembangkan oleh masyarakat | Objek | 34 | 646.575.00 0 | 0 | 0 | 3 | 87.160.000 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Perlindungan, pengembangan pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | 20 | 646.575.00 0 | 0 | 0 | 3 | 87.160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan | Persen | 75 | 725.025.00 0 | 0 | 0 | 50 | 224.125.00 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah kesenian tradisional yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat | Objek | 42 | 725.025.00 0 | | 0 | 2 | 224.125.00 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan(Ditingkatka n Kompetensinya) | Orang | 300 | 725.025.00 0 | 0 | 0 | 100 | 174.125.00 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | Persen | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36.800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah penduduk yang mendapatkan pengetahuan dan pembinaan sejarah lokal | Orang | 150 | 0 | 0 | 0 | ### ## | 36.800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------|---|----------------------|--|----------|---|-------------|--|----------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | Persen | 100 | 11.479.815.000 | 0 | 0 | 50 | 918.851.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola, dilesatirkan dan dikembangkan oleh masyarakat | Objek | 375 | 979.815.000 | 0 | 0 | 5 | 106.351.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pendaftaran objek diduga cagar budaya | Jumlah Objek diduga Cagar Budaya yang didaftarkan | Objek | 25 | 907.185.000 | 0 | 0 | 5 | 10.076.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Penetapan cagar budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Objek | 50 | 72.630.000 | 0 | 0 | 5 | 96.275.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola | Objek | | 10.500.000.000 | 0 | 0 | 45 | 812.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DI V/0! | 0 | | |
| | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | Objek | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 272.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengembangan cagar budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Objek | 5 | 10.500.000.000 | 0 | 0 | 5 | 540.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan permuseuman | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | Persen | 75 | 4.450.000.000 | 0 | 0 | 50 | 1.083.190.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan museum kabupaten/kota | Jumlah Museum Kab.kota yang terkelola dengan baik | Unit | 1 | 4.450.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.083.190.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan | Unit | 225 | 900.000.000 | 0 | 0 | 225 | 185.455.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|--------------------------|---|-------------|------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Koleksi Secara Terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Unit | 15 | 1.750.000.000 | 0 | 0 | 1 | 410.390.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | Unit | 10 | 900.000.000 | 0 | 0 | 1 | 18.345.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | Unit | 10 | 900.000.000 | 0 | 0 | 1 | 469.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Persen | 100 | 1.248.104.952.090 | 100 | 23.489.175.061 | 100 | 98.350.816.232 | 0 | 25.713.971.608 | 0 | 26,15 | 100 | 49.203.146.669,00 | 100 | 3,94 | Dinas Kesehatan | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 90 | 342.642.060 | 4 | 298.100 | 18 | 40.161.000 | 2 | 2.400.000 | 11,11 | 5,98 | 6 | 2.698.100,00 | 7 | 1 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 66.749.060 | 2 | 298.100 | 3 | 3.773.000 | 1 | 0 | 33,33 | 0 | 3 | 298.100,00 | 30 | 0,4466 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 24.485.000 | 1 | 0 | 1 | 5.548.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 58.457.500 | 1 | 0 | 1 | 7.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|---------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 58.050.000 | 1 | 0 | 1 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 61.540.500 | 4 | 0 | 1 | 4.500.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 5 | - | 100 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 73.360.000 | 0 | 0 | 4 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 21,05 | 0 | 2.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 135 | 466.808.273.050 | 27 | 91.000.313.471 | 3 | 96.632.946.232 | 0 | 25.663.121.608 | 0 | 26,56 | 27 | 116.663.435.079,00 | 20 | 24,992 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 59.780 | 323.769.581.070 | ### ## | 90.417.482.171 | 991 | 95.820.567.232 | 0 | 25.523.031.608 | 0 | 26,64 | #### ### | 115.940.513.779,00 | 28,806 | 35,81 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 26.320 | 139.975.741.980 | 12 | 560.340.000 | 1 | 802.440.000 | 0 | 140.090.000 | 0 | 17,46 | 12 | 700.430.000,00 | 0,0456 | 0,5004 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|---|-------------|--|----------------------------|---|---------------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 60 | 3.062.950.0 00 | 1 | 22.491.30 0 | 1 | 9.939.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.491.300,0 0 | 1,66 67 | 0,73 43 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 125 | 10.473.124. 850 | 6 | 825.659.5 56 | 7 | 644.259.00 0 | 0 | 35.700.00 0 | 3,57 | 5,54 | 6,25 | 861.359.556, 00 | 5 | 8,22 45 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 7 | 5.599.562.4 25 | 1 | 20.950.00 0 | 1 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.950.000,0 0 | 14,2 86 | 0,37 41 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 107.000.00 0 | 1 | 26.700.50 0 | 1 | 3.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.700.500,0 0 | 20 | 24,9 54 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 213.250.00 0 | 1 | 242.418.5 00 | 1 | 148.500.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242.418.500, 00 | 20 | 113, 68 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 2.093.712.4 25 | 0 | 0 | 1 | 27.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 123.375.00 0 | 12 | 13.925.00 0 | 1 | 16.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.925.000,0 0 | 240 | 11,2 87 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 69.625.000 | 25 | 382.465.5 56 | 1 | 291.749.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 382.465.556, 00 | 41,6 67 | 549, 32 | | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 125 | 2.266.600.0 00 | 1 | 139.200.0 00 | 1 | 142.800.00 0 | 0 | 35.700.00 0 | 0 | 25 | 1 | 174.900.000, 00 | 0,8 | 7,71 64 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 280.800.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|--------------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 116.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 5 | 769.322.512.130 | 2 | 62.476.000 | 2 | 69.250.000 | 0 | 12.750.000 | 0 | 18,41 | 2 | 75.226.000,00 | 40 | 0,0098 | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 769.162.012.130 | 12 | 11.476.000 | 1 | 18.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.476.000,00 | 600 | 0,0015 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 160.500.000 | 25 | 51.000.000 | 1 | 51.000.000 | 0 | 12.750.000 | 0 | 25 | 25 | 63.750.000,00 | 41,667 | 39,72 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berada Dalam Kondisi Baik | Jenis | 60 | 1.158.400.000 | 1 | 50.955.800 | 2 | 683.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.955.800,00 | 1,6667 | 4,3988 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 10 | 704.200.000 | 5 | 50.955.800 | 1 | 166.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.955.800,00 | 50 | 7,236 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 25 | 454.200.000 | 0 | 0 | 1 | 517.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|--|----------|---|----------|--|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 571.161.84 8.155 | 100 | 141.375.5 53.344 | 100 | 88.902.148. 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553. 344,00 | 100 | 24,7 5 | | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia | Unit | 15 | 530.328.95 3.155 | 9 | 99.239.76 3.121 | 8 | 41.462.799. 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.239.763.1 21,00 | 60 | 18,7 13 | | |
| | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Unit | 5 | 228.000.00 0.000 | 1 | 45.118.70 5.600 | 1 | 9.585.500.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.118.705.6 00,00 | 20 | 19,7 89 | | |
| | Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | Unit | 100 | 138.500.00 0.000 | 7 | 27.212.63 3.000 | 6 | 5.857.000.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.212.633.0 00,00 | 7 | 19,6 48 | | |
| | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Unit | 60 | 12.988.200. 000 | 8 | 4.260.848. 069 | 6 | 3.474.500.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.260.848.06 9,00 | 13,3 33 | 32,8 06 | | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.090.000.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan | Unit | 401 | 60.187.474. 125 | 79 | | 14 | 12.500.000. 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | - | 19,7 01 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|----------|---|----------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Kesehatan yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 112 | 89.839.679.030 | 1 | 6.608.300.280 | 1 | 8.877.639.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.608.300.280,00 | 0,8929 | 7,3557 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 7.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | Paket | 5 | 813.600.000 | 1 | 54.260.000 | 1 | 71.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.260.000,00 | 20 | 6,6691 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Junlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 40.832.895.000 | 20 | 41.907.990.223 | 20 | 47.439.349.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41.907.990.23,00 | 100 | 102,63 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 33.000 | 278.500.000 | 5.397 | 185.754.000 | 5.164 | 387.206.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 5.397,00 | #VALUE! | 16,355 | ### | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 33.000 | 590.000.000 | 491 | 52.380.000 | 5.164 | 339.940.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 491 | #VALUE! | 1,4879 | ### | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 29.000 | 360.825.000 | ### | 53.100.000 | ### | 42.560.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | #### | #VALUE! | 96,552 | ### | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--|----|---|---------|--|---------|---|-----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | | | 0 | 0 | 6.000 | 13.260.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | ### | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 500 | 862.000.000 | 6.220 | 171.935.000 | 6.308 | 53.780.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 6.220,00 | #VALUE! | 1244 | ### | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 230.900.000 | 1 | 46.180.000 | 1 | 355.300.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 20 | ### | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 2.594.904.000 | 0 | 0 | 1 | 337.671.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | ### | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dokumen | 5 | 2.866.168.800 | 1 | 450.773.678 | 1 | 158.995.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 20 | ### | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 4.555 | 273.420.000 | 1 | 45.092.000 | ### | 252.810.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 0,022 | ### | | |
| | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Dokumen | 5 | 1.800.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 400.000.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 20 | ### | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 14.148.504.000 | 1 | 2.418.263.999 | 1 | 354.500.000 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 20 | ### | | |
| | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | | | 1 | 24.085.928.300 | 1 | 27.590.646.850 | 0 | - | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #DIV/0! | ### | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---|-------------------|---|-------------------|--|--------------------|--|----|---|-------------|--|---------|---|------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Dokumen | 5 | 1.102.524.0 00 | 1 | 77.675.40 0 | 1 | 55.988.000 | 0 | - | 0 | #VAL UE! | 1 | #VALUE! | 20 | ### ### | | |
| | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dokumen | 5 | 1.649.241.6 00 | 0 | 0 | 1 | 13.376.608. 650 | 0 | - | 0 | #VAL UE! | 0 | #VALUE! | 0 | ### ### | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 3.523.986.0 00 | 1 | 222.000.0 00 | 1 | 380.528.00 0 | 0 | - | 0 | #VAL UE! | 1 | #VALUE! | 20 | ### ### | | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 5 | 1.649.241.6 00 | 1 | 246.367.4 01 | 1 | 796.286.00 0 | 0 | - | 0 | #VAL UE! | 1 | #VALUE! | 20 | ### ### | | |
| | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | Unit | 0 | 0 | | | 1 | 55.700.000 | 0 | - | 0 | #VAL UE! | 0 | #VALUE! | #DI V/0! | ### ### | | |
| | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit | 5 | 6.631.080.0 00 | 1 | 1.084.020. 000 | 1 | 2.329.660.0 00 | 0 | - | 0 | #VAL UE! | 1 | #VALUE! | 20 | ### ### | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 500 | 2.271.600.0 00 | 0 | 0 | 5.0 33 | 100.000.00 0 | 0 | - | 0 | #VAL UE! | 0 | #VALUE! | 0 | ### ### | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.910.000 | 0 | - | 0 | #VAL UE! | 0 | #VALUE! | #DI V/0! | ### ### | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | Persen | 100 | 6.940.380.000 | 100 | 1.208.968.000 | 100 | 920.246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.208.968.000,00 | 100 | 17,419 | | |
| | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pemenuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai untuk Pelayanan UKP dan UKM | Dokumen | 1.500 | 1.159.326.000 | 200 | 291.170.000 | 14 | 11.437.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 291.170.000,00 | 13,333 | 25,115 | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dokumen | 5 | 1.159.326.000 | 1 | 291.170.000 | 1 | 11.437.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291.170.000,00 | 20 | 25,115 | | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Kesehatan yang Memiliki Mutu dan Kompetensi Teknis Sesuai Ketentuan | Orang | 1.500 | 5.781.054.000 | 5 | 917.798.000 | 200 | 908.809.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 917.798.000,00 | 0,3333 | 15,876 | | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Orang | 1.500 | 5.781.054.000 | 200 | 917.798.000 | 200 | 908.809.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 917.798.000,00 | 13,333 | 15,876 | | |
| | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | Persen | 100 | 2.274.786.000 | 100 | 362.226.000 | 100 | 411.457.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 362.226.000,00 | 100 | 15,924 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dokumen | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 83.333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #DI V/0! | | |
| | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang Diterbitkan | Dokumen | 5 | 2.274.786.000 | 1 | 362.226.000 | 70 | 241.129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362.226.000,00 | 20 | 15,924 | | |
| | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh | Dokumen | 5 | 2.274.786.000 | 1 | 379.131.000 | 70 | 241.129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379.131.000,00 | 20 | 16,667 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di Periksa dan Ditindaklanjuti | Dokumen | | 0 | 0 | 0 | 50 | 86.995.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 86.995.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 362.400.000 | 95 | 238.230.000 | 100 | 229.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 238.230.000,00 | 95 | 65,737 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 362.400.000 | 400 | 238.230.000 | 1 | 229.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000,00 | 20 | 65,737 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---------------------------------------|------------------------|---|----------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-------------|--|--------------------------|---|---------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 362.400.000 | 1 | 120.600.000 | 1 | 229.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.600.000,00 | 20 | 33,278 | | |
| | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI | | | | | | | | 111.698.168.266 | | 10.855.526.639 | #DIV/0! | 9,72 | 0 | 10.855.526.639,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 145.449.325.585 | | | 100 | 80.294.093.266 | 0 | 10.757.974.639 | 0 | 13,4 | 0 | 10.757.974.639,00 | 0 | 7,3964 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 5.473.583.605 | 1 | 64.845.046.712 | 1 | 55.000.000.000 | 0 | 10.757.974.639 | 0 | 19,56 | 1 | 75.603.021.351,00 | 10 | 1381,2 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 5.473.583.605 | 1 | 64.845.046.712 | 1 | 55.000.000.000 | 0 | 10.757.974.639 | 0 | 19,56 | 1 | 75.603.021.351,00 | 20 | 1381,2 | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 135 | 139.975.741.980 | 27 | 91.000.313.471 | 1 | 1.929.093.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 91.000.313.471,00 | 20 | 65,011 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 26.320 | 139.975.741.980 | ### ## | 90.417.482.171 | 423 | 1.929.093.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### ### | 90.417.482.171,00 | 65,426 | 64,595 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 0 | 0 | 6 | 825.659.556 | 1 | 22.700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 825.659.556,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|--------|---------------------------------------|-----------------|---|-----------------|---|----------------|--|-------------|---|-------|--|--------------------|---|---------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berada Dalam Kondisi Baik | Jenis | 0 | 0 | 1 | 50.955.800 | 1 | 665.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.955.800,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 665.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 294.129.126.525 | 100 | 141.375.553.344 | 100 | 31.404.075.000 | 0 | 97.552.000 | 0 | 0,31 | 100 | 141.473.105.344,00 | 100 | 48,099 | | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia | Unit | 15 | 294.129.126.525 | 9 | 99.239.763.121 | 8 | 31.404.075.000 | 0 | 97.552.000 | 0 | 0,31 | 9 | 99.337.315.121,00 | 60 | 33,773 | | |
| | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Unit | 5 | 228.000.000.000 | 1 | 45.118.705.600 | 1 | 16.975.000.000 | 0 | 97.552.000 | 0 | 0,57 | 1 | 45.216.257.600,00 | 20 | 19,832 | | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 237 | 66.129.126.525 | 0 | 1.971.500.000 | 1 | 14.429.075.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971.500.000,00 | 0 | 2,9813 | | |
| | Puskesmas LAU | | | | | | | | 3.269.174.350 | | 468.361.815 | #DIV/0! | 14,33 | 0 | 468.361.815,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 383.669.056.065 | | | 100 | 2.429.248.000 | 0 | 468.361.815 | 0 | 19,28 | 0 | 468.361.815,00 | 0 | 0,1221 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|------------|---|---------------------|---|---------------------|--|-------------------|--|-----------------|---|-------|--|------------------------|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 383.669.05 6.065 | 15 | 89.549.43 1.673 | 1 | 2.429.248.0 00 | 0 | 468.361.8 15 | 0 | 19,28 | 15 | 90.017.793.4 88,00 | 150 | 23,4 62 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 75 | 383.669.05 6.065 | 1 | 2.241.013. 548 | 1 | 2.429.248.0 00 | 0 | 468.361.8 15 | 0 | 19,28 | 1 | 2.709.375.36 3,00 | 1,33 33 | 0,70 62 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 4.420.350.0 00 | 100 | 141.375.5 53.344 | 100 | 827.071.35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553. 344,00 | 100 | 319 8,3 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 4.420.350.0 00 | 6 | 5.697.754. 900 | 20 | 827.071.35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.90 0,00 | 30 | 128, 9 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 2.16 0 | 87.600.000 | 491 | 52.380.00 0,00 | 255 | 75.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 52.380.000,0 0 | 22,7 31 | 59,7 95 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 23.9 15 | 198.450.00 0 | 6.1 12 | 48.370.00 0,00 | 5.6 28 | 50.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.112 ,00 | 48.370.000,0 0 | 25,5 57 | 24,3 74 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 18.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 2.92 0 | 85.400.000 | 171 | 11.900.00 0,00 | 545 | 14.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 11.900.000,0 0 | 5,85 62 | 13,9 34 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.435.900.0 00 | 1 | 173.536.0 00,00 | 1 | 226.100.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173.536.000, 00 | 20 | 12,0 86 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|----------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 178.920.000 | 1 | 25.340.000,00 | 1 | 14.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.340.000,00 | 20 | 14,163 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 124.500.000 | 1 | 28.170.000,00 | 1 | 25.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.170.000,00 | 20 | 22,627 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 610.680.000 | 1 | 133.290.000,00 | 1 | 106.211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.290.000,00 | 20 | 21,826 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.698.900.000 | 1 | 153.338.613,00 | 1 | 218.097.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153.338.613,00 | 20 | 9,0258 | | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.742.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------------|---|----------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---|--------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | | | 0 | 2.800.000, 00 | 1 | 23.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 414.270.00 0 | 95 | 238.230.0 00 | 100 | 12.855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 238.230.000, 00 | 95 | 57,5 06 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.00 0 | 414.270.00 0 | 0 | 0 | 1 | 12.855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 414.270.00 0 | 1 | 120.600.0 00 | 1 | 12.855.000 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.600.000, 00 | 20 | 29,1 11 | | |
| | Puskesmas MAROS BARU | | | | | | | | 2.787.060.3 50 | | 542.147.0 96 | #DIV/ 0! | 19,45 | 0 | 542.147.096, 00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 10 | 12.901.064. 350 | | | 100 | 1.951.035.0 00 | 0 | 542.147.0 96 | 0 | 27,79 | 0 | 542.147.096, 00 | 0 | 4,20 23 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 12.901.064. 350 | 15 | 89.549.43 1.673 | 1 | 1.951.035.0 00 | 0 | 542.147.0 96 | 0 | 27,79 | 15 | 90.091.578.7 69,00 | 150 | 698, 33 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 12.901.064. 350 | 1 | 1.739.318. 573 | 1 | 1.951.035.0 00 | 0 | 542.147.0 96 | 0 | 27,79 | 1 | 2.281.465.66 9,00 | 20 | 17,6 84 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---|---------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|--|----------|---|----------|--|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 4.477.400.0 00 | 100 | 141.375.5 53.344 | 100 | 823.335.35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553. 344,00 | 100 | 315 7,5 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia | Unit | 6 | 4.477.400.0 00 | 6 | 5.697.754. 900 | 8 | 823.335.35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.90 0,00 | 100 | 127, 26 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 3.22 5 | 142.800.00 0 | 434 | 76.160.00 0,00 | 490 | 75.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 76.160.000,0 0 | 13,4 57 | 53,3 33 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 3.22 5 | 142.800.00 0 | 4.0 93 | 39.690.00 0,00 | 3.7 82 | 43.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093 ,00 | 39.690.000,0 0 | 126, 91 | 27,7 94 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 25.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 1.86 5 | 48.300.000 | 264 | 17.080.00 0,00 | 270 | 16.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 17.080.000,0 0 | 14,1 55 | 35,3 62 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.288.100.0 00 | 1 | 251.089.0 00,00 | 1 | 231.822.80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251.089.000, 00 | 20 | 19,4 93 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|----------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|---------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 155.400.000 | 1 | 29.260.000,00 | 1 | 13.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.260.000,00 | 20 | 18,829 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 320.040.000 | 1 | 20.750.000,00 | 1 | 27.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.750.000,00 | 20 | 6,4836 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 681.060.000 | 1 | 113.610.000,00 | 1 | 119.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113.610.000,00 | 20 | 16,681 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.698.900.000 | 0 | 0 | 1 | 228.432.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 408.840.000 | 95 | 238.230.000 | 100 | 12.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 238.230.000,00 | 95 | 58,27 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 408.840.000 | 400 | 238.230.000 | 1 | 12.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000,00 | 20 | 58,27 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---|----------------------|---|------------------------|--|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|---------------------------|---|---------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 408.840.000 | 1 | 120.600.000 | 1 | 12.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.600.000,00 | 20 | 29,498 | | |
| | Puskesmas BANTIMURUNG | | | | | | | | 4.239.123.700 | | 625.051.867 | #DIV/0! | 14,74 | 0 | 625.051.867,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 7.780.000.000 | | | 100 | 3.403.097.000 | 0 | 625.051.867 | 0 | 18,37 | 0 | 625.051.867,00 | 0 | 8,0341 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 7.780.000.000 | 15 | 89.549.431.673 | 1 | 3.403.097.000 | 0 | 625.051.867 | 0 | 18,37 | 15 | 90.174.483.540,00 | 150 | 1159,1 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 7.780.000.000 | 1 | 3.265.388.911 | 1 | 3.403.097.000 | 0 | 625.051.867 | 0 | 18,37 | 1 | 3.890.440.778,00 | 20 | 50,006 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 4.585.670.000 | 100 | 141.375.553.344 | 100 | 818.346.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553.344,00 | 100 | 3083 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Junlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 4.585.670.000 | 9 | 99.239.763.121 | 20 | 818.346.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.239.763.121,00 | 45 | 2164,1 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 2.600 | 175.200.000 | 433 | 129.680.000,00 | 539 | 51.653.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 129.680.000,00 | 16,654 | 74,018 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---|---------------|---|----------------|--|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 29.705 | 305.600.000 | 5.241 | 50.400.000,00 | 4.434 | 53.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.241,00 | 50.400.000,00 | 17,643 | 16,492 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 39.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 3.445 | 108.500.000 | 437 | 9.660.000,00 | 540 | 17.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 9.660.000,00 | 12,685 | 8,9032 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.211.350.000 | 1 | 165.200.000,00 | 1 | 228.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165.200.000,00 | 20 | 13,638 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 163.380.000 | 1 | 45.580.000,00 | 1 | 15.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.580.000,00 | 20 | 27,898 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 267.000.000 | 0 | 0 | 1 | 21.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | | | 0 | 0 | 122 | 11.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 656.040.000 | 0 | 0 | 1 | 93.221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.698.600.000 | 0 | 0 | 1 | 215.232.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | | | 1 | 980.000,00 | 1 | 37.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 980.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 431.610.000 | | | 100 | 17.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 431.610.000 | | | 1 | 17.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 10 | 431.610.000 | | | 1 | 17.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Puskesmas SIMBANG | | | | | | | | 2.257.638.250 | | 258.984.156 | #DIV/0! | 11,47 | 0 | 258.984.156,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|---|--------------|--|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 14.510.311. 605 | | | 100 | 1.421.613.0 00 | 0 | 258.984.1 56 | 0 | 18,22 | 0 | 258.984.156, 00 | 0 | 1,78 48 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 14.510.311. 605 | 15 | 89.549.43 1.673 | 1 | 1.421.613.0 00 | 0 | 258.984.1 56 | 0 | 18,22 | 15 | 89.808.415.8 29,00 | 150 | 618, 93 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 14.510.311. 605 | 1 | 1.206.721. 679 | 1 | 1.421.613.0 00 | 0 | 258.984.1 56 | 0 | 18,22 | 1 | 1.465.705.83 5,00 | 20 | 10,1 01 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 5.294.612.0 00 | 100 | 141.375.5 53.344 | 100 | 823.635.25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553. 344,00 | 100 | 267 0,2 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 5.294.612.0 00 | 6 | 5.697.754. 900 | 20 | 823.635.25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.90 0,00 | 30 | 107, 61 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 3.43 5 | 78.300.000 | 460 | 122.410.0 00,00 | 458 | 77.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 122.410.000, 00 | 13,3 92 | 156, 33 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 3.8 24 | 61.040.00 0,00 | 1.8 29 | 48.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.824 ,00 | 61.040.000,0 0 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 31.5 20 | 204.400.00 0 | 3.8 24 | 61.040.00 0,00 | 4.0 16 | 41.812.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.824 ,00 | 61.040.000,0 0 | 12,1 32 | 29,8 63 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan | Orang | 0 | 0 | 221 | 21.700.00 0,00 | 2.5 02 | 10.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 21.700.000,0 0 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|----------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 1 | 235.758.000,00 | 66 | 5.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235.758.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 1.425 | 554.400.000 | 221 | 21.700.000,00 | 238 | 23.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 21.700.000,00 | 15,509 | 3,9141 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 3.855 | 58.450.000 | 1 | 5.880.000,00 | 502 | 2.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.880.000,00 | 0,0259 | 10,06 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 35.700.000 | 0 | 0 | 1 | 206.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 1.314.072.000 | 0 | 0 | 1 | 13.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 118.440.000 | 0 | 0 | 1 | 9.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | 9.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 295.560.000 | 0 | 0 | 1 | 123.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 813.960.000 | 0 | 0 | 1 | 228.432.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5 | 1.821.330.000 | 1 | 5.040.000,00 | 1 | 2.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.040.000,00 | 20 | 0,2767 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 402.330.000 | 95 | 238.230.000 | 100 | 12.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 238.230.000,00 | 95 | 59,213 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 402.330.000 | 400 | 238.230.000 | 1 | 12.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000,00 | 20 | 59,213 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 402.330.000 | 1 | 120.600.000 | 1 | 12.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.600.000,00 | 20 | 29,975 | | |
| | Puskesmas MANDAI | | | | | | | | 3.279.930.350 | | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---|---------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------|--|----------|---|----------|--|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 6.404.256.3 05 | | | 100 | 2.438.951.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 6.404.256.3 05 | 15 | 89.549.43 1.673 | 1 | 2.438.951.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 89.549.431.6 73,00 | 150 | 139 8,3 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 6.404.256.3 05 | 1 | 2.393.033. 062 | 1 | 2.438.951.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.393.033.06 2,00 | 20 | 37,3 66 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 4.079.516.0 00 | 100 | 141.375.5 53.344 | 100 | 829.429.35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553. 344,00 | 100 | 346 5,5 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 4.079.516.0 00 | 6 | 5.697.754. 900 | 20 | 829.429.35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.90 0,00 | 30 | 139, 67 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 5.01 0 | 43.800.000 | 800 | 34.520.00 0,00 | 421 | 62.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 34.520.000,0 0 | 15,9 68 | 78,8 13 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 4.70 5 | 554.400.00 0 | 8.3 51 | 88.620.00 0,00 | 6.5 19 | 62.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.351 ,00 | 88.620.000,0 0 | 177, 49 | 15,9 85 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 21.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---|-------------------|---|--------------------|--|-----------------|--|----|---|----|--|--------------------|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 4.41 0 | 59.450.000 | 567 | 11.690.00 0,00 | 794 | 19.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 11.690.000,0 0 | 12,8 57 | 19,6 64 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.095.060.0 00 | 1 | 189.957.0 00,00 | 1 | 227.360.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189.957.000, 00 | 20 | 17,3 47 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 118.440.00 0 | 1 | 39.280.00 0,00 | 1 | 13.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.280.000,0 0 | 20 | 33,1 64 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 295.560.00 0 | 0 | 0 | 1 | 23.355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 5 | 10.080.000 | 0 | 0 | 78 | 7.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 81.396.000 | 0 | 0 | 1 | 97.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.821.330.0 00 | 0 | 0 | 1 | 217.302.55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 246.367.4 01 | 1 | 4.954.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246.367.401, 00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.802.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|-----------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 700.000,00 | 1 | 30.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 398.970.000 | | | 100 | 11.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 398.970.000 | 400 | 238.230.000 | 1 | 11.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000,00 | 20 | 59,711 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 10 | 398.970.000 | 0 | 0 | 1 | 11.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Puskesmas MALLAWA | | | | | | | | 1.836.842.350 | | 185.920.478 | #DIV/0! | 10,12 | 0 | 185.920.478,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 11.752.090.135 | | | 100 | 1.000.817.000 | 0 | 185.920.478 | 0 | 18,58 | 0 | 185.920.478,00 | 0 | 1,582 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 11.752.090.135 | 15 | 89.549.431.673 | 1 | 1.000.817.000 | 0 | 185.920.478 | 0 | 18,58 | 15 | 89.735.352.151,00 | 150 | 763,57 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---|---------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|---|----------|--|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 11.752.090. 135 | 1 | 936.997.3 36 | 1 | 1.000.817.0 00 | 0 | 185.920.4 78 | 0 | 18,58 | 1 | 1.122.917.81 4,00 | 20 | 9,55 5 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 4.817.780.0 00 | 100 | 141.375.5 53.344 | 100 | 821.995.15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553. 344,00 | 100 | 293 4,5 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Junlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 4.817.780.0 00 | 6 | 5.697.754. 900 | 20 | 821.995.15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.90 0,00 | 30 | 118, 27 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 885 | 115.500.00 0 | 460 | 76.280.00 0,00 | 100 | 68.102.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 76.280.000,0 0 | 51,9 77 | 66,0 43 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 9.19 0 | 239.000.00 0 | 1.6 50 | 47.600.00 0,00 | 1.5 95 | 47.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 ,00 | 47.600.000,0 0 | 17,9 54 | 19,9 16 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 490 | 69.000.000 | 52 | 12.800.00 0,00 | 65 | 13.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12.800.000,0 0 | 10,6 12 | 18,5 51 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.594.500.0 00 | 1 | 228.087.0 00,00 | 1 | 221.540.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228.087.000, 00 | 20 | 14,3 05 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|----|---|----|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 155.400.000 | 1 | 45.760.000,00 | 1 | 18.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.760.000,00 | 20 | 29,447 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 220.800.000 | 0 | 0 | 1 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 725.100.000 | 0 | 0 | 1 | 83.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.698.480.000 | 0 | 0 | 1 | 216.602.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 24.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---|---------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|---|--------------|--|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 394.470.00 0 | | | 100 | 14.030.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.00 0 | 394.470.00 0 | 400 | 238.230.0 00 | 1 | 14.030.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000, 00 | 20 | 60,3 92 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 394.470.00 0 | 0 | 0 | 1 | 14.030.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Puskesmas TANRALILI | | | | | | | | 3.225.560.2 50 | | 410.693.2 21 | #DIV/ 0! | 12,73 | 0 | 410.693.221, 00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 5.638.883.6 05 | | | 100 | 2.389.535.0 00 | 0 | 410.693.2 21 | 0 | 17,19 | 0 | 410.693.221, 00 | 0 | 7,28 32 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 5.638.883.6 05 | | | 1 | 2.389.535.0 00 | 0 | 410.693.2 21 | 0 | 17,19 | 0 | 410.693.221, 00 | 0 | 7,28 32 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 5.638.883.6 05 | 1 | 2.112.542. 283 | 1 | 2.389.535.0 00 | 0 | 410.693.2 21 | 0 | 17,19 | 1 | 2.523.235.50 4,00 | 20 | 44,7 47 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 4.931.580.0 00 | 100 | 141.375.5 53.344 | 100 | 819.415.05 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553. 344,00 | 100 | 286 6,7 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 4.931.580.000 | 6 | 5.697.754.900 | 20 | 819.415.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.900,00 | 30 | 115,54 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 3.555 | 318.400.000 | 460 | 76.280.000,00 | 427 | 99.942.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 76.280.000,00 | 12,94 | 23,957 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 24.175 | 324.100.000 | 4.435 | 59.360.000,00 | 4.928 | 38.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435,00 | 59.360.000,00 | 18,345 | 18,315 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 2.080 | 81.900.000 | 281 | 16.380.000,00 | 448 | 16.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 16.380.000,00 | 13,51 | 20 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.492.300.000 | 1 | 228.087.000,00 | 1 | 217.770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228.087.000,00 | 20 | 15,284 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 66.360.000 | 1 | 16.295.000,00 | 1 | 13.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.295.000,00 | 20 | 24,555 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 170.940.000 | 0 | 0 | 1 | 13.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------------|---|-------------------------|---|-----------------|--|-------------------|--|----------|---|----------|--|--------------------|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 778.680.00 0 | 0 | 0 | 1 | 100.130.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.698.900.0 00 | 0 | 0 | 1 | 212.522.35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 2.100.000,00 | 1 | 40.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.100.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 401.490.00 0 | | | 100 | 16.610.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.00 0 | 401.490.00 0 | 400 | 238.230.0 00 | 1 | 16.610.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000, 00 | 20 | 59,3 36 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---|-----------------------|---|------------------------|--|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|---------------------------|---|---------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 401.490.000 | 0 | 0 | 1 | 16.610.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Puskesmas MARUSU | | | | | | | | 2.532.490.350 | | 345.899.561 | #DIV/0! | 13,66 | 0 | 345.899.561,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 11.250.950.000 | | | 100 | 1.692.065.000 | 0 | 345.899.561 | 0 | 20,44 | 0 | 345.899.561,00 | 0 | 3,0744 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 11.250.950.000 | 15 | 89.549.431.673 | 1 | 1.692.065.000 | 0 | 345.899.561 | 0 | 20,44 | 15 | 89.895.331.234,00 | 150 | 799 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 11.250.950.000 | 1 | 1.526.927.791 | 1 | 1.692.065.000 | 0 | 345.899.561 | 0 | 20,44 | 1 | 1.872.827.352,00 | 20 | 16,646 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 4.561.727.000 | 100 | 141.375.553.344 | 100 | 827.040.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553.344,00 | 100 | 309,2 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Junlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 4.561.727.000 | 6 | 5.697.754.900 | 20 | 827.040.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.900,00 | 30 | 124,9 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 3.130 | 102.200.000 | 582 | 86.240.000,00 | 597 | 66.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 86.240.000,00 | 18,594 | 84,384 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|----------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 25.045 | 401.800.000 | 4.069 | 76.440.000,00 | 4.080 | 49.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069,00 | 76.440.000,00 | 16,247 | 19,024 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 3.015 | 119.700.000 | 463 | 23.940.000,00 | 351 | 18.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 23.940.000,00 | 15,357 | 20 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.219.325.000 | 1 | 225.390.000,00 | 1 | 237.362.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225.390.000,00 | 20 | 18,485 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 18.102.000 | 1 | 23.540.000,00 | 1 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.540.000,00 | 20 | 130,04 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 170.400.000 | 0 | 0 | 1 | 22.995.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 696.360.000 | 0 | 0 | 1 | 102.795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.833.840.000 | 0 | 0 | 1 | 218.967.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 980.000,00 | 1 | 26.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 980.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 394.380.000 | | | 100 | 13.385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 394.380.000 | | | 1 | 13.385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 394.380.000 | 0 | 0 | 1 | 13.385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------------|---|-------------------|---|---------------------|--|-------------------|--|-----------------|---|-------|--|------------------------|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Puskesmas MONCONGLOE | | | | | | | | 2.139.510.3 50 | | 225.280.0 08 | #DIV/ 0! | 10,53 | 0 | 225.280.008, 00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 8.480.149.2 50 | | | 100 | 1.303.485.0 00 | 0 | 225.280.0 08 | 0 | 17,28 | 0 | 225.280.008, 00 | 0 | 2,65 66 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 8.480.149.2 50 | 15 | 89.549.43 1.673 | 1 | 1.303.485.0 00 | 0 | 225.280.0 08 | 0 | 17,28 | 15 | 89.774.711.6 81,00 | 150 | 105 8,6 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 8.480.149.2 50 | 1 | 1.074.582. 386 | 1 | 1.303.485.0 00 | 0 | 225.280.0 08 | 0 | 17,28 | 1 | 1.299.862.39 4,00 | 20 | 15,3 28 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 2.944.900.0 00 | 100 | 141.375.5 53.344 | 100 | 819.965.15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553. 344,00 | 100 | 480 0,7 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Junlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 2.944.900.0 00 | 6 | 5.697.754. 900 | 20 | 819.965.15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.90 0,00 | 30 | 193, 48 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 1.55 5 | 85.000.000 | 266 | 74.900.00 0,00 | 275 | 27.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 74.900.000,0 0 | 17,1 06 | 88,1 18 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 16.6 60 | 356.000.00 0 | 2.8 98 | 71.200.00 0,00 | 2.9 39 | 57.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 ,00 | 71.200.000,0 0 | 17,3 95 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|----------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 1.555 | 106.500.000 | 175 | 21.300.000,00 | 205 | 15.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 21.300.000,00 | 11,254 | 20 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.366.000.000 | 1 | 200.340.000,00 | 1 | 246.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.340.000,00 | 20 | 14,666 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 76.800.000 | 1 | 22.800.000,00 | 1 | 20.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.800.000,00 | 20 | 29,688 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 136.800.000 | 0 | 0 | 1 | 19.652.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 817.800.000 | 0 | 0 | 1 | 101.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216.422.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---|----------------------|---|----------------|--|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|---------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1.000.000,00 | 1 | 29.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 402.300.000 | | | 100 | 16.060.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 402.300.000 | 400 | 238.230.000 | 1 | 16.060.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000,00 | 20 | 59,217 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 402.300.000 | 0 | 0 | 1 | 16.060.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Puskesmas TOMPOBULU | | | | | | | | 2.315.685.250 | | 351.120.260 | #DIV/0! | 15,16 | 0 | 351.120.260,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 5.714.883.605 | | | 100 | 1.479.660.000 | 0 | 351.120.260 | 0 | 23,73 | 0 | 351.120.260,00 | 0 | 6,144 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 5.714.883.605 | 15 | 89.549.431.673 | 1 | 1.479.660.000 | 0 | 351.120.260 | 0 | 23,73 | 15 | 89.900.551.933,00 | 150 | 1573,1 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|---|--------------------|--|-------------|---|----------|--|---------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 5.714.883.605 | 1 | 1.416.436.354 | 1 | 1.479.660.000 | 0 | 351.120.260 | 0 | 23,73 | 1 | 1.767.556.614,00 | 20 | 30,929 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 4.661.560.000 | 100 | 141.375.53.344 | 100 | 815.675.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553.344,00 | 100 | 3032,8 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Junlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 4.661.560.000 | 6 | 5.697.754.900 | 20 | 815.675.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.900,00 | 30 | 122,23 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 1.600 | 65.700.000 | 246 | 77.600.000,00 | 160 | 83.302.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 77.600.000,00 | 15,375 | 118,11 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 16.275 | 548.300.000 | 2.693 | 61.700.000,00 | 2.858 | 45.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.693,00 | 61.700.000,00 | 16,547 | 11,253 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 1.085 | 44.100.000 | 146 | 35.800.000,00 | 130 | 23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 35.800.000,00 | 13,456 | 81,179 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan | Orang | 0 | 0 | 1 | 287.400.000,00 | 275 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|----------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Pelayanan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.217.600.000 | 1 | 287.400.000,00 | 1 | 238.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287.400.000,00 | 20 | 23,604 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 142.800.000 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.000.000,00 | 20 | 17,507 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 217.920.000 | 0 | 0 | 1 | 17.808.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 726.240.000 | 0 | 0 | 1 | 96.541.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.698.900.000 | 0 | 0 | 1 | 210.882.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 0 | 0 | | | 1 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1.000.000,00 | 1 | 25.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 423.300.000 | | | 100 | 20.350.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 423.300.000 | 400 | 238.230.000 | 1 | 20.350.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000,00 | 20 | 56,279 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 423.300.000 | 0 | 0 | 1 | 20.350.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Puskesmas BONTUA | | | | | | | | 2.981.352.500 | | 332.722.256 | #DIV/0! | 11,16 | 0 | 332.722.256,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 13.660.383.605 | | | 100 | 2.145.326.000 | 0 | 332.722.256 | 0 | 15,51 | 0 | 332.722.256,00 | 0 | 2,4357 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---|---------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|---|----------|--|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 13.660.383. 605 | 15 | 89.549.43 1.673 | 1 | 2.145.326.0 00 | 0 | 332.722.2 56 | 0 | 15,51 | 15 | 89.882.153.9 29,00 | 150 | 657, 98 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 13.660.383. 605 | 1 | 1.955.089. 078 | 1 | 2.145.326.0 00 | 0 | 332.722.2 56 | 0 | 15,51 | 1 | 2.287.811.33 4,00 | 20 | 16,7 48 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 4.661.560.0 00 | 100 | 141.375.5 53.344 | 100 | 821.061.50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553. 344,00 | 100 | 303 2,8 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Junlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 4.661.560.0 00 | 6 | 5.697.754. 900 | 20 | 821.061.50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.90 0,00 | 30 | 122, 23 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 3.28 5 | 65.700.000 | 587 | 70.820.00 0,00 | 564 | 58.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 70.820.000,0 0 | 17,8 69 | 107, 79 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 4.06 0 | 548.300.00 0 | 4.3 86 | 102.940.0 00,00 | 4.9 52 | 66.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 ,00 | 102.940.000, 00 | 108, 03 | 18,7 74 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 3.23 0 | 44.100.000 | 350 | 8.610.000, 00 | 470 | 16.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 8.610.000,00 | 10,8 36 | 19,5 24 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|----------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.217.600.000 | 1 | 195.470.000,00 | 1 | 245.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195.470.000,00 | 20 | 16,054 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 142.800.000 | 1 | 32.680.000,00 | 1 | 14.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.680.000,00 | 20 | 22,885 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 217.920.000 | 0 | 0 | 1 | 22.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 726.240.000 | 0 | 0 | 1 | 111.911.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.698.900.000 | 0 | 0 | 1 | 215.987.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.012.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------------|---|---------------------------|---|--------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---|---------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1.260.000, 00 | 1 | 18.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.260.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 423.300.00 0 | | | 100 | 14.965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.00 0 | 423.300.00 0 | 400 | 238.230.0 00 | 1 | 14.965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000, 00 | 20 | 56,2 79 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 423.300.00 0 | 0 | 0 | 1 | 14.965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Puskesmas TURIKALE | | | | | | | | 3.692.753.2 50 | | 483.891.8 80 | #DIV/ 0! | 13,1 | 0 | 483.891.880, 00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 6.928.125.0 00 | | | 100 | 2.852.328.0 00 | 0 | 483.891.8 80 | 0 | 16,96 | 0 | 483.891.880, 00 | 0 | 6,98 45 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 6.928.125.0 00 | 15 | 89.549.43 1.673 | 1 | 2.852.328.0 00 | 0 | 483.891.8 80 | 0 | 16,96 | 15 | 90.033.323.5 53,00 | 150 | 129 9,5 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 6.928.125.0 00 | 1 | 2.574.362. 961 | 1 | 2.852.328.0 00 | 0 | 483.891.8 80 | 0 | 16,96 | 1 | 3.058.254.84 1,00 | 20 | 44,1 43 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|---------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 6.552.360.000 | 100 | 141.375.53.344 | 100 | 824.765.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553.344,00 | 100 | 2157,6 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 6.552.360.000 | 6 | 5.697.754.900 | 20 | 824.765.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.900,00 | 30 | 86,957 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 4.945 | 102.200.000 | 248 | 84.280.000,00 | 671 | 67.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 84.280.000,00 | 5,0152 | 82,466 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 38.240 | 248.500.000 | 5.929 | 49.630.000,00 | 5.320 | 66.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.929,00 | 49.630.000,00 | 15,505 | 19,972 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 5.810 | 119.000.000 | 545 | 23.380.000,00 | 859 | 16.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 23.380.000,00 | 9,3804 | 19,647 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 1.431.100.000 | 1 | 188.240.000,00 | 1 | 232.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188.240.000,00 | 20 | 13,154 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------------|--|----|---|----|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 162.120.000 | 1 | 27.610.000,00 | 1 | 13.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.610.000,00 | 20 | 17,031 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 165.960.000 | 0 | 0 | 1 | 24.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 655.680.000 | 0 | 0 | 1 | 95.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.833.900.000 | 0 | 0 | 1 | 215.712.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 5 | 1.833.900.000 | 0 | 0 | 1 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.132.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 4.900.000,00 | 1 | 34.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.900.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|---------------------------|---|----------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 402.300.000 | | | 100 | 15.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 402.300.000 | 400 | 238.230.000 | 1 | 15.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000,00 | 20 | 59,217 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 402.300.000 | 0 | 0 | 1 | 15.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Puskesmas CENRANA | | | | | | | | 1.889.831.350 | | 197.498.649 | #DIV/0! | 10,45 | 0 | 197.498.649,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 6.900.000.000 | | | 100 | 1.053.805.000 | 0 | 197.498.649 | 0 | 18,74 | 0 | 197.498.649,00 | 0 | 2,8623 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 6.900.000.000 | 15 | 89.549.431.673 | 1 | 1.053.805.000 | 0 | 197.498.649 | 0 | 18,74 | 15 | 89.746.930.322,00 | 150 | 1300,7 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 6.900.000.000 | 1 | 966.195.786 | 1 | 1.053.805.000 | 0 | 197.498.649 | 0 | 18,74 | 1 | 1.163.694.435,00 | 20 | 16,865 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 3.575.420.000 | 100 | 141.375.53.344 | 100 | 823.756.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553.344,00 | 100 | 3954,1 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 3.575.420.000 | 6 | 5.697.754.900 | 20 | 823.756.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.900,00 | 30 | 159,36 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 800 | 133.000.000 | 145 | 65.800.000,00 | 134 | 75.602.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 65.800.000,00 | 18,125 | 49,474 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 12.160 | 375.000.000 | 2.018 | 75.000.000,00 | 1.963 | 41.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018,00 | 75.000.000,00 | 16,595 | 20 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 750 | 79.000.000 | 72 | 5.800.000,00 | 32 | 12.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.800.000,00 | 9,6 | 7,3418 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 180.000.000 | 1 | 98.430.000,00 | 1 | 231.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.430.000,00 | 20 | 54,683 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 180.000.000 | 911 | 23.640.000,00 | 1 | 23.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 23.640.000,00 | 18220 | 13,133 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 164.640.000 | 0 | 0 | 1 | 20.451.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 765.300.000 | 0 | 0 | 1 | 89.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.698.480.000 | 0 | 0 | 1 | 218.962.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1.200.000,00 | 1 | 38.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.200.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 527.700.000 | | | 100 | 12.270.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 527.700.000 | 400 | 238.230.000 | 1 | 12.270.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000,00 | 20 | 45,145 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---|-----------------------|---|------------------------|--|----------------------|--|-------------------|---|-------------|--|---------------------------|---|---------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 527.700.000 | | | 1 | 12.270.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Puskesmas CAMBA | | | | | | | | 2.275.061.350 | | 99.809.840 | #DIV/0! | 4,39 | 0 | 99.809.840,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 11.274.375.000 | | | 100 | 1.439.035.000 | 0 | 99.809.840 | 0 | 6,94 | 0 | 99.809.840,00 | 0 | 0,8853 | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Faskes dengan fasilitas BLUD | Unit Kerja | 10 | 11.274.375.000 | 15 | 89.549.431.673 | 1 | 1.439.035.000 | 1 | 99.809.840 | 100 | 6,94 | 16 | 89.649.241.513,00 | 160 | 795,16 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5 | 11.274.375.000 | 1 | 1.295.775.213 | 1 | 1.439.035.000 | 0 | 99.809.840 | 25 | 6,94 | 1,25 | 1.395.585.053,00 | 25 | 12,378 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100 | 4.339.080.000 | 100 | 141.375.553.344 | 100 | 826.416.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.375.553.344,00 | 100 | 3258,2 | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Junlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20 | 4.339.080.000 | 6 | 5.697.754.900 | 20 | 826.416.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.697.754.900,00 | 30 | 131,31 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 820 | 84.000.000 | 145 | 18.800.000 | 63 | 76.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 18.800.000,00 | 17,683 | 22,381 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---|-------------------|---|--------------------|--|-----------------|--|----|---|----|--|--------------------|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 9.84 0 | 400.000.00 0 | 1.8 22 | 70.100.00 0,00 | 1.6 47 | 44.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 ,00 | 70.100.000,0 0 | 18,5 16 | 17,5 25 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 750 | 90.000.000 | 350 | 8.610.000, 00 | 86 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 8.610.000,00 | 46,6 67 | 9,56 67 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5 | 38.000.000 | 1 | 271.733.5 00,00 | 1 | 225.340.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271.733.500, 00 | 20 | 715, 09 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5 | 1.708.200.0 00 | 1 | 15.800.00 0,00 | 1 | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.800.000,0 0 | 20 | 0,92 5 | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5 | 145.200.00 0 | 0 | 0 | 1 | 14.655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5 | 175.200.00 0 | 0 | 0 | 1 | 101.496.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|------------------|--|---------------|---|----------|--|-----------------------|---|---------------|---|-----------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5 | 1.698.480.000 | 0 | 0 | 1 | 219.022.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 35.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100 | 527.700.000 | 95 | 238.230.000 | 100 | 9.610.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 238.230.000,00 | 95 | 45,145 | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2.000 | 527.700.000 | 400 | 238.230.000 | 1 | 9.610.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 238.230.000,00 | 20 | 45,145 | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5 | 527.700.000 | 1 | 120.600.000 | 1 | 9.610.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.600.000,00 | 20 | 22,854 | | KESEHATAN |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah layanan penunjang yang dilaksanakan | Persen | 100 | 81.371.861.985 | 100 | 15.187.245.544 | 100 | 14.371.314.164 | 27 | 3.271.999.287 | 27 | 22,77 | 127 | 18.459.244.831,00 | 127 | 22,69 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanaha | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|------------|---|------------|---|------------|--|-----------|---|------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 105 | 92.595.000 | 18 | 18.159.000 | 33 | 34.545.000 | 16 | 2.400.000 | 48,48 | 6,95 | 34 | 20.559.000,00 | 32 | 22 | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 20.125.000 | 1 | 3.775.000 | 3 | 5.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.775.000,00 | 20 | 18,758 | | |
| 2 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 12.250.000 | 1 | 2.450.000 | 1 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.450.000,00 | 20 | 20 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 15.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 13.500.000 | 1 | 2.700.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.700.000,00 | 40 | 20 | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 17.400.000 | 1 | 3.370.000 | 1 | 3.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.370.000,00 | 20 | 19,368 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|----------------------|---|-------------|--|-------------------------|---|--------------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60 | 10.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000,00 | 1,66 67 | 20 | | |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 4.320.000 | 12 | 864.000 | 12 | 1.070.000,0 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 864.000,00 | 75 | 20 | | |
| 8 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.100.000,00 | 0 | 2.400.000 | 0 | 21,62 | 0 | 2.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| 9 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.500.000,0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Laporan | 225 | 69.158.579.485 | 10 | 2.958.130.197 | 45 | 12.874.751.164 | 11 | 3.167.295.687 | 24,44 | 24,6 | 21 | 6.125.425.884,00 | 9,33 33 | 8,85 71 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 112 40 | 65.532.179.485 | 465 | 2.826.810.197 | 224 8 | 12.077.956.164 | 642 | 2.973.615.687 | 28,56 | 24,62 | 1.107 ,00 | 5.800.425.884,00 | 9,84 88 | 8,85 13 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 3.611.300.000 | 3 | 131.320.000 | 12 | 794.400.000 | 3 | 193.680.000 | 25 | 24,38 | 6 | 325.000.000,00 | 10 | 8,99 95 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | Laporan | 5 | 9.250.000 | 0 | 0 | 1 | 1.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|------------|--|-----------|---|-------|--|--------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Keluaran Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD | Laporan | 90 | 5.850.000 | 4 | 0 | 18 | 1.375.000 | 4 | 0 | 22,22 | 0 | 8 | - | 8,88 | 0 | | |
| | Adminitarsi barang milik daerah pada perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 11.875.000 | 0 | 0 | 1 | 37.625.000 | | 9.000.000 | 0 | 23,92 | 0 | 9.000.000,00 | 0 | 75,7 | | |
| | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 11.875.000 | 0 | 0 | 1 | 37.625.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 23,92 | 0 | 9.000.000,00 | 0 | 75,7 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 800 | 155.000.000 | 154 | 0 | 160 | 22.150.000 | | 0 | 0 | 0 | 154 | - | 19,2 | 0 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 100 | 155.000.000 | 0 | 0 | 31 | 20.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4.621.162.500 | 2 | 39.580.000 | 7 | 593.893.000 | | 17.553.600 | 0 | 2,96 | 2 | 57.133.600,00 | 28,571 | 1,2363 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Jenis | 7 | 4.621.162.500 | 2 | 39.580.000 | 7 | 593.893.000 | | 17.553.600 | 0 | 2,96 | 2 | 57.133.600,00 | 28,571 | 1,2363 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 65.775.000 | 0 | 0 | 1 | 12.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 15.140.000 | 0 | 0 | 1 | 2.632.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 1.008.367.500 | 0 | 0 | 4 | 179.574.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 374.500.000 | 0 | 0 | 2 | 68.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 62.500.000 | 0 | 0 | 12 | 8.500.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 3.094.880.000 | 3 | 39.580.000 | 12 | 322.656.000 | 3 | 17.553.600 | 25 | 5,44 | 6 | 57.133.600,00 | 10 | 1,8461 | | |
| | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 600.000.000 | 2 | 87.050.000 | 3 | 277.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 87.050.000,00 | 100 | 14,508 | | |
| | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 150 | 225.000.000 | 30 | 46.700.000 | 10 | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46.700.000,00 | 20 | 20,756 | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 75 | 375.000.000 | 15 | 40.350.000 | 20 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.350.000,00 | 20 | 10,76 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 3 | 5.559.650.000 | 15 | 978.509.285 | 3 | 271.750.000 | | 61.350.000 | 0 | 22,58 | 15 | 1.039.859.285,00 | 500 | 18,704 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|--------------------|---|-------------|--|--------------------------|---|---------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 40.000.000 | 12 | 3.500.000 | 12 | 6.500.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 3.500.000,00 | 25 | 8,75 | | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 3.000.000 | 12 | 159.285 | 12 | 600.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 159.285,00 | 25 | 5,30 95 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 5.516.650.000 | 12 | 974.850.000 | 12 | 264.650.000 | 3 | 61.350.000 | 25 | 23,18 | 15 | 1.036.200.000,00 | 25 | 18,7 83 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 4 | 1.173.000.000 | 4 | 138.107.150 | 9 | 259.600.000,00 | | 14.400.000 | 0 | 5,55 | 4 | 152.507.150,00 | 100 | 13,001 | | |
| | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 40 | 250.000.000 | 8 | 34.674.650 | 8 | 75.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34.674.650,00 | 20 | 13,8 7 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | 30 | 748.000.000 | 6 | 74.690.000 | 5 | 149.600.000 | 0 | 14.400.000 | 0 | 9,63 | 6 | 89.090.000,00 | 20 | 11,9 1 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 250 | 125.000.000 | 50 | 20.500.000 | 100 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20.500.000,00 | 20 | 16,4 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 50.000.000 | 1 | 8.242.500 | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.242.500,00 | 20 | 16,4 85 | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian | Persen | 100 | 74.843.688.000 | 95 | 14.121.839.255 | 85 | 9.868.090.000 | 0 | 131.500.000 | 0 | 1,33 | 95 | 14.253.339.255,00 | 95 | 19,044 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|-----------------|---|------|--|-----------------------|---|-------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | dan kebutuhan air bersih masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (ws) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah ketersediaan air baku | M3 | 907 15 | 17.753.500. 000 | 1 | 3.700.630. 048 | 151 65 | 4.968.520.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 3.700.630.04 8,00 | 0,00 08 | 20,8 45 | | |
| | Pembangunan bangunan perkuatan tebing | Dinormalisasi/Direstor asi | KM | 5,72 8 | 10.576.500. 000 | 3 | 2.284.474. 306 | 2,2 2 | 2.819.380.0 00,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.284.474.30 6,00 | 52,3 74 | 21,6 | | |
| | Pembangunan sumur air tanah untuk air baku | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi | Titik | 15 | 2.350.500.0 00 | 3 | 465.219.9 26 | 4 | 637.920.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 465.219.926, 00 | 20 | 19,7 92 | | |
| | Pembangunan embung dan penampung air lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | Unit | 15 | 4.826.500.0 00 | 4,5 00 | 950.935.8 16 | 2 | 1.511.220.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 ,00 | 950.935.816, 00 | 300 00 | 19,7 02 | | |
| | Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik | Ha | 319 30 | 57.090.188. 000 | 2 | 10.421.20 9.207 | 410 0 | 4.899.570.0 00 | 0 | 131.500.0 00 | 0 | 2,68 | 1,74 | 10.552.709.2 07,00 | 0,00 54 | 18,4 84 | | |
| | Peningkatan jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | KM | 41,0 5 | 12.206.193. 000 | 2 | 1.481.275. 225 | 4,7 | 1.784.140.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.481.275.22 5,00 | 4,87 21 | 12,1 35 | | |
| | Peningkatan bendung irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | Bendung | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 241.730.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,21 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | KM | 10 | 2.600.500.0 00 | 3 | 515.991.9 87 | 12, 73 | 1.550.060.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 515.991.987, 00 | 30 | 19,8 42 | | |
| | Rehabilitasi bendung irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | Bendung | 123, 5 | 35.614.010. 000 | 33 | 7.307.942. 735 | 4 | 709.620.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,91 | 7.307.942.73 5,00 | 26,6 48 | 20,5 2 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|--------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|--|-------------|---|-------|--|------------------|---|-------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | KM | 15 | 3.960.350.000 | 0 | 784.949.260 | 132 | 565.320.000 | 0 | 131.500.000 | 0 | 23,26 | 0 | 916.449.260,00 | 0 | 23,141 | | |
| | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya | Lembaga | 449,73 | 2.709.135.000 | 0 | 331.050.000 | 10 | 48.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.050.000,00 | 0 | 12,22 | | |
| | Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM Pekerjaan Umum | Persen | 100 | 42.270.353.172 | 93 | 6.836.781.308 | 100 | 12.035.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,15 | 6.836.781.308,00 | 93,15 | 16,174 | | |
| | Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota | Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Layak | Rumah tangga | 429425 | 42.270.353.172 | ### ## | 6.836.781.308 | 88460 | 12.035.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### ### | 6.836.781.308,00 | 18,63 | 16,174 | | |
| | Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | Unit | 709 | 9.337.721.000 | 19 | 1.078.786.919 | 60 | 845.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.078.786.919,00 | 2,6798 | 11,553 | | |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Orang | 0 | 0 | 0 | 1.099.270.858 | 30 | 28.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099.270.858,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|-----------------------|--|----------|---|----------|--|------------------|---|-----------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | Liter/Detik | 36 | 12.279.632.172 | 0 | 0 | 2 | 8.868.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Liter/Detik | 18 | 10.563.750.000 | 2 | 2.075.755.334 | 2 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.075.755.334,00 | 11,11 | 19,65 | | |
| | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | SR | 318 | 10.089.250.000 | 2 | 2.582.968.197 | 80 | 1.670.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.582.968.197,00 | 0,6289 | 25,601 | | |
| | Perogram Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | | 0 | | 0 | 98 | 11.950.645.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Layak | RT | | 0 | | 0 | 825 81 | 11.950.645.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi | Unit | | 0 | | 0 | 1 | 7.217.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Rumah | | 0 | | 0 | 50 | 96.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | Rumah Tangga | | 0 | | 0 | 275 | 4.536.895.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-----------------|---|----------------|---|----------------|--|----|---|----|--|-------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | Dokumen | | 0 | | 0 | 1 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | Persen | 100 | 27.677.670.380 | 100 | 3.440.172.747 | 75 | 3.929.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.440.172.747,00 | 100 | 12,429 | | |
| | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota | Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan | km | 10 | 27.677.670.380 | 4 | 3.440.172.747 | 5000 | 3.929.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 3.440.172.747,00 | 36 | 12,429 | | |
| | Pembangunan sistem drainase lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | m | 22.441 | 27.677.670.380 | | | 3000 | 3.629.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penataan bangunan gedung | Rasio bangunan Ber IMB per satuan bangunan | Rasio | 1 | 112.725.375.000 | 12 | 20.455.438.571 | 1 | 25.569.867.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 20.455.438.571,00 | 1176 | 18,146 | | |
| | Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah dokumen IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan | Dokumen | 7000 | 112.725.375.000 | 150 | 20.455.438.571 | 5000 | 25.569.867.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20.455.438.571,00 | 2,1429 | 18,146 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengubahsuaian bangunan edung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | Bangunan Gedung | 25 | 6.500.000.000 | 5 | 1.289.509.373 | 1 | 1.526.651.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.289.509.373,00 | 20 | 19,839 | | |
| | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | Bangunan Gedung | 0 | 0 | 10 | 19.165.929.198 | 1 | 1.000.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19.165.929.198,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 105 | 106.225.375.000 | 0 | 0 | 18 | 23.043.216.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | Persen | 12 | 2.708.771.000 | 150 | 377.813.300 | 11,34 | 721.089.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 377.813.300,00 | 1250 | 13,948 | | |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Memenuhi Standar Sesuai ketentuan yang berlaku | Orang | 650 | 1.146.621.000 | 1 | 199.023.300 | 400 | 515.554.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199.023.300,00 | 0,1538 | 17,357 | | |
| | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 57.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan | Lembaga | 25 | 492.450.000 | 1 | 39.674.300 | 1 | 74.228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.674.300,00 | 4 | 8,0565 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | Orang | 30 | 39.150.000 | 3 | 13.050.000 | 8 | 3.870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.050.000,00 | 10 | 33,33 | | |
| | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya | Lembaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | Orang | 450 | 615.021.000 | 5 | 146.299.000 | 40 | 370.216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146.299.000,00 | 1,11 | 23,78 | | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersedia | Sistem | 1 | 517.950.000 | 1 | 52.920.000 | 1 | 85.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.920.000,00 | 100 | 10,217 | | |
| | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | Perangkat Pendukung | 5 | 53.000.000 | 30 | 0 | 2 | 47.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 600 | 0 | | |
| | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan | Dokumen | 15 | 287.700.000 | 30 | 40.020.000 | 3 | 32.555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40.020.000,00 | 200 | 13,91 | | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Orang | 25 | 77.250.000 | 1 | 12.900.000 | 10 | 3.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.900.000,00 | 4 | 16,69 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan | Layanan Informasi | 5 | 100.000.000 | 5 | 0 | 2 | 2.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 100 | 0 | | |
| | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Yang Diterbitkan | Rekomen dasi | 65 | 303.200.000 | 71 | 31.750.000 | 50 | 21.695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 31.750.000,00 | 109,23 | 10,472 | | |
| | Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi | Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi | Dokumen | 150 | 118.650.000 | 100 | 0 | 1 | 6.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 66,667 | 0 | | |
| | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 5 | 184.550.000 | 5 | 31.750.000 | 2 | 14.970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.750.000,00 | 100 | 17,204 | | |
| | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Penyelenggara Jasa Konstruksi Yang Diawasi dan Dievaluasi | Badan Usaha | 5 | 741.000.000 | 24 | 94.120.000 | 50 | 98.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 94.120.000,00 | 480 | 12,702 | | |
| | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | Paket Pekerjaan | 500 | 307.000.000 | 71 | 60.890.000 | 100 | 34.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60.890.000,00 | 14,2 | 19,834 | | |
| | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | Bangunan Konstruksi | 500 | 128.000.000 | 100 | 18.130.000 | 100 | 22.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18.130.000,00 | 20 | 14,164 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------------|---------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|----------|---|----------|--|--------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Lembaga | 25 | 178.000.000 | 5 | 0 | 5 | 17.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 20 | 0 | | |
| | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha | Badan Usaha | 100 | 128.000.000 | 20 | 15.100.000 | 20 | 23.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.100.000,00 | 20 | 11,797 | | |
| | Penyelenggaraan jalan | Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) | Persen | 100 | 654.826.974.451 | 94 | 93.197.565.570 | 97,2 | 38.620.329.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,68 | 93.197.565.570,00 | 93,68 | 14,232 | | |
| | Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | KM | 4928,9 | 654.826.974.451 | 923 | 93.197.565.570 | 1003 | 38.620.329.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,48 | 93.197.565.570,00 | 18,736 | 14,232 | | |
| | Pengelolaan leger jalan | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola | Dokumen | 5 | 500.000.000 | 1 | 99.789.000 | 1 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.789.000,00 | 20 | 19,958 | | |
| | Penggantian Jembatan | Jumlah Jembatan yang Diganti | Jembatan | | | 4 | 6.785.557.000 | 3 | 1.622.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,12 | 6.785.557.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembangunan jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | KM | 256 | 252.017.999.451 | 4 | 6.785.557.000 | 4,76 | 2.630.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,12 | 6.785.557.000,00 | 1,6094 | 2,6925 | | |
| | Rekonstruksi jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | KM | 155 | 347.258.975.000 | 35 | 77.524.575.570 | 16,23 | 24.404.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,74 | 77.524.575.570,00 | 22,413 | 22,325 | | |
| | Pemeliharaan berkala jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 521.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan kewenangan kabupaten/kota dan desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | KM | 6192,8 | 300.000.000 | 1.239 | 48.000.000 | 1239 | 57.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238,57 | 48.000.000,00 | 20 | 16 | | |
| | Pelebaran Jalan menuju standar | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar | KM | | | 1 | 593.900.000 | 0,3 | 410.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 593.900.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|-----------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|----|---|----|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Rehabilitasi jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | Jembatan | 5 | 3.000.000.000 | 1 | 593.900.000 | 3 | 732.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 593.900.000,00 | 20 | 19,797 | | |
| | Pembangunan jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | Jembatan | 45 | 49.500.000.000 | 7 | 7.696.779.000 | 5 | 6.906.969.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.696.779.000,00 | 15,556 | 15,549 | | |
| | Survey kondisi jalan/jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | KM | 6192,8 | 2.250.000.000 | 1,239 | 448.965.000 | ### | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238,57 | 448.965.000,00 | 20 | 19,954 | | |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 521.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemeliharaan rutin jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 210.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Ketaatan terhadap RTRW | Persen | 10 | 3.584.228.000 | 7 | 1.447.042.603 | 9 | 2.827.522.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 1.447.042.603,00 | 72,5 | 40,373 | | |
| | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Luas areal pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RRTR | Ha | 19800 | 3.172.953.000 | ### | 880.356.767 | 7200 | 777.446.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 880.356.767,00 | 61,108 | 27,746 | | |
| | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 3 | 794.239.267 | 3 | 201.647.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 794.239.267,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 9 | 2.727.228.000 | 0 | 0 | 1 | 279.949.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | Jumlah publikasi informasi penataan ruang | Publikasi | | 0 | 0 | 0 | 4 | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen | | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|-------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang | Laporan | 2.700 | 445.725.000 | 540 | 86.117.500 | 1 | 100.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 86.117.500,00 | 20 | 19,321 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah | Luas areal ruang daerah yang perencanaannya sesuai dengan rencana peruntukan | Ha | | 0 | ### ## | 7.260.000 | 7200 | 963.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### ### | 7.260.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 158 | 7.260.000 | 1 | 963.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 7.260.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Luas areal ruang daerah yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana peruntukan | Ha | | 123.150.000 | 12099 | 559.425.836 | 7200 | 821.203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### ### | 559.425.836,00 | #DI V/0! | 454,26 | | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | Dokumen | 0 | 0 | 157 | 529.925.836 | 1 | 765.103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 529.925.836,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | Layanan | 150 | 123.150.000 | 0 | 0 | 80 | 56.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Luas areal ruang daerah yang dikendalikan pemanfaatannya | Ha | 33000 | 288.125.000 | 12099 | 559.425.836 | 7200 | 265.672.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### ### | 559.425.836,00 | 36,665 | 194,16 | | |
| | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen | 150 | 288.125.000 | 30 | 19.300.000 | 30 | 10.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19.300.000,00 | 20 | 6,6985 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 255.522.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Masyarakat Maros Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar | Persen | 100 | 1.164.120.000 | 0 | 0 | 100 | 504.445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | Dan Kualifikasi SPM Perumahan | Rumah | 150 | 32.163.000 | 0 | 0 | 72 | 6.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen | 3 | 32.163.000 | 0 | 0 | 1 | 6.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | Orang | 150 | 81.957.000 | 0 | 0 | 100 | 47.870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | Orang | 150 | 7.707.000 | | | 100 | 5.870.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terlatih | Orang | 3 | 74.250.000 | 0 | 0 | 6 | 42.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|------------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|----------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Dibangun atau Direhabilitasi | Rumah | 450 | 1.050.000.000 | 0 | 0 | 87 | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | Unit Rumah | 450 | 600.000.000 | 0 | 0 | 15 | 235.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | Unit Rumah | 60 | 450.000.000 | 0 | 0 | 10 | 215.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Kawasan Permukiman | Persentase pemukiman yang tertata | Persen | 100 | 1.243.726.200 | 0 | 0 | 99 | 385.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Dikeluarkan | Dokumen | 3 | 87.540.000 | 0 | 0 | 10 | 30.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Laporan | 3 | 87.540.000 | 0 | 0 | 1 | 30.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditingkatkan Kualitasnya | Kawasan | 10 | 1.156.186.200 | 0 | 0 | 5 | 355.295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | Unit Rumah | 900 | 1.006.186.200 | 0 | 0 | 15 | 344.495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | Dokumen | 3 | 150.000.000 | 0 | 0 | 1 | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|------------|---------------------------------------|-------------|---|---------------|---|---------------|--|----|---|----|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | Persen | 100 | 993.336.000 | 5 | 2.390.742.120 | 81,43 | 369.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.390.742.120,00 | 5 | 240,68 | | |
| | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah dalam Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Diperbaiki | Rumah | 50 | 993.336.000 | 75 | 2.390.742.120 | 16 | 369.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2.390.742.120,00 | 150 | 240,68 | | |
| | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Unit Rumah | 300 | 993.336.000 | 219 | 2.390.742.120 | 15 | 369.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 2.390.742.120,00 | 73 | 240,68 | | |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | Persen | | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.070.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.070.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.070.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|--------------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----|---|----|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan | Persen | 100 | 240.050.000 | 90 | 13.100.000 | 100 | 802.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13.100.000,00 | 90 | 5,4572 | | |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam DaerahvKabupaten/Kota | Jumlah Kasus Sengketa Tanah yang Diselesaikan | Kasus | 4 | 240.050.000 | 3 | 13.100.000 | 2 | 802.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.100.000,00 | 75 | 5,4572 | | |
| | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Berita Acara | 15 | 91.300.000 | 10 | 11.060.000 | 2 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.060.000,00 | 66,667 | 12,114 | | |
| | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kasus | 30 | 148.750.000 | 1 | 2.040.000 | 2 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.040.000,00 | 3,3333 | 1,3714 | | |
| | Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee | Persen | 100 | 234.525.000 | 100 | 5.780.000 | 100 | 2.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.780.000,00 | 100 | 2,4646 | | |
| | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente yang di tetapkan | Obyek | 1 | 234.525.000 | 1 | 5.780.000 | 1 | 2.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.780.000,00 | 100 | 2,4646 | | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | Dokumen | 5 | 121.550.000 | 1 | 0 | 1 | 175.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--|---------------|---|-------|--|-------------------|---|--------|----------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Dokumen | 5 | 112.975.000 | 1 | 5.780.000 | 1 | 2.215.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.780.000,00 | 20 | 5,1162 | | |
| | Program Penatagunaan Tanah | Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW | Persen | 100 | 156.600.000 | 70 | 10.140.000 | 80 | 2.215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10.140.000,00 | 70 | 6,4751 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 19800 | 156.600.000 | ### | 10.140.000 | 1 | 2.215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 10.140.000,00 | 61,108 | 6,4751 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 5 | 156.600.000 | 1 | 10.140.000 | 1 | 2.215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.140.000,00 | 20 | 6,4751 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan DanPelaporan Perangkat Daerah | Persen | 100 | 76.831.413.445 | 100 | 14.459.764.659 | 100 | 10.249.089.129 | 100 | 2.360.102.227 | 100 | 23,03 | 200 | 16.819.866.886,00 | 200 | 21,89 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 49.000.000 | 29 | 17.464.500 | 17 | 17.004.500 | 1 | 2.400.000 | 5,88 | 14,11 | 30 | 19.864.500,00 | 300 | 41 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 9.640.000 | 2 | 9.778.500 | 2 | 2.261.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.778.500,00 | 40 | 101,44 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.585.000 | 1 | 1.286.000 | 2 | 793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.286.000,00 | 20 | 19,529 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|---|----|--|--------------|---|-------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.585.000 | 1 | 1.286.000 | 2 | 793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.286.000,00 | 20 | 19,5 29 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.585.000 | 1 | 1.286.000 | 2 | 793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.286.000,00 | 20 | 19,5 29 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 25 | 6.585.000 | 1 | 1.286.000 | 2 | 793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.286.000,00 | 4 | 19,5 29 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 90 | 6.435.000 | 5 | 1.256.000 | 4 | 793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.256.000,00 | 5,55 56 | 19,5 18 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 15 | 6.585.000 | 18 | 1.286.000 | 4 | 793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.286.000,00 | 120 | 19,5 29 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.600.000 | 1 | 2.400.000 | 100 | 25 | 1 | 2.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|--------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | 1200 | 47.339.828.445 | 3 | 8.609.133.574 | 6 | 6.475.208.529 | 2 | 1.500.152.227 | 33,33 | 23,17 | 5 | 10.109.285.801,00 | 0,4167 | 21,355 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 60 | 46.636.400.945 | 2231 | 8.470.301.574 | 1.260 | 6.336.648.529 | 270 | 1.469.282.227 | 21,43 | 23,19 | 2.501,00 | 9.939.583.801,00 | 4168,3 | 21,313 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 90 | 663.850.000 | 12 | 132.770.000 | 12 | 135.600.000 | 3 | 30.870.000 | 25 | 22,77 | 15 | 163.640.000,00 | 16,667 | 24,65 | | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 409.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 30 | 39.577.500 | 18 | 6.062.000 | 12 | 409.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.062.000,00 | 60 | 15,317 | | |
| | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 409.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.731.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|----|---|----|--|--------------------|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Adminitarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi BarangMilik Daerah Pada Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 542.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada SKPD | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 259.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1.058.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 259.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 259.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 539.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 950.965.00 0 | 5 | 151.611.5 85 | 8 | 111.825.10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151.611.585, 00 | 83,3 33 | 15,9 43 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---|-----------------|---|----------------|--|------------|--|----|---|----|--|-------------------|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 17.275.000 | 2 | 3.285.000 | 1 | 2.584.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.285.000,00 | 8 | 19,0 16 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 42.160.000 | 5 | 8.076.000 | 1 | 2.584.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.076.000,00 | 20 | 19,1 56 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 106.930.00 0 | 5 | 19.749.00 0 | 3 | 12.089.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.749.000,0 0 | 20 | 18,4 69 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 60 | 49.650.000 | 0 | 0 | 1 | 4.614.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.072.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 75.000.000 | 12 | 15.000.00 0 | 12 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15.000.000,0 0 | 20 | 20 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 10 | 659.950.00 0 | 12 | 97.071.58 5 | 12 | 69.954.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 97.071.585,0 0 | 120 | 14,7 09 | | |
| | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 2 | 28.437.370.000 | 2 | 5.577.270.000 | 2 | 3.583.850.000 | 1 | 857.550.000 | 50 | 23,93 | 3 | 6.434.820.000,00 | 150 | 22,628 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 21.120.000 | 12 | 2.475.000 | 12 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.475.000,00 | 20 | 11,719 | | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 10 | 28.416.250.000 | 12 | 5.574.795.000 | 12 | 3.578.650.000 | 3 | 857.550.000 | 25 | 23,96 | 15 | 6.432.345.000,00 | 150 | 22,636 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 3 | 54.250.000 | 1 | 104.285.000 | 3 | 33.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.285.000,00 | 33,333 | 192,23 | | |
| | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 20 | 54.250.000 | 24 | 104.285.000 | 2 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 104.285.000,00 | 120 | 192,23 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Presentase Pencapaian Target Penyelesaian Pelanggaran K3 | | 100 | | 100 | 591.672.000 | 100 | 205.840.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 591.672.000,00 | 100 | #DI V/0! | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|---|------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kejadian ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani | | 6 | 354.950.000 | 5 | 473.500.000 | 6 | 49.795.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 473.500.000,00 | 83,33 | 133,4 | | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 70 | 112.950.000 | 0 | 0 | 12 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8.646.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | Dokumen | 5 | 107.000.000 | 0 | 0 | 1 | 789.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Laporan | 1800 | 109.500.000 | 0 | 0 | 12 | 14.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Laporan | 500 | 25.500.000 | 0 | 0 | 12 | 14.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota | Jumlah PERDA dan PERBUP yang dilaksanakan penagakannya | | 7 | 350.835.960,00 | 30 | 113.932.000 | 5 | 150.980.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 113.932.000,00 | 428,57 | 32,474 | | |
| | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.554.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | | 2 | 789.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Sosialisasi penegakan peraturan d aerah dan peraturan bupati/wali kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan | Laporan | 430 | 205.225.000 | 0 | 0 | 12 | 59.408.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|----------|--|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | Laporan | 70 | 105.535.960 | 9 | 4.060.000 | 12 | 80.488.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.060.000,00 | 12,857 | 3,847 | | |
| | Pengawasan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Laporan | 70 | 40.075.000 | 13 | 25.862.000 | 12 | 2.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25.862.000,00 | 18,571 | 64,534 | | |
| | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.064.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.064.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 76.981.413.445 | 6 | 3.393.982.222 | 100 | 6.844.136.222 | 30 | 1.317.657.017 | 30 | 19,25 | 36 | 4.711.639.239,00 | 36 | 6,12 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 49.000.000 | 0 | 0 | 18 | 20.469.500 | 4 | 2.400.000 | 22,22 | 11,72 | 4 | 2.400.000,00 | 40 | 5 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-----------|---|----|---|--------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 9.640.000 | 0 | 0 | 3 | 2.235.000,00 | 1 | 0 | 33,33 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.585.000 | 0 | 0 | 1 | 1.437.000,00 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.585.000 | 1 | 0 | 1 | 1.184.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.585.000 | 0 | 0 | 1 | 1.437.000,00 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 25 | 6.585.000 | 1 | 0 | 1 | 1.184.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 90 | 6.435.000 | 4 | 0 | 5 | 1.224.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,4444 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 15 | 6.585.000 | 2 | 0 | 18 | 1.184.000,00 | 4 | 0 | 22,22 | 0 | 6 | - | 40 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|-----------------|---|----------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|---|-------------|--|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.600.000,0 0 | 3 | 2.400.000 | 25 | 25 | 3 | 2.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 984.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 120 00 | 47.339.828. 445 | 600 | 1.949.446. 467 | 12 | 4.548.110.7 22,00 | 4 | 927.957.0 17 | 33,33 | 20,4 | 604 | 2.877.403.48 4,00 | 5,03 33 | 6,07 82 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bul an | 60 | 46.636.400. 945 | 3 | 1.913.236. 467 | 868 | 4.435.614.7 22,00 | 248 | 903.447.0 17 | 28,57 | 20,37 | 251 | 2.816.683.48 4,00 | 418, 33 | 6,03 97 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 90 | 663.850.00 0 | 4 | 36.210.00 0 | 12 | 110.160.00 0,00 | 3 | 24.510.00 0 | 25 | 22,25 | 7 | 60.720.000,0 0 | 7,77 78 | 9,14 66 | | |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.142.500,0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Laporan | 30 | 39.577.500 | 3 | 0 | 18 | 1.193.500,0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 10 | 0 | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 392.500,00 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|---|----------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 392.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | layanan | | 0 | 0 | 0 | 1 | 153.648.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150.000.000,00 | 150 | 0 | 60 | 0 | 150 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.265.000,00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.383.000,00 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 950.965.000 | 5 | 151.611.585 | 7 | 100.823.500,00 | 2 | 0 | 28,57 | 0 | 7 | 151.611.585,00 | 116,67 | 15,943 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 17.275.000 | 2 | 3.285.000 | 1 | 2.402.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.285.000,00 | 8 | 19,016 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 25 | 42.160.000 | 5 | 8.076.000 | 2 | 9.732.500,00 | 1 | 0 | 50 | 0 | 6 | 8.076.000,00 | 24 | 19,156 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 106.930.000 | 5 | 19.749.000 | 2 | 16.227.000,00 | 1 | 0 | 50 | 0 | 6 | 19.749.000,00 | 24 | 18,469 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 60 | 49.650.000 | 5 | 8.430.000 | 12 | 7.500.000,00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 8 | 8.430.000,00 | 13,3 | 16,979 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.682.000,00 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 75.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 14.000.000,00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 15.000.000,00 | 25 | 20 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 10 | 659.950.000 | 12 | 97.071.585 | 12 | 48.280.000,00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 97.071.585,00 | 150 | 14,709 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Layanan | | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 152.000.000,00 | 6 | 0 | 33,33 | 0 | 6 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Layanan | 2 | 28.437.370.000 | 2 | 5.577.270.000 | 2 | 1.783.192.000,00 | 1 | 387.300.000 | 50 | 21,72 | 3 | 5.964.570.000,00 | 150 | 20,974 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dokumen | 60 | 21.120.000 | 12 | 2.475.000 | 12 | 4.992.000,00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 2.475.000,00 | 25 | 11,719 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 10 | 28.416.250.000 | 12 | 5.574.795.000 | 12 | 1.778.200.000,00 | 3 | 387.300.000 | 25 | 21,78 | 15 | 5.962.095.000,00 | 150 | 20,981 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Layanan | 2 | 204.250.000 | 1 | 104.285.000 | 1 | 85.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.285.000,00 | 50 | 51,058 | | |
| | penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 20 | 54.250.000 | 24 | 104.285.000 | 2 | 18.000.000,00 | 1 | 0 | 50 | 0 | 25 | 104.285.000,00 | 125 | 192,23 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|----------------|--|----|---|----|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 500 | 150.000.000 | 0 | 0 | 17 | 60.000.000,00 | 8 | 0 | 47,06 | 0 | 8 | - | 1,6 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Persentase Masyarakat Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100 | 586.584.900 | 100 | 80.918.550 | 100 | 312.794.000 | 40 | 0 | 40 | 0 | 140 | 80.918.550,00 | 140 | 13,795 | | |
| | Pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 4 | 514.984.900 | 100 | 45.542.550 | 100 | 302.594.000,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 140 | 45.542.550,00 | 3500 | 8,8435 | | |
| | Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam | Laporan | 500 | 114.776.200 | 365 | 13.940.000 | 365 | 269.290.000,00 | 90 | 0 | 24,66 | 0 | 455 | 13.940.000,00 | 91 | 12,145 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|---------------|--|----|---|----|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen | 1825 | 225.145.000 | 12 | 7.420.000 | 12 | 6.300.000,00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 7.420.000,00 | 0,8219 | 3,2957 | | |
| | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Dokumen | 48 | 123.183.000 | 12 | 24.182.550 | 1 | 17.104.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24.182.550,00 | 25 | 19,631 | | |
| | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | 103 | 51.880.700 | 103 | 0 | 103 | 1.800.000,00 | 103 | 0 | 100 | 0 | 206 | - | 200 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|---------------------|--|----------|---|----------|--|----------------------|---|-----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan Kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga kemitraan dalam pencegahan , penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Inspeksi peralatan proteksi kebakaran | Jumlah jenis peralatan proteksi kebakaran yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku | Jenis | 3 | 50.300.000 | 1 | 10.060.000 | 1 | 6.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.060.000,00 | 33,33 | 20 | | |
| | Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Dokumen | 5 | 50.300.000 | 12 | 10.060.000 | 1 | 3.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.060.000,00 | 240 | 20 | | |
| | Investigasi kejadian kebakaran | Jumlah kasus kebakaran yang diinvestigasi | Laporan | 60 | 21.300.000 | 0 | 0 | 1 | 3.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penilaian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | Dokumen | 70 | 21.300.000 | 0 | 0 | 1 | 3.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---|----|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|------|-------------------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | program penunjang urusan pemerintahan daerah | persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan | Persen | 100 | 23.903.180.285 | | | 100 | 5.756.512.577 | 0 | 547.800.565 | 0 | 9,52 | 0 | 547.800.565,00 | 0 | 2,29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah | Jenis | 10 | 24.550.000 | | | 100 | 7.050.500 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | - | 80 | 0 | | |
| | penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 11.720.000 | | | 2 | 3.664.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 5 | 12.830.000 | | | 1 | 3.386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 230 | 18.546.689.260 | | | 3 | 3.873.192.177 | 2 | 510.250.565 | 66,67 | 13,17 | 2 | 510.250.565,00 | 1 | 3 | | |
| | penyediaan gaji dan tunjangan asn | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 210 | 17.910.539.260 | | | 552 | 3.740.772.177 | 10 | 499.860.565 | 1,81 | 13,36 | 10 | 499.860.565,00 | 5 | 3 | | |
| | pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 583.000.000 | | | 12 | 124.680.000 | 6 | 10.390.000 | 50 | 8,33 | 6 | 10.390.000,00 | 10 | 2 | | |
| | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 25.000.000 | | | 1 | 3.865.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|----|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksa | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut | Dokumen | 5 | 8.150.000 | | | 2 | 965.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 40 | 0 | | |
| | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 90 | 20.000.000 | | | 4 | 2.910.000 | 4 | 0 | 100 | 0 | 4 | - | 4 | 0 | | |
| | administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 200 | 50.000.000 | | | 46 | 8.540.900 | 13 | 0 | 28,26 | 0 | 13 | - | 7 | 0 | | |
| | pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 200 | 50.000.000 | | | 1 | 3.850.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | | |
| | pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | | | 12 | 4.690.900 | 12 | 0 | 100 | 0 | 12 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 8 | 962.115.000 | | | 8 | 333.479.000 | 8 | 0 | 100 | 0 | 8 | - | 100 | 0 | | |
| | penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 40 | 67.077.500 | | | 1 | 16.425.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | | |
| | penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jenis | 15 | 300.000.000 | | | 25 | 50.000.000 | 25 | 0 | 100 | 0 | 25 | - | 167 | 0 | | |
| | penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 135 | 250.037.500 | | | 1 | 15.560.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|----|---|--------------------|--|-------------------|---|-------------|--|----------------------|---|----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 80 | 70.000.000 | | | 4 | 39.660.000 | 4 | 0 | 100 | 0 | 4 | - | 5 | 0 | | |
| | penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 20 | 125.000.000 | | | 2 | 16.106.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 10 | 0 | | |
| | penyediaan bahan / materil | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | | | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | #DIV/0! | 25 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 25 | 50.000.000 | | | 2 | 20.000.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 8 | 0 | | |
| | penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2.500 | 100.000.000 | | | 12 | 175.728.000 | 12 | 0 | 100 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | | |
| | pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | jumlah bmd penunjang kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jenis | | | | | 1 | 600.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | jumlah Paket kendaraan operasional/lapangan | Paket | | | | | 1 | 600.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 800 | 3.776.000.000 | | | 2 | 664.050.000 | 2 | 37.550.000 | 100 | 5,65 | 2 | 37.550.000,00 | 0 | 1 | | |
| | penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 3.748.500.000 | | | 12 | 5.500.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 150 | 0 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 2.500 | 27.500.000 | | | 12 | 658.550.000 | 3 | 37.550.000 | 25 | 5,7 | 3 | 37.550.000,00 | 0 | 137 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|-------------|--|----|---|----|--|----|---|------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 20 | 543.826.025 | | | 3 | 270.200.000 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | - | 15 | 0 | | |
| | pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 5 | 43.826.025 | | | 250 | 142.000.000 | 100 | 0 | 40 | 0 | 100 | - | 2.000 | 0 | | |
| | pemeliharaan aset tetap lainnya | jumlah aset tetap kebutuhan kantor dalam kondisi baik | Unit | 5 | 150.000.000 | | | 690 | 90.000.000 | 200 | 0 | 28,99 | 0 | 200 | - | 4.000 | 0 | | |
| | pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 15 | 350.000.000 | | | 3 | 38.200.000 | 2 | 0 | 66,67 | 0 | 2 | - | 13 | 0 | | |
| | pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | Kawasan | | | | | 14 | 13.225.000 | 2 | 0 | 14,29 | 0 | 2 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | jumlah masyarakat korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi | Orang | | | | | 200 | 160.794.000 | 27 | 0 | 13,5 | 0 | 27 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | respon cepat darurat bencana kabupaten/kota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Dakumen | ### ### | #VALUE! | | | 1 | 2.094.000 | 5 | 0 | 500 | 0 | 5 | - | ### ### | ### ### | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|---------|---|----|---|-------------|--|----|---|---------|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | pencaria, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupate/kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Orang | | | | | 10 | 38.500.000 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | ### | #VALUE! | | | 100 | 120.200.000 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | ### | ### | | |
| | penataan sistem dasar penanggulangan bencana | jumlah lembaga yang terlibat dalam penataan sistem dasar penanggulangan bencana | Lembaga | | | | | 10 | 10.000.000 | 10 | 0 | 100 | 0 | 10 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | Dokumen | ### | #VALUE! | | | 1 | 5.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | ### | ### | | |
| | bimbingan teknis pasca kabupaten/kota | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | Orang | | | | | 10 | 5.000.000 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|-------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 23.781.766.920 | 20 | 972.424.331 | 100 | 5.037.264.170 | 21 | 1.067.518.277 | 21,19 | 21,19 | 40,82 | 2.039.942.608,00 | 40,82 | 8,58 | Dinas Sosial | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | persen | 100 | 65.300.000 | 0 | 0 | 100 | 29.793.900 | 8 | 2.400.000 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 2.400.000,00 | 8 | 4 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 60 | 9.625.000 | 0 | 0 | 12 | 3.598.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 5 | 8.775.000 | 0 | 0 | 1 | 2.870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 5 | 9.550.000 | 0 | 0 | 1 | 2.138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | dokumen | 5 | 9.650.000 | 0 | 0 | 1 | 2.445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | dokumen | 5 | 9.650.000 | 0 | 0 | 1 | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 10 | 9.125.000 | 0 | 0 | 12 | 1.852.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 5 | 8.925.000 | 0 | 0 | 12 | 2.134.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan walidata Pendukung statistik sektoral Daerah | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.340.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 21,16 | 0 | 2.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah dokumen data statistik sektoral daerah | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.076.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian target Laporan Pelaksanaan Dministrasi Keuangan | persen | 5 | 22.080.137.420 | 2.087 | 921.584.331 | 100 | 4.590.671.170 | 22,31 | 1.024.018.277 | 22,31 | 22,31 | 2.109,31 | 1.945.602.608,00 | 42186 | 8,8116 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | org | 3500 | 21.266.837.420 | 658 | 897.404.331 | 630 | 4.439.235.170 | 135 | 987.748.277 | 21,43 | 22,25 | 793 | 1.885.152.608,00 | 22,657 | 8,8643 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 60 | 794.750.000 | 12 | 24.180.000 | 12 | 147.480.000 | 3 | 36.270.000 | 25 | 24,59 | 15 | 60.450.000,00 | 25 | 7,6062 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 120 | 9.800.000 | 1 | 0 | 10 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0,8333 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | laporan | 60 | 8.750.000 | 18 | 0 | 16 | 2.656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 30 | 0 | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase capaian target dokumen administrasi Barang Milik Daerah | Persen | 5 | 5.500.000 | 1 | 0 | 100 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | dokumen | 20 | 5.500.000 | 1 | 0 | 10 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah aparatur PD yang mendapatkan layanan Administrasi kepegawaian | orang | 500 | 65.000.000 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 52 | - | 10,4 | 0 | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah aparatur PD yang mendapatkan layanan Administrasi kepegawaian | orang | 10 | 65.000.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | - | 20 | 0 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase capaian target Layanan administrasi umum PD yang dilaksanakan | persen | 5 | 842.814.500 | 6 | 169.775.404 | 100 | 144.249.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169.775.404,00 | 120 | 20,144 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 100 | 8.900.000 | 11 | 1.593.000 | 11 | 2.012.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.593.000,00 | 11 | 17,899 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | paket | 15 | 209.485.000 | 5 | 41.923.250 | 8 | 43.713.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.923.250,00 | 33,333 | 20,013 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 30 | 23.769.500 | 6 | 5.051.400 | 2 | 5.026.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.051.400,00 | 20 | 21,252 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | paket | 25 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | layanan | 60 | 101.075.000 | 11 | 20.215.000 | 12 | 16.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20.215.000,00 | 18,333 | 20 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | layanan | 20 | 449.585.000 | 12 | 100.992.754 | 12 | 77.248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.992.754,00 | 60 | 22,464 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase capaian target Jenis BMD Penunjang kebutuhan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah | persen | 1 | 125.000.000 | 1 | 49.650.000 | 100 | 57.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.650.000,00 | 100 | 39,72 | | |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Peralatan Pengadaan Mabel yang Disediakan | jenis | | | 0 | 0 | 4 | 30.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | jenis | 100 | 125.000.000 | 1 | 49.650.000 | 4 | 27.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.650.000,00 | 1 | 39,72 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase capaian target Jenis Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah | persen | 2 | 343.007.500 | 2 | 222.070.000 | 100 | 175.450.000 | 23,43 | 41.100.000 | 23,43 | 23,43 | 25,43 | 263.170.000,00 | 127,13 | 76,724 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jenis | 5 | 13.000.000 | 12 | 2.400.000 | 1 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.400.000,00 | 240 | 18,462 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | jenis | 60 | 330.007.500 | 12 | 219.670.000 | 7 | 172.650.000 | 6 | 41.100.000 | 85,71 | 23,81 | 18 | 260.770.000,00 | 30 | 79,019 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase capaian target Jenis BMD PD Penunjang kebutuhan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang berada dalam kondisi baik | persen | 4 | 255.007.500 | 4 | 51.762.100 | 100 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.762.100,00 | 100 | 20,298 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|-------------|--|-----------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | jenis | 25 | 75.000.000 | 3 | 14.875.000 | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.875.000,00 | 12 | 19,833 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | jenis | 25 | 90.003.750 | 3 | 19.670.000 | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.670.000,00 | 12 | 21,855 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | jenis | 100 | 52.500.000 | 20 | 9.932.500 | 3 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.932.500,00 | 20 | 18,919 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | jenis | 10 | 37.503.750 | 1 | 7.284.600 | 2 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.284.600,00 | 10 | 19,424 | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Masyarakat Miskin yg memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial dan jaminan sosial. | 100 | 100 | 1.232.724.500 | 100 | 254.166.245 | 100 | 329.489.000 | 8 | 25.200.000 | 7,65 | 7,65 | 107,65 | 279.366.245,00 | 107,65 | 22,66 | | |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah petugas PKKS yang mendapatkan pengembangan potensi | Orang | 5 | 1.232.724.500 | 14 | 254.166.245 | 100 | 329.489.000 | 7,65 | 25.200.000 | 7,65 | 7,65 | 21,65 | 279.366.245,00 | 432,96 | 22,663 | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya | org | 70 | 574.100.000 | 14 | 130.035.245 | 168 | 119.565.000 | 42 | 25.200.000 | 25 | 21,08 | 56 | 155.235.245,00 | 80 | 27,04 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|------------------|---|-------------|--|-----------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 15 | 572.460.000 | 3 | 101.872.000 | 20 | 93.656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101.872.000,00 | 20 | 17,795 | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 45 | 86.164.500 | 15 | 22.259.000 | 14 | 116.268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22.259.000,00 | 33,333 | 25,833 | | |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial. | persen | 100 | 520.080.000 | 100 | 159.215.200 | 100 | 155.186.000 | 2 | 3.500.000 | 2,26 | 2,26 | 102,26 | 162.715.200,00 | 102,26 | 31,29 | | |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti | Orang | 5 | 403.700.000,00 | 150 | 130.112.200 | 100 | 145.865.000 | 2,4 | 3.500.000 | 2,4 | 2,4 | 152,4 | 133.612.200,00 | 3048 | 33,097 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|--------|---------------------------------------|----------------|---|------------|---|------------|--|-----------|---|------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 3 | 21.000.000,00 | 50 | 7.000.000 | 140 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.000.000,00 | 166,7 | 33,3 | | |
| | Penyediaan sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 3 | 48.750.000,00 | 60 | 11.000.000 | 140 | 16.250.000 | 0 | | 0 | 0 | 60 | 11.000.000,00 | 2000 | 22,564 | | |
| | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 250 | 247.250.000,00 | 22 | 37.350.000 | 66 | 45.830.000 | 7 | 3.500.000 | 10,61 | 7,64 | 29 | 40.850.000,00 | 11,6 | 16,522 | | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 300 | 82.950.000,00 | 100 | 25.555.000 | 66 | 74.535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.555.000,00 | 33,333 | 30,808 | | |
| | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 300 | 3.750.000,00 | 0 | 0 | 50 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi | Orang | 350 | 116.380.000,00 | 50 | 29.103.000 | 100 | 9.321.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29.103.000,00 | 14,286 | 25,007 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|-------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 116.380.000,00 | 1 | 23.276.000 | 4 | 9.321.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.276.000,00 | #DIV/0! | 20 | | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | Persen | 100 | 4.697.572.500 | 100 | 1.665.174.979 | 100 | 756.950.000 | 10,2 | 77.190.000 | 10,2 | 10,2 | 110,2 | 1.742.364.979,00 | 110,2 | 37,091 | | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data fakir miskin yang dikelola | Jenis | ### | 4.697.572.500 | ### | 1.665.174.979 | 100 | 756.950.000 | 10,2 | 77.190.000 | 10,2 | 10,2 | #### | 1.742.364.979,00 | 39,992 | 37,091 | | |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | org | 200000 | 3.184.300.000 | ### | 598.803.075 | ### | 570.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 598.803.075,00 | 20 | 18,805 | | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | org | 200000 | 149.997.500 | ### | 29.098.000 | ### | 8.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 29.098.000,00 | 5 | 19,399 | | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 86360 | 1.332.045.000 | ### | 668.723.904 | ### | 168.820.000 | 0 | 77.190.000 | 0 | 45,72 | #### | 745.913.904,00 | 25 | 55,998 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 60 | 31.230.000 | 20 | 368.550.000 | 50 | 9.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 368.550.000,00 | 33,33 | 1180,1 | | |
| | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana. | persen | 100 | 1.277.740.000,00 | 100 | 305.997.650 | 100 | 326.718.500 | 13,77 | 45.000.000 | 13,77 | 13,77 | 113,77 | 350.997.650,00 | 113,77 | 27,47 | | |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Presentase capaian target Korban bencana alam dan Sosial yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan Sosial | persen | 3 | 262.725.000,00 | 100 | 87.263.750 | 100 | 97.537.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 87.263.750,00 | 333,33 | 33,215 | | |
| | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 3 | 73.650.000,00 | 100 | 24.400.000 | 2.100 | 35.787.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24.400.000,00 | 333,33 | 33,13 | | |
| | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 300 | 160.875.000,00 | 100 | 53.463.750 | 850 | 53.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53.463.750,00 | 33,33 | 33,233 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|------------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | org | 300 | 28.200.000,00 | 100 | 9.400.000 | 100 | 8.525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9.400.000,00 | 33,33 | 33,33 | | |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Presentase capaian target Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial | persen | 385 | 1.015.015.000,00 | 14 | 218.733.900 | 100 | 229.181.000 | 19,64 | 45.000.000 | 19,64 | 19,64 | 33,64 | 263.733.900,00 | 8,7364 | 25,983 | | |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | lembaga | 88 | 399.910.000,00 | 14 | 14.530.000 | 3 | 33.262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.530.000,00 | 15,909 | 3,6333 | | |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | lembaga | 42 | 615.105.000,00 | 30 | 204.203.900 | 3 | 195.919.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 22,97 | 30 | 249.203.900,00 | 71,429 | 40,514 | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Kelayakan Penggunaan Taman makam Pahlawan | persen | 100 | 97.710.000 | 100 | 19.401.600 | 100 | 14.102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19.401.600,00 | 100 | 19,856 | | |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Presentase capaian target TPM yang dikelola oleh Daerah | persen | 4 | 97.710.000 | 2 | 19.401.600 | 100 | 14.102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.401.600,00 | 50 | 19,856 | | |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | unit | 4 | 97.710.000 | 2 | 19.401.600 | 2 | 14.102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.401.600,00 | 50 | 19,856 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|----|---|----|---|----------------------|--|--------------------|---|-------------|--|-----------------------|---|-----------------|---|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | | | | | 100 | 3.366.538.807 | 100 | 511.795.850 | 100 | 15,2 | 100 | 511.795.850,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | | | | | 21 | 39.803.300 | 3 | 2.400.000 | 14,29 | 6,03 | 3 | 2.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | | | | 2 | 2.249.600 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | | | | | 1 | 2.727.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | | | | | 1 | 2.387.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | | | | | 1 | 2.441.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | | | | | 1 | 2.373.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|----|---|----|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | | | | | 1 | 4.217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | | | | | 12 | 3.069.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | | | | | 1 | 17.782.400 | 0 | 2.400.000 | 0 | 13,5 | 0 | 2.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Total | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Dokumen | | | | | 1 | 2.556.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | | | | | 20 | 3.049.632.157 | 4 | 491.487.850 | 20 | 16,12 | 4 | 491.487.850,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | | | | | 216 | 2.906.123.557 | 54 | 453.987.850 | 25 | 15,62 | 54 | 453.987.850,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | | | | | 12 | 137.500.000 | 3 | 37.500.000 | 25 | 27,27 | 3 | 37.500.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | | | | | 12 | 3.051.600 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|----|---|----|---|--------------------|--|------------------|---|------------|--|---------------------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | | | | | 4 | 2.957.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | | | | | 18 | 3.808.000 | 18 | 3.808.000 | 100 | 100 | 18 | 3.808.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | | | | | 2 | 3.808.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | | | | | 5 | 105.526.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | | | | | 1 | 5.124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | | | | | 1 | 14.612.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | | | | | 1 | 2.730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | | | | | 12 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | | | | 1 | 65.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---------------------------------------|----|---|----|---|-------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | | | | | 3 | 100.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | | | | | 12 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | | | | | 3 | 57.170.000 | 3 | 14.100.000 | 100 | 24,66 | 3 | 14.100.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | | | | | 3 | 770.000 | 1 | 0 | 33,33 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | 12 | 27.600.000 | 3 | 6.900.000 | 25 | 25 | 3 | 6.900.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | 12 | 28.800.000 | 3 | 7.200.000 | 25 | 25 | 3 | 7.200.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | | | | | 1 | 10.598.850 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara | Unit | | | | | 2 | 10.598.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|---------------|---|----|---|----|--|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|---------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | | | | | 38 | 60.314.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikasi kompetensi | Orang | | | | | 30 | 50.574.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Orang | | | | | 10 | 50.574.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga | Jumlah Jenis Perizinan dan Pendaftaran Lembaga | Jenis | | | | | 1 | 9.740.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara terintegrasi | Jumlah Dokumen Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Dokumen | | | | | 1 | 9.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | | | | | 25 | 88.138.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan | Orang | | | | | 1.0 00 | 42.840.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | Orang | | | | | 50 | 3.690.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | Orang | | | | | 4 | 39.149.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja | Orang | | | | | 800 | 23.639.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah pelaksanaan Job Fair | Kali | | | | | 1 | 23.639.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|----------|---|----|---|----|--|-------------|--|----|---|----|--|----|---|----------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Sosialisasi pemberdayaan PMI | Kegiatan | | | | | 1 | 21.659.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia | Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | | | | | 30 | 12.766.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | Orang | | | | | 15 | 8.893.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan | Persen | | | | | 100 | 146.269.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian kerja | Dokumen | | | | | 4 | 12.356.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Laporan | | | | | 6 | 12.356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)// Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|----|---|----|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial terfasilitasi | Kasus | | | | | 10 | 133.913.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang dicegah | Kasus | | | | | 5 | 31.890.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | Kasus | | | | | 5 | 70.566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Kelompok | | | | | 1 | 31.457.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase kesesuaian Kawasan Transmigrasi | Persen | | | | | 100 | 59.358.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Luas areal kawasan transmigrasi yang tersedia | Ha | | | | | 220 | 59.358.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | Jumlah Dokumen Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | Dokumen | | | | | 1 | 59.358.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)// Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|-------------------|---|-------------|--|-------------------------|---|-------------|--|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Persen | 100 | 34.970.594.970 | 100 | 1.393.612.900 | 100 | 6.835.652.673 | 100 | 56.137.228 | 100 | 0,82 | 200 | 1.449.750.128,00 | 200 | 4,15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 45 | 102.750.000 | 2 | 0 | 9 | 20.550.000 | 9 | 0 | 100 | 0 | 11 | - | 24 | 0 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 15 | 22.500.000 | 1 | 0 | 3 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6,6667 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 13.500.000 | 0 | 0 | 1 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 16.000.000 | 1 | 0 | 1 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD P | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 16.000.000 | 0 | 0 | 1 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------|---|------------------|--|------------|---|----------|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 10.500.000 | 1 | 0 | 1 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 9.750.000 | 0 | 0 | 1 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5 | 14.500.000 | 0 | 0 | 1 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 155 | 32.208.265.470 | 264 | 1.323.692.900 | 31 | 6.260.046.773 | 31 | 56.137.228 | 100 | 0,9 | 295 | 1.379.830.128,00 | 190,32 | 4,2841 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4620 | 31.399.333.970 | 2 | 27.200.000 | 924 | 6.080.300.473 | 264 | 1.737.228 | 28,57 | 0,03 | 266 | 28.937.228,00 | 5,7576 | 0,0922 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 726.200.000 | 0 | 0 | 12 | 163.200.000 | 3 | 54.400.000 | 25 | 33,33 | 3 | 54.400.000,00 | 5 | 7,491 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 17.031.500 | 0 | 0 | 1 | 3.406.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 20 | 65.700.000 | 1 | 0 | 4 | 13.140.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | - | 10 | 0 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 155 | 40.000.000 | 1 | 0 | 31 | 8.000.000 | 31 | 0 | 100 | 0 | 32 | - | 20,645 | 0 | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 155 | 40.000.000 | 0 | 0 | 31 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 1.388.079.500 | 0 | 0 | 29 | 307.105.900 | 29 | 0 | 100 | 0 | 29 | - | 483,33 | 0 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 32.262.000 | 0 | 0 | 1 | 6.452.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket peralatan kantor yang disediakan | Paket | 5 | 44.225.000 | 0 | 0 | 1 | 8.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 305.910.000 | 0 | 0 | 1 | 61.182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 82.707.500 | 0 | 0 | 2 | 16.541.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 160.000.000 | 0 | 0 | 12 | 32.000.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|-------------|--|----|---|----|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 762.975.000 | 3 | 12.370.000 | 12 | 182.085.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 6 | 12.370.000,00 | 10 | 1,6213 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 3 | 15.000.000 | 0 | 0 | 3 | 3.000.000 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | - | 100 | 0 | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 15 | 15.000.000 | 0 | 0 | 3 | 3.000.000 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | - | 20 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 1 | 978.500.000 | 0 | 0 | 1 | 202.550.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 978.500.000 | 3 | 30.350.000 | 12 | 202.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.350.000,00 | 5 | 3,1017 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 3 | 238.000.000 | 1 | 0 | 3 | 34.400.000 | 3 | 0 | 100 | 0 | 4 | - | 133,33 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10 | 150.000.000 | 0 | 0 | 2 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15 | 38.000.000 | 1 | 0 | 3 | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6,6667 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang | Unit | 5 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|----|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta | Persen | 80 | 1.531.060.000 | 0 | | 100 | 405.840.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 125 | 0 | | |
| | Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG | Orang | 500 | 141.060.000 | 0 | 0 | 100 | 36.690.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 3 | 63.585.000 | 0 | 0 | 1 | 21.195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5 | 77.475.000 | 0 | 0 | 1 | 15.495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan anggota organisasi kemasyarakatan yang memiliki peningkatan kapasitas pada bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Orang | 300 | 1.300.000.000 | 0 | 0 | 100 | 351.150.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 33,33 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|------------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Organisasi | 5 | 1.060.000.000 | 0 | 0 | 1 | 303.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak | Lembaga | 500 | 240.000.000 | 0 | 0 | 100 | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | Lembaga | 1 | 90.000.000 | 0 | 0 | 1 | 18.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 100 | 0 | | |
| | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dokumen | 1 | 90.000.000 | 0 | 0 | 1 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------|---|--------------------|--|-------------------|---|-------------|--|----------------------|---|-------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan | Persen | 100 | 2.083.500.000 | 100 | 0 | 100 | 416.700.000 | 100 | 63.750.000 | 100 | 15,3 | 200 | 63.750.000,00 | 200 | 3,06 | | |
| | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan | Kasus | 30 | 522.250.000 | 0 | 0 | 30 | 104.450.000 | 30 | 0 | 100 | 0 | 30 | - | 100 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5 | 468.750.000 | 0 | 0 | 1 | 93.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | 200 | 53.500.000 | 0 | 0 | 40 | 10.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah jenis layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang tersedia | Layanan | 1 | 1.242.500.000 | 1 | 226.599.500 | 1 | 248.500.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 226.599.500,00 | 200 | 18,237 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|----------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|-----|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Layanan | 5 | 1.242.500.000 | 1 | 226.599.500 | 1 | 248.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.599.500,00 | 20 | 18,237 | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan | Lembaga | 1 | 318.750.000 | 1 | 56.610.000 | 1 | 63.750.000 | 1 | 63.750.000 | 100 | 100 | 2 | 120.360.000,00 | 200 | 37,76 | | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Orang | 500 | 318.750.000 | 100 | 56.610.000 | 100 | 63.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56.610.000,00 | 20 | 17,76 | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Rasio | 0.02 | 676.300.000 | 0 | 93.010.000 | 0 | 135.260.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,04 | 93.010.000,00 | ### ### | 13,75 | | |
| | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender | Jumlah keluarga yang memiliki pengetahuan terkait kesetaraan gedner dan hak anak | Keluarga | 500 | 285.750.000 | 200 | 14.900.000 | 200 | 57.150.000 | 200 | 0 | 100 | 0 | 400 | 14.900.000,00 | 80 | 5,2143 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------------------|---|-----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | 200 | 74.750.000 | 40 | 14.900.000 | 40 | 14.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14.900.000,00 | 20 | 19,933 | | |
| | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5 | 211.000.000 | 1 | 0 | 1 | 42.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga | Lembaga | 1 | 69.750.000 | 1 | 13.950.000 | 1 | 13.950.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 13.950.000,00 | 200 | 20 | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | Lembaga | 5 | 69.750.000 | 1 | 13.950.000 | 1 | 13.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.950.000,00 | 20 | 20 | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|-------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis layanan bagi keluarga yang tersedia | Layanan | 1 | 320.800.000 | 1 | 64.160.000 | 1 | 64.160.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 64.160.000,00 | 200 | 20 | | |
| | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | Layanan | 5 | 320.800.000 | 1 | 64.160.000 | 1 | 64.160.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 64.160.000,00 | 40 | 20 | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Pemanfaatan Data Gender dan anak dalam perencanaan Pembangunan | Persen | 100 | 81.400.000 | 100 | 16.280.000 | 100 | 16.280.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 16.280.000,00 | 200 | 20 | | |
| | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis data gender dan anak yang tersedia dan dianalisis | Jenis | 2 | 81.400.000 | 2 | 16.280.000 | 2 | 16.280.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 4 | 16.280.000,00 | 200 | 20 | | |
| | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5 | 81.400.000 | 1 | 16.280.000 | 1 | 16.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.280.000,00 | 20 | 20 | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | Presentase Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak | Persen | 100 | 3.350.400.000 | 100 | 669.517.038 | 100 | 670.080.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 669.517.038,00 | 200 | 19,98 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju satuan pendidikan ramah anak | Satuan Pendidikan | 485 | 1.872.350.000 | 485 | 374.470.000 | 485 | 374.470.000 | 485 | 0 | 100 | 0 | 970 | 374.470.000,00 | 200 | 20 | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Organisasi | 225 | 113.750.000 | 45 | 22.750.000 | 45 | 22.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22.750.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5 | 1.758.600.000 | 1 | 351.720.000 | 1 | 351.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351.720.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak | Lembaga | 1 | 1.478.050.000 | 1 | 295.047.038 | 1 | 295.610.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 295.047.038,00 | 200 | 19,962 | | |
| | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5 | 166.050.000 | 1 | 33.210.000 | 1 | 33.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.210.000,00 | 20 | 20 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5 | 464.000.000 | 1 | 92.487.038 | 1 | 92.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.487.038,00 | 20 | 19,933 | | |
| | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5 | 848.000.000 | 1 | 169.350.000 | 1 | 169.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.350.000,00 | 20 | 19,971 | | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan anak yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan | Persen | 100 | 523.350.000 | 100 | 75.735.000 | 100 | 104.670.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 75.735.000,00 | 200 | 14,471 | | |
| | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak | Kasus | 490 | 379.550.000 | 55 | 22.050.000 | 55 | 75.910.000 | 55 | 0 | 100 | 0 | 110 | 22.050.000,00 | 22,449 | 5,8095 | | |
| | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA | Orang | 225 | 110.750.000 | 45 | 22.050.000 | 45 | 22.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22.050.000,00 | 20 | 19,91 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)// Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Layanan | 5 | 268.800.000 | 1 | 53.685.000 | 1 | 53.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.685.000,00 | 20 | 19,972 | | |
| | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | Orang | 1 | 143.800.000 | 1 | 24.925.000 | 1 | 28.760.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 24.925.000,00 | 200 | 17,333 | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan | Orang | 5 | 143.800.000 | 1 | 28.760.000 | 1 | 28.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.760.000,00 | 20 | 20 | | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk | Persen | 1 | 552.250.000 | 2 | 110.350.000 | 2 | 110.450.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 4 | 110.350.000,00 | 400 | 19,98 | | |
| | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Kebijakan | 1 | 127.250.000 | 1 | 25.350.000 | 1 | 25.450.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 25.350.000,00 | 200 | 19,921 | | |
| | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 5 | 127.250.000 | 1 | 25.350.000 | 1 | 25.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.350.000,00 | 20 | 19,921 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis data kependudukan dan pengendalian penduduk yang tersedia | Jenis | 2 | 425.000.000 | 2 | 85.000.000 | 2 | 85.000.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 4 | 85.000.000,00 | 200 | 20 | | |
| | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Dokumen | 65 | 300.000.000 | 13 | 60.000.000 | 13 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana | Laporan | 60 | 125.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA | Persentase Akseptor KB | Persen | 100 | 28.419.436.000 | 100 | 3.106.948.622 | 100 | 5.683.887.200 | 100 | 1.689.137.200 | 100 | 29,72 | 200 | 4.796.085.822,00 | 200 | 16,876 | | |
| | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi | Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang mendapatkan advokasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB | PUS | 63500 | 10.600.000.000 | ### | 646.250.000 | 63380 | 2.120.000.000 | 63380 | 0 | 100 | 0 | #### | 646.250.000,00 | 199,62 | 6,0967 | | |
| | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | Laporan | 10 | 8.750.000.000 | 3 | 276.400.000 | 2 | 1.750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276.400.000,00 | 30 | 3,1589 | | |
| | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa | Laporan | 70 | 1.050.000.000 | 14 | 210.000.000 | 14 | 210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 210.000.000,00 | 20 | 20 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--|----|---|----|--|------------------|---|--------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Dokumen | 5 | 800.000.000 | 1 | 159.850.000 | 1 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159.850.000,00 | 20 | 19,981 | | |
| | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB | Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan dalam rangka perencanaan dan pembanguna daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana | Orang | 605 | 6.166.000.000 | 121 | 1.230.479.300 | 121 | 1.233.200.000 | 121 | 0 | 100 | 0 | 242 | 1.230.479.300,00 | 40 | 19,956 | | |
| | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Orang | 1030 | 1.854.000.000 | 206 | 370.800.000 | 206 | 370.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 370.800.000,00 | 20 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Laporan | 60 | 4.312.000.000 | 12 | 859.679.300 | 12 | 862.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 859.679.300,00 | 20 | 19,937 | | |
| | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PUS yang mendapatkan pelayanan penunjang KB berupa alat dan obat kontrasepsi | PUS | 9705 | 7.777.186.000 | 1941 | 1.230.219.322 | 1941 | 1.555.437.200 | 1941 | 1.555.437.200 | 100 | 100 | 3.882,00 | 2.785.656.522,00 | 40 | 35,818 | | |
| | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan | 60 | 152.500.000 | 12 | 28.800.000 | 12 | 30.500.000 | 0 | 7.480.000 | 0 | 24,52 | 12 | 36.280.000,00 | 20 | 23,79 | | |
| | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Orang | 9705 | 3.457.036.000 | 1941 | 539.079.322 | 1941 | 691.407.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941,00 | 539.079.322,00 | 20 | 15,594 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|-------------|---|----------|--|-------------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Laporan | 10 | 4.049.900.000 | 2 | 638.940.000 | 2 | 809.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 638.940.000,00 | 20 | 15,777 | | |
| | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan | 60 | 117.750.000 | 12 | 23.400.000 | 12 | 23.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.400.000,00 | 20 | 19,873 | | |
| | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Ormas | 5 | 3.876.250.000 | 1 | 775.250.000 | 1 | 775.250.000 | 1 | 133.700.000 | 100 | 17,25 | 2 | 908.950.000,00 | 40 | 23,449 | | |
| | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | Laporan | 60 | 3.876.250.000 | 12 | 775.250.000 | 12 | 775.250.000 | 0 | 133.700.000 | 0 | 17,25 | 12 | 908.950.000,00 | 20 | 23,449 | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA | Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 100 | 11.464.700.000 | 100 | 2.225.690.000 | 100 | 2.235.920.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 2.225.690.000,00 | 200 | 19,41 | | |
| | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | kelompok | 6 | 11.179.600.000 | 2 | 2.168.670.000 | 2 | 2.235.920.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2.168.670.000,00 | 66,667 | 19,398 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|---|--------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|----|---|----|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | Unit | 70 | 1.559.500.000 | 14 | 244.650.000 | 14 | 311.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 244.650.000,00 | 20 | 15,688 | | |
| | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | Orang | 45300 | 9.620.100.000 | 9060 | 1.924.020.000 | 9060 | 1.924.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.060,00 | 1.924.020.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Ormas | 520 | 285.100.000 | 104 | 57.020.000 | 104 | 57.020.000 | 104 | 0 | 100 | 0 | 208 | 57.020.000,00 | 40 | 20 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|-------------|-------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Organisasi | 520 | 285.100.000 | 104 | 57.020.000 | 104 | 57.020.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 40.262.433.060 | 100 | 1.776.508.659 | 100 | 7.083.391.565 | 21 | 1.596.254.359 | 21 | 22,54 | 121 | 3.372.763.018,00 | 121 | 8,38 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 35 | 84.577.500 | 4 | 0 | 17 | 19.260.000 | 4 | 2.250.000 | 23,53 | 11,68 | 8 | 2.250.000,00 | 23 | 3 | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 17.665.000 | 0 | 0 | 3 | 1.395.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| 2 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 11.437.500 | 0 | 0 | 1 | 1.440.000,00 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 10.775.000 | 0 | 0 | 1 | 1.575.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 10.125.000 | 1 | 0 | 1 | 1.500.000,00 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 40 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|-----------------|---|--------------------|---|-------------------|--|----------------------|--|-------------------|---|-------|--|----------------------|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 9.950.000 | 0 | 0 | 1 | 1.500.000,0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60 | 10.500.000 | 3 | 0 | 1 | 1.440.000,0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 20 | 14.125.000 | 1 | 0 | 4 | 1.410.000,0 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | - | 10 | 0 | | |
| 8 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.000.000,0 0 | 0 | 2.250.000 | 0 | 25 | 0 | 2.250.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi keuaangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 225 | 39.055.760. 600 | 9 | 1.639.999. 659 | 37 | 6.716.276.4 65,00 | 9 | 1.562.504. 359 | 24,32 | 23,26 | 18 | 3.202.504.01 8,00 | 8 | 8,19 98 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bul an | 112 80 | 38.166.660. 600 | 282 | 1.594.505. 659 | 102 2 | 6.532.916.4 65,00 | 292 | 1.517.174. 359 | 28,57 | 23,22 | 574 | 3.111.680.01 8,00 | 5,08 87 | 8,15 29 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 870.650.00 0 | 3 | 44.970.00 0 | 12 | 181.320.00 0,00 | 3 | 45.330.00 0 | 25 | 25 | 6 | 90.300.000,0 0 | 10 | 10,3 72 | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|----------------|--|----|---|---------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 12 | 13 |
| | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 6.925.000 | 0 | 0 | 1 | 885.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD | Laporan | 90 | 11.525.000 | 4 | 524.000 | 18 | 1.155.000,00 | 4 | 0 | 22,22 | 0 | 8 | 524.000,00 | 8,8889 | 4,5466 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 478 | 10.250.000 | 94 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 94 | - | 19,665 | 0 | | |
| | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 60 | 10.250.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 8 | 454.845.000 | 2 | 61.819.000 | 8 | 123.905.100,00 | 6 | 0 | 75 | 0 | 8 | 61.819.000,00 | 100 | 13,591 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 23.687.500 | 0 | 0 | 1 | 2.075.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 29.975.000 | 0 | 2.433.000 | 1 | 3.260.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433.000,00 | 0 | 8,1168 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah | Paket | 5 | 66.745.000 | 0 | 10.647.000 | 1 | 2.409.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.647.000,00 | 0 | 15,952 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|--------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|-----------------------|--|-------------------|---|----------------|--|-----------------------|---|----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Tangga yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 153.137.500 | 0 | 12.934.000 | 1 | 21.347.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.934.000,00 | 0 | 8,446 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 94.150.000 | 0 | 1.111.000 | 1 | 12.319.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111.000,00 | 0 | 1,18 | | |
| | Penyediaan bahan material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 50.000.000 | 3 | 1.569.000 | 12 | 4.241.000,00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 6 | 1.569.000,00 | 120 | 3,138 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 37.150.000 | 3 | 33.125.000 | 12 | 78.253.000,00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 6 | 33.125.000,00 | 10 | 89,166 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 0 | 2 | 69.810.000 | 24 | 163.950.000,00 | 2 | 31.500.000 | 8,33 | 19,21 | 4 | 101.310.000,00 | 200 | #DIV/0! | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 0 | 0 | 3 | 3.350.000 | 12 | 2.200.000,00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 6 | 3.350.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 0 | 0 | 3 | 66.460.000 | 12 | 161.750.000,00 | 3 | 31.500.000 | 25 | 19,47 | 6 | 97.960.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 10 | 175.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 5 | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|-----------|---|---------------|--|----|---|----|--|--------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 10 | 481.999.960 | 1 | 4.880.000 | 3 | 60.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.880.000,00 | 10 | 1,0124 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 240.999.980 | 1 | 4.880.000 | 2 | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.880.000,00 | 50 | 2,0249 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1 | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 5 | 190.999.980 | 10 | 0 | 10 | 20.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 200 | 0 | | |
| | Perencanaan lingkungan hidup | Persentase Pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten | Persen | 100 | 382.755.000 | 0 | 0 | 100 | 54.468.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Dokumen | 5 | 382.755.000 | 0 | 0 | 1 | 54.468.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penetapan RPPLH kabupaten/kota | Persentase Pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke | Dokuman | 3 | 382.755.000 | 0 | 0 | 1 | 54.468.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|------------|---|----|---|---------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | dalam Rencana Pembangunan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang mendapatkan pengakuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | Persen | 100 | 17.706.000 | 0 | 0 | 100 | 2.716.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait PPLH yang mendapatkan pengakuan | MHA | 1 | 17.706.000 | 0 | 0 | 1 | 2.716.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Dokumen | 3 | 17.706.000 | 0 | 0 | 1 | 2.716.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang lingkungan hidup | Persen | 100 | 99.195.000 | 0 | 0 | 100 | 13.430.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|-----------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|---------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Lembaga | 30 | 99.195.000 | 0 | 0 | | 13.430.000,00 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 3 | 54.975.000 | 0 | 0 | 1 | 8.100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | Orang | 90 | 44.220.000 | 0 | 0 | 1 | 5.330.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penanganan pengaduan lingkungan hidup | Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup yang diselesaikan | Persen | 100 | 17.946.000 | 0 | 0 | 100 | 3.348.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah kasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diselesaikan | Kasus | 50 | 17.946.000 | 0 | 0 | 5 | 3.348.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | Pengaduan | 36 | 17.946.000 | 0 | 0 | 5 | 3.348.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase luas wilayah yang tertutup pepohonan | Persen | 100 | 992.806.500 | 100 | 0 | 100 | 50.980.000,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | - | 200 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|-------------|---------------------------------------|-------------|---|-----------|---|---------------|--|----|---|----|--|--------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Luas areal keanekaragaman hayati (KEHATI) yang dikelola termasuk taman kebun raya dan RTH | Ha | 85 | 992.806.500 | 0 | 0 | 100 | 50.980.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Ha | 85 | 992.806.500 | 0 | 0 | 100 | 50.980.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Persentase ketataan terhadap izin lingkungan | Persen | 100 | 40.797.000 | 0 | 2.816.000 | 100 | 18.599.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816.000,00 | 0 | 6,9025 | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha yang memiliki izin PPLH yang berada dalam pengawasan pemerintah Kabupaten | Unit Usaha | 100 | 40.797.000 | 0 | 2.816.000 | 30 | 18.599.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816.000,00 | 0 | 6,9025 | | |
| | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Badan Usaha | 90 | 40.797.000 | 0 | 2.816.000 | 30 | 18.599.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816.000,00 | 0 | 6,9025 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|----------------|--|----|---|----|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota | Persentase Cakupan Wilayah Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Persen | 100 | 454.549.200 | 0 | 0 | 100 | 103.355.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumah lokasi pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota yang terlaksana | Lokasi | 50 | 454.549.200 | 0 | 0 | 20 | 103.355.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Dokumen | 3 | 17.553.000 | 0 | 0 | 1 | 5.329.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.569.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | Dokumen | 36 | 377.813.700 | 0 | 0 | 1 | 19.040.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 3 | 59.182.500 | 0 | 0 | 1 | 70.416.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|---------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan ebrbahaya dan beracun (B3) | Persentase Volume Limbah B3 yang tertangani sesuai ketentuan berlaku | Persen | 100 | 42.294.788 | 0 | 0 | 100 | 5.455.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah vulome limbah b3 yang terpantau | m3 | 500 | 42.294.788 | 0 | 0 | 100 | 5.455.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | Dokumen | 3 | 42.294.788 | 0 | 0 | 1 | 5.455.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat | Persentase Partisipasi Masyarakat secara Aktif Dalam Penghargaan Lingkungan Hidup | Persen | 100 | 171.150.000 | 0 | 0 | 100 | 16.125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penghargaan lingkungan hidup | Orang | 1000 | 171.150.000 | 0 | 0 | ### ## | 16.125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|------------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Entitas | 30 | 171.150.000 | 0 | 0 | 10 | 16.125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan persampahan | Persentase sampah yang tertangan | Persen | 100 | 38.123.915.976 | 31 | 1.854.350.000 | 100 | 9.224.130.750,00 | ### | 1.911.550.000 | #### | 20,72 | #### | 3.765.900.000,00 | 14671 | 9,8781 | | |
| | Pengelolaan Sampah | Jumlah sampah yang tertangani | Ton | 236520 | 38.123.915.976 | ### | 1.854.350.000 | 36510 | 9.224.130.750,00 | ### | 1.911.550.000 | 40,1 | 20,72 | #### | 3.765.900.000,00 | 12,38 | 9,8781 | | |
| | Penyediaan sarana adn prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Unit | 1476 | 20.179.445.976 | 195 | 286.500.000 | 492 | 2.748.245.750,00 | 123 | 248.800.000 | 25 | 9,05 | 318 | 535.300.000,00 | 21,545 | 2,6527 | | |
| | Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | Dokumen | 6 | 28.725.000 | 0 | 0 | 1 | 4.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Jumlah sampah yang terdaur ulang | Ton | 15 | 44.055.000 | 0 | 0 | 10 | 4.660.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional | jumlah sampah yang ertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional | Ton | 87600 | 17.871.690.000 | ### | 1.546.250.000 | 36500 | 6.447.225.000,00 | ### | 1.662.750.000 | 24,66 | 25,79 | #### | 3.209.000.000,00 | 26,712 | 17,956 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|-------------|--|-------------------------|---|--------------|---|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | Kelompok | 0 | 0 | 45 | 21.600.000 | 1 | 20.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21.600.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 29.308.598.440 | 100 | 5.718.410.175 | 100 | 6.384.832.868 | 30 | 415.977.905 | 30 | 6,52 | 130 | 6.134.388.080,00 | 130 | 20,93 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen | 85 | 81.000.000 | 17 | 16.860.000 | 29 | 31.449.300 | 4 | 1.600.000 | 13,79 | 5,09 | 21 | 18.460.000,00 | 25 | 23 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 25 | 12.000.000 | 5 | 2.340.000 | 5 | 4.699.300 | 1 | 0 | 20 | 0 | 6 | 2.340.000,00 | 24 | 19,5 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd | Dokumen | 5 | 12.000.000 | 1 | 1.020.000 | 1 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.020.000,00 | 20 | 8,5 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd | Dokumen | 5 | 5.250.000 | 1 | 2.340.000 | 1 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.340.000,00 | 20 | 44,571 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd | Dokumen | 5 | 8.250.000 | 0 | 0 | 1 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | Laporan | 20 | 15.000.000 | 4 | 2.940.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2.940.000,00 | 25 | 19,6 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 28.500.000 | 4 | 5.580.000 | 5 | 5.100.000 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5.580.000,00 | 25 | 19,579 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoraal Daerah | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoraal Daerah | Laporan | 0 | 0 | 1 | 1.620.000 | 12 | 11.900.000 | 1 | 1.600.000 | 8,33 | 13,45 | 2 | 3.220.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|-------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Pd Dan Renja Pd | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Pd Dan Renja Pd | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.600.000 | 1 | 0 | 33,33 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan | Layanan | 180 | 26.547.345.160 | 36 | 5.193.830.136 | 12 | 5.618.540.168 | 4 | 408.127.905 | 33,33 | 7,26 | 40 | 5.601.958.041,00 | 22,22 | 21,102 | | |
| | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | Jumlah Orang Penerima Gaji Dan Tunjangan | Orang | 4.270 | 25.787.820.160 | 865 | 5.050.725.136 | 756 | 5.450.335.168 | 189 | 396.127.901 | 25 | 7,27 | 1.054,00 | 5.446.853.037,00 | 24,684 | 21,122 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd | Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd | Dokumen | 60 | 693.000.000 | 12 | 129.800.000 | 12 | 153.600.000 | 3 | 12.000.000 | 25 | 7,81 | 15 | 141.800.000,00 | 25 | 20,462 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd | Laporan | 60 | 19.500.000 | 12 | 3.900.000 | 12 | 3.900.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 3.900.000,00 | 25 | 20 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd | Laporan | 60 | 47.025.000 | 12 | 9.405.000 | 18 | 10.705.000 | 4 | 4 | 22,22 | 0 | 16 | 9.405.004,00 | 26,667 | 20 | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah | layanan | 10 | 1.500.000 | 2 | 270.000 | 4 | 1.199.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270.000,00 | 20 | 18 | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | Jumlah Laporan Penatausahaan Baranng Milik Daerah | laporan | 10 | 1.500.000 | 2 | 270.000 | 4 | 1.199.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270.000,00 | 20 | 18 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Terpenuhi | Orang | 305 | 362.575.000 | 62 | 72.515.000 | 70 | 110.415.000 | 3 | 0 | 4,29 | 0 | 65 | 72.515.000,00 | 21,311 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Administrasi Kepegawaiannya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Dan Perlengkapannya | Orang | 305 | 105.000.000 | 62 | 21.000.000 | 63 | 23.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 21.000.000,00 | 20,328 | 20 | | |
| | Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | laporan | 305 | 11.825.000 | 62 | 2.365.000 | 12 | 2.565.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 65 | 2.365.000,00 | 21,311 | 20 | | |
| | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan | Pegawai | 305 | 245.750.000 | 62 | 49.150.000 | 63 | 84.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49.150.000,00 | 20,328 | 20 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum | Layanan | 7 | 638.053.280 | 7 | 145.201.039 | 25 | 235.135.800 | 5 | 0 | 20 | 0 | 12 | 145.201.039,00 | 171,43 | 22,757 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Laporan | 15 | 28.264.500 | 3 | 5.548.000 | 4 | 1.610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.548.000,00 | 20 | 19,629 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | Paket | 20 | 40.905.000 | 4 | 24.600.000 | 5 | 10.355.000 | 5 | 0 | 100 | 0 | 9 | 24.600.000,00 | 45 | 60,139 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan | Paket | 5 | 162.733.780 | 4 | 7.330.000 | 1 | 27.571.800 | 3 | 0 | 300 | 0 | 7 | 7.330.000,00 | 140 | 4,5043 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan | Paket | 10 | 30.000.000 | 1 | 29.713.756 | 1 | 12.500.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 29.713.756,00 | 20 | 99,046 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 85.500.000 | 2 | 5.699.000 | 12 | 15.480.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 5 | 5.699.000,00 | 8,333 | 6,6655 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | Laporan | 60 | 290.650.000 | 12 | 17.100.000 | 180 | 167.619.000 | 20 | 0 | 11,11 | 0 | 32 | 17.100.000,00 | 53,333 | 5,8834 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-----------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|---------------|--|-----------|---|-------|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Barang Mlik Daerah Penunjang | Laporan | 1 | 395.000.000 | 1 | 76.870.000 | 2 | 187.850.000 | 1 | 0 | 50 | 0 | 2 | 76.870.000,00 | 200 | 19,461 | | |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Laporan Pengadaan Mebel | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Barang Mlik Daerah | Laporan | 25 | 395.000.000 | 5 | 76.870.000 | 2 | 94.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76.870.000,00 | 20 | 19,461 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang | Laporan | 3 | 1.073.250.000 | 3 | 175.490.000 | 144 | 125.793.000 | 6 | 6.250.000 | 4,17 | 4,97 | 9 | 181.740.000,00 | 300 | 16,934 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 45.000.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 7.000.000 | 3 | 1.500.000 | 25 | 21,43 | 15 | 10.500.000,00 | 25 | 23,333 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan | Laporan | 60 | 20.000.000 | 12 | 4.000.000 | 3 | 78.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | Laporan | 120 | 1.008.250.000 | 24 | 162.490.000 | 12 | 40.443.000 | 3 | 4.750.000 | 25 | 11,74 | 27 | 167.240.000,00 | 22,5 | 16,587 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang/Unit Yang Dipelihara | Unit | 7 | 209.875.000 | 7 | 37.374.000 | 170 | 74.450.000 | 22 | 0 | 12,94 | 0 | 29 | 37.374.000,00 | 414,29 | 17,808 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya | Kendaraan | 10 | 135.000.000 | 2 | 26.824.000 | 5 | 14.450.000 | 2 | 0 | 40 | 0 | 4 | 26.824.000,00 | 40 | 19,87 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | Peralatan | 20 | 74.875.000 | 4 | 10.550.000 | 69 | 60.000.000 | 20 | 0 | 28,99 | 0 | 24 | 10.550.000,00 | 120 | 14,09 | | |
| | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Kepemilikan Dokumen | Persen | 100 | 3.743.552.300 | 100 | 421.835.593 | 95 | 462.742.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 421.835.593,00 | 100 | 11,27 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---|-------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|----|---|----|--|--------------------|---|------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan | Dokumen | ### ### | 1.969.217.0 00 | ### ## | 30.418.50 0 | ### ## | 23.297.400 | 588 3 | 0 | 1,53 | 0 | #### ### | 30.418.500,0 0 | 20,8 25 | 1,54 47 | | |
| | Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi Kependudukan | Dokumen | 500 | 80.639.500 | 45 | 4.808.000 | 500 | 6.430.400 | 123 | 0 | 24,6 | 0 | 168 | 4.808.000,00 | 33,6 | 5,96 23 | | |
| | Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dokumen | ### ### | 1.888.577.5 00 | ### ## | 25.610.50 0 | ### ## | 16.867.000 | 576 0 | 0 | 6,26 | 0 | #### ### | 25.610.500,0 0 | 20,8 11 | 1,35 61 | | |
| | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Dokumen | 7.02 5 | 1.774.335.3 00 | 1.5 93 | 391.417.0 93 | 501 0 | 439.444.90 0 | 98 | 0 | 1,96 | 0 | 1.691 ,00 | 391.417.093, 00 | 24,0 71 | 22,0 6 | | |
| | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen | 7.00 0 | 158.298.00 0 | 1.5 88 | 31.320.00 0 | 500 0 | 27.200.000 | 96 | 0 | 1,92 | 0 | 1.684 ,00 | 31.320.000,0 0 | 24,0 57 | 19,7 85 | | |
| | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Fasilitas Pendaftaran Penduduk | Laporan | 15 | 1.534.800.0 00 | 3 | 349.179.4 40 | 5 | 403.994.90 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 349.179.440, 00 | 26,6 67 | 22,7 51 | | |
| | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Laporan | 10 | 81.237.300 | 2 | 10.917.65 3 | 10 | 8.250.000 | 2 | 0 | 20 | 0 | 4 | 10.917.653,0 0 | 40 | 13,4 39 | | |
| | Program Pencatatan Sipil | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Dokumen | | 247.276.70 0 | 100 | 64.137.30 0 | 95 | 76.780.000 | 85 | 0 | 89,47 | 0 | 185 | 64.137.300,0 0 | #DI V/0! | 25,9 37 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|----|---|----|--|--------------------|---|-------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan Yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | Dokumen | | 0 | ### ## | 29.867.50 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | #### ### | 29.867.500,0 0 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko Ktp-El, Formulir, Dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko Ktp-El, Formulir, Dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Tersedia | Dokumen | 0 | 0 | ### ## | 29.867.50 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | #### ### | 29.867.500,0 0 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Laporan | 7.01 0 | 247.276.70 0 | 1.3 54 | 34.269.80 0 | 754 8 | 46.780.000 | 40 | 0 | 0,53 | 0 | 1.394 ,00 | 34.269.800,0 0 | 19,8 86 | 13,8 59 | | |
| | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Dokumen | 7.00 0 | 142.126.70 0 | 1.3 52 | 16.320.00 0 | 100 0 | 18.700.000 | 39 | 0 | 3,9 | 0 | 1.391 ,00 | 16.320.000,0 0 | 19,8 71 | 11,4 83 | | |
| | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | Laporan | 10 | 105.150.00 0 | 2 | 17.949.80 0 | 48 | 28.080.000 | 1 | 0 | 2,08 | 0 | 3 | 17.949.800,0 0 | 30 | 17,0 71 | | |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | | 1.414.710.0 00 | 100 | 213.948.3 00 | 100 | 599.870.00 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 125 | 213.948.300, 00 | #DI V/0! | 15,1 23 | | |
| | Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan Data Kependudukan | Dokumen | | 0 | 12 | 7.811.000 | 5 | 23.388.000 | 2 | 0 | 40 | 0 | 14 | 7.811.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | MOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.388.000 | 2 | 0 | 40 | 0 | 2 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Piak | Laporan | | 1.372.210.000 | 31 | 197.977.300 | 95 | 564.582.000 | 5 | 0 | 5,26 | 0 | 36 | 197.977.300,00 | #DI V/0! | 14,428 | | |
| | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 5 | 1.262.610.000 | 4 | 14.069.300 | 12 | 553.330.000 | 1 | 0 | 8,33 | 0 | 5 | 14.069.300,00 | 100 | 1,1143 | | |
| | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Dokumen | 25 | 109.600.000 | 1 | 145.205.000 | 7 | 5.765.600 | 1 | 0 | 14,29 | 0 | 2 | 145.205.000,00 | 8 | 132,49 | | |
| | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Data | 0 | 0 | 2 | 21.162.000 | 12 | 5.486.400 | 3 | 0 | 25 | 0 | 5 | 21.162.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan | Laporan | 36 | 42.500.000 | 19 | 17.541.000 | 12 | 11.900.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 22 | 17.541.000,00 | 61,111 | 41,273 | | |
| | Pembinaan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 36 | 42.500.000 | 0 | 0 | 12 | 11.900.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 8,3333 | 0 | | |
| | Program Pengelolaan Profil Kependudukan Yang | Jumlah Data Profil Kependudukan Yang | Data | 100 | 15.670.000 | 100 | 3.087.500 | 2 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.087.500,00 | 100 | 19,703 | | |
| | Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah Data Profil Kependudukan | Data | 2 | 15.670.000 | 2 | 3.087.500 | 2 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.087.500,00 | 100 | 19,703 | | |
| | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Data | 6 | 15.670.000 | 2 | 3.087.500 | 2 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.087.500,00 | 33,333 | 19,703 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 50.124.557.050 | 27 | 1.507.858.209 | 100 | 5.151.019.365 | 19 | 1.132.194.292 | 19 | 21,98 | 46 | 2.640.052.501,00 | 46 | 5,27 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 110 | 117.800.000 | 7 | 987.958.209 | 24 | 24.275.000 | 8 | 2.400.000 | 33,33 | 9,89 | 15 | 990.358.209,00 | 13,64 | 840,71 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 83.400.000 | 0 | 0 | 2 | 3.600.000 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka Skpd | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 9.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka Skpd | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.000.000 | 1 | 0 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa Skpd | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 7.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.200.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa Skpd | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 60 | 6.000.000 | 2 | 0 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3,33 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------|---|-------------------|--|------------------|---|--------------|--|---------------------|---|-------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 20 | 6.400.000 | 4 | 0 | 2 | 1.200.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 6 | - | 30 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.475.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah | Laporan | 305 | 46.822.304.600 | 15 | 0 | 12 | 12.600.000 | 3 | 2.400.000 | 25 | 19,05 | 18 | 2.400.000,00 | 5,9 | 0,01 | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 357 0 | 23.413.652.300 | 204 | 950.013.209 | 63 | 4.790.407.865 | 16 | 1.090.644.292 | 25,4 | 22,77 | 220 | 2.040.657.501,00 | 6,16 | 8,72 | | |
| | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 55 | 22.908.352.300 | 3 | 925.573.209 | 658 | 4.671.537.865 | 188 | 1.062.864.292 | 28,57 | 22,75 | 191 | 1.988.437.501,00 | 347,27 | 8,68 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 111.120.000 | 3 | 27.780.000 | 25 | 25 | 3 | 27.780.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd | Jumlah Laporan Akuntansi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntansi SKPD | Laporan | 5 | 476.300.000 | 0 | 24.440.000 | 1 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.440.000,00 | 0 | 5,13 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 25 | 8.000.000 | 1 | 0 | 1 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|------------|---|------------------|--|----------|---|----------|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 90 | 6.000.000 | 4 | 0 | 5 | 1.000.000 | 2 | 0 | 40 | 0 | 6 | - | 6,67 | 0 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 60 | 10.000.000 | 3 | 0 | 18 | 3.000.000 | 4 | 0 | 22,22 | 0 | 7 | - | 11,67 | 0 | | |
| | Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 20 | 20.350.000 | 2 | 0 | 12 | 1.000.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 5 | - | 25 | 0 | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah | Dokumen | 5 | 12.350.000 | 0 | 0 | 4 | 3.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 10 | 4.000.000 | 0 | 0 | 1 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 20 | 4.000.000 | 1 | 0 | 2 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 7 | 1.931.202.450 | 2 | 0 | 1 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 28,57 | 0 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 60 | 1.330.336.225 | 0 | 10.125.000 | 7 | 171.406.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.125.000,00 | 0 | 0,76 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|------------|---|----------|--|---------------------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 60 | 44.815.000 | 0 | 0 | 12 | 5.858.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 60 | 67.504.225 | 0 | 0 | 12 | 9.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 60 | 142.630.000 | 0 | 0 | 12 | 23.345.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15 | 125.917.000 | 0 | 0 | 12 | 18.654.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 60 | 155.000.000 | 0 | 0 | 3 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 120 | 65.000.000 | 2 | 0 | 12 | 11.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1,67 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | 0 | 0 | 10.125.000 | 24 | 88.749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.125.000,0 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.000.000 | 0 | 26.100.000 | 0 | 63,66 | 0 | 26.100.000,0 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 907.900.000 | 1 | 0 | 4 | 41.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 50 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 60 | 898.550.000 | 0 | 27.820.000 | 2 | 59.570.000 | 0 | 13.050.000 | 0 | 21,91 | 0 | 40.870.000,0 | 0 | 4,55 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 9.350.000 | 3 | 0 | 35 | 1.870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|---------------|---|---------------|--|------------|---|-------|--|------------------|---|---------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 325.000.000 | 0 | 27.820.000 | 12 | 57.700.000 | 3 | 13.050.000 | 25 | 22,62 | 3 | 40.870.000,00 | 150 | 12,58 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 175 | 225.000.000 | 0 | 0 | 2 | 61.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | 82 | 0 | 25 | 9.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,4 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 10 | 100.000.000 | 0 | 0 | 3 | 31.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | | | | | 2 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Persentase Desa yang memiliki kerja sama baik antar Pemerintah Desa Maupun dengan Pihak ketiga dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persen | 100 | 0 | 27 | 1.507.858.209 | 100 | 1.491.950.000 | 1 | 0 | 0,75 | 0 | 27,75 | 1.507.858.209,00 | 27,75 | #DIV/0! | | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa | Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka kerjasama pembangunan Desa | Desa | | | | | 80 | 1.491.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|----|---|---------------|---|---------------|--|----|---|----|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Dokumen | | | | | 1 | 1.491.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | Persen | 100 | 0 | 27 | 1.507.858.209 | 50 | 10.300.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1.507.858.209,00 | 28 | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | Desa | | | | | 40 | 10.300.000 | 80 | 0 | 200 | 0 | 80 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan Dan Pemberdayaan Bum Desa Dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Dokumen | | | | | 1 | 10.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persen | | | | | 100 | 13.400.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---------------------------------------|----|---|---------------|---|------------|--|----|---|----|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan | Lembaga | | | | | 534 | 13.400.000 | 118 | 0 | 22,1 | 0 | 118 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Dokumen | | | | | 1 | 13.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Persentase Desa yang memiliki kerja sama baik antar Pemerintah Desa maupun dengan Pihak ketiga dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persen | 100 | 0 | 27 | 1.507.858.209 | 100 | 14.655.000 | 1 | 0 | 0,75 | 0 | 27,75 | 1.507.858.209,00 | 27,75 | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa | Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka kerjasama pembangunan Desa | Desa | | | | | 80 | 14.655.000 | 80 | 0 | 100 | 0 | 80 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Dokumen | | | | | 2 | 14.655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|----------------|---------------------------------------|----|---|----|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persen | | | | | 100 | 1.198.095.000 | 22 | 363.500.000 | 22,1 | 30,34 | 22,1 | 363.500.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan | Lembaga | | | | | 534 | 1.198.095.000 | 118 | 363.500.000 | 22,1 | 30,34 | 118 | 363.500.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Dokumen | | | | | 2 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|---------|---|----|---|---------------|--|---------------|--|-------------|---|-------|--|------------------|---|-------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | | | | | 80 | 30.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Unit | | | | | 80 | 16.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Dokumen | | | | | 8 | 1.081.095.000 | 1 | 363.500.000 | 12,5 | 33,62 | 1 | 363.500.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Penataan Desa | Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa | Persen | 100 | 0 | 27 | 1.507.858.209 | 75 | 6.530.000 | 100 | 0 | 133,33 | 0 | 127 | 1.507.858.209,00 | 127 | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa | Desa | | | | | 60 | 6.530.000 | 80 | 0 | 133,33 | 0 | 80 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|----|---|----|---|-------------|--|----|---|----|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | | | | | 80 | 6.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | Desa | | | | | 56 | 5.485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Penamaan Dan Kode Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Desa | | | | | 2 | 21.804.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | Persen | | | | | 50 | 226.290.000 | 100 % | 0 | 2 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | Desa | | | | | 40 | 226.290.000 | 80 | 0 | 200 | 0 | 80 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Dokumen | | | | | 5 | 47.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Dokumen | | | | | 1 | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan | Orang | | | | | 80 | 59.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|---------|---|----|---|----|--|------------------|--|----|---|----|--|----|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Peningkatan Kapasitas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Laporan | | | | | 1 | 4.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Bpd | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Orang | | | | | 160 | 9.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Evaluasi Dan Pengawasan Peraturan Desa | Jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Dokumen | | | | | 1 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pembinaan Laporan Kepala Desa | Laporan | | | | | 1 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Dokumen | | | | | 5 | 7.500.000,0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Dokumen | | | | | 2 | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Dokumen | | | | | 2 | 9.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | Desa | | | | | 49 | 59.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|----------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persen | | | | | 100 | 25.000.000 | 22 | 0 | 22,1 | 0 | 22,1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan | Lembaga | | | | | 534 | 25.000.000 | 118 | 0 | 22,1 | 0 | 118 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Orang | | | | | 50 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Peraentase jumlh layanan penunjang yang dilaksanakan | Persen | 100 | 80.620.861.985 | 88 | 3.247.445.197 | 100 | 6.673.480.350 | 88 | 1.204.378.361 | 88 | 18,05 | 175,5 | 4.451.823.558,00 | 175,5 | 5,52 | Dinas Perhubun gan | |
| | Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 105 | 92.595.000 | 5 | 3.480.000 | 19 | 39.760.000 | 3 | 2.250.000 | 15,79 | 5,66 | 8 | 5.730.000,00 | 8 | 6 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 20.125.000 | 0 | 0 | 2 | 7.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd | Jumlah Dokumen RKA-PD | Dokumen | 5 | 12.250.000 | 0 | 0 | 3 | 4.400.000 | 1 | 0 | 33,33 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD | Dokumen | 5 | 15.000.000 | 0 | 0 | 2 | 3.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd | Jumlah Dokumen DPA-PD | Dokumen | 5 | 13.500.000 | 1 | 0 | 3 | 4.400.000 | 1 | 0 | 33,33 | 0 | 2 | - | 40 | 0 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD | Dokumen | 5 | 17.400.000 | 0 | 3.480.000 | 1 | 3.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480.000,00 | 0 | 20 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | Jumlah Dokumen SAKIP - PD | Dokumen | 60 | 10.000.000 | 3 | 0 | 1 | 3.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah | Dokumen | 20 | 4.320.000 | 1 | 0 | 4 | 3.290.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | - | 10 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.500.000 | 0 | 2.250.000 | 34 | 21,43 | 0,34 | 2.250.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Laporan | 225 | 69.158.579.485 | 10 | 2.958.130.197 | 45 | 4.461.110.850 | 277 | 942.728.361 | 615,56 | 21,13 | 287 | 3.900.858.558,00 | 127,56 | 5,6405 | | |
| | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 11240 | 65.532.179.485 | 465 | 2.826.810.197 | 1198 | 4.190.510.850 | 270 | 942.728.361 | 22,54 | 22,5 | 735 | 3.769.538.558,00 | 6,5391 | 5,7522 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 3.611.300.000 | 3 | 131.320.000 | 12 | 266.040.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 6 | 131.320.000,00 | 10 | 3,6364 | | |
| | Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 860.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)// Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|------------|--|----|---|----|--|----|---|---------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 9.250.000 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 90 | 5.850.000 | 4 | 0 | 6 | 1.700.000 | 1 | 0 | 16,67 | 0 | 5 | - | 5,5556 | 0 | | |
| | Adminitarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 11.875.000 | 0 | 0 | 1 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD | Dokumen | 5 | 11.875.000 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD - PD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan BMD - PD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Dasarh | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 800 | 155.000.000 | 154 | 0 | 160 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | - | 19,25 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 100 0 | 155.000.00 0 | 0 0 | | 1 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Jenis | 7 | 4.621.162.500 | 2 | 39.580.000 | | 323.209.500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | 39.580.000,00 | 28,571 | 0,8565 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jenis | 5 | 65.775.000 | 0 0 | | 6 | 32.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jenis | 5 | 15.140.000 | 0 0 | | 8 | 1.704.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jenis | 5 | 1.008.367.500 | 0 0 | | 4 | 92.815.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jenis | 5 | 374.500.000 | 0 0 | | 2 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Orang | 60 | 62.500.000 | 3 0 | | 190 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kali | 60 | 3.094.880.000 | 3 0 | 39.580.000 | 450 | 157.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.580.000,00 | 5 | 1,2789 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 600.000.000 | 1 | 0 | | 585.500.000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | - | 50 | 0 | | |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 150 | 225.000.000 | 30 0 | | 72 | 318.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 20 | 0 | | |
| | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 75 | 375.000.000 | 0 0 | | 23 | 267.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---|---------------|---|-------------|--|----------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|---------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 3 | 5.556.650.000 | 3 | 227.050.000 | | 1.107.900.000 | 249 | 259.400.000 | #DIV/0! | 23,41 | 252 | 486.450.000,00 | 8400 | 8,7544 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Surat | 60 | 40.000.000 | 3 | 0 | 1440 | 5.000.000 | 244 | 0 | 16,94 | 0 | 247 | - | 411,67 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jenis | 60 | 5.516.650.000 | 3 | 227.050.000 | 6 | 1.102.900.000 | 5 | 259.400.000 | 83,33 | 23,52 | 8 | 486.450.000,00 | 13,333 | 8,8179 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Laporan | 4 | 425.000.000 | 4 | 138.107.150 | 9 | 113.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138.107.150,00 | 100 | 32,496 | | |
| | Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 40 | 250.000.000 | 6 | 74.690.000 | 11 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74.690.000,00 | 15 | 29,876 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan Dan Mensin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 250 | 125.000.000 | 50 | 20.500.000 | 10 | 48.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20.500.000,00 | 20 | 16,4 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 50.000.000 | 1 | 8.242.500 | 1 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.242.500,00 | 20 | 16,485 | | |
| | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jenis | 0 | 1.738.894.958 | | | 1 | 7.039.421.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | 0 | | |
| | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | Jenis | 0 | 0 | | | 1 | 722.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|----|---|----------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi | Dokumen | 0 | 0 | | | 100 | 13.890.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengawasan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Terminal Tipe C yang di Awasi | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 450.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama Dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 250 | 50.000.000 | | | 1 | 13.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | | | 4 | 14.325.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 50 | 50.000.000 | | | 4 | 14.325.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | | |
| | Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 4 | 1.162.895.000 | | | 4 | 1.941.864.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | - | 25 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 20 | 1.162.895.000 | | | 4 | 290.609.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Pembangunan Rute Aman Sekolah (Rass) | Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun | Unit | | 0 | | | 3 | 138.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Monitoring Dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (Zoss) | Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi | Laporan | 0 | 0 | | | 4 | 6.905.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss) | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | Unit | 0 | 0 | | | 4 | 164.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 0 | 0 | | | 1 | 9.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | Dokumen/ Unit | 0 | 0 | | | 2 | 1.313.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan | Laporan | 0 | 0 | | | 4 | 18.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|-------------|--|---------|---|----|--|----------|---|----------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Jalan Kabupaten/Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupeten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | 0 | 0 | | | 13.520.000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | | |
| | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Laporan | 0 | 0 | | | 4 | 7.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | Laporan | | 0 | | | 4 | 6.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengujian Berkala Kendaran Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Unit | 0 | 0 | | | 5000 | 331.280.000 | 2157 | 0 | 43,14 | 0 | 2.157,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotoryang Tersedia | Unit | 0 | 0 | | | 6 | 119.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | Unit | 10500 | 525.999.958 | | | 5.000 | 21.800.000 | 1104 | 0 | 22,08 | 0 | 1.104,00 | - | 10,514 | 0 | | |
| | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Dokumen | 0 | 0 | | | 5.000 | 75.000.000 | 1049 | 0 | 20,98 | 0 | 1.049,00 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 15 | 82.900.000 | | | 4 | 10.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|---------|---|-----------------|---|----|--|------------|--|----|---|----|--|----|---|-------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Laporan | 70 | 49.450.000 | | | 4 | 16.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Unit | 55 | 159.149.95 8 | | | 11 | 62.000.000 | 3 | 0 | 27,27 | 0 | 3 | - | 5,45 45 | 0 | | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 100 | 169.550.00 0 | | | 4 | 16.560.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | | |
| | Monitoring Dan Evaluasi Peyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 20 | 64.950.000 | | | 4 | 9.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase arus penumpang angkutan penyeberangan sungai yang melalui dermaga/pelabuhan perahu penyeberangan | Persen | 0 | 0 | | | 100 | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Unit | 0 | 0 | | | 4 | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Laporan | | | | | 4 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|------------|--|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia | Unit | | | | | 2 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 30.084.648.850 | | | 100 | 5.915.050.538 | 100 | 843.166.800 | 100 | 14,25 | 100 | 843.166.800,00 | 100 | 2,8 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 95 | 51.965.000 | | | 19 | 19.801.000 | 10 | 0 | 52,63 | 0 | 10 | - | 11 | 0 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 7.225.000 | | | 2 | 1.355.000 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 7.490.000 | | | 1 | 1.450.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 7.375.000 | | | 1 | 1.475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 7.375.000 | | | 1 | 1.475.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 7.500.000 | | | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 7.500.000 | | | 1 | 1.446.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 60 | 7.500.000 | | | 12 | 1.500.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Laporan | | | | | 12 | 9.600.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 235 | 27.133.861.350 | | | 47 | 5.563.492.538 | 47 | 829.971.300 | 100 | 14,92 | 47 | 829.971.300,00 | 20 | 3,0588 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4060 | 26.348.086.350 | | | 812 | 5.363.606.438 | 232 | 788.311.300 | 28,57 | 14,7 | 232 | 788.311.300,00 | 5,7143 | 2,9919 | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Laporan | 0 | 0 | | | 12 | 14.326.100 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 771.100.000 | | | 12 | 182.760.000 | 3 | 41.660.000 | 25 | 22,79 | 3 | 41.660.000,00 | 5 | 5,4027 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-------------|--|-----------|---|------|--|--------------|---|------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 15 | 8.025.000 | | | 3 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Laporan | 90 | 6.650.000 | | | 18 | 1.300.000 | 4 | 0 | 22,22 | 0 | 4 | - | 4,44 44 | 0 | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah | Dokumen | 70 | 37.750.000 | | | 14 | 8.380.000 | 14 | 0 | 100 | 0 | 14 | - | 20 | 0 | | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 10 | 7.150.000 | | | 2 | 1.580.000 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 60 | 30.600.000 | | | 12 | 6.800.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 290 | 15.650.000 | | | 58 | 2.450.000 | 58 | 0 | 100 | 0 | 58 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 60 | 15.650.000 | | | 12 | 2.450.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 30 | 1.456.372.500 | | | 6 | 132.583.000 | 6 | 2.245.500 | 100 | 1,69 | 6 | 2.245.500,00 | 20 | 0,15 42 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 19.650.000 | | | 1 | 3.000.000 | 1 | 2.245.500 | 100 | 74,85 | 1 | 2.245.500,00 | 20 | 11,427 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 166.635.000 | | | 1 | 16.894.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 59.567.500 | | | 2 | 9.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 60.000.000 | | | 12 | 7.000.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 1.150.520.000 | | | 12 | 95.889.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 5 | 75.000.000 | | | 1 | 26.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 75.000.000 | | | 2 | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 15 | 955.800.000 | | | 3 | 75.044.000 | 3 | 10.950.000 | 100 | 14,59 | 3 | 10.950.000,00 | 20 | 1,1456 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 27.500.000 | | | 12 | 4.994.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 3.000.000 | | | 12 | 600.000 | 3 | 150.000 | 25 | 25 | 3 | 150.000,00 | 5 | 5 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-------------|--|------------|---|-------|--|--------------|---|---------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 925.300.000 | | | 12 | 69.450.000 | 3 | 10.800.000 | 25 | 15,55 | 3 | 10.800.000,0 | 5 | 1,1672 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 10 | 358.250.000 | | | 2 | 87.300.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 20 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 450 | 248.250.000 | | | 86 | 47.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Tahun | 0 | 0 | | | 1 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 110.000.000 | | | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase penyebaran informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa | Persen | 100 | 3.132.697.069 | | | 100 | 357.957.000 | 100 | 34.700.000 | 100 | 9,69 | 100 | 34.700.000,0 | 100 | 1,11 | | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis informasi dan komunikasi publik yang di kelola | Jenis | 3 | 3132697069 | | | 3 | 357.957.000 | 3 | 34.700.000 | 100 | 9,69 | 3 | 34.700.000,0 | 100 | 1,1077 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|------------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | Media | 0 | 0 | | | 1 | 1.206.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Diseminasi Informasi | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | Persen | 0 | 0 | | | 80 | 119.136.000 | 25 | 0 | 31,25 | 0 | 25 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | KIM | 0 | 0 | | | 14 | 1.600.000 | 14 | 0 | 100 | 0 | 14 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian | Laporan | 0 | 0 | | | 12 | 6.180.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | Media | 60 | 3.132.697.065 | | | 4 | 191.620.000 | 4 | 34.700.000 | 100 | 18,11 | 4 | 34.700.000,00 | 6,6667 | 1,1077 | | |
| | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | Permohonan | 60 | 4 | | | 28 | 16.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Konten | Jumlah Konten Informasi Publik | 4 | | | | | 4 | 11.650.000 | 4 | 0 | 100 | 0 | 4 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|-------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | Orang | 0 | 0 | | | 4 | 9.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE | Persen | 100 | 25.059.050.000 | | | 90 | 4.992.850.000 | 90 | 511.066.666 | 100 | 10,24 | 90 | 511.066.666,00 | 90 | 2,04 | | |
| | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah domain dan sub domain yang telah ditetapkan dan dikelola lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota | Domain/Sub domain | 400 | 59.050.000 | | | 63 | 10.950.000 | 63 | 2.000.000 | 100 | 18,26 | 63 | 2.000.000,00 | 15,75 | 3,387 | | |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 60 | 59.050.000 | | | 12 | 10.950.000 | 3 | 2.000.000 | 25 | 18,26 | 3 | 2.000.000,00 | 5 | 3,387 | | |
| | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi informatika layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi | Aplikasi | 10 | 25.000.000.000,00 | | | 40 | 4.981.900.000 | 40 | 509.066.666 | 100 | 10,22 | 40 | 509.066.666,00 | 400 | 2,0363 | | |
| | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Dokumen | 0 | 0 | | | 12 | 2.600.000.000 | 3 | 416.666.666 | 25 | 16,03 | 3 | 416.666.666,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Dokumen | 0 | 0 | | | 2 | 201.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|----------------|---|----|---|-------------------|--|------------|---|----------|--|---------------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemeintah daerah | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | Unit | 0 | 0 | | | 7 | 317.560.000 | 2 | 68.400.000 | 28,57 | 21,54 | 2 | 68.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | PD | 60 | 25.000.000.000 | | | 42 | 1.854.800.000 | 42 | 24.000.000 | 100 | 1,29 | 42 | 24.000.000,00 | 70 | 0,096 | | |
| | Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan | Aplikasi | 0 | 0 | | | 7 | 7.820.000 | 2 | 0 | 28,57 | 0 | 2 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Persen | 0 | 0 | | | 100 | 55.526.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros | Dokumen | 0 | 0 | | | 12 | 55.526.000 | 12 | 0 | 100 | 0 | 12 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | Orang | 0 | 0 | | | 10 | 14.238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan kualitas Data Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat di akses oleh pengguna data | Kegiatan | 0 | 0 | | | 100 | 11.518.000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | Metadata | 0 | 0 | | | 28 | 29.770.000 | 17 | 0 | 60,71 | 0 | 17 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|--|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|----------|--------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi | Persen | 100 | 169.000.000 | | | 100 | 178.111.000 | 100 | 24.750.000 | 100 | 13,9 | 100 | 24.750.000,0 | 100 | 14,64 | | |
| | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat daerah yang menerapkan persandian berupa tanda tangan elektronik untuk pengamanan informasi | PD | 40 | 84.000.000 | | | 40 | 170.223.000 | 40 | 24.750.000 | 100 | 14,54 | 40 | 24.750.000,0 | 100 | 29,464 | | |
| | Penyediaan Layanan Kemanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Dokumen | 0 | 0 | | | 2 | 22.963.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Laporan | 36 | 84.000.000 | | | 12 | 147.260.000 | 3 | 24.750.000 | 25 | 16,81 | 3 | 24.750.000,0 | 8,3333 | 29,464 | | |
| | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi | PD | 40 | 85.000.000 | | | 40 | 7.888.000 | 40 | 0 | 100 | 0 | 40 | - | 100 | 0 | | |
| | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | PD | 40 | 85.000.000 | | | 40 | 7.888.000 | 40 | 0 | 100 | 0 | 40 | - | 100 | 0 | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana | Persen | 100 | 38.874.116.415 | 99,34 | 15.396.000 | 100 | 6.384.832.868 | 30 | 415.977.905 | 30 | 6,52 | 129,34 | 431.373.905,00 | 129,34 | 1,11 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|------------|---|-----------|---|------------|--|-----------|---|------|--|--------------|---|--------|-------------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perindustrian dan Perdagangan | |
| | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 120 | 77.500.000 | 24 | 1.865.000 | 29 | 31.449.300 | 4 | 1.600.000 | 13,79 | 5,09 | 28 | 3.465.000,00 | 23 | 4 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 9.325.000 | 2 | 4.210.000 | 5 | 4.699.300 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 4.210.000,00 | 30 | 45,147 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd | Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd | Dokumen | 5 | 21.050.000 | 1 | 2.665.000 | 1 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.665.000,00 | 20 | 12,66 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd | Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd | Dokumen | 5 | 13.425.000 | 1 | 2.785.000 | 1 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.785.000,00 | 20 | 20,745 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd | Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd | Dokumen | 5 | 13.925.000 | 1 | 2.125.000 | 1 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.125.000,00 | 20 | 15,26 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd | Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd | Dokumen | 5 | 10.625.000 | 1 | 821.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 821.000,00 | 40 | 7,7271 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|-------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | Laporan | 30 | 4.525.000 | 6 | 925.000 | 5 | 5.100.000 | 1 | 0 | 20 | 0 | 7 | 925.000,00 | 23,333 | 20,442 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 60 | 4.625.000 | 12 | 4.997.276.479 | 12 | 11.900.000 | 1 | 1.600.000 | 8,33 | 13,45 | 13 | 4.998.876.479,00 | 21,667 | 108084 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.600.000 | 1 | 0 | 33,33 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 220 | 27.906.821.415 | 44 | 4.836.375.479 | 12 | 5.618.540.168 | 4 | 408.127.905 | 33,33 | 7,26 | 48 | 5.244.503.384,00 | 21,818 | 18,793 | | |
| | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn | Orang/bulan | 4480 | 27.076.073.915 | 812 | 158.290.000 | 756 | 5.450.335.168 | 189 | 396.127.901 | 25 | 7,27 | 1.001,00 | 554.417.901,00 | 22,344 | 2,0476 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Skpd | Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Skpd | Dokumen | 60 | 817.300.000 | 12 | 2.611.000 | 12 | 153.600.000 | 3 | 12.000.000 | 25 | 7,81 | 15 | 14.611.000,00 | 25 | 1,7877 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd | Laporan | 90 | 13.447.500 | 18 | 3.539.000 | 12 | 3.900.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 21 | 3.539.000,00 | 23,333 | 26,317 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Dokumen | 65 | 9.570.000 | 13 | 1.634.000 | 18 | 10.705.000 | 4 | 4 | 22,22 | 0 | 17 | 1.634.004,00 | 26,154 | 17,074 | | |
| | Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd | Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd | Laporan | 60 | 9.570.000 | 12 | 17.956.000 | 4 | 1.199.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17.956.000,00 | 20 | 187,63 | | |
| | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.199.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110.415.000 | 3 | 0 | 4,29 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur Pd Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 295 | 15.955.000 | 58 | 14.800.000 | 63 | 23.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14.800.000,00 | 19,661 | 92,761 | | |
| | Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 295 | 7.930.000 | 58 | 1.605.000 | 12 | 2.565.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 61 | 1.605.000,00 | 20,678 | 20,24 | | |
| | Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 295 | 8.025.000 | 58 | 204.223.195 | 63 | 84.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 204.223.195,00 | 19,661 | 2544,8 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Pd Yang Dilaksanakan | Jenis | 6 | 1.643.460.000 | 5 | 9.243.000 | 25 | 235.135.800 | 5 | 0 | 20 | 0 | 10 | 9.243.000,00 | 166,67 | 0,5624 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | Paket | 5 | 50.070.000 | 1 | 45.610.000 | 4 | 1.610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.610.000,00 | 20 | 91,092 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------|---|----------------------|--|------------------|---|--------------|--|----------------------|---|-----------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan | Paket | 10 | 306.190.000 | 2 | 27.100.000 | 5 | 10.355.000 | 5 | 0 | 100 | 0 | 7 | 27.100.000,00 | 70 | 8,8507 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan | Paket | 5 | 225.000.000 | 1 | 0 | 1 | 27.571.800 | 3 | 0 | 300 | 0 | 4 | - | 80 | 0 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1500 | 480.000.000 | 225 | 70.270.195 | 1 | 12.500.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 226 | 70.270.195,00 | 15,067 | 14,64 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | Laporan | 895 | 582.200.000 | 134 | 64.870.000 | 12 | 15.480.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 137,25 | 64.870.000,00 | 15,335 | 11,142 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Bmd Pd Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | | 0 | 1 | 64.870.000 | 180 | 167.619.000 | 20 | 0 | 11,11 | 0 | 21 | 64.870.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 5 | 1.453.914.000 | 2 | 187.850.000 | 1 | 0 | 50 | 0 | 6 | 1.453.914.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 8.620.810.000 | 2 | 10.164.000 | 1 | 93.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.164.000,00 | 100 | 0,1179 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 5 | 60.060.000 | 1 | 1.443.750.000 | 2 | 94.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.443.750.000,00 | 20 | 2403,8 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | Laporan | 60 | 8.560.750.000 | 12 | 131.304.163 | 144 | 125.793.000 | 6 | 6.250.000 | 4,17 | 4,97 | 18 | 137.554.163,00 | 30 | 1,6068 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Bmd Pd Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Berada Dalam Kondisi Baik | Jenis | 3 | 600.000.000 | 3 | 31.730.000 | 12 | 7.000.000 | 3 | 1.500.000 | 25 | 21,43 | 6 | 33.230.000,00 | 200 | 5,5383 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---|------------|---|-------------------|--|-----------|---|----------|--|---------------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 95 | 250.000.000 | 3 | 37.770.000 | 3 | 78.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.770.000,00 | 3,1579 | 15,108 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | Unit | 120 | 200.000.000 | 24 | 61.804.163 | 12 | 40.443.000 | 3 | 4.750.000 | 25 | 11,74 | 27 | 66.554.163,00 | 22,5 | 33,277 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 130 | 150.000.000 | 26 | 85.612.000 | 170 | 74.450.000 | 22 | 0 | 12,94 | 0 | 48 | 85.612.000,00 | 36,923 | 57,075 | | |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | Persen | 100 | 67.700.000 | | | 80 | 16.755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam | Unit Usaha | 935 | 67.700.000 | 0 | 0 | 80 | 16.755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 935 | 67.700.000 | 0 | 0 | 80 | 16.755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persen | | 0 | 0 | 0 | 80 | 13.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|------------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|------------|--|----|---|----|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi Berkualitas | Unit Usaha | | 0 | 0 | 0 | 82 | 13.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi Yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Unit Usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 13.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Penilaian Kesehatan Sp/Usp Koperasi | Persentase Koperasi Aktif | Persen | | 106.500.000 | 0 | 0 | 20, 73 | 31.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | 0 | | |
| | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Memperoleh Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi | Unit Usaha | 353 | 106.500.000 | 0 | 0 | 80 | 31.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Unit Usaha | 1765 | 106.500.000 | 0 | 0 | 80 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, Dan Permodalan | Jumlah Koperasi Yang Diberikan Penilaian Kesehatan | Unit Usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan | Persen | | 0 | 0 | 0 | 70, 34 | 15.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|------------|---------------------------------------|-------------------|---|----|---|-----------------|--|----|---|----|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengurus Koperasi Yang Memiliki Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas | Orang | | 0 | 0 | 0 | 100 | 15.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi | Jumlah Sdm Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas | Persen | 75 | 331.000.00 0 | 0 | 0 | 70, 34 | 45.624.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi Yang Memperoleh Perlindungan Usaha Dan Pemberdayaan Koperasi | Unit Usaha | 300 | 331.000.00 0 | 0 | 0 | 60 | 45.624.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Melalui Aspek Kelembagaan, Produksi, Pemasaran, Keuangan, Dan Inovasi Teknologi | Unit Usaha | 500 | 331.000.00 0 | 0 | 0 | 60 | 45.624.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) | Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal | Persen | 98 | 2.336.142.5 50 | 0 | 0 | 65, 12 | 379.531.50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|------------|---------------------------------------|-----------------|---|----|---|-----------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pembinaan Dalam Bentuk Bantuan Modal Kemitraan, Fasilitas Kemudahan Perizinan, Pelatihan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha. | Unit Usaha | ### ### | 2.336.142.50 | 0 | 0 | 245 82 | 379.531.50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | Unit Usaha | 300 | 143.645.00 0 | 0 | 0 | 60 | 107.945.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan | Unit Usaha | 6.23 4 | 803.137.55 0 | 0 | 0 | ### ## | 141.900.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan Dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Unit Usaha | 500 | 250.000.00 0 | 0 | 0 | 545 | 50.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Jumlah Usaha Mikro Yang Terfasilitasi Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Unit Usaha | 500 | 720.000.00 0 | 0 | 0 | 110 | 10.526.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata Dalam Basis Data Usaha Mikro | Unit Usaha | 167 375 | 169.360.00 0 | 0 | 0 | ### ## | 34.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Umkm Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Umkm Dan Kewirausahaan Melalui | Jumlah Sdm Yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro Dan Kewirausahaan | Orang | 500 | 250.000.00 0 | 0 | 0 | 60 | 34.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|------------|---------------------------------------|------------|---|----|---|------------|--|-------------|---|-----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pendidikan Dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Umkm | Proporsi Ukm Menjalिन Kemitraan Dan Ekspor | Persen | | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro Yang Meningkat Skala Usahanya Menjadi Usaha Kecil Melalui Pelatihan Pengembangan Produksi Dan Pengeolahan, Pemasaran, Sdm Serta Desain Dan Teknologi | Unit Usaha | | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro Yang Terfasilitasi Dalam Inkubator Wirausaha | Unit Usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 24.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi | Persen | | 0 | 0 | 0 | 85 | 8.630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Tanda Daftar Gudang Yang Diterbitkan | TDP | | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Sarana Prasarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya | Persen | 15 | 27.300.000 | 0 | 0 | 60 | 688.100.00 | 60 | 688.100.000 | 100 | 100 | 60 | 688.100.000,00 | 400 | 252 0,5 | | |
| | Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun Dan | Unit | 5 | 27.300.000 | | | 22 | 688.100.00 | 22 | 688.100.000 | 100 | 100 | 22 | 688.100.000,00 | 440 | 252 0,5 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|-------------|--|-------------|---|-----|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Dikelola Dengan Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 200 | 27.300.000 | 0 | 0 | 25 | 688.100.000 | 25 | 688.100.000 | 100 | 100 | 25 | 688.100.000,00 | 12,5 | 2520,5 | | |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persen | | 112.250.000 | 0 | 0 | 0 | 6.120.000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | - | #DIV/0! | 0 | | |
| | Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Bahan Pokok Dan Barang Penting Yang Harganya Dapat Dikendalikan | Jenis | 100 | 73.000.000 | 0 | 0 | 22 | 4.080.000 | 22 | 0 | 100 | 0 | 22 | - | 22 | 0 | | |
| | Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Laporan | 22 | 36.500.000 | 0 | 0 | 12 | 2.040.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 13,636 | 0 | | |
| | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 1215 | 36.500.000 | 0 | 0 | 12 | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Petani/Nelayan Yang Mendapatkan Pupuk Bersubsidi | Orang | 22 | 39.250.000 | 0 | 0 | ### | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|--------------------------|---|-------------------------|---|----------|--|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|----------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Dengan Realisasi Minimal 90% | Laporan | 125 0 | 39.250.000 | 0 | 0 | 12 | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Pengembangan Ekspor | Nilai Ekspor Barang | Rp dim Milyar | 60 | 30.750.000 | 0 | 0 | 194 0 | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Produk Ekspor Unggulan Yang Dipromosikan Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang | Jenis | | 30.750.000 | 0 | 0 | 2 | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | 0 | | |
| | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | Pelaku Usaha | 420 | 30.750.000 | 0 | 0 | 2 | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | Persen | 100 | 357.650.00 0 | 0 | 0 | 75 | 50.565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan | Jumlah Unit Usaha Perdagangan Yang Memiliki Cap Tanda Tera | Unit | 285 0 | 357.650.00 0 | 0 | 0 | 465 | 50.565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Unit | 471 5 | 291.650.00 0 | 0 | 0 | 154 9 | 38.665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha Di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina | Orang | 440 | 66.000.000 | 0 | 0 | 50 | 11.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------------|---------------------------------------|----------------|---|----|---|-------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dan Kawasan Industri | Persen | 100 | 14.589.791.557 | 0 | 0 | 60 | 244.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Luas Areal Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Yang Sesuai Dengan Rtrw | Ha | 200 | 14.589.791.557 | 0 | 0 | 350 | 244.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri | Dokumen | 15 | 12.754.901.557 | 0 | 0 | 2 | 100.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | 9 | 1.834.890.000 | 0 | 0 | 1 | 143.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat Dan Terkini | Persen | 100 | 146.100.000 | 0 | 0 | 100 | 10.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk Iui, Ipi, Iuk Dan Ipi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Informasi Yang Tersedia Dan Termantfaatkan Untuk Iui, Ipi, Iuk Dan Ipi | Jenis | 5 | 146.100.000 | 0 | 0 | 1 | 10.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem | Dokumen | 5 | 146.100.000 | 0 | 0 | 1 | 10.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|------|--|------------------|---|--------|--|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Informasi Industri Nasional (Siinas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 81.816.487.435 | 100 | | 100 | 6.987.332.757 | 100 | 1.383.772.479 | 100 | 19,8 | 200 | 1.383.772.479,00 | 200 | 1,69 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 95 | 351.190.000 | 4 | 1.750.520.491 | 19 | 57.414.000 | 1 | 2.400.000 | 5,26 | 4,18 | 5 | 1.752.920.491,00 | 5 | 499 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 187.995.000 | 2 | 14.265.000 | 2 | 8.418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.265.000,00 | 20 | 7,588 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka Skpd | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 45.780.000 | 1 | 7.576.000 | 1 | 4.591.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.576.000,00 | 20 | 16,549 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka Skpd | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 19.945.000 | 0 | 3.989.000 | 1 | 4.322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989.000,00 | 0 | 20 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa Skpd | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 18.735.000 | 1 | 0 | 1 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa Skpd | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 13.500.000 | 0 | 2.700.000 | 1 | 4.881.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000,00 | 0 | 20 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 17.745.000 | 0 | 0 | 1 | 7.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 60 | 47.490.000 | 0 | 0 | 12 | 5.419.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.907.000 | 1 | 2.400.000 | 100 | 16,1 | 1 | 2.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 210 | 72.628.942.660 | 13 | 0 | 42 | 5.759.774.757 | 0 | 1.260.569.739 | 0 | 21,89 | 13 | 1.260.569.739,00 | 6,19 05 | 1,73 56 | | |
| | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 5575 | 36.324.618.830 | 392 | 1.550.975.491 | 54 | 5.586.141.757 | 14 | 1.239.689.739 | 25,93 | 22,19 | 406 | 2.790.665.230,00 | 7,28 25 | 7,68 26 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 35.372.303.830 | 4 | 1.527.675.491 | 12 | 166.440.000 | 3 | 20.880.000 | 25 | 12,55 | 7 | 1.548.555.491,00 | 11,6 67 | 4,37 79 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|------------|---|--------------------|--|------------------|---|-------------|--|---------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 60 | 906.950.000 | 4 | 23.300.000 | 12 | 3.644.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.300.000,00 | 6,6667 | 2,5691 | | |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Laporan | 20 | 25.070.000 | 1 | 0 | 4 | 3.549.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah | Dokumen | 5 | 7.750.000 | 0 | 0 | 1 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 7.750.000 | 0 | 0 | 1 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 390 | 910.500.000 | 78 | 0 | 60 | 23.399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | - | 20 | 0 | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Paket | 10 | 575.000.000 | 0 | 0 | 1 | 15.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 60 | 335.500.000 | 0 | 0 | 12 | 7.899.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 4.137.788.600 | 1 | 0 | 6 | 475.395.000 | 2 | 7.252.740 | 33,33 | 1,53 | 3 | 7.252.740,00 | 50 | 0,1753 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 2.661.669.300 | 0 | 80.510.000 | 1 | 55.537.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.510.000,00 | 0 | 3,0248 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 326.809.300 | 0 | 15.741.000 | 1 | 154.259.000 | 1 | 4.720.275 | 92 | 3,06 | 0,92 | 20.461.275,00 | 18,4 | 6,2609 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 1.047.810.000 | 0 | 47.834.000 | 1 | 10.326.000 | 0 | 2.532.465 | 0 | 24,53 | 0 | 50.366.465,00 | 0 | 4,8068 | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket bahan/material yang disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 2.535.000 | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 51.500.000 | 0 | 0 | 12 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 5 | 50.000.000 | 3 | 14.400.000 | 3 | 195.273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.400.000,00 | 60 | 28,8 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 3 | 3.400.250.000 | 3 | 0 | 12 | 471.650.000 | 9 | 113.550.000 | 75 | 24,08 | 12 | 113.550.000,00 | 400 | 3,3395 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 0 | 0 | 4 | 104.770.000 | 12 | 21.300.000 | 3 | 6.150.000 | 25 | 28,87 | 7 | 110.920.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 3.293.750.000 | 4 | 4.650.000 | 12 | 264.000.000 | 3 | 66.000.000 | 25 | 25 | 7 | 70.650.000,00 | 11,667 | 2,145 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 106.500.000 | 4 | 44.000.000 | 12 | 186.350.000 | 3 | 41.400.000 | 25 | 22,22 | 7 | 85.400.000,00 | 11,667 | 80,188 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|-------------|--|----|---|----|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 380.066.175 | 1 | 56.120.000 | 3 | 198.250.000 | 10 | 0 | 333,33 | 0 | 11 | 56.120.000,00 | 550 | 14,766 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | Unit | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 15 | 380.066.175 | 0 | 0 | 3 | 53.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi | Persen | 100 | 63.375.000 | 20 | 0 | 100 | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 20 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah investor yang melakukan investasi pada tahun berkenan | Investor | 495 | 63.375.000 | 30 | | 165 | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 6,0606 | 0 | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | Dokumen | 5 | 63.375.000 | 0 | 0 | 1 | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Waktu | Persen | 100 | 2.197.075.000 | 0 | 0 | 95 | 144.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|---------------|---|-----------|---|-------------|--|----|---|----|--|--------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang dievaluasi dan mendapatkan pendampingan | Perusahaan | 480 | 2.197.075.000 | 0 | 0 | 160 | 144.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Pelaku Usaha | 600 | 1.908.750.000 | 0 | 2.000.000 | 40 | 74.530.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 0,1048 | | |
| | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kegiatan Usaha | 300 | 288.325.000 | 0 | 0 | 40 | 69.769.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan | Persen | 100 | 1.238.495.000 | 30 | 2.000.000 | 100 | 67.402.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.000.000,00 | 30 | 0,16 | | |
| | Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan | Dokumen | 130 | 1.238.495.000 | 8 | 0 | 26 | 67.402.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 6,1538 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|----------------|---|-------------|---|----|--|------------|--|----|---|----|--|----|---|----|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik | Pelaku Usaha | 250 | 538.125.000 | 10 | 0 | 50 | 33.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 4 | 0 | | |
| | Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik | Pelaku Usaha | 250 | 538.125.000 | 10 | 0 | 50 | 28.983.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 4 | 0 | | |
| | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah Kabuptaen/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Kegiatan Usaha | 15 | 162.245.000 | 1 | 0 | 3 | 34.127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6,66 67 | 0 | | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persen | 100 | 78.675.000 | 30 | 0 | 100 | 28.019.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 30 | 0 | | |
| | Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jjumlah Jenis data dan sistem Informasi Penanaman Modal | Jenis | 2 | 78.675.000 | 1 | 0 | 1 | 28.019.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 50 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------------------------|--|------------------------|---|-------------|--|---------------------------|---|---------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Dokumen | 20 | 78.675.000 | 1 | 0 | 1 | 28.019.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | 22.882.786.020 | 83 | 1.099.762.351 | 100 | 5.087.654.993.000 | 100 | 115.171.307.200 | 100 | 2,26 | 183,33 | 116.271.069.551,00 | 183,33 | 508,12 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 50 | 49.925.000 | 2 | 0 | 22 | 5.040.000.000 | 7 | 0 | 31,82 | 0 | 9 | - | 18 | 0 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 12.625.000 | 0 | 0 | 2 | 1.260.000.000 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 12.625.000 | 0 | 0 | 1 | 630.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.625.000 | 0 | 0 | 1 | 630.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 630.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------------|--|------------------------|---|-------------|--|---------------------------|---|-------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 630.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 10 | 12.625.000 | 1 | 0 | 4 | 630.000.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | - | 20 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 5.425.000 | 1 | 0 | 12 | 630.000.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | - | 20 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 220 | 2.627.915.340 | 21 | 961.356.881 | 38 | 5.082.046.984.000 | 10 | 115.139.657.200 | 26,32 | 2,27 | 31 | 116.101.014.081,00 | 14,091 | 4418 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 3500 | 1.944.165.340 | 200 | 925.956.881 | 660 | 4.938.646.984.000 | 180 | 111.962.657.200 | 27,27 | 2,27 | 380 | 112.888.614.081,00 | 10,857 | 5806,5 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 643.750.000 | 3 | 35.400.000 | 12 | 141.600.000.000 | 3 | 3.177.000.000 | 25 | 2,24 | 6 | 3.212.400.000,00 | 10 | 499,01 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 90 | 40.000.000 | 4 | 0 | 12 | 1.800.000.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 7 | - | 7,7778 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 30 | 3.309.595.680 | 2 | 59.054.470 | 46 | 181.209.000 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.054.470,00 | 6,6667 | 1,7843 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 6 | 2.709.635.340 | 6 | 3.995.000 | 11 | 14.768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.995.000,00 | 100 | 0,1474 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 373.767.340 | 5 | 22.784.500 | 6 | 55.355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.784.500,00 | 20 | 6,0959 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 75 | 43.693.000 | 2 | 1.362.500 | 4 | 5.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.362.500,00 | 2,6667 | 3,1183 | | |
| | Penyediaan bahan/material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 50.000.000 | 3 | 2.700.000 | 12 | 24.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.700.000,00 | 60 | 5,4 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 132.500.000 | 3 | 28.212.470 | 12 | 70.496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.212.470,00 | 5 | 21,292 | | |
| | Pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 840.200.000 | 0 | 0 | 2 | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 65 | 750.200.000 | 0 | 0 | 6 | 91.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 250 | 90.000.000 | 0 | 0 | 1 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---|----------------|---|------------|--|---------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|---------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 3 | 2.596.800.000 | 3 | 53.872.000 | 125 | 162.400.000 | 1 | 31.650.000 | 0,8 | 19,49 | 4 | 85.522.000,00 | 133,33 | 3,2934 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 1.448.400.000 | 3 | 600.000 | 50 | 1.300.000 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 600.000,00 | 233,33 | 0,0414 | | |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 100.000.000 | 3 | 5.992.000 | 15 | 29.000.000 | 3 | 0 | 20 | 0 | 6 | 5.992.000,00 | 10 | 5,992 | | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 1.048.400.000 | 3 | 47.280.000 | 60 | 132.100.000 | 3 | 31.650.000 | 5 | 23,96 | 6 | 78.930.000,00 | 10 | 7,5286 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 3 | 13.458.350.000 | 2 | 25.479.000 | 7 | 127.400.000 | 7 | 0 | 100 | 0 | 9 | 25.479.000,00 | 300 | 0,1893 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 13.308.350.000 | 3 | 7.479.000 | 4 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.479.000,00 | 150 | 0,0562 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 150.000.000 | 1 | 18.000.000 | 3 | 102.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.000.000,00 | 20 | 12 | | |
| | Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat | Persentase Masyarakat yang Memanfaatkan Perpustakaan | Persen | | | 0 | 0 | 100 | 1.468.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | Orang | | 12.708.140.000 | | | 72 | 678.195.000 | 72 | 0 | 100 | 0 | 72 | - | #DIV/0! | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------------|---------------------------------------|----------------|---|------------|---|-------------|--|----|---|----|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi | Layanan | | 12.106.300.000 | 4 | 27.900.000 | 5 | 52.590.000 | 5 | 0 | 100 | 0 | 9 | 27.900.000,00 | #DI V/0! | 0,2305 | | |
| | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Orang | 1300 | 321.100.000 | 0 | 0 | 100 | 40.770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan data dan informasi perpustakaan | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan | Dokumen | 10 | 17.000.000 | 0 | 0 | 3 | 59.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan bahan perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Eksemplar | 10500 | 2.561.100.000 | 0 | 0 | 2000 | 210.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | koleksi | 0 | 0 | 4 | 27.900.000 | 50 | 308.935.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.900.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | Perpustakaan | 1 | 9.207.100.000 | 1 | 4.942.000 | 1 | 5.700.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 4.942.000,00 | 200 | 0,0537 | | |
| | Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam gerakan gemar membaca | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 790.695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|----|---|----|--|--------------------|---|-------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | Perpusta kaan | 75 | 601.840.00 0 | 3 | 540.407.1 94 | 15 | 362.960.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 540.407.194, 00 | 4 | 89,7 93 | | |
| | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | Orang | 75 | 465.390.00 0 | 15 | 74.215.00 0 | 21 | 267.160.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74.215.000,0 0 | 20 | 15,9 47 | | |
| | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Lokus | 100 0 | 136.450.00 0 | 15 | 19.410.00 0 | 3 | 160.575.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19.410.000,0 0 | 1,5 | 14,2 25 | | |
| | Meningkatnya Ketersediaan Koleksi Perpustakaan | Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Jumlah Penduduk | Rasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.460.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| c | Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota | Jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan | Dokumen | 100 | 185.175.00 0 | 75 | 26.376.00 0 | 5 | 70.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 26.376.000,0 0 | 75 | 14,2 4 | | |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | Orang | 114 | 60.175.000 | 10 | 1.720.000 | 5 | 67.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.720.000,00 | 8,77 19 | 2,85 83 | | |
| | Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | Eksempla r | 190 | 60.175.000 | 25 | 1.720.000 | 5 | 2.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.720.000,00 | 13,1 58 | 2,85 83 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|-----------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----|---|----|--|---------------|---|---------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia | Jenis | 2 | 125.000.000 | 0 | 0 | 40 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Eksemplar | 500 | 125.000.000 | 70 | 24.656.000 | 45 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 24.656.000,00 | 14 | 19,725 | | |
| | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Eksemplar | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Pada Lembaga Pemerintah | Persentase Lembaga Pemerintah yang Melakukan Pengelolaan Kearsipan Secara Baku | Persen | 100 | 439.700.000 | 45 | 82.795.560 | 100 | 96.925.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 82.795.560,00 | 45 | 18,83 | | |
| | Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota | Jumlah arsip dinamis yang dikelola perangkat daerah | Dokumen | 250 | 155.800.000 | 35 | 23.625.000 | 50 | 28.874.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23.625.000,00 | 14 | 15,16 | | |
| | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | Berkas | 250 | 39.700.000 | 0 | 0 | 50 | 10.735.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | Berkas | 20 | 25.000.000 | 35 | 2.850.000 | 50 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.850.000,00 | 175 | 11,4 | | |
| | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 750 | 91.100.000 | 3 | 18.220.000 | 4 | 12.934.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.220.000,00 | 0,4 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----|---|----|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota | Jumlah arsip statis yang dikelola perangkat daerah | Dokumen | 250 | 156.500.000 | 100 | 31.290.560 | 24 | 35.642.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.290.560,00 | 40 | 19,994 | | |
| | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI | Arsip | 500 | 95.750.000 | 30 | 19.140.560 | 50 | 30.212.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19.140.560,00 | 6 | 19,99 | | |
| | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Arsip | 200 | 60.750.000 | 50 | 12.150.000 | 100 | 5.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.150.000,00 | 25 | 20 | | |
| | Pengelolaan simpul jaringan administrasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota | Jumlah layanan terkait pengelolaan kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota | Layanan | 8636 | 127.400.000 | 30 | 27.880.000 | 40 | 32.409.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27.880.000,00 | 0,3474 | 21,884 | | |
| | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 500 | 127.400.000 | 1320 | 25.300.000 | 4 | 32.409.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320,00 | 25.300.000,00 | 264 | 19,859 | | |
| | Perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase Dokumen Arsip Yang Diakuisisi dan Terpelihara | Persen | 100 | 383.350.000 | 75 | 3.010.000 | 100 | 33.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3.010.000,00 | 75 | 0,7852 | | |
| | Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun | Jumlah jenis arsip referensi dibawah 10 (sepuluh tahun) yang di musnahkan | Dokumen | 500 | 52.000.000 | 0 | 430.000 | 12 | 3.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000,00 | 0 | 0,8269 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|---------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Arsip | 200 | 52.000.000 | 0 | 430.000 | 100 | 3.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000,00 | 0 | 0,8269 | | |
| | Autensikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota | Jumlah arsip statis dan arsip hasil alih media yang teridentifikasi | Dokumen | 200 | 205.650.000 | 25 | 2.580.000 | 60 | 22.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.580.000,00 | 12,5 | 1,2546 | | |
| | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | Arsip | 200 | 205.650.000 | 25 | 2.580.000 | 60 | 10.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.580.000,00 | 12,5 | 1,2546 | | |
| | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11.685.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang | Jumlah arsip statis yang ditemukan | Dokumen | 500 | 125.700.000,00 | 0 | 0 | 20 | 7.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | Arsip | 100 | 125.700.000,00 | 0 | 0 | 20 | 2.885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | Arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)// Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|------|--|----------------------|---|------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 104.437.04 5.890 | 13 | 1.522.011. 586 | 100 | 7.459.037.9 59 | 13 | 1.499.300. 969 | 13 | 20,1 | 25,8 | 3.021.312.55 5,00 | 25,8 | 2,89 | Dinas Perikanan | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 60 | 135.000.00 0 | 5 | 0 | 15 | 4.175.000 | 5 | 0 | 33,33 | 0 | 10 | - | 17 | 0 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 22.500.000 | 0 | 0 | 3 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 22.500.000 | 0 | 0 | 1 | 475.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 22.500.000 | 0 | 0 | 1 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 22.500.000 | 1 | 0 | 1 | 475.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 40 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 22.500.000 | 0 | 0 | 1 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 22.500.000 | 1 | 0 | 2 | 475.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 3 | - | 60 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 375.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 215 | 92.955.286.650 | 10 | 1.380.910.216 | 37 | 6.644.312.059 | 7 | 1.451.150.969 | 18,92 | 21,84 | 17 | 2.832.061.185,00 | 7,907 | 3,0467 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4900 | 90.411.286.650 | 280 | 1.335.010.216 | 938 | 6.453.017.059 | 252 | 1.403.420.969 | 26,87 | 21,75 | 532 | 2.738.431.185,00 | 10,857 | 3,0289 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 2.524.500.000 | 3 | 45.900.000 | 12 | 190.920.000 | 3 | 47.730.000 | 25 | 25 | 6 | 93.630.000,00 | 10,909 | 3,7089 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Dokumen | 90 | 19.500.000 | 3 | 0 | 18 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3,3333 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|-----------|---|-------------|--|----|---|---------|--|--------------|---|---------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah | Dokumen | 5 | 19.500.000 | 0 | 0 | 1 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 19.500.000 | 0 | 0 | 1 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 125 | 150.000.000 | 0 | 1.300.000 | 67 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000,00 | 0 | 0,8667 | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Paket | 5 | 150.000.000 | 0 | 1.300.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1.300.000,00 | 0 | 0,8667 | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Jenis | 7 | 1.505.713.500 | 0 | 0 | 5 | 249.950.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 91.881.000 | 0 | 0 | 1 | 6.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 110.512.500 | 0 | 0 | 1 | 6.727.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 15 | 1.043.070.000 | 0 | 0 | 4 | 50.610.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 150.000.000 | 0 | 0 | 12 | 6.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 110.250.000 | 0 | 0 | 12 | 180.223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 60 | 1.905.000.000 | 0 | 0 | 1 | 52.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 445 | 1.905.000.000 | 0 | 0 | 8 | 52.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 5 | 6.106.500.000 | 2 | 68.430.000 | 2 | 257.900.000 | 2 | 48.150.000 | 100 | 18,67 | 4 | 116.580.000,00 | 80 | 1,9091 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 5.983.500.000 | 3 | 2.050.000 | 12 | 12.300.000 | 3 | 2.250.000 | 25 | 18,29 | 6 | 4.300.000,00 | 300 | 0,0719 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 123.000.000 | 3 | 66.380.000 | 12 | 245.600.000 | 3 | 45.900.000 | 25 | 18,69 | 6 | 112.280.000,00 | 10 | 91,285 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 60 | 1.660.045.740 | 3 | 289.680.516 | 3 | 249.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 289.680.516,00 | 5 | 17,45 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 2 | 908.545.740 | 89 | 126.150.000 | 3 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 126.150.000,00 | 4450 | 13,885 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 15 | 450.000.000 | 10 | 113.750.000 | 60 | 19.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113.750.000,00 | 66,667 | 25,278 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|-------------|--|----|---|----|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 50 | 301.500.000 | 2 | 49.780.516 | 1 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.780.516,00 | 4 | 16,511 | | |
| | Pengelolaan perikanan tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | Persen | 45 | 20.385.468.660 | 29 | 3.978.093.078 | 2 | 331.995.000 | 71 | 0 | 3.133,78 | 0 | 99,19 | 3.978.093.078,00 | 220,42 | 19,51 | | |
| | Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan alam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya. | Ton | 9900 | 19.325.654.500 | 3.887 | 3.858.911.578 | 3400 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.887,00 | 3.858.911.578,00 | 39,263 | 19,968 | | |
| | Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | Unit | 20 | 19.325.654.500 | 2 | 1.375.721.578 | 1 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.375.721.578,00 | 10 | 7,1186 | | |
| | Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapsitasnya | Kelompok | 75 | 1.059.814.160 | 25 | 119.181.500 | 30 | 131.995.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 119.181.500,00 | 33,333 | 11,246 | | |
| | Pengembangan kaapsitas nelayan kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | Orang | 1200 | 223.808.375 | 240 | 28.461.500 | 120 | 31.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 28.461.500,00 | 20 | 12,717 | | |
| | Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Unit Usaha | 125 | 836.005.785 | 25 | 90.720.000 | 15 | 100.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90.720.000,00 | 20 | 10,852 | | |
| | Pengelolaan perikanan budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Persen | 8 | 18.364.479.500 | 3 | 5.194.895.756 | 2,5 | 970.495.000 | 20 | 0 | 790,8 | 0 | 22,74 | 5.194.895.756,00 | 284,25 | 28,288 | | |
| | Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil | Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan | Kelompok | 100 | 815.614.500 | 20 | 21.860.000 | 15 | 16.522.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21.860.000,00 | 20 | 2,6802 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|-----------------|---|-----------------------|---|----------------------|--|--------------------|--|----------|---|----------|--|-------------------------|---|---------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kelompok | 100 | 815.614.500 | 20 | 21.860.000 | 15 | 16.522.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21.860.000,00 | 20 | 2,6802 | | |
| | Pengelolaan pembudidaya ikan | jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar | Kelompok | 225 | 17.405.352.500 | 45 | 5.173.035.756 | 30 | 849.172.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.173.035.756,00 | 20 | 29,721 | | |
| | Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Unit | 45 | 17.357.190.000 | 9 | 2.630.022.738 | 6 | 842.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.630.022.738,00 | 20 | 15,152 | | |
| | Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya sela a 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Dokumen | 10 | 48.162.500 | 2 | 9.300.000 | 1 | 6.772.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.300.000,00 | 20 | 19,31 | | |
| | Pengelolaan pembudidaya ikan | jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar | Kelompok | 225 | 143.512.500 | 45 | 5.173.035.756 | 20 | 104.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.173.035.756,00 | 20 | 3604,6 | | |
| | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | Dokumen | 20 | 143.512.500 | 4 | 78.585.750 | 1 | 104.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78.585.750,00 | 20 | 54,759 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|--------------|---|----------------|---|------------|--|-------------|--|----|---|----|--|--------------|---|----------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | Persen | 1,5 | 11.181.817.680 | 0 | 0 | 0,97 | 319.545.000 | 13 | 0 | 1.356,70 | 0 | 13,16 | - | 877,33 | 0 | | |
| | Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil | Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan | Unit Usaha | | 0 | 0 | 0 | 15 | 126.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Unit usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 126.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | jumlah jenis bahan baku industri yang tersedia dan disalurkan | Jenis | 2 | 11.181.817.680 | 0 | 64.516.680 | 7 | 193.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.516.680,0 | 0 | 0,577 | | |
| | Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | Pelaku usaha | 55 | 11.181.817.680 | 0 | 64.516.680 | 7 | 193.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.516.680,0 | 0 | 0,577 | | |
| | Pengelolaan perikanan tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | Persen | 45 | 98.670.000 | -63 | 7.750.000 | 2,25 | 19.049.738 | 2 | 0 | 87,56 | 0 | -61,1 | 7.750.000,00 | -135,8 | 7,8545 | | |
| | Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang dikelola | Unit | 5 | 98.670.000 | 0 | 0 | 1 | 19.049.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|-------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Layanan | 10 | 98.670.000 | 0 | 0 | 2 | 19.049.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 85.603.409.520 | 17 | 1.911.742.836 | 100 | 8.488.759.919 | 0 | 1.913.774.906 | 0 | 22,54 | 16,67 | 3.825.517.742,00 | 16,67 | 4,47 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 95 | 80.375.000 | 2 | 2.810.000 | 19 | 16.075.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.810.000,00 | 2 | 3 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 14.050.000 | 2 | 2.810.000 | 2 | 2.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.810.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 13.150.000 | 0 | 0 | 1 | 2.630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.650.000 | 0 | 0 | 1 | 930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 13.375.000 | 1 | 0 | 1 | 2.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.625.000 | 0 | 0 | 1 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 14.125.000 | 0 | 0 | 1 | 2.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5 | 15.400.000 | 0 | 0 | 1 | 3.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 225 | 77.745.153.820 | 8 | 0 | 45 | 7.610.513.919 | 6 | 1.763.855.768 | 13,33 | 23,18 | 14 | 1.763.855.768,00 | 6,2222 | 2,2688 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 6370 | 38.878.226.910 | 364 | 1.599.969.691 | 1.204 | 7.415.683.919 | 258 | 1.717.175.768 | 21,43 | 23,16 | 622 | 3.317.145.459,00 | 9,7645 | 8,5321 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 25 | 38.020.876.910 | 4 | 1.555.089.691 | 12 | 190.070.000 | 3 | 46.680.000 | 25 | 24,56 | 7 | 1.601.769.691,00 | 28 | 4,2129 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 90 | 12.500.000 | 4 | 44.880.000 | 3 | 2.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.880.000,00 | 4,4444 | 359,04 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 95 | 833.550.000 | 0 | 0 | 19 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 25 | 4.930.380.700 | 1 | 0 | 6 | 358.440.000 | 2 | 77.769.138 | 33,33 | 21,7 | 3,25 | 77.769.138,00 | 13 | 1,5773 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 2.600.190.350 | 1 | 520.038.070 | 1 | 9.435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520.038.070,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 78.427.850 | 1 | 15.685.570 | 1 | 67.982.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.685.570,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 464.162.500 | 1 | 92.832.500 | 1 | 14.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.832.500,00 | 20 | 20 | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 105.500.000 | 3 | 1.750.000 | 12 | 169.773.000 | 3 | 56.769.138 | 25 | 33,44 | 6 | 58.519.138,00 | 10 | 55,468 | | |
| | Dukungan pelaksanaan sistem peemrintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Laporan | 5 | 1.682.100.000 | 0 | 165.967.145 | 12 | 84.000.000 | 3 | 21.000.000 | 25 | 25 | 3,25 | 186.967.145,00 | 65 | 11,115 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia | Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 2.545.000.000 | 1 | 13.500.000 | 2 | 445.550.000 | 0 | 72.150.000 | 0 | 16,19 | 0,5 | 85.650.000,00 | 25 | 3,3654 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 2.472.500.000 | 3 | 91.950.000 | 12 | 12.300.000 | 3 | 2.250.000 | 25 | 18,29 | 6 | 94.200.000,00 | 10 | 3,8099 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 72.500.000 | 3 | 5.000.000 | 12 | 433.250.000 | 3 | 69.900.000 | 25 | 16,13 | 6 | 74.900.000,00 | 10 | 103,31 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 302.500.000 | 0 | 86.950.000 | 1 | 48.181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 86.950.000,00 | 12,5 | 28,744 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jenis | 25 | 302.500.000 | 3 | 29.024.000 | 5 | 36.646.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 29.024.000,00 | 10 | 9,5947 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Rata-rata lama kunjungan wisatawan | Hari | 15 | 13.549.250.000 | | | 1 | 975.950.000 | 1 | 298.750.000 | 100 | 30,61 | 1 | 298.750.000,00 | 6,67 | 2,2 | | |
| | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Daya Tarik Wisata ang terkelola dengan baik | Kawasan | 15 | 0 | | | 1 | 180.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 6,6667 | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan | Orang | 0 | 0 | | | 100 | 180.000.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota | Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik | DTW | 200 | 13.549.250.000 | 1 | 320.000.000 | 3 | 795.950.000 | 1 | 298.750.000 | 33,33 | 37,53 | 2 | 618.750.000,00 | 1 | 4,5667 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi) | Lokasi | 222,2 | 13.549.250.000 | 1 | 0 | 3 | 111.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0,45 | 0 | | |
| | Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi wisata kabupaten/kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | Unit | 0 | 0 | 10 | 320.000.000 | 40 | 684.900.000 | 10 | 298.750.000 | 25 | 43,62 | 20 | 618.750.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemasaran wisata | Persentase Kunjungan Wisata | Persen | 75 | 101.750.000 | 5 | 20.000.000 | 100 | 596.562.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0,75 | 5 | 24.500.000,00 | 6,67 | 24,08 | | |
| | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota | Jumlah Daya Tarik, Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang terpromosikan | Objek | 25 | 101.750.000 | 2 | 20.000.000 | 3 | 596.562.000 | 15 | 4.500.000 | 500 | 0,75 | 17 | 24.500.000,00 | 68 | 24,079 | | |
| | Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Kegiatan | 450 | 101.750.000 | 3 | 0 | 5 | 431.562.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0,6667 | 0 | | |
| | Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Promosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 165.000.000 | 3 | 4.500.000 | 25 | 2,73 | 3 | 4.500.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan hak kekayaan intelektual | Persentase Usaha Ekonomi Kreatif Lokal yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual | Persen | 5 | 358.000.000 | 0 | 0 | 100 | 122.360.000 | 0 | 62.360.000 | 0 | 50,96 | 0 | 62.360.000,00 | 0 | 17,42 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|---------|---|--------------------|---|-----------|--|-----------------|--|----------------|---|-------|--|-------------------|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha ekonomi kreatif yang Memanfaatkan Prasarana dan Pengembangan Pemasaran | Ukraf | 250 | 358.000.00 0 | 0 | 0 | 105 | 30.000.000 | 105 | 0 | 100 | 0 | 105 | - | 42 | 0 | | |
| | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | Unit | 5 | 179.000.00 0 | 0 | 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif | Jumlah ekonomi kreatif yang berkembang | Ekraf | 450 | 179.000.00 0 | 0 | | 50 | 92.360.000 | 50 | 62.360.00 0 | 100 | 67,52 | 50 | 62.360.000,0 0 | 11,1 11 | 34,8 38 | | |
| | Pengembangan sistem pemasaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92.360.000 | 0 | 62.360.00 0 | 0 | 67,52 | 0 | 62.360.000,0 0 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase peningkatan usaha kepariwisataan dan ekonomi kreatif | Persen | 30 | 400.000.00 0 | 0 | 0 | 100 | 300.000.00 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 333, 33 | 0 | | |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang meningkat kapasitasnya | Orang | 350 0 | 400.000.00 0 | 50 | 6.000.000 | 100 | 300.000.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.000.000,00 | 1,42 86 | 1,5 | | |
| | Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Laporan | 350 0 | 400.000.00 0 | 3 | 0 | 6 | 300.000.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0,08 57 | 0 | | |
| | Pengembangan kapasitas daya saing pemuda | Persentase pemuda aktif | Persen | 100 | 10.701.625. 000 | 0 | 0 | 100 | 973.085.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|------------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kapasitas kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota | Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader yang meningkat kaulitas dan kapasitasnya | Orang | 125 | 7.886.125.000 | 0 | 0 | 280 | 506.595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 225 | 1.220.000.000 | 0 | 408.769.800 | 200 | 178.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.769.800,00 | 0 | 33,506 | | |
| | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 252.705.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri | Orang | 70 | 6.666.125.000 | 0 | 0 | 40 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Organsiasi | 30 | 2.815.500.000 | 1 | 408.769.800 | 14 | 466.490.000 | 14 | 0 | 100 | 0 | 15 | 408.769.800,00 | 50 | 14,519 | | |
| | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Jumlah Dokumen pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 38.500.000 | 6 | 465.090.000 | 100 | 0 | 1.666,67 | 0 | 100 | 38.500.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|------------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|---------------|--|-----------|---|------|--|--------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda yang memiliki Kemandirian Ekonomi | Orang | 450 | 2.815.500.000 | 0 | 0 | 50 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.422.090.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0,06 | 0 | 2.000.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah cabang olahraga kependidikan yang mendapatkan pembinaan | Cabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 129.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah laporan korodinasi, dan sikronisaisi pelaksanaan pemberdayan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetesis oleh satuan pendidikan dasar | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 129.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat daerah | Cabor | 100 | 651.258.330 | 0 | 0 | 7 | 133.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 35 | 417.108.330 | 0 | 0 | 14 | 133.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga | Jumlah organisasi olahraga yang | Organisasi | 125 | 234.150.000 | 0 | 0 | 27 | 2.029.695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|--------------|---|----------|---|-------------|--|----------------------|--|------------------|---|-------------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | mendapatkan pembinaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Jumlah organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan | Organisasi | | | 0 | 0 | 27 | 2.029.695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi | Jumlah cabang olahraga rekreasi yang mendapatkan pembinaan | Cabor | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1.129.800.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0,18 | 6 | 2.000.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 77.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 294.460.000 | 3 | 41.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.460.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 995.000.000 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15.725.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 12,72 | 0 | 2.000.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|---|------------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|----------------|--|----|---|----|--|------------------|---|----------|--------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengembangan kapasitas kepramukaan | Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi | Persen | 60 | 107.400.000 | 440 | 199.990.000 | 100 | 443.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 199.990.000,00 | 733,33 | 186,21 | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah oragnsiasi kepramukaan yang mendapatkan pembinaan | Organisasi | 220 | 107.400.000 | 440 | 199.990.000 | 440 | 443.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 199.990.000,00 | 200 | 186,21 | | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi peneydiaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan | Dokumen | 0 | 107.400.000 | 3 | 378.500.000 | 12 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 378.500.000,00 | #DI V/0! | 352,42 | | |
| | Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | Organisasi | 0 | 0 | 145 | 58.500.000 | 440 | 431.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 58.500.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Persen | 100 | 100.740.542.435 | 100 | 4.164.140.083 | 100 | 20.968.966.517 | ### | 0 | #### | 0 | #### | 4.164.140.083,00 | ### | 4,13 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 105 | 94.485.000 | 0 | 0 | 3 | 24.805.300 | ### | 0 | #### | 0 | #### | - | ### | 0 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 25.700.000 | 0 | 0 | 3 | 4.530.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.450.000 | 0 | 0 | 1 | 929.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|--|----------------|---|---------|--|-------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.595.000 | 0 | 0 | 1 | 565.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.275.000 | 1 | 0 | 1 | 1.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.995.000 | 0 | 0 | 1 | 759.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60 | 37.030.000 | 3 | 0 | 8 | 9.672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 12.440.000 | 1 | 0 | 4 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | | | 0 | 0 | 12 | 6.000.000 | ### | 1,500,000 | #### | #VALUE! | #### | #VALUE! | #DIV/0! | ### | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 285 | 96.307.612.030 | 14 | 4.052.070.083 | 1 | 20.140.423.717 | 0 | 53.117.591.997 | 0 | 263,74 | 14 | 57.169.662.080,00 | 4,9123 | 59,362 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 14700 | 95.254.487.030 | 1050 | 4.017.170.083 | 2.496 | 19.939.633.717 | ### | 53,117,591,997 | #### | #VALUE! | #### | #VALUE! | 4E+08 | ### | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|-------------------|---|------------|---|----------------|--|----------|---|----------------|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 1.043.850.000 | 3 | 34.900.000 | 12 | 199.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.900.000,00 | 5 | 3,3434 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 3.375.000 | 0 | 0 | 1 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 90 | 4.250.000 | 4 | 0 | 18 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,4444 | 0 | | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 60 | 1.650.000 | 3 | 0 | 12 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah | Dokumen | 5 | 2.000.000 | 0 | 0 | 4 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 2.000.000 | 0 | 0 | 4 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 1040 | 63.750.000 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 255 | 63.750.000 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|-------------|--|----|---|---------|--|---------------|---|---------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 9 | 528.720.405 | 3 | 4.830.000 | 1 | 222.407.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.830.000,00 | 33,33 | 0,9135 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 8.015.000 | 0 | 0 | 1 | 11.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 7.500.000 | 0 | 0 | 1 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 41.000.000 | 0 | 0 | 1 | 11.324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 60 | 177.105.405 | 3 | 1.830.000 | 12 | 23.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.830.000,00 | 5 | 1,0333 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 70.100.000 | 0 | 0 | 12 | 12.724.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Material | Jumlah Bahan Material yang disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Kunjungan Tamu yang Dipasilitasi | Laporan | 5 | 50.000.000 | 3 | 3.000.000 | 12 | 19.215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.000.000,00 | 60 | 6 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terselenggara | Laporan | 60 | 175.000.000 | 3 | 0 | 12 | 143.909.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 327.500.000 | 103 | 56.800.000 | 103 | 161.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 56.800.000,00 | 5150 | 17,344 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|------------|---|----------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 327.500.000 | 35 | 56.800.000 | 35 | 77.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 56.800.000,00 | 350 | 17,344 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 3.101.500.000 | 2 | 552.240.000 | 2 | 298.870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 552.240.000,00 | 100 | 17,806 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 45.000.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.000.000 | ### ## | 2.250.000 | #### ### | 25 | #### ### | 11.250.000,00 | 4E+06 | 25 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 3.056.500.000 | 12 | 543.240.000 | 12 | 289.870.000 | ### ## | 48.150.000 | #### ### | 16,61 | #### ### | 591.390.000,00 | 8E+07 | 19,349 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 3 | 314.975.000 | 3 | 62.368.950 | 3 | 120.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62.368.950,00 | 100 | 19,801 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 15 | 200.000.000 | 3 | 39.913.950 | 3 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.913.950,00 | 20 | 19,957 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 175 | 75.000.000 | 35 | 14.460.000 | 35 | 15.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14.460.000,00 | 20 | 19,28 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | Unit | 5 | 39.975.000 | 1 | 7.995.000 | 1 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.995.000,00 | 20 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Ketersediaan Energi dan Protein perkapita | kka/kapita/hari | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.100 | 2.391.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia | Unit | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2.391.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Unit | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.391.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Ketersediaan energi dan protein perkapita | kka/kapita/hari | 340,6 | 1.122.245.000 | 68 | 220.874.000 | 2.100 | 234.862.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,12 | 220.874.000,00 | 20 | 19,681 | | |
| | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah jenis bahan pokok atau pangan lainnya yang tersedia dan tersalurkan | Jenis | 40 | 329.475.000 | 11 | 91.086.000 | 11 | 95.410.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91.086.000,00 | 27,5 | 27,646 | | |
| | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia | Laporan | 5 | 81.685.000 | 1 | 15.787.000 | 1 | 9.497.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.787.000,00 | 20 | 19,327 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Pasokan dan Harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen | Laporan | 1250 | 92.775.000 | 250 | 2.720.000 | 1 | 7.021.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2.720.000,00 | 20 | 2,9318 | | |
| | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6.174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)" | Dokumen | 5 | 51.660.000 | 1 | 3.580.000 | 1 | 44.082.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.580.000,00 | 20 | 6,9299 | | |
| | Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM | Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota | Laporan | 5 | 103.355.000 | 0 | 0 | 1 | 6.104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan pangan yang tersedia | Ton | 100 | 480.000.000 | 18 | 98.004.000 | 0,4 | 69.026.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 98.004.000,00 | 18 | 20,418 | | |
| | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Ton | 100 | 480.000.000 | 20 | 98.004.000 | 0,4 | 69.026.500 | | 0 | 0 | 0 | 20 | 98.004.000,00 | 20 | 20,418 | | |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah ketersediaan pangan | kkal/kapita/hari | 538,5 | 312.770.000 | 107 | 31.784.000 | 107 | 70.425.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 31.784.000,00 | 19,87 | 10,162 | | |
| | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Dokumen | 5 | 194.470.000 | 1 | 14.724.000 | 1 | 13.596.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.724.000,00 | 20 | 7,5713 | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan | Laporan | 5 | 17.000.000 | 1 | 2.380.000 | 1 | 48.163.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.380.000,00 | 20 | 14 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | Laporan | 5 | 101.300.000 | 1 | 14.680.000 | 1 | 8.665.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.680.000,00 | 20 | 14,492 | | |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani | persen | 100 | 134.215.000 | 100 | 32.270.000 | 100 | 91.726.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 32.270.000,00 | 200 | 24,04 | | |
| | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Jumlah kecamatan yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik | Kecamatan | 14 | 134.215.000 | 14 | 25.122.000 | 14 | 9.656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.122.000,00 | 100 | 18,718 | | |
| | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | Dokumen | 5 | 134.215.000 | 14 | 25.122.000 | 14 | 9.656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.122.000,00 | 280 | 18,718 | | |
| | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang tertangani | Desa / Kelurahan | 103 | 0 | 103 | 7.148.000 | 103 | 82.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 7.148.000,00 | 100 | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Laporan | 0 | 0 | 103 | 7.148.000 | 103 | 82.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 7.148.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan | Persen | 100 | 156.347.000 | 100 | 16.390.000 | 100 | 16.742.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16.390.000,00 | 100 | 10,483 | | |
| | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pangan segar yang memnuhi syarat keamanan pangan | jenis | 70 | 156.347.000 | 1 | 16.390.000 | 2 | 16.742.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.390.000,00 | 1,4286 | 10,483 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|-------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Dokumen | 5 | 156.347.000 | 1 | 16.390.000 | 1 | 16.742.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.390.000,00 | 20 | 10,483 | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Ton/Ha | 260 | 11.029.220.350 | 5 | 415.737.200 | 5 | 572.496.800 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 415.737.205,20 | 1,92 | 3,77 | | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah jenis sarana pertanian yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka peningkatan produksi pertanian | Jenis | 30 | 8.711.781.850 | 5 | 105.003.000 | 5 | 70.243.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105.003.000,00 | 16,667 | 1,2053 | | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Laporan | 5 | 3.182.972.850 | 1 | 75.063.000 | 1 | 10.496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.063.000,00 | 20 | 2,3583 | | |
| | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Laporan | 10 | 5.439.359.000 | 2 | 21.420.000 | 2 | 11.977.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.420.000,00 | 20 | 0,3938 | | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | Laporan | 10 | 34.100.000 | 2 | 0 | 2 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 20 | 0 | | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan | Laporan | 10 | 29.850.000 | 2 | 5.970.000 | 2 | 41.970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.970.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Laporan | 10 | 25.500.000 | 2 | 2.550.000 | 2 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.550.000,00 | 20 | 10 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|----------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme yang tersedia | Jenis | 1 | 580.156.000 | 1 | 127.182.200 | 1 | 183.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.182.200,00 | 100 | 21,922 | | |
| | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG /Tanaman | Dokumen | 5 | 580.156.000 | 1 | 127.182.200 | 1 | 183.580.000 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.182.200,00 | 20 | 21,922 | | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah benih/binit ternak yang diawasi dan di kendalikan | Ekor | 15 | 820.997.500 | 3 | 11.560.000 | 3 | 152.420.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.560.000,00 | 20 | 1,408 | | |
| | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar | Ekor | 3750 | 820.997.500 | 750 | 11.560.000 | 750 | 152.420.500 | | 0 | 0 | 0 | 750 | 11.560.000,00 | 20 | 1,408 | | |
| | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah benih/bibit ternak yang disediakan | Jenis | 25 | 916.285.000 | 2 | 171.992.000 | 2 | 166.253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171.992.000,00 | 8 | 18,771 | | |
| | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Ekor | 5.720 | 916.285.000 | 611 | 171.992.000 | 611 | 166.253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 171.992.000,00 | 10,682 | 18,771 | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 344.384.237.175 | 57 | 1.456.041.616 | 100 | 31.871.120.187 | 25 | 6.510.180.763 | 25 | 20,43 | 82,14 | 7.966.222.379,00 | 82,14 | 2,31 | Sektetariat DPRD | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 165.512.500 | 4 | 0 | 12 | 23.100.000 | 2 | 0 | 16,67 | 0 | 6 | - | 11 | 0 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 30.512.500 | 1 | 0 | 2 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|------------|---|----|---|------------|--|----|---|----|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 25.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.875.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.000.000 | 1 | 0 | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 5 | 30.000.000 | 1 | 0 | 1 | 2.250.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 40 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 20.000.000 | 1 | 0 | 4 | 1.500.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | - | 10 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 225 | 24.712.068.770 | 11 | 1.069.436.390 | 941 | 5.376.278.187 | 198 | 1.266.342.062 | 21,04 | 23,55 | 209 | 2.335.778.452,00 | 92,889 | 9,452 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4.550 | 23.786.118.770 | 260 | 1.030.586.390 | 910 | 5.172.038.187 | 195 | 1.238.322.062 | 21,43 | 23,94 | 455 | 2.268.908.452,00 | 10 | 9,5388 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 785.950.000 | 3 | 38.850.000 | 12 | 180.240.000 | 3 | 28.020.000 | 25 | 15,55 | 6 | 66.870.000,00 | 10 | 8,5082 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 40.000.000 | 0 | 0 | 1 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 90 | 100.000.000 | 3 | 0 | 4 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3,3333 | 0 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 325 | 3.905.000.000 | 0 | 0 | 60 | 41.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5 | 3.905.000.000 | 0 | 0 | 1 | 41.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 8 | 10.663.763.125 | 5 | 140.865.100 | 8 | 1.333.637.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140.865.100,00 | 62,5 | 1,321 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|-------------|--|----|---|----|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan komponen instalasi komponen listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 97.683.125 | 0 | 0 | 1 | 18.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 111.025.000 | 0 | 0 | 1 | 212.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 2.641.550.000 | 2 | 0 | 4 | 294.814.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 10 | 0 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 795.000.000 | 1 | 0 | 2 | 88.825.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 250 | 287.500.000 | 0 | 0 | 1 | 6.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan bahan/material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 10 | 2.387.500.000 | 1 | 37.500.000 | 50 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.500.000,00 | 10 | 1,5707 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 1.558.900.000 | 3 | 47.675.500 | 2 | 347.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.675.500,00 | 5 | 3,0583 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 2.784.605.000 | 2 | 55.689.600 | 12 | 306.077.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.689.600,00 | 3,3333 | 1,9999 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 1.120.000.000 | 0 | 0 | 2 | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 50 | 820.000.000 | 0 | 0 | 2 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 125 | 300.000.000 | 0 | 0 | 10 | 825.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|-----------------|---|-------------|---|---------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 3 | 4.470.983.690 | 3 | 194.740.126 | 3 | 821.600.000 | 3 | 59.658.164 | 100 | 7,26 | 6 | 254.398.290,00 | 200 | 5,69 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 186.500.000 | 3 | 9.400.000 | 12 | 43.300.000 | 3 | 2.000.000 | 25 | 4,62 | 6 | 11.400.000,00 | 10 | 6,1126 | | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumebr daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 210.000.000 | 3 | 10.369.626 | 12 | 42.000.000 | 3 | 7.058.164 | 25 | 16,81 | 6 | 17.427.790,00 | 10 | 8,2989 | | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 4.074.483.690 | 3 | 174.970.500 | 12 | 736.300.000 | 3 | 50.600.000 | 25 | 6,87 | 6 | 225.570.500,00 | 10 | 5,5362 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 5 | 182.282.556.060 | 2 | 51.000.000 | 5 | 1.063.670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.000.000,00 | 40 | 0,028 | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 240 | 1.431.350.000 | 3 | 39.000.000 | 5 | 229.270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.000.000,00 | 1,25 | 2,7247 | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 240 | 75.000.000 | 3 | 12.000.000 | 48 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.000.000,00 | 1,25 | 16 | | |
| | Pemeliharaan mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 20 | 975.000.000 | 0 | 0 | 48 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan perlataan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 100 | 1.275.000.000 | 0 | 0 | 4 | 139.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|----------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 178.526.206.060 | 0 | 0 | 20 | 610.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Layana keuangan dan kesejahteraan DPRD | Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan yang diterima angora DPRD | Layanan | 3 | 107.610.603.030 | 1 | 4.419.763.218 | 3 | 20.446.185.000 | 1 | 4.734.180.537 | 33,33 | 23,15 | 2 | 9.153.943.755,00 | 66,667 | 8,5065 | | |
| | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | Orang/Bulan | 2.450 | 87.169.353.030 | 140 | 4.419.763.218 | 490 | 19.966.685.000 | 140 | 4.734.180.537 | 28,57 | 23,71 | 280 | 9.153.943.755,00 | 11,429 | 10,501 | | |
| | Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | Paket | 134 | 1.968.750.000 | 0 | 0 | 35 | 339.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan medical chekcup DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | Orang | 175 | 18.472.500.000 | 0 | 0 | 7 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Layanan administrasi DPRD | Jumlah layanan administrasi DPRD | Layanan | 3 | 9.453.750.000 | 2 | 450.000.000 | 3 | 1.865.250.000 | 1 | 450.000.000 | 33,33 | 24,13 | 3 | 900.000.000,00 | 100 | 9,52 | | |
| | Fasilitasi fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Laporan | 60 | 18.750.000 | 0 | 0 | 3 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | Paket | 108 | 9.000.000.000 | 9 | 450.000.000 | 12 | 61.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 450.000.000,00 | 8,3333 | 5 | | |
| | Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Laporan | 60 | 435.000.000 | 1 | 0 | 36 | 1.800.000.000 | 3 | 450.000.000 | 8,33 | 25 | 4 | 450.000.000,00 | 6,6667 | 103,45 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|-------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 174.031.081.000 | 75 | 4.272.667.084 | 100 | 9.665.273.500 | 25 | 2.525.399.268 | 25 | 26,13 | 100 | 6.798.066.352,00 | 100 | 3,91 | | |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Dokumen | 200 | 1.120.250.000 | 3 | 4.475.000 | 41 | 143.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.475.000,00 | 1,5 | 0,3995 | | |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Dokumen | 60 | 51.000.000 | 0 | 0 | 40 | 7.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Dokumen | 60 | 448.000.000 | 3 | 4.475.000 | 12 | 65.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.475.000,00 | 5 | 0,9989 | | |
| | Penyelenggaraan kajian perundang-undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | Dokumen | 60 | 121.250.000 | 0 | 0 | 12 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Dokumen | 20 | 500.000.000 | 0 | 0 | 12 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembahasan kebijakan Anggaran | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah | Rekomen dasi | 50 | 746.750.000 | 0 | 0 | 4 | 158.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah laporan KUA dan PPAS | Dokumen | 10 | 182.000.000 | 0 | 0 | 16 | 33.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah laporan Perubahan KUA dan PPAS | Dokumen | 10 | 162.750.000 | 0 | 0 | 2 | 34.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembahasan APBD | Jumlah Pembahasan APBD | Dokumen | 10 | 124.000.000 | 0 | 0 | 2 | 38.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Pembahasan APBD Perubahan | Dokumen | 10 | 148.000.000 | 0 | 0 | 2 | 28.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan Pertanggung jawaban APBD | Jumlah laporan Pertanggung jawaban | Dokumen | 10 | 130.000.000 | 5 | 0 | 2 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 50 | 0 | | |
| | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan | Rekomendasi | 300 | 17.110.235.000 | 5 | 0 | 8 | 66.800.000 | 1 | 0 | 12,5 | 0 | 6 | - | 2 | 0 | | |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Laporan | 60 | 40.000.000 | 0 | 0 | 74 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Laporan | 60 | 40.000.000 | 1 | 0 | 12 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1,6667 | 0 | | |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 60 | 40.000.000 | 1 | 0 | 12 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1,6667 | 0 | | |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Laporan | 60 | 40.000.000 | 0 | 0 | 12 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang sumber daya alam | Laporan | 60 | 40.000.000 | 0 | 0 | 12 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dokumen | 10 | 60.000.000 | 1 | 0 | 12 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengawasan penggunaan anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Dokumen | 60 | 16.791.235.000 | 0 | 0 | 1 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Rekomendasi | 10 | 59.000.000 | 2 | 0 | 1 | 18.800.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 3 | - | 30 | 0 | | |
| | Peningkatan kapasitas DPRD | Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya | Orang | 35 | 19.787.830.000 | 35 | 101.262.000 | 35 | 1.915.276.000 | 35 | 709.704.255 | 100 | 37,05 | 70 | 810.966.255,00 | 200 | 4,0983 | | |
| | Pendalaman tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | Dokumen | 60 | 7.334.580.000 | 3 | 51.462.000 | 35 | 1.683.676.000 | 3 | 663.804.255 | 8,57 | 39,43 | 6 | 715.266.255,00 | 10 | 9,752 | | |
| | Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Orang | 180 | 450.000.000 | 9 | 22.500.000 | 36 | 90.000.000 | 3 | 22.500.000 | 8,33 | 25 | 12 | 45.000.000,00 | 6,6667 | 10 | | |
| | Penyediaan tenaga ahli fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Orang | 420 | 546.000.000 | 21 | 27.300.000 | 84 | 93.600.000 | 3 | 23.400.000 | 3,57 | 25 | 24 | 50.700.000,00 | 5,7143 | 9,2857 | | |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | Dokumen | 10 | 11.420.375.000 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Publikasi dan dokumentasi dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Dokumen | 60 | 36.875.000 | 0 | 0 | 1 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyerapan dan penghimpunan masyarakat | Jumlah usulan dan aspirasi masyarakat yang difasilitasi | Usulan | 175 | 22.204.250.000 | 35 | 1.358.315.000 | 35 | 2.053.250.000 | 35 | 447.660.000 | 100 | 21,8 | 70 | 1.805.975.000,00 | 40 | 8,1335 | | |
| | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | Laporan | 60 | 174.250.000 | 12 | 19.205.000 | 12 | 42.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.205.000,00 | 20 | 11,022 | | |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | Dokumen | 175 | 11.015.000.000 | 35 | 3.000.000 | 35 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.000.000,00 | 20 | 0,0272 | | |
| | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Dokumen | 175 | 11.015.000.000 | 35 | 1.336.110.000 | 3 | 2.009.250.000 | 1 | 447.660.000 | 33,33 | 22,28 | 36 | 1.783.770.000,00 | 20,571 | 16,194 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD | Jumlah pelanngaran kode otik yang terselesaikan | Kasus | 35 | 25.000.000 | 0 | 0 | 2 | 7.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Kode Etik | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengawasan kode etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Laporan | 35 | 25.000.000 | 0 | 0 | 2 | 5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan kerja sama daerah | Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi | Dokumen | 120 | 75.633.110.000 | 5 | 45.000.000 | 7 | 696.620.000 | 3 | 59.000.000 | 42,86 | 8,47 | 8 | 104.000.000,00 | 6,6667 | 0,1375 | | |
| | Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Dokumen | 60 | 73.555.610.000 | 0 | 0 | 7 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | Dokumen | 60 | 2.077.500.000 | 5 | 45.000.000 | 12 | 695.120.000 | 3 | 59.000.000 | 25 | 8,49 | 8 | 104.000.000,00 | 13,333 | 5,006 | | |
| | Fasilitasi tugas DPRD | Jumlah jenis tugas DPRD yang di fasilitasi | Jenis | 4 | 37.403.656.000 | 2 | 2.763.615.084 | 4 | 4.624.727.500 | 1 | 1.309.035.013 | 25 | 28,31 | 3 | 4.072.650.097,00 | 75 | 10,888 | | |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Dokumen | 60 | 33.380.810.000 | 5 | 2.639.135.000 | 12 | 4.130.779.000 | 3 | 1.309.035.013 | 25 | 31,69 | 8 | 3.948.170.013,00 | 13,333 | 11,828 | | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Dokumen | 60 | 60.000.000 | 0 | 0 | 4 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Dokumen | 60 | 3.012.380.000 | 5 | 124.480.084 | 12 | 393.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124.480.084,00 | 8,3333 | 4,1323 | | |
| | Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Dokumen | 21 | 950.466.000 | 0 | 0 | 1 | 88.072.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|----------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 344.384.237.175 | 57 | 1.456.041.616 | 100 | 31.871.120.187 | 25 | 6.510.180.763 | 25 | 20,43 | 82,14 | 7.966.222.379,00 | 82,14 | 2,31 | Sekretariat DPRD | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 165.512.500 | 4 | 0 | 12 | 23.100.000 | 2 | 0 | 16,67 | 0 | 6 | - | 11 | 0 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 30.512.500 | 1 | 0 | 2 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 25.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.875.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.000.000 | 1 | 0 | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 5 | 30.000.000 | 1 | 0 | 1 | 2.250.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 40 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 20.000.000 | 1 | 0 | 4 | 1.500.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | - | 10 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 225 | 24.712.068.770 | 11 | 1.069.436.390 | 941 | 5.376.278.187 | 198 | 1.266.342.062 | 21,04 | 23,55 | 209 | 2.335.778.452,00 | 92,889 | 9,452 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4.550 | 23.786.118.770 | 260 | 1.030.586.390 | 910 | 5.172.038.187 | 195 | 1.238.322.062 | 21,43 | 23,94 | 455 | 2.268.908.452,00 | 10 | 9,5388 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 785.950.000 | 3 | 38.850.000 | 12 | 180.240.000 | 3 | 28.020.000 | 25 | 15,55 | 6 | 66.870.000,00 | 10 | 8,5082 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 40.000.000 | 0 | 0 | 1 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|---------------|--|----|---|----|--|----------------|---|-------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | Laporan | 90 | 100.000.000 | 3 | 0 | 4 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3,33 | 33 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 325 | 3.905.000.000 | 0 | 0 | 60 | 41.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5 | 3.905.000.000 | 0 | 0 | 1 | 41.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 8 | 10.663.763.125 | 5 | 140.865.100 | 8 | 1.333.637.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140.865.100,00 | 62,5 | 1,321 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi komponen listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 97.683.125 | 0 | 0 | 1 | 18.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 111.025.000 | 0 | 0 | 1 | 212.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 2.641.550.000 | 2 | 0 | 4 | 294.814.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 10 | 0 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 795.000.000 | 1 | 0 | 2 | 88.825.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 250 | 287.500.000 | 0 | 0 | 1 | 6.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan bahan/material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 10 | 2.387.500.000 | 1 | 37.500.000 | 50 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.500.000,00 | 10 | 1,5707 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 1.558.900.000 | 3 | 47.675.500 | 2 | 347.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.675.500,00 | 5 | 3,0583 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 2.784.605.000 | 2 | 55.689.600 | 12 | 306.077.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.689.600,00 | 3,3333 | 1,9999 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 1.120.000.000 | 0 | 0 | 2 | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 50 | 820.000.000 | 0 | 0 | 2 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 125 | 300.000.000 | 0 | 0 | 10 | 825.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 3 | 4.470.983.690 | 3 | 194.740.126 | 3 | 821.600.000 | 3 | 59.658.164 | 100 | 7,26 | 6 | 254.398.290,00 | 200 | 5,69 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 186.500.000 | 3 | 9.400.000 | 12 | 43.300.000 | 3 | 2.000.000 | 25 | 4,62 | 6 | 11.400.000,00 | 10 | 6,1126 | | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumebr daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 210.000.000 | 3 | 10.369.626 | 12 | 42.000.000 | 3 | 7.058.164 | 25 | 16,81 | 6 | 17.427.790,00 | 10 | 8,2989 | | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 4.074.483.690 | 3 | 174.970.500 | 12 | 736.300.000 | 3 | 50.600.000 | 25 | 6,87 | 6 | 225.570.500,00 | 10 | 5,5362 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|----------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 5 | 182.282.556.060 | 2 | 51.000.000 | 5 | 1.063.670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.000.000,00 | 40 | 0,028 | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 240 | 1.431.350.000 | 3 | 39.000.000 | 5 | 229.270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.000.000,00 | 1,25 | 2,7247 | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 240 | 75.000.000 | 3 | 12.000.000 | 48 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.000.000,00 | 1,25 | 16 | | |
| | Pemeliharaan mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 20 | 975.000.000 | 0 | 0 | 48 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan perlataan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 100 | 1.275.000.000 | 0 | 0 | 4 | 139.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 178.526.206.060 | 0 | 0 | 20 | 610.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Layana keuangan dan kesejahteraan DPRD | Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan yang diterima angora DPRD | Layanan | 3 | 107.610.603.030 | 1 | 4.419.763.218 | 3 | 20.446.185.000 | 1 | 4.734.180.537 | 33,33 | 23,15 | 2 | 9.153.943.755,00 | 66,667 | 8,5065 | | |
| | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | Orang/Bulan | 2.450 | 87.169.353.030 | 140 | 4.419.763.218 | 490 | 19.966.685.000 | 140 | 4.734.180.537 | 28,57 | 23,71 | 280 | 9.153.943.755,00 | 11,429 | 10,501 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | Paket | 134 | 1.968.750.000 | 0 | 0 | 35 | 339.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan medical chekcup DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | Orang | 175 | 18.472.500.000 | 0 | 0 | 7 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Layanan administrasi DPRD | Jumlah layanan administrasi DPRD | Layanan | 3 | 9.453.750.000 | 2 | 450.000.000 | 3 | 1.865.250.000 | 1 | 450.000.000 | 33,33 | 24,13 | 3 | 900.000.000,00 | 100 | 9,52 | | |
| | Fasilitasi fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Laporan | 60 | 18.750.000 | 0 | 0 | 3 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | Paket | 108 | 9.000.000.000 | 9 | 450.000.000 | 12 | 61.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 450.000.000,00 | 8,3333 | 5 | | |
| | Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Laporan | 60 | 435.000.000 | 1 | 0 | 36 | 1.800.000.000 | 3 | 450.000.000 | 8,33 | 25 | 4 | 450.000.000,00 | 6,6667 | 103,45 | | |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 174.031.081.000 | 75 | 4.272.667.084 | 100 | 9.665.273.500 | 25 | 2.525.399.268 | 25 | 26,13 | 100 | 6.798.066.352,00 | 100 | 3,91 | | |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Dokumen | 200 | 1.120.250.000 | 3 | 4.475.000 | 41 | 143.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.475.000,00 | 1,5 | 0,3995 | | |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Dokumen | 60 | 51.000.000 | 0 | 0 | 40 | 7.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Dokumen | 60 | 448.000.000 | 3 | 4.475.000 | 12 | 65.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.475.000,00 | 5 | 0,9989 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan kajian perundang-undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | Dokumen | 60 | 121.250.000 | 0 | 0 | 12 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Dokumen | 20 | 500.000.000 | 0 | 0 | 12 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembahasan kebijakan Anggaran | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah | Rekomen dasi | 50 | 746.750.000 | 0 | 0 | 4 | 158.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah laporan KUA dan PPAS | Dokumen | 10 | 182.000.000 | 0 | 0 | 16 | 33.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah laporan Perubahan KUA dan PPAS | Dokumen | 10 | 162.750.000 | 0 | 0 | 2 | 34.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan APBD | Jumlah Pembahasan APBD | Dokumen | 10 | 124.000.000 | 0 | 0 | 2 | 38.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Pembahasan APBD Perubahan | Dokumen | 10 | 148.000.000 | 0 | 0 | 2 | 28.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan Pertanggung jawaban APBD | Jumlah laporan Pertanggung jawaban | Dokumen | 10 | 130.000.000 | 5 | 0 | 2 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 50 | 0 | | |
| | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan | Rekemon dasi | 300 | 17.110.235.000 | 5 | 0 | 8 | 66.800.000 | 1 | 0 | 12,5 | 0 | 6 | - | 2 | 0 | | |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Laporan | 60 | 40.000.000 | 0 | 0 | 74 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Laporan | 60 | 40.000.000 | 1 | 0 | 12 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1,66 67 | 0 | | |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 60 | 40.000.000 | 1 | 0 | 12 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1,66 67 | 0 | | |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Laporan | 60 | 40.000.000 | 0 | 0 | 12 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang sumber daya alam | Laporan | 60 | 40.000.000 | 0 | 0 | 12 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dokumen | 10 | 60.000.000 | 1 | 0 | 12 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |
| | Pengawasan penggunaan anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Dokumen | 60 | 16.791.235.000 | 0 | 0 | 1 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Rekomen dasi | 10 | 59.000.000 | 2 | 0 | 1 | 18.800.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 3 | - | 30 | 0 | | |
| | Peningkatan kapasitas DPRD | Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya | Orang | 35 | 19.787.830.000 | 35 | 101.262.000 | 35 | 1.915.276.000 | 35 | 709.704.255 | 100 | 37,05 | 70 | 810.966.255,00 | 200 | 4,09 83 | | |
| | Pendalaman tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | Dokumen | 60 | 7.334.580.000 | 3 | 51.462.000 | 35 | 1.683.676.000 | 3 | 663.804.255 | 8,57 | 39,43 | 6 | 715.266.255,00 | 10 | 9,75 2 | | |
| | Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Orang | 180 | 450.000.000 | 9 | 22.500.000 | 36 | 90.000.000 | 3 | 22.500.000 | 8,33 | 25 | 12 | 45.000.000,00 | 6,66 67 | 10 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan tenaga ahli fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Orang | 420 | 546.000.000 | 21 | 27.300.000 | 84 | 93.600.000 | 3 | 23.400.000 | 3,57 | 25 | 24 | 50.700.000,00 | 5,7143 | 9,2857 | | |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | Dokumen | 10 | 11.420.375.000 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Publikasi dan dokumentasi dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Dokumen | 60 | 36.875.000 | 0 | 0 | 1 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyerapan dan penghimpunan masyarakat | Jumlah usulan dan aspirasi maysrakat yang difasilitasi | Usulan | 175 | 22.204.250.000 | 35 | 1.358.315.000 | 35 | 2.053.250.000 | 35 | 447.660.000 | 100 | 21,8 | 70 | 1.805.975.000,00 | 40 | 8,1335 | | |
| | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | Laporan | 60 | 174.250.000 | 12 | 19.205.000 | 12 | 42.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.205.000,00 | 20 | 11,022 | | |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | Dokumen | 175 | 11.015.000.000 | 35 | 3.000.000 | 35 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.000.000,00 | 20 | 0,0272 | | |
| | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Dokumen | 175 | 11.015.000.000 | 35 | 1.336.110.000 | 3 | 2.009.250.000 | 1 | 447.660.000 | 33,33 | 22,28 | 36 | 1.783.770.000,00 | 20,571 | 16,194 | | |
| | Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD | Jumlah pelanngaran kode otik yang terselesaikan | Kasus | 35 | 25.000.000 | 0 | 0 | 2 | 7.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Kode Etik | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengawasan kode etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Laporan | 35 | 25.000.000 | 0 | 0 | 2 | 5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembahasan kerja sama daerah | Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi | Dokumen | 120 | 75.633.110.000 | 5 | 45.000.000 | 7 | 696.620.000 | 3 | 59.000.000 | 42,86 | 8,47 | 8 | 104.000.000,00 | 6,6667 | 0,1375 | | |
| | Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Dokumen | 60 | 73.555.610.000 | 0 | 0 | 7 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi | Dokumen | 60 | 2.077.500.000 | 5 | 45.000.000 | 12 | 695.120.000 | 3 | 59.000.000 | 25 | 8,49 | 8 | 104.000.000,00 | 13,333 | 5,006 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)// Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | dan Publikasi yang Disusun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi tugas DPRD | Jumlah jenis tugas DPRD yang di fasilitasi | Jenis | 4 | 37.403.656.000 | 2 | 2.763.615.084 | 4 | 4.624.727.500 | 1 | 1.309.035.013 | 25 | 28,31 | 3 | 4.072.650.097,00 | 75 | 10,888 | | |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Dokumen | 60 | 33.380.810.000 | 5 | 2.639.135.000 | 12 | 4.130.779.000 | 3 | 1.309.035.013 | 25 | 31,69 | 8 | 3.948.170.013,00 | 13,33 | 11,828 | | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Dokumen | 60 | 60.000.000 | 0 | 0 | 4 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Dokumen | 60 | 3.012.380.000 | 5 | 124.480.084 | 12 | 393.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124.480.084,00 | 8,33 | 4,1323 | | |
| | Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Dokumen | 21 | 950.466.000 | 0 | | 1 | 88.072.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 43.513.571.640 | 100 | 1.742.139.328 | 100 | 14.188.248.574 | 100 | 2.327.357.250 | 100 | 16,4 | 200 | 4.069.496.578,00 | 200 | 9,35 | Inspektora t | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 96.765.000 | 3 | 0 | 12 | 6.450.000 | 4 | 0 | 33,33 | 0 | 7 | - | 13 | 0 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 16.325.000 | 0 | 0 | 3 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 15.222.500 | 0 | 0 | 1 | 750.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 11.222.500 | 0 | 0 | 1 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 13.000.000 | 1 | 0 | 1 | 975.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 40 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 14.995.000 | 0 | 0 | 1 | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 13.000.000 | 1 | 0 | 1 | 975.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 40 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 13.000.000 | 1 | 0 | 4 | 975.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | - | 10 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 125 | 40.602.435.125 | 6 | 1.609.111.628 | 25 | 12.068.751.260 | 7 | 2.309.207.250 | 28 | 19,13 | 13 | 3.918.318.878,00 | 10,4 | 9,6505 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 5110 | 39.937.485.125 | 219 | 1.572.841.628 | 1.022 | 11.916.471.260 | 292 | 2.271.137.250 | 28,57 | 19,06 | 511 | 3.843.978.878,00 | 10 | 9,625 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|--------------------|--|------------|---|----------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 664.950.000 | 3 | 36.270.000 | 12 | 152.280.000 | 3 | 38.070.000 | 25 | 25 | 6 | 74.340.000,00 | 10,909 | 11,18 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 365 | 538.134.015 | 3 | 18.304.000 | 73 | 757.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.304.000,00 | 0,8219 | 3,4014 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Paket | 5 | 37.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 365 | 500.634.015 | 3 | 18.304.000 | 73 | 757.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.304.000,00 | 0,8219 | 3,6562 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 7 | 927.737.500 | 2 | 61.623.700 | 6 | 416.897.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.623.700,00 | 28,571 | 6,6424 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 6.375.000 | 0 | 0 | 1 | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 50.000.000 | 0 | 1.530.700 | 1 | 9.602.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530.700,00 | 0 | 3,0614 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 47.287.500 | 0 | 14.666.000 | 4 | 100.762.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.666.000,00 | 0 | 31,015 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 20 | 432.825.000 | 0 | 6.300.000 | 3 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300.000,00 | 0 | 1,4556 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 15 | 191.250.000 | 3 | 12.500.000 | 12 | 31.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.500.000,00 | 20 | 6,5359 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|------------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 200.000.000 | 3 | 26.627.000 | 12 | 267.032.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.627.000,00 | 5 | 13,314 | | |
| | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 50 | 75.000.000 | 0 | 0 | 1 | 597.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 75.000.000 | 0 | 0 | 10 | 597.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 50 | 1.198.500.000 | 2 | 53.100.000 | 3 | 270.850.000 | 0 | 18.150.000 | 0 | 6,7 | 2 | 71.250.000,00 | 4 | 5,9449 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 15 | 857.750.000 | 107 | 2.250.000 | 450 | 14.200.000 | 51 | 0 | 11,33 | 0 | 158 | 2.250.000,00 | 1053,3 | 0,2623 | | |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2250 | 60.000.000 | 0 | 31.000.000 | 3 | 101.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000.000,00 | 0 | 51,667 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 15 | 280.750.000 | 3 | 19.850.000 | 12 | 154.800.000 | 3 | 18.150.000 | 25 | 11,72 | 6 | 38.000.000,00 | 40 | 13,535 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 1 | 75.000.000 | 0 | 0 | 1 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | 0 | 0 | 1 | 70.000.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 100 | 0 | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|-------------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|---------------|--|------------|---|------|--|----------------|---|-------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyelenggaraan pengawasan | Persentase pelanggaran pegawai | Persen | 1 | 9.388.270.000 | 100 | 477.440.000 | 100 | 1.944.974.000 | 0 | 14.400.007 | 0 | 0,74 | 100 | 491.840.007,00 | ### ### | 5,24 | | |
| | Penyelenggaraan pengawasan internal | Jumlah temuan pelanggaran yang ditindaklanjuti | Kasus | 740 | 8.140.570.000 | 3 | 468.600.000 | 4 | 1.695.434.000 | 0 | 14.400.007 | 0 | 0,85 | 3 | 483.000.007,00 | 0,40 54 | 5,93 32 | | |
| | Pengawasan kinerja pemerintah daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 195 | 1.460.300.000 | 2 | 16.660.000 | 39 | 292.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.660.000,00 | 1,02 56 | 1,14 09 | | |
| | Pengawasan keuangan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 750 | 4.590.000.000 | 44 | 407.490.000 | 150 | 918.000.000 | 11 | 7 | 7,33 | 0 | 55 | 407.490.007,00 | 7,33 33 | 8,87 78 | | |
| | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Internal yang terbentuk | Kesepakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Laporan | 240 | 2.090.270.000 | 15 | 44.450.000 | 48 | 418.054.000 | 12 | 14.400.000 | 25 | 3,44 | 27 | 58.850.000,00 | 11,2 5 | 2,81 54 | | |
| | Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu | Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan | Rekomendasi | 144 | 1.247.700.000 | 1 | 362.780.000 | 2 | 249.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362.780.000,00 | 0,69 44 | 29,0 76 | | |
| | Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Laporan | 40 | 90.000.000 | 8 | 0 | 8 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 20 | 0 | | |
| | Pengawasan dengan tujuan tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | laporan | 44 | 1.157.700.000 | 14 | 362.780.000 | 10 | 231.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 362.780.000,00 | 31,8 18 | 31,3 36 | | |
| | Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi | Persentase tindak lanjut temuan | Persen | 100 | 4.084.875.000 | 100 | 109.454.000 | 100 | 911.855.000 | 0 | 58.600.000 | 0 | 6,43 | 100 | 168.054.000,00 | 100 | 4,11 | | |
| | Pendampingan dan asistensi | Jumlah layanan pendampingan dan asistensi di yang di berikan | Layanan | 4 | 4.084.875.000 | 4 | 109.454.000 | 4 | 911.855.000 | 0 | 58.600.000 | 0 | 6,43 | 4 | 168.054.000,00 | 100 | 4,11 41 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|--------------------------|---|--------------|---------------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | PD | 210 | 2.901.500.000 | 20 | 97.304.000 | 42 | 580.300.000 | 10 | 58.600.000 | 23,81 | 10,1 | 30 | 155.904.000,00 | 14,286 | 5,3732 | | |
| | Pendampingan , asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | PD | 210 | 197.075.000 | 39 | 7.250.000 | 42 | 39.415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.250.000,00 | 18,571 | 3,6788 | | |
| | Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Laporan | 15 | 274.700.000 | 1 | 4.900.000 | 3 | 54.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.900.000,00 | 6,6667 | 1,7838 | | |
| | Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan zona integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | PD | 21 | 711.600.000 | 7 | 0 | 7 | 237.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 33,333 | 0 | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Persen | 100 | 66.992.853.710 | 100 | 12.921.603.017 | 100 | 14.928.537.551 | 3 | 5.375.296.542 | 3 | 36,01 | 103 | 18.296.899.559,00 | 103 | 27,31 | Badan Pendapata n Daerah | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 60 | 40.300.000 | 12 | 8.060.000 | 12 | 8.060.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 8.060.000,00 | 25 | 20 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 7.250.000 | | | 2 | 1.450.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.500.000 | | | 1 | 1.300.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----|---|-----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.750.000 | | | 1 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.050.000 | | | 1 | 1.210.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.250.000 | | | 1 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 20 | 7.000.000 | | | 4 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 10 | 3.500.000 | | | 2 | 700.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 20 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 285 | 62.413.552.240 | | | 57 | 13.912.507.551 | 12 | 5.262.346.542 | 21,05 | 37,82 | 12 | 5.262.346.542,00 | 4,2105 | 8,4314 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4200 | 61.114.097.240 | | | 840 | 13.604.105.601 | 168 | 5.208.366.542 | 20 | 38,29 | 168 | 5.208.366.542,00 | 4 | 8,5224 | | |
| | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi | Dokumen | 60 | 410.355.000 | | | 12 | 82.071.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|----------------|---|----------------------|---|----|--|--------------------|--|------------|---|----------|--|---------------|---|-----------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Pelaksanaan Tugas ASN") | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 872.250.000 | | | 12 | 222.960.000 | 3 | 53.980.000 | 25 | 24,21 | 3 | 53.980.000,00 | 5 | 6,1886 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 10.600.000 | | | 1 | 2.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | Laporan | 90 | 6.250.000 | | | 18 | 1.250.950 | 3 | 0 | 16,67 | 0 | 3 | - | 3,3333 | 0 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian PD yang Dilaksanakan | Layanan | | 0 | | | 1 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut yang disediakan | Pasang | 0 | 0 | | | 60 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 1.040.251.470 | | | 6 | 313.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 5.841.970 | | | 1 | 2.201.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|----|---|--------------------|--|--------------------|---|-------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 60 | 11.465.000 | | | 12 | 4.206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 211.687.500 | | | 12 | 41.455.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 60 | 122.857.000 | | | 12 | 24.915.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Penerimaan Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 75.000.000 | | | 12 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 613.400.000 | | | 12 | 225.292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 798.500.000 | | | 2 | 81.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan Meubel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 30 | 568.500.000 | | | 1 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 30 | 230.000.000 | | | 2 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 2.267.000.000 | | | 6 | 523.000.000 | 3 | 112.950.000 | 50 | 21,6 | 3 | 112.950.000,00 | 150 | 4,9824 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 11.000.000 | | | 12 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 2.256.000.000 | | | 12 | 520.800.000 | 3 | 112.950.000 | 25 | 21,69 | 3 | 112.950.000,00 | 5 | 5,0066 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|----------------|---|---------------|--|------------|---|-------|--|-------------------|---|--------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 433.250.000 | | | 12 | 75.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 57 | 333.250.000 | | | 55 | 55.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 100.000.000 | | | 2 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan | Persen | 100 | 5.298.851.000 | 100 | 12.921.603.017 | 100 | 1.493.093.500 | 3 | 49.857.500 | 3 | 3,34 | 103 | 12.971.460.517,00 | 103 | 244,8 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | Pengelolaan pendapatan daerah | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Dokumen | 350 | 5.298.851.000 | | | 48 | 1.493.093.500 | 3 | 49.857.500 | 6,25 | 3,34 | 3 | 49.857.500,00 | 0,8571 | 0,9409 | | |
| | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Dokumen | 15 | 627.500.000 | | | 1 | 440.225.000 | 1 | 49.857.500 | 100 | 11,33 | 1 | 49.857.500,00 | 6,6667 | 7,9454 | | |
| | Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Dokumen | 15 | 271.064.000 | | | 1 | 17.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Unit | 21 | 65.200.000 | | | 7 | 18.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|------------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|--------------|--|--------------------------|---|--------------|---------------------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 60 | 935.000.000 | | | 12 | 160.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan | 18 | 828.250.000 | | | 12 | 230.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penetapan wajib pajak daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen | 60 | 2.006.769.000 | | | 12 | 449.903.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengendalian, pemeriksaan dan penagwasan pajak daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Dokumen | 60 | 565.068.000 | | | 12 | 176.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 263.751.907.400 | 100 | 9.956.487.036 | 100 | 61.979.480.005 | 100 | 55.390.130.132 | 100 | 89,37 | 200 | 65.346.617.168,00 | 200 | 24,78 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 135.885.000 | 5 | 11.970.000 | 11 | 35.376.000 | 11 | 27.172.000 | 100 | 76,81 | 16 | 39.142.000,00 | 29 | 29 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 21.200.000 | 0 | 4.235.000 | 2 | 3.840.000 | 2 | 4.235.000 | 100 | 110,29 | 2 | 8.470.000,00 | 20 | 40 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 23.250.000 | 0 | 0 | 1 | 1.791.000 | 1 | 4.650.000 | 100 | 259,63 | 1 | 4.650.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 22.450.000 | 0 | 0 | 1 | 2.970.000 | 1 | 4.490.000 | 100 | 151,18 | 1 | 4.490.000,00 | 20 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|----------------|--|----------------|---|--------|--|-------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 15.550.000 | 1 | 0 | 1 | 3.480.000 | 1 | 3.110.000 | 100 | 89,37 | 2 | 3.110.000,00 | 40 | 20 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 14.760.000 | 0 | 0 | 1 | 3.070.000 | 1 | 2.952.000 | 100 | 96,16 | 1 | 2.952.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 19.125.000 | 1 | 3.825.000 | 1 | 3.980.000 | 1 | 3.825.000 | 100 | 96,11 | 2 | 7.650.000,00 | 40 | 40 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 19.550.000 | 1 | 3.910.000 | 4 | 3.410.000 | 4 | 3.910.000 | 100 | 114,66 | 5 | 7.820.000,00 | 25 | 40 | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik SektoralDaerah | Jumlah Data Statistik SektoralDaerah | Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 160 | 118.882.387.665 | 17 | 3.615.056.602 | 32 | 31.167.621.482 | 32 | 25.456.061.213 | 100 | 81,67 | 49 | 29.071.117.815,00 | 31 | 24 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4.340 | 113.934.295.165 | 240 | 3.340.316.602 | 868 | 30.206.036.227 | 868 | 24.477.645.213 | 100 | 81,04 | 1.108 | 27.817.961.815,00 | 26 | 24 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-------------|---|-------------------|--|-------------------|---|---------------|--|----------------------|---|-----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 60 | 567.932.500 | 3 | 60.248.000 | 12 | 109.088.810 | 12 | 111.421.000 | 100 | 102,14 | 15 | 171.669.000,00 | 25 | 30 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 5 | 3.845.050.000 | 0 | 192.870.000 | 1 | 782.400.000 | 1 | 759.480.000 | 100 | 97,07 | 1 | 952.350.000,00 | 20 | 25 | | |
| | Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 5 | 168.450.000 | 0 | 13.958.000 | 1 | 17.337.500 | 1 | 39.840.000 | 100 | 229,79 | 1 | 53.798.000,00 | 20 | 32 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 135.200.000 | 0 | 0 | 1 | 16.300.000 | 1 | 14.696.000 | 100 | 90,16 | 1 | 14.696.000,00 | 20 | 11 | | |
| | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 5 | 74.295.000 | 0 | 6.788.000 | 1 | 15.079.000 | 1 | 13.814.000 | 100 | 91,61 | 1 | 20.602.000,00 | 20 | 28 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 10 | 134.790.000 | 0 | 876.000 | 2 | 17.434.445 | 2 | 35.005.000 | 100 | 200,78 | 2 | 35.881.000,00 | 20 | 27 | | |
| | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 5 | 22.375.000 | 0 | 0 | 1 | 3.945.500 | 1 | 4.160.000 | 100 | 105,44 | 1 | 4.160.000,00 | 20 | 19 | | |
| | Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah | Dokumen | 25 | 66.110.000 | 0 | 0 | 5 | 21.434.500 | 5 | 24.731.500 | 100 | 115,38 | 5 | 24.731.500,00 | 20 | 37 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|-----------------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 5 | 12.537.500 | 0 | 0 | 1 | 4.357.000 | 1 | 2.425.000 | 100 | 55,66 | 1 | 2.425.000,00 | 20 | 19 | | |
| | Pengamanan barang milik daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 5 | 15.135.000 | 0 | 0 | 1 | 5.800.500 | 1 | 1.145.000 | 100 | 19,74 | 1 | 1.145.000,00 | 20 | 8 | | |
| | Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 18.100.000 | 0 | 0 | 1 | 3.425.000 | 1 | 1.707.000 | 100 | 49,84 | 1 | 1.707.000,00 | 20 | 9 | | |
| | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 20.337.500 | 0 | 0 | 1 | 3.935.000 | 1 | 3.570.000 | 100 | 90,72 | 1 | 3.570.000,00 | 20 | 18 | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.917.000 | 1 | 15.884.500 | 100 | 405,53 | 1 | 15.884.500,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 400 | 228.500.000 | 3 | 8.200.000 | 80 | 5.855.000 | 80 | 61.520.000 | 100 | 1.050,73 | 83 | 69.720.000,00 | 21 | 31 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan | Paket | 400 | 187.500.000 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 53.320.000 | 100 | #DIV/0! | 80 | 53.320.000,00 | 20 | 28 | | |
| | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 60 | 41.000.000 | 3 | 8.200.000 | 12 | 5.855.000 | 12 | 8.200.000 | 100 | 140,05 | 15 | 16.400.000,00 | 25 | 40 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 7 | 6.144.720.625 | 5 | 146.341.431 | 7 | 263.490.375 | 7 | 640.137.181 | 100 | 242,95 | 12 | 786.478.612,00 | 171 | 13 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 50 | 49.049.375 | 3 | 0 | 10 | 8.956.125 | 10 | 9.535.000 | 100 | 106,46 | 13 | 9.535.000,00 | 26 | 19 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-------------|---|----------|--|--------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 125.012.500 | 0 | 0 | 1 | 32.646.500 | 1 | 26.281.500 | 100 | 80,5 | 1 | 26.281.500,00 | 20 | 21,023 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 145 | 330.658.750 | 3 | 11.708.000 | 29 | 45.721.750 | 29 | 79.590.000 | 100 | 174,07 | 32 | 91.298.000,00 | 22,069 | 27,611 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 35 | 90.000.000 | 3 | 4.999.500 | 7 | 11.350.000 | 7 | 17.899.500 | 100 | 157,7 | 10 | 22.899.000,00 | 28,571 | 25,443 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 86.000.000 | 100 | 172 | 1 | 86.000.000,00 | 20 | 172 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 300.000.000 | 3 | 13.000.000 | 12 | 114.816.000 | 12 | 420.831.181 | 100 | 366,53 | 15 | 433.831.181,00 | 25 | 144,61 | | |
| | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 10 | 2.600.000.000 | 110 | 116.633.931 | 2 | 155.100.000 | 540 | 567.100.000 | #### | 365,64 | 650 | 683.733.931,00 | 6500 | 26,297 | | |
| | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 5 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 600.000.000 | 0 | 0 | 1 | 155.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 10 | 123.522.154.205 | 3 | 25.326.160.265 | 3 | 27.047.635.200 | | | 0 | 0 | 3 | 25.326.160.265,00 | 30 | 20,503 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 188.500.000 | 12 | 36.500.000 | 12 | 34.220.000 | | | 0 | 0 | 12 | 36.500.000,00 | 20 | 19,363 | | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 108.690.678.205 | 12 | 22.750.374.665 | 12 | 23.700.000.000 | | | 0 | 0 | 12 | 22.750.374.665,00 | 20 | 20,931 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|--|----|---|---------|--|-------------------|---|--------|--------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 15 | 14.642.976.000 | 3 | 2.539.285.600 | 3 | 3.313.415.200 | | | 0 | 0 | 3 | 2.539.285.600,00 | 20 | 17,341 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 15 | 14.772.149.905 | 4 | 3.287.247.973 | 3 | 3.282.967.448 | | | 0 | 0 | 4 | 3.287.247.973,00 | 26,667 | 22,253 | | |
| | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10 | 11.062.700.000 | 2 | 2.605.601.038 | 2 | 2.715.613.500 | | | 0 | 0 | 2 | 2.605.601.038,00 | 20 | 23,553 | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 30 | 3.055.699.905 | 6 | 548.880.935 | 6 | 518.253.948 | | | 0 | 0 | 6 | 548.880.935,00 | 20 | 17,963 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 155 | 153.750.000 | 31 | 34.466.000 | 31 | 49.100.000 | | | 0 | 0 | 31 | 34.466.000,00 | 20 | 22,417 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 500.000.000 | 1 | 98.300.000 | 1 | 0 | | | 0 | #DIV/0! | 1 | 98.300.000,00 | 20 | 19,66 | | |
| | Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target | Persen | 100 | 9.082.371.250 | 100 | 79.303.064.820 | 100 | 174.783.684.450 | 6 | 0 | 6 | 0 | 106 | 79.303.064.820,00 | 106 | 873,15 | Badan Penanggu-langan Bencana Daerah | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah | Jumlah Dokumen koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Dokumen | 1.185 | 3.940.083.750 | 237 | 577.299.716 | 237 | 591.111.500 | 6 | 0 | 2,53 | 0 | 243 | 577.299.716,00 | 21 | 15 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Dokumen | 10 | 77.300.000 | 2 | 10.670.000 | 2 | 10.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.670.000,00 | 20 | 13,803 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen | 10 | 77.427.500 | 2 | 15.335.500 | 2 | 8.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.335.500,00 | 20 | 19,806 | | |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 195 | 39.130.000 | 39 | 4.403.000 | 39 | 1.446.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.403.000,00 | 20 | 11,252 | | |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 195 | 32.130.000 | 39 | 3.000.000 | 39 | 2.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.000.000,00 | 20 | 9,3371 | | |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 195 | 38.880.000 | 39 | 0 | 39 | 1.129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 195 | 38.880.000 | 39 | 7.309.000 | 39 | 2.417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.309.000,00 | 20 | 18,799 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Dokumen | 5 | 1.376.631.250 | 1 | 210.567.188 | 1 | 240.228.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210.567.188,00 | 20 | 15,296 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | 5 | 1.542.381.250 | 1 | 244.176.000 | 1 | 253.238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244.176.000,00 | 20 | 15,831 | | |
| | Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen | 60 | 110.397.500 | 12 | 20.258.500 | 12 | 14.574.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20.258.500,00 | 20 | 18,351 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|----------------|---|----------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|----------|---|----------|--|-----------------------|---|---------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Dokumen | 60 | 411.236.250 | 12 | 37.129.528 | 12 | 31.885.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37.129.528,00 | 20 | 9,0288 | | |
| | Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Dokumen | 60 | 100.020.000 | 12 | 8.971.000 | 12 | 14.891.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.971.000,00 | 20 | 8,9692 | | |
| | Pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 195 | 95.670.000 | 39 | 15.480.000 | 39 | 9.412.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15.480.000,00 | 20 | 16,181 | | |
| | Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Dokumen | 340 | 1.454.027.500 | 68 | 257.102.180 | 68 | 171.547.500 | 3 | 0 | 4,41 | 0 | 71 | 257.102.180,00 | 20,882 | 17,682 | | |
| | Koordinasi dan pengelolaan kas daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | 60 | 92.020.000 | 12 | 18.180.000 | 12 | 35.917.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18.180.000,00 | 20 | 19,757 | | |
| | Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas di SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen | 60 | 195.700.000 | 12 | 5.600.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 5.600.000,00 | 20 | 2,8615 | | |
| | Penatausahaan pembiayaan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Dokumen | 60 | 216.400.000 | 12 | 40.178.000 | 12 | 28.631.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40.178.000,00 | 20 | 18,567 | | |
| | Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi , monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen | 120 | 575.982.500 | 4 | 103.173.629 | 4 | 31.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103.173.629,00 | 3,3333 | 17,913 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan trnasaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga kuangan bukan bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Dokumen | 20 | 85.265.000 | 4 | 23.752.926 | 4 | 9.069.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.752.926,00 | 20 | 27,858 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetora perhitungan fihak ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lapora Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan | 60 | 233.900.000 | 12 | 58.017.625 | 12 | 45.980.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 58.017.625,00 | 25 | 24,804 | | |
| | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen | 60 | 54.760.000 | 12 | 8.200.000 | 12 | 20.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.200.000,00 | 20 | 14,974 | | |
| | Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan | Dokumen | 415 | 3.249.370.000 | 67 | 673.187.827 | 165 | 740.064.750 | 6 | 0 | 3,64 | 0 | 73 | 673.187.827,00 | 17,59 | 20,717 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|-------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | pelaporan keuangan daerah | Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Laporan | 60 | 93.690.000 | 12 | 0 | 12 | 16.859.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 20 | 0 | | |
| | Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban | Dokumen | 60 | 51.785.000 | 12 | 10.357.000 | 12 | 8.484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.357.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran | Laporan | 60 | 325.065.000 | 12 | 6.979.000 | 12 | 42.262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.979.000,00 | 20 | 2,147 | | |
| | Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Laporan | 60 | 1.406.057.500 | 12 | 267.426.000 | 12 | 429.404.500 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 267.426.000,00 | 25 | 19,02 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan pertauran kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 10 | 181.757.500 | 2 | 35.331.500 | 2 | 32.860.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.331.500,00 | 20 | 19,439 | | |
| | Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.584.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Dokumen | 5 | 11.940.000 | 1 | 168.586.000 | 12 | 158.959.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168.586.000,00 | 20 | 141,9 | | |
| | Penyusunan analisis laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Dokumen | 0 | 0 | 12 | 27.500.000 | 1 | 1.602.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27.500.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Dokumen | 60 | 843.855.000 | 0 | 0 | 1 | 24.461.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah | Jumlah istem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen | 5 | 13.010.000 | 1 | 58.955.522 | 1 | 22.371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.955.522,00 | 20 | 453,16 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|--|----------|---|----------|--|--------------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 5 | 322.210.000 | 1 | 98.052.805 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 98.052.805,00 | 20 | 30,431 | | |
| | Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten/kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | Lembaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Koordinasi dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen | 5 | 438.890.000 | 1 | 77.795.475.097 | 2 | 173.280.960.700 | 1 | 0 | 50 | 0 | 2 | 77.795.475.097,00 | 40 | 17726 | | |
| | Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Laporan | 320 | 438.890.000 | 80 | 77.795.475.097 | 80 | 164.752.079.700 | 30 | 0 | 37,5 | 0 | 110 | 77.795.475.097,00 | 34,375 | 17726 | | |
| | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.528.881.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pengelolaan barang milik daerah | Persentase PD Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah | Persen | 100 | 29.928.056.250 | 100 | 6.695.647.711 | 100 | 15.537.385.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.695.647.711,00 | 100 | 22,37 | | |
| | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | Dokumen | 55 | 29.928.056.250 | 140 | 6.695.647.711 | 102 | 15.537.385.314 | 2 | 0 | 1,96 | 0 | 142 | 6.695.647.711,00 | 258 | 22 | | |
| | Penyusunan standar harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | Dokumen | 5 | 172.705.000 | 1 | 31.913.000 | 1 | 50.870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.913.000,00 | 20 | 18,478 | | |
| | Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen | 10 | 65.240.000 | 2 | 3.555.000 | 2 | 19.291.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.555.000,00 | 20 | 5,4491 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|--|----|---|----|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen | 5 | 107.940.000 | 1 | 7.369.000 | 1 | 12.956.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.369.000,00 | 20 | 6,8269 | | |
| | Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Dokumen | 200 | 37.465.000 | 40 | 700.000 | 40 | 5.198.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 700.000,00 | 20 | 1,8684 | | |
| | penatausahaan barang milik daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 250 | 348.271.250 | 3 | 84.811.250 | 3 | 17.327.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84.811.250,00 | 1,2 | 24,352 | | |
| | Inventarisasi barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Laporan | 15 | 101.462.500 | 3 | 13.557.500 | 3 | 7.610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.557.500,00 | 20 | 13,362 | | |
| | Pengamanan barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Laporan | 125 | 75.522.500 | 25 | 31.526.000 | 25 | 60.554.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31.526.000,00 | 20 | 41,744 | | |
| | Penilaian barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan | 15 | 14.481.750.000 | 3 | 3.026.059.000 | 3 | 10.945.059.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.026.059.000,00 | 20 | 20,896 | | |
| | Pengawasan dan pengendaliin pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Laporan | 25 | 186.454.500 | 5 | 155.790.000 | 5 | 6.043.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155.790.000,00 | 20 | 83,554 | | |
| | Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, oemusnahan dan penghapusan barang milik daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen | 75 | 13.722.455.500 | 12 | 3.247.959.961 | 15 | 4.257.045.400 | 2 | 0 | 13,33 | 0 | 14 | 3.247.959.961,00 | 18,667 | 23,669 | | |
| | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | 15 | 147.375.000 | 3 | 26.679.000 | 3 | 19.832.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.679.000,00 | 20 | 18,103 | | |
| | Penyusunan laporan barang milik daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Laporan | 5 | 328.850.000 | 1 | 59.608.000 | 1 | 78.597.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.608.000,00 | 20 | 18,126 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|-------|--|------------------|---|----------|---|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 200 | 152.565.000 | 40 | 6.120.000 | 40 | 57.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.120.000,00 | 20 | 4,0114 | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 53.687.788.540 | 90 | 5.280.650.122 | 100 | 5.998.045.740 | 1 | 1.224.130.410 | 1,13 | 20,41 | 91 | 6.504.780.532,00 | 91,13 | 12,12 | Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 3.975.400 | 3 | 2.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.975.400,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 130 | 48.211.863.600 | 26 | 4.697.809.053 | 44 | 5.216.210.340 | 7 | 1.186.480.410 | 15,91 | 22,75 | 33 | 5.884.289.463,00 | 25,385 | 12,205 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 3570 | 24.394.406.800 | 714 | 4.571.929.053 | 1050 | 5.071.299.940 | 300 | 1.151.380.410 | 28,57 | 22,7 | 1014 | 5.723.309.463,00 | 28,403 | 23,462 | | |
| | pelaksanaan penatalaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 23.817.456.800 | 12 | 125.880.000 | 12 | 140.400.000 | 3 | 35.100.000 | 25 | 25 | 15 | 160.980.000,00 | 25 | 0,6759 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|------------------|---|-------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.510.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah | Dokumen | 5 | 1.500.000 | 1 | 0 | 1 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 1.500.000 | 1 | 0 | 1 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 225 | 135.000.000 | 8 | 27.000.000 | 22 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.000.000,00 | 3,5556 | 20 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Paket | 225 | 135.000.000 | 45 | 27.000.000 | 22 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 7 | 3.511.095.000 | 41 | 207.681.669 | 7 | 427.705.400 | 0 | 9.150.000 | 0 | 2,14 | 41 | 216.831.669,00 | 585,71 | 6,1756 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 40 | 1.876.972.500 | 7 | 6.848.000 | 8 | 13.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.848.000,00 | 17,5 | 0,3648 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 8 | 19.105.000 | 2 | 31.695.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.105.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 116.350.000 | 3 | 64.723.525 | 4 | 105.300.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64.723.525,00 | 15 | 55,628 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 711.352.500 | 2 | 5.840.000 | 2 | 10.358.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.840.000,00 | 20 | 0,821 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 35.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.000.000,00 | 20 | 22,857 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 80.000.000 | 12 | 75.165.144 | 12 | 202.106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.165.144,00 | 20 | 93,956 | | |
| | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 5 | 691.420.000 | 1 | 28.000.000 | 1 | 57.000.000 | 0 | 9.150.000 | 0 | 16,05 | 1 | 37.150.000,00 | 20 | 5,373 | | |
| | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 235.000.000 | 2 | 114.800.000 | 2 | 93.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114.800.000,00 | 100 | 48,851 | | |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Pengadaan Mebel | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 25 | 235.000.000 | 5 | 114.800.000 | 5 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114.800.000,00 | 20 | 48,851 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 1.033.000.000 | 3 | 181.300.000 | 2 | 121.950.000 | 2 | 28.500.000 | 100 | 23,37 | 5 | 209.800.000,00 | 250 | 20,31 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 1.029.000.000 | 12 | 22.000.000 | 12 | 23.200.000 | 3 | 4.500.000 | 25 | 19,4 | 15 | 26.500.000,00 | 25 | 2,5753 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 4.000.000 | 12 | 159.000.000 | 12 | 98.750.000 | 3 | 24.000.000 | 25 | 24,3 | 15 | 183.000.000,00 | 25 | 4575 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 560.329.940 | 5 | 48.084.000 | 3 | 114.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.084.000,00 | 250 | 8,5814 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----|---|----------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaan dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 5 | 355.164.970 | 1 | 11.069.000 | 2 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.069.000,00 | 20 | 3,1166 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 115 | 205.164.970 | 23 | 37.015.000 | 23 | 49.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37.015.000,00 | 20 | 18,042 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | | 0 | 0 | 1 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Persen | 0 | 6.020.368.000 | 100 | 1.358.473.950 | 100 | 1.387.587.750 | #REF! | | #REF! | 0 | #REF! | 1.358.473.950,00 | #REF! | 22,56 | | |
| | Penyusunan perencanaan dan pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan | Dokumen | 5 | 3.502.775.000 | 7 | 722.136.950 | 5 | 728.947.000 | | | 0 | 0 | 7 | 722.136.950,00 | 140 | 20,616 | | |
| | Pelaksanaan konsultasi publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | 5 | 175.765.000 | 1 | 28.088.400 | 1 | 55.122.000 | | | 0 | 0 | 1 | 28.088.400,00 | 20 | 15,981 | | |
| | Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | 5 | 181.580.000 | 1 | 31.053.900 | 1 | 33.177.000 | | | 0 | 0 | 1 | 31.053.900,00 | 20 | 17,102 | | |
| | Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | ### | 452.615.000 | 1 | 81.580.400 | 1 | 109.796.000 | | | 0 | 0 | 1 | 81.580.400,00 | 0,0071 | 18,024 | | |
| | Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Usulan | 20 | 389.125.000 | 1,550 | 69.857.700 | 1550 | 39.431.000 | | | 0 | 0 | 1.550 | 69.857.700,00 | 7750 | 17,953 | | |
| | Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | 50 | 2.303.690.000 | 4 | 511.556.550 | 4 | 491.421.000 | | | 0 | 0 | 4 | 511.556.550,00 | 8 | 22,206 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|----|---|-------------|--|-------------|---|--------|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen | 0 | 0 | | | 6 | 248.622.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen | 0 | 0 | | | 6 | 144.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Orang | 0 | 0 | | | 100 | 104.622.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah | Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang Dikeluarkan | Dokumen | 20 | 783.546.250 | | | 11 | 316.476.000 | 10 | 591.436.500 | 90,91 | 186,88 | 10 | 591.436.500,00 | 50 | 75,482 | | |
| | Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 30 | 323.200.000 | | | 5 | 126.713.000 | 4 | 64.182.500 | 80 | 50,65 | 4 | 64.182.500,00 | 13,333 | 19,858 | | |
| | Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 5 | 460.346.250 | | | 6 | 189.763.000 | 6 | 527.254.000 | 100 | 277,85 | 6 | 527.254.000,00 | 120 | 114,53 | | |
| | Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Dokumen | 5 | 1.734.046.750 | | | 2 | 93.542.750 | 1 | 44.900.500 | 50 | 48 | 1 | 44.900.500,00 | 20 | 2,5893 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|----|---|--------------------|--|--------------------|---|---------------|--|-----------------------|---|-----------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan data dalam distem informasi pemerintahan daerah bidang pembangunan daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Dokumen | 50 | 125.000.000 | | | 1 | 56.493.000 | 1 | 20.389.000 | 100 | 36,09 | 1 | 20.389.000,00 | 2 | 16,311 | | |
| | penerapan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Dokumen | 100 | 1.609.046.750 | | | 1 | 37.049.750 | 10 | 24.511.500 | 1.000,00 | 66,16 | 10 | 24.511.500,00 | 10 | 1,5234 | | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persen | 153 | 6.866.859.000 | | | 100 | 271.903.450 | 100 | 161.186.700 | 100 | 59,28 | 100 | 161.186.700,00 | 65,359 | 2,3473 | | |
| | Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Dokumen | 10 | 772.065.000 | | | 9 | 119.838.450 | 8 | 130.750.000 | 88,89 | 109,11 | 8 | 130.750.000,00 | 80 | 16,935 | | |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | 15 | 300.000.000 | | | 2 | 23.515.250 | 2 | 59.940.000 | 100 | 254,9 | 2 | 59.940.000,00 | 13,333 | 19,98 | | |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 8 | 472.065.000 | | | 7 | 96.323.200 | 2 | 70.810.000 | 28,57 | 73,51 | 2 | 70.810.000,00 | 25 | 15 | | |
| | Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Dokumen | 0 | 0 | | | 13 | 57.093.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|----|---|--------------------|--|-------------------|---|--------------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Laporan | 0 | 0 | | | 11 | 30.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Sumber Daya Alam) | Laporan | 0 | 0 | | | 2 | 26.443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Dokumen | 25 | 6.094.794.000 | | | 10 | 94.972.000 | 8 | 30.436.700 | 80 | 32,05 | 8 | 30.436.700,00 | 32 | 0,4994 | | |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | 25 | 157.355.000 | | | 5 | 50.706.500 | 5 | 16.166.500 | 100 | 31,88 | 5 | 16.166.500,00 | 20 | 10,274 | | |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Laporan | 100 | 5.937.439.000 | | | 5 | 44.265.500 | 5 | 14.270.200 | 100 | 32,24 | 5 | 14.270.200,00 | 5 | 0,2403 | | |
| | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Persen | 10 | 5.150.716.000 | | | 70 | 515.766.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Dokumen | 5 | 3.392.364.000 | | | 2 | 185.816.000 | 70 | 864.811.000 | 3.500,00 | 465,41 | 70 | 864.811.000,00 | 1400 | 25,493 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|----------------|---|----------------------|---|----|--|--------------------|--|--------------------|---|---------------|--|-----------------------|---|-----------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Laporan | 5 | 675.600.000 | | | 1 | 92.611.000 | 2 | 175.540.000 | 200 | 189,55 | 2 | 175.540.000,00 | 40 | 25,983 | | |
| | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Laporan | 9 | 2.716.764.000 | | | 1 | 93.205.000 | 1 | 105.887.500 | 100 | 113,61 | 1 | 105.887.500,00 | 11,111 | 3,8976 | | |
| | Penelitian dan pengembangan bidang sosial bidang kependudukan | Jumlah Kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan | dokumen | 3 | 1.758.352.000 | | | 2 | 177.481.000 | 3 | 423.797.500 | 150 | 238,78 | 3 | 423.797.500,00 | 100 | 24,102 | | |
| | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Dokumen | 3 | 429.917.000 | | | 1 | 88.588.000 | 1 | 146.961.000 | 100 | 165,89 | 1 | 146.961.000,00 | 33,333 | 34,184 | | |
| | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Dokumen | 6 | 1.328.435.000 | | | 1 | 88.893.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 113.124.000 | 1 | 69.682.500 | 100 | 61,6 | 1 | 69.682.500,0 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 93.124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|--------|--|------------------|---|----------|---|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengembangan inovasi dan teknologi | Jumlah inovasi dan teknologi yang tersedia | Inovasi | 0 | 0 | | | 1 | 39.345.000 | 3 | 195.791.000 | 300 | 497,63 | 3 | 195.791.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Dokumen | 0 | 0 | | | 1 | 39.345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 28.605.307.390 | 100 | 5.711.210.926 | 100 | 6.131.430.918 | 0 | 1.286.444.807 | 0 | 20,98 | 50 | 6.997.655.733,00 | 50 | 24,46 | Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 95 | 166.505.000 | 19 | 33.301.000 | 21 | 46.775.000 | 4 | 2.400.000 | 19 | 5,13 | 23 | 35.701.000,00 | 24,21 | 21,44 | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 20.345.000 | 2 | 4.069.000 | 3 | 8.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.069.000,00 | 20 | 20 | | |
| 2 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 12.150.000 | 1 | 2.430.000 | 1 | 5.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.430.000,00 | 20 | 20 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.160.000 | 1 | 4.032.000 | 1 | 2.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.032.000,00 | 20 | 20 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Dokumen | 5 | 13.400.000 | 1 | 2.680.000 | 1 | 6.095.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.680.000,00 | 40 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 24.375.000 | 1 | 4.875.000 | 1 | 4.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.875.000,00 | 20 | 20 | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 59.150.000 | 1 | 11.830.000 | 1 | 6.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.830.000,00 | 20 | 20 | | |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 60 | 16.925.000 | 12 | 3.385.000 | 12 | 3.050.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 3.385.000,00 | 25 | 20 | | |
| 8 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.475.000 | 3 | 2.400.000 | 25 | 22,91 | 3 | 2.400.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 225 | 27.048.328.970 | 45 | 4.927.983.976 | 45 | 5.484.879.018 | 0 | 1.244.585.807 | 0 | 22,69 | 45 | 6.172.569.783,00 | 20 | 22,82 | | |
| 1 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4200 | 26.217.743.970 | 840 | 4.755.770.976 | 840 | 5.303.121.718 | 217 | 1.209.215.807 | 26 | 22,8 | 1.057 | 5.964.986.783,00 | 25,17 | 22,75 | | |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 736.450.000 | 12 | 155.850.000 | 12 | 164.400.000 | 3 | 35.370.000 | 25 | 21,51 | 15 | 191.220.000,00 | 25 | 25,97 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)// Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|-----------|---|---------|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 16.305.000 | 1 | 3.261.000 | 1 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.261.000,00 | 20 | 20 | | |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semes teran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Laporan | 90 | 77.830.000 | 18 | 13.102.000 | 18 | 11.757.300 | 4 | 0 | 22 | 0 | 22 | 13.102.000,00 | 24,44 | 16,83 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 300 | 375.000.000 | 4 | 288.063.500 | 7 | 268.401.900 | 0 | 8.300.000 | 0 | 3,09 | 4 | 296.363.500,00 | 1,33 | 79,03 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 7 | 1.608.709.500 | 5 | 8.858.500 | 2 | 3.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.858.500,00 | 71,43 | 0,55 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 15 | 46.150.000 | 3 | 2.430.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 2.430.000,00 | 20 | 5,27 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 12.150.000 | 4 | 48.504.000 | 3 | 62.154.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.504.000,00 | 20 | 399,21 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 60 | 212.049.500 | 12 | 20.185.000 | 4 | 6.823.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20.185.000,00 | 20 | 9,52 | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 60 | 102.175.000 | 0 | 0 | 1 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 157.625.000 | 12 | 38.300.000 | 12 | 40.210.000 | 3 | 3.800.000 | 25 | 9,45 | 15 | 42.100.000,00 | 300 | 26,71 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 1.028.560.000 | 12 | 169.786.000 | 12 | 151.084.000 | 3 | 4.500.000 | 25 | 2,98 | 15 | 174.286.000,00 | 25 | 16,94 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 5 | 1.015.473.420 | 2 | 145.540.000 | 2 | 80.390.000 | 0 | 16.800.000 | 0 | 20,9 | 2 | 162.340.000,00 | 40 | 15,99 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 221.773.420 | 12 | 4.180.000 | 12 | 4.940.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 4.180.000,00 | 25 | 1,88 | | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 10 | 793.700.000 | 2 | 141.360.000 | 12 | 75.450.000 | 3 | 16.800.000 | 25 | 22,27 | 5 | 158.160.000,00 | 50 | 19,93 | | |
| | Kepegawaian Daerah | Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian | Persen | 100 | 6.183.173.550 | 100 | 1.096.511.400 | 100 | 1.483.427.000 | 0 | 112.000.000 | 0 | 7,55 | 100 | 1.208.511.400,00 | 100 | 19,55 | | |
| | Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | Jumlah jenis informasi terkait pengadaan, pemberhentian dan kepegawaian | Jenis | 7 | 2.150.410.550 | 7 | 518.500.400 | 7 | 466.217.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 21,45 | 7 | 618.500.400,00 | 100 | 28,76 | | |
| | Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan penagadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Dokumen | 5 | 52.250.000 | 1 | 10.450.000 | 1 | 8.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.450.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Dokumen | 5 | 358.250.000 | 1 | 71.310.000 | 1 | 62.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.310.000,00 | 20 | 19,91 | | |
| | Koordinasi dan pelaksanaan administrasi pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Dokumen | 5 | 99.218.000 | 1 | 28.550.000 | 1 | 12.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.550.000,00 | 20 | 28,78 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------|---|----------|--|-----------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Fasilitasi lembaga profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | Lembaga | 1 | 990.098.550 | 1 | 250.000.000 | 1 | 300.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 33,33 | 1 | 350.000.000,00 | 100 | 35,35 | | |
| | Pengelolaan sistem informasi kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 10 | 314.850.000 | 2 | 35.517.400 | 2 | 37.457.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.517.400,00 | 20 | 11,28 | | |
| | Pengelolaan data kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | Dokumen | 20 | 175.704.000 | 3 | 57.388.000 | 3 | 11.250.000 | 1 | 0 | 33 | 0 | 4 | 57.388.000,00 | 20 | 32,66 | | |
| | Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Laporan | 5 | 160.040.000 | 4 | 65.285.000 | 4 | 33.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65.285.000,00 | 80 | 40,79 | | |
| | Mutasi dan promosi ASN | Jumlah ASN yangmendapatkan mutasi dan promosi | Orang | 7000 | 1.014.538.000 | 1.865 | 167.837.000 | 1.865 | 313.692.000 | 129 | 0 | 7 | 0 | 1.994 | 167.837.000,00 | 28,49 | 16,54 | | |
| | Pengelolaan mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Dokumen | 5 | 273.648.000 | 1 | 42.882.000 | 1 | 23.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.882.000,00 | 20 | 15,67 | | |
| | Pengelolaan kenaikan pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Dokumen | 10 | 661.950.000 | 2 | 106.620.000 | 2 | 113.212.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106.620.000,00 | 20 | 16,11 | | |
| | Pengelolaan promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Dokumen | 5 | 78.940.000 | 1 | 18.335.000 | 1 | 177.205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.335.000,00 | 20 | 23,23 | | |
| | Pengembangan kompetensi ASN | jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Orang | 5.606 | 1.481.950.000 | 275 | 118.564.000 | 275 | 421.414.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276 | 118.564.000,00 | 4,92 | 8 | | |
| | Pengelolaan assesment center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | Dokumen | 10 | 1.357.950.000 | 1 | 88.473.000 | 3 | 361.584.000 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 88.473.000,00 | 20 | 6,52 | | |
| | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|--------------|---------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|---|-------------|--|-----------------------------|---|-------------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | Orang | 150 0 | 124.000.00 0 | 251 | 30.091.00 0 | 251 | 31.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 30.091.000,0 0 | 16,7 3 | 24,2 7 | | |
| | Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Jumlah ASN yang di mendapatkan evaluasi dan penilaian kinerja | Orang | 700 0 | 1.536.275.0 00 | 6.5 89 | 291.610.0 00 | 6.5 89 | 282.104.00 0 | 4.8 62 | 12.000.00 0 | 74 | 4,25 | 11.45 1 | 303.610.000,0 00 | 163, 59 | 19,7 6 | | |
| | Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja apartur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen | 10 | 133.000.00 0 | 2 | 20.750.00 0 | 2 | 43.160.000 | 1 | 12.000.00 0 | 50 | 27,8 | 3 | 32.750.000,0 0 | 30 | 24,6 2 | | |
| | Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen | 42 | 228.860.00 0 | 2 | 32.400.00 0 | 2 | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.400.000,0 0 | 4,76 | 14,1 6 | | |
| | Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Laporan | 5 | 256.750.00 0 | 2 | 40.640.00 0 | 2 | 14.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.640.000,0 0 | 40 | 15,8 3 | | |
| | Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | Orang | 100 0 | 429.815.00 0 | 150 | 103.900.0 00 | 150 | 123.150.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 103.900.000,0 00 | 15 | 24,1 7 | | |
| | Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | Orang | 150 0 | 82.500.000 | 100 | 16.500.00 0 | 100 | 20.724.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16.500.000,0 0 | 6,67 | 20 | | |
| | Pembinaan disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | Orang | 450 | 219.100.00 0 | 85 | 41.670.00 0 | 85 | 11.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 41.670.000,0 0 | 18,8 9 | 19,0 2 | | |
| | Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Laporan | 50 | 93.000.000 | 10 | 17.850.00 0 | 10 | 30.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.850.000,0 0 | 20 | 19,1 9 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|-------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelayanan proses izin perceraian pagwai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | Dokumen | 65 | 64.250.000 | 13 | 12.100.000 | 13 | 23.000.000 | 5 | 0 | 38 | 0 | 18 | 12.100.000,00 | 27,69 | 18,83 | | |
| | Evaluasi disiplin pegawai | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | Laporan | 5 | 29.000.000 | 1 | 5.800.000 | 1 | 4.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.800.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persen | 100 | 3.570.730.000 | 100 | 640.544.900 | 100 | 549.721.000 | 0 | 90.266.500 | 0 | 16,42 | 100 | 730.811.400,00 | 100 | 20,47 | | |
| | Setifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas | Orang | 1085 | 3.570.730.000 | 200 | 640.544.900 | 200 | 549.721.000 | 57 | 90.266.500 | 29 | 16,42 | 257 | 730.811.400,00 | 23,69 | 20,47 | | |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | Orang | 885 | 2.644.960.000 | 165 | 460.504.900 | 165 | 380.976.000 | 0 | 90.266.500 | 0 | 23,69 | 165 | 550.771.400,00 | 18,64 | 20,82 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | Dokumen | 35 | 925.770.000 | 4 | 180.040.000 | 4 | 168.745.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 5 | 180.040.000,00 | 14,29 | 19,45 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 52.419.592.020 | 14 | 1.101.207.962 | 100 | 4.938.356.087 | 100 | 1.107.013.864 | 100 | 22,42 | 113,8 | 2.208.221.826,00 | 113,8 | 4,21 | Kecamatan Maros Baru | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 30 | 16.500.000 | 0 | 1.618.000 | 7 | 2.700.000 | 7 | 2.698.500 | 100 | 99,94 | 7 | 4.316.500,00 | 23 | 26 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 | 1 | 900.000 | 1 | 899.500 | 100 | 99,94 | 1 | 899.500,00 | #DIV/0! | 32,709 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 2.750.000 | 0 | 550.000 | 1 | 900.000 | 1 | 899.500 | 100 | 99,94 | 1 | 1.449.500,00 | 20 | 52,709 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 2.750.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|----------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 2.750.000 | 0 | 518.000 | 1 | 900.000 | 1 | 899.500 | 100 | 99,94 | 1 | 1.417.500,00 | 20 | 51,545 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 2.750.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 2.750.000 | 0 | 550.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 550.000,00 | 0 | 20 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5 | 47.633.752.020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 125 | 24.780.773.510 | 7 | 1.048.876.917 | 25 | 4.779.213.087 | 25 | 1.081.656.199 | 100 | 22,63 | 32 | 2.130.533.116,00 | 25,6 | 8,5975 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 3720 | 22.852.978.510 | 248 | 1.019.206.917 | 744 | 4.707.213.087 | 744 | 1.069.306.199 | 100 | 22,72 | 992 | 2.088.513.116,00 | 26,667 | 9,1389 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 1.927.795.000 | 3 | 29.670.000 | 12 | 72.000.000 | 3 | 12.350.000 | 25 | 17,15 | 6 | 42.020.000,00 | 10,909 | 2,1797 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 130 | 1.927.795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|--------------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 6 | 1.927.795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 30 | 457.022.500 | 1 | 16.753.045 | 6 | 69.993.000 | 6 | 3.609.165 | 100 | 5,16 | 7 | 20.362.210,00 | 23,33 | 4,4554 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 1.125.000 | 0 | 0 | 1 | 1.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 9.447.500 | 1 | 557.000 | 16 | 2.338.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 557.000,00 | 10 | 5,8957 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 40.500.000 | 0 | 1.110.000 | 3 | 10.300.000 | 3 | 3.609.165 | 100 | 35,04 | 3 | 4.719.165,00 | 60 | 11,652 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 14.250.000 | 0 | 824.900 | 5,010 | 1.503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 824.900,00 | 5 | 5,7888 | | |
| | Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya | Jumlah Paket Peralatan mesin lainnya yang disediakan | Paket | 60 | 125.400.000 | 2 | 5.680.000 | 2 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.680.000,00 | 3,3333 | 4,5295 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 266.300.000 | 2 | 8.581.145 | 12 | 16.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.581.145,00 | 3,3333 | 3,2224 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 0 | 0 | 0 | 33.960.000 | 12 | 19.382.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 33.960.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 60 | 50.000.000 | 3 | 2.850.000 | 12 | 76.750.000 | 12 | 19.050.000 | 100 | 24,82 | 15 | 21.900.000,00 | 25 | 43,8 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 913.750.000 | 3 | 31.110.000 | 2 | 9.550.000 | 2 | 2.250.000 | 100 | 23,56 | 5 | 33.360.000,00 | 250 | 3,6509 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 10 | 43.575.000 | 1 | 0 | 1 | 67.200.000 | 1 | 16.800.000 | 100 | 25 | 2 | 16.800.000,00 | 20 | 38,554 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 38.750.000 | 1 | 0 | 1 | 9.700.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 100 | 0 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 5 | 4.825.000 | 0 | 0 | 2 | 7.000.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 40 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 60 | 33.925.000 | 0 | 0 | 12 | 2.700.000 | 12 | 0 | 100 | 0 | 12 | - | 20 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 4.535.000.000 | 169.200.000 | 4 | 4 | 995.950.000 | 4 | 204.900.000 | 100 | 20,57 | 4 | 374.100.000,00 | 4 | 8,25 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 12 | 820.250.000 | 0 | 12 | 12 | 259.150.000 | 12 | 20.700.000 | 100 | 7,99 | 12 | 20.700.000,00 | 100 | 2,5236 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60 | 10.250.000 | 4 | 0 | 12 | 2.650.000 | 12 | 0 | 100 | 0 | 16 | - | 26,667 | 0 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60 | 270.000.000 | 0 | 0 | 12 | 85.500.000 | 12 | 6.900.000 | 100 | 8,07 | 12,2 | 6.900.000,00 | 20,333 | 2,5556 | | Kelurahan Baju Bodoa |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.000 | 2 | 0 | 12 | 85.500.000 | 12 | 6.900.000 | 100 | 8,07 | 14 | 6.900.000,00 | 38,889 | 2,5556 | | Kelurahan Pallantikang |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|----------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.000 | 1 | 0 | 12 | 85.500.000 | 12 | 6.900.000 | 100 | 8,07 | 13 | 6.900.000,00 | 36,11 | 2,5556 | | Kelurahan Baji Pa'mai |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | Layanan | 2 | 3.694.250.000 | 1 | 169.200.000 | 4 | 736.800.000 | 4 | 184.200.000 | 100 | 25 | 5 | 353.400.000,00 | 250 | 9,5662 | | |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 10.250.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | - | 1,6667 | 0 | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 3.684.000.000 | 0 | 169.200.000 | 2 | 736.800.000 | 2 | 184.200.000 | 100 | 25 | 2 | 353.400.000,00 | 20 | 9,5928 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 2 | 20.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | - | 100 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 60 | 10.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | - | 1,6667 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 10 | 10.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | - | 120 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|-------|--|--------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 35.290.000 | 0 | 15.265.000 | 100 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.265.000,0 | 0 | 43,26 | | |
| | Fasilitasi, rekomendasi dan korodinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Desa | 4 | 35.290.000 | | 15.265.000 | 1 | 700.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 15.265.000,0 | 25 | 43,256 | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 500 | 35.290.000 | 47 | 0 | 1 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,51 | - | 9,302 | 0 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 2.067.142.500 | 400 | 0 | 100 | 20.350.000 | 100 | 17.989.100 | 100 | 88,4 | 500 | 17.989.100,0 | 500 | 0,87 | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 928 | 267.142.500 | 1 | 0 | 800 | 20.350.000 | 800 | 17.989.100 | 100 | 88,4 | 801 | 17.989.100,0 | 86,315 | 6,7339 | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 0 | 104.017.500 | 0 | 0 | 1 | 18.550.000 | 1 | 17.989.100 | 100 | 96,98 | 1 | 17.989.100,0 | #DIV/0! | 17,294 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---|---------------|---|----|--|-------------|--|----|---|----|--|----|---|----|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan PKK | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 500 | 163.125.000 | 0 | 0 | 1 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan kelurahan | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | Orang | 4000 | 1.800.000.000 | 0 | 0 | 60 | 613.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 6 | 600.000.000 | 0 | 0 | 1 | 204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan Baju Bodoa |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3 | 600.000.000 | 0 | 0 | 1 | 204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan Pallantikang |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3 | 600.000.000 | 0 | 0 | 1 | 204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan Baji Palmai |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 11.250.000 | 0 | 0 | 100 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | laporan | 100 | 11.250.000 | 0 | 0 | 1 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 11.250.000 | 0 | 0 | 1 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 487.875.000 | 0 | 0 | 100 | 62.700.000 | 100 | 15.849.750 | 100 | 25,28 | 100 | 15.849.750,00 | 100 | 3,25 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 2 | 487.875.000 | 0 | 0 | 2 | 62.700.000 | 1 | 15.849.750 | 50 | 25,28 | 1 | 15.849.750,00 | 50 | 3,2487 | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 0 | 225.375.000 | 0 | 0 | 400 | 29.800.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 0 | 262.500.000 | 0 | 0 | 3 | 32.900.000 | 1 | 15.849.750 | | | | | | | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|-------------|-------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 25.045.254.850 | 43 | 607.450.846 | 100 | 2.731.920.873 | 29 | 653.208.112 | 28,57 | 23,91 | 71,43 | 1.260.658.958,00 | 71,43 | 5,03 | Kecamatan Marusu | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 11 | 24.250.000 | 0 | 0 | 7 | 2.700.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 3.950.000 | 0 | 0 | 2 | 300.000 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.450.000 | 0 | 0 | 1 | 540.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jaumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.200.000 | 0 | 0 | 1 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.450.000 | 0 | 0 | 1 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 3.200.000 | 1 | 0 | 1 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5 | 5.000.000 | 1 | 0 | 4 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 20 | 23.995.874.850 | 14 | 570.208.846 | 432 | 2.585.422.873 | 7 | 638.148.112 | 1,62 | 24,68 | 21 | 1.208.356.958,00 | 105 | 5,0357 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 125 | 12.134.887.425 | 120 | 555.268.846 | 420 | 2.526.142.873 | 90 | 623.328.112 | 21,43 | 24,68 | 210 | 1.178.596.958,00 | 168 | 9,7125 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 2100 | 11.860.987.425 | 3 | 14.940.000 | 12 | 59.280.000 | 3 | 14.820.000 | 25 | 25 | 6 | 29.760.000,00 | 0,2857 | 0,2509 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 150 | 726.305.000 | 1 | 16.582.000 | 27 | 70.638.000 | 6 | 0 | 22,22 | 0 | 7 | 16.582.000,00 | 4,6667 | 2,2831 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 6 | 500.515.000 | 0 | 0 | 1 | 3.585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 16.180.000 | 0 | 2.077.000 | 1 | 6.861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077.000,00 | 0 | 12,837 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 33.110.000 | 0 | 6.375.000 | 1 | 22.461.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375.000,00 | 0 | 19,254 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 14.000.000 | 0 | 2.960.000 | 12 | 18.240.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2.960.000,00 | 60 | 21,143 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|--------------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 162.500.000 | 0 | 5.170.000 | 12 | 19.491.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | 5.170.000,00 | 5 | 3,1815 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 152.950.000 | 2 | 20.660.000 | 24 | 59.160.000 | 9 | 15.060.000 | 37,5 | 25,46 | 11 | 35.720.000,00 | 550 | 23,354 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 531.000.000 | 3 | 600.000 | 12 | 1.560.000 | 6 | 660.000 | 50 | 42,31 | 9 | 1.260.000,00 | 450 | 0,2373 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 10.000.000 | 3 | 20.060.000 | 12 | 57.600.000 | 3 | 14.400.000 | 25 | 25 | 6 | 34.460.000,00 | 10 | 344,6 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 145.875.000 | 0 | 0 | 1 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 145.875.000 | 0 | 0 | 15 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 34.150.000 | 54 | 0 | 100 | 9.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | - | 54 | 0 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 1 | 12.600.000 | 0 | 0 | 1 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan | Dokumen | 60 | 12.600.000 | 0 | 0 | 12 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|------------|---|----|---|-----------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 2 | 21.550.000 | 0 | 0 | 2 | 5.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan | Laporan | 5 | 11.500.000 | 0 | 0 | 1 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 10.050.000 | 0 | 0 | 1 | 3.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 11.900.000 | 0 | 0 | 100 | 2.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Desa | 7 | 11.900.000 | 0 | 0 | 7 | 2.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 35 | 11.900.000 | 0 | 0 | 7 | 2.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|------------|--|------------|---|-----|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 352.575.000 | 75 | 0 | 100 | 25.540.000 | 75 | 100 | 75 | 0 | 150 | 100,00 | 150 | 0 | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 2000 | 352.575.000 | 300 | 0 | 400 | 25.540.000 | 300 | 400 | 75 | 0 | 600 | 400,00 | 30 | 0,0001 | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10 | 140.325.000 | 1 | 0 | 2 | 21.950.000 | 1 | 21.950.000 | 50 | 100 | 2 | 21.950.000,00 | 20 | 15,642 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15 | 212.250.000 | 0 | 0 | 3 | 3.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 19.640.000 | 0 | 0 | 100 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 375 | 19.640.000 | 0 | 0 | 75 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan | Laporan | 5 | 19.640.000 | 0 | 0 | 1 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|------|--|--------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 409.450.000 | 63 | 19.100.000 | 100 | 56.400.000 | 50 | 41.398.850 | 50 | 73,4 | 112,5 | 60.498.850,0 | 112,5 | 14,78 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 2 | 409.450.000 | 1 | 19.100.000 | 2 | 56.400.000 | 1 | 41.398.850 | 50 | 73,4 | 2 | 60.498.850,0 | 100 | 14,776 | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 1500 | 131.430.000 | 0 | 0 | 300 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|--------------|--------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 2500 | 278.020.000 | 500 | 19.100.000 | 500 | 41.400.000 | 500 | 41.398.850 | 100 | 100 | 1.000,00 | 60.498.850,00 | 40 | 21,761 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 14.574.009.515 | 15 | 2.750.772.448 | 100 | 2.959.403.579 | 2 | 635.791.983 | 1,5 | 21,48 | 16,83 | 3.386.564.431,00 | 16,83 | 23,24 | Kecamatan Mallawa | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 95 | 35.880.000 | 18 | 5.790.000 | 19 | 6.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.790.000,00 | 19 | 16 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatda aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 4.950.000 | 1 | 0 | 2 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.950.000 | 1 | 990.000 | 1 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.950.000 | 1 | 900.000 | 1 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900.000,00 | 20 | 18,182 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.250.000 | 1 | 1.050.000 | 1 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.050.000,00 | 20 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|---|---------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.250.000 | 1 | 900.000 | 1 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900.000,00 | 20 | 17,143 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 5.250.000 | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.050.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 60 | 5.280.000 | 12 | 900.000 | 12 | 1.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 900.000,00 | 20 | 17,045 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 130 | 12.871.106.390 | 25 | 2.425.029.077 | 26 | 2.734.472.579 | 7 | 611.041.983 | 26,92 | 22,35 | 32 | 3.036.071.060,00 | 24,615 | 23,588 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 2380 | 12.631.306.390 | 476 | 2.377.069.077 | 14 | 2.682.632.579 | 112 | 598.081.983 | 800 | 22,29 | 588 | 2.975.151.060,00 | 24,706 | 23,554 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 239.800.000 | 11 | 47.960.000 | 7 | 51.840.000 | 3 | 12.960.000 | 42,86 | 25 | 14 | 60.920.000,00 | 23,333 | 25,405 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 200 | 50.000.000 | 40 | 10.000.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 40 | 10.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 200 | 50.000.000 | 40 | 10.000.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 40 | 10.000.000,00 | 20 | 20 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|---|------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 625.635.000 | 5 | 123.153.371 | 6 | 87.006.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123.153.371,00 | 83,333 | 19,685 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket abhan material yang disediakan | Paket | 25 | 8.887.500 | 0 | 0 | 5 | 2.192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 10 | 53.862.500 | 2 | 10.764.500 | 2 | 5.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.764.500,00 | 20 | 19,985 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 5.500.000 | 2 | 1.777.500 | 2 | 17.224.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.777.500,00 | 20 | 32,318 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 100 | 3.960.000 | 19 | 980.000 | 20 | 2.516.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 980.000,00 | 19 | 24,747 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 94.075.000 | 12 | 33.815.000 | 12 | 22.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.815.000,00 | 20 | 35,945 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 459.350.000 | 11 | 75.024.371 | 12 | 37.084.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75.024.371,00 | 18,333 | 16,333 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 986.388.125 | 2 | 170.630.000 | 2 | 92.250.000 | 1 | 18.750.000 | 50 | 20,33 | 3 | 189.380.000,00 | 150 | 19,199 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 59.300.000 | 12 | 11.420.000 | 12 | 10.650.000 | 3 | 2.250.000 | 25 | 21,13 | 15 | 13.670.000,00 | 25 | 23,052 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 15 | 927.088.125 | 12 | 159.210.000 | 12 | 81.600.000 | 3 | 16.500.000 | 25 | 20,22 | 15 | 175.710.000,00 | 100 | 18,953 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|---------|--|----------------|---|--------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 5.000.000 | 2 | 16.170.000 | 2 | 39.385.000 | 1 | 6.000.000 | 50 | 15,23 | 3 | 22.170.000,00 | 150 | 443,4 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 5.000.000 | 10 | 1.000.000 | 10 | 37.000.000 | 3 | 6.000.000 | 30 | 16,22 | 13 | 7.000.000,00 | 26 | 140 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 8.800.000 | 1 | 15.170.000 | 2 | 2.385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.170.000,00 | 20 | 172,39 | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 1.199.416.000 | 3 | 260.495.000 | 100 | 243.900.000 | 2 | 45.750.000 | 2 | 18,76 | 5,33 | 306.245.000,00 | 5,33 | 25,53 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 2 | 513.016.000 | 2 | 79.595.000 | 2 | 73.500.000 | 1 | 4.650.000 | 50 | 6,33 | 3 | 84.245.000,00 | 150 | 16,422 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 63.016.000 | 2 | 2.250.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2.250.000,00 | 40 | 3,5705 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Laporan | 60 | 450.000.000 | 12 | 77.345.000 | 12 | 73.500.000 | 3 | 4.650.000 | 25 | 6,33 | 15 | 81.995.000,00 | 25 | 18,221 | | Kelurahan Sabila |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | Layanan | 2 | 670.050.000 | 1 | 179.400.000 | 2 | 170.400.000 | 1 | 41.100.000 | 50 | 24,12 | 2 | 220.500.000,00 | 100 | 32,908 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|---------|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 25 | 113.850.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 556.200.000 | 12 | 179.400.000 | 12 | 170.400.000 | 3 | 41.100.000 | 25 | 24,12 | 15 | 220.500.000,00 | 125 | 39,644 | | |
| | Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 3 | 16.350.000 | 1 | 1.500.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1.500.000,00 | 33,333 | 9,1743 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 12 | 4.050.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan non perizinan | Laporan | 39 | 4.050.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 8.250.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1.500.000,00 | 20 | 18,182 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 1.227.450.000 | 214 | 244.384.280 | 100 | 229.009.000 | 200 | 24.009.000 | 200 | 10,48 | 414 | 268.393.280,00 | 414 | 21,87 | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 1075 | 227.450.000 | 4 | 42.700.000 | 200 | 24.509.000 | 200 | 24.009.000 | 100 | 97,96 | 204 | 66.709.000,00 | 18,977 | 29,329 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|------------|---|----------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10 | 141.150.000 | 2 | 27.490.000 | 2 | 24.509.000 | 1 | 24.009.000 | 50 | 97,96 | 3 | 51.499.000,00 | 30 | 36,485 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 86.300.000 | 2 | 15.210.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 15.210.000,00 | 20 | 17,625 | | |
| | Pemberdayaan kelurahan | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | Orang | 1260 | 1.000.000.000 | 420 | 201.684.280 | 228 | 204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 201.684.280,00 | 33,333 | 20,168 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 5 | 1.000.000.000 | 1 | 201.684.280 | 1 | 204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201.684.280,00 | 20 | 20,168 | | Kelurahan sabila |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 6.750.000 | 1 | 32.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 32.000.000,00 | 1 | 474,07 | | |
| | Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 3 | 6.750.000 | 1 | 32.000.000 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 32.000.000,00 | 33,333 | 474,07 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 6.750.000 | 1 | 32.000.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 32.000.000,00 | 33,333 | 474,07 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----|---|----|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 449.850.000 | 1 | 56.800.000 | 100 | 76.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.800.000,00 | 1 | 12,63 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 2 | 449.850.000 | 1 | 56.800.000 | 2 | 76.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.800.000,00 | 50 | 12,626 | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 2500 | 233.600.000 | 400 | 32.000.000 | 400 | 40.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 32.000.000,00 | 16 | 13,699 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 6000 | 216.250.000 | 500 | 24.800.000 | 400 | 36.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 24.800.000,00 | 8,3333 | 11,468 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|------------------|---|--------|-----------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 20.742.329.650 | 43 | 945.030.520 | 100 | 4.178.738.758 | 100 | 525.272.067 | 100 | 12,57 | 142,86 | 1.470.302.587,00 | 142,86 | 7,09 | Kecamatan Bantimurung | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 33.550.000 | 3 | 0 | 11 | 6.580.000 | 0 | 499.500 | 0 | 7,59 | 3 | 499.500,00 | 5 | 1 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 3.950.000 | 0 | 0 | 2 | 1.100.000 | 0 | 499.500 | 0 | 45,41 | 0 | 499.500,00 | 0 | 12,646 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.200.000 | 0 | 0 | 1 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.950.000 | 0 | 0 | 1 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.200.000 | 1 | 0 | 1 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.950.000 | 0 | 0 | 1 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 5.300.000 | 1 | 0 | 1 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 6.000.000 | 1 | 0 | 4 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 125 | 19.009.122.150 | 13 | 884.756.660 | 16 | 4.002.252.758 | 7 | 510.222.567 | 43,75 | 12,75 | 20 | 1.394.979.227,00 | 16 | 7,3385 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 3.360 | 18.774.822.150 | 144 | 876.236.660 | 672 | 3.951.612.758 | 192 | 501.782.567 | 28,57 | 12,7 | 336 | 1.378.019.227,00 | 10 | 7,3397 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 234.300.000 | 2 | 8.520.000 | 12 | 50.640.000 | 3 | 8.440.000 | 25 | 16,67 | 5 | 16.960.000,00 | 9,0909 | 7,2386 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 807.507.500 | 1 | 31.213.860 | 6 | 89.775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.213.860,00 | 16,667 | 3,8655 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 13.900.000 | 1 | 2.490.000 | 1 | 3.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.490.000,00 | 20 | 17,914 | | |
| | penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 43.135.000 | 0 | 1.858.000 | 1 | 7.872.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858.000,00 | 0 | 4,3074 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 121.957.500 | 0 | 0 | 1 | 18.265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---|-------------|---|------------|--|---------------|--|------------|---|---------|--|---------------|---|---------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 | 5 | 30.515.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1.000.000,00 | 0 | 3,2771 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 340.750.000 | 0 | 12.000.000 | 12 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000,00 | 0 | 3,5216 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 257.250.000 | 0 | 0 | 12 | 32.568.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 740.250.000 | 0 | 0 | 2 | 59.520.000,00 | 2 | 14.550.000 | 100 | 24,45 | 2 | 14.550.000,00 | 100 | 1,9656 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 36.600.000 | 0 | 0 | 12 | 7.320.000,00 | 3 | 1.500.000 | 25 | 20,49 | 3 | 1.500.000,00 | 5 | 4,0984 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 703.650.000 | 0 | 0 | 12 | 52.200.000,00 | 3 | 13.050.000 | 25 | 25 | 3 | 13.050.000,00 | 5 | 1,8546 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 151.900.000 | 0 | 0 | 2 | 20.611.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 110 | 130.750.000 | 0 | 0 | 22 | 14.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 21.150.000 | 0 | 0 | 1 | 5.811.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | | | 2 | 0 | 3 | 151.100.000 | 3 | 3.000.000 | 100 | 1,99 | 5 | 3.000.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|-------------|--|------------|---|------|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | | 0 | 0 | 1 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 20.750.000 | 3 | 0 | 12 | 73.500.000 | 3 | 1.500.000 | 25 | 2,04 | 6 | 1.500.000,00 | 120 | 7,22 89 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | | 3 | 0 | 12 | 73.500.000 | 3 | 1.500.000 | 25 | 2,04 | 6 | 1.500.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 10 | 14.000.000 | 0 | 0 | 100 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku | Desa | 6 | 14.000.000 | 0 | 0 | 6 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 30 | 14.000.000 | 0 | 0 | 6 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 2.255.750.000 | 75 | 22.150.000 | 100 | 451.375.000 | 100 | 26.450.000 | 100 | 5,86 | 175 | 48.600.000,00 | 175 | 2,15 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|---------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|-----------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 2000 | 237.250.000 | 300 | 22.150.000 | 1.080 | 41.225.000,00 | 800 | 26.450.000 | 74,07 | 64,16 | 1.100,00 | 48.600.000,00 | 55 | 20,485 | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10 | 132.250.000 | 1 | 22.150.000 | 2 | 36.075.000,00 | 1 | 26.450.000 | 50 | 73,32 | 2 | 48.600.000,00 | 20 | 36,749 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 105.000.000 | 0 | 0 | 1 | 5.150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan | Kegiatan | 10 | 2.018.500.000 | 0 | 0 | 2 | 410.150.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 20 | 0 | | |
| | Evaluasi kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Laporan | 5 | 18.500.000 | 0 | 0 | 1 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 5 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 1 | 204.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan leang-Leang |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 10 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 2 | 204.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan kalabbirang |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 20.500.000 | 0 | 0 | 100 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---|-----------------|---|-----------|--|-----------------|--|----------------|---|-------|--|-------------------|---|------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 375 | 20.500.000 | 0 | 0 | 300 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 20.500.000 | 0 | 0 | 1 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 542.000.00 0 | 9 | 7.800.000 | 100 | 100.625.00 0 | 2 | 40.374.37 5 | 2 | 40,12 | 10,5 | 48.174.375,0 0 | 10,5 | 8,89 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 15 | 542.000.00 0 | 1 | 7.800.000 | 2 | 100.625.00 0 | 2 | 40.374.37 5 | 100 | 40,12 | 3 | 48.174.375,0 0 | 20 | 8,88 83 | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan | Orang | 1.50 0 | 252.625.00 0 | 0 | 0 | 300 | 45.450.000 | 300 | 0 | 100 | 0 | 300 | - | 20 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|---------------|--|-------------|---|---------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (imtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 375 | 20.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 4.000 | 268.625.000 | 100 | 7.800.000 | 800 | 55.175.000 | 400 | 40.374.375 | 50 | 73,18 | 500 | 48.174.375,00 | 12,5 | 17,934 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 15.259.958.105 | 43 | 521.429.893 | 100 | 3.143.796.302 | 0 | 772.225.048 | 0 | 24,56 | 42,86 | 1.293.654.941,00 | 42,86 | 8,48 | Kecamatan Bontoa | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 48.000.000 | 5 | 0 | 18 | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 9 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|------------|---|----|---|-----------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 10.000.000 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.000.000 | 1 | 0 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60 | 8.000.000 | 3 | 0 | 12 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 10.000.000 | 1 | 0 | 4 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 125 | 13.721.933.105 | 6 | 467.815.933 | 25 | 2.932.646.302 | 6 | 747.625.048 | 24 | 25,49 | 12 | 1.215.440.981,00 | 9,6 | 8,8577 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 2380 | 13.482.133.105 | 102 | 454.735.933 | 14 | 2.878.406.302 | 3 | 734.065.048 | 21,43 | 25,5 | 105 | 1.188.800.981,00 | 4,4118 | 8,8176 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 239.800.000 | 3 | 13.080.000 | 12 | 54.240.000 | 3 | 13.560.000 | 25 | 25 | 6 | 26.640.000,00 | 10,909 | 11,109 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 660.025.000 | 3 | 25.373.960 | 6 | 86.939.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.373.960,00 | 50 | 3,8444 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 30.000.000 | 0 | 0 | 1 | 5.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 115.475.000 | 1 | 5.266.000 | 1 | 23.234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.266.000,00 | 20 | 4,5603 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 137.500.000 | 3 | 6.900.000 | 12 | 26.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.900.000,00 | 5 | 5,0182 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 357.050.000 | 3 | 13.207.960 | 12 | 25.965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.207.960,00 | 5 | 3,6992 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 713.500.000 | 0 | 0 | 2 | 101.400.000 | 0 | 24.600.000 | 0 | 24,26 | 0 | 24.600.000,00 | 0 | 3,4478 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 43.000.000 | 0 | 0 | 12 | 12.000.000 | 3 | 2.250.000 | 25 | 18,75 | 3 | 2.250.000,00 | 5 | 5,2326 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|----------|------------------|------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 670.500.000 | 0 | 0 | 12 | 89.400.000 | 3 | 22.350.000 | 25 | 25 | 3 | 22.350.000,00 | 5 | 3,3333 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 116.500.000 | 0 | 0 | 2 | 13.211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 110 | 101.500.000 | 0 | 0 | 22 | 10.211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 15.000.000 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | | 25 | 95.184.000 | 100 | 376.750.000 | 1 | 71.550.000 | 1 | 18,99 | 26 | 166.734.000,00 | 26 | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 2 | 1.962.250.000 | 2 | 95.184.000 | 2 | 365.950.000 | 1 | 71.550.000 | 50 | 19,55 | 3 | 166.734.000,00 | 150 | 8,4971 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60 | 1.462.250.000 | 3 | 71.550.000 | 12 | 292.450.000 | 3 | 71.550.000 | 25 | 24,47 | 6 | 143.100.000,00 | 10 | 9,7863 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 40 | 500.000.000 | 3 | 23.634.000 | 12 | 73.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.634.000,00 | 7,5 | 4,7268 | | Kelurahan Bontoa |
| | Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | | | 0 | 0 | 3 | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha | Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan non usaha | Laporan | | | 0 | 0 | 1 | 2.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | | | 0 | 0 | 1 | 2.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | | | 0 | 0 | 1 | 4.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 73.150.000 | 0 | 0 | 100 | 5.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Desa | 8 | 73.150.000 | 0 | 0 | 8 | 5.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 30 | 73.150.000 | 0 | 0 | 6 | 5.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang- | Desa | 100 | 1.386.000.600 | 38 | 30.900.000 | 100 | 259.600.000 | 0 | 38.899.270 | 0 | 14,98 | 38 | 69.799.270,00 | 38 | 5,04 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | undangan yang berlaku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4825 | 386.000.600 | 375 | 30.900.000 | 965 | 55.100.000 | 0 | 38.899.250 | 0 | 70,6 | 375 | 69.799.250,00 | 7,72 | 18,083 | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 10 | 185.750.000 | 1 | 30.900.000 | 2 | 45.150.000 | 1 | 38.899.250 | 50 | 86,16 | 2 | 69.799.250,00 | 20 | 37,577 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 15 | 200.250.600 | 0 | 0 | 3 | 9.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan kelurahan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 100 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 20 | 204.500.000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 2E-06 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 2 | 204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan Bontoa |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|-------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 19.125.000 | 0 | 0 | 100 | 3.825.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | | |
| | Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 375 | 19.125.000 | 0 | 0 | 75 | 3.825.000 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 0 | 0,0004 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 19.125.000 | 0 | 0 | 1 | 3.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 832.350.000 | 0 | 0 | 100 | 109.250.000 | 0 | 17.250.000 | 0 | 15,79 | 0 | 17.250.000,00 | 0 | 2,07 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 3 | 832.350.000 | 0 | 0 | 3 | 109.250.000 | 500 | 17.250.000 | #### | 15,79 | 500 | 17.250.000,00 | 16667 | 2,0724 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|-------------|---------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 4225 | 480.250.000 | 0 | 0 | 845 | 63.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 375 | 60.100.000 | 0 | 0 | 75 | 4.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 3500 | 292.000.000 | 0 | 0 | 700 | 41.500.000 | 500 | 17.250.0000 | 71,43 | 41,57 | 500 | 17.250.000,00 | 14,286 | 5,9075 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 44.020.160.170 | 43 | 1.948.746.656 | 100 | 8.922.615.742 | 43 | 2.089.040.159 | 42,86 | 23,41 | 85,72 | 4.037.786.815,00 | 85,72 | 9,17 | Kecamatan Turikale | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|------------|---|-----------|---|-----------|--|----|---|----|--|--------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 68.100.000 | 3 | 3.900.000 | 11 | 8.832.000 | 3 | 0 | 27,27 | 0 | 6 | 3.900.000,00 | 11 | 6 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 6.550.000 | 0 | 1.310.000 | 2 | 2.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310.000,00 | 0 | 20 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.400.000 | 0 | 1.310.000 | 1 | 2.081.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310.000,00 | 0 | 20,469 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 12.150.000 | 0 | 1.280.000 | 1 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000,00 | 0 | 10,535 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 6.550.000 | 0 | 0 | 1 | 2.081.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 12.150.000 | 1 | 1.310.000 | 1 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.310.000,00 | 20 | 10,782 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 12.150.000 | 1 | 0 | 1 | 600.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 40 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 12.150.000 | 1 | 0 | 4 | 600.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | - | 10 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 130 | 41.967.625.170 | 7 | 1.887.543.656 | 26 | 8.764.265.742 | 7 | 2.082.740.159 | 26,92 | 23,76 | 14 | 3.970.283.815,00 | 10,769 | 9,4603 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 7.140 | 41.727.825.170 | 408 | 1.883.183.656 | 1428 | 8.712.425.742 | 408 | 2.078.380.159 | 28,57 | 23,86 | 816 | 3.961.563.815,00 | 11,429 | 9,4938 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 239.800.000 | 3 | 4.360.000 | 12 | 51.840.000 | 3 | 4.360.000 | 25 | 8,41 | 6 | 8.720.000,00 | 10 | 3,6364 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 5 | 485.335.000 | 2 | 15.663.000 | 6 | 59.163.000 | 2 | 0 | 33,33 | 0 | 4 | 15.663.000,00 | 80 | 3,2273 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 12.685.000 | 0 | 0 | 1 | 2.593.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 36.780.000 | 0 | 1.584.000 | 1 | 3.726.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584.000,00 | 0 | 4,3067 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 117.120.000 | 0 | 5.541.000 | 1 | 17.929.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541.000,00 | 0 | 4,731 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu") | Laporan | 60 | 157.500.000 | 3 | 5.775.000 | 12 | 21.120.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 6 | 5.775.000,00 | 10 | 3,6667 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 161.250.000 | 3 | 1.380.000 | 12 | 13.795.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 6 | 1.380.000,00 | 10 | 0,8558 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 10 | 1.469.100.000 | 2 | 41.640.000 | 2 | 76.700.000 | 2 | 6.300.000 | 100 | 8,21 | 4 | 47.940.000,00 | 40 | 3,2632 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|---------------|--|-------------|---|------|--|----------------|---|----------|------------------|------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 58.200.000 | 3 | 1.410.000 | 12 | 10.100.000 | 3 | 750.000 | 25 | 7,43 | 6 | 2.160.000,00 | 10 | 3,7113 | | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 1.410.900.000 | 3 | 40.230.000 | 12 | 66.600.000 | 3 | 5.550.000 | 25 | 8,33 | 6 | 45.780.000,00 | 10 | 3,2447 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berada Dalam Kondisi Baik | Jenis | 1 | 30.000.000 | 0 | 0 | 2 | 13.655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 100 | 30.000.000 | 0 | 0 | 20 | 12.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 34.132.280.000 | 54 | 237.870.000 | 100 | 2.665.350.000 | 54 | 185.150.000 | 54 | 6,95 | 108 | 423.020.000,00 | 108 | 1,24 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 1 | 23.353.000.000 | 1 | 59.270.000 | 1 | 517.500.000 | 1 | 7.650.000 | 100 | 1,48 | 2 | 66.920.000,00 | 200 | 0,2866 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 3 | 31.000.000 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.000 | 3 | 18.011.000 | 12 | 73.500.000 | 3 | 1.400.000 | 25 | 1,9 | 6 | 19.411.000,00 | 16,667 | 7,1893 | | Kelurahan Taroda |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|-------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.000 | 3 | 20.995.500 | 12 | 73.500.000 | 3 | 1.400.000 | 25 | 1,9 | 6 | 22.395.500,00 | 16,667 | 8,2946 | | Kelurahan Adatong eng |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.000 | 3 | 1.150.000 | 12 | 73.500.000 | 3 | 1.150.000 | 25 | 1,56 | 6 | 2.300.000,00 | 16,667 | 0,8519 | | Kelurahan Pattuad ae |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.000 | 3 | 1.150.000 | 12 | 73.500.000 | 3 | 1.400.000 | 25 | 1,9 | 6 | 2.550.000,00 | 16,667 | 0,9444 | | Kelurahan Boribella ya |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.000 | 3 | 15.663.500 | 12 | 73.500.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 6 | 15.663.500,00 | 16,667 | 5,8013 | | Kelurahan Raya |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.000 | 3 | 1.150.000 | 12 | 73.500.000 | 3 | 1.150.000 | 25 | 1,56 | 6 | 2.300.000,00 | 16,667 | 0,8519 | | Kelurahan Turikale |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.000 | 3 | 1.150.000 | 12 | 73.500.000 | 3 | 1.150.000 | 25 | 1,56 | 6 | 2.300.000,00 | 16,667 | 0,8519 | | Kelurahan Alliriteng ae |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | Layanan | 5 | 10.716.000.000 | 1 | 178.600.000 | 1 | 2.143.200.000 | 1 | 177.500.000 | 100 | 8,28 | 2 | 356.100.000,00 | 40 | 3,3231 | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 420 | 10.716.000.000 | 21 | 178.600.000 | 84 | 2.143.200.000 | 21 | 177.500.000 | 25 | 8,28 | 42 | 356.100.000,00 | 10 | 3,3231 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)// Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|---------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilipahkan kepada Camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 3 | 63.280.000 | 0 | 0 | 3 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 5 | 19.030.000 | 0 | 0 | 1 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Jumlah laporan terkiat non perizinan | Laporan | 5 | 18.050.000 | 0 | 0 | 1 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 26.200.000 | 0 | 0 | 1 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 6.074.750.000 | 44 | 17.900.000 | 100 | 1.459.700.000 | 100 | 17.899.250 | 100 | 1,23 | 144,44 | 35.799.250,00 | 144,44 | 0,59 | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Orang | 4.500 | 399.750.000 | 400 | 17.900.000 | 900 | 27.200.000 | 400 | 17.899.250 | 44,44 | 65,81 | 800 | 35.799.250,00 | 17,778 | 8,9554 | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10 | 120.250.000 | 1 | 17.900.000 | 2 | 20.850.000 | 1 | 17.899.250 | 50 | 85,85 | 2 | 35.799.250,00 | 20 | 29,771 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan | Laporan | 15 | 279.500.000 | 0 | 0 | 2 | 6.350.000 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | - | 6,6667 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|------------------|---|-------------------|---|----|--|-------------------|--|----|---|----|--|----|---|-------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemberdayaan kelurahan | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | Orang | 4.00 0 | 5.675.000.0 00 | 0 | 0 | 800 | 1.432.500.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Evaluasi kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Laporan | 5 | 12.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 12 | 809.000.00 0 | 0 | 0 | 1 | 179.500.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 8 | 809.000.00 0 | 0 | 0 | 1 | 179.500.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 4 | 809.000.00 0 | 0 | 0 | 1 | 179.500.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 4 | 809.000.00 0 | 0 | 0 | 1 | 179.500.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 4 | 809.000.00 0 | 0 | 0 | 1 | 179.500.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 12 | 809.000.00 0 | 0 | 0 | 1 | 179.500.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 8 | 809.000.00 0 | 0 | 0 | 1 | 179.500.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan | Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan | pokmas/or mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|---------------|---|-------------|---|----|--|------------|--|----|---|----|--|----|---|----------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan | Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan | pokmas/or mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan | Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan | pokmas/or mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan | Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan | pokmas/or mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan | Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan | pokmas/or mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan | Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan | pokmas/or mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan | Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan | pokmas/or mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 246.250.000 | 0 | 0 | 100 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 3.000 | 163.250.000 | 0 | 0 | 600 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|---------|---|------------|--|----|---|----|--|------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 163.250.000 | 0 | 0 | 1 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 83.000.000 | 100 | 900.000 | 100 | 25.150.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 900.000,00 | 200 | 1,08 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 2 | 83.000.000 | 1 | 900.000 | 2 | 25.150.000 | 1 | 0 | 50 | 0 | 2 | 900.000,00 | 100 | 1,0843 | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 1.500 | 30.000.000 | 0 | 0 | 500 | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|--------------|----------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 1.200 | 53.000.000 | 260 | 900.000 | 440 | 20.850.000 | 260 | 0 | 59,09 | 0 | 520 | 900.000,00 | 43,33 | 1,6981 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 32.521.848.835 | 100 | 6.055.596.229 | 100 | 6.529.922.713 | 0 | 1.835.959.041 | 0 | 28,12 | 100 | 7.891.555.270,00 | 100 | 24,27 | Kecamatan Lau | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 4.750.000 | 1 | 949.500 | 11 | 5.181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 949.500,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60 | 4.750.000 | ### ## | 1 | 12 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### ### | 1,00 | 2E+06 | 2E-05 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 125 | 30.628.223.335 | 25 | 5.648.005.942 | 25 | 6.326.343.713 | 6 | 1.817.359.041 | 24 | 28,73 | 31 | 7.465.364.983,00 | 24,8 | 24,374 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 5740 | 30.396.123.335 | 1.148 | 5.601.585.942 | 476 | 6.274.503.713 | 34 | 1.804.399.041 | 7,14 | 28,76 | 1.182,00 | 7.405.984.983,00 | 20,592 | 24,365 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 232.100.000 | 11 | 46.420.000 | 12 | 51.840.000 | 3 | 12.960.000 | 25 | 25 | 14 | 59.380.000,00 | 25,455 | 25,584 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 4 | 479.375.500,00 | 4 | 95.329.100 | 6 | 88.012.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.329.100,00 | 100 | 19,886 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.567.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.588.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 61.060.500 | 5 | 12.212.100 | 1 | 15.072.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.212.100,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Paket | 10 | 40.490.000 | 2 | 7.552.000 | 1 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.552.000,00 | 20 | 18,652 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 60.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 317.825.000 | 12 | 63.565.000 | 12 | 42.184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63.565.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 809.500.000 | 0 | 0 | 2 | 74.686.000 | 0 | 18.600.000 | 0 | 24,9 | 0 | 18.600.000,00 | 0 | 2,2977 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 53.250.000 | 0 | 0 | 12 | 9.286.000 | 3 | 2.250.000 | 25 | 24,23 | 3 | 2.250.000,00 | 5 | 4,2254 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 756.250.000 | 0 | 0 | 12 | 65.400.000 | 3 | 16.350.000 | 25 | 25 | 3 | 16.350.000,00 | 5 | 2,162 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 600.000.000 | 1 | 118.641.687 | 2 | 35.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.641.687,00 | 50 | 19,774 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | 1 | 29.949.000 | 22 | 20.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.949.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang | Unit | 10 | 600.000.000 | 0 | 88.692.687 | 1 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.692.687,00 | 0 | 14,782 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|-------------|--|------------|---|------|--|------------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 11.067.803.125 | 4 | 1.676.100.000 | 100 | 684.000.000 | 0 | 27.600.000 | 0 | 4,04 | 4 | 1.703.700.000,00 | 4 | 15,39 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 4 | 11.054.803.125 | 1 | 360.000.000 | 2 | 684.000.000 | 0 | 27.600.000 | 0 | 4,04 | 1 | 387.600.000,00 | 25 | 3,5062 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 342.000.000 | 3 | 13.800.000 | 25 | 4,04 | 3 | 13.800.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Allepolea) | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 2.210.960.625 | 1 | 90.000.000 | 12 | 85.500.000 | 0 | 3.450.000 | 0 | 4,04 | 1 | 93.450.000,00 | 20 | 4,2267 | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Maccini Baji) | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 2.210.960.625 | 1 | 90.000.000 | 12 | 85.500.000 | 0 | 3.450.000 | 0 | 4,04 | 1 | 93.450.000,00 | 20 | 4,2267 | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Soreang) | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 2.210.960.625 | 1 | 90.000.000 | 12 | 85.500.000 | 0 | 3.450.000 | 0 | 4,04 | 1 | 93.450.000,00 | 20 | 4,2267 | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Mattiro Deceng) | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 2.210.960.625 | 1 | 90.000.000 | 12 | 85.500.000 | 0 | 3.450.000 | 0 | 4,04 | 1 | 93.450.000,00 | 20 | 4,2267 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilipahkan kepada Camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 3 | 13.000.000 | 1 | 2.600.000 | 3 | 7.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.600.000,00 | 33,33 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|-------------|--|-----------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha | Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan non usaha | Laporan | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #DI V/0! | ### | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 13.000.000 | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.600.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 7.920.000 | 100 | 2.640.000 | 100 | 2.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.640.000,00 | 100 | 33,33 | | |
| | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Desa | 2 | 7.920.000 | 1 | 2.640.000 | 8 | 2.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.640.000,00 | 50 | 33,33 | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 6 | 7.920.000 | 1 | 2.640.000 | 6 | 2.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.640.000,00 | 16,67 | 33,33 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang- | Desa | 100 | 1.209.125.000 | 85 | 841.825.000 | 100 | 874.051.000 | 0 | 30.510.000 | 0 | 3,49 | 85 | 872.335.000,00 | 85 | 72,15 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|---|-------|--|----------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | undangan yang berlaku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 2 | 209.125.000 | 350 | 41.825.000 | 965 | 56.051.000 | 0 | 30.510.000 | 0 | 54,43 | 350 | 72.335.000,00 | 17500 | 34,589 | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 10 | 163.825.000 | 2 | 32.765.000 | 2 | 35.501.000 | 1 | 30.510.000 | 50 | 85,94 | 3 | 63.275.000,00 | 30 | 38,624 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 15 | 45.300.000 | 3 | 9.060.000 | 3 | 20.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.060.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Pemberdayaan kelurahan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 1 | 1.000.000.000 | 200 | 800.000.000 | 20 | 818.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 800.000.000,00 | 20000 | 80 | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 1.000.000.000 | 1 | 200.000.000 | 2 | 818.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000,00 | 20 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|-------------|--|----|---|----|--|---------------|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 11.775.000 | 100 | 2.355.000 | 100 | 3.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.355.000,00 | 100 | 20 | | |
| | Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 150 | 11.775.000 | 12 | 2.355.000 | 75 | 3.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.355.000,00 | 8 | 20 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 11.775.000 | 12 | 2.355.000 | 1 | 3.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.355.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 321.625.000 | 100 | 64.325.000 | 100 | 130.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64.325.000,00 | 100 | 20 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 3 | 321.625.000 | 2 | 64.325.000 | 3 | 130.550.000 | 500 | 0 | #### | 0 | 502 | 64.325.000,00 | 16733 | 20 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|--|---|--------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|----|---|----|--|---------------|---|-------------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 2500 | 207.875.000 | 500 | 41.575.000 | 500 | 55.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41.575.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konusltasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 2500 | 113.750.000 | 500 | 22.750.000 | 700 | 72.400.000 | 500 | 0 | 71,43 | 0 | 1.000,00 | 22.750.000,00 | 40 | 20 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 10.853.854.255 | 40 | 2.154.986.828 | 100 | 2.171.312.062 | 606.380.334 | 0 | 27,93 | 40 | 2.761.367.162,00 | 40 | 25,44 | Kecamatan Simbang | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-------------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|------------------|---|------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 25 | 16.425.000 | 4 | 2.160.000 | 5 | 3.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.160.000,00 | 16 | 13 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 3.000.000 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.000.000 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.000.000 | 0 | 0 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.000.000 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 4.425.000 | 1 | 360.000 | 1 | 885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360.000,00 | 20 | 8,13 56 | | |
| | Administrasi keuaangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 130 | 9.449.339.255 | 1 | 1.868.271.534 | 26 | 1.941.319.062 | | 592.930.334 | 0 | 30,54 | 1 | 2.461.201.868,00 | 0,76 92 | 26,0 46 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 1.960 | 9.209.539.255 | 26 | 1.820.311.534 | 364 | 1.887.079.062 | 3 | 579.370.334 | 0,82 | 30,7 | 29 | 2.399.681.868,00 | 1,47 96 | 26,0 56 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|------------|---|----------------|--|-----------------------|---|----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 239.800.000 | 0 | 0 | 12 | 54.240.000 | 3 | 13.560.000 | 25 | 25 | 3 | 13.560.000,00 | 5 | 5,6547 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 627.490.000 | 4 | 139.707.794 | 6 | 121.628.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139.707.794,00 | 66,667 | 22,265 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 35 | 12.540.000 | 0 | 2.508.000 | 7 | 2.508.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508.000,00 | 0 | 20 | | |
| | penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 70 | 8.610.000 | 0 | 1.722.000 | 14 | 1.722.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722.000,00 | 0 | 20 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 180 | 129.490.000 | 6 | 25.679.000 | 36 | 25.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.679.000,00 | 3,3333 | 19,831 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15 | 31.000.000 | 7 | 6.200.000 | 3 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.200.000,00 | 46,667 | 20 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 110.000.000 | 12 | 51.525.000 | 12 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51.525.000,00 | 20 | 46,841 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 335.850.000 | 36 | 52.073.794 | 12 | 63.248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52.073.794,00 | 60 | 15,505 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan | jenis | 4 | 147.500.000 | 1 | 27.250.000 | 1 | 29.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.250.000,00 | 25 | 18,475 | | |
| | Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya | Jumlah Paket Peralatan mesin lainnya yang disediakan | unit | 10 | 147.500.000 | 11 | 27.250.000 | 2 | 29.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.250.000,00 | 110 | 18,475 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 10 | 518.600.000 | 0 | 0 | 2 | 56.680.000 | | 13.450.000 | 0 | 23,73 | 0 | 13.450.000,00 | 0 | 2,5935 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 34.400.000 | 0 | 0 | 12 | 6.880.000 | 3 | 1.500.000 | 25 | 21,8 | 3 | 1.500.000,00 | 5 | 4,3605 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 484.200.000 | 0 | 0 | 12 | 49.800.000 | 3 | 11.950.000 | 25 | 24 | 3 | 11.950.000,00 | 5 | 2,468 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 94.500.000 | 2 | 17.917.500 | 2 | 18.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.917.500,00 | 100 | 18,96 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 180 | 69.500.000 | 12 | 12.917.500 | 36 | 13.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.917.500,00 | 6,6667 | 18,586 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 25.000.000 | 12 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.000.000,00 | 240 | 20 | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 15.250.000 | 1 | 7.300.000 | 100 | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.300.000,00 | 1 | 47,87 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---------------------------------------|------------|---|-----------|---|------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 1 | 15.250.000 | 1 | 3.050.000 | 1 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.050.000,00 | 100 | 20 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 15.250.000 | 1 | 3.050.000 | 1 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.050.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 1 | 21.250.000 | 1 | 4.250.000 | 1 | 3.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.250.000,00 | 100 | 20 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 21.250.000 | 1 | 4.250.000 | 1 | 3.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.250.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 0 | 0 | 100 | 2.800.000 | 100 | 61.700.000 | 21.650.000 | 0 | 0 | 35,09 | 100 | 24.450.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Desa | 0 | 0 | 6 | 2.800.000 | 6 | 61.700.000 | 1 | 21.650.000 | 16,67 | 35,09 | 7 | 24.450.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.600.000 | 1 | 21.650.000 | 50 | 81,39 | 1 | 21.650.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|---|------------|--|----|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.050.000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 0 | 0 | 100 | 58.650.000 | 100 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 58.650.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 0 | 0 | 3 | 32.050.000 | 100 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.050.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan | Persen | 100 | 334.600.000 | 100 | 109.200.000 | 100 | 85.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 109.200.000,00 | 100 | 32,64 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----|---|----|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 2 | 334.600.000 | 2 | 54.600.000 | | 85.650.000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | 54.600.000,00 | 100 | 16,318 | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 0 | 136.800.000 | 250 | 34.200.000 | 350 | 45.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 34.200.000,00 | #DIV/0! | 25 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 0 | 197.800.000 | 900 | 20.400.000 | 350 | 40.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 20.400.000,00 | #DIV/0! | 10,313 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|-------------|--------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 11.790.227.010 | 16 | 466.132.324 | 100 | 2.281.289.632 | 16 | 564.488.808 | 16,16 | 24,74 | 32,32 | 1.030.621.132,00 | 32,32 | 8,74 | Kecamatan Cenrana | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 26.600.000 | 3 | 1.620.000 | 11 | 7.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.620.000,00 | 5 | 6 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 4.800.000 | 0 | 900.000 | 2 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000,00 | 0 | 18,75 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.300.000 | 0 | 720.000 | 1 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000,00 | 0 | 16,744 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 2.250.000 | 0 | 0 | 1 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.750.000 | 1 | 0 | 1 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 2.250.000 | 0 | 0 | 1 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 5.350.000 | 1 | 0 | 1 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 3.900.000 | 1 | 0 | 4 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 125 | 9.922.102.015 | 14 | 417.719.524 | 26 | 2.036.998.632 | 7 | 540.338.808 | 26,92 | 26,53 | 21 | 958.058.332,00 | 16,8 | 9,6558 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 1.680 | 9.687.802.015 | 96 | 404.939.524 | 350 | 1.986.358.632 | 100 | 527.678.808 | 28,57 | 26,57 | 196 | 932.618.332,00 | 11,667 | 9,6267 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 234.300.000 | 3 | 12.780.000 | 12 | 50.640.000 | 3 | 12.660.000 | 25 | 25 | 6 | 25.440.000,00 | 10,909 | 10,858 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 945.865.000 | 0 | 14.962.000 | 6 | 110.881.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.962.000,00 | 0 | 1,5818 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 22.650.000 | 0 | 0 | 1 | 4.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 60.820.000 | 0 | 0 | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 132.895.000 | 0 | 2.362.000 | 1 | 36.203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362.000,00 | 0 | 1,7773 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)// Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|---------|--|---------------|---|---------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 | 5 | 50.000.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1.600.000,00 | 0 | 3,2 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 310.000.000 | 3 | 3.500.000 | 12 | 35.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.500.000,00 | 5 | 1,129 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 369.500.000 | 3 | 7.500.000 | 12 | 25.248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.500.000,00 | 5 | 2,0298 | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pengadaan meubel | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 615.365.000 | 2 | 25.830.800 | 2 | 75.240.000 | 2 | 18.150.000 | 100 | 24,12 | 4 | 43.980.800,00 | 200 | 7,1471 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 58.215.000 | 3 | 2.690.000 | 12 | 11.640.000 | 3 | 2.250.000 | 25 | 19,33 | 6 | 4.940.000,00 | 10 | 8,4858 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 557.150.000 | 3 | 23.140.800 | 12 | 63.600.000 | 3 | 15.900.000 | 25 | 25 | 6 | 39.040.800,00 | 10 | 7,0072 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 280.294.995 | 0 | 6.000.000 | 2 | 50.630.000 | 1 | 6.000.000 | 50 | 11,85 | 1 | 12.000.000,00 | 50 | 4,2812 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 240.004.995 | 0 | 6.000.000 | 10 | 46.400.000 | 3 | 6.000.000 | 30 | 12,93 | 3 | 12.000.000,00 | 6 | 4,9999 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 40.290.000 | 0 | 0 | 1 | 4.230.000 | 3 | 0 | 300 | 0 | 3 | - | 60 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 117.500.000 | 0 | 0 | 100 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 1 | 35.250.000 | 0 | 0 | 1 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 35.250.000 | 0 | 0 | 1 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | Layanan | 1 | 20.250.000 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 20.250.000 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilipahkan kepada Camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 3 | 62.000.000 | 0 | 0 | 3 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait perizinan non usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 5 | 20.500.000 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|---------|--|---------------|---|-------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 5 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 25.500.000 | 0 | 0 | 1 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 30.000.000 | 0 | 0 | 100 | 3.500.000 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | - | 90 | 0 | | |
| | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagawasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Desa | 7 | 30.000.000 | 0 | 0 | 7 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 35 | 30.000.000 | 0 | 0 | 7 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 221.650.000 | 75 | 21.500.000 | 100 | 31.600.000 | 90 | 22.498.000 | 90 | 71,2 | 165 | 43.998.000,00 | 165 | 19,85 | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 1.500 | 221.650.000 | 300 | 21.500.000 | 400 | 31.600.000 | 300 | 22.498.000 | 75 | 71,2 | 600 | 43.998.000,00 | 40 | 19,85 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------|---|--------------------|--|-------------------|---|--------------|--|----------------------|---|-------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10 | 133.000.000 | 1 | 21.500.000 | 2 | 26.600.000 | 1 | 22.498.000 | 50 | 84,58 | 2 | 43.998.000,00 | 20 | 33,081 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15 | 88.650.000 | 0 | 0 | 3 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 12.000.000 | 0 | 0 | 100 | 3.000.000 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | - | 90 | 0 | | |
| | Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 375 | 12.000.000 | 0 | 0 | 75 | 3.000.000 | 75 | 0 | 100 | 0 | 75 | - | 20 | 0 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 12.000.000 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase urusan pemerintahan daerah yang sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Persen | 100 | 456.200.000 | 0 | 0 | 100 | 109.400.000 | 90 | 13.000.000 | 90 | 11,88 | 90 | 13.000.000,00 | 90 | 2,85 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|--------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|-------------|--|------------|---|---------|--|--------------|---|---------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah aerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 4 | 456.200.000 | 0 | 0 | 3 | 109.400.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 11,88 | 0 | 13.000.000,0 | 0 | 2,8496 | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 2.500 | 160.950.000 | 0 | 0 | 500 | 50.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (imtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 375 | 12.000.000 | 0 | 0 | 75 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sisialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahann Nasionall | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|-------------|--|-------------------------|---|-------------|------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 4.000 | 283.250.000 | 0 | 0 | 800 | 55.050.000 | 400 | 13.000.000 | 50 | 23,61 | 400 | 13.000.000,00 | 10 | 4,5896 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 22.836.487.865 | ### | 816.699.039 | 100 | 3.809.349.881 | 100 | 944.647.422 | 100 | 24,8 | #### | 1.761.346.461,00 | ### | 7,71 | Kecamatan Camba | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 17.175.098.785 | 3 | 0 | 11 | 4.650.000 | 11 | 0 | 100 | 0 | 14 | - | 25 | 0 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatda aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 3.000.000 | 0 | 0 | 2 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.000.000 | 0 | 0 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.000.000 | 0 | 0 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.000.000 | 1 | 0 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|-----------------|---|--------------------|---|-----------------|--|-------------------|--|-----------------|---|-------|--|----------------------|---|------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.000.000 | 0 | 0 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 3.000.000 | 1 | 0 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 17.157.098. 785 | 1 | 0 | 4 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 125 | 312.650.00 0 | 7 | 781.168.0 39 | 25 | 3.603.372.8 81 | 25 | 921.447.4 22 | 100 | 25,57 | 32 | 1.702.615.46 1,00 | 25,6 | 544, 58 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bul an | 279 0 | 273.900.00 0 | 126 | 766.228.0 39 | 14 | 3.544.092.8 81 | 105 | 901.687.4 22 | 750 | 25,44 | 231 | 1.667.915.46 1,00 | 8,27 96 | 608, 95 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 38.750.000 | 3 | 14.940.00 0 | 11 | 59.280.000 | 4 | 19.760.00 0 | 36,36 | 33,33 | 7 | 34.700.000,0 0 | 12,7 27 | 89,5 48 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administarsi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 1.362.439.0 80 | 4 | 7.071.000 | 6 | 94.677.000 | 6 | 0 | 100 | 0 | 10 | 7.071.000,00 | 166, 67 | 0,51 9 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 17.110.000 | 3 | 0 | 1 | 3.065.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 60 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|--------------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 106.940.000 | 3 | 528.000 | 1 | 8.544.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 4 | 528.000,00 | 80 | 0,4937 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 27.000.000 | 3 | 3.318.000 | 1 | 23.117.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.318.000,00 | 80 | 12,289 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 491.189.080 | 36 | 900.000 | 12 | 11.610.000 | 4 | 0 | 33,33 | 0 | 40 | 900.000,00 | 66,667 | 0,1832 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 720.200.000 | 36 | 1.200.000 | 12 | 48.341.000 | 4 | 0 | 33,33 | 0 | 40 | 1.200.000,00 | 66,667 | 0,1666 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 902.300.000 | 0 | 0 | 2 | 70.920.000 | 2 | 23.200.000 | 100 | 32,71 | 2 | 23.200.000,00 | 100 | 2,5712 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 677.000.000 | 0 | 0 | 12 | 7.320.000 | 4 | 2.000.000 | 33,33 | 27,32 | 4 | 2.000.000,00 | 6,6667 | 0,2954 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 225.300.000 | 0 | 0 | 12 | 63.600.000 | 4 | 21.200.000 | 33,33 | 33,33 | 4 | 21.200.000,00 | 6,6667 | 9,4097 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 3.084.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2 | 35.730.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 6.000.000,00 | 100 | 0,1946 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 30 | 31.550.000 | 0 | 6.000.000 | 6 | 31.500.000 | 1 | 0 | 16,67 | 0 | 1 | 6.000.000,00 | 3,3333 | 19,017 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10 | 3.052.450.000 | 0 | 0 | 2 | 4.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|--------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 2.077.400.000 | 24 | 0 | 100 | 570.800.000 | 100 | 136.600.000 | 100 | 23,93 | 123,5 | 136.600.000,00 | 123,5 | 6,58 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 3 | 525.000.000 | 2 | 108.110.000 | 3 | 152.500.000 | 2 | 0 | 66,67 | 0 | 4 | 108.110.000,00 | 133,33 | 20,592 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 38.200.000 | 0 | 10.660.000 | 1 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.660.000,00 | 0 | 27,906 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60 | 243.400.000 | 3 | 0 | 12 | 73.500.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 6 | - | 10 | 0 | | Kelurahan Cempaniga |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60 | 243.400.000 | 3 | 10.660.000 | 12 | 73.500.000 | 3 | 0 | 25 | 0 | 6 | 10.660.000,00 | 10 | 4,3796 | | Kelurahan Mario Pulana |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | Layanan | 5 | 1.532.400.000 | 1 | 0 | 1 | 412.800.000 | 1 | 136.600.000 | 100 | 33,09 | 2 | 136.600.000,00 | 40 | 8,9141 | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 1.532.400.000 | 6 | 97.450.000 | 24 | 412.800.000 | 8 | 136.600.000 | 33,33 | 33,09 | 14 | 234.050.000,00 | 23,333 | 15,273 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 3 | 20.000.000 | 0 | 97.450.000 | 2 | 5.500.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 97.450.000,00 | 66,667 | 487,25 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|--------------|--|----------------------|---|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 15 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | | 11 | 0 | 100 | 461.380.000 | 100 | 27.790.000 | 100 | 6,02 | 111,1 | 27.790.000,00 | 111,1 | #DIV/0! | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 2100 | 718.941.508 | 350 | 28.790.000 | 525 | 52.380.000 | 500 | 27.790.000 | 95,24 | 53,05 | 850 | 56.580.000,00 | 40,476 | 7,8699 | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10 | 195.150.000 | 1 | 28.790.000 | 2 | 36.190.000 | 1 | 27.790.000 | 50 | 76,79 | 2 | 56.580.000,00 | 20 | 28,993 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15 | 523.791.508 | 0 | 28.790.000 | 3 | 16.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.790.000,00 | 0 | 5,4965 | | |
| | Pemberdayaan kelurahan | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | Orang | 180 | | 0 | 0 | 60 | 409.000.000 | 60 | 0 | 100 | 0 | 60 | - | 33,333 | #DIV/0! | | |
| | Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3 | 600.000.000 | 0 | 0 | 1 | 204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan Cempangiga |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|--------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|-------------|--|------------|---|-------|--|--------------|---|--------|------------------|-------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3 | 600.000.000 | 0 | 0 | 1 | 204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan Cemping |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 215.970.000 | 33 | 0 | 100 | 61.450.000 | 100 | 21.750.000 | 100 | 35,39 | 133,3 | 21.750.000,0 | 133,3 | 10,07 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 3 | 215.970.000 | 1 | 0 | 2 | 61.450.000 | 2 | 21.750.000 | 100 | 35,39 | 3 | 21.750.000,0 | 100 | 10,071 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|------------|---|----|---|------------|--|----|---|----|--|----|---|----|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Kecamatan") Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pestaarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah laporan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Kecamatan") | Laporan | 250 0 | 93.270.000 | 0 | 0 | 1 | 34.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|--------------|-----------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionalnegara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara k"&"esatuan republik indonesia") | jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionalnegara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara k"&"esatuan republik indonesia") | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 2830 | 122.700.000 | 0 | 0 | 640 | 21.750.000 | 0 | 21.750.000 | 0 | 100 | 0 | 21.750.000,00 | 0 | 17,726 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 13.390.358.885 | 11 | 2.907.051.062 | 100 | 2.538.956.313 | 100 | 464.059.767 | 100 | 18,28 | 111 | 3.371.110.829,00 | 111 | 25,18 | Kecamatan Moncongloe | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 35 | 70.000.000 | 7 | 14.000.000 | 7 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 10.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000,00 | 20 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 10.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 10.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 10.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 10.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60 | 10.000.000 | 12 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 10 | 10.000.000 | 2 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 130 | 11.725.593.935 | 25 | 2.612.466.822 | 25 | 2.294.793.313 | 7 | 437.959.767 | 28 | 19,08 | 32 | 3.050.426.589,00 | 24,615 | 26,015 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------|---|----------|--|-----------------------|---|--------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 1890 | 11.491.293.935 | 378 | 2.569.866.866 | 350 | 2.242.953.313 | 75 | 424.999.767 | 21,43 | 18,95 | 453 | 2.994.866.633,00 | 23,968 | 26,062 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 234.300.000 | 12 | 42.599.956 | 12 | 51.840.000 | 3 | 12.960.000 | 25 | 25 | 15 | 55.559.956,00 | 25 | 23,713 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 175 | 50.000.000 | 35 | 13.975.000 | 4 | 6.937.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13.975.000,00 | 20 | 27,95 | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 20 | 50.000.000 | 35 | 13.975.000 | 4 | 6.937.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13.975.000,00 | 175 | 27,95 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 4 | 769.615.000 | 2 | 115.366.477 | 6 | 111.076.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115.366.477,00 | 50 | 14,99 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.967.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 125 | 25.200.000 | 4 | 4.867.000 | 16 | 5.083.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.867.000,00 | 3,2 | 19,313 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 25 | 39.165.000 | 1 | 7.443.000 | 6 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.443.000,00 | 4 | 19,004 | | |
| | Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya | Jumlah Paket Peralatan mesin lainnya yang disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 125 | 250.000.000 | 20 | 56.125.000 | 12 | 38.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56.125.000,00 | 16 | 22,45 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 455.250.000 | 8 | 46.931.477 | 12 | 29.526.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46.931.477,00 | 13,333 | 10,309 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 10 | 620.150.000 | 5 | 127.334.763 | 2 | 95.150.000 | 2 | 23.100.000 | 100 | 24,28 | 7 | 150.434.763,00 | 70 | 24,258 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 744.149.950 | 16 | 12.500.000 | 2 | 11.750.000 | 2 | 2.250.000 | 100 | 19,15 | 18 | 14.750.000,00 | 900 | 1,9821 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 549.150.000 | 12 | 114.834.763 | 12 | 83.400.000 | 3 | 20.850.000 | 25 | 25 | 15 | 135.684.763,00 | 25 | 24,708 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 5 | 154.999.950 | 2 | 23.908.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 3.000.000 | 100 | 17,65 | 3 | 26.908.000,00 | 60 | 17,36 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 154.999.950 | 2 | 23.908.000 | 2 | 17.000.000 | 2 | 3.000.000 | 100 | 17,65 | 4 | 26.908.000,00 | 200 | 17,36 | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di kecamatan | IKM PATEN | Nilai Indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,26 | 49.960.000 | 3 | 15.085.000 | 100 | 30,19 | 3,26 | 15.085.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 167.750.000 | 100 | 55.500.000 | 4 | 30.410.000 | 2 | 0 | 50 | 0 | 102 | 55.500.000,00 | 102 | 33,08 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 1 | 50.000.000 | 2 | 19.100.000 | 12 | 6.910.000 | 4 | 0 | 33,33 | 0 | 6 | 19.100.000,00 | 600 | 38,2 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (| Dokumen | 5 | 50.000.000 | 0 | 9.100.000 | 12 | 6.910.000 | 4 | 0 | 33,33 | 0 | 4 | 9.100.000,00 | 80 | 18,2 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)// Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Keg.Kecamatan Sehat) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | Layanan | 1 | 66.750.000 | 1 | 10.000.000 | 4 | 14.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.000.000,00 | 100 | 14,981 | | |
| | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (PKK) | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 66.750.000 | 0 | 0 | 2 | 14.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 2 | 51.000.000 | 3 | 14.900.000 | 2 | 9.400.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 5 | 14.900.000,00 | 250 | 29,216 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Non perizinan | Jumlah laporan pelayanan perizinan Non perizinan | Laporan | 5 | 25.000.000 | 1 | 4.700.000 | 1 | 4.200.000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 4.700.000,00 | 40 | 18,8 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah laporan | Laporan | 10 | 26.000.000 | 1 | 5.200.000 | 2 | 5.200.000 | | | 0 | 0 | 1 | 5.200.000,00 | 10 | 20 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 20.750.000 | 100 | 6.050.000 | 100 | 19.550.000 | 100 | 15.085.000 | 100 | 77,16 | 200 | 21.135.000,00 | 200 | 101,86 | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 25 | 20.750.000 | 2 | 6.050.000 | 800 | 19.550.000 | 400 | 15.085.000 | 50 | 77,16 | 402 | 21.135.000,00 | 1608 | 101,86 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 25 | 20.750.000 | 2 | 6.050.000 | 2 | 19.550.000 | 1 | 15.085.000 | 50 | 77,16 | 3 | 21.135.000,00 | 12 | 101,86 | | |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 818.250.000 | 100 | 21.950.000 | 100 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21.950.000,00 | 100 | 2,68 | | |
| | Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | laporan | 3 | 818.250.000 | 500 | 21.950.000 | 1 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 21.950.000,00 | 16667 | 2,6826 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 50.000.000 | 2 | 21.950.000 | 1 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.950.000,00 | 40 | 43,9 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 358.375.000 | 100 | 71.675.000 | 100 | 69.050.000 | 50 | 12.000.000 | 50 | 17,38 | 150 | 83.675.000,00 | 150 | 23,35 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 15 | 358.375.000 | 130 | 71.675.000 | 2 | 69.050.000 | 1 | 12.000.000 | 50 | 17,38 | 131 | 83.675.000,00 | 873,33 | 23,348 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|--------------|----------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 350 0 | 176.250.00 0 | 700 | 35.250.00 0 | 400 | 36.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 35.250.000,0 0 | 20 | 20 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 400 0 | 182.125.00 0 | 800 | 36.425.00 0 | 3 | 33.000.000 | 1 | 12.000.00 0 | 33,33 | 36,36 | 801 | 48.425.000,0 0 | 20,0 25 | 26,5 89 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 13.688.975.115 | 100 | 2.644.307.412 | 100 | 2.759.162.943 | 100 | 666.918.926 | 100 | 24,17 | 200 | 3.311.226.338,00 | 200 | 24,19 | Kecamatan Tompobulu | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 20 | 12.300.000 | 4 | 2.460.000 | 4 | 2.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.460.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Dokumen | 5 | 3.075.000 | 1 | 615.000 | 1 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615.000,00 | 20 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|----------------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.075.000 | 1 | 615.000 | 1 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.075.000 | 1 | 615.000 | 1 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.075.000 | 1 | 615.000 | 1 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 125 | 12.430.855.115 | 25 | 2.392.042.778 | 25 | 2.608.543.943 | 25 | 651.768.926 | 100 | 24,99 | 50 | 3.043.811.704,00 | 40 | 24,486 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 2.100 | 12.191.055.115 | 420 | 2.344.082.778 | 14 | 2.556.703.943 | 120 | 638.808.926 | 857,14 | 24,99 | 540 | 2.982.891.704,00 | 25,714 | 24,468 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 239.800.000 | 11 | 47.960.000 | 12 | 51.840.000 | 3 | 12.960.000 | 25 | 25 | 14 | 60.920.000,00 | 25,455 | 25,405 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 150 | 37.500.000 | 30 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 7.500.000,00 | 20 | 20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5 | 37.500.000 | 1 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 7.500.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 5 | 504.570.000 | 5 | 108.835.634 | 4 | 61.509.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108.835.634,00 | 100 | 21,57 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 22.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.500.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 71.820.000 | 1 | 14.364.000 | 1 | 14.774.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.364.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 28.750.000 | 1 | 5.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 5.750.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 89.750.000 | 12 | 28.175.000 | 12 | 17.035.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28.175.000,00 | 20 | 31,393 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 291.750.000 | 12 | 56.046.634 | 12 | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56.046.634,00 | 20 | 19,211 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 583.750.000 | 2 | 107.240.000 | 2 | 61.150.000 | 2 | 15.150.000 | 100 | 24,78 | 4 | 122.390.000,00 | 200 | 20,966 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 48.250.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.550.000 | 3 | 2.250.000 | 25 | 23,56 | 15 | 11.250.000,00 | 25 | 23,316 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 535.500.000 | 12 | 98.240.000 | 12 | 51.600.000 | 3 | 12.900.000 | 25 | 25 | 15 | 111.140.000,00 | 25 | 20,754 | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----|---|---------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 1 | 120.000.000 | 2 | 26.229.000 | 1 | 25.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.229.000,00 | 200 | 21,858 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/ Jabatan dalam kondisi baik | Unit | 5 | 120.000.000 | 1 | 23.979.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 23.979.000,00 | 20 | 19,983 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 130 | 16.250.000 | 10 | 2.250.000 | 40 | 25.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.250.000,00 | 7,6923 | 13,846 | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 51.000.000 | 100 | 10.100.000 | 100 | 3.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10.100.000,00 | 100 | 19,8 | | |
| | Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 10 | 51.000.000 | 2 | 10.100.000 | 1 | 3.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.100.000,00 | 20 | 19,804 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 5 | 25.500.000 | 1 | 5.050.000 | 1 | 3.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.050.000,00 | 20 | 19,804 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 25.500.000 | 1 | 5.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 5.050.000,00 | 20 | 19,804 | | |
| | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan | Persen | 100 | 34.250.000 | 100 | 6.800.000 | 100 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.800.000,00 | 100 | 19,85 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Perundang - Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Desa | 40 | 34.250.000 | 8 | 6.800.000 | 8 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.800.000,00 | 20 | 19,854 | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 40 | 34.250.000 | 8 | 6.800.000 | 8 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.800.000,00 | 20 | 19,854 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 200.625.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 42.400.000 | 100 | 29.844.000 | 100 | 70,39 | 200 | 69.844.000,00 | 200 | 34,81 | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 4.650 | 200.625.000 | 580 | 40.000.000 | 580 | 42.400.000 | 580 | 29.844.000 | 100 | 70,39 | 1.160,00 | 69.844.000,00 | 24,946 | 34,813 | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 50 | 169.875.000 | 2 | 33.850.000 | 1 | 29.845.000 | 1 | 29.844.000 | 100 | 100 | 3 | 63.694.000,00 | 6 | 37,495 | | |

| N O | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----|---|----|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 30.750.000 | 1 | 6.150.000 | 1 | 12.555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.150.000,00 | 20 | 20 | | |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 25.000.000 | 100 | 34.950.000 | 100 | 4.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34.950.000,00 | 100 | 139,8 | | |
| | Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 375 | 25.000.000 | 75 | 34.950.000 | 60 | 4.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34.950.000,00 | 20 | 139,8 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 25.000.000 | 1 | 34.950.000 | 1 | 4.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.950.000,00 | 20 | 139,8 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 410.000.000 | 100 | 83.400.000 | 100 | 43.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83.400.000,00 | 100 | 20,34 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 2 | 410.000.000 | 2 | 83.400.000 | 2 | 43.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.400.000,00 | 100 | 20,341 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|----------------|---|-----------------------|---|--------------------|--|----------------------|--|--------------------|---|--------------|--|-------------------------|---|-------------|-------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 2.00 0 | 205.000.00 0 | 300 | 41.000.00 0 | 300 | 35.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 41.000.000,0 0 | 15 | 20 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 4.50 0 | 205.000.00 0 | 450 | 42.400.00 0 | 450 | 8.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 42.400.000,0 0 | 10 | 20,6 83 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 24.536.688.105 | 50 | 835.248.562 | 100 | 5.185.031.059 | 100 | 663.424.344 | 100 | 12,79 | 150 | 1.498.672.906,00 | 150 | 6,11 | Kecamatan Mandai | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 35 | 23.850.000 | 0 | 0 | 7 | 7.800.000 | 7 | 0 | 100 | 0 | 7 | - | 20 | 0 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 2.750.000 | 0 | 0 | 2 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|------------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 2.750.000 | 0 | 0 | 1 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 2.750.000 | 0 | 0 | 1 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 2.750.000 | 1 | 0 | 1 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 2.750.000 | 0 | 0 | 1 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60 | 2.750.000 | 3 | 0 | 12 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 7.350.000 | 1 | 0 | 4 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 140 | 22.916.552.940 | 7 | 775.234.202 | 28 | 4.975.792.059 | 28 | 649.974.344 | 100 | 13,06 | 35 | 1.425.208.546,00 | 25 | 6,2191 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|----------------|--|----------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4200 | 22.676.752.940 | 240 | 762.234.202 | 840 | 4.923.952.059 | 322 | 641.374.344 | 38,33 | 13,03 | 562 | 1.403.608.546,00 | 13,381 | 6,1896 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 239.800.000 | 3 | 13.000.000 | 12 | 51.840.000 | 2 | 8.600.000 | 16,67 | 16,59 | 5 | 21.600.000,00 | 8,3333 | 9,0075 | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | 145 | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 145 | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 5 | 616.135.165 | 2 | 25.034.360 | 6 | 105.964.000 | 6 | 0 | 100 | 0 | 8 | 25.034.360,00 | 160 | 4,0631 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 50 | 9.940.400 | 0 | 0 | 8 | 2.083.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 29.362.500 | 0 | 1.290.000 | 1 | 5.587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 1.290.000,00 | 1,66 | 4,3934 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 77.682.265 | 0 | 4.488.500 | 3 | 15.697.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 4.488.500,00 | 1,6 | 5,778 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 100.000.000 | 0 | 0 | 12 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 399.150.000 | 1 | 18.445.860 | 12 | 62.596.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.445.860,00 | 1,6667 | 4,6213 | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 855.000.000 | 2 | 34.980.000 | 2 | 76.920.000 | 2 | 13.450.000 | 100 | 17,49 | 4 | 48.430.000,00 | 200 | 5,6643 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|---|-------------------|--|-----------------|---|-------|--|--------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 36.600.000 | 1 | 1.830.000 | 8 | 7.320.000 | 3 | 1.500.000 | 37,5 | 20,49 | 4 | 3.330.000,00 | 6,66 67 | 9,09 84 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 818.400.00 0 | 3 | 33.150.00 0 | 12 | 69.600.000 | 3 | 11.950.00 0 | 25 | 17,17 | 6 | 45.100.000,0 0 | 10 | 5,51 08 | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 96.150.000 | 0 | 0 | 2 | 18.555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 150 | 62.200.000 | 0 | 0 | 39 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 33.950.000 | 0 | 0 | 1 | 8.055.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 6.993.125.0 00 | #R EF! | 304.850.0 00 | 100 | 1.280.820.0 01 | 100 | 211.900.0 00 | 100 | 16,54 | #RE FI | 516.750.000, 00 | #RE FI | 7,39 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 3 | 569.975.00 0 | | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | - | 100 | 0 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 29.975.000 | | 0 | 1 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.00 0 | | 0 | 12 | 85.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurah an Bontoa |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------------|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|--------|------------------|----------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36 | 270.000.000 | | 0 | 12 | 85.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan Hasanuddin |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | Layanan | 1 | 6.357.000.000 | | 304.850.000 | 1 | 1.271.400.000 | 1 | 211.900.000 | 100 | 16,67 | 1 | 516.750.000,00 | 100 | 8,1288 | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 6.357.000.000 | | 304.850.000 | 12 | 1.271.400.000 | 3 | 211.900.000 | 25 | 16,67 | 3 | 516.750.000,00 | 5 | 8,1288 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 3 | 66.150.000 | | 0 | 3 | 9.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha | Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan non usaha | Laporan | 55 | 20.700.000 | | 0 | 1 | 3.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 140 | 20.475.000 | | 0 | 1 | 3.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 30 | 24.975.000 | | 0 | 1 | 3.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|--------------|---|-----------|---|------------|--|-----------|---|-------|--|---------------|---|--------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 19.950.000 | 0 | 0 | 100 | 4.175.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 100 | 0 | | |
| | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Desa | 4 | 19.950.000 | 0 | 0 | 4 | 4.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 20 | 19.950.000 | 0 | 0 | 4 | 4.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 1.428.390,00 | 26 | 19.480,00 | 100 | 46.933.000 | 100 | 18.305,00 | 100 | 39 | 126,25 | 37.785.000,00 | 126,25 | 2,65 | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 1585 | 228.390,00 | 162 | 17.080,00 | 317 | 46.933.000 | 317 | 18.305,00 | 100 | 39 | 479 | 35.385.000,00 | 30,21 | 15,493 | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10 | 112.390,00 | 1 | 17.080,00 | 2 | 23.405.000 | 1 | 18.305,00 | 50 | 78,21 | 2 | 35.385.000,00 | 20 | 31,484 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|--------------|---------------------------------------|---------------|---|-----------|---|-------------|--|----|---|----|--|--------------|---|---------|------------------|----------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 116.000.000 | 0 | 0 | 2 | 23.528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan kelurahan | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | Orang | 1500 | 1.200.000.000 | 0 | 2.400.000 | 300 | 409.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000,00 | 0 | 0,2 | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 10 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 15 | 600.000.000 | 0 | 0 | 5 | 188.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan Bontoa |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 15 | 600.000.000 | 0 | 0 | 5 | 188.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan Hasanuddin |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 29.900.000 | 0 | 0 | 100 | 3.080.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 100 | 0 | | |
| | Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 500 | 29.900.000 | 0 | 0 | 100 | 3.080.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 20 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|---------|---------------------------------------|-------------|---|----|---|------------|--|------------|---|------|--|---------------|---|------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 29.900.000 | 0 | 0 | 1 | 3.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 352.500.000 | 32 | 0 | 100 | 90.625.000 | 100 | 16.400.000 | 100 | 18,1 | 132,3 | 16.400.000,00 | 132,33 | 4,65 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 2 | 352.500.000 | 1 | 0 | 2 | 90.625.000 | 2 | 16.400.000 | 100 | 18,1 | 3 | 16.400.000,00 | 150 | 4,65 | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 1500 | 130.000.000 | 0 | 0 | 300 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|---|--------------|--|------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 300 0 | 222.500.00 0 | 291 | 0 | 600 | 45.625.000 | 376 | 16.400.00 0 | 62,67 | 35,95 | 667 | 16.400.000,0 0 | 22,2 33 | 7,37 08 | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 17.980.786. 065 | 32 | 790.832.4 39 | 100 | 3.440.888.2 46 | 100 | 3.103.340. 873 | 100 | 90,19 | 132,1 4 | 3.894.173.31 2,00 | 132, 14 | 21,6 6 | Kecamata n Tanralili | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55 | 50.000.000 | 3 | 2.100.000 | 11 | 7.600.000 | 11 | 0 | 100 | 0 | 14 | 2.100.000,00 | 25 | 4 | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 10.000.000 | 0 | 1.500.000 | 2 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 0 | 15 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.000.000 | 0 | 600.000 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 12 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.000.000 | 1 | 0 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|-----------------|---|----------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|---|--------------|--|------------------------------|---|--------------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 10.000.000 | 1 | 0 | 1 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 10.000.000 | 1 | 0 | 4 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 125 | 16.425.681. 065 | 7 | 725.322.4 39 | 25 | 3.295.442.2 46 | 25 | 3.088.190. 873 | 100 | 93,71 | 32 | 3.813.513.31 2,00 | 25,6 | 23,2 17 | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bul an | 273 0 | 16.185.881. 065 | 156 | 712.242.4 39 | 546 | 3.243.602.2 46 | 117 | 3.040.230. 873 | 21,43 | 93,73 | 273 | 3.752.473.31 2,00 | 10 | 23,1 84 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 239.800.00 0 | 3 | 13.080.00 0 | 12 | 51.840.000 | 3 | 47.960.00 0 | 25 | 92,52 | 6 | 61.040.000,0 0 | 10,9 09 | 25,4 55 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6 | 679.105.00 0 | 2 | 42.290.00 0 | 6 | 62.096.000 | 6 | 0 | 100 | 0 | 8 | 42.290.000,0 0 | 133, 33 | 6,22 73 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 7.500.000 | 0 | 0 | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|--------------|---|-------------------------|---|------------------------|--|-------------------|--|------------------------|---|--------------|--|---------------------------|---|---------------------|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 86.605.000 | 0 | 0 | 1 | 10.076.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 2.802.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 290.000.00 0 | 3 | 36.000.00 0 | 12 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.000.000,0 0 | 5 | 12,4 14 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 225.000.00 0 | 3 | 6.290.000 | 12 | 26.718.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.290.000,00 | 5 | 2,79 56 | | |
| | Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Jenis Pengadaan Perlatan Mesin Lainnya | Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 2 | 711.000.00 0 | 2 | 21.120.00 0 | 2 | 62.250.000 | 2 | 15.150.00 0 | 100 | 24,34 | 4 | 36.270.000,0 0 | 200 | 5,10 13 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 53.250.000 | 3 | 2.250.000 | 12 | 10.650.000 | 3 | 2.250.000 | 25 | 21,13 | 6 | 4.500.000,00 | 10 | 8,45 07 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 657.750.00 0 | 3 | 18.870.00 0 | 12 | 51.600.000 | 3 | 12.900.00 0 | 25 | 25 | 6 | 31.770.000,0 0 | 10 | 4,83 01 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|-------------|--|------------|---|---------|--|--------------|---|------|------------------|------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 115.000.000 | 0 | 0 | 2 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 80.000.000 | 0 | 0 | 10 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 35.000.000 | 0 | 0 | 1 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 1.324.700.000 | 9 | 29.400.000 | 100 | 191.100.000 | 15 | 29.400.000 | 15 | 15,38 | 24,2 | 58.800.000,0 | 24,2 | 4,44 | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan | Urusan | 1 | 672.450.000 | 1 | 0 | 1 | 73.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 100 | 0 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 222.450.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60 | 450.000.000 | 3 | 0 | 12 | 73.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | | Kelurahan Borong |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | Layanan | 1 | 588.000.000 | 1 | 29.400.000 | 1 | 117.600.000 | 1 | 29.400.000 | 100 | 25 | 2 | 58.800.000,0 | 200 | 10 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|---|------------|---|-------------|--|------------|---|----------------|--|---------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Peningkatan efektifitas,Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 588.000.000 | 3 | 29.400.000 | 12 | 117.600.000 | 3 | 29.400.000 | 25 | 25 | 6 | 58.800.000,00 | 10 | 10 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Urusan | 3 | 64.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait perizinan non usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 5 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkat dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 5 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 24.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | - | 20 | 0 | | |
| | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 20.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Desa | 7 | 20.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|----------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---|-------------|--|------------|---|---------|--|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 35 | 20.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 1.044.120.000 | 17 | 26.550.000 | 100 | 241.275.000 | 50 | 31.725.000 | 50 | 13,15 | 66,67 | 58.275.000,00 | 66,67 | 5,58 | | |
| | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 3760 | 244.120.000 | 350 | 26.550.000 | 752 | 36.775.000 | 1 | 31.725.000 | 0,13 | 86,27 | 351 | 58.275.000,00 | 9,3351 | 23,871 | | |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10 | 160.000.000 | 1 | 26.550.000 | 1 | 31.725.000 | 1 | 31.725.000 | 100 | 100 | 2 | 58.275.000,00 | 20 | 36,422 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15 | 84.120.000 | 0 | 0 | 1 | 5.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pemberdayaan kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan | Kegiatan | 5 | 800.000.000 | 0 | 0 | 1 | 204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 5 | 800.000.000 | 0 | 0 | 1 | 204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Kelurahan Borong |
| | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 23.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | 0 | 0 | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|--|---------|---|-----------------|---|----|--|------------|--|----|---|-------------|--|----|---|----|---------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 375 | 23.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/ 0! | #DIV/ 0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 23.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/ 0! | #DIV/ 0! | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 414.250.00 0 | 0 | 0 | 100 | 89.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 2 | 414.250.00 0 | 0 | 0 | 2 | 89.100.000 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | - | 100 | 0 | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan | Orang | 250 0 | 190.250.00 0 | 0 | 0 | 350 | 44.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-----------------|---|----|---|---------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|----------|-----------------------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 400 0 | 224.000.00 0 | 0 | 0 | 500 | 44.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | | | | | 100 | 3.176.151.240 | 0 | 739.329.578 | 0 | 23,28 | 0 | 739.329.578,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | | | | | 8 | 24.846.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | | | | 2 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Dokumen | | | | | 1 | 2.852.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|----|---|----|---|------------|--|----|---|----|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | | | | | 1 | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | | | | | 1 | 2.371.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | | | | | 1 | 2.385.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | | | | | 1 | 12.428.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | | | | | 1 | 2.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah | Dokumen | | | | | 12 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|-------------|---------------------------------------|----|---|----|---|---------------|--|-------------|---|---------|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | | | | | 41 | 2.939.692.887 | 6 | 730.929.578 | 14,63 | 24,86 | 6 | 730.929.578,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | | | | | 392 | 2.786.163.887 | 108 | 696.489.578 | 27,55 | 25 | 108 | 696.489.578,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | | | | | 14 | 144.960.000 | 3 | 34.440.000 | 21,43 | 23,76 | 3 | 34.440.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | | | | | 1 | 2.983.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | | | | | 12 | 5.585.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | | | | | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Paket | | | | | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | | | | | 34 | 163.011.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|--------------|---------------------------------------|----|---|----|---|-------------------|--|------------------|---|--------------|--|---------------------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | | | | | 5 | 1.929.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | | | | | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | | | | | 1 | 5.607.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | | | | | 14 | 4.737.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | | | | | 2 | 1.946.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan bahan/material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Laporan | | | | | 1 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | | | | | 1 | 10.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | | | | 10 | 85.741.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | | | | | 14 | 38.600.000 | 3 | 8.400.000 | 21,43 | 21,76 | 3 | 8.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | | | | | 1 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | 1 | 3.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|---|---------|---------------------------------------|----|---|----|---|---------------|--|-----------|---|------|--|--------------|---|----------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | 12 | 33.600.000 | 3 | 8.400.000 | 25 | 25 | 3 | 8.400.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | | | | | 3 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | | | | | 2 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persen | | | | | 100 | 1.231.866.900 | 40 | 1.600.000 | 40 | 0,13 | 40 | 1.600.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Dokumen | | | | | 559 | 1.231.866.900 | 40 | 1.600.000 | 7,16 | 0,13 | 40 | 1.600.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | | | | | 50 | 21.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|----|---|----|---|---------------|--|-----------|---|-------|--|--------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi | Orang | | | | | 200 | 4.320.000 | 40 | 1.600.000 | 20 | 37,04 | 40 | 1.600.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah laporan hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan | Dokumen | | | | | 100 | 1.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Dokumen | | | | | 4 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pembentukan paskibraka | Jumlah Paskibraka | Orang | | | | | 250 | 1.054.221.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik | Persen | | | | | 100 | 887.456.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|----|---|----|---|-------------|--|----|---|----|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Dokumen | | | | | 4 | 887.456.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Orang | | | | | 50 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|----|---|----|---|-------------|--|----|---|---------|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemerintahan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun | Dokumen | | | | | 6 | 4.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah | Orang | | | | | 5.000 | 874.726.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol | Dokumen | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------------|---------------------------------------|----|---|----|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|-----------------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | Dokumen | | | | | 6 | 2.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan tugas Paskibraka | Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan tugas paskibraka | Dokumen | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | Persen | | | | | 100 | 13.143.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Dokumen | | | | | 1 | 13.143.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Dokumen | | | | | 5 | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|---|--|---------|---|----|---|----|--|-----------|--|----|---|-------------|--|----|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Dokumen | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/ 0! | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan oras dan ormas asing di daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah | Orang | | | | | 100 | 6.933.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Dokumen | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/ 0! | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Dokumen | | | | | 5 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|---|--------|---------------------------------------|----|---|----|---|-------------|--|----|---|----|--|----|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekoomi, sosial dan budaya | Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya | Persen | | | | | 100 | 161.215.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya | Orang | | | | | 150 | 161.215.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | | | | | 150 | 150.965.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | | | | | 100 | 8.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|--|--|---------|---------------------------------------|----|---|----|---|-------------|--|-------------|---|----|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Dokumen | | | | | 2 | 1.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik | Persen | | | | | 100 | 575.983.100 | 3 | 201.600.000 | 3 | 35 | 3 | 201.600.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | Dokumen | | | | | 15 | 575.983.100 | 3 | 201.600.000 | 20 | 35 | 3 | 201.600.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Dokumen | | | | | | 3.010.000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| N o | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|--------|--|---|---------|---|----|---|----|--|------------|--|----|---|----|--|----|---|-------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | | | | | 100 | 16.482.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | | | | | 2 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|----|---|----|---|-------------|--|-------------|---|-------|--|----------------|---|----------|------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah | Jumlah laporan hasil Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah | Laporan | | | | | 2 | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DI V/0! | #DI V/0! | | |
| | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum korodinasi pimpinan daerah kabupaten/kota | Dokumen | | | | | 12 | 539.590.500 | 3 | 201.600.000 | 25 | 37,36 | 3 | 201.600.000,00 | #DI V/0! | #DI V/0! | | |

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

2.3.1 Hambatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi RKPD antara lain:

1. Kurangnya kemampuan aparat perangkat daerah dalam memahami substansi pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah;
2. Keterbatasan aparat perangkat daerah dalam pengisian format evaluasi Renja;
3. Keterbatasan aparat perangkat daerah dalam menyusun indikator kinerja yang tepat sehingga menyulitkan proses pelaporan dan evaluasi.
4. Masih rendahnya penyerapan anggaran yang disebabkan oleh kendala teknis.

2.3.2 Upaya Pencapaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan aparatur perangkat daerah dalam memahami substansi akan program/kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Adanya SOP/ToR yang memadai dalam pelaksanaan program/kegiatan;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang memadai.

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan memperhitungkan target kinerja dan target keuangan agar pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan tepat sasaran;
3. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah sehingga harus dilakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap usulan perangkat daerah supaya tidak terjadi perbedaan jumlah program/kegiatan/sub kegiatan antara RPJMD, RKPD dan APBD.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Melalui analisis terhadap kondisi ekonomi terkini dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai akhir tahun 2025.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian permasalahan pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Disisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1 KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 berkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen. Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen (y-on-y).

A.1. Tantangan Ekonomi Indonesia Tahun 2025

Tantangan perekonomian nasional di tahun 2025 meliputi ketidakpastian global, seperti perang dagang dan konflik geopolitik, yang dapat memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Selain itu, ketahanan energi, digitalisasi, dan ketimpangan ekonomi juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Adapun beberapa tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2025 adalah:

- **Ketidakpastian Global:**
Konflik geopolitik, perubahan kebijakan suku bunga global, dan potensi resesi di negara-negara besar dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama karena ketergantungan pada ekspor komoditas.
- **Daya Beli Masyarakat:**

Penurunan permintaan pasar global, hambatan perdagangan, dan kebijakan domestik yang berubah dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur.

- **Ketahanan Energi:**

Target peningkatan energi terbarukan menghadapi kendala investasi dan regulasi. Mempercepat pengembangan energi terbarukan menjadi krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional.

- **Digitalisasi:**

Transformasi digital yang pesat menuntut pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk beradaptasi. Banyak UMKM yang belum siap menghadapi tantangan ini, baik dari segi infrastruktur maupun keterampilan sumber daya manusia.

- **Ketimpangan Ekonomi:**

Ketimpangan kekayaan yang semakin melebar menjadi perhatian serius. Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite, sementara kelas menengah rentan terhadap dampak krisis.

A.2. Peluang

Perekonomian Indonesia di tahun 2025 diperkirakan akan terus bertumbuh, meskipun dengan tantangan global dan domestik yang perlu diwaspadai. Pemerintah dan Bank Indonesia telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,7% hingga 5,0%. Beberapa faktor yang menjadi peluang dan tantangan akan dibahas lebih lanjut.

- **Pertumbuhan Konsumsi Domestik:**

Meskipun ada tantangan, konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

- **Ekspor:**

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

- **Peningkatan Investasi:**

Pemerintah berupaya mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui berbagai kebijakan dan program.

- **Hilirisasi:**

Optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, terutama di sektor pertanian dan pertambangan, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi.

- **Program Pemerintah:**

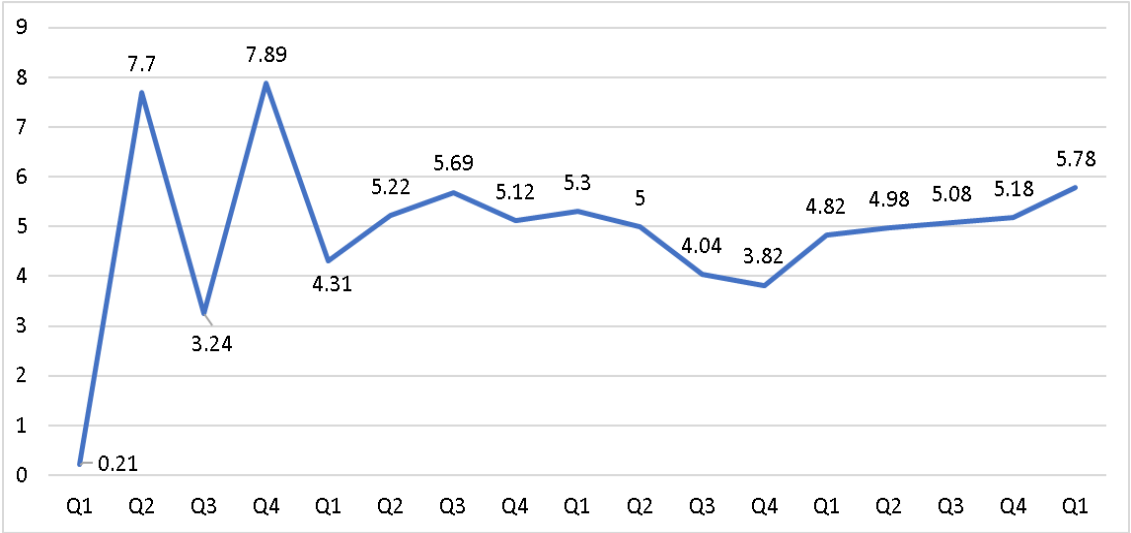
Program seperti pembangunan infrastruktur dan stimulus ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

B. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulawesi Selatan triwulan 1-2025 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 173,51 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 97,36triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 1-2025 terhadap triwulan 1-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen (y-on-y). Dari Sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,56 persen. Dari Sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,61 persen. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 1-2025 terhadap triwulan sebelumnya

mengalami kontraksi sebesar -4,12 persen (q-to-q). Dari Sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi, sebesar -26,06 persen. Sementara dari Sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi terdalam sebesar 51,38 persen.

Grafik 2.2
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (yoy)
Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Sulsel, 2025

B.1. Tantangan Ekonomi Sulsel Tahun 2025

Tantangan perekonomian Sulawesi Selatan di tahun 2025 mencakup beberapa hal, termasuk inflasi, ketidakpastian ekonomi global, dan perlunya diversifikasi ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi diperkirakan positif, tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan.

- **Inflasi:**
Inflasi, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, menjadi perhatian. Meskipun ada upaya untuk menahan inflasi melalui penurunan harga beberapa komoditas, menjaga stabilitas harga tetap menjadi tantangan.
- **Ketidakpastian Global:**
Konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi global dapat memengaruhi perekonomian Sulawesi Selatan, terutama melalui fluktuasi harga komoditas.
- **Ketergantungan pada Sektor Tertentu:**
Beberapa sektor ekonomi, seperti pertanian dan pertambangan, masih menjadi penopang utama. Penting untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan mengembangkan sektor-sektor potensial lainnya.
- **Efisiensi Anggaran:**
Efisiensi anggaran, meskipun penting untuk menjaga stabilitas fiskal, dapat berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik.
- **Diversifikasi Ekonomi:**
Sulawesi Selatan perlu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan mengembangkan sektor-sektor potensial lainnya, seperti

industri pengolahan, ekonomi biru (kelautan dan perikanan), serta perdagangan dan logistik.

B.2. Peluang

Perekonomian Sulawesi Selatan di tahun 2025 diproyeksikan akan terus tumbuh, didukung oleh beberapa sektor unggulan dan investasi baru. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,8% hingga 5,6%. Sektor pertanian dan perdagangan diperkirakan menjadi motor penggerak utama, dengan peningkatan produksi pertanian dan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas pangan. Selain itu, investasi baru melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti peternakan sapi dan kawasan industri di Takalar juga akan memberikan kontribusi signifikan.

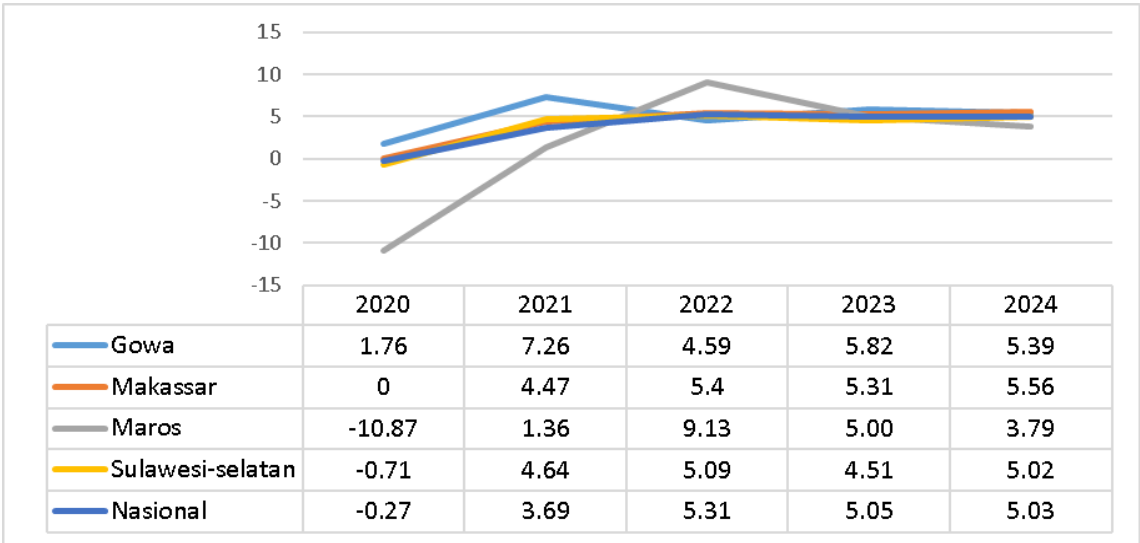
Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi:

- **Sektor Pertanian:**
Produksi pertanian yang lebih baik, didukung oleh peningkatan alokasi pupuk subsidi dan penyesuaian HPP untuk beras dan jagung, akan mendorong pertumbuhan sektor ini.
- **Sektor Perdagangan:**
Pertumbuhan sektor perdagangan akan didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
- **Investasi:**
Masuknya investasi baru melalui PSN seperti peternakan sapi dan kawasan industri Takalar akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian.
- **Inflasi Terkendali:**
Inflasi diperkirakan tetap terkendali pada level yang wajar, sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

C. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros

Setiap lapangan usaha menciptakan nilai tambah yang membentuk struktur ekonomi dari suatu daerah. Struktur ekonomi ini menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap lapangan usaha. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perekonomian Kabupaten Maros di dominasi oleh Sektor Transportasi dan pergudangan, Industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Hal ini tergambar dari kontribusi masing-masing lapangan usaha PDRB Kabupaten Maros.

Grafik 2.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2025

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% (year-on-year), sedikit melambat dibandingkan dengan 5,05% pada tahun 2023, namun tetap menunjukkan kinerja yang solid.

Beberapa faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 antara lain: Konsumsi Rumah Tangga: Meningkatnya belanja konsumen, didorong oleh kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan program sosial pemerintah. Investasi tumbuh sebesar 4,61% secara tahunan, mencatatkan angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Peningkatan belanja pemerintah, termasuk program bantuan sosial dan subsidi, turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tantangan dan Proyeksi 2025, meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, antara lain: Gejolak Global: Ketidakpastian ekonomi global, termasuk potensi kebijakan tarif dari negara mitra dagang, dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi. Stabilitas Nilai Tukar: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi perhatian, meskipun Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter yang hati-hati.

Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan optimisme, dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 4,7% hingga 5,5%. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan global, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan ketahanan dan prospek yang positif. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan stabilitas makroekonomi, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhannya pada tahun 2025.

Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 696,252 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 43 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 652,648 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari 377,208 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 396,142 triliun rupiah di tahun 2023. Hal ini menunjukan selama tahun 2024, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,02 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh

meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Sulawesi Selatan didominasi oleh 4 kategori lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 21,84%.

Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Maros pada tahun 2024 terdapat sebanyak 52 tempat. Dimana terdiri dari 21 pasar dengan bangunan permanen, 16 Kelompok pertokoan dan 14 pasar dengan bangunan semi permanen. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dikaitkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Sehingga hal tersebut yang mendorong permintaan akan barang-barang kebutuhan rumah tangga semakin meningkat juga.

Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 miliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 miliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024, Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,79 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 243.062,72 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 16.159,93 milyar dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp 226.902,79. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Dua lapangan usaha memiliki pertumbuhan di atas 5 persen. Sembilan lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif antara 3 dan 5 persen. Sedangkan, enam lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan kurang dari 3 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 5 persen antara lain: lapangan usaha Real Estate sebesar 8,18 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,09 persen. Sedangkan, enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 3 persen adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 2,12 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,29 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 2,36 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 2,73 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,81 persen, dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 2,05 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 140.197,90 milyar di tahun 2023 menjadi Rp 147.989,20 milyar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024, Kota Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,56 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor;

Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Makassar pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarnya mencapai 20,03 persen.

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Gowa mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencatatkan angka 5,39%, yang melebihi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 5,02% . Pendapatan per Kapita: Meningkat dari Rp35,52 juta pada tahun 2023 menjadi Rp37,77 juta pada tahun 2024, mencatatkan kenaikan sebesar 6,33% .

Sektor-sektor Pendorong Pertumbuhan adalah sektor pariwisata menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Gowa. Program "Beautiful Malino" dan pembangunan destinasi wisata baru seperti Sierra Sky View, Cimory Dairy Land, dan Malino Wonderland berhasil menarik investasi sebesar Rp400 miliar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) . UMKM dan Inovasi Rumah Produktif: Inovasi "Proksi Rumah Produktif" yang diluncurkan oleh Pemkab Gowa berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Program ini telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Gowa dan 167 desa/kelurahan, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gowa berhasil masuk sepuluh besar dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 yang diselenggarakan oleh Bappenas RI. Inovasi "Proksi Rumah Produktif" menjadi salah satu faktor utama yang diakui dalam penghargaan tersebut, menunjukkan komitmen Pemkab Gowa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan .

Meskipun perekonomian Kabupaten Maros menunjukkan kinerja yang positif, tantangan seperti ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, Pemkab Maros terus mendorong pengembangan sektor-sektor baru seperti pariwisata dan UMKM untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 miliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 miliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukan selama tahun 2024. Distribusi

persentase PDRB berdasarkan ADHB Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros

| No. | Sektor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 18,52 | 19,74 | 16,50 | 15,25 | 14,79 | 16.96 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 8,47 | 9,01 | 7,70 | 7,43 | 6,98 | 7.92 |
| 3 | Industri Pengolahan | 18,94 | 17,62 | 15,59 | 14,94 | 14,79 | 16.38 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.05 |
| 5 | Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0.12 |
| 6 | Konstruksi | 11,55 | 11,92 | 10,47 | 9,94 | 9,51 | 10.68 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,53 | 3,63 | 3,15 | 2,99 | 2,93 | 3.25 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 25,79 | 24,88 | 35,56 | 39,29 | 40,92 | 33.29 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,37 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0.34 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1,49 | 1,56 | 1,29 | 1,20 | 1,14 | 1.34 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,66 | 1,73 | 1,48 | 1,33 | 1,27 | 1.49 |
| 12 | Real Estate | 1,61 | 1,63 | 1,42 | 1,33 | 1,37 | 1.47 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0.03 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,74 | 4,51 | 3,66 | 3,31 | 3,37 | 3.92 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,76 | 1,74 | 1,44 | 1,34 | 1,29 | 1.51 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,86 | 0,92 | 0,76 | 0,73 | 0,72 | 0.80 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0.45 |
| PDRB | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Maros didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Maros.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu mencapai 40,92 persen (angka ini meningkat dari 39,28 persen di tahun 2023). Selanjutnya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 14,79 persen (angka ini menurun dari 15,25 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,79 persen (menurun dari 14,94 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,94 persen (menurun dari 9,94 persen di tahun 2023). Dan terakhir yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,98 persen (menurun dari 7,43 persen di tahun 2023).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Transportasi dan Pergudangan cenderung mengalami peningkatan peranan. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; dan Konstruksi adalah kategori yang cenderung mengalami penurunan peranan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan Transportasi dan Pergudangan adalah bertambahnya aktivitas pada lapangan usaha tersebut sebagai pasca pandemi Covid-19. Dibukanya kembali rute penerbangan internasional dan kemudahan persyaratan penerbangan membuat jumlah penumpang utamanya sub sektor Angkutan Udara menjadi bertambah.

C.1. Tantangan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2025

Tantangan ekonomi Kabupaten Maros pada tahun 2025 mencakup perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan yang masih ada, dan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- **Perlambatan Pertumbuhan:**
Data menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2023 ke 2024, yang perlu diatasi untuk mencapai target pembangunan yang lebih tinggi.
- **Ketimpangan Pendapatan:**
Meskipun PDRB per kapita meningkat, ketimpangan pendapatan yang masih ada mengindikasikan bahwa tidak semua masyarakat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata.
- **Peningkatan Kualitas SDM:**
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan, menjadi krusial untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan mampu bersaing, serta mendukung inovasi dalam pembangunan ekonomi.
- **Pemerataan Pembangunan:**
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dalam pembangunan, memastikan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Maros dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi.

C.2. Peluang

Peluang ekonomi Kabupaten Maros pada tahun 2025 terlihat menjanjikan, terutama dengan beberapa faktor pendukung dan inisiatif yang sedang berjalan. Kabupaten Maros memiliki potensi besar dalam sektor transportasi dan pergudangan, didukung oleh keberadaan Bandara Sultan Hasanuddin.

- **Transportasi dan Pergudangan:**
Peningkatan jumlah penumpang Bandara Sultan Hasanuddin memberikan dampak positif pada sektor transportasi dan pergudangan, yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB.

- **Ekonomi Wakaf:**
Maros masuk dalam 11 besar calon Kota Wakaf Nasional, menunjukkan potensi pengembangan wakaf sebagai instrumen ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- **Pertanian dan Perikanan:**
Sebagai daerah agraris, Maros memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan, termasuk potensi ekowisata bahari.
- **Pariwisata:**
Kabupaten Maros memiliki potensi wisata alam dan budaya yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

3.1.1.2 Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

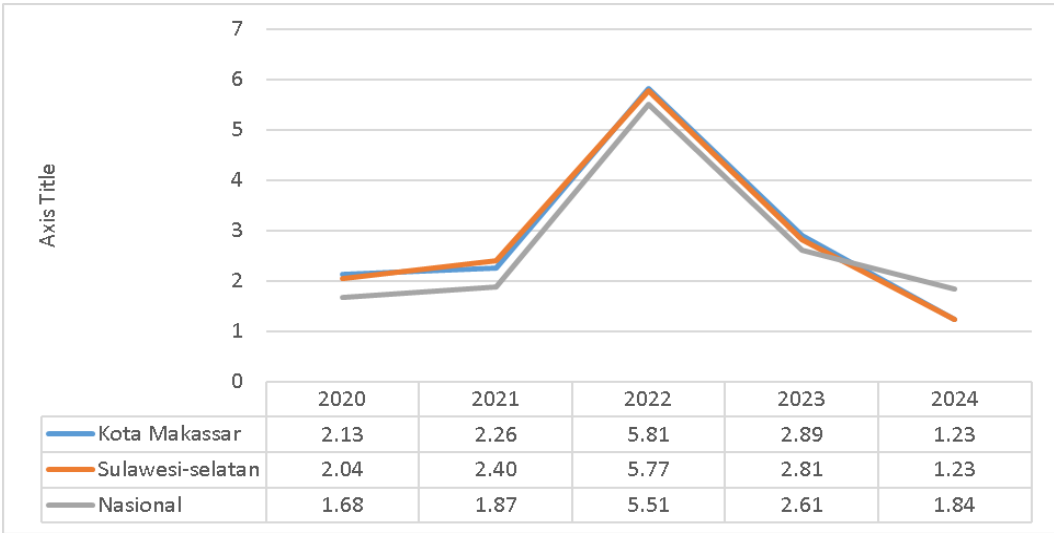
Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2024 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran $2,5\% \pm 1$. Capaian inflasi tahun 2024 tersebut tercatat sebesar 1,84% atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2023, yakni sebesar 2.61%. Rincian Inflasi 2024 adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), meningkat dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 106,80 pada Desember 2024.

Kelompok Pengeluaran yang Meningkatkan Inflasi antarlain, makanan, minuman, dan tembakau, mencatat inflasi sebesar 1,90%, dengan kontribusi terbesar berasal dari sigaret kretek mesin (0,13%) dan minyak goreng (0,11%). Emas Perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,35%. Nasi dengan Lauk memberikan andil inflasi sebesar 0,06%..

Faktor Penyebab Inflasi Rendah adalah penurunan harga pangan, harga komoditas pangan yang sebelumnya mengalami lonjakan pada 2022 dan 2023 mulai stabil, berkontribusi terhadap rendahnya inflasi. Kebijakan Pemerintah, kebijakan penurunan harga tiket pesawat selama periode liburan Natal dan Tahun Baru, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak oleh PT Pertamina, turut menekan laju inflasi.

Kebijakan Moneter Bank Indonesia: Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi 2024 mencapai 3,2%, namun realisasinya lebih rendah dari perkiraan tersebut, menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi.

Grafik 2.49
Perbandingan Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025

Perbandingan ini menunjukkan bahwa inflasi di Sulawesi Selatan relatif terkendali dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional. Keberhasilan Sulawesi Selatan dalam menjaga inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh pengendalian harga di sektor makanan, minuman, dan tembakau yang merupakan salah satu kontributor utama inflasi.

Pada tahun 2024, inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 1,23%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Makassar yang berada di angka 1,23% pada bulan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar berhasil menjaga stabilitas harga sama dengan rata-rata provinsi.

Jumlah koperasi di Kota Makassar pada tahun 2024 adalah sebanyak 1.976 unit. Berdasarkan jenisnya terdapat 8 unit KUD, 228 unit KPRI, 198 unit KOPKAR, 12 unit KOPPAS, dan 1.530 unit koperasi jenis lainnya. Jumlah koperasi aktif di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 terus bertambah setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, terdapat 1.059 unit koperasi aktif di Kota Makassar. Jumlah koperasi aktif terbanyak berada di Kecamatan Rappocini, sedangkan yang tidak memiliki koperasi aktif adalah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Salah satu cara untuk mengetahui stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat tingkat perkembangan indeks harga konsumen (laju inflasi) di daerah tersebut. Inflasi bulanan sepanjang tahun 2023 menunjukkan fluktuasi harga yang cukup signifikan terutama pada beberapa bulan tertentu. Pada tahun 2024 tercatat puncak inflasi terjadi pada bulan Desember yakni 0,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,49. Sedangkan, deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari dengan deflasi sebesar 0,25 persen serta Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,66. Sebagai ibukota provinsi, Kota Makassar memiliki fasilitas perbankan yang cukup lengkap. Hingga 2024, tercatat sejumlah 67 kantor pusat dan kantor cabang bank umum dan 15 kantor pusat dan cabang bank perkreditan rakyat di Kota Makassar.

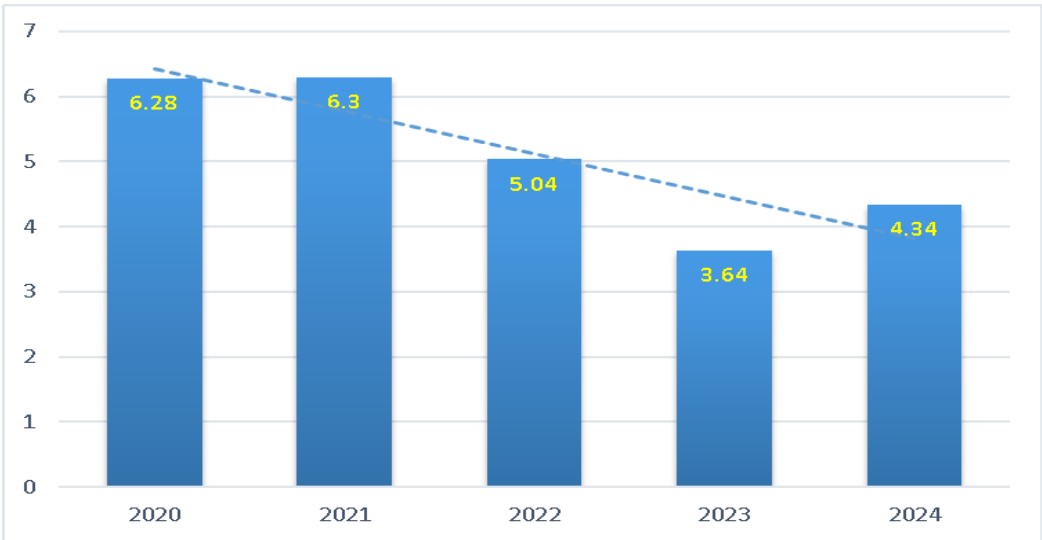
3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja. TPT mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja.

TPT merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi suatu wilayah. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, TPT menunjukkan adanya perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Namun, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini.

Perkembangan TPT Kabupaten maros menunjukkan tren yang cenderung menurun selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Maros sebesar 6,28 persen, kemudian naik pada Tahun 2021 sebesar 6,28. Kemudian tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan hingga mencapai 6,3. Namun pada tahun 2023 dengan semakin mengurangnya pandemi serta percepatan akselerasi ekonomi yang digalakkan Pemerintah Daerah, TPT Kabupaten Maros mengalami penurunan hingga mencapai 5,04 persen dan Pada Tahun 2024 dengan semakin banyaknya lapangan kerja di buka baik oleh swasta maupun oleh Pemerintah, maka TPT Kabupaten Maros dapat kembali menurun hingga mencapai 4,34 persen.

Grafik 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Maros Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros berada pada posisi ke-19 tertinggi dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan, meningkat dibandingkan pada Tahun 2024 (posisi 15 dari 24 kabupaten/Kota). Kabupaten yang memiliki TPT tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar dengan capaian TPT 9,71 persen. Sedangkan capaian TPT terendah berada di Kabupaten Enrekang yaitu sebesar 1,51 persen. TPT Kabupaten Maros tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Gambaran capaian TPT kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Pada tahun 2024 TPT menunjukkan peningkatan hingga mencapai 4,34 persen. Hal ini disebabkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Selain itu tingkat Pendidikan tenaga kerja masih berada pada level menengah kebawah sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami seseorang dalam memenuhi kebutuhan dsar yang minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan berbagai karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosilogisnya. Upaya pembeberdayaan masyarakat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial - ekonomi serta memperkuat martabatnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dilaksanakan dengan menggunakan data BPS dan Dinas Sosial yang terdpat dalam aplikasi DTKS.

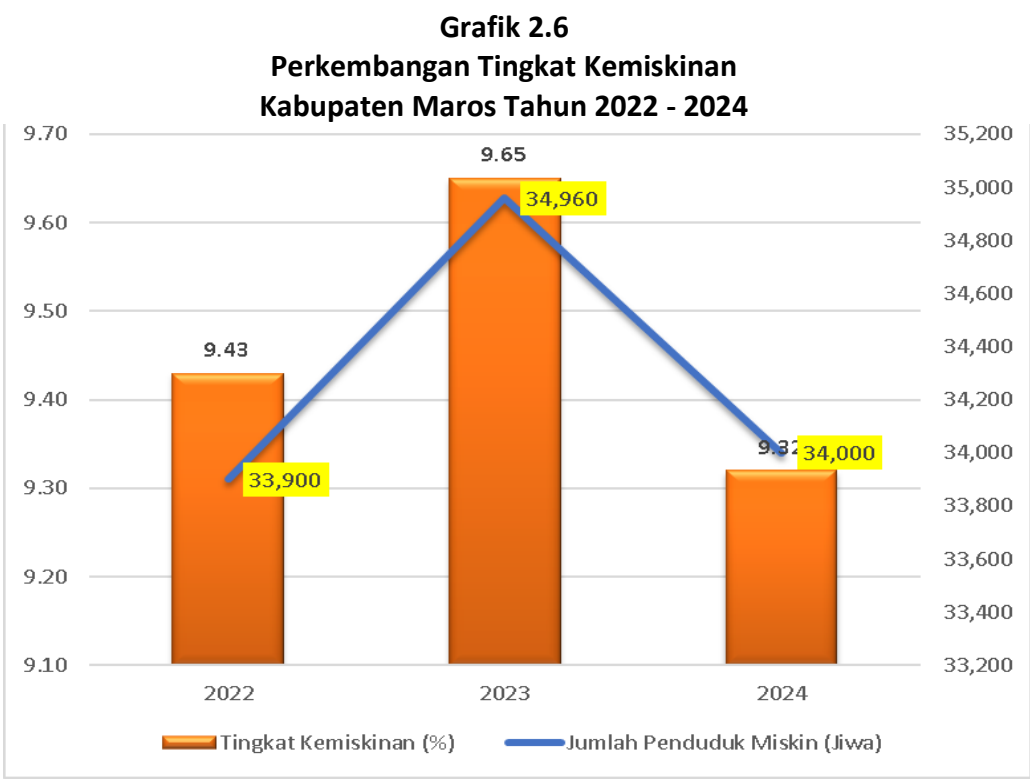
Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 9,89 persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2021 hingga mencapai 9,74 persen. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 9,32 persen. Data perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | Tingkat Kemiskinan (Persen) |
|----|-------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2020 | 391.774 | 34.620 | 9,74 |
| 2 | 2021 | 396.924 | 34.110 | 9,57 |
| 3 | 2022 | 403.774 | 33.900 | 9,43 |
| 4 | 2023 | 410.699 | 34.960 | 9,65 |
| 5 | 2024 | 423.990 | 34.000 | 9,32 |

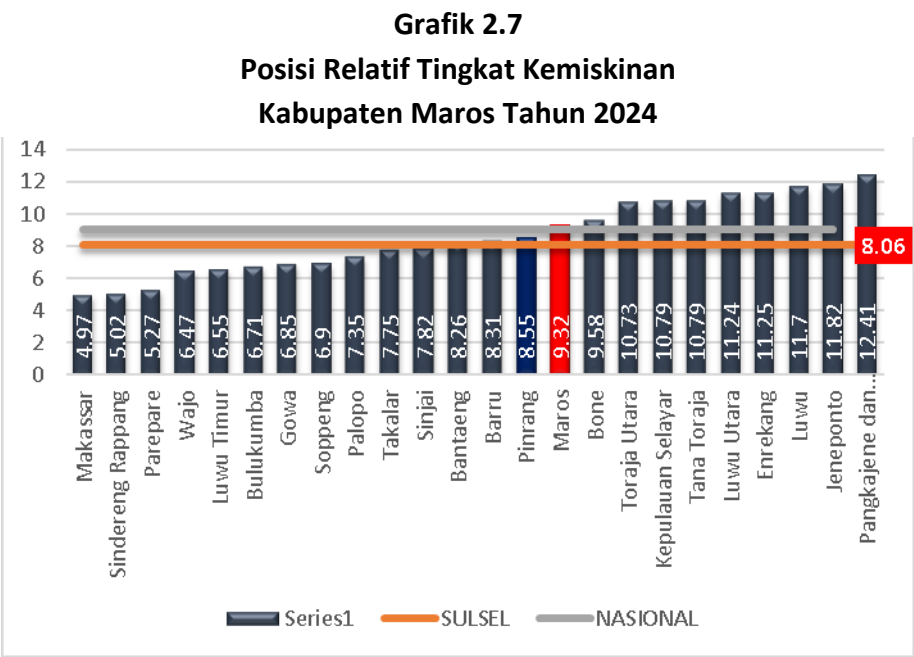
Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

Seperti yang terlihat pada Tabel diatas, terdapat penurunan angka tingkat kemiskinan pada Tahun 2024. Penurunan tahun 2024 disebabkan kondisi cuaca cenderung normal, produksi pertanian kembali meningkat. Program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta beberapa program Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain program pemberian bantuan bibit ikan dan bibit pertanian, pembagian alat tangkap dan alsintan, penyediaan asuransi bagi petani, pemberian baju seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin, pembangunan jalan produksi, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan pemukiman kawasan kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan.



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di urutan 15 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan,. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki capaian tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 12,41 persen. Sedangkan Kota Makassar memiliki capaian tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 4,97 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, terlihat bahwa hampir seluruh Kabupaten/Kota serta Propinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan tingkat kemiskinan.



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

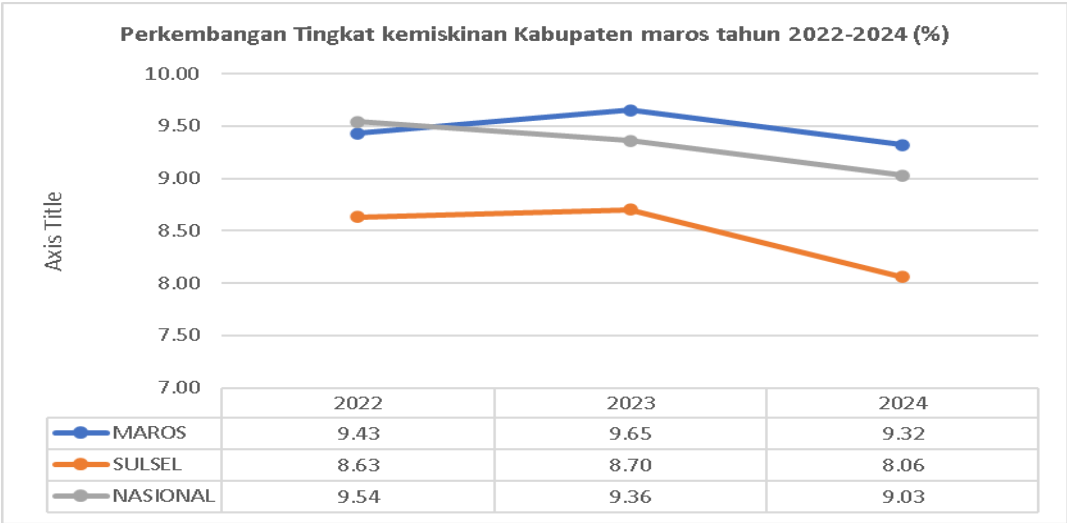
Tabel 2.3
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

| No | Kabupaten/Kota | Tingkat Kemiskinan (%) | | | | |
|----|--------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kepulauan Selayar | 12,48 | 12,45 | 12.24 | 12,27 | 10,79 |
| 2 | Bulukumba | 7,10 | 7,43 | 7.39 | 7,22 | 6,71 |
| 3 | Bantaeng | 8,95 | 9,41 | 9.07 | 9,18 | 8,26 |
| 4 | Jeneponto | 14,58 | 14,28 | 13.73 | 13,06 | 11,82 |
| 5 | Takalar | 8,44 | 8,25 | 8.25 | 8,29 | 7,75 |
| 6 | Gowa | 7,38 | 7,54 | 7.36 | 7,42 | 6,85 |
| 7 | Sinjai | 9,00 | 8,84 | 8.80 | 8,55 | 7,82 |
| 8 | Maros | 9,74 | 9,57 | 9.43 | 9,65 | 9,32 |
| 9 | Pangkajene dan Kepulauan | 13,96 | 14,28 | 13.92 | 13,4 | 12,41 |
| 10 | Barru | 8,26 | 8,68 | 8.40 | 8,46 | 8,31 |
| 11 | Bone | 10,68 | 10,52 | 10.58 | 10,53 | 9,58 |
| 12 | Soppeng | 7,59 | 7,53 | 7.49 | 7,48 | 6,9 |
| 13 | Wajo | 6,95 | 6,46 | 6.57 | 6,73 | 6,47 |
| 14 | Sindereng Rappang | 5,05 | 5,04 | 5.11 | 5,14 | 5,02 |
| 15 | Pinrang | 8,86 | 8,81 | 8.79 | 8,9 | 8,55 |
| 16 | Enrekang | 12,17 | 12,47 | 12.39 | 12,69 | 11,25 |
| 17 | Luwu | 12,65 | 12,53 | 12.49 | 12,71 | 11,7 |
| 18 | Tana Toraja | 12,10 | 12,27 | 12.18 | 12,48 | 10,79 |
| 19 | Luwu Utara | 13,41 | 13,59 | 13.22 | 12,66 | 11,24 |
| 20 | Luwu Timur | 6,85 | 6,94 | 6.81 | 6,93 | 6,55 |
| 21 | Toraja Utara | 12,01 | 11,99 | 11.65 | 12,12 | 10,73 |
| 22 | Makassar | 4,54 | 4,82 | 4.58 | 5,07 | 4,97 |
| 23 | Parepare | 5,44 | 5,40 | 5.41 | 5,34 | 5,27 |
| 24 | Palopo | 7,85 | 8,14 | 7.78 | 7,69 | 7,35 |

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025

Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan (9,32 %), dan capaian Nasional (9,03 %). Pada Tahun 2024, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros lebih tinggi dibandingkan Tingkat Kemiskinan Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Grafik 2.8
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

3.1.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. sebelumnya yang sebesar 74,39. persen per tahun. Peningkatan ini termasuk dalam kategori tinggi. Peningkatan terjadi di seluruh dimensi pembentuk IPM seperti umur panjang dan hidup sehat: harapan hidup saat lahir meningkat. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah meningkat. Standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita meningkat. IPM Indonesia tahun 2024 berada di peringkat ke-112 dunia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selata tahun 2024 mencapai 75,18, meningkat 0,58 poin (0,78 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (74,60). Selama 2020-2024, IPM Sulawesi Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,71 persen per tahun. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pendidikan mengalami perlambatan sedangkan percepatan pertumbuhan terjadi pada dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 di Sulawesi Selatan memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,83 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,54 tahun menjadi 13,55 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,10 tahun, dari 8,76 tahun menjadi 8,86 tahun pada 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil

per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 434 ribu rupiah (3,67 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, jumlah kabupaten/kota pada masing-masing status pembangunan dari sedang hingga sangat tinggi masih sama dengan tahun sebelumnya. Seluruh kota madya memiliki status pembangunan manusia “sangat tinggi” (IPM≥80). Selanjutnya, terdapat 20 kabupaten lainnya dengan status pembangunan tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Sementara itu, hanya Jeneponto yang status pembangunan manusianya masih berada pada level sedang dengan nilai indeks 69,45. Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan IPM. Rata-rata peningkatan IPM 24 Kabupaten/Kota sebesar 0,64 poin. 4 kabupaten dengan peningkatan paling tinggi adalah Tana Toraja, Bantaeng, Kepulauan Selayar dan Soppeng dengan peningkatan sebesar 0,82 poin sampai dengan 0,93 poin. Sedangkan Kabupaten dengan peningkatan paling rendah adalah Kota Makassar sebesar 0,38 poin.

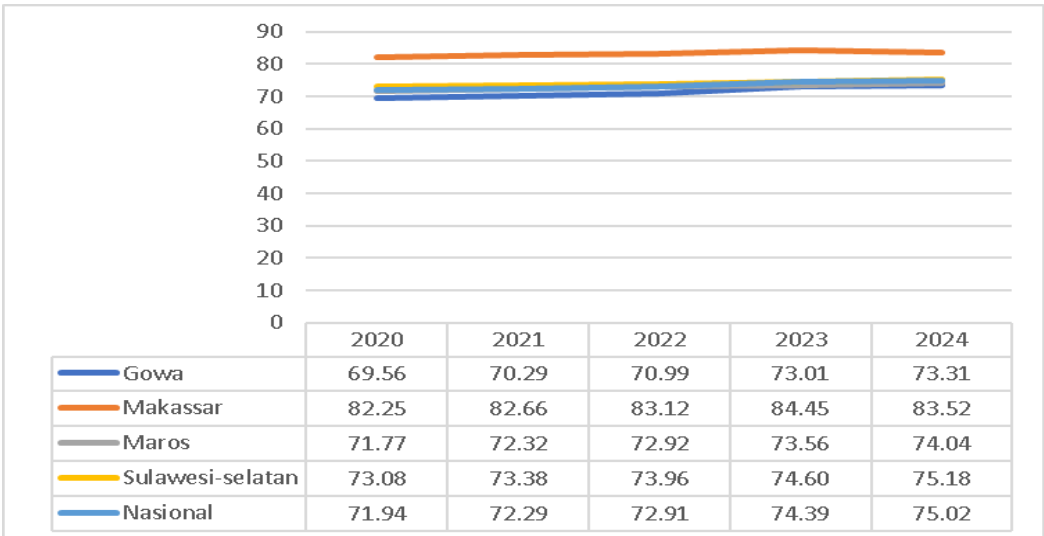
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 73,56% dan tahun 2024 sebesar 74,04 dengan perubahan sebesar 0,48%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar pada tahun 2024 mencapai 83,52, meningkat dari 83,12 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, IPM Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mencapai 75,18, juga mengalami peningkatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 mencapai 73,71. IPM ini menunjukkan sejauh mana masyarakat Gowa dapat mengakses hasil pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Gowa berada di kategori tinggi menurut standar UNDP.

Perkembangan IPM Nasinal, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.4
Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

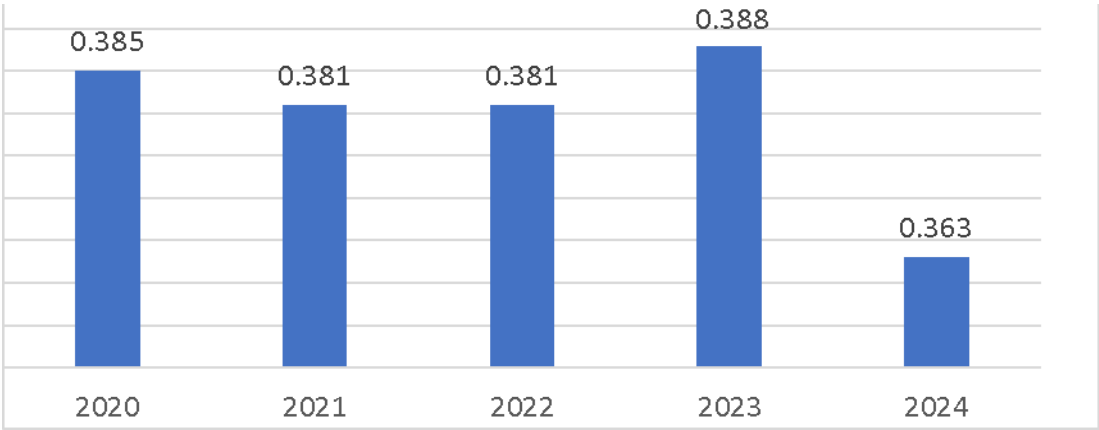
3.1.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur Tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur Tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Perhitungan Indeks Gini di Kabupaten Maros baru dilakukan oleh BPS pada tahun 2014.

Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Maros secara umum masih tinggi dan menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Maros sebesar 0,385. Capaian Indeks Gini Kabupaten Maros yang masih tinggi menunjukkan bahwa masih tinggi kesenjangan antara pengeluaran penduduk antara 40 persen lapisan bawah, dan menengah. Indeks Gini turun tipis karena tidak ada perbaikan pengeluaran kelompok masyarakat miskin, bahkan pengeluaran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalami penurunan. Masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih menjadi buruh di perusahaan daripada menjadi petani, dengan penghasilan yang tidak lebih baik. Hal ini linear dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Maros, dimana walaupun Tingkat kemiskinan terus menurun namun, kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin meningkat.

Data terakhir yang tersedia adalah untuk tahun2024, yang tercatat sebesar 0,363. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2023 yang sebesar 0,388. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran penduduk di Kabupaten Maros.

Grafik 2.47
Indeks Gini Kab. Maros Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

3.2 TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.2.1 Aspek Eksternal

Ekonomi Indonesia di awal 2025 berhadapan dengan tantangan berupa deflasi, tekanan pada rupiah, dan pasar saham yang tertekan, namun pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan melalui berbagai stimulus dan kebijakan. Proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi tetap positif

meskipun terdapat risiko perlambatan, dengan penekanan pada penguatan daya beli masyarakat, investasi, dan ekspor sebagai pilar utama.

Awal tahun 2025 memperlihatkan beberapa indikator ekonomi Indonesia yang menurun, menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya deflasi beruntun pada Januari dan Februari 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan deflasi bulanan masing-masing sebesar 0,76% dan 0,48%. Deflasi tahunan juga terlihat sebesar 0,09%, suatu fenomena yang terakhir kali terjadi 25 tahun yang lalu di tahun 2000. Selain itu, nilai tukar rupiah mengalami tekanan dan pasar saham mencatat penurunan yang tajam, sementara penerimaan APBN memperlihatkan anomali, yang semuanya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan antisipatif.

Untuk menghadapi tantangan eksternal dan memastikan perekonomian tetap tumbuh, diperlukan kebijakan yang sistematis dan holistik. Oleh karena itu, sangat penting melakukan penguatan perekonomian domestik, yaitu (1) mendorong konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli, serta memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, (2) menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi domestik, (3) memperkuat stabilitas makroekonomi: menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan (4) meningkatkan daya saing industri: hilirisasi industri dan mendorong inovasi di sektor manufaktur. Kolaborasi erat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi katalis utama mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif 2025.

Beberapa tantangan perekonomian nasional maupun regional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau
6. Perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi perekonomian daerah, terutama jika daerah tersebut bergantung pada sektor pertanian atau pariwisata.
7. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah kabupaten/kota
8. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi perekonomian daerah, terutama jika daerah tersebut tidak siap untuk mengadaptasi teknologi baru, dan lain-lain

3.2.2 Aspek Internal

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Gambaran struktur perekonomian Kabupaten Maros masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Kontruksi; Pertambangan dan

Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Maros. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros tahun 2020-2024 menunjukkan pelambatan, puncaknya pada tahun 2020 akibat adanya COVID-19, PDRB Kabupaten Maros mengalami kontraksi yang sangat dalam hingga mencapai angka negatif. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros membaik hingga mencapai 1,36 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros tahun 2022 bertumbuh sangat signifikan yakni sebesar 9,13 persen, angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros kembali melambat dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,00 persen dan di tahun 2024 kembali mengalami pelambatan menjadi 3,79 persen.

Beberapa tantangan perekonomian Kabupaten Maros yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- **Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi:**
Meskipun ada potensi peningkatan di tahun 2025, tantangan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetap ada.
- **Ketimpangan Pendapatan:**
Meskipun Indeks Gini menunjukkan ketimpangan rendah, upaya untuk pemerataan pendapatan antar wilayah (desa dan kota) dan antar kelompok masyarakat tetap menjadi tantangan.
- **Kualitas Sumber Daya Manusia:**
Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan beriman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah tantangan yang perlu terus diupayakan.
- **Inovasi dan Daya Saing:**
Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan meningkatkan daya saing daerah agar Maros lebih dihormati di tingkat nasional merupakan tantangan yang memerlukan strategi yang tepat.
- **Pemerataan Pembangunan:**
Memastikan pembangunan yang merata antara desa dan kota, serta antar kelompok masyarakat, adalah tantangan yang perlu ditangani secara serius.
- **Stabilitas Keamanan dan Sosial:**
Menjaga stabilitas keamanan dan sosial untuk mempercepat pembangunan juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun 2025 mengambil tema: **Percepatan Pembangunan Wilayah yang Berkualitas Untuk Mewujudkan Pemerataan Wilayah**. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Potensi Ekonomi Wilayah;
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat Secara Inklusif;
3. Peningkatan Ketersediaan dan Kebermanfaatan Infrastruktur Dasar Wilayah;
4. Peningkatan Ketahanan Ekologi, Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan;

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak pada Pelayanan dan Berbasis Iptek.

Arah kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan;
2. Peningkatan investasi pada sektor unggulan daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja;
3. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;
4. Peningkaan nilai tambha, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi;
5. Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro;
6. Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital;
7. Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditi yang berpeluang ekspor;
8. Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan;
9. Pemanfaatan keberadaan potensi wolrd heritage pada bentangan kawasan karst Maros srbagai tujuan wisata internasional;
10. Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama;
11. Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional koperasi dan UMKM;
12. Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan;
13. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital;
14. Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif.

Adapun perubahan Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 3.1
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Maros Tahun 2025

| No | Indikator | Realisasi 2024 | Tahun 2025 | perubahan 2025 |
|----|----------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,79 | 6,24 | 5,08 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,34 | 3,5 | 4,13 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan (%) | 9,32 | 7,14 | 9,08 |
| 4 | PDRB Perkapita (Rp Juta) | 69,21 | 72,22 | 72,22 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | 74,04 | 71,1 | 74,62 |
| 6 | Gini Ratio | 0,349 | 0,368 | 0,362 |
| 7 | Intensitas Emisi GRK (%) | - | 13,35 | 13,53 |

Sumber : Bapperida, 2025

3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah, secara otomatis membuat pelaksanaan APBD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib yang sifatnya mandatory, pencapaian prioritas pembangunan, dan pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati. Sedangkan pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan

3.3.1.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Melihat dinamika dan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Maret 2025, maka perubahan kebijakan pendapatan APBD diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA.2025 mempertimbangkan:
 - Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
2. Penyesuaian Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Penyesuaian terhadap program prioritas Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024

Pendapatan Kabupaten Maros pada RKPd Pokok Tahun 2025 ditargetkan senilai **Rp 1.726.036.847.248,00**. Pos pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp -116.209.258.326,00** menjadi **Rp 1.609.827.588.922,00** pada Perubahan RKPd Tahun 2025.

3.3.1.1.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada RKPD Pokok 2025 sebesar **Rp 349.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi **Rp 385.510.687.604,00** pada Perubahan RKPD Tahun 2025, dengan rincian Pendapatan Pajak Daerah senilai **Rp 238.855.000.000,00**; Retribusi Daerah senilai **Rp 89.278.845.831,00**; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan senilai Rp 11.250.577.808,00 dan Lain-lain PAD yang sah senilai **Rp 46.126.261.965,00**.

3.3.1.1.2. Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang besumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Penerimaan Pendapatan Transfer pada RKPD Pokok 2025 ditargetkan sebesar **Rp1.375.036.847.248,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp 150.719.945.930,00** menjadi **Rp1.224.316.901.318,00** pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Adapun rinciannya adalah:

- a. **Transfer Pemerintah Pusat**, pada RKPD Pokok Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp 1.244.336.847.248,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan menjadi **Rp 1.145.785.596.000,00** pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- b. **Transfer Antar Daerah**, Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Provinsi) pada RKPD Pokok Tahun 2025 ditargetkan senilai **Rp 130.700.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan menjadi **Rp 78.531.305.318,00** pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

3.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan tidak ada penerimaan atau nihil.

3.3.1 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2024 serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijakan belanja perubahan APBD Kabupaten Maros diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial serta ketentraman dan ketertiban umum.
3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah senantiasa memberikan perhatian yang maksimal terhadap peningkatan investasi daerah.

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Anggaran belanja Kabupaten Maros RKPD Pokok Tahun 2025 senilai **Rp1.726.036.847.248,00** diproyeksikan mengalami penurunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi **Rp 1.653.150.439.239,00**. **Hal ini tentu sejalan dengan semangat efisiensi berdasarkan** Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3.3.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada RKPD Pokok Tahun 2025 ditargetkan sebesar senilai **Rp 1.147.895.543.248,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi **Rp 1.173.890.439.195,00** pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

3.3.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada RKPD Pokok Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp 405.598.403.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan menjadi **Rp 306.771.983.844,00** pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

3.3.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada RKPD Pokok Tahun 2025 ditargetkan senilai **Rp 5.900.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi **Rp 7.821.720.000,00** pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

3.3.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer (Belanja Bantuan Keuangan) pada RKPD Pokok Tahun 2025 ditargetkan senilai **Rp 166.642.901.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan menjadi **Rp 164.666.296.200,00**.

3.3.2 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan, Alokasi penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp 44.322.850.315,00**. Perubahan nilai ini berasal dari Alokasi SILPA Tahun sebelumnya, dimana pos ini diperuntukkan untuk membayar hutang tahun sebelumnya (DPAL).

3.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, Alokasi pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp 1.000.000.000,00**.

Gambaran lebih rinci terkait perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut.

TABEL 3.2
Target Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2025

| URAIAN | RKPD POKOK TAHUN 2025 | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 | BERTAMBAH/ BERKURANG |
|------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | 6=5-4 |
| 1 | 4 | 5 | 6=5-4 |
| PENDAPATAN | 1.726.036.847.248,00 | 1.609.827.588.922 | -116.209.258.326,00 |

| URAIAN | RKPD POKOK TAHUN 2025 | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 | BERTAMBAH/ BERKURANG |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6=5-4 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 349.000.000.000,00 | 385.510.687.604 | 36.510.687.604,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 197.500.000.000,00 | 238.855.000.000 | 41.355.000.000,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 25.500.000.000,00 | 89.278.845.831 | 63.778.845.831,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.000.000.000,00 | 11.250.577.808,00 | 250.577.808,00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 115.000.000.000,00 | 46.126.263.965 | -68.873.736.035,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 1.375.036.847.248,00 | 1.224.316.901.318 | -150.719.945.930,00 |
| TRANSFER PUSAT | 1.244.336.847.248,00 | 1.145.785.596.000 | -98.551.251.248,00 |
| DANA PERIMBANGAN | 1.147.967.930.982,00 | 1.066.968.856.000 | -80.999.074.982,00 |
| TRANSFER UMUM | 795.248.905.527,00 | 821.007.816.000,00 | 25.758.910.473,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 19.870.836.527,00 | 22.022.645.000 | 2.151.808.473,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 775.378.069.000,00 | 798.985.171.000 | 23.607.102.000,00 |
| DANA TRANSFER KHUSUS | 352.719.025.455,00 | 245.961.040.000 | -106.757.985.455,00 |
| DANA INSENTIF DAERAH | 18.000.000.000,00 | 0 | -18.000.000.000,00 |
| DANA DESA | 78.368.916.266,00 | 78.816.740.000,00 | 447.823.734,00 |
| TRANSFER ANTAR DAERAH | 130.700.000.000,00 | 78.531.305.318 | -52.168.694.682,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 121.200.000.000,00 | 73.531.305.318 | -47.668.694.682,00 |
| Bantuan Keuangan | 9.500.000.000,00 | 5.000.000.000 | -4.500.000.000,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 2.000.000.000,00 | 0 | -2.000.000.000,00 |
| Hibah Dari Pemerintah Lainnya | 2.000.000.000,00 | 0 | -2.000.000.000,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | 0 |
| BELANJA | 1.726.036.847.248,00 | 1.653.150.439.239 | -83.222.444.537,00 |
| BELANJA OPERASI | 1.147.895.543.248,00 | 1.173.890.439.195 | 19.795.532.120,00 |
| Belanja Pegawai | 717.380.502.000,00 | 742.398.670.491 | 18.633.869.481,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 392.300.324.455,00 | 390.890.450.457 | -506.741.005,00 |
| Belanja Hibah | 36.614.716.793,00 | 39.531.318.247 | 2.198.403.644,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 1.600.000.000,00 | 1.070.000.000 | -530.000.000,00 |
| BELANJA MODAL | 405.598.403.000,00 | 306.771.983.844 | -102.963.091.857,00 |
| BELANJA MODAL | 405.598.403.000,00 | 306.771.983.844 | -102.963.091.857,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.900.000.000,00 | 7.821.720.000 | 1.921.720.000,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 5.900.000.000,00 | 7.821.720.000 | 1.921.720.000,00 |
| BELANJA TRANSFER | 166.642.901.000,00 | 164.666.296.200 | -1.976.604.800,00 |
| Belanja Bagi Hasil | 0 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 166.642.901.000,00 | 160.666.296.200 | -5.976.604.800,00 |
| PEMBIAYAAN | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 2.000.000.000,00 | 44.322.850.315 | 42.322.850.315,00 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 2.000.000.000,00 | 44.322.850.315 | 42.322.850.315,00 |

| URAIAN | RKPD POKOK TAHUN 2025 | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 | BERTAMBAH/ BERKURANG |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | 6=5-4 |
| 1 | 4 | 5 | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000 | - |
| Penyertaan Modal Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000 | - |
| | | | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | 44.322.850.315 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | 1.000.000.000 | |
| Pembiayaan Netto | 1.000.000.000,00 | 43.322.850.315 | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | | | |

Sumber : Bapperida Kabupaten Maros Tahun 2025

BAB IV

**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2025**

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah mendasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam rencana pembangunan menengah daerah, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, Sesuai dengan Pentahapan Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maros Periode 2025 – 2029, maka Fokus utama pada tahap I Pembangunan di tahun 2025 **adalah menyusun dan menyelaraskan kembali dokumen perencanaan daerah, terutama untuk memastikan sinkronisasi antara RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten , Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penerjemahan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat serta Penataan dasar kelembagaan dan regulasi juga menjadi prioritas, dengan tujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan, menguatkan akuntabilitas birokrasi, serta memperkuat instrumen perencanaan dan penganggaran berbasis. Dimana pada tahap in mencakup pemetaan isu-isu strategis daerah, perbaikan sistem pelayanan publik, penguatan database pembangunan, serta revitalisasi peran kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program prioritas.**

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi dan dinyatakan secara eksplisit dan ukuran waktu pencapaiannya. Dengan ditetapkannya suatu tujuan, visi dan misi sudah semakin berwujud. Dalam konteks pengukuran kinerja, tujuan merupakan pedoman perumusan kriteria kinerja. Dalam merumuskan indikator atau ukuran kinerja tidak dapat lepas dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan tujuan organisasi yang dinyatakan secara lebih eksplisit, selain diikuti ukuran waktu juga dijelaskan cara mengukur ketercapaiannya. Oleh karena sifatnya yang lebih berwujud, maka sasaran ini lebih mudah diukur daripada tujuan. Sasaran pada umumnya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dengan jangka waktu pencapaian yaitu satu tahun. Sasaran sangat penting fungsinya untuk menentukan ukuran kinerja.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Pada Tahun 2025 dirumuskan dan disusun dengan memperhatikan Kebijakan – kebijakan baik pada tingkatan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, maupun yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 dan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029.

Serta menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Program Asta Cita presiden dan wakil presiden terpilih sesuai dengan Surat Edaran Mendagri nomor 900.1.1/640/SJ tahun 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Tabel 4.1
Visi, pokok Visi, dan Penjelasan Visi

| VISI | POKOK – POKOK VISI | PENJELASAN |
|---|--------------------|---|
| “MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU DAN BERKELANJUTAN” | SEJAHTERA | Kondisi masyarakat dengan kualitas hidup tinggi, terpenuhinya kebutuhan dasar secara layak, serta akses setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial yang inklusif. Kesejahteraan mencakup pemenuhan hak perempuan, anak, pemuda, masyarakat adat, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. |
| | RELIGIUS | Kondisi kehidupan masyarakat yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral, etika, dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Religiusitas tidak hanya dimaknai secara seremonial, tetapi sebagai kekuatan pembentuk karakter dan ketahanan sosial yang mendorong terciptanya masyarakat yang toleran, saling menghargai, dan hidup dalam harmoni. |
| | MAJU | Kondisi Kabupaten Maros yang mengalami perkembangan yang pesat dan berkelanjutan pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang tinggi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi serta transformasi pemerintahan yang berintegritas, adaptif, berbasis smart government, serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan pelayanan publik. |

| VISI | POKOK – POKOK VISI | PENJELASAN |
|------|--------------------|---|
| | BERKELANJUTAN | Mencerminkan pembangunan Kabupaten Maros yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara merata, tetapi juga memastikan pemerataan akses pembangunan antar wilayah, penguatan konektivitas infrastruktur, menjamin kelestarian lingkungan dan ketahanan wilayah, serta peningkatan daya saing daerah yang responsif terhadap dinamika perubahan dan tantangan jangka panjang, sehingga pembangunan dapat terus berlangsung secara konsisten dan bertanggung jawab antar generasi. |

Guna Menyatukan tindakan yang nyata bagi seluruh stakeholders pembangunan Daerah dan seluruh komponen Penyelenggara Pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskanlah 6 (enam) Misi beserta penjelasannya, yaitu:

Tabel 4.2
Misi dan penjelasan Misi

| NO | MISI | PENJELASAN |
|----|--|---|
| 1 | Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif | Upaya untuk mewujudkan masyarakat Maros yang sehat, cerdas, dan produktif (utamanya pada bidang jasa, Pertanian, Teknologi, Manufaktur, ekonomi kreatif) melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, keterampilan kerja, dan perlindungan jaminan sosial yang inklusif serta berkeadilan, Dengan memastikan bahwa setiap warga termasuk perempuan, anak, pemuda, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar dan terlindungi dalam menjalani kehidupan yang layak. |
| 2 | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi | Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas daerah secara berkelanjutan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, mendorong sektor-sektor unggulan |

| NO | MISI | PENJELASAN |
|----|--|--|
| | | daerah, dan memperkuat kapasitas pelaku ekonomi lokal. |
| 3 | Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government | Upaya yang menitikberatkan pada transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, berbasis teknologi informasi dan menghasilkan pelayanan publik yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip smart government yang diarahkan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan dan produktivitas daerah secara berkelanjutan. |
| 4 | Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah Guna Memacu Akselerasi Pembangunan | Upaya pada penciptaan kondisi keamanan yang stabil dan lingkungan kondusif guna mendukung kualitas hidup masyarakat yang tinggi. Dengan menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan akses aman dan setara terhadap layanan dasar. Keamanan yang terjaga menjadi prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. |
| 5 | Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan | Upaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai agama sebagai pijakan moral, etika, dan spiritual yang mendasar dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Religiusitas diimplementasikan secara substansial sebagai sumber karakter dan ketahanan sosial, guna membangun masyarakat inklusif yang menjunjung toleransi, penghargaan antar sesama, serta hidup rukun dalam harmoni. |
| 6 | Mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang | Upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan wilayah melalui penyediaan infrastruktur, penguatan konektivitas, dan akses yang merata antar wilayah/kawasan secara berkualitas, terintegrasi, dan adaptif, |

| NO | MISI | PENJELASAN |
|----|--|---|
| | berkualitas, terintegrasi, dan adaptif | guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara inklusif. yang dilaksanakan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan berketahanan bencana. |
| 7 | Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah | Upaya yang menekankan pada kesinambungan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah melalui Pendekatan yang adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan jangka panjang sehingga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang konsisten, berkelanjutan, dan bertanggung jawab lintas generasi |

Perumusan pernyataan tujuan dilakukan pada setiap Misi sebagai jawaban terhadap isu – isu strategis Daerah dan permasalahan pembangunan Daerah yang sedang dan akan dihadapi dengan memperhatikan dan melihat kesesuaian terhadap Program – program Dedikasi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Berdasarkan Penjelasan tersebut maka Tujuan setiap Misi dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif
 - Tujuan 1 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.
 - ❖ Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Kesehatan
 - ❖ Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pendidikan
 - ❖ Sasaran 3 : Meningkatnya Indeks Pengeluaran masyarakat
 - Tujuan 2 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
 - ❖ Sasaran 4 : Menurunnya Angka Prevalensi Gizi Buruk atau Stunting
 - Tujuan 3 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
 - ❖ Sasaran 5 : Meningkatnya persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan Literasi (membaca, menulis, literasi digital)
 - Tujuan 4 : Meningkatnya Tingkat Gemar Membaca
 - ❖ Sasaran 6 : Meningkatnya persentase lulusan pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus
 - Tujuan 5 : Menurunnya Nilai Indeks Ketimpangan Gender
 - ❖ Sasaran 7 : Meningkatnya Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
 - ❖ Sasaran 8 : Menurunnya indeks ketimpangan gender.
 - Tujuan 6 : Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Pemuda
 - ❖ Sasaran 9 : Meningkatnya persentase partisipasi aktif pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan

- ❖ Sasaran 10 : Meningkatkan Persentase pemuda yang menjadi wirausahawan baru
 - Tujuan 7 : Meningkatkan Nilai Indeks Perlindungan Anak
 - ❖ Sasaran 11 : Meningkatkan Indeks Pemenuhan hak anak
 - Tujuan 8 : Meningkatkan Indeks kepesertaan jaminan sosial masyarakat
 - ❖ Sasaran 12 : Meningkatkan persentase cakupan masyarakat yang menjadi peserta aktif jaminan kesehatan
 - ❖ Sasaran 13 : Meningkatkan persentase cakupan pekerja yang menjadi peserta aktif jaminan ketenagakerjaan
2. Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi
- Tujuan 9 : Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah
 - ❖ Sasaran 14 : Meningkatkan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah
 - ❖ Sasaran 15 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah
 - ❖ Sasaran 16 : Meningkatkan persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah
 - ❖ Sasaran 17: Meningkatkan persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB daerah
 - ❖ Sasaran 18 : Meningkatkan persentase kontribusi real estate terhadap PDRB daerah
 - ❖ Sasaran 19 : Terkendalinya laju inflasi daerah
 - ❖ Sasaran 20 : Menurunnya persentase masyarakat miskin
 - ❖ Sasaran 21 : Menurunnya rasio gini
 - ❖ Sasaran 22 : Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka
 - ❖ Sasaran 23 : Meningkatkan persentase pendapatan per kapita
3. Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government
- Tujuan 10 : Meningkatkan Nilai indeks Reformasi birokrasi Kabupaten
 - ❖ Sasaran 24 : Meningkatkan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis digital
 - ❖ Sasaran 25 : Meningkatkan nilai indeks sistem merit
 - ❖ Sasaran 26 : Meningkatkan nilai indeks inovasi instansi pemerintah
 - ❖ Sasaran 27 : Meningkatkan nilai indeks pelayanan public
 - ❖ Sasaran 28 : Meningkatkan nilai indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan
4. Misi 4 : Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah Guna Memacu Akselerasi Pembangunan
- Tujuan 11 : Meningkatkan nilai indeks Stabilitas Keamanan Daerah
 - ❖ Sasaran 29 : Menurunnya persentase Angka Kriminalitas dan Tindak Kekerasan (pencurian, penganiayaan, narkoba, dll.)
 - ❖ Sasaran 30 : Menurunnya persentase Gangguan Ketertiban Umum (keributan, tawuran, demonstrasi anarkis, dan gangguan sosial lainnya)
5. Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan
- Tujuan 12 : Meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Masyarakat.
 - ❖ Sasaran 31 : Meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Keagamaan

- ❖ Sasaran 32 : Meningkatnya nilai indeks kerukunan umat beragama
- ❖ Sasaran 33 : Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan
- 6. Misi 6 : Mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif.
 - Tujuan 13 : Meningkatnya Nilai Indeks Layanan Infrastruktur.
 - ❖ Sasaran 34 : Meningkatnya proporsi jalan kondisi mantap
 - ❖ Sasaran 35 : Meningkatnya persentase akses air bersih layak rumah tangga
 - ❖ Sasaran 36 : Meningkatnya persentase cakupan wilayah blankspot oleh jaringan internet 4G atau lebih
 - Tujuan 14 : Meningkatnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - ❖ Sasaran 37 : Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana
 - ❖ Sasaran 38 : Menurunnya nilai intensitas emisi gas rumah kaca
- 7. Misi 7 : Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah
 - Tujuan 15 : Meningkatnya Nilai Indeks Daya Saing Daerah.
 - ❖ Sasaran 39 : Meningkatnya persentase nilai realisasi investasi daerah
 - ❖ Sasaran 40 : Meningkatnya persentase kawasan produktif yang terkoneksi dengan sistem transportasi lokal.
 - ❖ Sasaran 41 : Meningkatnya Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital dalam operasional bisnis (produksi, promosi, layanan pelanggan).
 - ❖ Sasaran 42 : Meningkatnya proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB

Tabel 4.3
Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Dalam RPJMD 2025 - 2029

| NO | MISI | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET TAHUN RKPD POKOK 2025 | TARGET RKPD PERUBAHAN | |
|----|--|----------------|--|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif | 1 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | 74,04 | 73,91 | 74,62 | |
| | | | 1 | Meningkatnya Indeks Kesehatan | Indeks Kesehatan | 82,72 | 76,28 | 82,97 |
| | | | 2 | Meningkatnya Indeks Pendidikan | Indeks Pendidikan | 64,36 | 64,97 | 64,78 |
| | | | 3 | Meningkatnya Indeks Pengeluaran masyarakat | Indeks Pengeluaran | 12.208,96 | - | 12.542,88 |
| | | 2 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan Masyarakat | 82,32 | | 87,58 | |
| | | | 4 | Menurunnya Angka Prevalensi Gizi Buruk atau Stunting s | Prevalensi Stunting | 21,34 | | 18,32 |
| | | 3 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 91,04 | | 91,50 | |
| 5 | Meningkatnya Tingkat Gemar Membaca | | Tingkat Gemar membaca | 90,84 | | 91,00 | | |

| NO | MISI | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET TAHUN RKPD POKOK 2025 | TARGET RKPD PERUBAHAN | |
|----|------|----------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------|
| | | 4 | Meningkatnya persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sektor produktif | | Tingkat Partisipasi Angkatan kerja sektor Produktif | 61,55 | | 62,34 |
| | | | 6 | Meningkatnya persentase lulusan pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus | Persentase lulusan vokasi yang bekerja di sektor produktif dalam 6 bulan setelah kelulusan. | 11,45 | | 12,25 |
| | | 5 | Menurunnya Nilai Indeks Ketimpangan Gender | | Indeks Ketimpangan Gender | 0,24 | | 0,22 |
| | | | 7 | Meningkatnya Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). | 63,00 | | 65,00 |
| | | | 8 | Meningkatnya rasio akseptor KB sebesar 84,54 persen pada tahun 2029 | Rasio Akseptor KB | 63,17 | | 66,96 |
| | | 6 | Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Pemuda | | Indeks Pembangunan Pemuda | 64,46 | | 64,68 |
| | | | 9 | Meningkatnya persentase partisipasi aktif pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan | Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, sosial, atau politik. | 23,00 | | 23,82 |
| | | | 10 | Meningkatnya Persentase pemuda yang menjadi wirausahawan baru | Rasio wirausaha pemuda | 8,67 | | 8,81 |
| | | 7 | Meningkatnya Nilai Indeks Perlindungan Anak | | Indeks Perlindungan anak | 60,60 | | 62,37 |
| | | | 11 | Meningkatnya Indeks Pemenuhan hak anak | Indeks Pemenuhan Hak anak (IPHA) | 58,67 | | 59,26 |
| | | 8 | Meningkatnya Indeks kepesertaan jaminan sosial masyarakat | | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat | 54,19 | | 54,77 |
| | | | 12 | Meningkatnya persentase cakupan masyarakat yang menjadi peserta aktif jaminan kesehatan | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | 99,63 | | 99,63 |
| | | | 13 | Meningkatnya persentase cakupan pekerja yang menjadi | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 8,75 | | 9,90 |

| NO | MISI | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET TAHUN RKPD POKOK 2025 | TARGET RKPD PERUBAHAN |
|----|--|----------------|---|--|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | peserta aktif jaminan ketenagakerjaan | | | | |
| 2 | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berkas Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi | 9 | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah | | Pertumbuhan ekonomi | 3,79 | 6,55 | 5,08 |
| | | | 14 | Meningkatnya persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | 14,79 | - | 15,54 |
| | | | 15 | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah | 0,31 | | 0,32 |
| | | | 16 | Meningkatnya persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | 3,74 | | 3,95 |
| | | | 17 | Meningkatnya persentase kontribusi induetri pengolahan terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah | 14,79 | | 15,23 |
| | | | 18 | Meningkatnya persentase kontribusi real estate terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah | 1,37 | | 1,42 |
| | | | 19 | Terkendalnya laju inflasi daerah | Laju inflasi daerah | 1,23 | 3,03 | 1,50 |
| | | | 20 | Menurunnya persentase masyarakat miskin | Tingkat Kemiskinan | 9,32 | 7,14 | 9,08 |
| | | | 21 | Menurunnya rasio gini | Rasio gini | 0,349 | 0,368 | 0,346 |
| | | | 22 | Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka | Tingkat pengangguran terbuka | 4,34 | 3,50 | 4,13 |
| | | | 23 | Meningkatnya persentase pendapatan per kapita | Pendapatan Per Kapita | 6,49 | 72,22 | 75,05 |
| 3 | Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berkas Smart Government | 10 | Meningkatnya Nilai indeks Reformasi birokrasi Kabupaten | | Indeks Reformasi Birokrasi | 69,62 | 74,67 | 70,12 |
| | | | 24 | Meningkatnya nilai indeks sistem pemerintahan berbasis digital | Indeks SPBE | 3,15 | | 4,00 |
| | | | 25 | Meningkatnya nilai indeks sistem merit | Indeks Sistem Merit | 298,50 | | 301,92 |
| | | | 26 | Meningkatnya nilai indeks inovasi instansi pemerintah | Indeks inovasi | 50,98 | | 52,48 |

| NO | MISI | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET TAHUN RKPD POKOK 2025 | TARGET RKPD PERUBAHAN |
|----|---|----------------|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | 27 | Meningkatnya nilai indeks pelayanan publik | Indeks pelayanan Publik | 2,54 | 2,62 |
| | | | 28 | Meningkatnya nilai indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan | Indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan | 64,83 | A (80) 65,40 |
| 4 | Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah | 11 | Meningkatnya nilai indeks Stabilitas Keamanan Daerah | | Indeks Stabilitas Keamanan Daerah | 99,98 | 99,99 |
| | | | 29 | Menurunnya persentase Angka Kriminalitas dan Tindak Kekerasan (pencurian, penganiayaan, narkoba, dll.) per 10.000 penduduk | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk | 20,26 | 19,26 |
| | | | 30 | Menurunnya persentase Gangguan Ketertiban Umum (keributan, tawuran, demonstrasi anarkis, dan gangguan sosial lainnya) setiap tahunnya | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun | 77,91 | 76,91 |
| 5 | Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan | 12 | Meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Masyarakat | | Indeks Ketahanan Masyarakat | 0,00 | 0,66 |
| | | | 31 | Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan keagamaan | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keagamaan | 3,77 | 3,26 3,77 |
| | | | 32 | Meningkatnya nilai indeks kerukunan umat beragama | Indeks kerukunan umat beragama | 96,18 | 96,38 |
| | | | 33 | Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks Pembangunan Kebudayaan | 0,22 | 0,23 |
| 6 | Mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif | 13 | Meningkatnya Nilai Indeks Layanan Infrastruktur | | Indeks Layanan Infrastruktur | 3,89 | 3,93 |
| | | | 34 | Meningkatnya proporsi jalan kondisi mantap | Proporsi jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan kabupaten. | 74,56 | 76,58 |
| | | | 35 | Meningkatnya persentase akses air bersih layak rumah tangga | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak | 76,68 | 88,86 |
| | | | 36 | Meningkatnya persentase cakupan wilayah blankspot oleh jaringan internet 4G atau lebih | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih | 48,38 | 50,58 |

| NO | MISI | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET TAHUN RKPD POKOK 2025 | TARGET RKPD PERUBAHAN |
|----|---|----------------|---|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | 14 | Meningkatnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 71,90 | | 75,26 |
| | | | 37 Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana | Indeks Resiko Bencana | 111,99 | 108,06 | 110,87 |
| | | | 38 Menurunnya nilai intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 16,55 persen pada tahun 2029 | Penurunan Intensitas Emisi GRK | 13,35 | | 13,53 |
| 7 | Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah | 15 | Meningkatnya Nilai Indeks Daya Saing Daerah | Indeks Daya Saing Daerah | 3,66 | | 3,70 |
| | | | 39 Meningkatnya persentase nilai realisasi investasi daerah | Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah | 24,47 | | 7,00 |
| | | | 40 Meningkatnya persentase kawasan produktif yang terkoneksi dengan sistem transportasi lokal | Persentase kawasan produktif yang terkoneksi dengan sistem transportasi lokal | 65,45 | | 65,45 |
| | | | 41 Meningkatnya Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital dalam operasional bisnis (produksi, promosi, layanan pelanggan) sebesar 28,70 persen pada tahun 2029 | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital | 27,40 | | 27,65 |
| | | | 42 Meningkatnya proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB | proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB | 0,45 | | 0,48 |

Sumber : Ranhir RPJMD 2025 - 2029

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2025

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Untuk tahun 2025, tema RKP yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dimana pembangunan nasional diarahkan pada 8 prioritas yaitu:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian

Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi MelaLui Peran Aktlf Koperasi;
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan , Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber saya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
- 8) Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengna Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2025, maka sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

Tabel. 4.4. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

| NO | INDIKATOR MAKRO | TARGET 2025 |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,3 – 5,6 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,0 – 8,0 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,5 – 5,0 |
| 4 | Indeks Modal Manusia | 0,56 |
| 5 | Gini Rasio | 0,379 – 0,382 |
| 6 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) | 38,6 |
| 7 | Nilai Tukar Petani (Nilai) | 113 - 115 |
| 8 | Nilai Tukar Nelayan (Nilai) | 104 - 105 |

Sumber : RKP Tahun 2025

Adapun tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan nasional antara lain :

- 1. Program penguatan Sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
- 2. Program Makan bergizi Gratis
- 3. Pencegahan Stunting;
- 4. Pengendalian Inflasi Daerah;
- 5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- 6. Dukungan Swasembada Pangan;
- 7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasiltasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Mikro, Kecil , dan menengah

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Sejalan dengan pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema RKPd Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing”**. Terdapat lima Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi.
2. Peningkatan Layanan Keagamaan, Pemajuan Kebudayaan, Kearifan Lokal, Sosial kemasyarakatan, Demokrasi Substansial dan Penguatan Peran generasi muda yang inklusif yang memperhatikan pelibatan kelompok marjinal.
3. Hilirasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
4. Peningkatan Ekonomi dan Fiskal Daerah yang modern dan berdaya saing.
5. Peningkatan Kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan.
6. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital.
7. Peningkatan layanan transportasi (Darat, Laut, Udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berawasan lingkungan.
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tahun 2025, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 difokuskan pada sasaran sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

| No | Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Baseline 2024 | Target 2025 |
|----|--|-------------------------------------|---|---|--------|---------------|---------------|
| 1 | Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi | Tujuan 1 : | | | | | |
| | | Meningkatkan Kualitas Modal Manusia | | Indeks Modal Manusia | | | 0.52 |
| | | 1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan | Usia Harapan Hidup | | 73.83 | 73.95 |
| | | 2 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif | Rata rata Lama sekolah | Tahun | 8.86 | 9.47 |
| | | | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13.55 | 13.80 - 13.81 |
| | | | | % Siswa yang terserap ke Perguruan Tinggi | Pesen | 41.83 | 44 |
| 2 | Peningkatan Layanan Keagamaan, Pemajuan | Tujuan 2 : | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Baseline 2024 | Target 2025 |
|----|---|---|--|--|--------|---------------|-------------|
| | Kebudayaan, Kearifan Lokal, Sosial kemasyarakatan, Demokrasi Substansial dan Penguatan Peran generasi muda yang inklusif yang memperhatikan pelibatan kelompok marjinal | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif | | Indeks Ketahanan Nasional | Angka | | 3.04 |
| | | 3 | Meningkatnya Kualitas Demokrasi | Indeks Demokrasi Propinsi | Indeks | 76.43 | |
| | | 4 | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Pemajuan Budaya | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 79.04 | 79.08 |
| | | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | 55.26 | 56.51 |
| | | 5 | Meningkatnya Kualitas generasi muda dan Kesetaraan gender | Indeks Perlindungan Anak | Indeks | 60.74 | 62.48 |
| | | | | Indeks Pembangunan Pemuda | Indeks | 56.67 | 56.79 |
| | | | | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0.366 | 0.344 |
| 3 | Hilirasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | Tujuan 3 : | | | | | |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif | | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5.02 | 5.02 |
| | | 6 | Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Swasembada Pangan | Rasio Industri Pengolahan Terhadap PDRB | Persen | 13.02 | 13.05 |
| | | | | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB | Persen | na | 0.75 |
| | | | | Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan | Persen | 6.99 | 7.05 |
| | | | | Indeks Ketahanan Pangan | Poin | 83.82 | 85.02 |
| 4 | Peningkatan Ekonomi dan Fiskal Daerah yang modern dan berdaya saing | 7 | Meningkatnya Integrasi ekonomi Regional Dan Global | Ekspor Barang dan Jasa | % PDRB | 9.68 | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Baseline 2024 | Target 2025 |
|----|---|--|---|---------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| | | 8 | Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah | Tingkat Inflasi | % | 1.53 | 10.05 |
| | | | | Inklusi Keuangan | | 75.02 | 80 |
| 5 | Peningkatan Kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan. | 9 | Meningkatnya pembangunan perdesaan | Persentase Desa Mandiri | % | 32.88 | 38.79 |
| | | 10 | Menurunnya angka pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4.19 | 4.1 |
| 6 | Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital. | Tujuan 4 : | | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas tata kelola yang berintegritas adaptif, dan inovatif | | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 81.74 | 81.8 |
| | | 11 | Terwujudnya birokrasi yang akuntabel | Nilai SAKIP | Angka | 69.02 | 69.27 |
| | | 12 | Terwujudnya pemerintahan yang adaptif, dan inovatif | Indeks SPBE | Angka | 3.94 | 4.01 |
| | | | | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 59.66 | 60 |
| | | | | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 4.12 | 4.41. |
| 7 | Peningkatan layanan transportasi (Darat, Laut, Udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berawasan lingkungan | Tujuan 5 : | | | Angka | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Baseline 2024 | Target 2025 |
|----|---|--|--|---------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| | | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan berkelanjutan | | Indeks Williamson | | | 0.55 |
| | | 13 | Meningkatnya pengelolaan infrastruktur | Indeks Layanan Infrastruktur | Angka | 85.64 | 88.39 |
| 8 | Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 75.69 | 77.6 |
| | | 14 | Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim | Indeks Risiko Bencana | Angka | 140.76 | 135.46 |
| | | | | Penurunan Intensitas Emisi GRK | Angka | na | 29.7 |

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2029 dimana pada tahap awal periode Pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros menekankan penyusunan dan penyelarasan kembali dokumen perencanaan daerah, terutama untuk memastikan sinkronisasi antara RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten , Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penerjemahan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat dimana Penataan dasar kelembagaan dan regulasi juga menjadi prioritas, dengan tujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan, menguatkan akuntabilitas birokrasi, serta memperkuat instrumen perencanaan dan penganggaran berbasis data. Tahap ini mencakup pemetaan isu-isu strategis daerah, perbaikan sistem pelayanan publik, penguatan database pembangunan, serta revitalisasi peran kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program prioritas. Berdasarkan pada tahapan tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah:

1. Penataan dan penguatan layanan kesehatan dasar melalui revitalisasi Puskesmas dan optimalisasi Posyandu
2. Penataan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar serta pendataan anak tidak sekolah.

3. Pemetaan potensi ekonomi lokal dan basis rumah tangga miskin untuk perumusan strategi peningkatan pendapatan.
4. Penataan kelembagaan dan sistem pendataan gizi balita serta pemetaan keluarga risiko stunting.
5. Pemetaan tingkat literasi masyarakat dan penataan kelembagaan literasi berbasis komunitas.
6. Pemetaan kompetensi lulusan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja sektor produktif di daerah.
7. Pemetaan kapasitas dan kesiapan perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG.
8. Pemetaan kebutuhan dan hambatan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia subur.
9. Pemetaan potensi, minat, dan tingkat keterlibatan pemuda dalam organisasi dan pembangunan daerah.
10. Pemetaan potensi wirausaha pemuda dan hambatan yang dihadapi.
11. Pemetaan kondisi pemenuhan hak anak dan identifikasi hambatan utama.
12. Pemetaan kelompok masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan.
13. Pemetaan pekerja yang belum tercakup dalam jaminan ketenagakerjaan.
14. Pemetaan potensi subsektor pertanian dan rantai nilai unggulan daerah.
15. Pemetaan daya tarik wisata unggulan dan penyusunan masterplan pengembangan pariwisata daerah.
16. Pemetaan subsektor jasa potensial dan penyusunan roadmap pengembangan sektor jasa.
17. Pemetaan potensi bahan baku lokal dan kawasan industri pengolahan strategis.
18. Pemetaan kawasan potensial dan penyusunan rencana induk pengembangan real estate (perumahan, komersial, dan industri).
19. Penguatan kelembagaan dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta pemetaan komoditas penyumbang inflasi.
20. Pemutakhiran data kemiskinan dan identifikasi kelompok rentan berbasis by name by address untuk penargetan program yang tepat.
21. Pemetaan ketimpangan wilayah dan kelompok sosial berbasis data spasial dan sosial ekonomi.
22. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi angkatan kerja secara sektoral dan kewilayahan.
23. Pemetaan potensi ekonomi lokal dan produktivitas per sektor untuk mendorong pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah.
24. Pemetaan dan penataan infrastruktur TIK serta integrasi data lintas perangkat daerah.
25. Pemetaan dan pembenahan kebijakan manajemen ASN, termasuk sistem rekrutmen dan mutasi.
26. Identifikasi baseline inovasi dan penyusunan roadmap inovasi daerah.
27. Evaluasi dan pemetaan standar pelayanan di seluruh unit layanan publik.
28. Pemetaan kelemahan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penyusunan rencana aksi perbaikan.
29. Pemetaan wilayah rawan kriminalitas dan kekerasan serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

30. Pemetaan dan analisis akar penyebab gangguan ketertiban umum serta penguatan koordinasi antar aparat keamanan dan pemerintah daerah.
31. Pendataan dan pemetaan kebutuhan layanan keagamaan di seluruh wilayah serta penguatan koordinasi antar lembaga keagamaan dan pemerintah daerah.
32. Pendataan dan pemetaan kondisi kerukunan umat beragama serta identifikasi potensi konflik dan kelompok rentan.
33. Pendataan dan inventarisasi potensi kebudayaan daerah serta penguatan koordinasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan pelaku seni.
34. Inventarisasi dan pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh untuk menentukan prioritas perbaikan dan pemeliharaan.
35. Pendataan dan pemetaan cakupan serta kondisi sumber dan jaringan air bersih di seluruh wilayah.
36. Pendataan dan pemetaan wilayah blankspot secara detail untuk menentukan prioritas pembangunan jaringan.
37. Pendataan dan pemetaan risiko bencana di seluruh wilayah secara detail serta penguatan koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana.
38. Pendataan dan pemetaan sumber emisi gas rumah kaca (GRK) utama di wilayah serta penyusunan baseline emisi.
39. Pendataan potensi investasi daerah dan identifikasi hambatan utama dalam proses investasi.
40. Pendataan dan pemetaan kawasan produktif serta jaringan transportasi lokal yang ada untuk identifikasi gap konektivitas.
41. Pendataan UMKM dan tingkat pemanfaatan teknologi digital saat ini serta identifikasi kendala utama dalam adopsi digital.
42. Pendataan potensi dan pelaku ekonomi kreatif serta identifikasi kendala pengembangan sektor ini di daerah.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tahun 2025, maka pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 difokuskan pada sasaran sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL 4.6
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET 2025 | TARGET RPJMD |
|----|---|----------------|---|----------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | 1 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | 74,04 | 74,62 | 76 |
| 1 | Penataan dan penguatan layanan kesehatan dasar melalui revitalisasi Puskesmas dan optimalisasi Posyandu | | 1 Meningkatkan Indeks Kesehatan | Indeks Kesehatan | 82,72 | 82,97 | 83.97 |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET 2025 | TARGET RPJMD |
|----|---|----------------|---|---|---|----------------|-------------|--------------|
| 2 | Penataan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar serta pendataan anak tidak sekolah. | 2 | 2 | Meningkatnya Indeks Pendidikan | Indeks Pendidikan | 64,36 | 64,78 | 66,50 |
| 3 | Pemetaan potensi ekonomi lokal dan basis rumah tangga miskin untuk perumusan strategi peningkatan pendapatan. | | 3 | Meningkatnya Indeks Pengeluaran masyarakat | Indeks Pengeluaran | 12.208,96 | 12.542,88 | 13.972,40 |
| | | 2 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat | | Pertumbuhan Ekonomi | 82,32 | 87,58 | 95,11 |
| 4 | Penataan kelembagaan dan sistem pendataan gizi balita serta pemetaan keluarga risiko stunting. | | 4 | Menurunnya Angka Prevalensi Gizi Buruk atau Stunting s | Prevalensi Stunting | 21,34 | 18,32 | 14,24 |
| | | 3 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 91,04 | 91,50 | 93,00 |
| 5 | Pemetaan tingkat literasi masyarakat dan penataan kelembagaan literasi berbasis komunitas. | | 5 | Meningkatnya Tingkat Gemar Membaca | Tingkat Gemar membaca | 90,84 | 91,00 | 91,80 |
| | | 4 | Meningkatnya persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sektor produktif | | Tingkat Partisipasi Angkatan kerja sektor Produktif | 61,55 | 62,34 | 64,88 |
| 6 | Pemetaan kompetensi lulusan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja sektor produktif di daerah. | | 6 | Meningkatnya persentase lulusan pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus | Persentase lulusan vokasi yang bekerja di sektor produktif dalam 6 bulan setelah kelulusan. | 11,45 | 12,25 | 16,08 |
| | | 5 | Menurunnya Nilai Indeks Ketimpangan Gender | | Indeks Ketimpangan Gender | 0,24 | 0,22 | 0,17 |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET 2025 | TARGET RPJMD |
|----|---|----------------|---|---|---|----------------|-------------|--------------|
| 7 | Pemetaan kapasitas dan kesiapan perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG. | | 7 | Meningkatnya Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). | 63,00 | 65,00 | 84,00 |
| 8 | Pemetaan kebutuhan dan hambatan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia subur. | | 8 | Meningkatnya rasio akseptor KB sebesar 84,54 persen pada tahun 2029 | Rasio Akseptor KB | 63,17 | 66,96 | 84,54 |
| | | 6 | Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Pemuda | | Indeks Pembangunan Pemuda | 64,46 | 64,68 | 65,59 |
| 9 | Pemetaan potensi, minat, dan tingkat keterlibatan pemuda dalam organisasi dan pembangunan daerah. | | 9 | Meningkatnya persentase partisipasi aktif pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan | Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, sosial, atau politik. | 23,00 | 23,82 | 27,42 |
| 10 | Pemetaan potensi wirausaha pemuda dan hambatan yang dihadapi. | | 10 | Meningkatnya Persentase pemuda yang menjadi wirausahawan baru | Rasio wirausaha pemuda | 8,67 | 8,81 | 9,40 |
| | | 7 | Meningkatnya Nilai Indeks Perlindungan Anak | | Indeks Perlindungan anak | 60,60 | 62,37 | 65,53 |
| 11 | Pemetaan kondisi pemenuhan hak anak dan identifikasi hambatan utama. | | 11 | Meningkatnya Indeks Pemenuhan hak anak | Indeks Pemenuhan Hak anak (IPHA) | 58,67 | 59,26 | 61,66 |
| | | 8 | Meningkatnya Indeks kepesertaan jaminan sosial masyarakat | | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat | 54,19 | 54,77 | 58,13 |
| 12 | Pemetaan kelompok masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan. | | 12 | Meningkatnya persentase cakupan masyarakat yang menjadi peserta aktif jaminan kesehatan | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | 99,63 | 99,63 | 100,00 |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET 2025 | TARGET RPJMD |
|----|---|----------------|----|--|---|----------------|-------------|--------------|
| 13 | Pemetaan pekerja yang belum tercakup dalam jaminan ketenagakerjaan. | | 13 | Meningkatnya persentase cakupan pekerja yang menjadi peserta aktif jaminan ketenagakerjaan | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 8,75 | 9,90 | 16,26 |
| | | | | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah | Pertumbuhan ekonomi | 3,79 | 6,55 | 6,00 |
| 14 | Pemetaan potensi subsektor pertanian dan rantai nilai unggulan daerah. | | 14 | Meningkatnya persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | 14,79 | 15,54 | 19,66 |
| 15 | Pemetaan daya tarik wisata unggulan dan penyusunan masterplan pengembangan pariwisata daerah. | | 15 | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah | 0,31 | 0,32 | 0,40 |
| 16 | Pemetaan subsektor jasa potensial dan penyusunan roadmap pengembangan sektor jasa. | | 16 | Meningkatnya persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | 3,74 | 3,95 | 4,94 |
| 17 | Pemetaan potensi bahan baku lokal dan kawasan industri pengolahan strategis. | 9 | 17 | Meningkatnya persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah | 14,79 | 15,23 | 18,67 |
| 18 | Pemetaan kawasan potensial dan penyusunan rencana induk pengembangan real estate (perumahan, komersial, dan industri). | | 18 | Meningkatnya persentase kontribusi real estate terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah | 1,37 | 1,42 | 1,69 |
| 19 | Penguatan kelembagaan dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta pemetaan komoditas penyumbang inflasi. | | 19 | Terkendalinya laju inflasi daerah | Laju inflasi daerah | 1,23 | 1,50 | 1,50 |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET 2025 | TARGET RPJMD |
|----|--|----------------|---|--|------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 20 | Pemutakhiran data kemiskinan dan identifikasi kelompok rentan berbasis by name by address untuk penargetan program yang tepat. | | 20 | Menurunnya persentase masyarakat miskin | Tingkat Kemiskinan | 9,32 | 9,08 | 6,89 |
| 21 | Pemetaan ketimpangan wilayah dan kelompok sosial berbasis data spasial dan sosial ekonomi. | | 21 | Menurunnya rasio gini | Rasio gini | 0,349 | 0,346 | 0,334 |
| 22 | Pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi angkatan kerja secara sektoral dan kewilayahan. | | 22 | Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka | Tingkat pengangguran terbuka | 4,34 | 4,13 | 3,50 |
| 23 | Pemetaan potensi ekonomi lokal dan produktivitas per sektor untuk mendorong pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah. | | 23 | Meningkatnya persentase pendapatan per kapita | Pendapatan Per Kapita | 6,49 | 75,05 | 101,71 |
| | | 10 | Meningkatnya Nilai indeks Reformasi birokrasi Kabupaten | | Indeks Reformasi Birokrasi | 69,62 | 70,12 | 72,12 |
| 24 | Pemetaan dan penataan infrastruktur TIK serta integrasi data lintas perangkat daerah. | | 24 | Meningkatnya nilai indeks sistem pemerintahan berbasis digital | Indeks SPBE | 3,15 | 4,00 | 4,80 |
| 25 | Pemetaan dan pembenahan kebijakan manajemen ASN, termasuk sistem rekrutmen dan mutasi. | | 25 | Meningkatnya nilai indeks sistem merit | Indeks Sistem Merit | 298,50 | 301,92 | 315,58 |
| 26 | Identifikasi baseline inovasi dan penyusunan roadmap inovasi daerah. | | 26 | Meningkatnya nilai indeks inovasi instansi pemerintah | Indeks inovasi | 50,98 | 52,48 | 59,48 |
| 27 | Evaluasi dan pemetaan standar pelayanan di seluruh unit layanan publik. | | 27 | Meningkatnya nilai indeks pelayanan publik | Indeks pelayanan Publik | 2,54 | 2,62 | 2,94 |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET 2025 | TARGET RPJMD |
|----|---|----------------|----|---|---|----------------|-------------|--------------|
| 28 | Pemetaan kelemahan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penyusunan rencana aksi perbaikan. | | 28 | Meningkatnya nilai indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan | Indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan | 64,83 | 65,40 | 75,00 |
| | | | | Meningkatnya nilai indeks Stabilitas Keamanan Daerah | Indeks Stabilitas Keamanan Daerah | 99,98 | 99,99 | 99,99 |
| 29 | Pemetaan wilayah rawan kriminalitas dan kekerasan serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. | 11 | 29 | Menurunnya persentase Angka Kriminalitas dan Tindak Kekerasan (pencurian, penganiayaan, narkoba, dll.) per 10.000 penduduk | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk | 20,26 | 19,26 | 15,26 |
| 30 | Pemetaan dan analisis akar penyebab gangguan ketertiban umum serta penguatan koordinasi antar aparat keamanan dan pemerintah daerah. | | 30 | Menurunnya persentase Gangguan Ketertiban Umum (keributan, tawuran, demonstrasi anarkis, dan gangguan sosial lainnya) setiap tahunnya | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun | 77,91 | 76,91 | 72,91 |
| | | | | Meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Masyarakat | Indeks Ketahanan Masyarakat | 0,00 | 0,66 | 0,81 |
| 31 | Pendataan dan pemetaan kebutuhan layanan keagamaan di seluruh wilayah serta penguatan koordinasi antar lembaga keagamaan dan pemerintah daerah. | 12 | 31 | Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan keagamaan | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keagamaan | 3,77 | 3,77 | 3,85 |
| 32 | Pendataan dan pemetaan kondisi kerukunan umat beragama serta identifikasi potensi konflik dan kelompok rentan. | | 32 | Meningkatnya nilai indeks kerukunan umat beragama | Indeks kerukunan umat beragama | 96,18 | 96,38 | 97,20 |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET 2025 | TARGET RPJMD |
|----|---|----------------|---|--|--|----------------|-------------|--------------|
| 33 | Pendataan dan inventarisasi potensi kebudayaan daerah serta penguatan koordinasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan pelaku seni. | | 33 | Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks Pembangunan Kebudayaan | 0,22 | 0,23 | 0,25 |
| | | 13 | Meningkatnya Nilai Indeks Layanan Infrastruktur | | Indeks Layanan Infrastruktur | 3,89 | 3,93 | 4,08 |
| 34 | Inventarisasi dan pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh untuk menentukan prioritas perbaikan dan pemeliharaan. | | 34 | Meningkatnya proporsi jalan kondisi mantap | Proporsi jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan kabupaten. | 74,56 | 76,58 | 84,56 |
| 35 | Pendataan dan pemetaan cakupan serta kondisi sumber dan jaringan air bersih di seluruh wilayah. | | 35 | Meningkatnya persentase akses air bersih layak rumah tangga | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak | 76,68 | 88,86 | 89,66 |
| 36 | Pendataan dan pemetaan wilayah blankspot secara detail untuk menentukan prioritas pembangunan jaringan. | | 36 | Meningkatnya persentase cakupan wilayah blankspot oleh jaringan internet 4G atau lebih | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih | 48,38 | 50,58 | 63,29 |
| | | 14 | Meningkatnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 71,90 | 75,26 | 76,11 |
| 37 | Pendataan dan pemetaan risiko bencana di seluruh wilayah secara detail serta penguatan koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana. | | 37 | Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana | Indeks Resiko Bencana | 111,99 | 110,87 | 106,50 |
| 38 | Pendataan dan pemetaan sumber emisi gas rumah kaca (GRK) utama di wilayah serta penyusunan baseline emisi. | | 38 | Menurunnya nilai intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 16,55 persen pada tahun 2029 | Penurunan Intensitas Emisi GRK | 13,35 | 13,53 | 16,55 |
| | | 15 | Meningkatnya Nilai Indeks Daya Saing Daerah | | Indeks Daya Saing Daerah | 3,66 | 3,70 | 3,85 |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | TARGET 2025 | TARGET RPJMD |
|----|--|----------------|----|--|---|----------------|-------------|--------------|
| 39 | Pendataan potensi investasi daerah dan identifikasi hambatan utama dalam proses investasi. | | 39 | Meningkatnya persentase nilai realisasi investasi daerah | Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah | 24,47 | 7,00 | 8,25 |
| 40 | Pendataan dan pemetaan kawasan produktif serta jaringan transportasi lokal yang ada untuk identifikasi gap konektivitas. | | 40 | Meningkatnya persentase kawasan produktif yang terkoneksi dengan sistem transportasi lokal | Persentase kawasan produktif yang terkoneksi dengan sistem transportasi lokal | 65,45 | 65,45 | 74,29 |
| 41 | Pendataan UMKM dan tingkat pemanfaatan teknologi digital saat ini serta identifikasi kendala utama dalam adopsi digital. | | 41 | Meningkatnya Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital dalam operasional bisnis (produksi, promosi, layanan pelanggan) sebesar 28,70 persen pada tahun 2029 | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital | 27,40 | 27,65 | 28,70 |
| 42 | Pendataan potensi dan pelaku ekonomi kreatif serta identifikasi kendala pengembangan sektor ini di daerah. | | 42 | Meningkatnya proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB | proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB | 0,45 | 0,48 | 0,60 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026

Prioritas pembangunan tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 sebagaimana tabel sebelumnya yang menggambarkan arah kebijakan PRJMD terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025

| NO | MISI | PRIORITAS PEMBANGUNAN | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR |
|----|--|---|----------------|---|----------------------------|
| 1 | Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif | Peningkatan tata kelola Kelembagaan guna mewujudkan Sumber Daya Manusia Sehat, Cerdas dan Produktif | 1 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia | Indeks Pembangunan Manusia |
| | | | | Meningkatnya Indeks Kesehatan | Indeks Kesehatan |
| | | | | Meningkatnya Indeks Pendidikan | Indeks Pendidikan |

| NO | MISI | PRIORITAS PEMBANGUNAN | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR |
|----|------|-----------------------|----------------|---|---|---|
| | | | | 3 | Meningkatnya Indeks Pengeluaran masyarakat | Indeks Pengeluaran |
| | | | 2 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat | | Indeks Kesehatan Masyarakat |
| | | | | 4 | Menurunnya Angka Prevalensi Gizi Buruk atau Stunting s | Prevalensi Stunting |
| | | | 3 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat |
| | | | | 5 | Meningkatnya Tingkat Gemar Membaca | Tingkat Gemar membaca |
| | | | 4 | Meningkatnya persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sektor produktif | | Tingkat Partisipasi Angkatan kerja sektor Produktif |
| | | | | 6 | Meningkatnya persentase lulusan pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus | Persentase lulusan vokasi yang bekerja di sektor produktif dalam 6 bulan setelah kelulusan. |
| | | | 5 | Menurunnya Nilai Indeks Ketimpangan Gender | | Indeks Ketimpangan Gender |
| | | | | 7 | Meningkatnya Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). |
| | | | | 8 | Meningkatnya rasio akseptor KB sebesar 84,54 persen pada tahun 2029 | Rasio Akseptor KB |
| | | | 6 | Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Pemuda | | Indeks Pembangunan Pemuda |
| | | | | 9 | Meningkatnya persentase partisipasi aktif pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan | Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, sosial, atau politik. |
| | | | | 10 | Meningkatnya Persentase pemuda yang menjadi wirausahawan baru | Rasio wirausaha pemuda |
| | | | 7 | Meningkatnya Nilai Indeks Perlindungan Anak | | Indeks Perlindungan anak |
| | | | | 11 | Meningkatnya Indeks Pemenuhan hak anak | Indeks Pemenuhan Hak anak (IPHA) |
| | | | 8 | Meningkatnya Indeks kepesertaan jaminan sosial masyarakat | | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat |

| NO | MISI | PRIORITAS PEMBANGUNAN | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR |
|----|--|--|----------------|---|--|---|
| 2 | | | | 12 | Meningkatnya persentase cakupan masyarakat yang menjadi peserta aktif jaminan kesehatan | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) |
| | | | | 13 | Meningkatnya persentase cakupan pekerja yang menjadi peserta aktif jaminan ketenagakerjaan | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan |
| | | | | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah | | Pertumbuhan ekonomi |
| | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi | Identifikasi sumber sumber pertumbuhan ekonomi dan Produktivitas daerah berbasis iptek | 9 | 14 | Meningkatnya persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah |
| | | | | 15 | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah |
| | | | | 16 | Meningkatnya persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah |
| | | | | 17 | Meningkatnya persentase kontribusi induetri pengolahan terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah |
| | | | | 18 | Meningkatnya persentase kontribusi real estate terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah |
| | | | | 19 | Terkendalnya laju inflasi daerah | Laju inflasi daerah |
| | | | | 20 | Menurunnya persentase masyarakat miskin | Tingkat Kemiskinan |
| | | | | 21 | Menurunnya rasio gini | Rasio gini |
| | | | | 22 | Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka | Tingkat pengangguran terbuka |
| | | | | 23 | Meningkatnya persentase pendapatan per kapita | Pendapatan Per Kapita |
| 3 | Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government | Penataan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Inovasi | 10 | Meningkatnya Nilai indeks Reformasi birokrasi Kabupaten | | Indeks Reformasi Birokrasi |
| | | | | 24 | Meningkatnya nilai indeks sistem pemerintahan berbasis digital | Indeks SPBE |
| | | | | 25 | Meningkatnya nilai indeks sistem merit | Indeks Sistem Merit |
| | | | | 26 | Meningkatnya nilai indeks inovasi instansi pemerintah | Indeks inovasi |

| NO | MISI | PRIORITAS PEMBANGUNAN | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR |
|----|---|--|----------------|--|---|--|
| 4 | | | | 27 | Meningkatnya nilai indeks pelayanan publik | Indeks pelayanan Publik |
| | | | | 28 | Meningkatnya nilai indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan | Indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan |
| | Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah | Penguatan Data dan analisis Potensi Rawan gangguan Kemanan Daerah | 11 | Meningkatnya nilai indeks Stabilitas Keamanan Daerah | | Indeks Stabilitas Keamanan Daerah |
| | | | | 29 | Menurunnya persentase Angka Kriminalitas dan Tindak Kekerasan (pencurian, penganiayaan, narkoba, dll.) per 10.000 penduduk | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk |
| | | | | 30 | Menurunnya persentase Gangguan Ketertiban Umum (keributan, tawuran, demonstrasi anarkis, dan gangguan sosial lainnya) setiap tahunnya | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun |
| | Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan | Penguatan Data dan Informasi Strategis terkait Ketahanan Masyarakat yang inklusif | 12 | Meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Masyarakat | | Indeks Ketahanan Masyarakat |
| | | | | 31 | Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan keagamaan | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keagamaan |
| | | | | 32 | Meningkatnya nilai indeks kerukunan umat beragama | Indeks kerukunan umat beragama |
| | Mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif | Penataan Basis Data dan Informasi Strategis Pengembangan wilayah dan infrastruktur dasar yang inklusif | 13 | 33 | Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks Pembangunan Kebudayaan |
| | | | | Meningkatnya Nilai Indeks Layanan Infrastruktur | | Indeks Layanan Infrastruktur |
| | | | | 34 | Meningkatnya proporsi jalan kondisi mantap | Proporsi jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan kabupaten. |
| | | | | 35 | Meningkatnya persentase akses air bersih layak rumah tangga | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak |
| 5 | | | | 36 | Meningkatnya persentase cakupan wilayah blankspot oleh jaringan internet 4G atau lebih | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih |
| | | | | Meningkatnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| 6 | | | | 37 | Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana | Indeks Resiko Bencana |

| NO | MISI | PRIORITAS PEMBANGUNAN | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR |
|----|--|--|----------------|---|--|---|
| 7 | Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah | Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pembangunan yang berbasis daya saing | 15 | 38 | Menurunnya nilai intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 16,55 persen pada tahun 2029 | Penurunan Intensitas Emisi GRK |
| | | | | Meningkatnya Nilai Indeks Daya Saing Daerah | | Indeks Daya Saing Daerah |
| | | | | 39 | Meningkatnya persentase nilai realisasi investasi daerah | Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah |
| | | | | 40 | Meningkatnya persentase kawasan produktif yang terkoneksi dengan sistem transportasi lokal | Persentase kawasan produktif yang terkoneksi dengan sistem transportasi lokal |
| | | | | 41 | Meningkatnya Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital dalam operasional bisnis (produksi, promosi, layanan pelanggan) sebesar 28,70 persen pada tahun 2029 | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital |
| | | | | 42 | Meningkatnya proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB | proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB |

Sumber : Ranhir RPJMD Kab. Maros 2025 - 2029
 Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2025, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|---|---|-----------------------------------|
| Penataan dan penguatan layanan kesehatan dasar melalui revitalisasi Puskesmas dan optimalisasi Posyandu | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | |
| | Program Pengembangan Permukiman | |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | |
| | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | |
| | Program Penanggulangan Bencana | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|--|
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Sosial |
| | Program Rehabilitasi Sosial | |
| | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | |
| | Program Pengelolaan Persampahan | |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor | Statistik |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pertanian |
| Penataan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar serta pendataan anak tidak sekolah. | | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Pendidikan |
| | Program Pengembangan Kurikulum | |
| | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | |
| | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Pemuda Dan Olahraga |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | |
| | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor | Statistik |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|---|--|-------------------------------------|
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| Pemetaan potensi ekonomi lokal dan basis rumah tangga miskin untuk perumusan strategi peningkatan pendapatan. | | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Penguatan Badan Hukum Koperasi | |
| | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Sosial |
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pangan |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |
| | Program Promosi Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Pariwisata |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian | Peranian |
| | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Perikanan |
| | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Perdagangan |
| | Program Pengembangan Ekspor | |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | |
| | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Transmigrasi |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Penataan kelembagaan dan sistem pendataan gizi balita serta pemetaan keluarga risiko stunting. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|-------------------|---|--|
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pangan |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | |
| | Program Perlindungan Perempuan | |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Pendidikan |
| | Program Pengembangan Kurikulum | |
| | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |
| | Program Pengembangan Permukiman | |
| | Program Pengembangan Perumahan | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Kawasan Permukiman | |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | |
| | Program Penanggulangan Bencana | Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Sosial |
| | Program Rehabilitasi Sosial | |
| | Program Penanganan Bencana | |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | |
| | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | |
| | Program Pengelolaan Persampahan | |
| | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Pengendalian Penduduk Dan Kb |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | Program Penyuluhan Pertanian | |
| | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|---|-------------------------------------|
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | |
| Pemetaan tingkat literasi masyarakat dan penataan kelembagaan literasi berbasis komunitas. | | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Pendidikan |
| | Program Pengembangan Kurikulum | |
| | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | |
| | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra | |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | Kebudayaan |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | Perpustakaan |
| | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | |
| | Program Pengelolaan Arsip | Arsip |
| | Program Perizinan Penggunaan Arsip | |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Pemetaan kompetensi lulusan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja sektor produktif di daerah. | | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Pendidikan |
| | Program Pengembangan Kurikulum | |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | Program Hubungan Industrial | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|---|---|--|
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | |
| | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Perindustrian |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | | |
| Pemetaan kapasitas dan kesiapan perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG. | | |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | | |
| Pemetaan kebutuhan dan hambatan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia subur. | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Perlindungan Perempuan | |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Pengendalian Penduduk Dan Kb |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|---|--|--|
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| Pemetaan potensi, minat, dan tingkat keterlibatan pemuda dalam organisasi dan pembangunan daerah. | | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Sosial |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | Kebudayaan |
| | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | |
| | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah / Riset dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| Pemetaan potensi wirausaha pemuda dan hambatan yang dihadapi. | | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Sosial |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Perdagangan |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | Program Pengembangan Ekspor | |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Sekretariat Daerah |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|---|---|
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Pemetaan kondisi pemenuhan hak anak dan identifikasi hambatan utama. | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pangan |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Pendidikan |
| | Program Pengembangan Kurikulum | |
| | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |
| | Program Pengembangan Permukiman | |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | |
| | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Pengembangan Perumahan | |
| | Program Kawasan Permukiman | |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Ketenteraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | |
| | Program Penanggulangan Bencana | Sosial |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | |
| | Program Pemberdayaan Sosial | |
| | Program Rehabilitasi Sosial | Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | |
| | Program Pendaftaran Penduduk | |
| | Program Pencatatan Sipil | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | |
| | Program Penataan Desa | |
| | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|-------------------------------------|
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Pengendalian Penduduk Dan Kb |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | |
| | | |
| Pemetaan kelompok masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan. | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | |
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Sosial |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | | |
| Pemetaan pekerja yang belum tercakup dalam jaminan ketenagakerjaan. | | |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Hubungan Industrial | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|---|-------------------------------------|
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Pemetaan potensi subsektor pertanian dan rantai nilai unggulan daerah. | | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Kelautan Dan Perikanan |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | |
| | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pertanian |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | |
| | Program Penyuluhan Pertanian | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pangan |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Perdagangan |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | |
| | Program Pengembangan Ekspor | |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|---|---|-------------------------------------|
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Pemetaan daya tarik wisata unggulan dan penyusunan masterplan pengembangan pariwisata daerah. | | |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pariwisata |
| | Program Pemasaran Pariwisata | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPRD |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Pemetaan subsektor jasa potensial dan penyusunan roadmap pengembangan sektor jasa. | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pangan |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Penguatan Badan Hukum Koperasi | |
| | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | |
| | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | |
| | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|-------------------------------------|
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Perdagangan |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pariwisata |
| | Program Pemasaran Pariwisata | |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Perikanan |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pertanian |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | |
| Pemetaan potensi bahan baku lokal dan kawasan industri pengolahan strategis. | | |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | Program Hubungan Industrial | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Perdagangan |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|---|-----------------------------------|
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | |
| | Program Pengembangan Ekspor | |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | |
| | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Perindustrian |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Pariwisata |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Perikanan |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pertanian |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| Pemetaan kawasan potensial dan penyusunan rencana induk pengembangan real estate (perumahan, komersial, dan industri). | | |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengembangan Permukiman | |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | |
| | Program Pengembangan Perumahan | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Kawasan Permukiman | |
| | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |
| | Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Pertanahan |
| | Program Penatagunaan Tanah | |
| | Program Pengurusan Hak-hak Atas Tanah | |
| | Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan | |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|---|-------------------------------------|
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Penguatan Badan Hukum Koperasi | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| Penguatan kelembagaan dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta pemetaan komoditas penyumbang inflasi. | | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pangan |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Perdagangan |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Sekretariat Daerah |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Kelautan Dan Perikanan |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pertanian |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Penanggulangan Bencana | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|---|--|--|
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Perhubungan |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Pengendalian Penduduk Dan Kb |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Kesehatan |
| | Program Pengembangan Perumahan | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Sosial |
| | Program Penanganan Bencana | |
| | Program Pemberdayaan Sosial | |
| | | |
| <p>Pemutakhiran data kemiskinan dan identifikasi kelompok rentan berbasis by name by address untuk penargetan program yang tepat.</p> | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | |
| | Program Pengembangan Permukiman | |
| | Program Pengembangan Perumahan | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Kawasan Permukiman | |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Pangan |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Kelautan Dan Perikanan |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pertanian |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|-------------------|--|---|
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | |
| | Program Penyuluhan Pertanian | |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Perdagangan |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | |
| | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Transmigrasi |
| | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pariwisata |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Sosial |
| | Program Rehabilitasi Sosial | |
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | |
| | Program Penanganan Bencana | |
| | Program Perlindungan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Pendidikan |
| | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Pengendalian Penduduk Dan Kb |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | Perpustakaan |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Ketenteraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Penanggulangan Bencana | |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Pertanahan |
| | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | |
| | Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | |
| | Program Pengurusan Hak Atas Tanah | |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | |
| | Program Pengelolaan Persampahan | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Perhubungan |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|-------------------------------------|
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (ASN) | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Kepegawaian Daerah | Kepegawaian |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | |
| Pemetaan ketimpangan wilayah dan kelompok sosial berbasis data spasial dan sosial ekonomi. | | |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Pangan |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pertanian |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| | Program Penyuluhan Pertanian | |
| | Program Pengembangan Ekspor | Perdagangan |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Transmigrasi |
| | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | |
| | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Pariwisata |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | |
| | Program Pemasaran Pariwisata | |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
| | Program Pengurusan Hak Atas Tanah | Pertanahan |
| | Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|--|
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | Perpustakaan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Sosial |
| | Program Pemberdayaan Sosial | |
| | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | |
| | Program Rehabilitasi Sosial | |
| | Program Penanganan Bencana | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |
| | Program Penanggulangan Bencana | |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| Pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi angkatan kerja secara sektoral dan kewilayahan. | | |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | |
| | Program Hubungan Industrial | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Pariwisata |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | |
| | Program Pengembangan Ekspor | Perdagangan |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|--|
| | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Transmigrasi |
| | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | |
| | Program Pengembangan Perumahan | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| Pemetaan potensi ekonomi lokal dan produktivitas per sektor untuk mendorong pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah. | | |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Pangan |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Kelautan Dan Perikanan |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pertanian |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Perdagangan |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | Program Pengembangan Ekspor | |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pariwisata |
| | Program Pemasaran Pariwisata | |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|---|---|--|
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| Pemetaan dan penataan infrastruktur TIK serta integrasi data lintas perangkat daerah. | | |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Program Pendaftaran Penduduk | |
| | Program Pencatatan Sipil | |
| | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan | Pertanahan |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Perindustrian |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persandian |
| | Program Pengelolaan Arsip | Arsip |
| | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | |
| | Program Perizinan Penggunaan Arsip | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Pendidikan |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | |
| | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | Program Kepegawaian Daerah | Kepegawaian |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| Pemetaan dan pembenahan kebijakan manajemen ASN, termasuk sistem rekrutmen dan mutasi. | | |
| | Program Kepegawaian Daerah | Kepegawaian |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|---|---|--|
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| Identifikasi baseline inovasi dan penyusunan roadmap inovasi daerah. | | |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| Evaluasi dan pemetaan standar pelayanan di seluruh unit layanan publik. | | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Pengembangan Perumahan | |
| | Program Kawasan Permukiman | |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Kesehatan |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Pendidikan |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra | |
| | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | |
| | Program Penanggulangan Bencana | Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|-------------------|---|--|
| | Program Pendaftaran Penduduk | Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Program Pencatatan Sipil | |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | |
| | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Perdagangan |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | |
| | Program Pengembangan Ekspor | |
| | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | |
| | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Perindustrian |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | Pertanian |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Arsip |
| | Program Perizinan Penggunaan Arsip | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Kepegawaian Daerah | Kepegawaian |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |
| | Program Pengembangan Permukiman | |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | |
| | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Perhubungan |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Sosial |
| | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | |
| | Program Rehabilitasi Sosial | |
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | |
| | Program Perlindungan Perempuan | |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | |
| | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Pertanahan |
| | Program Penetapan Tanah Ulayat | |
| | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | |
| | Program Pengurusan Hak Atas Tanah | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|--|
| | Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan | |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | |
| | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH | |
| | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Kelautan Dan Perikanan |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Pariwisata |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | |
| | Program Pemasaran Pariwisata | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Pangan |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Tenaga Kerja |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| | Program Hubungan Industrial | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | Kebudayaan |
| | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | Perpustakaan |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | |
| | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | |
| | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Pengendalian Penduduk Dan Kb |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Sekretariat Daerah |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | |
| | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Perencanaan |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| Pemetaan kelemahan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penyusunan rencana aksi perbaikan. | | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|---|
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Daerah |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| | Program Pengelolaan Arsip | Arsip |
| | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Kepegawaian Daerah | Kepegawaian |
| Pemetaan wilayah rawan kriminalitas dan kekerasan serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. | | |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Ketenteraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | |
| | Program Penanggulangan Bencana | |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Penanganan Bencana | Sosial |
| | Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan | Pertanahan |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Perhubungan |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| Pemetaan dan analisis akar penyebab gangguan ketertiban umum serta penguatan koordinasi antar aparat keamanan dan pemerintah daerah. | | |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Ketenteraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | |
| | Program Penanggulangan Bencana | |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Pertanahan |
| | Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan | |
| | Program Hubungan Industrial | Tenaga Kerja |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Pangan |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Perdagangan |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Pendataan dan pemetaan kebutuhan layanan keagamaan di | | |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|--|
| seluruh wilayah serta penguatan koordinasi antar lembaga keagamaan dan pemerintah daerah. | Program Kawasan Permukiman | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Pendidikan |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| Pendataan dan pemetaan kondisi kerukunan umat beragama serta identifikasi potensi konflik dan kelompok rentan. | | |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Pendidikan |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | Program Pengembangan Kurikulum | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| Pendataan dan inventarisasi potensi kebudayaan daerah serta penguatan koordinasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan pelaku seni. | | |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | Kebudayaan |
| | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | |
| | Program Pembinaan Sejarah | |
| | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | |
| | Program Perfilman Nasional | Perpustakaan |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | |
| | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | |
| | Program Pengelolaan Arsip | Arsip |
| | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | |
| | Program Perizinan Penggunaan Arsip | |
| | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra | Pendidikan |
| | Program Pengembangan Kurikulum | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|---|-----------------------------------|
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh | Lingkungan Hidup |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Pariwisata |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | |
| | Program Pemasaran Pariwisata | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Kepegawaian Daerah | Kepegawaian |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | |
| | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | | |
| Inventarisasi dan pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh untuk menentukan prioritas perbaikan dan pemeliharaan. | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Pertanahan |
| | Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Perhubungan |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Kepegawaian Daerah | Kepegawaian |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | | |
| Pendataan dan pemetaan cakupan serta kondisi sumber dan jaringan air bersih di seluruh wilayah. | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | |
| | Program Pengembangan Permukiman | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|---|---|--|
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Kepegawaian Daerah | Kepegawaian |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| Pendataan dan pemetaan wilayah blankspot secara detail untuk menentukan prioritas pembangunan jaringan. | | |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Pertanahan |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Kepegawaian Daerah | Kepegawaian |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| Pendataan dan pemetaan risiko bencana di seluruh wilayah secara detail serta penguatan koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana. | | |
| | Program Penanggulangan Bencana | Ketentraman Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat |
| | Program Penanganan Bencana | Sosial |
| | Program Pemberdayaan Sosial | |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |
| | Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Lingkungan Hidup |
| | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | |
| | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Perencanaan |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|---|-----------------------------------|
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kesehatan |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat Dprd |
| | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| Pendataan dan pemetaan sumber emisi gas rumah kaca (GRK) utama di wilayah serta penyusunan baseline emisi. | | |
| | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | |
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | |
| | Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | |
| | Program Pengelolaan Persampahan | |
| | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Perhubungan |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| Pendataan potensi investasi daerah dan identifikasi hambatan utama dalam proses investasi. | | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | |
| | | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|-------------------------------------|
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | Program Pengembangan Permukiman | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Pertanahan |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | | |
| Pendataan dan pemetaan kawasan produktif serta jaringan transportasi lokal yang ada untuk identifikasi gap konektivitas. | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Perhubungan |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| Pendataan UMKM dan tingkat pemanfaatan teknologi digital saat ini serta identifikasi kendala utama dalam adopsi digital. | | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS | URUSAN PENGAMPU |
|--|--|-------------------------------------|
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Statistik |
| Pendataan potensi dan pelaku ekonomi kreatif serta identifikasi kendala pengembangan sektor ini di daerah. | | |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Pariwisata |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | |
| | Program Pemasaran Pariwisata | |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | Kebudayaan |
| | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | |
| | Program Pembinaan Sejarah | |
| | Program Perfilman Nasional | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Program Pengembangan UMKM | |
| | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Perdagangan |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Riset Dan Inovasi Daerah | |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |

4.2.4. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD

RKPD sebagai perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPJMD yang tergambarkan melalui sasaran prioritas pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD 2025- 2029

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR |
|----|----------------------------------|----------------|---|----------------------------|
| | | 1 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia | Indeks Pembangunan Manusia |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR |
|----|---|----------------|---|---|---|
| 1 | Penataan dan penguatan layanan kesehatan dasar melalui revitalisasi Puskesmas dan optimalisasi Posyandu | | 1 | Meningkatnya Indeks Kesehatan | Indeks Kesehatan |
| 2 | Penataan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar serta pendataan anak tidak sekolah. | | 2 | Meningkatnya Indeks Pendidikan | Indeks Pendidikan |
| 3 | Pemetaan potensi ekonomi lokal dan basis rumah tangga miskin untuk perumusan strategi peningkatan pendapatan. | | 3 | Meningkatnya Indeks Pengeluaran masyarakat | Indeks Pengeluaran |
| | | 2 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat | | Pertumbuhan Ekonomi |
| 4 | Penataan kelembagaan dan sistem pendataan gizi balita serta pemetaan keluarga risiko stunting. | | 4 | Menurunnya Angka Prevalensi Gizi Buruk atau Stunting s | Prevalensi Stunting |
| | | 3 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat |
| 5 | Pemetaan tingkat literasi masyarakat dan penataan kelembagaan literasi berbasis komunitas. | | 5 | Meningkatnya Tingkat Gemar Membaca | Tingkat Gemar membaca |
| | | 4 | Meningkatnya persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sektor produktif | | Tingkat Partisipasi Angkatan kerja sektor Produktif |
| 6 | Pemetaan kompetensi lulusan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja sektor produktif di daerah. | | 6 | Meningkatnya persentase lulusan pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus | Persentase lulusan vokasi yang bekerja di sektor produktif dalam 6 bulan setelah kelulusan. |
| | | 5 | Menurunnya Nilai Indeks Ketimpangan Gender | | Indeks Ketimpangan Gender |
| 7 | Pemetaan kapasitas dan kesiapan perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG. | | 7 | Meningkatnya Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR |
|----|---|----------------|---|---|---|
| 8 | Pemetaan kebutuhan dan hambatan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia subur. | | 8 | Meningkatnya rasio akseptor KB sebesar 84,54 persen pada tahun 2029 | Rasio Akseptor KB |
| | | 6 | Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Pemuda | | Indeks Pembangunan Pemuda |
| 9 | Pemetaan potensi, minat, dan tingkat keterlibatan pemuda dalam organisasi dan pembangunan daerah. | | 9 | Meningkatnya persentase partisipasi aktif pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan | Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, sosial, atau politik. |
| 10 | Pemetaan potensi wirausaha pemuda dan hambatan yang dihadapi. | | 10 | Meningkatnya Persentase pemuda yang menjadi wirausahawan baru | Rasio wirausaha pemuda |
| | | 7 | Meningkatnya Nilai Indeks Perlindungan Anak | | Indeks Perlindungan anak |
| 11 | Pemetaan kondisi pemenuhan hak anak dan identifikasi hambatan utama. | | 11 | Meningkatnya Indeks Pemenuhan hak anak | Indeks Pemenuhan Hak anak (IPHA) |
| 12 | | 8 | Meningkatnya Indeks kepesertaan jaminan sosial masyarakat | | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat |
| 13 | Pemetaan kelompok masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan. | | 12 | Meningkatnya persentase cakupan masyarakat yang menjadi peserta aktif jaminan kesehatan | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) |
| 14 | Pemetaan pekerja yang belum tercakup dalam jaminan ketenagakerjaan. | | 13 | Meningkatnya persentase cakupan pekerja yang menjadi peserta aktif jaminan ketenagakerjaan | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan |
| | | 9 | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah | | Pertumbuhan ekonomi |
| 15 | Pemetaan potensi subsektor pertanian dan rantai nilai unggulan daerah. | | 14 | Meningkatnya persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR |
|----|--|----------------|---|---|
| 16 | Pemetaan daya tarik wisata unggulan dan penyusunan masterplan pengembangan pariwisata daerah. | 15 | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah |
| 17 | Pemetaan subsektor jasa potensial dan penyusunan roadmap pengembangan sektor jasa. | 16 | Meningkatnya persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah |
| 18 | Pemetaan potensi bahan baku lokal dan kawasan industri pengolahan strategis. | 17 | Meningkatnya persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah |
| 19 | Pemetaan kawasan potensial dan penyusunan rencana induk pengembangan real estate (perumahan, komersial, dan industri). | 18 | Meningkatnya persentase kontribusi real estate terhadap PDRB daerah | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah |
| 20 | Penguatan kelembagaan dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta pemetaan komoditas penyumbang inflasi. | 19 | Terkendalnya laju inflasi daerah | Laju inflasi daerah |
| 21 | Pemutakhiran data kemiskinan dan identifikasi kelompok rentan berbasis by name by address untuk penargetan program yang tepat. | 20 | Menurunnya persentase masyarakat miskin | Tingkat Kemiskinan |
| 22 | Pemetaan ketimpangan wilayah dan kelompok sosial berbasis data spasial dan sosial ekonomi. | 21 | Menurunnya rasio gini | Rasio gini |
| 23 | Pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi angkatan kerja secara sektoral dan kewilayahan. | 22 | Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka | Tingkat pengangguran terbuka |
| 24 | Pemetaan potensi ekonomi lokal dan produktivitas per sektor untuk mendorong pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah. | 23 | Meningkatnya persentase pendapatan per kapita | Pendapatan Per Kapita |
| | | 10 | Meningkatnya Nilai indeks Reformasi birokrasi Kabupaten | Indeks Reformasi Birokrasi |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR |
|----|---|----------------|--|---|---|
| 25 | Pemetaan dan penataan infrastruktur TIK serta integrasi data lintas perangkat daerah. | 10 | 24 | Meningkatnya nilai indeks sistem pemerintahan berbasis digital | Indeks SPBE |
| 26 | Pemetaan dan pembenahan kebijakan manajemen ASN, termasuk sistem rekrutmen dan mutasi. | | 25 | Meningkatnya nilai indeks sistem merit | Indeks Sistem Merit |
| 27 | Identifikasi baseline inovasi dan penyusunan roadmap inovasi daerah. | | 26 | Meningkatnya nilai indeks inovasi instansi pemerintah | Indeks inovasi |
| 28 | Evaluasi dan pemetaan standar pelayanan di seluruh unit layanan publik. | | 27 | Meningkatnya nilai indeks pelayanan publik | Indeks pelayanan Publik |
| 29 | Pemetaan kelemahan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penyusunan rencana aksi perbaikan. | | 28 | Meningkatnya nilai indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan | Indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan |
| | | 11 | Meningkatnya nilai indeks Stabilitas Keamanan Daerah | | Indeks Stabilitas Keamanan Daerah |
| 30 | Pemetaan wilayah rawan kriminalitas dan kekerasan serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. | | 29 | Menurunnya persentase Angka Kriminalitas dan Tindak Kekerasan (pencurian, penganiayaan, narkoba, dll.) per 10.000 penduduk | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk |
| 31 | Pemetaan dan analisis akar penyebab gangguan ketertiban umum serta penguatan koordinasi antar aparat keamanan dan pemerintah daerah. | | 30 | Menurunnya persentase Gangguan Ketertiban Umum (keributan, tawuran, demonstrasi anarkis, dan gangguan sosial lainnya) setiap tahunnya | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun |
| | | 12 | Meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Masyarakat | | Indeks Ketahanan Masyarakat |
| 32 | Pendataan dan pemetaan kebutuhan layanan keagamaan di seluruh wilayah serta penguatan koordinasi antar lembaga keagamaan dan pemerintah daerah. | | 31 | Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan keagamaan | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keagamaan |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR |
|----|---|----------------|---|--|--|
| 33 | Pendataan dan pemetaan kondisi kerukunan umat beragama serta identifikasi potensi konflik dan kelompok rentan. | | 32 | Meningkatnya nilai indeks kerukunan umat beragama | Indeks kerukunan umat beragama |
| 34 | Pendataan dan inventarisasi potensi kebudayaan daerah serta penguatan koordinasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan pelaku seni. | | 33 | Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks Pembangunan Kebudayaan |
| | | 13 | Meningkatnya Nilai Indeks Layanan Infrastruktur | | Indeks Layanan Infrastruktur |
| 35 | Inventarisasi dan pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh untuk menentukan prioritas perbaikan dan pemeliharaan. | | 34 | Meningkatnya proporsi jalan kondisi mantap | Proporsi jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan kabupaten. |
| 36 | Pendataan dan pemetaan cakupan serta kondisi sumber dan jaringan air bersih di seluruh wilayah. | | 35 | Meningkatnya persentase akses air bersih layak rumah tangga | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak |
| | Pendataan dan pemetaan wilayah blankspot secara detail untuk menentukan prioritas pembangunan jaringan. | | 36 | Meningkatnya persentase cakupan wilayah blankspot oleh jaringan internet 4G atau lebih | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih |
| | | 14 | Meningkatnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| 37 | Pendataan dan pemetaan risiko bencana di seluruh wilayah secara detail serta penguatan koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana. | | 37 | Menurunnya Nilai Indeks Resiko Bencana | Indeks Resiko Bencana |
| 38 | Pendataan dan pemetaan sumber emisi gas rumah kaca (GRK) utama di wilayah serta penyusunan baseline emisi. | | 38 | Menurunnya nilai intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 16,55 persen pada tahun 2029 | Penurunan Intensitas Emisi GRK |
| | | 15 | Meningkatnya Nilai Indeks Daya Saing Daerah | | Indeks Daya Saing Daerah |
| 39 | Pendataan potensi investasi daerah dan identifikasi hambatan utama dalam proses investasi. | | 39 | Meningkatnya persentase nilai realisasi investasi daerah | Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 | TUJUAN/SASARAN | | | INDIKATOR |
|----|--|----------------|----|--|---|
| 40 | Pendataan dan pemetaan kawasan produktif serta jaringan transportasi lokal yang ada untuk identifikasi gap konektivitas. | | 40 | Meningkatnya persentase kawasan produktif yang terkoneksi dengan sistem transportasi lokal | Persentase kawasan produktif yang terkoneksi dengan sistem transportasi lokal |
| 41 | Pendataan UMKM dan tingkat pemanfaatan teknologi digital saat ini serta identifikasi kendala utama dalam adopsi digital. | | 41 | Meningkatnya Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital dalam operasional bisnis (produksi, promosi, layanan pelanggan) sebesar 28,70 persen pada tahun 2029 | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital |
| 42 | Pendataan potensi dan pelaku ekonomi kreatif serta identifikasi kendala pengembangan sektor ini di daerah. | | 42 | Meningkatnya proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB | proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB |
| | | | | | |

Sumber : RPJMD Kab. Maros 2025 – 2029.

4.2.5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Berikut gambaran strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025.

Tabel 4.10
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Penataan dan penguatan layanan kesehatan dasar melalui revitalisasi Puskesmas dan optimalisasi Posyandu | Meningkatnya Indeks Kesehatan | Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan dasar, memperluas akses layanan kesehatan reproduksi, gizi, dan ibu-anak, melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit, menguatkan upaya promotif dan preventif berbasis masyarakat, memperluas akses jaminan kesehatan yang inklusif, serta memperkuat tata kelola sistem kesehatan yang adaptif dan kolaboratif. | Penguatan Layanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas dan Merata |
| | | | | Perluasan Layanan Kesehatan Reproduksi, Gizi, dan Ibu-Anak |
| | | | | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular |
| | | | | Penguatan Upaya Promotif dan Preventif Berbasis Masyarakat |
| | | | | Peningkatan Akses Terhadap Jaminan Kesehatan yang Inklusif |
| | | | | Penguatan Tata Kelola Sistem Kesehatan yang Adaptif dan Kolaboratif |
| 2 | Penataan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar serta pendataan anak tidak sekolah. | Meningkatnya Indeks Pendidikan | Memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, menguatkan pendidikan anak usia dini berkualitas, mengimplementasikan transformasi digital dalam pendidikan, memperkuat peran keluarga dan komunitas, serta menjamin kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pendidikan. | Perluasan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif |
| | | | | Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan |
| | | | | Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berkualitas |
| | | | | Transformasi Digital dalam Pendidikan |
| | | | | Penguatan Peran Keluarga dan Komunitas dalam Pendidikan |
| | | | | Penjaminan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pendidikan |
| 3 | Pemetaan potensi ekonomi lokal dan basis rumah tangga miskin untuk perumusan strategi | Meningkatnya Indeks pengeluaran per kapita masyarakat | Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha dan lapangan kerja, | Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kewirausahaan Masyarakat |
| | | | | Perluasan Kesempatan Kerja dan Akses Terhadap Pasar Kerja Berkualitas |
| | | | | Peningkatan Daya Beli melalui Kesejahteraan Sosial Inklusif |
| | | | | Penguatan Ekonomi Rumah Tangga dan Usaha Mikro |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|--|---|
| | peningkatan pendapatan. | | memperluas akses permodalan dan pasar, meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan, serta memperkuat perlindungan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat. | Penguatan ketahanan pangan lokal dan efisiensi rantai distribusi bahan pokok. Peningkatan Akses dan Literasi Keuangan Keluarga |
| 4 | Penataan kelembagaan dan sistem pendataan gizi balita serta pemetaan keluarga risiko stunting. | | | |
| | | Menurunnya Angka Prevalensi Gizi Buruk atau Stunting | Meningkatkan akses dan kualitas layanan gizi bagi ibu dan anak, mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat dan gizi seimbang, memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak terpadu, meningkatkan ketersediaan pangan bergizi, serta melibatkan keluarga dan komunitas dalam pencegahan stunting. | Intervensi Gizi Spesifik bagi Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita |
| | | | | Intervensi Gizi Sensitif Melalui Lintas Sektor |
| | | | | Penguatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | | | Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Posyandu Terintegrasi |
| | | | | Edukasi Gizi dan Pengasuhan bagi Keluarga |
| | | | | Penargetan dan Pemantauan Keluarga Risiko Stunting secara Inklusif |
| 5 | Pemetaan tingkat literasi masyarakat dan penataan kelembagaan literasi berbasis komunitas. | | | |
| | | Meningkatnya persentase Tingkat Kegemaran Membaca | Meningkatkan akses sarana literasi dan ruang baca publik, Mendorong program literasi berbasis komunitas dan keluarga, Memperluas pelatihan literasi digital, Mengintegrasikan kegiatan literasi dalam pendidikan formal dan nonformal, Memperkuat kolaborasi dan kampanye budaya baca. | Peningkatan Akses terhadap Fasilitas Literasi yang Inklusif |
| | | | | Penguatan Gerakan Literasi di Masyarakat |
| | | | | Peningkatan Literasi Digital secara Merata |
| | | | | Inovasi Program dan Layanan Literasi Berbasis Kearifan Lokal |
| | | | | Integrasi Literasi dalam Pendidikan Formal dan Nonformal |
| | | | | Dukungan Regulasi dan Pembiayaan Literasi |
| 6 | | | | |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|---|---|--|
| | Pemetaan kompetensi lulusan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja sektor produktif di daerah. | Meningkatnya persentase lulusan pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus | Meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, Memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, Menyelenggarakan pelatihan kerja dan magang terintegrasi, Mengembangkan layanan penyaluran kerja dan kewirausahaan bagi lulusan. | Penyesuaian Kurikulum Vokasi dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri Penguatan Sistem Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Sertifikasi Kompetensi Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Vokasi dan Tenaga Pendidik Penguatan Layanan Penelusuran Lulusan dan Bursa Kerja Khusus Mendorong Wirausaha Muda Produktif dari Lulusan Vokasi Pemetaan dan Penguatan Sektor Produktif Penyerapan Tenaga Kerja Vokasi |
| 7 | Pemetaan kapasitas dan kesiapan perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG | Meningkatnya Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam PPRG, mendorong integrasi perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, menyediakan pendampingan teknis dan monitoring pelaksanaan secara berkelanjutan. | Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Gender di Daerah Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Daerah dalam PPRG Integrasi Gender dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Monitoring, Evaluasi, dan Insentif Penerapan PPRG Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Non-Pemerintah Digitalisasi dan Inovasi dalam Penerapan PPRG |
| 8 | Pemetaan kebutuhan dan hambatan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia subur. | Meningkatnya rasio akseptor KB | Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan reproduksi, memperluas jangkauan layanan ke wilayah terpencil, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, memperkuat peran tenaga kesehatan dan | Penguatan Layanan Kesehatan Reproduksi yang Terjangkau dan Inklusif Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Tenaga Kesehatan Edukasi dan Literasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Gender dan Hak Optimalisasi layanan kesehatan reproduksi keliling Kolaborasi Lintas Sektor dan Komunitas |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|---|--|---|
| | | | kader di tingkat komunitas. | |
| 9 | Pemetaan potensi, minat, dan tingkat keterlibatan pemuda dalam organisasi dan pembangunan daerah. | Meningkatnya persentase partisipasi aktif pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan | Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda, memperluas ruang partisipasi pemuda dalam organisasi dan forum pembangunan, mendorong pelibatan pemuda dalam perumusan kebijakan publik, memperkuat dukungan terhadap komunitas dan jejaring kepemudaan. | Penguatan Ruang Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan dan Organisasi Kepemudaan |
| | | | | Dukungan terhadap Ekosistem Organisasi dan Komunitas Pemuda |
| | | | | Digitalisasi dan Inovasi dalam Partisipasi Pemuda |
| | | | | Kolaborasi Lintas Sektor untuk Afirmasi Peran Pemuda |
| | | | | Pemantauan, Evaluasi, dan Pengakuan Peran Aktif Pemuda |
| 10 | Pemetaan potensi wirausaha pemuda dan hambatan yang dihadapi. | Meningkatnya Persentase pemuda yang menjadi wirausahawan baru | Meningkatkan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, memperluas akses pembiayaan dan pendampingan usaha, mengembangkan inkubasi bisnis berbasis potensi lokal, memperkuat jejaring dan promosi wirausaha muda. | Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda yang Inklusif dan Berkelanjutan |
| | | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Kewirausahaan Pemuda |
| | | | | Akses terhadap Permodalan dan Pendanaan Inklusif |
| | | | | Inkubasi Bisnis dan Akselerator Wirausaha Pemuda |
| | | | | Digitalisasi dan Transformasi Bisnis Pemuda |
| | | | | Peningkatan Akses Pasar dan Jaringan Usaha |
| 11 | Pemetaan kondisi pemenuhan hak anak dan identifikasi hambatan utama. | Meningkatnya Indeks Pemenuhan hak anak | Meningkatkan layanan dasar bagi anak, memperkuat perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, mendorong partisipasi anak dalam pembangunan, memperkuat peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam | Penguatan Sistem Perlindungan Anak yang Komprehensif dan Terintegrasi |
| | | | | Peningkatan Akses Anak terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Gizi yang Berkualitas |
| | | | | Pengembangan Program Perlindungan Anak dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi |
| | | | | Penguatan Peran Keluarga dan Komunitas dalam Pemenuhan Hak Anak |
| | | | | Pelibatan Anak dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan |
| | | | | Peningkatan Sistem Data dan Monitoring Pemenuhan Hak Anak |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|---|--|
| | | | pemenuhan hak anak. | |
| 12 | Pemetaan kelompok masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan. | Meningkatnya persentase cakupan masyarakat yang menjadi peserta aktif jaminan kesehatan | Memperluas sosialisasi dan edukasi tentang jaminan kesehatan, meningkatkan kemudahan akses pendaftaran peserta, memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, dan memastikan pelayanan jaminan kesehatan yang berkualitas dan inklusif. | Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat tentang Jaminan Kesehatan |
| | | | | Perluasan Akses dan Kemudahan Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan |
| | | | | Penguatan Sinergi Antar Lembaga Pemerintah dan Pemangku Kepentingan |
| | | | | Penyesuaian dan Penyempurnaan Kebijakan Subsidi dan Bantuan Pembiayaan |
| | | | | Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Jaminan Kesehatan |
| | | | | Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Cakupan Peserta Secara Berkala |
| | | | | |
| 13 | Pemetaan pekerja yang belum tercakup dalam jaminan ketenagakerjaan. | Meningkatnya persentase cakupan pekerja yang menjadi peserta aktif jaminan ketenagakerjaan | Meningkatkan sosialisasi manfaat jaminan ketenagakerjaan, mempermudah proses pendaftaran dan administrasi peserta, memperkuat kolaborasi dengan sektor usaha dan pekerja, serta memastikan layanan yang responsif dan terpercaya bagi peserta. | Sosialisasi dan Edukasi Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial bagi Pekerja |
| | | | | Perluasan Akses dan Kemudahan Pendaftaran Peserta Jaminan Ketenagakerjaan |
| | | | | Penguatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Serikat Pekerja |
| | | | | Pengembangan Skema Insentif dan Regulasi yang Mendukung Kepesertaan |
| | | | | Perluasan jaringan layanan BPJS Ketenagakerjaan agar mudah dijangkau oleh pekerja. |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Cakupan Peserta secara Berkala |
| | | | | |
| 14 | Pemetaan potensi subsektor pertanian dan rantai nilai unggulan daerah. | Meningkatnya persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, mengembangkan teknologi tepat guna dan inovasi pertanian, memperluas akses pasar dan pengolahan hasil, memperkuat kelembagaan petani dan kemitraan usaha, serta meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian. | Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Modern |
| | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian Berbasis IPTEK dan Inovasi |
| | | | | Penguatan Sistem Informasi dan Data Pertanian |
| | | | | Pengembangan Produk Pertanian Bernilai Tambah Berbasis Inovasi |
| | | | | Fasilitasi Akses Pembiayaan untuk Investasi Teknologi Pertanian |
| | | | | Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan untuk Inovasi Pertanian |
| | | | | |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|---|--|--|
| 15 | Pemetaan daya tarik wisata unggulan dan penyusunan masterplan pengembangan pariwisata daerah. | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah | Mengembangkan produk dan destinasi pariwisata unggulan, meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pariwisata, memperkuat promosi dan pemasaran pariwisata, memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku pariwisata, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk pengelolaan pariwisata berkelanjutan. | Pengembangan Produk Pariwisata Inovatif dan Berkelanjutan |
| | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis IPTEK |
| | | | | Digitalisasi Promosi dan Layanan Pariwisata |
| | | | | Peningkatan Infrastruktur Pariwisata Berbasis Teknologi |
| | | | | Penguatan Jejaring dan Kemitraan Inovatif |
| | | | | Insentif dan Regulasi Pendukung Pengembangan Pariwisata Berbasis Inovasi |
| 16 | Pemetaan subsektor jasa potensial dan penyusunan roadmap pengembangan sektor jasa. | Meningkatnya persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | Mengembangkan layanan jasa yang berkualitas dan inovatif, memperluas akses pasar dan jaringan bisnis jasa, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor jasa, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam layanan jasa, serta memperkuat kemitraan antara pelaku usaha jasa dan pemerintah daerah. | Digitalisasi Layanan Jasa |
| | | | | Pengembangan Inovasi Produk dan Layanan Jasa |
| | | | | Peningkatan Kapasitas SDM di Sektor Jasa |
| | | | | Penguatan Infrastruktur Digital dan Fisik |
| | | | | Peningkatan Akses Pembiayaan dan Investasi |
| | | | | Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung |
| 17 | Pemetaan potensi bahan baku lokal dan kawasan industri pengolahan strategis. | Meningkatnya persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB daerah | Meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri pengolahan, memperluas akses pasar dan investasi, mengembangkan teknologi dan inovasi industri, memperkuat fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta membangun kemitraan strategis antara | Penerapan Teknologi Modern dan Inovasi Produksi |
| | | | | Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Industri |
| | | | | Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Investasi |
| | | | | Pengembangan Infrastruktur Industri dan Rantai Pasok |
| | | | | Digitalisasi Proses Produksi dan Pemasaran |
| | | | | Penguatan Regulasi dan Monitoring Berbasis Data |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|---|--|---|
| | | | industri, pemerintah, dan lembaga riset. | |
| 18 | Pemetaan kawasan potensial dan penyusunan rencana induk pengembangan real estate (perumahan, komersial, dan industri). | Meningkatnya persentase kontribusi real estate terhadap PDRB daerah | Mendorong pengembangan properti yang terencana dan berkelanjutan, mempermudah perizinan dan investasi di sektor real estate, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung, memperkuat regulasi dan pengawasan pembangunan, serta memperluas akses pembiayaan properti bagi masyarakat dan pelaku usaha. | Penataan ruang yang kondusif untuk pengembangan kawasan perumahan, komersial, dan kawasan industri berbasis tata ruang yang terintegrasi. |
| | | | | Insentif Investasi dan Kemitraan Strategis |
| | | | | Penguatan Infrastruktur Pendukung Real Estate |
| | | | | Peningkatan Kualitas dan Standarisasi Produk Real Estate |
| | | | | Digitalisasi Layanan dan Promosi Real Estate |
| | | | | Penguatan Regulasi dan Monitoring Perkembangan Real Estate |
| 19 | Penguatan kelembagaan dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta pemetaan komoditas penyumbang inflasi. | Terkendalinya laju inflasi daerah | Mengoptimalkan pengelolaan pasokan barang kebutuhan pokok, memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian harga, mendorong peningkatan produksi lokal, meningkatkan efisiensi distribusi barang, serta memantau dan mengantisipasi faktor penyebab inflasi secara berkala. | Penguatan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok |
| | | | | Pengembangan Sistem Informasi Harga dan Pasar |
| | | | | Penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) |
| | | | | Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Daerah |
| | | | | Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar dan Subsidi Terbatas |
| | | | | Penguatan Edukasi dan Komunikasi Publik |
| 20 | Pemutakhiran data kemiskinan dan identifikasi kelompok rentan berbasis by name by address untuk penargetan program yang tepat. | Menurunnya persentase masyarakat miskin | Meningkatkan akses dan kualitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, memperluas lapangan kerja dan peluang usaha, memperkuat perlindungan sosial, | Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar |
| | | | | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rentan dan Miskin |
| | | | | Penguatan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran |
| | | | | Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Wilayah |
| | | | | Integrasi dan Sinergi Program Penanggulangan Kemiskinan |
| | | | | Penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Aksesibilitas Wilayah |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|---|---|
| | | | meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan. | |
| 21 | Pemetaan ketimpangan wilayah dan kelompok sosial berbasis data spasial dan sosial ekonomi. | Menurunnya rasio gini | Mendorong pemerataan pendapatan melalui pengembangan ekonomi inklusif, memperkuat program pemberdayaan masyarakat rentan, meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial. | Pemerataan Akses terhadap Pendidikan dan Keterampilan Berkualitas |
| | | | | Perluasan Akses terhadap Lapangan Kerja yang Produktif dan Layak |
| | | | | Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Subsidi yang Bersifat Redistributif |
| | | | | Pemerataan Akses terhadap Modal dan Aset Produktif |
| | | | | Peningkatan investasi infrastruktur dan ekonomi di wilayah desa, pesisir, dan kawasan terluar |
| | | | | Penguatan Kebijakan Upah dan Insentif Kesejahteraan Pekerja Rendah |
| 22 | Pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi angkatan kerja secara sektoral dan kewilayahan. | Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka | Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar, memperluas peluang kerja melalui pengembangan sektor usaha dan industri, mendorong kewirausahaan dan usaha mikro kecil menengah, serta memperkuat fasilitasi penyaluran tenaga kerja dan informasi pasar kerja. | Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja |
| | | | | Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Inklusif |
| | | | | Pengembangan Klaster Usaha dan Ekonomi Lokal |
| | | | | Mendorong Investasi Sektor Padat Karya Produktif |
| | | | | Peningkatan Akses Informasi Pasar Kerja dan Mobilitas Tenaga Kerja |
| | | | | Perluasan Program Padat Karya Berbasis Komunitas dan Wilayah |
| 23 | Pemetaan potensi ekonomi lokal dan produktivitas per sektor untuk mendorong pertumbuhan berbasis | Meningkatnya persentase pendapatan per kapita | Mendorong peningkatan produktivitas sektor ekonomi utama, memperluas akses pasar dan investasi, | Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor-Sektor Unggulan |
| | | | | Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Inovasi |
| | | | | Diversifikasi Ekonomi Lokal untuk Meningkatkan Sumber Pendapatan |
| | | | | Peningkatan Nilai Tambah Produk Daerah Melalui Hilirisasi |
| | | | | Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|--|---|
| | keunggulan wilayah. | | meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mengembangkan kewirausahaan, serta memperkuat dukungan infrastruktur dan layanan pendukung ekonomi. | Mendorong Investasi Produktif dan Inklusif |
| 24 | Pemetaan dan penataan infrastruktur TIK serta integrasi data lintas perangkat daerah. | | | |
| | | Meningkatnya nilai indeks sistem pemerintahan berbasis digital | Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang handal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital, menerapkan layanan pemerintahan elektronik yang transparan dan efisien, memperkuat keamanan data dan sistem, serta mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah dalam transformasi digital. | Peningkatan cakupan dan kualitas jaringan internet di seluruh instansi pemerintahan daerah, termasuk kecamatan dan desa. |
| | | | | Integrasi dan Interoperabilitas Layanan Digital Pemerintahan |
| | | | | Penyusunan kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan SPBE (standar keamanan informasi, standar layanan digital, SOP pelayanan elektronik). |
| | | | | Digitalisasi Proses Administrasi dan Layanan Publik |
| | | | | Peningkatan Literasi Digital dan Kapasitas ASN |
| 25 | Pemetaan dan pembenahan kebijakan manajemen ASN, termasuk sistem rekrutmen dan mutasi. | Meningkatnya nilai indeks sistem merit | Menguatkan penerapan prinsip merit dalam manajemen SDM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen dan promosi, mengembangkan sistem penilaian kinerja yang objektif, memperkuat kapasitas dan kompetensi aparatur, serta mendorong budaya kerja profesional dan berintegritas. | Penyusunan dan Pembaharuan dokumen analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) untuk seluruh unit kerja. |
| | | | | Penyelenggaraan seleksi ASN secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. |
| | | | | Pengembangan Kompetensi dan Karier Berbasis Kinerja |
| | | | | Promosi dan Mutasi Secara Adil, Transparan, dan Tanpa Intervensi |
| | | | | Manajemen Kinerja ASN yang Terukur dan Akuntabel |
| | | | | Perlindungan terhadap ASN dan Penguatan Sistem Disiplin |
| 26 | Identifikasi baseline inovasi | Meningkatnya nilai indeks | Mendorong budaya inovasi | Penerapan dan Penguatan Budaya Inovasi di Lingkungan Instansi Pemerintah |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|--|--|---|
| | dan penyusunan roadmap inovasi daerah. | inovasi instansi pemerintah | dan kreativitas di lingkungan pemerintah, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan, memperkuat sistem manajemen inovasi, memfasilitasi kolaborasi antar instansi dan dengan pihak eksternal, serta memberikan penghargaan dan insentif bagi inovasi yang berdampak positif. | Penguatan Kapasitas SDM Pemerintah dalam Berinovasi |
| | | | | Pembentukan dan Penguatan Laboratorium Inovasi Daerah |
| | | | | Digitalisasi Layanan dan Proses Kerja Pemerintah |
| | | | | Sistematisasi Penilaian dan Replikasi Inovasi |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inovasi |
| 27 | Evaluasi dan pemetaan standar pelayanan di seluruh unit layanan publik. | Meningkatnya nilai indeks pelayanan publik | Meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan publik, memperluas akses layanan yang inklusif dan ramah, menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi, memperkuat kompetensi dan integritas petugas pelayanan, serta rutin melakukan evaluasi dan perbaikan layanan berdasarkan masukan masyarakat. | Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Elektronik |
| | | | | Implementasi One-Stop Service Berbasis Digital yang memayungi seluruh layanan perizinan, administrasi, dan pengaduan. |
| | | | | Peningkatan Kapasitas ASN dalam Pelayanan Digital dan Etika Layanan |
| | | | | Penguatan Infrastruktur TIK dan Keamanan Data Pelayanan |
| | | | | Optimalisasi Kanal Pengaduan dan Umpan Balik Masyarakat |
| | | | | Pemantauan, Evaluasi, dan Perbaikan Layanan Secara Berkala |
| 28 | Evaluasi dan pemetaan standar pelayanan di seluruh unit layanan publik. | Meningkatnya nilai indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan | Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran yang transparan, meningkatkan kapasitas pengelolaan kinerja dan keuangan, menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif, memperbaiki pelaporan dan evaluasi kinerja, | Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja |
| | | | | Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan |
| | | | | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Manajemen Kinerja dan Keuangan |
| | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berbasis Data |
| | | | | Penyelenggaraan pelatihan dan asistensi teknis terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). |
| | | | | Penguatan Fungsi Pengawasan Internal |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|---|---|--|
| | | | serta mendorong budaya akuntabilitas dan tata kelola yang baik di seluruh perangkat daerah. | |
| 29 | Pemetaan wilayah rawan kriminalitas dan kekerasan serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. | Menurunnya persentase Angka Kriminalitas dan Tindak Kekerasan (pencurian, penganiayaan, narkoba, dll.) | Memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas aparat keamanan dan penegakan hukum, memperkuat kerjasama antar lembaga terkait, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk pengawasan, serta mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak kekerasan. | Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Keamanan dan Penegak Hukum |
| | | | | Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Pencegahan Kejahatan Berbasis Teknologi |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) |
| | | | | Peningkatan Edukasi Hukum dan Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Kekerasan |
| | | | | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rentan untuk Mencegah Kriminalitas |
| | | | | Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Kriminalitas dan Kekerasan |
| 30 | Pemetaan dan analisis akar penyebab gangguan ketertiban umum serta penguatan koordinasi antar aparat keamanan dan pemerintah daerah. | Menurunnya persentase Gangguan Ketertiban Umum (keributan, tawuran, demonstrasi anarkis, dan gangguan sosial lainnya) | Meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan di masyarakat, memperkuat peran aparat keamanan dan kepolisian, mengembangkan program dialog dan mediasi antar kelompok, memberdayakan komunitas untuk mencegah konflik, serta meningkatkan kesadaran hukum dan budaya damai melalui edukasi. | Penguatan Peran Aparat Penegak Ketertiban dan Satpol PP |
| | | | | Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) |
| | | | | Pendidikan Karakter dan Budaya Damai di Lingkungan Sekolah dan Pemuda |
| | | | | Fasilitasi Ruang Ekspresi Aspirasi Masyarakat Secara Tertib dan Demokratis |
| | | | | Peningkatan Penataan dan Pengawasan Ruang Publik |
| | | | | Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Konflik Sosial |
| 31 | Pendataan dan pemetaan kebutuhan layanan keagamaan di | Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatkan kualitas fasilitas dan sarana ibadah, | Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan yang Memadai |
| | | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Layanan Keagamaan |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|---|--|---|
| | seluruh wilayah serta penguatan koordinasi antar lembaga keagamaan dan pemerintah daerah. | layanan Keagamaan | memperluas akses layanan keagamaan yang inklusif, meningkatkan kapasitas pengelola dan pelayan keagamaan, mengembangkan program pembinaan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. | Pengembangan Program Keagamaan yang Inklusif dan Multikultural |
| | | | | Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Layanan Keagamaan |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Kualitas Layanan Keagamaan |
| 32 | Pendataan dan pemetaan kondisi kerukunan umat beragama serta identifikasi potensi konflik dan kelompok rentan. | Meningkatnya nilai indeks kerukunan umat beragama | Mendorong dialog antar umat beragama secara rutin, memperkuat kegiatan bersama lintas agama, meningkatkan pendidikan toleransi dan nilai-nilai kebersamaan, memperkuat peran tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga kerukunan, serta membangun kebijakan yang mendukung harmoni sosial dan penghormatan antar pemeluk agama. | Pengembangan Forum Dialog Antar umat Beragama |
| | | | | Pendidikan dan Penyuluhan Toleransi Beragama |
| | | | | Penguatan Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Kebebasan Beragama |
| | | | | Pemberdayaan Tokoh dan Organisasi Keagamaan sebagai Agen Kerukunan |
| | | | | Pelaksanaan Kegiatan Lintas Agama yang Inklusif |
| 33 | Pendataan dan inventarisasi potensi kebudayaan daerah serta penguatan koordinasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan pelaku seni. | Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan | Mengembangkan pelestarian dan promosi kebudayaan lokal, meningkatkan fasilitas dan sarana kebudayaan, memperkuat pendidikan dan pelatihan bidang kebudayaan, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan | Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Lokal |
| | | | | Penguatan Pendidikan dan Penyuluhan Kebudayaan di Masyarakat |
| | | | | Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Kebudayaan |
| | | | | Pemberdayaan Pelaku Seni dan Budaya Lokal |
| | | | | Penguatan Sinergi Antar Lembaga Kebudayaan dan Pemerintah |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Indeks Pembangunan Kebudayaan |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|---|---|--|
| | | | kebudayaan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku seni budaya. | |
| 34 | Inventarisasi dan pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh untuk menentukan prioritas perbaikan dan pemeliharaan. | Meningkatnya proporsi jalan kondisi mantap | Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan standar teknis yang baik, memperkuat pengelolaan dan pendanaan infrastruktur jalan, mempercepat perbaikan jalan rusak, serta mengoptimalkan koordinasi antar dinas terkait untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan jaringan jalan. | Perencanaan dan Prioritisasi Pembangunan Jalan Berdasarkan Kebutuhan Wilayah |
| | | | | Peningkatan Kualitas dan Standar Teknis Jalan |
| | | | | Integrasi dan Sinergi Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Sistem Transportasi dan Kawasan |
| | | | | Pengembangan Sistem Pemeliharaan Jalan yang Adaptif dan Berkelanjutan |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Kualitas Jalan Secara Berkala |
| 35 | Pendataan dan pemetaan cakupan serta kondisi sumber dan jaringan air bersih di seluruh wilayah. | Meningkatnya persentase akses air bersih layak rumah tangga | Memperluas pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih, meningkatkan kualitas sumber air dan sistem distribusi, memperkuat pengelolaan dan pemeliharaan sarana air bersih, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air, serta memastikan akses air bersih merata bagi seluruh rumah tangga. | Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Air Bersih Berbasis Kebutuhan Wilayah |
| | | | | Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Bersih |
| | | | | Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Ramah Lingkungan |
| | | | | Penguatan Kapasitas Pengelolaan dan Operasional Sistem Air Bersih |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengawasan |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Akses dan Kualitas Air Bersih secara Berkelanjutan |
| 36 | Pendataan dan pemetaan wilayah blankspot secara detail untuk menentukan | Meningkatnya persentase cakupan wilayah blankspot oleh jaringan | Mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di wilayah | Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Blankspot Secara Terperinci |
| | | | | Pengembangan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Terpencil dan Blankspot |
| | | | | Kolaborasi dengan Operator Telekomunikasi dan Stakeholder Terkait |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|--|---|--|
| | prioritas pembangunan jaringan. | internet 4G atau lebih | blankspot, mendorong kerjasama dengan penyedia layanan dan operator, meningkatkan investasi dan pendanaan sektor telekomunikasi, serta melakukan pemetaan dan monitoring cakupan jaringan secara berkala untuk memastikan akses internet merata. | Pemanfaatan Teknologi Inovatif dan Adaptif Sesuai Kondisi Geografis Penguatan Regulasi dan Insentif untuk Mempercepat Ekspansi Jaringan Monitoring dan Evaluasi Cakupan dan Kualitas Jaringan secara Berkala |
| 37 | Pendataan dan pemetaan risiko bencana di seluruh wilayah secara detail serta penguatan koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana. | Menurunnya Nilai Indeks Risiko Bencana | Memperkuat kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, meningkatkan sistem peringatan dini dan respons cepat, mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, memperkuat edukasi dan kesadaran masyarakat, serta memperbaiki infrastruktur yang tahan bencana. | Pemetaan dan Analisis Risiko Bencana Secara Komprehensif |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Tahan Bencana |
| | | | | Pengembangan Sistem Peringatan Dini dan Respons Cepat Bencana |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi dan Adaptasi Bencana |
| | | | | Integrasi Kebijakan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Indeks Risiko Bencana |
| 38 | Pendataan dan pemetaan sumber emisi gas rumah kaca (GRK) utama di wilayah serta penyusunan baseline emisi. | Menurunnya nilai intensitas emisi gas rumah kaca | Mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, memperkuat pengelolaan limbah dan penghijauan, mengembangkan transportasi ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran dan | Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi |
| | | | | Penerapan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan |
| | | | | Pengelolaan Limbah/sampah Terpadu dan Ramah Lingkungan |
| | | | | Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Hijau serta Penghijauan Kota |
| | | | | Penguatan Regulasi dan Insentif Pengurangan Emisi |
| | | | | Monitoring dan Pelaporan Emisi Secara Terintegrasi dan Berkala |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|---|---|---|
| | | | partisipasi masyarakat dalam pengurangan emisi. | |
| 39 | Pendataan potensi investasi daerah dan identifikasi hambatan utama dalam proses investasi. | Meningkatnya persentase nilai realisasi investasi daerah | Meningkatkan iklim investasi dengan penyederhanaan perizinan, memperkuat promosi dan fasilitasi investasi, memperbaiki infrastruktur pendukung, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mendorong kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor. | Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif dan Transparan |
| | | | | Promosi dan Fasilitasi Investasi di Sektor Unggulan Daerah |
| | | | | Pengembangan Infrastruktur Pendukung Investasi |
| | | | | Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Investasi |
| | | | | Peningkatan Kolaborasi dengan Stakeholder dan Mitra Strategis |
| | | | | Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Investasi secara Berkelanjutan |
| 40 | Pendataan dan pemetaan kawasan produktif serta jaringan transportasi lokal yang ada untuk identifikasi gap konektivitas. | Meningkatnya persentase kawasan produktif yang terkoneksi dengan sistem transportasi lokal | Mempercepat pembangunan dan perbaikan jaringan transportasi lokal, mengintegrasikan sistem transportasi dengan kawasan produktif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang serta tenaga kerja, memperkuat koordinasi antar sektor terkait, serta mendorong penggunaan moda transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. | Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Terintegrasi |
| | | | | Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Produktif |
| | | | | Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Sistem Transportasi Lokal |
| | | | | Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Transportasi Lokal |
| | | | | Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lokal dan Swasta |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sistem Transportasi Lokal |
| 41 | Pendataan UMKM dan tingkat pemanfaatan teknologi digital saat ini serta identifikasi kendala utama dalam adopsi digital. | Meningkatnya Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital dalam operasional bisnis (produksi, promosi, layanan pelanggan) | Meningkatkan akses dan literasi digital bagi UMKM, menyediakan pelatihan penggunaan platform digital, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, memfasilitasi | Pengembangan Kapasitas SDM UMKM dalam Pemanfaatan Teknologi Digital |
| | | | | Peningkatan Akses Infrastruktur Digital di Wilayah UMKM |
| | | | | Fasilitasi Akses dan Integrasi UMKM ke Berbagai Platform Digital |
| | | | | Pendampingan dan Penguatan Ekosistem Digital UMKM Berbasis Kolaborasi Lokal |
| | | | | Promosi dan Kampanye Kesadaran Pentingnya Digitalisasi UMKM |
| | | | | Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Kebijakan Berbasis Data |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025 | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|---|---|
| | | | kemitraan dengan penyedia teknologi, serta mendorong inovasi digital dalam produksi, promosi, dan layanan pelanggan UMKM. | |
| 42 | Pendataan potensi dan pelaku ekonomi kreatif serta identifikasi kendala pengembangan sektor ini di daerah. | Meningkatnya proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB | Mendorong pengembangan produk dan inovasi ekonomi kreatif, memperkuat pelatihan dan kapasitas pelaku kreatif, meningkatkan akses pembiayaan dan pasar, membangun ekosistem yang mendukung kolaborasi dan kreativitas, serta memperkuat promosi ekonomi kreatif di tingkat lokal dan nasional. | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif |
| | | | | Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Ekonomi Kreatif |
| | | | | Fasilitasi Akses Pasar dan Promosi Produk Kreatif |
| | | | | Pengembangan Ekosistem Inovasi dan Kolaborasi |
| | | | | Peningkatan Dukungan Kebijakan dan Pendanaan untuk Ekonomi Kreatif |
| | | | | Pemantauan dan Evaluasi Berkala terhadap Kontribusi Ekonomi Kreatif |

4.3.PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2025, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|-------------------|---|--|------------|----------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak pada Pelayanan dan Berbasis IPTEK | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 15,074,555,000 | | | Seluruh Perangkat Daerah (Setda/Setwan/ Inspektorat/Badan/Dinas/ Kecamatan) |
| | | 3 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan | 100 Persen | 4,587,500,000 | | 3,308,388,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 4 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan | 100 Persen | 4,595,000,000 | | 1,167,587,000 | |
| | | 6 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan | 95 Persen | 13,438,000,000 | | 8,309,470,500 | SEKRETARIAT DPRD |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--|--|------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100 Persen | 1,950,000,000 | 100 Persen | 1,110,961,750 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANAGAN DAERAH |
| | | 8 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | 100 Persen | 408,000,000 | 100 Persen | 166,906,600 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANAGAN DAERAH |
| | | 9 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyerapan anggaran sesuai target | 80 Persen | 166,361,209,105 | | 174,078,094,450 | BADAN KEUANGAN |
| | | 10 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah | 100 Persen | 826,352,498 | | 15,568,945,314 | DAN ASET DAERAH |
| | | 11 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan | 100 Persen | 1,602,500,000 | | 1,076,191,400 | BADAN PENDAPATAN |
| | | | | | | | | | DAERAH |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|---|--|------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 12 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian | 100 Persen | 3,762,479,000 | | 1,483,427,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | 13 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100 Persen | 3,992,297,000 | | 549,721,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | 14 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. | 100 Persen | 900,000,000 | 75 persen | 294,240,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | 15 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Pelanggaran Pegawai | 015 Persen | 5,954,779,500 | 0 | 1,944,974,000 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | 16 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persentase tindak lanjut temuan | 66 Persen | 1,457,657,000 | 0 | 911,855,000 | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|---|--|------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 17 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE | 65 Persen | 8,350,000,000 | 0 | 4,992,850,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | 18 | Program Pengelolaan Arsip | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 100 Persen | 120,000,000 | | 112,065,100 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | 19 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Persentase Dokumen Arsip Yang Diakuisisi dan Terpelihara | 100 Persen | 110,000,000 | | 18,102,000 | |
| | | 20 | Program Perizinan Penggunaan Arsip | Persentase Arsip Yang Menjadi bahan Informasi | 100 Persen | 40,000,000 | | 0 | |
| | | 21 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | 100 Persen | 250,000,000 | | 55,526,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---|-------------------|---|---|------------|-------------|----------------------|-------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas | 1 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK | 89 persen | 975,000,000 | | 453,672,200 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | 2 | Program Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk Yang Mengalami Peristiwa Penting dan Terdata dalam Pencatatan Sipil | 95 persen | 417,000,000 | | 59,654,900 | |
| | | 3 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Ketersediaan Database Kependudukan | 100 Persen | 815,000,000 | | 575,561,800 | |
| | | 4 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan | 100 persen | 55,000,000 | | 5,000,000 | |
| | | 5 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan | 100 Persen | 385,000,000 | | 38,581,100 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|-------------------|---|--|------------|----------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | 100 Persen | 15,074,555,000 | | 886,450,000 | KECAMATAN |
| | | 7 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | Persentase Anak Yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak | 100 Persen | 324,000,000 | | 89,172,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | 8 | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana dan melibatkan Anak Yang Diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan | 100 Persen | 258,850,000 | | 42,800,000 | |
| Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Kebermanfaatan Inrastruktur Dasar Wilayah | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat | 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat | 75 Persen | 26,447,000,000 | | 7,930,170,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--|---|-------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Secara Inklusi dan Berkelanjutan | | 2 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Pengurangan Sampah pada Wilayah Perkotaan yang Terfasilitasi | 1.76 Persen | 2,700,000,000 | | | |
| | | 3 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 96.63 Perse | 9,060,000,000 | 98,13 Persen | 11,798,913,000 | |
| | | 4 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 60 Persen | 7,000,000,000 | 75 Persen | 2,529,920,000 | |
| | | 5 | Program Pengembangan Permukiman | Persentase areal kawasan kumuh | 6.14 Persen | 5,000,000,000 | | tidak ada data | |
| | | 6 | Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | 1.9 Rasio | 35,000,000,000 | 0,67 Rasio | 23,819,867,000 | |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|---|---|-------------|-----------------|----------------------|----------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | 92.23 Perse | 309,950,000,000 | 97,2 Persen | 46,306,889,900 | |
| | | 8 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Ketaatan terhadap RTRW | 5.73 Persen | 2,346,500,000 | 9,18 Persen | 2,827,522,000 | |
| | | 9 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Persentase layanan angkutan darat | 27.89 Perse | 5,290,200,000 | 80 Persen | 13,108,713,000 | |
| | | 10 | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase Arus Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai Yang Melalui Dermaga/Pelabuhan Perahu Penyeberangan | 40 Persen | 1,330,557,000 | | 3,400,000 | |
| | | 11 | Program Kawasan Permukiman | Persentase pemukiman yang tertata | 99,75 Perse | 22,825,000,000 | 99,48 Persen | 385,530,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|-------------|----------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 12 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 98,60 Perse | 3,000,000,000 | 81,43 Persen | 369,180,000 | |
| | | 13 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 85 Persen | 1,470,000,000 | | 0 | |
| | | 14 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa | 100 Persen | 680,000,000 | | 357,957,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | 15 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE | 65 Persen | 8,350,000,000 | | 4,992,850,000 | |
| | | 16 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat | 95 Persen | 11,749,585,000 | 100 Persen | 688,100,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|--|------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 17 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 53,97 Ton/ | 6,834,986,000 | 0 | 572,496,800 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | 18 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | 100 Persen | 13,615,000,000 | | 465,374,500 | |
| | | 19 | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Secara Cepat, Murah, dan Mudah | 100 Persen | 11,200,000 | | tidak ada data | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN |
| | | 20 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan | 30 Persen | 40,000,000 | | | |
| | | 21 | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase Pengajuan Izin Membuka Tanah Yang Diselesaikan dengan Cepat, Murah, dan Mudah | 60 Persen | 30,000,000 | | | |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|--|---|-------------------|---|--|-------------|----------------|----------------------|-------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 22 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | 12.12 Perse | 2,490,987,000 | 11,34 Persen | 721,089,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 23 | Program Kawasan Permukiman | Persentase pemukiman yang tertata | 99,75 Perse | 22,825,000,000 | 99,48 Persen | 385,530,000 | |
| | | 24 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 98,60 Perse | 3,000,000,000 | 81,43 Persen | 369,180,000 | |
| | | 25 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 85 Persen | 1,470,000,000 | 0 | 0 | |
| Peningkatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Potensi | Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB | 1 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | 100 Persen | 13,615,000,000 | | 465,374,500 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|-------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ekonomi Wilayah | | 2 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak | 80 Persen | 1,059,500,000 | | 238,208,000 | |
| | | 3 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen | 100 Persen | 700,000,000 | | 467,858,400 | |
| | | 4 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | 0,70 Persen | 70,000,000 | | 2,705,500 | |
| | | 5 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Kelompok Tani Yang Mendapatkan Pembinaan | 8,38 Persen | 1,100,000,000 | | 826,832,900 | |
| | | 6 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 1.75 Persen | 3,490,000,000 | 2,25 Persen | 555,322,238 | DINAS PERIKANAN |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|--|--------------|----------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5.15 Persen | 3,510,000,000 | 5,4 Persen | 970,672,500 | DAERAH |
| | | 8 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | 0.97 Persen | 1,500,000,000 | 0,97 Persen | 291,490,000 | |
| | | 9 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Rata - Rata Lama Kunjungan Wisata | 2 hari | 10,673,702,996 | | 1,278,197,344 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA |
| | | 10 | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase Kunjungan Wisata | 43,80 persen | 1,930,000,000 | | 303,300,000 | |
| | | 11 | Program Pengembangan Ekspor | Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan | 0,99 Persen | 2,081,093,900 | 0,99 persen | 2,040,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENGENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN |
| | | 12 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri | 95 Persen | 17,502,000,000 | 100 persen | 244,190,000 | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 13 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | | 100 Persen | 22,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 14 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Industri Yang Dimanfaatkan Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Melalui Sistem Informasi Industri Nasional | 85 Persen | 122,000,000 | 95 persen | 10,950,000 | |
| | | 15 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Pertumbuhan Investasi | 12.06 Perse | 306,000,000 | 0 | 0 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | 16 | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi | 85 Persen | 360,000,000 | | 2,490,000 | |
| | | 17 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Waktu | 85 Persen | 825,000,000 | | 59,646,400 | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|-------------|-------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 18 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal | 65 Persen | 75,000,000 | | 15,095,000.00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENGENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN |
| | | 19 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah | 85 Persen | 180,000,000 | 95 persen | 16,755,000 | |
| | | 20 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah | 2,36 Persen | 229,130,000 | 2,50 persen | 13,050,000 | |
| | | 21 | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | Persentase Koperasi Berkategori Sehat | 50 Persen | 189,470,000 | 72,92 persen | 31,500,000 | |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--|---|-------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 22 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase Koperasi Aktif | 71,62 Perse | 63,184,000 | 72,92 persen | 45,624,000 | |
| | | 23 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil,Dan Usaha Mikro (Umkm) | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 100 Persen | 470,000,000 | 100 Persen | 379,531,500 | |
| | | 24 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Persentase layanan angkutan darat | 27.89 Perse | 5,290,200,000 | 80 Persen | 13,108,713,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN |
| | | 25 | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase Arus Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai Yang Melalui Dermaga/Pelabuhan Perahu Penyeberangan | 40 Persen | 1,330,557,000 | | 3,400,000 | |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|-------------|----------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 26 | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase sampah yang tertangani | 96.23 Perse | 16,845,000,000 | | 9,224,130,750 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 27 | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Secara Cepat, Murah, dan Mudah | 100 Persen | 11,200,000 | | | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN |
| | | 28 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan | 30 Persen | 40,000,000 | | | |
| | | 29 | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase Pengajuan Izin Membuka Tanah Yang Diselesaikan dengan Cepat, Murah, dan Mudah | 60 Persen | 30,000,000 | | | |
| | | 30 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | 12.12 Perse | 2,490,987,000 | 11,34 Persen | 721,089,000 | |
| | | 31 | Program Kawasan Permukiman | Persentase pemukiman yang tertata | 99,75 Perse | 22,825,000,000 | 99,48 Persen | 385,530,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| PRORORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---|--|-------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 32 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 98,60 Perse | 3,000,000,000 | 81,43 Persen | 369,180,000 | |
| | | 33 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 85 Persen | 1,470,000,000 | 0 | 0 | |
| | Terkendalinya Laju Inflasi | 1 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan | 100 Persen | 95,000,000 | | 16,742,200 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | 2 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran | 95 Persen | 330,425,000 | 100 Persen | 6,120,000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | 3 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan | 100 Persen | 4,595,000,000 | | 1,167,587,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|-------------------|--|---|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Penanganan Kasus Konflik Berbasis Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 20 Persen | 263,000,000 | 75 persen | 161,215,300 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Peningkatna Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat Secara Inklusif | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat | 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | 100 Persen | 292,680,000,005 | 100 Persen | 126,167,900,800 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | 2 | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase Nilai Rata - Rata Nilai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 3,450,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 3 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 100 Persen | 450,000,000 | 100 Persen | 186,660,000 | |
| | | 4 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Perizinan | 100 Persen | 1,700,000,000 | 0 | 0 | |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5 | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra | Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal | 100 Persen | 3,500,000,000 | 100 Persen | 160,985,000 | DINAS KESEHATAN/RSUD |
| | | 6 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | 100 Persen | 547,540,000 | | 100,557,302,800 | |
| | | 7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | 100 Persen | 2,588,900,000 | | 908,809,000 | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|--|-------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 8 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | 100 Persen | 597,560,448 | | | |
| | | 9 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | 100 Persen | 2,259,823,174 | | 307,316,700 | |
| | | 10 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk | 1,59 Persen | 2,012,750,000 | | 71,797,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | 11 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | Persentase Akseptor KB | 80,16 Perse | 7,985,496,400 | | 6,073,883,000 | |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|---|-------------------|---|---|-------------|----------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 12 | Program Pembinaan Perpustakaan | Rasio perpustakaan per satuan penduduk | 0,96 Rasio | 10,850,000,000 | | 1,472,470,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | 13 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 100 Persen | 4,140,000,000 | | 901,305,000 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA |
| | | 14 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Cakupan pembinaan olahraga | 100 Persen | 9,180,000,000 | | 3,344,040,000 | |
| | | 15 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi | 100 Persen | 2,720,000,000 | | tdk ada | |
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender | 1 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Lembaga Swasta | 56,98 Perse | 644,450,000 | | 336,174,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|---|-------------------|---|---|------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2 | Program Perlindungan Perempuan | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana dan melibatkan Perempuan Yang Diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan | 100 Persen | 1,130,000,000 | | 400,660,000 | PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | 3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Rasio KDRT | 0,01 Rasio | 354,900,000 | | 76,775,000 | |
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan | 1 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan | 100 Persen | 4,587,500,000 | | 3,308,388,000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---------------------|-------------------|--|---|------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 100 Persen | 4,293,240,000 | | 62.700.000,00 | KECAMATAN |
| | | 3 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan | 100 Persen | 2,600,000,000 | 100 Persen | 500,865,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | 4 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase Peserta Didik Yang Menguasai Kesenian Tradisional Lokal | 100 Persen | 400,000,000 | 100 Persen | 243,350,000 | |
| | | 5 | Program Pembinaan Sejarah | Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal | 100 Persen | 700,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 6 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | 100 Persen | 2,550,000,000 | 100 Persen | 905,651,000 | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---|-------------------|---|---|------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7 | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam setahun | 100 Persen | 1,000,000,000 | 25 Persen | 836,015,000 | |
| | Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat | 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | 100 Persen | 292,680,000,005 | 100 Persen | 126,167,900,800 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | 2 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 100 Persen | 450,000,000 | 100 Persen | 186,660,000 | |
| | | 3 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | 100 Persen | 547,540,000 | | 100,557,302,800 | DINAS KESEHATAN/RSUD |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---|--|------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | 100 Persen | 2,588,900,000 | | 908,809,000 | |
| | | 5 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | 100 Persen | 597,560,448 | | tdk ada | |
| | | 6 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | 100 Persen | 2,259,823,174 | | 307,316,700 | |

| PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|--|--|------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM Pekerjaan Umum | 100 Persen | 15,000,000,000 | 100 Persen | 11,685,600,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN |
| | | 8 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Masyaraat Maros Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar Dan Kualifikasi SPM Perumahan | 100 Persen | 5,758,000,000 | 100 Persen | 504,445,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|--|------------|----------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 9 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Cakupan Layanan Kebencanaan Sesuai SPM Kebencanaan | 100 Persen | 3,752,688,250 | | 344,569,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | 10 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 14,465,973,333 | 100 persen | 319,244,500 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|---|--|---------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 11 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial | 100 Persen | 1,080,000,000 | 100 persen | 327,274,000 | DINAS SOSIAL |
| | | 12 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | 100 Persen | 2,659,000,000 | 100 persen | 150,936,000 | |
| | | 13 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | 100 Persen | 2,420,000,000 | 100 persen | 756,950,000 | |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---|------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 14 | Program Penanganan Bencana | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana | 100 Persen | 1,175,000,000 | 100 persen | 323,556,500 | |
| | Menurunnya jumlah masyarakat miskin | 1 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan | 100 Persen | 4,587,500,000 | 100 persen | 3,308,388,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 2 | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | 100 Persen | 292,680,000,005 | 100 persen | 126,167,900,800 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|---|---|------------|----------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 3 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | 100 Persen | 547,540,000.00 | | 100,557,302,800.00 | Dinas Kesehatan |
| | | 4 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Masyaraat Maros Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar Dan Kualifikasi SPM Perumahan | 100 Persen | 5,758,000,000 | 100 persen | 504,445,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| PRIRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | 100 Persen | 2,420,000,000 | 100 persen | 756,950,000 | DINAS SOSIAL |
| | | 6 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Anak Yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak | 100 Persen | 324,000,000 | | 89,172,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | 7 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 60 Persen | 9,013,410,550 | 60 persen | 2,131,388,000 | |
| | | 8 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK | 89 persen | 975,000,000 | | 453,672,200 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|-------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 9 | Program Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk Yang Mengalami Peristiwa Penting dan Terdata dalam Pencatatan Sipil | 95 persen | 417,000,000 | | 59,654,900 | |
| | | 10 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | 100 Persen | 1,290,000,000 | | 1,236,495,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAR DESA |
| | | 11 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen | 5.15 Persen | 4,335,000,000 | | 467,858,400 | |

| PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|-------------|---------------|----------------------|-------------|---|
| | | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 12 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 5.15 Persen | 120,000,000 | 2,25 Persen | 555,322,238 | DINAS PERIKANAN |
| | | 13 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5.15 Persen | 120,000,000 | 5,4 Persen | 970,672,500 | |
| | Menurunnya jumlah pengangguran | 1 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase Rencana Ketenagakerjaan Yang ditindak Lanjuti | 100 Persen | 12,000,000 | 0 | 0 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | 2 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 37,54 Perse | 1,825,000,000 | | 60,207,800 | |
| | | 3 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 24,5 Persen | 565,000,000 | | 88,281,900 | |
| | | | | | | | | | |

4.3.1 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD

RKPD sebagai perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPJMD yang menggambarkan melalui sasaran prioritas pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan
Sasaran RPJMD Untuk Tahun 2025

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Target RKPD Tahun 2025 |
|----|--|------------------------------|--|---|------------------------|
| 1 | Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak pada pelayanan dan berbasis iptek | Tujuan | Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi | Indeks Reformasi Birokrasi | BB (67) |
| | | Sasaran | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP | A (80) |
| | | Sasaran | Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | A (3,26) |
| 2 | Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup masyarakat secara inklusif | Tujuan | Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia | 71,43 |
| | | Sasaran | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat | Indeks Pendidikan | 64,97 |
| | | | | Indeks Kesehatan | 76,28 |
| | | Sasaran | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan | A (3,26) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Target RKPD Tahun 2025 |
|----|--|------------------------------|--|--|------------------------|
| | | Sasaran | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender | Indeks Pemberdayaa n Gender | 90,85 |
| | | Tujuan | Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Ketersediaa n Kebutuhan Dasar | A (3,26) |
| | | Sasaran | Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat | Indeks Harga Konsumen | 100,93 |
| | | Sasaran | Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar | A (3,26) |
| 3 | Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis potensi ekonomi wilayah | Tujuan | Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah | Pertumbuhan Ekonomi | 6,55 |
| | | Sasaran | Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB | Persentase pertumbuhan Kontribusi lapangan usaha Daerah | 4,11 |
| | | | | PDRB Per Kapita | 55,22 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Target RKPD Tahun 2025 |
|----|---|------------------------------|--|--|------------------------|
| | | Sasaran | Menurunnya jumlah pengangguran | Tingkat pengangguran terbuka | 3,81 |
| | | Sasaran | Terkendalinya Laju Inflasi | Laju inflasi | 3,03 |
| | | Sasaran | Menurunnya jumlah masyarakat miskin | Angka kemiskinan | 7,74 |
| 4 | Peningkatan ketersediaan dan kebermanfaatan infrastruktur dasar wilayah secara inklusif dan berkelanjutan | Tujuan | Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah | Rasio Gini | 0,36 |
| | | Sasaran | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Nilai Indeks | A (3,12) |
| 5 | Peningkatan ketahanan ekologi, ketahanan bencana, dan kelestarian lingkungan | Tujuan | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks kualitas lingkungan hidup | 75,26 |
| | | Sasaran | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan | Indeks Kualitas Udara | 87,9 |
| | | | | Indeks Kualitas Air | 75,12 |
| | | | | Indeks Kualitas Lahan | 54,70 |
| | | Tujuan | Menurunkan resiko bencana | Indeks risiko bencana | 128,04 |
| | | Sasaran | Menurunnya resiko akibat bencana | Indeks Ancaman Bencana | 16,4 |
| | | | | Indeks | 6,81 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Target RKPD Tahun 2025 |
|----|------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | Kerugian | |
| | | | | Indeks Kapasitas | 0,73 |

Sumber : RPJMD Kab. Maros 2021 – 2026

4.3.2 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 dan mendukung prioritas nasional dalam program asta cita tahun 2025. Serta telah memperhatikan Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Maros Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan nasioal, maka hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas nasional tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Terhadap
Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

| NO | PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS DAERAH |
|----|--|---|
| 1 | Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak pada pelayanan dan berbasis iptek |
| 2 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | |
| 3 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru | Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis potensi ekonomi wilayah |
| 4 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan | |
| 5 | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | |
| 6 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan ketersediaan dan kebermanfaatan infrastruktur dasar wilayah secara inklusif dan berkelanjutan |
| 7 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi/Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial) dan Generasi Z dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup masyarakat secara inklusif |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa prioritas pembangunan daerah

tahun 2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan nasioal, maka hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas nasional tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Dukungan Pemerintah Kabupaten Maros Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2025

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Nasional | | Kegiatan Prioritas Nasional | | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn) | Perangkat Daerah |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1 | Konsolidasi Demokrasi | 1 | Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | | | | 2 | Penguatan Kesetaraan Dan Kebebasan | | |
| | | | | 3 | Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | 2 | Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri | 1 | Penguatan Integritas Nkri Dan Perlindungan Wni Di Luar Negeri | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | | | | | | | |
| | | 3 | Penegakan Hukum Nasional | 1 | Penataan Regulasi | Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum | Bagian Hukum Setda |
| | | | | 2 | Perbaikan Sistem Hukum Pidana Dan Perdata | | |
| | | | | 3 | Penguatan Sistem Anti Korupsi | | |
| | | | | 4 | Peningkatan Akses Terhadap Keadilan | | |
| | | 4 | Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola | 1 | Penguatan Implementasi Manajemen Asn Berbasis Sistem Merit | Program Kepegawaian Daerah | BKPSDM |
| | | | | 2 | Transformasi Pelayanan Publik | Program Penataan Organisasi | Bagian Organisasi Setda |
| | | | | 3 | Penataan Kelembagaan Dan Proses Bisnis | | |
| | | | | 4 | Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan | | |
| | | 5 | Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional | 1 | Penguatan Keamanan Dalam Negeri | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | | | | 2 | Penguatan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan |
| | | | | 3 | Penguatan Keamanan Dan Ketahanan Siber | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Nasional | | Kegiatan Prioritas Nasional | | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn) | Perangkat Daerah |
|-----|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan | 1 | Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalias Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter | 1 | Revolusi Mental Dalam Sistem Pendidikan Untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja Gotong Royong, Dan Budi Pekerti | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | | | | 2 | Revolusi Mental Dalam Tata Kelola Pemerintahan Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani, Dan Responsif | | |
| | | | | 3 | Revolusi Mental Dalam Sistem Sosial Untuk Memperkuat Ketahana, Kualitas Dan Peran Keluarga Dalam Masyarakat Dalam Pembentukan Karekter | | |
| | | | | 4 | Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Revolusi Mental | | |
| | | | | 5 | Pembangunan Dan Pemberdayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila | | |
| | | | | 6 | Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Dan Patriotisme | | |
| | | 2 | Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk | 1 | Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia | 2 | Pengembangan Dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya Untuk Memperkuat Karakter Bangsa Dan Kesejahteraan Rakyat | | |
| | | | | 3 | Perlindungan Hak Kebudayaan Dan Ekspresi Budaya Untuk Memperkuat Budaya Yang Inklusif | | |
| | | | | 4 | Pengembangan Diplomasi Budaya Untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia Dalam Perkembangan Peradaban Dunia | | |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Nasional | | Kegiatan Prioritas Nasional | | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn) | Perangkat Daerah |
|-----|---|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | 3 | Memperkuat Modernisasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, Dan Harmoni Sosial | 5 | Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan | | |
| | | | | 1 | Penguatan Cara Pandang, Sikap, Dan Praktik Beragama Dalam Prespektif Jalan Tengah Untuk Memantapkan Persaudaraan Dan Kebersamaan Dikalangan Umat Beragama | | |
| | | | | 2 | Penguatan Harmini Dan Kerukunan Umat Beragama | | |
| | | | | 3 | Penyelarasan Relasi Agama Dan Budaya | | |
| | | | | 4 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan | | |
| | | | | 5 | Pengembagngan Ekonomi Dan Sumber Daya Keagammaan | | |
| | | 4 | Peningkatab Budaya Literasi, Inovasi, Dan Kreatifitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan Dan Berkarakter | 1 | Peningkatan Budaya Literasi | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | 2 | Pengembangan, Pembinaan, Dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Dan Aksara Daerah, Serta Sastra | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | 3 | Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas Dan Daya Cipta | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | 4 | Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi Dan Inovasi | Program Pembinaan Perpustakaan; Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Dinas Perpustakaan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1 | Infrastruktur Pelayanan Dasar | 1 | Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau | Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| | | | | 2 | Penyediaan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak Dan Aman | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | |
| | | | | 4 | Keselamatan Dan Keamanan Transportasi | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Llaj | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, PERhubungan dan PERTanahan |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Nasional | | Kegiatan Prioritas Nasional | | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn) | Perangkat Daerah |
|-----|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | 5 | Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur | Program Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 6 | Waduk Multipurpose Dan Modernisasi Irigasi | Program Pengelolaan Sumber Daya Air Sda | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, PERhubungan dan PERTanahan |
| | | 2 | Infrastruktur Ekonomi | 1 | Konektivitas Jalan | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, PERhubungan dan PERTanahan |
| | | | | 2 | Konektivitas Keretaapi | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, PERhubungan dan PERTanahan |
| | | | | 3 | Konektivitas Laut | Program Pengelolaan Pelayaran | |
| | | | | 5 | Konektivitas Darat | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Llj | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, PERhubungan dan PERTanahan |
| | | 3 | Infrastruktur Perkotaan | 1 | Transportasi Perkotaan | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llj) | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, PERhubungan dan PERTanahan |
| | | | | 2 | Infrastruktur Dan Ekosistem Tik Perkotaan | Program Penyelenggaraan Jalan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llj); Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, PERhubungan dan PERTanahan; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | 3 | Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau Di Perkotaan | Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| | | 5 | Transformasi Digital | 1 | Penuntasan Infrastruktur Tik | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | 2 | Pemanfaatan Infrastruktur Tik | | |
| | | | | 3 | Fasilitas Pendukung Transformasi Digital | | |
| | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | 1 | Peningkatan Kualitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Perumbuhan Ekonomi | 1 | Penyediaan Air Untuk Pertanian | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanian |
| | | | | 2 | Penyediaan Air Baku Untuk Kawasan Prioritas | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | |
| | | | | 3 | Pemeliharaaa, Pemulihan Dan Konserfasi Sumber Daya Air Dan Ekosistemnya Termasuk Revitalisasi Danau Dan Infrastruktur Hijau | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Nasional | | Kegiatan Prioritas Nasional | | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn) | Perangkat Daerah |
|-----|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | 4 | Pengembangan Waduk Multi Guna | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | |
| | | 2 | Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Komsumsi Pangan | 1 | Peningkatan Kualitas Komsumsi, Keamanan, Fortifikasi Dan Biofortifikasi Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | 2 | Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan Untuk Menjaga Stabilitas Pasokan Dan Harga Kebutuhan Pokok | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | |
| | | | | 3 | Peningkatan Produktifitas Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (Sdm) Pertanian, Perikanan Dan Kepastian Pasar | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Perikanan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | 4 | Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, Dan Digitalisasi Pertanian | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | 5 | Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional | Program Pengembangan Distribusi Dan Harga Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | 4 | Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, Dan Kelautan | 1 | Peningkatan Pengelolaan Wilayah Penyelolaan Perikanan (Wpp) Dan Tata Ruang Laut Dan Rencana Zonasi Pesisir Serta Pengelolaan Ruang Laut | Program Pengelolaan | Dinas Perikanan |
| | | | | 2 | Peningkatan Ekosistem Kelautan Dan Pemanfaatan Jasa Kelautan | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil | |
| | | | | 3 | Peningkatan Produksi, Produktifitas, Standarisasi Mutu Dan Nilai Tambah Produk Kelautan Dan Perikanan | Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha Dan Daya Saing | |
| | | | | 4 | Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, Dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan Perikanan Skala Kecil Serta Akses Terhadap Pengelolaan Sumber Daya | Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha Dan Daya Saing | |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Nasional | | Kegiatan Prioritas Nasional | | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn) | Perangkat Daerah |
|-----|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|--|--|---|
| | | 5 | Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umkm) Dan Koperasi | 5 | Peningkatan Sdm Dan Riset Kemaritiman Dan Kelautan Serta Databaase Kelautan Perikanan | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil | |
| | | | | 1 | Peningkatan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil Dan Usaha Menengah Besar | Program Pengembangan Umkm | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan PERdagangan |
| | | | | 2 | Peningkatan Kapasitas Usaha Dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | |
| | | | | 3 | Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, Dan Inovasi Koperasi | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | |
| | | | | 4 | Peningkatan Penciptaan Start-Up Dan Peluang Usaha | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) | |
| | | 5 | | 5 | Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial | Program Pengembangan Umkm | |
| | | | | 1 | Peningkatan Industri Pengelolaan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, Dan Non Agro Yang Terintegrasi Hulu-Hilir | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan PERdagangan |
| | | 6 | Peningkatatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil Dan Insdustrialisasi | 2 | Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter Dan Kawasan Industri Terutama Di Luar Jawa | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | |
| | | | | 3 | Peningkatan Daya Saing Destinasi Dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Pariwisata Alam, Yang Didukung Penguatan Rantai Pasok | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 4 | Peningkatran Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Dan Usaha Kreatif Dan Digital | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | |
| | | | | 5 | Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Ketenagakerjaan |
| | | | | 6 | Pengembangan Industri Halal | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Nasional | | Kegiatan Prioritas Nasional | | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn) | Perangkat Daerah |
|-----|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | Perindustrian dan PERdagangan |
| | | 7 | Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri | 1 | Peningkatan Diversifikasi Nilai Tambah, Dan Daya Saing Produk Ekspor Dan Jasa | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan PERdagangan |
| | | | | 2 | Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor | | |
| | | | | 3 | Pengelolaan Impor | | |
| | | | | 4 | Peningkatan Kandungan Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah Yang Efektif | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | |
| | | | | 5 | Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produk Global | Program Pengembangan Ekspor | |
| | | | | 6 | Peningkatan Citra Dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas Dan Destinasi Branding, Dan Produk Kreatif | Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 7 | Peningkatan Efektifitas Preferential Trader Agreement (Pta)/ Free Trade Agreement (Fta)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa) Dan Diplomasi Ekonomi | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan PERdagangan |
| | | 8 | Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi | 1 | Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | | | 2 | Otimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Dan Industri 4.0 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan PERdagangan |
| | | | | 3 | Peningkatan Sistem Logistik Dan Stabilitas Harga | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan PERdagangan |
| | | | | 4 | Peningkatan Penerapan Praaktik Berkelanjutan Di Industri Pengolahan Pariwisata | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 5 | Reformasi Fiskal | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Dan Aset Daerah |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Nasional | | Kegiatan Prioritas Nasional | | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn) | Perangkat Daerah |
|-----|--|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | 6 | Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Data Dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dan Ekonomi Digital | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan PERdagangan |
| | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurai Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5 | Pengembangan Wilayah Sulawesi | 1 | Pengembangan Kawasan Strategis | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan |
| | | | | 2 | Pengembangan Sektor Unggulan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Perikanan |
| | | | | 3 | Pengembangan Kawasan Perkotaan | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan |
| | | | | 4 | Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, Dan Transmigrasi | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Ketenagakerjaan |
| | | | | 5 | Kelembagaan Dan Keuangan Daerah | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1 | Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan | 1 | Percepatan Cakupan Administarsi Kependudukan | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | | | | 2 | Integritas Sistem Administrasi Kependudukan | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | |
| | | | | 3 | Pendampingan Dan Layanan Terpadu | Program Pendaftaran Penduduk | |
| | | | | 4 | Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk | Program Pengendalian Penduduk | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | 2 | Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial | 1 | Sistem Jaminan Sosial Nasional | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | 2 | Bantuan Sosial Dan Subsidi Tepat Sasaran | Program Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | 3 | Perlindungan Sosial Adatif | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | |
| | | | | 4 | Kesejahteraan Sosial | Program Pemberdayaan Sosial | |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Nasional | | Kegiatan Prioritas Nasional | | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn) | Perangkat Daerah |
|-----|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|
| | | 3 | Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan | 1 | Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (Kb) Dan Kesehatan Reproduksi | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan Keluarga Berencana Kb | Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | 2 | Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | | 3 | Peningkatan Pengendalian Penyakit | Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | 4 | Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |
| | | | | 5 | Penguatan Sistem Kesehatan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | 4 | Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas | 1 | Peningkatan Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran | Program Pengembangan Kurikulum | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | 2 | Afirmasi Askes Dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun | Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | 3 | Peningkatan Pengelolaan Dan Penempatan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | |
| | | | | 4 | Penjamin Mutu Kependidikan | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | |
| | | | | 5 | Peningkatan Tata Kelola Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | 5 | Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda | 1 | Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | 2 | Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Perempuan | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | |
| | | | | 3 | Kualitas Pemuda | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | 6 | Pengentasan Kemiskinan | 1 | Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Ks | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | 2 | Keperantaraan Usaha Dan Dampak Sosial | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Nasional | | Kegiatan Prioritas Nasional | | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn) | Perangkat Daerah |
|-----|---|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | 3 | Reforma Agraria | Program Penatagunaan Tanah | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| | | 7 | Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing | 1 | Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | 2 | Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | 3 | Peningkatan Kapabilitas Iptek Dan Penciptaan Inovasi | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | 4 | Prestasi Olah Raga | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Dinas Pariwisata, PEmuda dan Olahraga |
| | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | 1 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 1 | Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup | Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| | | | | 2 | Penanggulangan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | 3 | Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | 4 | Penguatan Kelembagaan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh); Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | |
| | | 2 | Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim | 1 | Penanggulangan Bencana | Program Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 2 | Peningkatan Ketahanan Iklim | Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| | | 3 | Pembangunan Rendah Karbon | 3 | Pengelolaan Limbah | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| | | | | 4 | Pengembangan Industri Hijau | | |
| | | | | 5 | Rendah Karbon Pesisir Dan Laut | | |

4.3.3 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 dan mendukung prioritas Provinsi Sulawesi Selatan. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Prioritas Kabupaten Maros Tahun 2025

| NO | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS DAERAH |
|----|--|---|
| 1 | Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif | Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak pada pelayanan dan berbasis iptek |
| 2 | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata | Peningkatan ketersediaan dan kebermanfaatan infrastruktur dasar wilayah secara inklusif dan berkelanjutan |
| 3 | Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah | Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis potensi ekonomi wilayah |
| 4 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata | Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup masyarakat secara inklusif |
| 5 | Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup | Peningkatan ketahanan ekologi, ketahanan bencana, dan kelestarian lingkungan |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan provinsi, maka hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas provinsi tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Terhadap
Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

| Prioritas Pembangunan Daerah | | | | | Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan | | |
|------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|
| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah | Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan | Sasaran Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan | Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan |
| 1 | Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak pada pelayanan dan berbasis iptek | Tujuan | Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi | Indeks Reformasi Birokrasi | Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif | Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik | Indek Reformasi Birokrasi |
| | | Sasaran | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Nilai SAKIP Provinsi |
| | | Sasaran | Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | | Optimalnya kualitas pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik |
| 2 | Peningkatan ketersediaan dan kebermanfaatan infrastruktur dasar wilayah secara inklusif dan berkelanjutan | Tujuan | Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah | Rasio Gini | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata | Indeks Williamson |
| | | Sasaran | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Nilai Indeks | | Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah | Indeks Layanan Infrastruktur |
| 3 | Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis potensi ekonomi wilayah | Tujuan | Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah | Pertumbuhan Ekonomi | Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi |
| | | Sasaran | Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB | Persentase pertumbuhan Kontribusi lapangan usaha Daerah | | Meningkatnya produktivitas Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah | Produktivitas Total Daerah\ |
| | | | | PDRB Per Kapita | | | |

Sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2025, maka Kabupaten

Maros menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada Tabel berikut:

Tabel 4.18
Dukungan Pemerintah Kabupaten Maros Terhadap Kegiatan Prioritas Sulawesi Selatan
Tahun 2025

| No. | Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan | Sasaran Pembangunan | Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Sulawesi Selatan | Perangkat Daerah |
|-----|--|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif | Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | BKPSDM |
| | | | Program Kepegawaian Daerah | BKPSDM |
| | | | Program Penataan Organisasi | BKPSDM |
| | | | Program Penyelenggaeaan Pengawasan | INSPEKTORAT |
| | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | BAPPERIDA |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | DISKOMINFO SP |
| | | | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | BAGIAN HUKUM SETDA |
| | | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | DPMD |
| | | Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | BAPPERIDA |
| | | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | DISKOMINFO SP |
| | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | DPMPTSP |
| | | | | |
| 2 | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata | Penyelenggaraan Jalan | DPUTRPKP |
| | | Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | DPUTRPKP |
| | | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitasn Umum | DPUTRPKP |

| | | | | |
|---|---|---|---|------------------|
| | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | DPUTRPKP |
| 3 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata | Program Pengembangan Kurikulum | DISDIKBUD |
| | | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | DISPARPORA |
| | | Menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem | Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan | DINAS KESEHATAN |
| | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas SDM Yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | DINAS KESEHATAN |
| | | Meningkatnya kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan | Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | DP3ADALDUK KB |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | DP3ADALDUK KB |
| | | | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | SATPOL PP, |
| | | | Program Kesejahteraan Rakyat | SETDA |
| | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | BADAN KESBANGPOL |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | BADAN KESBANGPOL |
| | | | | |
| 4 | Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | DINAS PERTANIAN |
| | | Meningkatnya produktivitas Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | DINAS PERIKANAN |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | DINAS PERIKANAN |
| | | | Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian | DINAS PERTANIAN |
| | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | DINAS PERIKANAN |

| | | | | |
|---|--|---|---|-----------------|
| | | | Program Kawasan Permukiman | DPUTRPKP |
| | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro | DISKOPURINDAG |
| | | | Program Pengembangan UMKM | DISKOPURINDAG |
| | | | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | DPMPTSP |
| | | | Program Perlinungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | DINAS PERTANIAN |
| | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | DPMD |
| | | | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | DISKOPURINDAG |
| 5 | Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan | Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | | Terpeliharanya kualitas hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | DPUTRPKP |
| | | | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | DPUTRPKP |
| | | | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLH |
| | | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | DLH |
| | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | DPUTRPKP |
| | | | Program Pengelolaan Persampahan | DLH |
| | | | | |

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025

Kerangka keuangan daerah Kabupaten Maros pada perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan dari target RKPD Pokok Tahun 2025. **Pendapatan daerah pada Peurbahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.609.827.588.922,00 yang bersumber dari PAD Rp 385.510.687.604,00, Pendapatan Transfer Rp 1.224.316.901.318,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 0.**

Target belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi **Rp 1.653.150.439.239**. Dimana belanja daerah terdiri dari **Belanja Operasi Rp 1.173.890.439.195,00 , Belanja Modal Rp 306.771.983.844, , Belanja Tidak Terduga Rp 7.821.720.000dan Belanja Transfer Rp 164.666.296.200**. Berikut gambaran lebih rinci terkait perubahan belanja daerah tahun 2025.

Tabel 5.1

Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025

| URAIAN | RKPD POKOK TAHUN 2025 | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 | BERTAMBAH/ BERKURANG |
|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6=5-4 |
| PENDAPATAN | 1.726.036.847.248,00 | 1.609.827.588.922 | -116.209.258.326,00 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 349.000.000.000,00 | 385.510.687.604 | 36.510.687.604,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 197.500.000.000,00 | 238.855.000.000 | 41.355.000.000,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 25.500.000.000,00 | 89.278.845.831 | 63.778.845.831,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.000.000.000,00 | 11.250.577.808,00 | 250.577.808,00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 115.000.000.000,00 | 46.126.263.965 | -68.873.736.035,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 1.375.036.847.248,00 | 1.224.316.901.318 | -150.719.945.930,00 |
| TRANSFER PUSAT | 1.244.336.847.248,00 | 1.145.785.596.000 | -98.551.251.248,00 |
| DANA PERIMBANGAN | 1.147.967.930.982,00 | 1.066.968.856.000 | -80.999.074.982,00 |
| TRANSFER UMUM | 795.248.905.527,00 | 821.007.816.000,00 | 25.758.910.473,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 19.870.836.527,00 | 22.022.645.000 | 2.151.808.473,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 775.378.069.000,00 | 798.985.171.000 | 23.607.102.000,00 |
| DANA TRANSFER KHUSUS | 352.719.025.455,00 | 245.961.040.000 | -106.757.985.455,00 |
| DANA INSENTIF DAERAH | 18.000.000.000,00 | 0 | -18.000.000.000,00 |
| DANA DESA | 78.368.916.266,00 | 78.816.740.000,00 | 447.823.734,00 |
| TRANSFER ANTAR DAERAH | 130.700.000.000,00 | 78.531.305.318 | -52.168.694.682,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 121.200.000.000,00 | 73.531.305.318 | -47.668.694.682,00 |
| Bantuan Keuangan | 9.500.000.000,00 | 5.000.000.000 | -4.500.000.000,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 2.000.000.000,00 | 0 | -2.000.000.000,00 |
| Hibah Dari Pemerintah Lainnya | 2.000.000.000,00 | 0 | -2.000.000.000,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan | | | 0 |
| BELANJA | 1.726.036.847.248,00 | 1.653.150.439.239 | -83.222.444.537,00 |
| BELANJA OPERASI | 1.147.895.543.248,00 | 1.173.890.439.195 | 19.795.532.120,00 |
| Belanja Pegawai | 717.380.502.000,00 | 742.398.670.491 | 18.633.869.481,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 392.300.324.455,00 | 390.890.450.457 | -506.741.005,00 |

| URAIAN | RKPD POKOK TAHUN 2025 | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 | BERTAMBAH/ BERKURANG |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6=5-4 |
| Belanja Hibah | 36.614.716.793,00 | 39.531.318.247 | 2.198.403.644,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 1.600.000.000,00 | 1.070.000.000 | -530.000.000,00 |
| BELANJA MODAL | 405.598.403.000,00 | 306.771.983.844 | -102.963.091.857,00 |
| BELANJA MODAL | 405.598.403.000,00 | 306.771.983.844 | -102.963.091.857,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.900.000.000,00 | 7.821.720.000 | 1.921.720.000,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 5.900.000.000,00 | 7.821.720.000 | 1.921.720.000,00 |
| BELANJA TRANSFER | 166.642.901.000,00 | 164.666.296.200 | -1.976.604.800,00 |
| Belanja Bagi Hasil | 0 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 166.642.901.000,00 | 160.666.296.200 | -5.976.604.800,00 |

Sumber : Bappelitbangda Kab.Maros Tahun 2025

Disisi lain dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, telah ditetapkan proyeksi Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mana nomenklatur perangkat daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tabel 3.7
Target Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

| NO | PERANGKAT DAERAH | PROYEKSI RKPD 2025 | PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2025 |
|----|--|--------------------|---------------------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 485.444.625.884,00 | 494,733,005,836.00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 258.856.321.766,00 | 234,180,352,555.00 |
| 3 | RSUD | 81.510.439.149,00 | 133,312,445,226.00 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 214.671.761.404,00 | 134,997,375,427.00 |
| 5 | SATPOL PP | 13.145.339.426,00 | 10.454.929.629,00 |
| 6 | PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 17.983.962.660,00 | 7,313,530,722.00 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6.832.422.852,00 | 6,023,081,577.00 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 7.926.818.801,00 | 6,757,894,670.00 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 4.541.450.000,00 | 3,206,620,957.00 |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 18.959.249.036,00 | 15,892,676,462.00 |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 18.538.535.267,00 | 17,075,299,365.00 |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7.657.074.084,00 | 7,386,320,872.00 |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 8.459.824.528,00 | 7,974,528,365.00 |
| 14 | DIINAS PERHUBUNGAN | 11.195.593.500,00 | 19,552,982,350.00 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 18.004.660.723,00 | 11,635,807,438.00 |
| 16 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 11.480.412.520,00 | 9,415,302,300.00 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 9.802.577.030,00 | 6,538,541,257.00 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | PROYEKSI RKPD 2025 | PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2025 |
|----|---|-----------------------------|------------------------------|
| 18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 10.960.247.678,00 | 7,249,113,084.00 |
| 19 | DINAS PERIKANAN DAERAH | 18.800.719.110,00 | 9,540,660,197.00 |
| 20 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 17.357.969.247,00 | 15,205,696,919.00 |
| 21 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 27.800.129.400,00 | 23,999,854,647.00 |
| 22 | SEKRETARIAT DAERAH | 39.320.900.186,00 | 44.481.102.938,00 |
| 23 | SEKRETARIAT DPRD | 43.043.640.789,00 | 41.536.393.687,00 |
| 24 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 12.014.916.170,00 | 7,132,951,090.00 |
| 25 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 227.898.929.851,00 | 253,085,141,875.00 |
| 26 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 18.540.830.701,00 | 16,841,610,401.00 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 8.808.894.781,00 | 7,996,578,918.00 |
| 28 | INSPEKTORAT KABUPATEN | 17.100.500.000,00 | 23,205,077,574.00 |
| 29 | KECAMATAN MAROS BARU | 7.224.026.065,00 | 6,518,386,087.00 |
| 30 | KECAMATAN BANTIMURUNG | 6.003.872.804,00 | 5,134,438,758.00 |
| 31 | KECAMATAN CAMBA | 5.552.615.775,00 | 4,505,079,881.00 |
| 32 | KECAMATAN MALLAWA | 4.115.652.253,00 | 3,382,212,579.00 |
| 33 | KECAMATAN TANRALILI | 4.610.383.300,00 | 4,177,363,246.00 |
| 34 | KECAMATAN BONTOA | 4.592.377.203,00 | 4,008,401,302.00 |
| 35 | KECAMATAN TURIKALE | 13.861.628.025,00 | 12,875,165,742.00 |
| 36 | KECAMATAN MARUSU | 3.429.092.856,00 | 2,907,140,873.00 |
| 37 | KECAMATAN LAU | 9.629.106.337,00 | 8,790,997,557.00 |
| 38 | KECAMATAN CENRANA | 3.116.077.114,00 | 2,667,789,632.00 |
| 39 | KECAMATAN MONCONGLOE | 3.291.320.926,00 | 2,448,366,313.00 |
| 40 | KECAMATAN TOMPOBULU | 3.466.047.893,00 | 2,955,462,943.00 |
| 41 | KECAMATAN SIMBANG | 3.353.792.988,00 | 2,653,827,811.00 |
| 42 | KECAMATAN MANDAI | 7.717.773.049,00 | 6,820,664,059.00 |
| 43 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.443.497.590,00 | 6,580,266,118.00 |
| | TOTAL | 1.725.066.010.721,00 | 1.653.150.439.239,00 |

5.2 Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2023 dan tahun berjalan, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan daerah, strategi pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan pada dokumen RPJMD periode 2025-2029, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah:

Tabel 5.2
Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|---|-------------------|--|--|------------|-----------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 15.074.555.000 | 0 | 0 | Seluruh Perangkat Daerah (Setda/Setwa n/ Inspektorat/ Badan/Dinas / Kecamatan) |
| | 3 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan | 100 Persen | 4.587.500.000 | 100 Persen | 3.308.388.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase Kebijakan Perekonomia n Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan | 100 Persen | 4.595.000.000 | 100 Persen | 1.167.587.000 | |
| | 6 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan | 95 Persen | 13.438.000.000 | 95 Persen | 8.309.470.500 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 7 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100 Persen | 1.950.000.000 | 100 Persen | 1.110.961.750 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN AGAN DAERAH |
| | 8 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | 100 Persen | 408.000.000 | 100 Persen | 166.906.600 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN AGAN DAERAH |
| | 9 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyerapan anggaran sesuai target | 80 Persen | 166.361.209.105 | 80 Persen | 174.078.094.45 0 | BADAN KEUANGAN |
| | 10 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah | 100 Persen | 826.352.498 | 100 Persen | 15.568.945.314 | DAN ASET DAERAH |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---------------------------------------|--|--|------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 11 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan | 100 Persen | 1.602.500.000 | 100 Persen | 1.076.191.400 | BADAN PENDAPATA N |
| | | | | | | | | DAERAH |
| | 12 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian | 100 Persen | 3.762.479.000 | 100 Persen | 1.483.427.000 | BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 13 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100 Persen | 3.992.297.000 | 100 Persen | 549.721.000 | BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 14 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. | 100 Persen | 900.000.000 | 75 persen | 294.240.000 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN AGAN DAERAH |
| | 15 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Pelanggaran Pegawai | 15 Persen | 5.954.779.500 | 15 Persen | 1.944.974.000 | INSPEKTORA T KABUPATEN |
| | 16 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persentase tindak lanjut temuan | 66 Persen | 1.457.657.000 | 66 Persen | 911.855.000 | |
| | 17 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE | 65 Persen | 8.350.000.000 | 65 Persen | 4.992.850.000 | DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 18 | Program Pengelolaan Arsip | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 100 Persen | 120.000.000 | 100 Persen | 112.065.100 | DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN |
| | 19 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Persentase Dokumen Arsip Yang Diakuisisi dan Terpelihara | 100 Persen | 110.000.000 | | 18.102.000 | |
| 20 | Program Perizinan Penggunaan Arsip | Persentase Arsip Yang Menjadi bahan Informasi | 100 Persen | 40.000.000 | 0 | 0 | | |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|---|-------------------|---|--|------------|----------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 21 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | 100 Persen | 250.000.000 | 50 | 55.526.000 | DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIK A, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas | 1 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK | 89 persen | 975.000.000 | 40 | 453.672.200 | DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATA N SIPIL |
| | 2 | Program Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk Yang Mengalami Peristiwa Penting dan Terdata dalam Pencatatan Sipil | 95 persen | 417.000.000 | 40 | 59.654.900 | |
| | 3 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Ketersediaan Database Kependuduka n | 100 Persen | 815.000.000 | 50 | 575.561.800 | |
| | 4 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependuduka n | 100 persen | 55.000.000 | | 5.000.000 | |
| | 5 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan | 100 Persen | 385.000.000 | | 38.581.100 | DINAS PENANAMA N MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 6 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | 100 Persen | 15.074.555.000 | | 886.450.000 | KECAMATAN |
| | 7 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | Persentase Anak Yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak | 100 Persen | 324.000.000 | | 89.172.000 | DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN , PERLINDUNG AN ANAK , PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 8 | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana dan melibatkan Anak Yang Diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan | 100 Persen | 258.850.000 | | 42.800.000 | |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|--|-------------------|--|---|-------------|-----------------|----------------------|----------------|--|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat | 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat | 75 Persen | 26.447.000.000 | | 7.930.170.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN |
| | 2 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Pengurangan Sampah pada Wilayah Perkotaan yang Terfasilitasi | 1.76 Persen | 2.700.000.000 | 0 | 0 | |
| | 3 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 96.63 Perse | 9.060.000.000 | 98,13 Persen | 11.798.913.000 | |
| | 4 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 60 Persen | 7.000.000.000 | 40 persne | 2.529.920.000 | |
| | 5 | Program Pengembangan Permukiman | Persentase areal kawasan kumuh | 6.14 Persen | 5.000.000.000 | 0 | 0 | |
| | 6 | Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | 1.9 Rasio | 35.000.000.000 | 0,67 Rasio | 23.819.867.000 | |
| | 7 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | 92.23 Perse | 309.950.000.000 | 97,2 Persen | 46.306.889.900 | |
| | 8 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Ketaatan terhadap RTRW | 5.73 Persen | 2.346.500.000 | 9,18 Persen | 2.827.522.000 | |
| | 9 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Persentase layanan angkutan darat | 27.89 Perse | 5.290.200.000 | 80 Persen | 13.108.713.000 | |
| | 10 | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase Arus Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai Yang Melalui Dermaga/Pelabuhan Perahu Penyeberangan | 40 Persen | 1.330.557.000 | | 3.400.000 | |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|-------------------|---|---|-------------|----------------|----------------------|----------------|---|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 11 | Program Kawasan Permukiman | Persentase pemukiman yang tertata | 99,75 Perse | 22.825.000.000 | 99,48 Persen | 385.530.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 12 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 98,60 Perse | 3.000.000.000 | 81,43 Persen | 369.180.000 | |
| | 13 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 85 Persen | 1.470.000.000 | 0 | 0 | |
| | 14 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa | 100 Persen | 680.000.000 | | 357.957.000 | DINAS KOMUNIKASI / INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 15 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE | 65 Persen | 8.350.000.000 | | 4.992.850.000 | |
| | 16 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat | 95 Persen | 11.749.585.000 | 100 Persen | 688.100.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 17 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 53,97 Ton/ | 6.834.986.000 | 0 | 572.496.800 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 18 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | 100 Persen | 13.615.000.000 | | 465.374.500 | |
| | 19 | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Secara Cepat, Murah, dan Mudah | 100 Persen | 11.200.000 | 0 | tidak ada data | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN |
| | 20 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkann | 30 Persen | 40.000.000 | 0 | 0 | |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|---|-------------------|---|--|-------------|----------------|----------------------|-------------|---|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 21 | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase Pengajuan Izin Membuka Tanah Yang Diselesaikan dengan Cepat, Murah, dan Mudah | 60 Persen | 30.000.000 | 0 | 0 | |
| | 22 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | 12.12 Perse | 2.490.987.000 | 11,34 Persen | 721.089.000 | |
| | 23 | Program Kawasan Permukiman | Persentase pemukiman yang tertata | 99,75 Perse | 22.825.000.000 | 99,48 Persen | 385.530.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 24 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 98,60 Perse | 3.000.000.000 | 81,43 Persen | 369.180.000 | |
| | 25 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 85 Persen | 1.470.000.000 | 0 | 0 | |
| Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB | 1 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | 100 Persen | 13.615.000.000 | | 465.374.500 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak | 80 Persen | 1.059.500.000 | | 238.208.000 | |
| | 3 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen | 100 Persen | 700.000.000 | | 467.858.400 | |
| | 4 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | 0,70 Persen | 70.000.000 | | 2.705.500 | |
| | 5 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Kelompok Tani Yang Mendapatkan Pembinaan | 8,38 Persen | 1.100.000.000 | | 826.832.900 | |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|-------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 6 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 1.75 Persen | 3.490.000.000 | 2,25 Persen | 555.322.238 | DINAS PERIKANAN |
| | 7 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5.15 Persen | 3.510.000.000 | 5,4 Persen | 970.672.500 | DAERAH |
| | 8 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | 0.97 Persen | 1.500.000.000 | 0,97 Persen | 291.490.000 | |
| | 9 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Rata - Rata Lama Kunjungan Wisata | 2 hari | 10.673.702.996 | | 1.278.197.344 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA |
| | 10 | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase Kunjungan Wisata | 43,80 persen | 1.930.000.000 | | 303.300.000 | |
| | 11 | Program Pengembangan Ekspor | Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan | 0,99 Persen | 2.081.093.900 | 0,99 persen | 2.040.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENGENGA H, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN |
| | 12 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri | 95 Persen | 17.502.000.000 | 100 persen | 244.190.000 | |
| | 13 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | | 100 Persen | 22.000.000 | 0 | 0 | |
| | 14 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Industri Yang Dimanfaatkan Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Melalui Sistem Informasi Industri Nasional | 85 Persen | 122.000.000 | 95 persen | 10.950.000 | |
| | 15 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Pertumbuhan Investasi | 12.06 Perse | 306.000.000 | 0 | 0 | |
| | 16 | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi | 85 Persen | 360.000.000 | | 2.490.000 | DINAS PENANAMA N MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 17 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Perusahaan Yang Menyampaika n Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Waktu | 85 Persen | 825.000.000 | | 59.646.400 | |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|---------------------|-------------------|--|---|-------------|----------------|----------------------|----------------|---|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 18 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal | 65 Persen | 75.000.000 | | 15.095.000,00 | |
| | 19 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah | 85 Persen | 180.000.000 | 95 persen | 16.755.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENGENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN |
| | 20 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah | 2,36 Persen | 229.130.000 | 2,50 persen | 13.050.000 | |
| | 21 | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | Persentase Koperasi Berkategori Sehat | 50 Persen | 189.470.000 | 72,92 persen | 31.500.000 | |
| | 22 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase Koperasi Aktif | 71,62 Perse | 63.184.000 | 72,92 persen | 45.624.000 | |
| | 23 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil,Dan Usaha Mikro (Umkm) | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 100 Persen | 470.000.000 | 100 Persen | 379.531.500 | |
| | 24 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Persentase layanan angkutan darat | 27.89 Perse | 5.290.200.000 | 80 Persen | 13.108.713.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN |
| | 25 | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase Arus Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai Yang Melalui Dermaga/Pelabuhan Perahu Penyeberangan | 40 Persen | 1.330.557.000 | | 3.400.000 | |
| | 26 | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase sampah yang tertangani | 96.23 Perse | 16.845.000.000 | | 9.224.130.750 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|-------------------|--|---|-------------|----------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 27 | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Secara Cepat, Murah, dan Mudah | 100 Persen | 11.200.000 | | | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNG AN DAN PERTANAHAN |
| | 28 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase Luas Tanah Kosong yang Termanfaatka n | 30 Persen | 40.000.000 | | | |
| | 29 | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase Pengajuan Izin Membuka Tanah Yang Diselesaikan dengan Cepat, Murah, dan Mudah | 60 Persen | 30.000.000 | | | |
| | 30 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | 12.12 Perse | 2.490.987.000 | 11,34 Persen | 721.089.000 | |
| | 31 | Program Kawasan Permukiman | Persentase pemukiman yang tertata | 99,75 Perse | 22.825.000.000 | 99,48 Persen | 385.530.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMA N, DAN LINGKUNGA N HIDUP |
| | 32 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 98,60 Perse | 3.000.000.000 | 81,43 Persen | 369.180.000 | |
| | 33 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 85 Persen | 1.470.000.000 | 0 | 0 | |
| Terkendalinya Laju Inflasi | 1 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan | 100 Persen | 95.000.000 | | 16.742.200 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangk an di Tempat Pemasaran | 95 Persen | 330.425.000 | 100 Persen | 6.120.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANG AN |
| | 3 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase Kebijakan Perekonomia n Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan | 100 Persen | 4.595.000.000 | | 1.167.587.000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|--|-------------------|---|---|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 4 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Penanganan Kasus Konflik Berbasis Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 20 Persen | 263.000.000 | 75 persen | 161.215.300 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat | 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | 100 Persen | 292.680.000.005 | 100 Persen | 126.167.900.800 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N |
| | 2 | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase Nilai Rata - Rata Nilai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 3.450.000.000 | 0 | 0 | |
| | 3 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 100 Persen | 450.000.000 | 100 Persen | 186.660.000 | |
| | 4 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Perizinan | 100 Persen | 1.700.000.000 | 0 | 0 | |
| | 5 | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra | Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal | 100 Persen | 3.500.000.000 | 100 Persen | 160.985.000 | |
| | 6 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | 100 Persen | 547.540.000 | | 100.557.302.800 | DINAS KESEHATAN/ RSUD |
| | 7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | 100 Persen | 2.588.900.000 | | 908.809.000 | |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|---|-------------------|---|--|-------------|----------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 8 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | 100 Persen | 597.560.448 | 0 | 0 | |
| | 9 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | 100 Persen | 2.259.823.174 | | 307.316.700 | |
| | 10 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk | 1,59 Persen | 2.012.750.000 | | 71.797.000 | DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN , PERLINDUNG AN ANAK , PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 11 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | Persentase Akseptor KB | 80,16 Perse | 7.985.496.400 | | 6.073.883.000 | |
| | 12 | Program Pembinaan Perpustakaan | Rasio perpustakaan per satuan penduduk | 0,96 Rasio | 10.850.000.000 | | 1.472.470.000 | DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN |
| | 13 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 100 Persen | 4.140.000.000 | | 901.305.000 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA |
| | 14 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Cakupan pembinaan olahraga | 100 Persen | 9.180.000.000 | | 3.344.040.000 | |
| | 15 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembanga n Organisasi | 100 Persen | 2.720.000.000 | 0 | 0 | |
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender | 1 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Lembaga Swasta | 56,98 Perse | 644.450.000 | | 336.174.000 | DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN , PERLINDUNG AN ANAK , |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|---|-------------------|--|---|------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 2 | Program Perlindungan Perempuan | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana dan melibatkan Perempuan Yang Diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan | 100 Persen | 1.130.000.000 | | 400.660.000 | PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Rasio KDRT | 0,01 Rasio | 354.900.000 | | 76.775.000 | |
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan | 1 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan | 100 Persen | 4.587.500.000 | | 3.308.388.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 2 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 100 Persen | 4.293.240.000 | | 62.700.000,00 | KECAMATAN |
| | 3 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan | 100 Persen | 2.600.000.000 | 100 Persen | 500.865.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N |
| | 4 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase Peserta Didik Yang Menguasai Kesenian Tradisional Lokal | 100 Persen | 400.000.000 | 100 Persen | 243.350.000 | |
| | 5 | Program Pembinaan Sejarah | Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal | 100 Persen | 700.000.000 | 0 | 0 | |
| | 6 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | 100 Persen | 2.550.000.000 | 100 Persen | 905.651.000 | |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|---|-------------------|---|---|------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 7 | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam setahun | 100 Persen | 1.000.000.000 | 25 Persen | 836.015.000 | |
| Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat | 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | 100 Persen | 292.680.000.005 | 100 Persen | 126.167.900.800 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N |
| | 2 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 100 Persen | 450.000.000 | 100 Persen | 186.660.000 | |
| | 3 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | 100 Persen | 547.540.000 | | 100.557.302.800 | DINAS KESEHATAN/ RSUD |
| | 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | 100 Persen | 2.588.900.000 | | 908.809.000 | |
| | 5 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | 100 Persen | 597.560.448 | | tdk ada | |
| | 6 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | 100 Persen | 2.259.823.174 | | 307.316.700 | |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|-------------------|---|---|------------|----------------|----------------------|----------------|---|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 7 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM Pekerjaan Umum | 100 Persen | 15.000.000.000 | 100 Persen | 11.685.600.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNG AN DAN PERTANAHA N |
| | 8 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Masyaraat Maros Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar Dan Kualifikasi SPM Perumahan | 100 Persen | 5.758.000.000 | 100 Persen | 504.445.000 | DINAS PERUMAHA N, KAWASAN PERMUKIMA N DAN LINGKUNGA N HIDUP |
| | 9 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Cakupan Layanan Kebencanaan Sesuai SPM Kebencanaan | 100 Persen | 3.752.688.250 | | 344.569.000 | BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH |
| | 10 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 14.465.973.333 | 100 persen | 319.244.500 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMA TAN |
| | 11 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial | 100 Persen | 1.080.000.000 | 100 persen | 327.274.000 | DINAS SOSIAL |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------------|-------------------|---|---|------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 12 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | 100 Persen | 2.659.000.000 | 100 persen | 150.936.000 | |
| | 13 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | 100 Persen | 2.420.000.000 | 100 persen | 756.950.000 | |
| | 14 | Program Penanganan Bencana | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana | 100 Persen | 1.175.000.000 | 100 persen | 323.556.500 | |
| Menurunnya jumlah masyarakat miskin | 1 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan | 100 Persen | 4.587.500.000 | 100 persen | 3.308.388.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 2 | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | 100 Persen | 292.680.000.005 | 100 persen | 126.167.900.800 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|-------------------|---|--|------------|----------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 3 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | 100 Persen | 547.540.000,00 | | 100.557.302.800,00 | Dinas Kesehatan |
| | 4 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Masyaraat Maros Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar Dan Kualifikasi SPM Perumahan | 100 Persen | 5.758.000.000 | 100 persen | 504.445.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 5 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | 100 Persen | 2.420.000.000 | 100 persen | 756.950.000 | DINAS SOSIAL |
| | 6 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Anak Yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak | 100 Persen | 324.000.000 | | 89.172.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 7 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 60 Persen | 9.013.410.550 | 60 persen | 2.131.388.000 | PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 8 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK | 89 persen | 975.000.000 | | 453.672.200 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 9 | Program Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk Yang Mengalami Peristiwa Penting dan Terdata dalam Pencatatan Sipil | 95 persen | 417.000.000 | | 59.654.900 | |

| SASARAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PRIORITAS | | INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) | TAHUN 2025 | | PERUBAHAN TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH |
|--------------------------------|-------------------|---|--|-------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | TARGET | | TARGET | | |
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| 3 | 4 | | 5 | 8 | 9 | | | 10 |
| | 10 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat Melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | 100 Persen | 1.290.000.000 | | 1.236.495.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKA R DESA |
| | 11 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen | 5.15 Persen | 4.335.000.000 | | 467.858.400 | |
| | 12 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 5.15 Persen | 120.000.000 | 2,25 Persen | 555.322.238 | DINAS PERIKANAN |
| | 13 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5.15 Persen | 120.000.000 | 5,4 Persen | 970.672.500 | |
| Menurunnya jumlah pengangguran | 1 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase Rencana Ketenagakerja an Yang ditindak Lanjuti | 100 Persen | 12.000.000 | 0 | 0 | DINAS PENANAMA N MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 37,54 Perse | 1.825.000.000 | | 60.207.800 | |
| | 3 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 24,5 Persen | 565.000.000 | | 88.281.900 | |

5.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025, maka disusunlah rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi perubahan rencana program/kegiatan dan sub kegiatan daerah tahun 2025, pada tabel berikut ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MAROS
TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | 485.444.625.884,00 | 471.083.200.658,00 | 494.733.005.836,00 | 9.288.379.952,00 | | | | | | 428.348.900.000,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 481.164.188.884,00 | 468.268.064.658,00 | 492.247.124.836,00 | 11.082.935.952,00 | | | | | | | 424.173.900.000,00 | |
| | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | 481.164.188.884,00 | 468.268.064.658,00 | 492.247.124.836,00 | 11.082.935.952,00 | | | | | | | 424.173.900.000,00 | |
| 1. | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 314.904.958.137,00 | 339.581.758.858,00 | 357.481.737.880,00 | -11.166.058.137,00 | | | | | | | 303.738.900.000,00 | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 70.125.000,00 | 67.200.000,00 | 67.200.000,00 | -2.925.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 167.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.950.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 2.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.300.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 1.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.125.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | -925.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.300.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 1.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.775.000,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 175.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.775.000,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 175.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | -2.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 17.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 5 Data | 5 Data | 15.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 50 Berita Acara | 50 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan yang tersedia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 312.808.894.037,00 | 337.773.373.858,00 | 356.388.712.580,00 | 43.579.818.543,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 300.812.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2600 Orang /bulan | 2600 Orang /bulan | 312.074.444.037,00 | 336.997.453.858,00 | 355.612.792.580,00 | 43.538.348.543,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 724.350.000,00 | 765.820.000,00 | 765.820.000,00 | 41.470.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.050.000,00 | 62.050.000,00 | 56.950.000,00 | -23.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 101.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 17.700.000,00 | 41.700.000,00 | 36.600.000,00 | 18.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|------------------------------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.350.000,00 | 20.350.000,00 | 20.350.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian yang tersedia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 57.400.000,00 | 62.500.000,00 | 33.300.000,00 | -24.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 145.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 100 Paket | 100 Paket | 17.500.000,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | -17.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.950.000,00 | 17.400.000,00 | 13.100.000,00 | -12.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.950.000,00 | 25.300.000,00 | 20.200.000,00 | 6.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum yang tersedia | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 673.339.100,00 | 647.614.000,00 | 376.954.300,00 | -296.384.800,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 971.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 20 Paket | 20 Paket | 15.574.600,00 | 16.061.500,00 | 16.061.500,00 | 486.900,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 27.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 22.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 86.175.500,00 | 114.150.500,00 | 93.620.500,00 | 7.445.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 115.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 56.549.000,00 | 61.549.000,00 | 37.370.300,00 | -19.178.700,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 55.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 79.250.000,00 | 65.750.000,00 | 33.950.000,00 | -45.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 140.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 385.950.000,00 | 346.263.000,00 | 162.112.000,00 | -223.838.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 525.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 36.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 357.000.000,00 | 318.000.000,00 | 100.000.000,00 | -257.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 910.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 78.000.000,00 | 46.500.000,00 | 0,00 | -78.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 279.000.000,00 | 271.500.000,00 | 100.000.000,00 | -179.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 55.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 55.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 396.900.000,00 | 266.300.000,00 | 266.300.000,00 | -130.600.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 452.900.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 14.500.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 7.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 14.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -3.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 18.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 370.400.000,00 | 235.900.000,00 | 235.900.000,00 | -134.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 370.400.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan barang milik daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 461.250.000,00 | 384.721.000,00 | 192.321.000,00 | -268.929.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 20.000.000,00 | 35.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 91.250.000,00 | 61.000.000,00 | 58.600.000,00 | -32.650.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 300.000.000,00 | 288.721.000,00 | 103.721.000,00 | -196.279.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Berpatisipasi Dalam Pendidikan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 165.866.635.747,00 | 128.288.660.800,00 | 134.417.741.956,00 | -47.456.635.747,00 | | | | | | | 118.410.000.000,00 | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | | | | 44592 Orang | 44592 Orang | 99.264.316.232,00 | 69.080.523.859,00 | 73.475.468.450,00 | -25.788.847.782,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Penduduk Usia 7-12 tahun | | 58.850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 4.000.000.000,00 | 1.155.000.000,00 | 0,00 | -4.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 5 Unit | 12 Unit | 3.740.000.000,00 | 840.200.000,00 | 2.162.062.400,00 | -1.577.937.600,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit | 3 Unit | 500.000.000,00 | 577.500.000,00 | 577.500.000,00 | 77.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 200.000.000,00 | 567.000.000,00 | 567.000.000,00 | 367.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 1.050.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | | | | 20 Paket | 20 Paket | 3.000.000.000,00 | 3.047.500.000,00 | 4.575.203.900,00 | 1.575.203.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 20 Paket | 20 Paket | 6.900.000.000,00 | 2.500.200.000,00 | 2.500.200.000,00 | -4.399.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 150 Peserta Didik | 150 Peserta Didik | 421.550.000,00 | 421.550.000,00 | 0,00 | -421.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 100 Orang | 100 Orang | 956.070.000,00 | 956.089.800,00 | 900.000.000,00 | -56.070.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 100 Orang | 100 Orang | 85.055.000,00 | 257.125.000,00 | 133.920.000,00 | 48.865.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | | 241 Satuan Pendidikan | 241 Satuan Pendidikan | 9.015.000,00 | 30.100.000,00 | 0,00 | -9.015.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | | 241 Satuan Pendidikan | 241 Satuan Pendidikan | 36.418.601.232,00 | 42.015.168.059,00 | 41.702.563.000,00 | 5.283.961.768,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 41.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 482 Orang | 482 Orang | 120.530.000,00 | 116.030.000,00 | 116.030.000,00 | -4.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 250.000.000,00 | 294.000.000,00 | 294.000.000,00 | 44.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 27.950.000,00 | 27.950.000,00 | 0,00 | -27.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 2 Konten Digital | 2 Konten Digital | 8.750.000,00 | 28.750.000,00 | 0,00 | -8.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i> | | | | 100 Orang | 100 Orang | 19.250.000,00 | 19.250.000,00 | 0,00 | -19.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.600.000,00 | 162.850.000,00 | 108.450.000,00 | 94.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 39.950.000,00 | 2.539.965.000,00 | 39.950.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i> | | | | 14 Komunitas | 14 Komunitas | 15.170.000,00 | 21.885.000,00 | 0,00 | -15.170.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0042 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i> | | | | 5 Paket | 2 Paket | 2.400.000.000,00 | 555.200.000,00 | 1.055.200.000,00 | -1.344.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i> | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 19.250.000,00 | 26.550.000,00 | 26.550.000,00 | 7.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i> | | | | 1000 Buku | 1000 Buku | 100.000.000,00 | 54.720.000,00 | 54.720.000,00 | -45.280.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i> | | | | 8000 Paket | 18250 Paket | 6.092.000.000,00 | 2.320.200.000,00 | 4.318.950.000,00 | -1.773.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i> | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 13.480.000.000,00 | 5.574.626.000,00 | 5.199.450.000,00 | -8.280.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> | | | | 8 Unit | 8 Unit | 450.000.000,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | -345.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 241 Satuan Pendidikan | 241 Satuan Pendidikan | 115.175.000,00 | 135.150.000,00 | 111.350.000,00 | -3.825.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 15 Ruang | 15 Ruang | 15.150.000.000,00 | 4.210.765.000,00 | 8.407.169.150,00 | -6.742.830.850,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 300 Peserta Didik | 300 Peserta Didik | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 8 Paket | 8 Paket | 200.000.000,00 | 520.200.000,00 | 520.200.000,00 | 320.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | | | | 21614 Orang | 21614 Orang | 52.729.297.500,00 | 38.616.349.941,00 | 40.943.349.706,00 | -11.785.947.794,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 36.275.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000.000,00 | 1.260.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|---|---|--------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 250.000.000,00 | 630.000.000,00 | 630.000.000,00 | 380.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 750.000,00 0 Unit | 750.000,00 0 Unit | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 4 Unit | 4 Unit | 1.650.000.000,00 | 0,00 | 1.095.991.306,00 | -554.008.694,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 20 Ruang | 20 Ruang | 5.750.000.000,00 | 0,00 | 813.750.000,00 | -4.936.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 650.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Unit | 3 Unit | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 4 Unit | 4 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|---|--------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 5 Paket | 5 Paket | 1.800.000.000,00 | 3.072.700.000,00 | 4.600.403.900,00 | 2.800.403.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 5 Paket | 14 Paket | 4.600.000.000,00 | 2.545.200.000,00 | 3.145.200.000,00 | -1.454.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 500 Peserta Didik | 500 Peserta Didik | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 100 Peserta Didik | 304.425.000,00 | 429.700.000,00 | 0,00 | -304.425.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 50 Orang | 50 Orang | 512.835.000,00 | 513.035.000,00 | 500.000.000,00 | -12.835.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 100 Orang | 100 Orang | 163.855.000,00 | 241.635.000,00 | 55.120.000,00 | -108.735.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | 74 Satuan Pendidikan | 74 Satuan Pendidikan | 111.575.000,00 | 207.363.000,00 | 120.013.000,00 | 8.438.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | | 74 Satuan Pendidikan | 74 Satuan Pendidikan | 19.039.100.000,00 | 18.808.644.941,00 | 19.121.250.000,00 | 82.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 18.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | 148 Orang | 148 Orang | 106.327.500,00 | 106.142.000,00 | 106.142.000,00 | -185.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 50 Orang | 50 Orang | 30.850.000,00 | 30.850.000,00 | 0,00 | -30.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 2 Konten Digital | 2 Konten Digital | 8.620.000,00 | 16.450.000,00 | 0,00 | -8.620.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 11.350.000,00 | 11.350.000,00 | 0,00 | -11.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.230.000,00 | 126.610.000,00 | 108.250.000,00 | 97.020.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.775.000,00 | 50.250.000,00 | 50.250.000,00 | 4.475.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | | 14 Komunitas | 14 Komunitas | 8.550.000,00 | 21.885.000,00 | 0,00 | -8.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 40.575.000,00 | 185.375.000,00 | 185.375.000,00 | 144.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 16000 Satuan Pendidikan | 16000 Satuan Pendidikan | 112.880.000,00 | 114.020.000,00 | 97.020.000,00 | -15.860.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 4.550.000.000,00 | 6.923.700.000,00 | 6.493.144.500,00 | 1.943.144.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 50 Orang | 50 Orang | 11.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | | | | 500 Buku | 500 Buku | 100.000.000,00 | 110.240.000,00 | 110.240.000,00 | 10.240.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 10 Paket | 10 Paket | 3.740.000.000,00 | 2.305.200.000,00 | 2.305.200.000,00 | -1.434.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | 850.000.000,00 | 735.000.000,00 | 735.000.000,00 | -115.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 5 Paket | 5 Paket | 400.000.000,00 | 171.000.000,00 | 171.000.000,00 | -229.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.02.2.02.0068 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | | | | 2 Paket | 20 Paket | 350.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | | | | 15272 Orang | 15272 Orang | 10.495.795.015,00 | 18.889.439.000,00 | 18.091.268.800,00 | 7.595.473.785,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Penduduk Usia 5-6 Tahun | | 17.800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit | 3 Unit | 1.048.750.000,00 | 262.500.000,00 | 262.500.000,00 | -786.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | | | | 10 Paket | 10 Paket | 480.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.320.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | | | | 10 Paket | 10 Paket | 475.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -475.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 500 Peserta Didik | 500 Peserta Didik | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | | | | 750 Orang | 750 Orang | 6.405.000,00 | 5.956.400.000,00 | 5.956.400.000,00 | 5.949.995.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 100 Orang | 100 Orang | 190.035.000,00 | 261.285.000,00 | 48.420.000,00 | -141.615.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 267 Satuan Pendidikan | 267 Satuan Pendidikan | 88.390.000,00 | 352.530.000,00 | 19.250.000,00 | -69.140.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | | | | 267 Satuan Pendidikan | 267 Satuan Pendidikan | 360.250.000,00 | 5.380.200.000,00 | 5.380.200.000,00 | 5.019.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | 241 Orang | 241 Orang | 93.450.000,00 | 78.470.000,00 | 78.470.000,00 | -14.980.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 2 Konten Digital | 2 Konten Digital | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 50.475.000,00 | 71.950.000,00 | 0,00 | -50.475.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.215.000,00 | 142.450.000,00 | 98.250.000,00 | 87.035.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 179.925.000,00 | 147.485.000,00 | 122.085.000,00 | -57.840.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | | 14 Komunitas | 14 Komunitas | 93.250.000,00 | 134.800.000,00 | 134.800.000,00 | 41.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 1.350.000.015,00 | 312.700.000,00 | 312.700.000,00 | -1.037.300.015,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0031 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | | | | 2 Paket | 2 Paket | 475.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 525.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0033 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 50 Peserta didik | 50 Peserta didik | 20.000.000,00 | 75.350.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0035 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | | | | 1500 Buku | 1500 Buku | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0036 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i> | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 23.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i> | | | | 100 Orang | 100 Orang | 43.860.000,00 | 47.100.000,00 | 47.100.000,00 | 3.240.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i> | | | | 20 Paket | 20 Paket | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> | | | | 3 Unit | 3 Unit | 1.175.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.175.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia</i> | | | | 10 Paket | 10 Paket | 950.000.000,00 | 1.779.879.000,00 | 1.779.879.000,00 | 829.879.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar</i> | | | | 13000 Satuan Pendidikan | 13000 Satuan Pendidikan | 141.340.000,00 | 141.340.000,00 | 103.400.000,00 | -37.940.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i> | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0050 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 100.000.000,00 | 945.000.000,00 | 947.814.800,00 | 847.814.800,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDDIKAN-RE GULER-PAUD | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penduduk usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 154 Orang | 154 Orang | 3.377.227.000,00 | 1.702.348.000,00 | 1.907.655.000,00 | -1.469.572.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Penduduk Usia 7- 18 Tahun | | 5.485.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 50 Peserta Didik | 50 Peserta Didik | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 20 Orang | 20 Orang | 6.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.980.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Penilaian Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 50 Orang | 50 Orang | 32.250.000,00 | 32.250.000,00 | 0,00 | -32.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 12 Satuan Pendidikan | 12 Satuan Pendidikan | 14.550.000,00 | 44.550.000,00 | 30.000.000,00 | 15.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | | | | 12 Satuan Pendidikan | 12 Satuan Pendidikan | 37.605.000,00 | 545.600.000,00 | 545.600.000,00 | 507.995.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | 50 Orang | 50 Orang | 23.055.000,00 | 23.055.000,00 | 23.055.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 50 Orang | 50 Orang | 59.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 2 Konten Digital | 2 Konten Digital | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 30 Orang | 30 Orang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 336.620.000,00 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 | -243.620.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | | 12 Komunitas | 12 Komunitas | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 23.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0033 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | | | | 1 Paket | 1 Paket | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 50 Peserta Didik | 50 Peserta Didik | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 500 Paket | 500 Paket | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0037 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | | | | 500 Buku | 500 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0038 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SKB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SKB | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 12 Paket | 12 Paket | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Unit | 2 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 25 Orang | 25 Orang | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0043 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 12 Peserta Didik | 12 Peserta Didik | 184.017.000,00 | 188.893.000,00 | 0,00 | -184.017.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0052 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | | | | 2 unit | 2 unit | 100.000.000,00 | 525.000.000,00 | 966.000.000,00 | 866.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | | | | 12 Paket | 12 Paket | 375.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -375.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0056 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0057 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0058 | Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0059 | Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0060 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 3. | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Nilai Rata - Rata Nilai Standar Nasional Pendidikan | | | | 68 Persen | 68 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000.000,00 | | | | | | | 550.000.000,00 | | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang diterapkan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Penduduk Usia 5-18 tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya | | | | 30 Orang | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.03.2.01.0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikann Anak Usia Dini dan Nonformal yang diterapkan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Penduduk Usia 5-18 tahun | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.03.2.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.03.2.02.0005 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 4. | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 269.260.000,00 | 236.660.000,00 | 186.660.000,00 | 130.740.000,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | | | | 75 Persen | 75 Persen | 269.260.000,00 | 236.660.000,00 | 186.660.000,00 | -82.600.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.060.000,00 | 115.060.000,00 | 115.060.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 154.200.000,00 | 121.600.000,00 | 71.600.000,00 | -82.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 5. | 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Perizinan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000.000,00 | | | | | | | 425.000.000,00 | |
| | 1.01.05.2.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Penerbitan Dokumen Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat yang dikelola | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Satuan Pendidikan | | 175.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Penerbitan Dokumen Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat yang dikelola | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.02.0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 6. | 1.01.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal | | | | 100 Persen | 100 Persen | 123.335.000,00 | 160.985.000,00 | 160.985.000,00 | 526.665.000,00 | | | | | | | 650.000.000,00 | |
| | 1.01.06.2.01 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 123.335.000,00 | 160.985.000,00 | 160.985.000,00 | 37.650.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat | | 650.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.06.2.01.0002 | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | | | | 2 Bahasa | 2 Bahasa | 123.335.000,00 | 160.985.000,00 | 160.985.000,00 | 37.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.06.2.01.0003 | Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2 Publikasi | 2 Publikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.06.2.01.0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|--|--------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi | | | | 500 Buku | 500 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.06.2.01.0006 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Peserta Didik | 100 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.06.2.01.0007 | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 4.280.437.000,00 | 2.815.136.000,00 | 2.485.881.000,00 | -1.794.556.000,00 | | | | | | | 4.175.000.000,00 | | |
| | 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | 4.280.437.000,00 | 2.815.136.000,00 | 2.485.881.000,00 | -1.794.556.000,00 | | | | | | | 4.175.000.000,00 | | |
| 1. | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 371.270.000,00 | 473.570.000,00 | 500.865.000,00 | 928.730.000,00 | | | | | | | 1.300.000.000,00 | | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kebudayaan yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat | | | | 6 Objek | 6 Objek | 40.500.000,00 | 58.700.000,00 | 0,00 | -40.500.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | | | | 2 Objek | 2 Objek | 40.500.000,00 | 58.700.000,00 | 0,00 | -40.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesenian tradisional yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat | | | | 5 Objek | 5 Objek | 151.655.000,00 | 135.755.000,00 | 135.755.000,00 | -15.900.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | | | 2 Objek | 2 Objek | 151.655.000,00 | 135.755.000,00 | 135.755.000,00 | -15.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Adat yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 179.115.000,00 | 279.115.000,00 | 365.110.000,00 | 185.995.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.02.2.03.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | | | 3 Objek | 3 Objek | 179.115.000,00 | 279.115.000,00 | 365.110.000,00 | 185.995.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.02.2.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|---|--|--------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | | NASIONAL | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 2. | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 224.125.000,00 | 224.125.000,00 | 243.350.000,00 | 25.875.000,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesenian tradisional yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat | | | | 14 Objek | 14 Objek | 224.125.000,00 | 224.125.000,00 | 243.350.000,00 | 19.225.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | | | | 100 Orang | 100 Orang | 174.125.000,00 | 174.125.000,00 | 243.350.000,00 | 69.225.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 3. | 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal | | | | 100 Persen | 100 Persen | 36.800.000,00 | 36.800.000,00 | 0,00 | 338.200.000,00 | | | | | | | 375.000.000,00 | | |
| | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penduduk yang mendapatkan pengetahuan dan pembinaan sejarah lokal | | | | 100 Orang | 100 Orang | 36.800.000,00 | 36.800.000,00 | 0,00 | -36.800.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat | | 375.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.04.2.01.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.04.2.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.800.000,00 | 36.800.000,00 | 0,00 | -36.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 4. | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.661.251.000,00 | 997.451.000,00 | 905.651.000,00 | -1.461.251.000,00 | | | | | | | 1.200.000.000,00 | | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola, dilestirikan dan dikembangkan oleh masyarakat | | | | 233 Objek | 233 Objek | 116.251.000,00 | 184.951.000,00 | 93.151.000,00 | -23.100.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | | | | 5 Objek | 5 Objek | 15.026.000,00 | 15.026.000,00 | 8.876.000,00 | -6.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | | | | 5 Objek | 5 Objek | 101.225.000,00 | 169.925.000,00 | 84.275.000,00 | -16.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola | | | | 2 Objek | 2 Objek | 2.545.000.000,00 | 812.500.000,00 | 812.500.000,00 | -1.732.500.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | | | | 40 Objek | 40 Objek | 445.000.000,00 | 272.500.000,00 | 272.500.000,00 | -172.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | | | | 5 Objek | 5 Objek | 2.100.000.000,00 | 540.000.000,00 | 540.000.000,00 | -1.560.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | | | | 5 Objek | 5 Objek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 5. | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam setahun | | | | 25 Persen | 25 Persen | 986.991.000,00 | 1.083.190.000,00 | 836.015.000,00 | 63.009.000,00 | | | | | | | 1.050.000.000,00 | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Jumlah Museum Kab.kota yang dikelola dengan baik | | | | 1 Unit | 1 Unit | 986.991.000,00 | 1.083.190.000,00 | 836.015.000,00 | -150.976.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat | | 1.050.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | 225 Unit | 225 Unit | 237.989.000,00 | 185.455.000,00 | 185.455.000,00 | -52.534.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | | | | 30 Orang | 30 Orang | 108.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | | | 1 Unit | 1 Unit | 415.252.000,00 | 410.390.000,00 | 410.390.000,00 | -4.862.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 175.750.000,00 | 18.345.000,00 | 18.345.000,00 | -157.405.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | 469.000.000,00 | 221.825.000,00 | 171.825.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | DINAS KESEHATAN | | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 160.015.000,00 | 101.075.000,00 | 40.161.000,00 | -119.854.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 127.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 3.773.000,00 | -10.227.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.908.000,00 | 12.908.000,00 | 5.548.000,00 | -7.360.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 7.330.000,00 | -5.670.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 3.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.871.000,00 | 13.871.000,00 | 2.810.000,00 | -11.061.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.036.000,00 | 10.036.000,00 | 4.500.000,00 | -5.536.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.000.000,00 | 9.860.000,00 | 1.800.000,00 | -14.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 16.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 67.200.000,00 | 14.400.000,00 | 11.400.000,00 | -55.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 66.345.689.376,00 | 68.569.109.481,00 | 98.423.336.232,00 | 32.077.646.856,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 65.989.096.214,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1000 Orang /bulan | 1000 Orang /bulan | 65.505.898.876,00 | 67.740.058.481,00 | 97.820.567.232,00 | 32.314.668.356,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 64.753.916.214,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 810.644.500,00 | 802.760.000,00 | 592.830.000,00 | -217.814.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.225.180.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.146.000,00 | 26.291.000,00 | 9.939.000,00 | -19.207.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 35.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 17.500.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 17.500.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.186.589.000,00 | 887.377.500,00 | 644.259.000,00 | -542.330.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 1.119.912.965,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 21.400.000,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | -7.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 21.400.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 26.666.500,00 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | -23.156.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 42.650.500,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 434.917.500,00 | 195.032.500,00 | 148.500.000,00 | -286.417.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 418.742.465,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.925.000,00 | 27.925.000,00 | 27.925.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 24.675.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.020.000,00 | 18.775.000,00 | 16.275.000,00 | 255.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 13.925.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 488.060.000,00 | 485.835.000,00 | 291.749.000,00 | -196.311.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 453.320.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 171.600.000,00 | 142.800.000,00 | 142.800.000,00 | -28.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 145.200.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 277.000.000,00 | 280.800.000,00 | 280.800.000,00 | 3.800.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | - | 0 0 | 119.500.000,00 | 164.800.000,00 | 164.800.000,00 | 45.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | | NASIONAL | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 15 Unit | 15 Unit | 157.500.000,00 | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 | -41.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 75.000.000,00 | 69.250.000,00 | 69.250.000,00 | -5.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 83.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.000.000,00 | 18.250.000,00 | 18.250.000,00 | -5.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 32.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 51.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 777.860.000,00 | 783.400.000,00 | 888.900.000,00 | 111.040.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 145.840.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 277.860.000,00 | 258.400.000,00 | 166.400.000,00 | -111.460.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.840.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500.000.000,00 | 525.000.000,00 | 722.500.000,00 | 222.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 46.325.500.000,00 | 9.585.500.000,00 | 11.043.864.000,00 | -35.281.636.000,00 | Kab. Maros, Camba, Mario Pulana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 49.179.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun</i> | | | | 4 Unit | 4 Unit | 11.450.000.000,00 | 5.857.000.000,00 | 5.660.322.000,00 | -5.789.678.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Baruga Kab. Maros, Tanrallili, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Simbang, Tanete | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 12.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | 10000 Unit | 10000 Unit | 10.851.259.380,00 | 3.474.500.000,00 | 3.671.459.500,00 | -7.179.799.880,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | | | | 4 Unit | 4 Unit | 500.000.000,00 | 1.090.000.000,00 | 1.084.348.000,00 | 584.348.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 6.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 1.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 2.000.000.000,00 | 12.500.000.000,00 | 12.193.800.982,00 | 10.193.800.982,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 2.250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | | | | 14 Unit | 14 Unit | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | 14 Unit | 14 Unit | 28.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.500.000.000,00 | 8.877.639.000,00 | 8.877.639.000,00 | 3.377.639.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 1.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas</i> | | | | 6600 Keluarga | 6600 Keluarga | 14.280.000,00 | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | -7.140.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 92.560.000,00 | 71.020.000,00 | 71.020.000,00 | -21.540.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 130.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 6600 Orang | 6600 Orang | 154.410.000,00 | 437.206.000,00 | 264.206.000,00 | 109.796.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 6600 Orang | 6600 Orang | 93.000.000,00 | 339.940.000,00 | 462.940.000,00 | 369.940.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 6600 Orang | 6600 Orang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 6600 Orang | 6600 Orang | 113.910.000,00 | 44.940.000,00 | 42.560.000,00 | -71.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 10000 Orang | 10000 Orang | 1.036.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.036.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 10000 Orang | 10000 Orang | 15.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.320.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 6000 Orang | 6000 Orang | 1.517.625.000,00 | 13.260.000,00 | 13.260.000,00 | -1.504.365.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 6000 Orang | 6000 Orang | 39.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -39.300.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 5000 Orang | 5000 Orang | 227.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | -227.908.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 100 Orang | 100 Orang | 6.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.780.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 10000 Orang | 10000 Orang | 106.780.000,00 | 53.780.000,00 | 53.780.000,00 | -53.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 6600 Dokumen | 6600 Dokumen | 46.780.000,00 | 409.160.000,00 | 355.300.000,00 | 308.520.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 174.411.100,00 | 0,00 | 0,00 | -174.411.100,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 168.300.000,00 | 337.671.000,00 | 349.006.000,00 | 180.706.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 613.342.600,00 | 163.495.000,00 | 286.495.000,00 | -326.847.600,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 57.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.120.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 139.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | -139.760.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 10000 Orang | 10000 Orang | 269.252.000,00 | 308.860.000,00 | 252.810.000,00 | -16.442.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | 450.000.000,00 | 400.000.000,00 | -100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.014.121.500,00 | 354.500.000,00 | 354.500.000,00 | -659.621.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.003.988.400,00 | 27.590.646.850,00 | 27.590.646.850,00 | 3.586.658.450,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 35.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 235.976.000,00 | 131.943.000,00 | 55.988.000,00 | -179.988.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 190.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.324.100.000,00 | 14.408.725.650,00 | 15.312.819.250,00 | 11.988.719.250,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 5.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 332.280.000,00 | 394.808.000,00 | 340.500.000,00 | 8.220.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | | | | 1 Unit | 1 Unit | 167.868.000,00 | 167.868.000,00 | 55.700.000,00 | -112.168.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.780.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.940.230.000,00 | 2.384.410.000,00 | 2.329.660.000,00 | 389.430.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 6600 Dokumen | 6600 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 171.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -171.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 6600 Dokumen | 6600 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 6000 Dokumen | 6000 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -49.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 92.140.000,00 | 81.820.000,00 | 57.910.000,00 | -34.230.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 164.138.000,00 | 0,00 | 0,00 | -164.138.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | | | | 50 Unit | 50 Unit | 164.138.000,00 | 0,00 | 0,00 | -164.138.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 3. | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | | | | - | - | 6.848.948.000,00 | 1.013.092.000,00 | 908.809.000,00 | -4.398.948.000,00 | | | | | | 2.450.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 10.030.000,00 | 10.166.000,00 | 0,00 | -10.030.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.030.000,00 | 10.166.000,00 | 0,00 | -10.030.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 303.498.000,00 | 11.437.000,00 | 0,00 | -303.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 303.498.000,00 | 11.437.000,00 | 0,00 | -303.498.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 6.535.420.000,00 | 991.489.000,00 | 908.809.000,00 | -5.626.611.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | 1280 Orang | 1280 Orang | 6.535.420.000,00 | 991.489.000,00 | 908.809.000,00 | -5.626.611.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 4. | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | - | | | | - | - | 46.000.000,00 | 411.457.000,00 | 411.457.000,00 | 654.000.000,00 | | | | | | | 700.000.000,00 | | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | - | | | | - | - | 24.000.000,00 | 83.333.000,00 | 83.333.000,00 | 59.333.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.000.000,00 | 83.333.000,00 | 83.333.000,00 | 59.333.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | - | | | | - | - | 12.000.000,00 | 241.129.000,00 | 241.129.000,00 | 229.129.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | 241.129.000,00 | 241.129.000,00 | 229.129.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 86.995.000,00 | 86.995.000,00 | 76.995.000,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i> | | | | 0 Unit | 0 Unit | 10.000.000,00 | 86.995.000,00 | 86.995.000,00 | 76.995.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.600.000,00 | 322.180.000,00 | 101.520.000,00 | -99.080.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI | | | | | | | 109.505.587.541,00 | 133.503.677.017,00 | 133.312.445.226,00 | 23.806.857.685,00 | | | | | 70.510.439.149,00 | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 109.505.587.541,00 | 133.503.677.017,00 | 133.312.445.226,00 | 23.806.857.685,00 | | | | | | | 70.510.439.149,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 109.505.587.541,00 | 133.503.677.017,00 | 133.312.445.226,00 | 23.806.857.685,00 | | | | | | | 70.510.439.149,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 100.165.587.541,00 | 108.374.602.017,00 | 100.800.236.716,00 | -32.165.587.541,00 | | | | | | | 68.000.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 27.995.148.396,00 | 30.009.602.017,00 | 1.929.093.266,00 | -26.066.055.130,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 900 Orang/ bulan | 900 Orang/ bulan | 27.995.148.396,00 | 30.009.602.017,00 | 1.929.093.266,00 | -26.066.055.130,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 19.170.439.145,00 | 22.700.000.000,00 | 25.700.000.000,00 | 6.529.560.855,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 14.600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.470.439.145,00 | 0,00 | 0,00 | -10.470.439.145,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 2 Paket | 8.700.000.000,00 | 22.700.000.000,00 | 25.700.000.000,00 | 17.000.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 14.600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 665.000.000,00 | 665.000.000,00 | 665.000.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 665.000.000,00 | 665.000.000,00 | 665.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 53.000.000.000,00 | 55.000.000.000,00 | 72.506.143.450,00 | 19.506.143.450,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 53.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 53.000.000.000,00 | 55.000.000.000,00 | 72.506.143.450,00 | 19.506.143.450,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 53.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 9.340.000.000,00 | 25.129.075.000,00 | 32.512.208.510,00 | -6.829.560.851,00 | | | | | | | 2.510.439.149,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 9.340.000.000,00 | 25.129.075.000,00 | 32.512.208.510,00 | 23.172.208.510,00 | | | - | - | - | | 2.510.439.149,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 7.000.000.000,00 | 10.700.000.000,00 | 17.011.923.510,00 | 10.011.923.510,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Taroada | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i> | | | | 15 Unit | 15 Unit | 2.340.000.000,00 | 14.429.075.000,00 | 15.500.285.000,00 | 13.160.285.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.510.439.149,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PUSKESMAS LAU | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.580.212.870,00 | 2.429.248.000,00 | 2.724.644.105,00 | 144.431.235,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.580.212.870,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 27236 Keluarga | 27236 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 491 Orang | 491 Orang | 30.607.000,00 | 75.920.000,00 | 75.920.000,00 | 45.313.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 491 Orang | 491 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 491 Orang | 491 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1823 Orang | 1823 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 6112 Orang | 6112 Orang | 30.607.000,00 | 50.470.000,00 | 50.470.000,00 | 19.863.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 18650 Orang | 18650 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2474 Orang | 2474 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 371 Orang | 371 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 219 Orang | 219 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i> | | | | 84 Orang | 84 Orang | 30.607.000,00 | 18.480.000,00 | 18.480.000,00 | -12.127.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i> | | | | 171 Orang | 171 Orang | 30.607.000,00 | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 | -15.907.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i> | | | | 518 Orang | 518 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 226.100.000,00 | 226.100.000,00 | 195.493.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | -21.857.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 14.560.000,00 | 14.560.000,00 | -16.047.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 25.880.000,00 | 25.880.000,00 | -4.727.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i> | | | | 84 Orang | 84 Orang | 30.607.000,00 | 7.280.000,00 | 7.280.000,00 | -23.327.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i> | | | | 6112 Orang | 6112 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 106.211.000,00 | 106.211.000,00 | 75.604.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah</i> | | | | 6112 Orang | 6112 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 218.097.550,00 | 218.097.550,00 | 187.490.550,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | -26.707.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 27 Orang | 27 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 4 Orang | 4 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 20.742.800,00 | 20.742.800,00 | -9.864.200,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | -27.807.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 10.080.000,00 | 10.080.000,00 | -20.527.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | -7.507.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.642.000,00 | 12.855.000,00 | 12.855.000,00 | -17.787.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | | PUSKESMAS MAROS BARU | | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.556.000.000,00 | 1.951.035.000,00 | 2.280.968.704,00 | 724.968.704,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.556.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 16851 Keluarga | 16851 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 500 Orang | 500 Orang | 30.607.000,00 | 75.190.000,00 | 75.190.000,00 | 44.583.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 434 Orang | 434 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 434 Orang | 434 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1877 Orang | 1877 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 4324 Orang | 4324 Orang | 30.607.000,00 | 43.820.000,00 | 43.820.000,00 | 13.213.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 10182 Orang | 10182 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2345 Orang | 2345 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1069 Orang | 1069 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 233 Orang | 233 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 58 Orang | 58 Orang | 30.607.000,00 | 25.060.000,00 | 25.060.000,00 | -5.547.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 264 Orang | 264 Orang | 30.607.000,00 | 16.450.000,00 | 16.450.000,00 | -14.157.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 564 Orang | 564 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 231.822.800,00 | 231.822.800,00 | 201.215.800,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 15.470.000,00 | 15.470.000,00 | -15.137.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 13.160.000,00 | 13.160.000,00 | -17.447.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 27.640.000,00 | 27.640.000,00 | -2.967.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 58 Orang | 58 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 500 Orang | 500 Orang | 30.607.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | -23.047.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 119.550.000,00 | 119.550.000,00 | 88.943.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 500 Orang | 500 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 228.432.550,00 | 228.432.550,00 | 197.825.550,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 117 Orang | 117 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 7 Orang | 7 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -22.207.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 10.780.000,00 | 10.780.000,00 | -19.827.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.642.000,00 | 12.690.000,00 | 12.690.000,00 | -17.952.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | | PUSKESMAS BANTIMURUNG | | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.929.062.321,00 | 3.403.097.000,00 | 3.567.221.247,00 | 638.158.926,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 2.902.062.321,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas</i> | | | | 27841 Keluarga | 27841 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 433 Orang | 433 Orang | 30.607.000,00 | 51.653.000,00 | 51.653.000,00 | 21.046.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 433 Orang | 433 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 5241 Orang | 5241 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2193 Orang | 2193 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 5241 Orang | 5241 Orang | 30.607.000,00 | 53.060.000,00 | 54.180.000,00 | 23.573.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 19701 Orang | 19701 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2899 Orang | 2899 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1354 Orang | 1354 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 239 Orang | 239 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 112 Orang | 112 Orang | 30.607.000,00 | 39.060.000,00 | 39.900.000,00 | 9.293.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 437 Orang | 437 Orang | 30.607.000,00 | 17.220.000,00 | 17.220.000,00 | -13.387.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 501 Orang | 501 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 228.760.000,00 | 222.040.000,00 | 191.433.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 15.330.000,00 | 16.590.000,00 | -14.017.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | -15.487.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 21.790.000,00 | 21.790.000,00 | -8.817.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 112 Orang | 112 Orang | 30.607.000,00 | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | -19.407.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 5241 Orang | 5241 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 93.221.000,00 | 93.221.000,00 | 62.614.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 5241 Orang | 5241 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 215.232.700,00 | 215.142.400,00 | 184.535.400,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 64 Orang | 64 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 11 Orang | 11 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 8.260.000,00 | 9.520.000,00 | -21.087.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | -30.467.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 11.200.000,00 | 12.320.000,00 | -18.287.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 37.100.000,00 | 37.100.000,00 | 6.493.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.642.000,00 | 17.680.000,00 | 18.890.300,00 | -11.751.700,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PUSKESMAS SIMBANG | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.280.851.261,00 | 1.421.613.000,00 | 1.460.470.688,00 | 179.619.427,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.280.851.261,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 21124 Keluarga | 21124 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 460 Orang | 460 Orang | 30.607.000,00 | 77.580.000,00 | 35.040.000,00 | 4.433.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 0 Orang | 0 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 460 Orang | 460 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1878 Orang | 1878 Orang | 30.607.000,00 | 48.320.000,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 3824 Orang | 3824 Orang | 30.607.000,00 | 41.812.700,00 | 50.352.700,00 | 19.745.700,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 14798 Orang | 14798 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2502 Orang | 2502 Orang | 30.607.000,00 | 10.920.000,00 | 10.080.000,00 | -20.527.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1323 Orang | 1323 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 149 Orang | 149 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 66 Orang | 66 Orang | 30.607.000,00 | 5.460.000,00 | 10.500.000,00 | -20.107.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 221 Orang | 221 Orang | 30.607.000,00 | 23.800.000,00 | 23.800.000,00 | -6.807.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 495 Orang | 495 Orang | 30.607.000,00 | 2.520.000,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 206.500.000,00 | 262.780.000,00 | 232.173.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 8.680.000,00 | 16.800.000,00 | -13.807.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 13.860.000,00 | 13.860.000,00 | -16.747.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 9.170.000,00 | 17.280.000,00 | -13.327.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 66 Orang | 66 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 3824 Orang | 3824 Orang | 30.607.000,00 | 9.240.000,00 | 13.860.000,00 | -16.747.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 123.340.000,00 | 132.660.000,00 | 102.053.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 3824 Orang | 3824 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 228.432.550,00 | 215.522.350,00 | 184.915.350,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 2.520.000,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 34 Orang | 34 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 5 Orang | 5 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 11.480.000,00 | 17.220.000,00 | -13.387.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.642.000,00 | 12.390.000,00 | 16.270.200,00 | -14.371.800,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | | PUSKESMAS MANDAI | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.580.212.870,00 | 2.438.951.000,00 | 2.557.996.867,00 | -22.216.003,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.350.418.027,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 33785 Keluarga | 33785 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 800 Orang | 800 Orang | 30.607.000,00 | 62.780.000,00 | 62.780.000,00 | 32.173.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 800 Orang | 800 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 800 Orang | 800 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 3960 Orang | 3960 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 8351 Orang | 8351 Orang | 30.607.000,00 | 62.860.000,00 | 62.860.000,00 | 32.253.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 23706 Orang | 23706 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1728 Orang | 1728 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 467 Orang | 467 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 252 Orang | 252 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 76 Orang | 76 Orang | 30.607.000,00 | 21.840.000,00 | 21.840.000,00 | -8.767.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 567 Orang | 567 Orang | 30.607.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | -11.007.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 905 Orang | 905 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 227.360.000,00 | 227.360.000,00 | 196.753.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 10.080.000,00 | 10.080.000,00 | -20.527.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 13.860.000,00 | 13.860.000,00 | -16.747.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 23.355.000,00 | 23.355.000,00 | -7.252.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 76 Orang | 76 Orang | 30.607.000,00 | 7.280.000,00 | 7.280.000,00 | -23.327.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 8351 Orang | 8351 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 97.045.000,00 | 97.045.000,00 | 66.438.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 8351 Orang | 8351 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 217.302.550,00 | 217.302.550,00 | 186.695.550,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 4.954.000,00 | 4.954.000,00 | -25.653.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 105 Orang | 105 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 19 Orang | 19 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 16.802.800,00 | 16.802.800,00 | -13.804.200,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 3.640.000,00 | 3.640.000,00 | -26.967.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 10.080.000,00 | 10.080.000,00 | -20.527.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 30.590.000,00 | 30.590.000,00 | -17.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.642.000,00 | 11.550.000,00 | 11.550.000,00 | -19.092.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | | PUSKESMAS MALLAWA | | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.127.776.721,00 | 1.000.817.000,00 | 1.010.601.606,00 | -117.175.115,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.127.776.721,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 8856 Keluarga | 8856 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 100 Orang | 100 Orang | 30.607.000,00 | 68.102.800,00 | 68.102.800,00 | 37.495.800,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 100 Orang | 100 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 100 Orang | 100 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 689 Orang | 689 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1650 Orang | 1650 Orang | 30.607.000,00 | 47.800.000,00 | 47.800.000,00 | 17.193.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 5742 Orang | 5742 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1464 Orang | 1464 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 210 Orang | 210 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 500 Orang | 500 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 54 Orang | 54 Orang | 30.607.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | -17.407.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 52 Orang | 52 Orang | 30.607.000,00 | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | -17.207.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 108 Orang | 108 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 221.540.000,00 | 221.540.000,00 | 190.933.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | -13.707.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | -12.407.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | -2.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 54 Orang | 54 Orang | 30.607.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | -24.007.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 1650 Orang | 1650 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 83.850.000,00 | 83.850.000,00 | 53.243.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 1650 Orang | 1650 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 216.602.350,00 | 216.602.350,00 | 185.995.350,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 8 Orang | 8 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 500 Orang | 500 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | -10.407.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -28.207.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 24.200.000,00 | 24.200.000,00 | -6.407.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 10.393.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.631.000,00 | 14.030.200,00 | 14.030.200,00 | -16.600.800,00 | Kab. Maros, Malliawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PUSKESMAS TANRALILI | | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.305.500.000,00 | 2.389.535.000,00 | 2.501.309.336,00 | 195.809.336,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.250.190.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 19099 Keluarga | 19099 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 460 Orang | 460 Orang | 30.607.000,00 | 99.942.700,00 | 99.942.700,00 | 69.335.700,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 460 Orang | 460 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 460 Orang | 460 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 3360 Orang | 3360 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 4435 Orang | 4435 Orang | 30.607.000,00 | 38.640.000,00 | 38.640.000,00 | 8.033.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 12501 Orang | 12501 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2163 Orang | 2163 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1466 Orang | 1466 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 231 Orang | 231 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 52 Orang | 52 Orang | 30.607.000,00 | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | -24.167.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 281 Orang | 281 Orang | 30.607.000,00 | 16.940.000,00 | 16.940.000,00 | -13.667.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 547 Orang | 547 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 217.770.000,00 | 217.770.000,00 | 187.163.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 4.270.000,00 | 4.270.000,00 | -26.337.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 13.580.000,00 | 13.580.000,00 | -17.027.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 13.620.000,00 | 13.620.000,00 | -16.987.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 52 Orang | 52 Orang | 30.607.000,00 | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | -19.407.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 4435 Orang | 4435 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 100.130.000,00 | 100.130.000,00 | 69.523.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 4435 Orang | 4435 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 212.522.350,00 | 212.522.350,00 | 181.915.350,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 52 Orang | 52 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 11 Orang | 11 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 61.214.000,00 | 30.880.000,00 | 30.880.000,00 | -30.334.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | -29.627.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | -18.287.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 40.180.000,00 | 40.180.000,00 | 9.573.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.642.000,00 | 16.610.200,00 | 16.610.200,00 | -14.031.800,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | | PUSKESMAS MARUSU | | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.696.029.850,00 | 1.692.065.000,00 | 1.808.860.259,00 | 112.830.409,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 1.696.029.850,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | - | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas</i> | | | | 22350 Keluarga | 22350 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 582 Orang | 582 Orang | 30.607.000,00 | 66.430.000,00 | 66.430.000,00 | 35.823.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 582 Orang | 582 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 582 Orang | 582 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 2944 Orang | 2944 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 4069 Orang | 4069 Orang | 30.607.000,00 | 49.140.000,00 | 49.140.000,00 | 18.533.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 16260 Orang | 16260 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 2021 Orang | 2021 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 398 Orang | 398 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | 212 Orang | 212 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i> | | | | 67 Orang | 67 Orang | 30.607.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | -9.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i> | | | | 463 Orang | 463 Orang | 30.607.000,00 | 18.480.000,00 | 18.480.000,00 | -12.127.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 665 Orang | 665 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 237.362.800,00 | 237.362.800,00 | 206.755.800,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 8.890.000,00 | 8.890.000,00 | -21.717.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | -16.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 22.995.000,00 | 22.995.000,00 | -7.612.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 67 Orang | 67 Orang | 30.607.000,00 | 6.160.000,00 | 6.160.000,00 | -24.447.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 4069 Orang | 4069 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 102.795.000,00 | 102.795.000,00 | 72.188.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 4069 Orang | 4069 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 218.967.550,00 | 218.967.550,00 | 188.360.550,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | -26.207.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 70 Orang | 70 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 6 Orang | 6 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | -13.107.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | -29.627.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 11.760.000,00 | 11.760.000,00 | -18.847.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 26.180.000,00 | 26.180.000,00 | -4.427.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.642.000,00 | 13.385.000,00 | 13.385.000,00 | -17.257.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | | PUSKESMAS MONCONGLOE | | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.201.450.000,00 | 1.303.485.000,00 | 1.400.866.757,00 | 199.416.757,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.142.976.721,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 10608 Keluarga | 10608 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 266 Orang | 266 Orang | 30.607.000,00 | 27.250.000,00 | 17.250.000,00 | -13.357.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 266 Orang | 266 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 266 Orang | 266 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1391 Orang | 1391 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 3332 Orang | 3332 Orang | 30.607.000,00 | 57.500.000,00 | 57.500.000,00 | 26.893.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 6417 Orang | 6417 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1293 Orang | 1293 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 600 Orang | 600 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 165 Orang | 165 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 46 Orang | 46 Orang | 30.607.000,00 | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | -13.407.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 175 Orang | 175 Orang | 30.607.000,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | -15.407.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 400 Orang | 400 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 246.340.000,00 | 256.340.000,00 | 225.733.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | -4.207.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | -10.207.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 19.652.800,00 | 19.652.800,00 | -10.954.200,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 46 Orang | 46 Orang | 30.607.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | -27.407.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 2898 Orang | 2898 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 101.600.000,00 | 101.600.000,00 | 70.993.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 2898 Orang | 2898 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 216.422.350,00 | 217.862.350,00 | 187.255.350,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 100 Orang | 100 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 2 Orang | 2 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | -19.007.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | -2.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 29.200.000,00 | 29.200.000,00 | -1.407.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.642.000,00 | 16.060.200,00 | 14.620.200,00 | -16.021.800,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PUSKESMAS TOMPOBULU | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.465.625.000,00 | 1.479.660.000,00 | 1.567.849.298,00 | 102.224.298,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.385.625.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 13963 Keluarga | 13963 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 246 Orang | 246 Orang | 30.607.000,00 | 83.302.700,00 | 83.302.700,00 | 52.695.700,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 500 Orang | 500 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 246 Orang | 246 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1539 Orang | 1539 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2693 Orang | 2693 Orang | 30.607.000,00 | 45.600.000,00 | 45.600.000,00 | 14.993.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 9864 Orang | 9864 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1406 Orang | 1406 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 665 Orang | 665 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 100 Orang | 100 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 28 Orang | 28 Orang | 30.607.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -24.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 146 Orang | 146 Orang | 30.607.000,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | -7.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 275 Orang | 275 Orang | 30.607.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -28.207.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 238.340.000,00 | 238.340.000,00 | 207.733.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | -24.407.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | -11.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 17.808.100,00 | 17.808.100,00 | -12.798.900,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 28 Orang | 28 Orang | 30.607.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | -16.207.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 2693 Orang | 2693 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 96.541.900,00 | 96.541.900,00 | 65.934.900,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 2693 Orang | 2693 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 210.882.350,00 | 210.882.350,00 | 180.275.350,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -30.207.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 26 Orang | 26 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 1 Orang | 1 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | -24.207.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -28.107.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | -13.007.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | -5.307.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.642.000,00 | 20.350.200,00 | 20.350.200,00 | -10.291.800,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PUSKESMAS BONTOA | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.254.875.000,00 | 2.145.326.000,00 | 2.163.751.553,00 | -91.123.447,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.254.875.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 23185 Keluarga | 23185 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 587 Orang | 587 Orang | 30.607.000,00 | 58.200.000,00 | 58.200.000,00 | 27.593.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 587 Orang | 587 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 587 Orang | 587 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2228 Orang | 2228 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 4386 Orang | 4386 Orang | 30.607.000,00 | 66.220.000,00 | 66.220.000,00 | 35.613.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 16317 Orang | 16317 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2482 Orang | 2482 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 969 Orang | 969 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 188 Orang | 188 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 68 Orang | 68 Orang | 30.607.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | -23.047.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 350 Orang | 350 Orang | 30.607.000,00 | 16.240.000,00 | 16.240.000,00 | -14.367.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 625 Orang | 625 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 245.350.000,00 | 245.350.000,00 | 214.743.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 8.120.000,00 | 8.120.000,00 | -22.487.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 14.980.000,00 | 14.980.000,00 | -15.627.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 22.700.000,00 | 22.700.000,00 | -7.907.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 68 Orang | 68 Orang | 30.607.000,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | -24.727.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 4386 Orang | 4386 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 111.911.000,00 | 111.911.000,00 | 81.304.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 4386 Orang | 4386 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 215.987.700,00 | 215.987.700,00 | 185.380.700,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 63 Orang | 63 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 5 Orang | 5 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 15.012.800,00 | 15.012.800,00 | -15.594.200,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | -30.187.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 13.860.000,00 | 13.860.000,00 | -16.747.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 18.620.000,00 | 18.620.000,00 | -11.987.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.642.000,00 | 14.965.000,00 | 14.965.000,00 | -15.677.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PUSKESMAS TURIKALE | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | 244.745.260.392,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.732.076.721,00 | 2.852.328.000,00 | 2.972.404.804,00 | 240.328.083,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.732.076.721,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 20033 Keluarga | 20033 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 248 Orang | 248 Orang | 30.607.000,00 | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 36.393.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 248 Orang | 248 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 248 Orang | 248 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2320 Orang | 2320 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 5929 Orang | 5929 Orang | 30.607.000,00 | 66.920.000,00 | 66.920.000,00 | 36.313.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 500 Orang | 500 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 3565 Orang | 3565 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1080 Orang | 1080 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 411 Orang | 411 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 93 Orang | 93 Orang | 30.607.000,00 | 11.760.000,00 | 11.760.000,00 | -18.847.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 545 Orang | 545 Orang | 30.607.000,00 | 16.310.000,00 | 16.310.000,00 | -14.297.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 310 Orang | 310 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 30.607.000,00 | 232.960.000,00 | 232.960.000,00 | 202.353.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 10.430.000,00 | 10.430.000,00 | -20.177.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 13.860.000,00 | 13.860.000,00 | -16.747.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 24.530.000,00 | 24.530.000,00 | -6.077.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 93 Orang | 93 Orang | 30.607.000,00 | 8.960.000,00 | 8.960.000,00 | -21.647.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 5929 Orang | 5929 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 95.170.000,00 | 95.170.000,00 | 64.563.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 5929 Orang | 5929 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 215.712.550,00 | 215.712.550,00 | 185.105.550,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | -26.207.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 54 Orang | 54 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 16 Orang | 16 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 10.132.700,00 | 10.132.700,00 | -20.474.300,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | -29.347.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 10.780.000,00 | 10.780.000,00 | -19.827.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 34.580.000,00 | 34.580.000,00 | 3.973.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.642.000,00 | 15.660.000,00 | 15.660.000,00 | -14.982.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | PUSKESMAS CENRANA | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | | | 244.745.260.392,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | | | 93.616.260.392,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.208.770.000,00 | 1.053.805.000,00 | 1.056.210.183,00 | -152.559.817,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.094.716.721,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 12044 Keluarga | 12044 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 145 Orang | 145 Orang | 30.607.000,00 | 75.602.800,00 | 82.902.800,00 | 52.295.800,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 145 Orang | 145 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 145 Orang | 145 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 969 Orang | 969 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2018 Orang | 2018 Orang | 30.607.000,00 | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 10.793.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 8147 Orang | 8147 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1879 Orang | 1879 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 375 Orang | 375 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 60 Orang | 60 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 45 Orang | 45 Orang | 30.607.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -22.207.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 72 Orang | 72 Orang | 30.607.000,00 | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | -18.207.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 167 Orang | 167 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 231.740.000,00 | 224.740.000,00 | 194.133.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | -24.207.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | -7.407.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 20.451.000,00 | 20.451.000,00 | -10.156.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 45 Orang | 45 Orang | 30.607.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | -23.807.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 2018 Orang | 2018 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 89.800.000,00 | 91.900.000,00 | 61.293.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 2018 Orang | 2018 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 218.962.350,00 | 218.362.350,00 | 187.755.350,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 11 Orang | 11 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 4 Orang | 4 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 28.000.000,00 | 28.300.000,00 | -2.307.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | -24.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 14.000.000,00 | 15.400.000,00 | -15.207.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 38.600.000,00 | 36.500.000,00 | 5.893.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.642.000,00 | 12.270.200,00 | 12.870.200,00 | -17.771.800,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | | PUSKESMAS CAMBA | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | 244.745.260.392,00 | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | 244.745.260.392,00 | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 230.861.173.370,00 | 201.606.873.481,00 | 234.180.352.555,00 | 3.319.179.185,00 | | | | | 244.745.260.392,00 | | | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 95.155.595.990,00 | 97.706.011.981,00 | 128.955.643.773,00 | -1.539.335.598,00 | | | | | 93.616.260.392,00 | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 26.298.442.614,00 | 27.000.000.000,00 | 28.608.937.541,00 | 2.310.494.927,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 25.733.811.213,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.380.000.000,00 | 1.439.035.000,00 | 1.535.782.134,00 | 155.782.134,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.380.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 128.171.052.380,00 | 101.954.026.300,00 | 103.598.566.082,00 | 18.617.947.620,00 | | | | | | | 146.789.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 77.201.597.380,00 | 41.462.799.000,00 | 42.609.593.482,00 | -34.592.003.898,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 74.964.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 10850 Keluarga | 10850 Keluarga | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.316.819.000,00 | 60.491.227.300,00 | 60.988.972.600,00 | 10.672.153.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 71.105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 145 Orang | 145 Orang | 30.607.000,00 | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 45.893.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 145 Orang | 145 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 145 Orang | 145 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 829 Orang | 829 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 1822 Orang | 1822 Orang | 30.607.000,00 | 44.800.000,00 | 44.800.000,00 | 14.193.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 6994 Orang | 6994 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2034 Orang | 2034 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 718 Orang | 718 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 192 Orang | 192 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 54 Orang | 54 Orang | 30.607.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -18.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 150 Orang | 150 Orang | 30.607.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | -16.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 201 Orang | 201 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 225.340.000,00 | 225.340.000,00 | 194.733.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | -25.207.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | -11.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.607.000,00 | 14.655.000,00 | 14.655.000,00 | -15.952.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 54 Orang | 54 Orang | 30.607.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | -27.407.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 1822 Orang | 1822 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 101.496.000,00 | 101.496.000,00 | 70.889.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | | | | 1822 Orang | 1822 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 219.022.350,00 | 219.022.350,00 | 188.415.350,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 100 Orang | 100 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 1 Orang | 1 Orang | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 37.750.000,00 | 37.750.000,00 | 7.143.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 352.800,00 | 352.800,00 | -30.254.200,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | -13.007.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 35.300.000,00 | 35.300.000,00 | 4.693.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 488.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.498.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.607.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 639.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | 550.423.000,00 | | | | | | | 1.190.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 629.577.000,00 | 522.286.200,00 | 305.876.700,00 | -323.700.300,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.642.000,00 | 9.610.200,00 | 9.610.200,00 | -21.031.800,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | | | | | 214.671.761.404,00 | 167.030.089.164,00 | 134.997.375.427,00 | -79.674.385.977,00 | | | | | | | 35.917.400.000,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 214.538.851.404,00 | 166.981.711.664,00 | 134.991.967.927,00 | -79.546.883.477,00 | | | | | | | 35.592.500.000,00 | |
| | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | 210.879.696.404,00 | 163.652.156.664,00 | 133.732.812.927,00 | -77.146.883.477,00 | | | | | | | 35.592.500.000,00 | |
| 1. | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 17.264.875.404,00 | 14.689.056.164,00 | 14.443.272.764,00 | -17.264.875.404,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 33.525.000,00 | 36.945.000,00 | 34.545.000,00 | 1.020.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.000.000,00 | 7.750.000,00 | 5.350.000,00 | 350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 70.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.500.000,00 | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 16 Data | 16 Data | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | | | 45 Laporan | 45 Laporan | 13.947.855.404,00 | 12.874.751.164,00 | 12.884.411.164,00 | -1.063.444.240,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2248 Orang /bulan | 2248 Orang /bulan | 13.288.980.404,00 | 12.077.956.164,00 | 12.077.956.164,00 | -1.211.024.240,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 656.480.000,00 | 794.400.000,00 | 804.060.000,00 | 147.580.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.625.000,00 | 37.625.000,00 | 37.625.000,00 | 36.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.625.000,00 | 37.625.000,00 | 37.625.000,00 | 36.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | | | 160 Orang | 160 Orang | 40.900.000,00 | 22.150.000,00 | 2.000.000,00 | -38.900.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 31 Paket | 31 Paket | 35.000.000,00 | 20.150.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 160 Orang | 160 Orang | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan | | | | 7 Jenis | 7 Jenis | 908.870.000,00 | 909.235.000,00 | 564.341.600,00 | -344.528.400,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.530.000,00 | 12.530.000,00 | 12.530.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.632.500,00 | 2.632.500,00 | 2.632.500,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 179.574.500,00 | 179.574.500,00 | 164.332.000,00 | -15.242.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 53.691.100,00 | -14.308.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 627.633.000,00 | 627.998.000,00 | 322.656.000,00 | -304.977.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 1.380.000.000,00 | 277.000.000,00 | 389.000.000,00 | -991.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 100.000.000,00 | 27.000.000,00 | 127.000.000,00 | 27.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 20 Unit | 280.000.000,00 | 250.000.000,00 | 262.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 692.500.000,00 | 271.750.000,00 | 271.750.000,00 | -420.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 685.400.000,00 | 264.650.000,00 | 264.650.000,00 | -420.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Berada Dalam Kondisi Baik | | | | 9 Jenis | 9 Jenis | 259.600.000,00 | 259.600.000,00 | 259.600.000,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 8 Unit | 8 Unit | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 149.600.000,00 | 149.600.000,00 | 149.600.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 100 Unit | 100 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2. | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat | | | | 85 Persen | 85 Persen | 31.849.842.000,00 | 16.911.268.000,00 | 11.553.396.983,00 | -1.953.842.000,00 | | | | | | | 29.896.000.000,00 | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ketersediaan air baku | | | | 15165 m3 | 15165 m3 | 11.947.300.000,00 | 4.968.520.000,00 | 2.912.816.000,00 | -9.034.484.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat | | 8.850.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | | | | 1,2 KM | 1,2 KM | 1.160.200.000,00 | 0,00 | 420.716.000,00 | -739.484.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | | | | 2,22 KM | 2,22 KM | 7.261.200.000,00 | 2.819.380.000,00 | 1.810.200.000,00 | -5.451.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 4.850.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0119 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun | | | | 6 Titik | 4 Titik | 1.085.300.000,00 | 637.920.000,00 | 206.800.000,00 | -878.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | | | | 6 Unit | 2 Unit | 2.440.600.000,00 | 1.511.220.000,00 | 475.100.000,00 | -1.965.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik | | | | 4100 Ha | 4100 Ha | 19.902.542.000,00 | 11.942.748.000,00 | 8.640.580.983,00 | -11.261.961.017,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat | | 21.046.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | | | | 4,7 KM | 4,7 KM | 3.351.000.000,00 | 1.784.140.000,00 | 2.514.140.000,00 | -836.860.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 7.597.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0009 | Peningkatan Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | | | | 4 Bendung | 2 Bendung | 1.250.300.000,00 | 241.730.000,00 | 434.250.000,00 | -816.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 700.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | | | | 12,73 KM | 12,73 KM | 12.752.422.000,00 | 8.585.678.000,00 | 4.423.370.983,00 | -8.329.051.017,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUGASAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 8.200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0015 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | | | | 8 Bendung | 4 Bendung | 1.655.800.000,00 | 709.620.000,00 | 703.500.000,00 | -952.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 1.550.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi | | | | 6 KM | 6 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 1.050.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 132 KM | 132 KM | 836.760.000,00 | 565.320.000,00 | 565.320.000,00 | -271.440.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 87 Bendung | 87 Bendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0024 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 2,89 KM | 2,89 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0030 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya | | | | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 56.260.000,00 | 56.260.000,00 | 0,00 | -56.260.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0032 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya | | | | 87 DI | 87 DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 49.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | | | | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| 3. | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase akses air minum layak dengan jaringan perpipaan Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Kebutuhan Air Minum Sesuai SPM | | | | 50,30 100 Persen Persen | 50,30 100 Persen Persen | 6.524.245.000,00 | 12.055.945.000,00 | 12.289.850.000,00 | -6.524.245.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak | | | | 88460 RT | 88460 RT | 6.524.245.000,00 | 12.055.945.000,00 | 12.289.850.000,00 | 5.765.605.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.03.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | | | | 60 Unit | 60 Unit | 665.100.000,00 | 845.100.000,00 | 1.045.100.000,00 | 380.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i> | | | | 30 Orang | 30 Orang | 31.045.000,00 | 31.045.000,00 | 28.550.000,00 | -2.495.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 140.700.000,00 | 140.700.000,00 | 422.850.000,00 | 282.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan</i> | | | | 2 Liter/Detik | 2 Liter/Detik | 2.413.600.000,00 | 8.868.700.000,00 | 9.168.700.000,00 | 6.755.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i> | | | | 2 Liter/Detik | 2 Liter/Detik | 1.860.200.000,00 | 500.000.000,00 | 504.250.000,00 | -1.355.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i> | | | | 80 SR | 80 SR | 1.413.600.000,00 | 1.670.400.000,00 | 1.120.400.000,00 | -293.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| 4. | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal bersanitasi | | | | 98,13 Persen | 98,13 Persen | 4.220.748.000,00 | 11.950.645.000,00 | 11.689.113.000,00 | -4.220.748.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Layak</i> | | | | 82581 RT | 82581 RT | 4.220.748.000,00 | 11.950.645.000,00 | 11.689.113.000,00 | 7.468.365.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.05.2.01.0019 | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang diptimalisasi</i> | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 7.217.450.000,00 | 7.217.450.000,00 | 7.217.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i> | | | | 50 Rumah Tangga | 50 Rumah Tangga | 96.300.000,00 | 96.300.000,00 | 0,00 | -96.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IITEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i> | | | | 250 Rumah Tangga | 275 Rumah Tangga | 4.024.448.000,00 | 4.536.895.000,00 | 4.471.663.000,00 | 447.215.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| 5. | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | | | | 75 Persen | 75 Persen | 2.808.650.000,00 | 3.929.920.000,00 | 2.879.920.000,00 | -2.808.650.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik</i> | | | | 5000 KM | 500 KM | 2.808.650.000,00 | 3.929.920.000,00 | 2.879.920.000,00 | 71.270.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | | | | 6950 M | 3000 M | 2.508.650.000,00 | 3.629.920.000,00 | 2.879.920.000,00 | 371.270.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | -300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| 6. | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | | | | 0,67 Rasio | 0,67 Rasio | 50.900.000.000,00 | 25.569.867.000,00 | 25.629.336.680,00 | -50.900.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan | | | | 5000 Dokumen | 5000 Dokumen | 50.900.000.000,00 | 25.569.867.000,00 | 25.629.336.680,00 | -25.270.663.320,00 | | - | | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | ASN, Masyarakat | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | | | | 2 Bangunan Gedung | 1 Bangunan Gedung | 3.500.000.000,00 | 1.526.651.000,00 | 1.526.651.000,00 | -1.973.349.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | | | | 2 Bangunan Gedung | 3 Bangunan Gedung | 1.500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 15 Dokumen | 18 Dokumen | 45.900.000.000,00 | 23.043.216.000,00 | 22.802.685.680,00 | -23.097.314.320,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| 7. | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | | | | 97,2 Persen | 97,2 Persen | 91.277.600.000,00 | 74.365.980.900,00 | 51.350.707.500,00 | -91.277.600.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang | | | | 1003,1 KM | 1003,1 KM | 91.277.600.000,00 | 74.365.980.900,00 | 51.350.707.500,00 | -39.926.892.500,00 | | - | | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0028 | Pengelolaan Leger Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | | | | 12 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya | | | | 48 KM | 48 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Diganti | | | | 4 Jembatan | 3 Jembatan | 1.355.000.000,00 | 1.622.640.000,00 | 2.351.010.000,00 | 996.010.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dibangun | | | | 6,7 KM | 4,76 KM | 10.670.000.000,00 | 4.877.230.000,00 | 3.604.407.600,00 | -7.065.592.400,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM OPSEN PKB | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | | | | 34,63 KM | 16,23 KM | 45.885.000.000,00 | 58.425.381.000,00 | 36.457.120.000,00 | -9.427.880.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) OPSEN PKB | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | | | | 10 KM | 0,2 KM | 15.660.000.000,00 | 521.760.000,00 | 521.760.000,00 | -15.138.240.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | | | | 1238,567 KM | 1238,567 KM | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar | | | | 3,6 KM | 0,3 KM | 1.165.000.000,00 | 410.880.000,00 | 1.348.800.000,00 | 183.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | 10 Jembatan | 10 Jembatan | 1.190.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.190.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | | | | 4 Jembatan | 3 Jembatan | 3.755.000.000,00 | 732.640.000,00 | 332.640.000,00 | -3.422.360.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Dibangun | | | | 5 Jembatan | 5 Jembatan | 3.380.000.000,00 | 6.906.969.900,00 | 5.777.369.900,00 | 2.397.369.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.10.2.01.0042 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala | | | | 4 Jembatan | 4 Jembatan | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | | | | 1238.567 KM | 1238.567 KM | 700.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | | | | 0,3 KM | 0,3 KM | 2.140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.140.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | 2,3 KM | 0,1 KM | 2.765.000.000,00 | 210.880.000,00 | 300.000.000,00 | -2.465.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0048 | Pelebaran Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Dilebarkan | | | | 2 Jembatan | 2 Jembatan | 1.055.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.055.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 8. | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | | | | 11,34 Persen | 11,34 Persen | 1.433.529.000,00 | 956.830.000,00 | 721.089.000,00 | -57.029.000,00 | | | | | | | 1.376.500.000,00 | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Memenuhi Standar Sesuai ketentuan yang berlaku | | | | 400 Orang | 400 Orang | 632.609.000,00 | 588.278.000,00 | 515.554.000,00 | -117.055.000,00 | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | Tenaga Terampil Konstruksi | | | 816.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0009 | Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | | | | 200 Orang | 200 Orang | 130.000.000,00 | 62.320.000,00 | 57.160.000,00 | -72.840.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 99.154.000,00 | 103.760.000,00 | 82.733.000,00 | -16.421.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0012 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | | | | 8 Orang | 8 Orang | 28.620.000,00 | 11.310.000,00 | 3.870.000,00 | -24.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 21.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0013 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 28.775.000,00 | 34.252.000,00 | 0,00 | -28.775.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0014 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0015 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.290.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | | | | 40 Orang | 40 Orang | 309.220.000,00 | 376.636.000,00 | 371.791.000,00 | 62.571.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersedia | | | | 1 Sistem | 1 Sistem | 362.820.000,00 | 164.147.000,00 | 85.580.000,00 | -277.240.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN, Badan Usaha | | 265.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.02.0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | | | | 2 Perangkat Pendukung | 2 Perangkat Pendukung | 63.750.000,00 | 54.750.000,00 | 47.825.000,00 | -15.925.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 157.135.000,00 | 76.315.000,00 | 32.555.000,00 | -124.580.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 10 Orang | 10 Orang | 88.025.000,00 | 27.662.000,00 | 3.130.000,00 | -84.895.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan | | | | 2 Layanan Informasi | 2 Layanan Informasi | 53.910.000,00 | 5.420.000,00 | 2.070.000,00 | -51.840.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Yang Diterbitkan | | | | 50 Rekome ndasi | 50 Rekome ndasi | 79.640.000,00 | 35.355.000,00 | 21.695.000,00 | -57.945.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Badan Usaha | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.03.0006 | Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.400.000,00 | 14.555.000,00 | 6.725.000,00 | -16.675.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.03.0007 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 56.240.000,00 | 20.800.000,00 | 14.970.000,00 | -41.270.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Penyelenggara Jasa Konstruksi Yang Diawasi dan Dievaluasi | | | | 50 Badan Usaha | 50 Badan Usaha | 358.460.000,00 | 169.050.000,00 | 98.260.000,00 | -260.200.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Badan Usaha | | 220.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | | | | 100 Paket Pekerjaan | 100 Paket Pekerjaan | 86.650.000,00 | 68.550.000,00 | 34.500.000,00 | -52.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | | | | 100 Bangunan Konstruksi | 100 Bangunan Konstruksi | 60.700.000,00 | 34.500.000,00 | 22.010.000,00 | -38.690.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM .TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | | | | 5 Lembaga | 5 Lembaga | 115.010.000,00 | 29.200.000,00 | 17.860.000,00 | -97.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha | | | | 20 Badan Usaha | 20 Badan Usaha | 57.150.000,00 | 36.800.000,00 | 23.890.000,00 | -33.260.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 38.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 9. | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Ketaatan terhadap RTRW | | | | 9,18 Persen | 9,18 Persen | 4.600.207.000,00 | 3.222.644.600,00 | 3.176.127.000,00 | -280.207.000,00 | | | | | | | 4.320.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Luas areal pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RRTR | | | | 7200 Ha | 7200 Ha | 1.383.559.000,00 | 887.471.600,00 | 976.051.600,00 | -407.507.400,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN | | 1.005.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW/ Kabupaten/Kota | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 490.395.000,00 | 208.797.600,00 | 201.647.600,00 | -288.747.400,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 403.089.000,00 | 299.849.000,00 | 279.949.000,00 | -123.140.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0007 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah publikasi informasi penataan ruang | | | | 24 Publikasi | 24 Publikasi | 265.900.000,00 | 228.400.000,00 | 373.605.000,00 | 107.705.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0008 | Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.950.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -36.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 167.225.000,00 | 130.425.000,00 | 100.850.000,00 | -66.375.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 120.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Luas areal ruang daerah yang perencanaannya sesuai dengan rencana peruntukan | | | | 7200 Ha | 7200 Ha | 1.536.939.000,00 | 1.081.092.000,00 | 963.200.000,00 | -573.739.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Masyarakat | | 1.590.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.455.102.000,00 | 1.081.092.000,00 | 963.200.000,00 | -491.902.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02.0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | | | | 3 Orang | 3 Orang | 81.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | -81.837.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02.0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Luas areal ruang daerah yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana peruntukan | | | | 7200 Ha | 7200 Ha | 1.236.982.000,00 | 923.629.000,00 | 985.203.000,00 | -251.779.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Masyarakat | | 1.240.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 778.584.000,00 | 828.944.000,00 | 965.103.000,00 | 186.519.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 630.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | | | | 80 Layanan | 80 Layanan | 53.810.000,00 | 94.685.000,00 | 20.100.000,00 | -33.710.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 160.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 279.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -279.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 125.538.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.538.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Luas areal ruang daerah yang dikendalikan pemanfaatannya | | | | 7200 Ha | 7200 Ha | 442.727.000,00 | 330.452.000,00 | 251.672.400,00 | -191.054.600,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 485.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | - | 0 0 | 58.107.000,00 | 33.757.000,00 | 0,00 | -58.107.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0007 | Pengenaaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif | | | | 20 Kasus | 20 Kasus | 15.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 28.145.000,00 | 26.620.000,00 | 10.150.000,00 | -17.995.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 306.075.000,00 | 270.075.000,00 | 241.522.400,00 | -64.552.600,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 130.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0010 | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.600.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0013 | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang | | | | 5 Berita Acara | 5 Berita Acara | 15.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | 3.659.155.000,00 | 3.329.555.000,00 | 1.259.155.000,00 | -2.400.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 1. | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Masyaraat Maros Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar Dan Kualifikasi SPM Perumahan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 504.445.000,00 | 504.445.000,00 | 504.445.000,00 | -504.445.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | | | | 72 Rumah | 72 Rumah | 6.575.000,00 | 6.575.000,00 | 10.575.000,00 | 4.000.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.02.2.01.0007 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.575.000,00 | 6.575.000,00 | 10.575.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 100 Orang | 47.870.000,00 | 47.870.000,00 | 43.870.000,00 | -4.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 100 Orang | 5.870.000,00 | 5.870.000,00 | 5.870.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.02.2.02.0004 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | | | | 6 Orang | 6 Orang | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 38.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Dibangun atau Direhabilitasi | | | | 87 Rumah | 87 Rumah | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | | | | 15 Unit Rumah | 15 Unit Rumah | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | | 10 Unit Rumah | 10 Unit Rumah | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.04.02.2.03.0008 | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah | | | | 3 Rumah Tangga | 3 Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang Diterbitkan | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| 2. | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase pemukiman yang tertata | | | | 99,48 Persen | 99,48 Persen | 385.530.000,00 | 385.530.000,00 | 385.530.000,00 | -385.530.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Dikeluarkan | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 30.235.000,00 | 30.235.000,00 | 30.235.000,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.235.000,00 | 30.235.000,00 | 30.235.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditingkatkan Kualitasnya | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditingkatkan Kualitasnya | | | | 5 Kawasan | 5 Kawasan | 355.295.000,00 | 355.295.000,00 | 355.295.000,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | | | | 15 Unit Rumah | 15 Unit Rumah | 344.495.000,00 | 344.495.000,00 | 344.495.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 3. | 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | | | | 81,43 Persen | 81,43 Persen | 369.180.000,00 | 369.180.000,00 | 369.180.000,00 | -369.180.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Rumah dalam Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Diperbaiki</i> | | | | 16 Rumah | 16 Rumah | 369.180.000,00 | 369.180.000,00 | 369.180.000,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i> | | | | 15 Unit Rumah | 15 Unit Rumah | 369.180.000,00 | 369.180.000,00 | 369.180.000,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 4. | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | | | | 80 Persen | 80 Persen | 2.400.000.000,00 | 2.070.400.000,00 | 0,00 | -2.400.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | <i>Jumlah Lokasi dalam Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Dibangun Prasarana, Sarana dan Utilitas</i> | | | | 10 Lokasi | 10 Lokasi | 2.400.000.000,00 | 2.070.400.000,00 | 0,00 | -2.400.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i> | | | | 10 Lokasi | 6 Lokasi | 2.400.000.000,00 | 2.070.400.000,00 | 0,00 | -2.400.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang</i> | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 132.910.000,00 | 48.377.500,00 | 5.407.500,00 | -127.502.500,00 | | | | | | | 324.900.000,00 | |
| | 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | 132.910.000,00 | 48.377.500,00 | 5.407.500,00 | -127.502.500,00 | | | | | | | 324.900.000,00 | |
| 1. | 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 53.500.000,00 | 20.077.500,00 | 802.500,00 | -3.500.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Kasus Sengketa Tanah yang Diselesaikan</i> | | | | 2 Kasus | 2 Kasus | 53.500.000,00 | 20.077.500,00 | 802.500,00 | -52.697.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Masyarakat | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PEMERINTAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.04.2.01.0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 18.500.000,00 | 9.250.000,00 | 750.000,00 | -17.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.04.2.01.0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 10.827.500,00 | 52.500,00 | -34.947.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2. | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee | | | | 100 Persen | 100 Persen | 46.635.000,00 | 17.350.000,00 | 2.390.000,00 | 153.265.000,00 | | | | | | | 199.900.000,00 | |
| | 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente yang di tetapkan | | | | 1 Objek | 1 Objek | 46.635.000,00 | 17.350.000,00 | 2.390.000,00 | -44.245.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Masyarakat | | 199.900.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.06.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.220.000,00 | 8.675.000,00 | 2.215.000,00 | -22.005.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.06.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.415.000,00 | 8.675.000,00 | 175.000,00 | -22.240.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 19.900.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.06.2.01.0005 | Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 3. | 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW | | | | 80 Persen | 80 Persen | 32.775.000,00 | 10.950.000,00 | 2.215.000,00 | 42.225.000,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Luas penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW | | | | 7200 Ha | 7200 Ha | 32.775.000,00 | 10.950.000,00 | 2.215.000,00 | -30.560.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Masyarakat | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 32.775.000,00 | 10.950.000,00 | 2.215.000,00 | -30.560.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | 13.145.339.426,00 | 10.584.161.529,00 | 10.454.929.629,00 | -2.690.409.797,00 | | | | | | 83.126.000.000,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 13.145.339.426,00 | 10.584.161.529,00 | 10.454.929.629,00 | -2.690.409.797,00 | | | | | | | 83.126.000.000,00 | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | 13.145.339.426,00 | 10.584.161.529,00 | 10.454.929.629,00 | -2.690.409.797,00 | | | | | | | 83.126.000.000,00 | |
| 1. | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 12.525.073.426,00 | 10.329.062.029,00 | 10.255.183.629,00 | 63.843.926.574,00 | | | | | | | 76.369.000.000,00 | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 63.740.500,00 | 21.484.500,00 | 23.099.000,00 | -40.641.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 307.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen Dokumen | 2 Dokumen Dokumen | 7.313.500,00 | 3.111.500,00 | 8.356.000,00 | 1.042.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen Dokumen | 2 Dokumen Dokumen | 7.404.500,00 | 1.395.500,00 | 793.000,00 | -6.611.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen Dokumen | 2 Dokumen Dokumen | 7.404.500,00 | 1.395.500,00 | 793.000,00 | -6.611.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 2 Dokumen Dokumen | 2 Dokumen Dokumen | 7.404.500,00 | 1.395.500,00 | 793.000,00 | -6.611.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 2 Dokumen Dokumen | 2 Dokumen Dokumen | 7.404.500,00 | 1.395.500,00 | 793.000,00 | -6.611.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Laporan Laporan | 4 Laporan Laporan | 7.404.500,00 | 1.395.500,00 | 793.000,00 | -6.611.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 16.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan Laporan | 4 Laporan Laporan | 7.404.500,00 | 1.395.500,00 | 793.000,00 | -6.611.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 16.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 1 Data | 1 Data | 6.000.000,00 | 400.000,00 | 385.000,00 | -5.615.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.312.102.646,00 | 6.477.522.529,00 | 6.475.208.529,00 | -836.894.117,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 40.428.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1260 Orang /bulan | 1260 Orang /bulan | 7.152.716.646,00 | 6.336.648.529,00 | 6.336.648.529,00 | -816.068.117,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.436.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 132.770.000,00 | 135.600.000,00 | 135.600.000,00 | 2.830.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 310.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.436.000,00 | 819.000,00 | 409.500,00 | -4.026.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.436.000,00 | 819.000,00 | 409.500,00 | -4.026.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 16.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.436.000,00 | 819.000,00 | 409.500,00 | -4.026.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.436.000,00 | 2.817.000,00 | 1.731.500,00 | -2.704.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 21.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.436.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 21.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 11.792.000,00 | 825.500,00 | 542.500,00 | -11.249.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.356.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | -7.073.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.436.000,00 | 542.500,00 | 259.500,00 | -4.176.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 461.744.000,00 | 1.877.500,00 | 1.058.500,00 | -460.685.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 576.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 5 Unit | 5 Unit | 4.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.436.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 444.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -444.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 510.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.436.000,00 | 542.500,00 | 259.500,00 | -4.176.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.436.000,00 | 542.500,00 | 259.500,00 | -4.176.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.436.000,00 | 792.500,00 | 539.500,00 | -3.896.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 16.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 373.894.280,00 | 183.902.000,00 | 81.825.100,00 | -292.069.180,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.002.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.980.280,00 | 2.584.500,00 | 2.584.500,00 | -2.395.780,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 130.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.966.000,00 | 2.584.000,00 | 2.584.000,00 | -7.382.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 17.736.000,00 | 4.927.000,00 | 4.927.000,00 | -12.809.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 92.357.000,00 | 19.419.500,00 | 12.089.000,00 | -80.268.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 26.100.000,00 | 7.530.000,00 | 4.653.600,00 | -21.446.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 81.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 3.766.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.766.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 51.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.542.000,00 | 2.072.000,00 | 2.072.000,00 | -1.470.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 13.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 195.447.000,00 | 129.785.000,00 | 39.915.000,00 | -155.532.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 400.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 610.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 369.000.000,00 | 26.000.000,00 | 56.000.000,00 | -313.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 12.480.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 30 Unit | 30 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 15 Unit | 15 Unit | 39.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -39.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 330.000.000,00 | 26.000.000,00 | 56.000.000,00 | -274.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 310.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 210.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 130.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 310.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 210.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 3.829.600.000,00 | 3.583.850.000,00 | 3.583.850.000,00 | -245.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 18.182.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.500.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | -1.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 51.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 21.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.823.100.000,00 | 3.578.650.000,00 | 3.578.650.000,00 | -244.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 18.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 103.200.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | -69.600.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.354.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.410.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 51.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 8.800.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | -5.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 51.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 51.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 51.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 17.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.310.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 210.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 17.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.090.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 210.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 210.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 620.266.000,00 | 255.099.500,00 | 199.746.000,00 | 6.136.734.000,00 | | | | | | | 6.757.000.000,00 | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 399.661.000,00 | 86.878.000,00 | 49.795.500,00 | -349.865.500,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 4.212.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 25.238.000,00 | 14.400.000,00 | 7.200.000,00 | -18.038.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.971.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 200 Orang | 200 Orang | 13.971.000,00 | 9.019.000,00 | 8.646.000,00 | -5.325.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 16.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 1.600.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.138.000,00 | 2.039.000,00 | 789.500,00 | -4.348.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 321.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0011 | Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.071.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 121.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0012 | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. | | | | 4 Orang | 4 Orang | 15.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.590.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0013 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | | | | 300 Orang | 300 Orang | 17.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.871.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | | 4 Orang | 4 Orang | 15.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.590.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | | | | 12 laporan | 12 laporan | 43.936.000,00 | 28.160.000,00 | 14.030.000,00 | -29.906.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 43.936.000,00 | 28.160.000,00 | 14.030.000,00 | -29.906.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | | | | 4 Laporan Laporan | 4 Laporan Laporan | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | | | | 40 Unit | 40 Unit | 82.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | -82.338.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 310.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0019 | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 87.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | -87.611.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 510.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | - | | | | - | - | 175.271.000,00 | 162.579.000,00 | 144.886.000,00 | -30.385.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 1.313.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.02.0004 | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 4 laporan | 4 laporan | 19.777.000,00 | 9.819.000,00 | 7.554.500,00 | -12.222.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.02.0005 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 5.138.000,00 | 2.039.000,00 | 789.500,00 | -4.348.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 321.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.02.0006 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah | | | | 6 unit | 6 unit | 48.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -48.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 400.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.02.0007 | Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.571.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.02.0008 | Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan | | | | 12 laporan | 12 laporan | 8.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.571.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 51.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.02.0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 8.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.571.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 21.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 19.271.000,00 | 61.672.900,00 | 56.053.900,00 | 36.782.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.436.000,00 | 83.398.100,00 | 77.748.100,00 | 49.312.100,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.436.000,00 | 5.650.000,00 | 2.740.000,00 | -25.696.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 80.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 45.334.000,00 | 5.642.500,00 | 5.064.500,00 | -40.269.500,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 1.232.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.03.0002 | Pembentukan Sekretariat PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.071.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 520.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.03.0003 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.671.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.671.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.03.0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 3.271.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.271.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.03.0005 | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 151.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.321.000,00 | 5.642.500,00 | 5.064.500,00 | -2.256.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 251.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | | | | | | | 17.983.962.660,00 | 7.343.150.722,00 | 7.313.530.722,00 | -10.670.431.938,00 | | | | | 51.700.174.600,00 | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 17.983.962.660,00 | 7.343.150.722,00 | 7.313.530.722,00 | -10.670.431.938,00 | | | | | | | 51.700.174.600,00 | | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | 17.983.962.660,00 | 7.343.150.722,00 | 7.313.530.722,00 | -10.670.431.938,00 | | | | | | | 51.700.174.600,00 | | |
| 1. | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 13.547.184.260,00 | 6.998.166.222,00 | 6.745.536.222,00 | 7.534.490.340,00 | | | | | | | 21.081.674.600,00 | | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 41.663.000,00 | 20.469.500,00 | 24.469.500,00 | -17.193.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 138.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.671.000,00 | 2.235.000,00 | 7.477.000,00 | 2.806.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.922.000,00 | 1.437.000,00 | 0,00 | -2.922.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.922.000,00 | 1.184.000,00 | 0,00 | -2.922.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.355.000,00 | 1.437.000,00 | 0,00 | -3.355.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.922.000,00 | 1.184.000,00 | 0,00 | -2.922.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Laporan | 5 Laporan | 2.922.000,00 | 1.224.500,00 | 0,00 | -2.922.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | - | 18 0 | 4.521.000,00 | 1.184.000,00 | 6.408.500,00 | 1.887.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | -2.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 1 Data | 1 Data | 5.428.000,00 | 984.000,00 | 984.000,00 | -4.444.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.307.424.722,00 | 4.548.110.722,00 | 4.548.110.722,00 | -1.759.314.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 9.436.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1000 Orang /bulan | 868 Orang/ bulan | 6.134.489.722,00 | 4.435.614.722,00 | 4.435.614.722,00 | -1.698.875.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.000.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 145.080.000,00 | 110.160.000,00 | 110.160.000,00 | -34.920.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.571.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.571.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | - | - | 5.571.000,00 | 1.142.500,00 | 1.142.500,00 | -4.428.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 5.571.000,00 | 1.193.500,00 | 1.193.500,00 | -4.377.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 16.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | - | - | 5.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.571.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 30.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 318.874.000,00 | 255.648.000,00 | 153.648.000,00 | -165.226.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 645.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 14 Unit | 14 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 250 Paket | 150 Paket | 307.500.000,00 | 252.000.000,00 | 150.000.000,00 | -157.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 400.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.653.000,00 | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | -4.388.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.721.000,00 | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | -3.338.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 427.398.000,00 | 152.703.500,00 | 96.823.500,00 | -330.574.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 702.674.600,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.926.000,00 | 2.402.000,00 | 2.402.000,00 | -5.524.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 45.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 24.995.000,00 | 9.732.500,00 | 9.732.500,00 | -15.262.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 24.999.000,00 | 16.227.000,00 | 16.227.000,00 | -8.772.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 30.000.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | -22.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.674.600,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.348.000,00 | 2.682.000,00 | 2.682.000,00 | -12.666.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | - | 10 0 | 30.100.000,00 | 14.000.000,00 | 10.000.000,00 | -20.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 6 Laporan | 294.030.000,00 | 100.160.000,00 | 48.280.000,00 | -245.750.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 3.004.124.538,00 | 152.150.000,00 | 245.400.000,00 | -2.758.724.538,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 4.090.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 100 Unit | 100 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.660.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.660.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 90.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | - | 8 0 | 485.500.000,00 | 0,00 | 69.010.000,00 | -416.490.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 18 Unit | 0,00 | 152.150.000,00 | 176.390.000,00 | 176.390.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 310.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------|--------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 30 Unit | 30 Unit | 858.624.538,00 | 0,00 | 0,00 | -858.624.538,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 2.840.700.000,00 | 1.783.192.000,00 | 1.591.192.000,00 | -1.249.508.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.740.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | - | - | 7.800.000,00 | 4.992.000,00 | 4.992.000,00 | -2.808.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.832.900.000,00 | 1.778.200.000,00 | 1.586.200.000,00 | -1.246.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 607.000.000,00 | 85.500.000,00 | 85.500.000,00 | -521.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 3.300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 4 Unit | 2 Unit | 54.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -36.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 17 Unit | 17 Unit | 310.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | | | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | |
| | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | -142.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 20 Unit | 20 Unit | 93.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -93.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| 2. | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | - | | | | - | - | 4.436.778.400,00 | 344.984.500,00 | 567.994.500,00 | 26.181.721.600,00 | | | | | | | 30.618.500.000,00 | | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.213.343.900,00 | 329.684.500,00 | 557.794.500,00 | -2.655.549.400,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOTAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 14.218.500.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 57.811.900,00 | 11.700.000,00 | 16.350.000,00 | -41.461.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOTAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 18.500.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 365 Laporan | 365 Laporan | 74.100.000,00 | 278.020.000,00 | 319.290.000,00 | 245.190.000,00 | Kab. Maros, Camba, Cempangia Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang Kab. Maros, Bontoa, Bontoa Kab. Maros, Tanralili, Borong Kab. Maros, Marusu, Termapaduae Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOTAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 80.100.000,00 | 10.500.000,00 | 6.300.000,00 | -73.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOTAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 1.600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOTAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 97.400.000,00 | 19.064.500,00 | 17.104.500,00 | -80.295.500,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | | | | 188 Orang | 188 Orang | 467.402.000,00 | 0,00 | 0,00 | -467.402.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | | | | 103 Desa/K elurahan | 103 Desa/K elurahan | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.314.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 700.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0012 | Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran | | | | 10 laporan | 10 laporan | 299.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | -299.425.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 700.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0013 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 312.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | -312.705.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 700.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0014 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 25.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.253.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0015 | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 800.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0016 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 85.453.000,00 | 0,00 | 0,00 | -85.453.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 700.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | | | | 120 Unit | 250 Unit | 1.654.030.000,00 | 0,00 | 190.500.000,00 | -1.463.530.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 19.750.000,00 | 8.600.000,00 | 6.450.000,00 | -13.300.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.01.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga | | | | 100 Keluarga | 100 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | - | | | | - | - | 88.700.000,00 | 10.200.000,00 | 6.800.000,00 | -81.900.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.600.000,00 | 5.100.000,00 | 3.400.000,00 | -53.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.100.000,00 | 5.100.000,00 | 3.400.000,00 | -28.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | - | | | | - | - | 20.600.000,00 | 5.100.000,00 | 3.400.000,00 | -17.200.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 700.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.600.000,00 | 5.100.000,00 | 3.400.000,00 | -17.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 700.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | - | | | | - | - | 151.692.500,00 | 0,00 | 0,00 | -151.692.500,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | | | | 500 Orang | 500 Orang | 29.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -29.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | | | | 103 Desa/K elurahan | 103 Desa/K elurahan | 27.052.500,00 | 0,00 | 0,00 | -27.052.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 1.600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.140.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 2.800.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | - | | | | - | - | 962.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | -962.442.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 10.100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -47.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 1.600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.05.0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 900.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 229.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | -229.446.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 1.600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | | | | 300 Unit | 300 Unit | 685.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | -685.996.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 6.000.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | 6.827.252.852,00 | 6.466.709.177,00 | 6.023.081.577,00 | -804.171.275,00 | | | | | | 7.168.600.000,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 6.827.252.852,00 | 6.466.709.177,00 | 6.023.081.577,00 | -804.171.275,00 | | | | | | | 7.168.600.000,00 | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | 6.827.252.852,00 | 6.466.709.177,00 | 6.023.081.577,00 | -804.171.275,00 | | | | | | | 7.168.600.000,00 | |
| 1. | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 6.069.308.852,00 | 6.105.515.177,00 | 5.608.512.577,00 | 244.991.148,00 | | | | | | | 6.314.300.000,00 | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.008.000,00 | 9.858.500,00 | 7.050.500,00 | 2.042.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 11.500.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 0 | 2 0 | 0,00 | 4.907.500,00 | 3.664.500,00 | 3.664.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.500.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 5.008.000,00 | 4.951.000,00 | 3.386.000,00 | -1.622.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.980.980.852,00 | 3.875.777.177,00 | 3.765.192.177,00 | -215.788.675,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 4.082.800.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | - | 0 0 | 3.610.607.852,00 | 3.740.772.177,00 | 3.632.772.177,00 | 22.164.325,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.700.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 238.918.000,00 | 0,00 | 0,00 | -238.918.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 240.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 120.890.000,00 | 124.680.000,00 | 124.680.000,00 | 3.790.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 130.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.035.000,00 | 5.035.000,00 | 3.865.000,00 | -1.170.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.600.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 965.000,00 | -665.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.600.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 3.900.000,00 | 3.660.000,00 | 2.910.000,00 | -990.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.600.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 179.410.500,00 | 99.206.500,00 | 48.540.900,00 | -130.869.600,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 185.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 60 Paket | 60 Paket | 117.750.000,00 | 93.550.000,00 | 43.850.000,00 | -73.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 119.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.410.500,00 | 5.656.500,00 | 4.690.900,00 | -719.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 2 Orang | 2 Orang | 56.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -56.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 787.859.500,00 | 542.423.000,00 | 333.479.000,00 | -454.380.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 850.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.095.000,00 | 16.425.000,00 | 16.425.000,00 | -670.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 18.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 172.000.000,00 | 97.000.000,00 | 50.000.000,00 | -122.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 180.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 17.915.000,00 | 15.560.000,00 | 15.560.000,00 | -2.355.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 31.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 51.757.500,00 | 50.290.000,00 | 39.660.000,00 | -12.097.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 53.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 16.106.000,00 | -8.894.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 31.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 31.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 41.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 454.092.000,00 | 298.148.000,00 | 175.728.000,00 | -278.364.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 465.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGU JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.07.0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Kegiatan Unit | 1 Kegiatan Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 761.050.000,00 | 664.050.000,00 | 664.050.000,00 | -97.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 823.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.250.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | -2.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 31.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 31.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 726.800.000,00 | 658.550.000,00 | 658.550.000,00 | -68.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 750.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 355.000.000,00 | 314.200.000,00 | 190.200.000,00 | -164.800.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 362.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 5 Unit | 180.000.000,00 | 171.000.000,00 | 40.000.000,00 | -140.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 185.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 5 Unit | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 91.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 2 Unit | 85.000.000,00 | 53.200.000,00 | 60.200.000,00 | -24.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 86.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Kegiatan Unit | 1 Kegiatan Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | - | | | | - | - | 757.944.000,00 | 361.194.000,00 | 414.569.000,00 | 96.356.000,00 | | | | | | | 854.300.000,00 | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | - | | | | - | - | 334.560.000,00 | 119.500.000,00 | 75.275.000,00 | -259.285.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 389.300.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | | | | 50 Unit | 50 Unit | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 54.800.000,00 | 21.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 84.300.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | | | | 10 Kawasan | 10 Kawasan | 39.700.000,00 | 44.000.000,00 | 7.250.000,00 | -32.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 40.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | | | | 50 Orang | 50 Orang | 34.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | -34.840.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 35.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 183.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -183.120.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 185.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | | | | 14 Kawasan | 14 Kawasan | 43.600.000,00 | 42.200.000,00 | 13.225.000,00 | -30.375.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 45.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | | | | - | - | 376.884.000,00 | 216.694.000,00 | 139.294.000,00 | -237.590.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 379.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.554.000,00 | 2.744.000,00 | 2.094.000,00 | -1.460.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 4.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | | | | 30 Orang | 30 Orang | 103.780.000,00 | 67.050.000,00 | 38.500.000,00 | -65.280.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 104.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 200 Orang | 200 Orang | 173.950.000,00 | 146.900.000,00 | 98.700.000,00 | -75.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 175.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 95.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 96.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | - | | | | - | - | 46.500.000,00 | 25.000.000,00 | 200.000.000,00 | 153.500.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 86.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 24.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 5.000.000,00 | -7.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 14.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | | | | 100 Orang | 100 Orang | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 195.000.000,00 | 182.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 48.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | | DINAS SOSIAL | | | | | | | 7.926.818.801,00 | 7.004.904.170,00 | 6.757.894.670,00 | -1.168.924.131,00 | | | | | | | 10.049.546.000,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 7.926.818.801,00 | 7.004.904.170,00 | 6.757.894.670,00 | -1.168.924.131,00 | | | | | | | 10.049.546.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | 7.926.818.801,00 | 7.004.904.170,00 | 6.757.894.670,00 | -1.168.924.131,00 | | | | | | | 10.049.546.000,00 | | |
| 1. | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 5.665.107.801,00 | 5.146.899.320,00 | 4.931.347.170,00 | 578.038.199,00 | | | | | | | 6.243.146.000,00 | | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 46.293.300,00 | 29.793.900,00 | 29.793.900,00 | -16.499.400,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 19.455.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.505.000,00 | 3.598.000,00 | 3.598.000,00 | -1.907.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.955.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.965.000,00 | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | -1.095.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.965.000,00 | 2.138.000,00 | 2.138.000,00 | -1.827.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.965.000,00 | 2.445.000,00 | 2.445.000,00 | -1.520.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.965.000,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | -1.625.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.397.000,00 | 1.852.000,00 | 1.852.000,00 | -1.545.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.934.000,00 | 2.134.900,00 | 2.134.900,00 | -1.799.100,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 15.304.000,00 | 11.340.000,00 | 11.340.000,00 | -3.964.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 0 Data | 0 Data | 2.293.300,00 | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | -1.217.300,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.610.901.001,00 | 4.590.671.170,00 | 4.421.771.170,00 | -189.129.831,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 5.272.041.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 50 Orang/b ulan | 50 Orang/b ulan | 4.470.101.001,00 | 4.439.235.170,00 | 4.269.235.170,00 | -200.865.831,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.105.041.000,00 | DINAS SOSIAL | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 135.190.000,00 | 147.480.000,00 | 147.480.000,00 | 12.290.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 1.950.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | -650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.500.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.660.000,00 | 2.656.000,00 | 3.756.000,00 | 96.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.500.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.250.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.700.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.250.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.700.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 63.191.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | -63.191.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 2 Unit | 2 Unit | 35.691.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.691.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 110 Paket | 110 Paket | 27.500.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | -27.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 395.784.500,00 | 228.884.250,00 | 150.732.100,00 | -245.052.400,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 250.900.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.062.000,00 | 2.012.000,00 | 4.467.000,00 | -595.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 65.117.500,00 | 45.266.250,00 | 46.226.000,00 | -18.891.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 51.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 10.500.000,00 | 5.100.000,00 | 5.026.100,00 | -5.473.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.200.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.200.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 17.000.000,00 | 16.250.000,00 | 19.375.000,00 | 2.375.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 26.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 288.105.000,00 | 150.256.000,00 | 75.638.000,00 | -212.467.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 151.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 209.000.000,00 | 57.750.000,00 | 108.250.000,00 | -100.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 292.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 8 Unit | 8 Unit | 82.500.000,00 | 30.250.000,00 | 35.750.000,00 | -46.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 185.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 126.500.000,00 | 27.500.000,00 | 72.500.000,00 | -54.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 107.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 266.688.000,00 | 175.450.000,00 | 175.450.000,00 | -91.238.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 263.350.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.288.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 512.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.550.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 264.400.000,00 | 172.650.000,00 | 172.650.000,00 | -91.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 260.800.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 72.000.000,00 | 38.000.000,00 | 44.000.000,00 | -28.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 82.700.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 18.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.500.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 31.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 33 Unit | 33 Unit | 14.000.000,00 | 8.000.000,00 | 9.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.700.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 2. | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | - | | | | 100 persen | - | 277.290.000,00 | 347.019.100,00 | 320.817.000,00 | 328.210.000,00 | | | | | | | 605.500.000,00 | |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | 297 Orang | - | 277.290.000,00 | 347.019.100,00 | 320.817.000,00 | 43.527.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Masyarakat Miskin | | 605.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 14 Orang | 14 Orang | 127.728.000,00 | 122.479.000,00 | 116.721.000,00 | -11.007.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 178.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 40 Keluarga | 40 Keluarga | 118.140.000,00 | 97.062.100,00 | 88.728.000,00 | -29.412.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 155.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 4 Lembaga | 4 Lembaga | 31.422.000,00 | 127.478.000,00 | 115.368.000,00 | 83.946.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 272.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 3. | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial. | | | | 100 persen | 100 persen | 293.247.500,00 | 212.471.000,00 | 150.936.000,00 | 215.952.500,00 | | | | | | | 509.200.000,00 | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | | | | 212 Orang | 212 Orang | 166.280.000,00 | 184.695.000,00 | 141.615.000,00 | -24.665.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat Miskin | | 276.600.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 140 Orang | 140 Orang | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 15.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 140 Orang | 140 Orang | 17.900.000,00 | 16.250.000,00 | 13.250.000,00 | -4.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 21.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 72 Orang | 72 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 151.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 35 Orang | 35 Orang | 42.900.000,00 | 70.410.000,00 | 45.830.000,00 | 2.930.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 41.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 35 Orang | 35 Orang | 94.230.000,00 | 88.785.000,00 | 74.535.000,00 | -19.695.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 23.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 50 Orang | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 25.100.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial | Jumlah masyarakat dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi sosial dasar | | | | 50 Orang | 50 Orang | 126.967.500,00 | 27.776.000,00 | 9.321.000,00 | -117.646.500,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat Miskin | | 232.600.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 5.900.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.04.2.02.0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 35 Orang | 35 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | 3.700.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 30 Orang | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 200.500.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.04.2.02.0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i> | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 126.967.500,00 | 27.776.000,00 | 9.321.000,00 | -117.646.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 22.500.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| 4. | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | | | 100 persen | 100 persen | 1.108.365.500,00 | 932.422.000,00 | 997.729.000,00 | 722.634.500,00 | | | | | | 1.831.000.000,00 | | |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah fakir miskin yang telah terdata dan diverifikasi oleh daerah.</i> | | | | 261523 Orang | 261523 Orang | 1.108.365.500,00 | 932.422.000,00 | 997.729.000,00 | -110.636.500,00 | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Masyarakat Miskin | | 1.831.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i> | | | | 261523 Orang | 261523 Orang | 655.572.500,00 | 579.771.000,00 | 570.190.000,00 | -85.382.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 651.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i> | | | | 29322 Keluarga | 29322 Keluarga | 27.520.000,00 | 11.740.000,00 | 8.290.000,00 | -19.230.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 156.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 28432 Keluarga | 28432 Keluarga | 405.033.000,00 | 324.611.000,00 | 409.599.000,00 | 4.566.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 873.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 50 Orang | 50 Orang | 20.240.000,00 | 16.300.000,00 | 9.650.000,00 | -10.590.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 151.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| 5. | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | - | | | | - | - | 561.031.000,00 | 351.990.750,00 | 334.306.500,00 | 248.669.000,00 | | | | | | 809.700.000,00 | | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 175.924.000,00 | 99.612.500,00 | 94.537.500,00 | -81.386.500,00 | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 368.200.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 2100 Orang | 2100 Orang | 53.974.000,00 | 35.787.500,00 | 35.787.500,00 | -18.186.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | 201.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 850 Orang | 850 Orang | 95.450.000,00 | 53.225.000,00 | 53.225.000,00 | -42.225.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | 152.000.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 150 Orang | 150 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | 5.600.000,00 | DINAS SOSIAL | |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Orang | 100 Orang | 26.500.000,00 | 10.600.000,00 | 5.525.000,00 | -20.975.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | 9.600.000,00 | DINAS SOSIAL | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------|---|---|--|------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 385.107.000,00 | 252.378.250,00 | 239.769.000,00 | -145.338.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 441.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 3 Kampung | 3 Kampung | 109.831.000,00 | 36.851.250,00 | 17.570.000,00 | -92.261.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 41.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 50 Orang | 275.276.000,00 | 215.527.000,00 | 222.199.000,00 | -53.077.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 400.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 6. | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Kelayakan Penggunaan Taman makam Pahlawan | | | | 100 persen | 100 persen | 21.777.000,00 | 14.102.000,00 | 22.759.000,00 | 29.223.000,00 | | | | | | | 51.000.000,00 | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam PahlawanKabupaten/Kota | | | | 57 Makam | 57 Makam | 21.777.000,00 | 14.102.000,00 | 22.759.000,00 | 982.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | Tamam Makam Pahlawan (TMP) Cakupan Daerah | | 51.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | | | | 2 Makam | 2 Makam | 21.777.000,00 | 14.102.000,00 | 22.759.000,00 | 982.000,00 | Kab. Maros, Camba, Cempangiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 51.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | 4.541.450.000,00 | 4.004.118.557,00 | 3.206.620.957,00 | -1.334.829.043,00 | | | | | | 4.541.450.000,00 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 4.447.793.500,00 | 3.935.647.807,00 | 3.147.262.307,00 | -1.300.531.193,00 | | | | | | | 4.406.450.000,00 | |
| | 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | 4.447.793.500,00 | 3.935.647.807,00 | 3.147.262.307,00 | -1.300.531.193,00 | | | | | | | 4.406.450.000,00 | |
| 1. | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 3.818.559.000,00 | 3.494.583.907,00 | 2.867.808.807,00 | -180.209.000,00 | | | | | | | 3.638.350.000,00 | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 45.322.000,00 | 53.326.000,00 | 39.803.300,00 | -5.518.700,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 45.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.415.000,00 | 2.835.000,00 | 2.249.600,00 | -165.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 0 | 0 0 | 3.899.000,00 | 3.440.000,00 | 2.727.000,00 | -1.172.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.065.000,00 | 3.065.000,00 | 2.387.000,00 | -678.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 0 | 0 0 | 3.622.000,00 | 3.222.000,00 | 2.441.000,00 | -1.181.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.712.000,00 | 3.112.000,00 | 2.373.900,00 | -1.338.100,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.395.000,00 | 6.945.000,00 | 4.217.000,00 | 822.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 2.716.000,00 | 3.515.000,00 | 3.069.000,00 | 353.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.000.000,00 | 23.822.000,00 | 17.782.400,00 | -1.217.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 1 Data | 1 Data | 3.498.000,00 | 3.370.000,00 | 2.556.400,00 | -941.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.306.626.500,00 | 3.052.060.557,00 | 2.541.472.157,00 | -765.154.343,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.774.749.770,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | - | 0 0 | 3.196.846.500,00 | 2.906.123.557,00 | 2.392.123.557,00 | -804.722.943,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.674.749.770,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 109.780.000,00 | 137.500.000,00 | 143.340.000,00 | 33.560.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 4.251.000,00 | 3.051.600,00 | 3.051.600,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | - | - | 0,00 | 4.186.000,00 | 2.957.000,00 | 2.957.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 16.699.000,00 | 3.808.000,00 | 3.808.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 4.299.000,00 | 3.808.000,00 | 3.808.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 223.710.500,00 | 194.729.500,00 | 105.356.500,00 | -118.354.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 288.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.816.000,00 | 5.124.000,00 | 5.124.000,00 | -4.692.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.644.500,00 | 21.714.500,00 | 14.612.500,00 | -4.032.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 21.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.200.000,00 | 4.550.000,00 | 2.730.000,00 | -9.470.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 17.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.000.000,00 | 26.000.000,00 | 18.000.000,00 | -42.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 113.050.000,00 | 127.341.000,00 | 64.890.000,00 | -48.160.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 130.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 110.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 235.600.230,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 140.600.230,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |
| | 2.07.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 0 | 0 0 | 0,00 | 110.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 95.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 192.900.000,00 | 57.170.000,00 | 66.770.000,00 | -126.130.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 255.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.300.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | -11.530.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 13.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.400.000,00 | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | -7.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 165.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 145.200.000,00 | 28.800.000,00 | 38.400.000,00 | -106.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 77.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 10.598.850,00 | 10.598.850,00 | -39.401.150,00 | | | - | - | - | | 40.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 10.598.850,00 | 10.598.850,00 | -9.401.150,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 0 | 0 0 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2. | 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | - | | | | - | - | 10.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | - | | | | - | - | 10.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.070.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 10.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.020.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | | | | 50 Orang | 50 Orang | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.050.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| 3. | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | - | | | | - | - | 74.040.000,00 | 81.116.900,00 | 54.367.800,00 | 4.160.000,00 | | | | | | | 78.200.000,00 | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | - | | | | - | - | 63.887.000,00 | 61.976.900,00 | 42.747.800,00 | -21.139.200,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 68.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | | 50 Orang | 50 Orang | 63.887.000,00 | 61.976.900,00 | 42.747.800,00 | -21.139.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 68.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | | | | 35 Lembaga | 35 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0004 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0005 | Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | - | | | | - | - | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.100.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 5.100.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | | | | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.100.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.03 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | - | | | | - | - | 5.053.000,00 | 19.140.000,00 | 11.620.000,00 | 6.567.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 5.100.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | 10 Perizinan | 10 Perizinan | 5.053.000,00 | 19.140.000,00 | 11.620.000,00 | 6.567.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.100.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| 4. | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | - | | | | - | - | 176.870.500,00 | 131.117.000,00 | 88.281.900,00 | -5.570.500,00 | | | | | | | 171.300.000,00 | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 73.623.000,00 | 51.589.000,00 | 42.840.300,00 | -30.782.700,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 65.700.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | | | 100 Orang | 100 Orang | 9.804.000,00 | 7.197.000,00 | 3.690.500,00 | -6.113.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 10.700.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD | | | | - Orang | - Orang | 63.819.000,00 | 44.392.000,00 | 39.149.800,00 | -24.669.200,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 55.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | | | | - Orang | - Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.02 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.02.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi | | | | - Lembaga | - Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | - | | | | - | - | 82.678.500,00 | 50.000.000,00 | 23.639.400,00 | -59.039.100,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 85.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | | | | - Orang | - Orang | 82.678.500,00 | 50.000.000,00 | 23.639.400,00 | -59.039.100,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 85.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.569.000,00 | 29.528.000,00 | 21.802.200,00 | 1.233.200,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 20.600.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | | | | 10 Orang | 10 Orang | 5.053.000,00 | 17.467.000,00 | 12.766.200,00 | 7.713.200,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.100.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0002 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | | | | - Orang | - Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | | | | 10 Orang | 10 Orang | 15.516.000,00 | 12.061.000,00 | 9.036.000,00 | -6.480.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 15.500.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| 5. | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | - | | | | - | - | 368.254.000,00 | 228.830.000,00 | 136.803.800,00 | 140.346.000,00 | | | | | | | 508.600.000,00 | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 78.265.000,00 | 22.142.000,00 | 12.356.000,00 | -65.909.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 135.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdftar di WLKP Online | | | | - Perusaha an | - Perusaha an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | | | | - Perusaha an | - Perusaha an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 78.265.000,00 | 22.142.000,00 | 12.356.000,00 | -65.909.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 135.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 289.989.000,00 | 206.688.000,00 | 124.447.800,00 | -165.541.200,00 | | | - | - | - | | 373.600.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | | | | 9 Perkara | 9 Perkara | 84.115.000,00 | 67.501.000,00 | 22.424.800,00 | -61.690.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 111.800.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | | | | 9 Perkara | 9 Perkara | 205.874.000,00 | 89.187.000,00 | 70.566.000,00 | -135.308.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 261.800.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | | | - Lembaga | - Lembaga | 0,00 | 50.000.000,00 | 31.457.000,00 | 31.457.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | - Orang | - Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 93.656.500,00 | 68.470.750,00 | 59.358.650,00 | -34.297.850,00 | | | | | | | 135.000.000,00 | |
| | 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | 93.656.500,00 | 68.470.750,00 | 59.358.650,00 | -34.297.850,00 | | | | | | | 135.000.000,00 | |
| 1. | 3.32.02 | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | - | | | | - | - | 93.656.500,00 | 68.470.750,00 | 59.358.650,00 | 41.343.500,00 | | | | | | | 135.000.000,00 | |
| | 3.32.02.2.01 | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | - | | | | - | - | 93.656.500,00 | 68.470.750,00 | 59.358.650,00 | -34.297.850,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 135.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0002 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi | | | | 1 Kawasan Transmigra si | 1 Kawasan Transmigra si | 93.656.500,00 | 68.470.750,00 | 59.358.650,00 | -34.297.850,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 135.000.000,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2. | 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan | | | | 150 Kepala Keluarga | 150 Kepala Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan | | | | 150 Orang | 150 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | 18.959.249.036,00 | 16.679.735.462,00 | 15.892.676.462,00 | -3.066.572.574,00 | | | | | | 411.805.000.000,00 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 18.959.249.036,00 | 16.679.735.462,00 | 15.892.676.462,00 | -3.066.572.574,00 | | | | | | | 411.805.000.000,00 | |
| | 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | 9.981.308.036,00 | 8.299.893.462,00 | 7.615.608.462,00 | -2.365.699.574,00 | | | | | | | 411.805.000.000,00 | |
| 1. | 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 7.798.388.036,00 | 7.043.975.462,00 | 6.657.667.462,00 | 402.376.611.964,00 | | | | | | | 410.175.000.000,00 | |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 44.750.000,00 | 26.131.000,00 | 19.380.000,00 | -25.370.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 13.170.000,00 | 2.901.000,00 | 1.590.000,00 | -11.580.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.280.000,00 | 1.800.000,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.100.000,00 | -1.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.650.000,00 | -1.850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 1.500.000,00 | -1.050.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.530.000,00 | 1.800.000,00 | 1.140.000,00 | -3.390.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 14.500.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | -4.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 1 Data | 1 Data | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.683.096.036,00 | 6.612.933.462,00 | 6.327.883.462,00 | -355.212.574,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 408.525.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 80 Orang/b ulan | 80 Orang/b ulan | 6.484.026.036,00 | 6.417.413.462,00 | 6.137.413.462,00 | -346.612.574,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 186.120.000,00 | 186.120.000,00 | 184.320.000,00 | -1.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.850.000,00 | 2.000.000,00 | 450.000,00 | -4.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.100.000,00 | 7.400.000,00 | 5.700.000,00 | -2.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.190.000,00 | 1.000.000,00 | 7.300.000,00 | 110.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.190.000,00 | 1.000.000,00 | 7.300.000,00 | 110.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 101.730.000,00 | 20.300.000,00 | 5.940.000,00 | -95.790.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 80 Paket | 80 Paket | 70.000.000,00 | 10.850.000,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i> | | | | - | - | 21.430.000,00 | 6.450.000,00 | 3.440.000,00 | -17.990.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i> | | | | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 10.300.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | -7.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 433.602.000,00 | 250.911.000,00 | 159.464.000,00 | -274.138.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 610.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 5 Paket | 5 Paket | 6.480.000,00 | 5.691.000,00 | 4.641.000,00 | -1.839.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 3 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 10 Paket | 10 Paket | 6.172.000,00 | 4.552.000,00 | 4.552.000,00 | -1.620.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 20 Paket | 20 Paket | 34.015.000,00 | 27.894.000,00 | 21.023.000,00 | -12.992.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 23.000.000,00 | 23.120.000,00 | 17.337.000,00 | -5.663.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 48.000.000,00 | 25.880.000,00 | 22.140.000,00 | -25.860.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 315.935.000,00 | 163.774.000,00 | 89.771.000,00 | -226.164.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 184.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -184.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 154.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -154.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 284.820.000,00 | 96.000.000,00 | 101.000.000,00 | -183.820.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 284.820.000,00 | 96.000.000,00 | 101.000.000,00 | -183.820.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 58.700.000,00 | 36.700.000,00 | 36.700.000,00 | -22.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 5 Unit | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | -12.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2. | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | - | | | | - | - | 1.174.609.000,00 | 483.860.000,00 | 336.174.000,00 | -674.609.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 159.493.000,00 | 55.892.000,00 | 44.452.000,00 | -115.041.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34.895.000,00 | 12.400.000,00 | 7.700.000,00 | -27.195.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 108.798.000,00 | 35.692.000,00 | 28.952.000,00 | -79.846.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | | | | 103 Orang | 103 Orang | 15.800.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 392.616.000,00 | 296.468.000,00 | 161.722.000,00 | -230.894.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.300.000,00 | 7.900.000,00 | 4.650.000,00 | -24.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 363.316.000,00 | 288.568.000,00 | 157.072.000,00 | -206.244.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Bonto Manurung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 622.500.000,00 | 131.500.000,00 | 130.000.000,00 | -492.500.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.02.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | | | | 30 Lembaga | 30 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | | | | 70 Orang | 70 Orang | 600.000.000,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | -470.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.02.2.03.0006 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota | | | | 1 Unit | 1 Unit | 22.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | -22.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 3. | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | - | | | | - | - | 433.196.000,00 | 400.660.000,00 | 400.660.000,00 | 51.804.000,00 | | | | | | | 485.000.000,00 | | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 105.430.000,00 | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | -3.930.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.430.000,00 | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | -3.930.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 45 Perangkat Daerah | 45 Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 264.016.000,00 | 230.140.000,00 | 230.140.000,00 | -33.876.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | | | | 50 Orang | 50 Orang | 17.816.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.816.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 Layanan | 0 Layanan | 246.200.000,00 | 230.140.000,00 | 230.140.000,00 | -16.060.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 63.750.000,00 | 69.020.000,00 | 69.020.000,00 | 5.270.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 85.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | | | | 100 Orang | 100 Orang | 63.750.000,00 | 69.020.000,00 | 69.020.000,00 | 5.270.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.08.03.2.03.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 4. | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | - | | | | - | - | 132.960.000,00 | 107.760.000,00 | 76.775.000,00 | 212.040.000,00 | | | | | | | 345.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 52.900.000,00 | 30.400.000,00 | 18.400.000,00 | -34.500.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 180.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 45 Perangkat Daerah | 45 Perangkat Daerah | 16.800.000,00 | 14.300.000,00 | 8.550.000,00 | -8.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.01.0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.100.000,00 | 16.100.000,00 | 9.850.000,00 | -26.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 13.900.000,00 | 10.700.000,00 | 6.200.000,00 | -7.700.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 65.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 70 Orang | 70 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02.0003 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.900.000,00 | 10.700.000,00 | 6.200.000,00 | -7.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.03 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 66.160.000,00 | 66.660.000,00 | 52.175.000,00 | -13.985.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.03.0001 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 66.160.000,00 | 66.660.000,00 | 52.175.000,00 | -13.985.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 5. | 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | - | | | | - | - | 25.540.000,00 | 19.450.000,00 | 12.360.000,00 | 74.460.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 25.540.000,00 | 19.450.000,00 | 12.360.000,00 | -13.180.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.540.000,00 | 19.450.000,00 | 12.360.000,00 | -13.180.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.05.2.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6. | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | - | | | | - | - | 256.615.000,00 | 173.388.000,00 | 89.172.000,00 | -56.615.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 144.142.000,00 | 108.138.000,00 | 56.712.000,00 | -87.430.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | | | | 50 Organisasi | 50 Organisasi | 23.900.000,00 | 17.900.000,00 | 9.650.000,00 | -14.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.242.000,00 | 90.238.000,00 | 47.062.000,00 | -73.180.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 112.473.000,00 | 65.250.000,00 | 32.460.000,00 | -80.013.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 112.473.000,00 | 65.250.000,00 | 32.460.000,00 | -80.013.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 7. | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | - | | | | - | - | 160.000.000,00 | 70.800.000,00 | 42.800.000,00 | -160.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 102.350.000,00 | 51.000.000,00 | 31.800.000,00 | -70.550.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0003 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 39.300.000,00 | 16.200.000,00 | 13.700.000,00 | -25.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | 80 Orang | 80 Orang | 26.900.000,00 | 19.000.000,00 | 9.650.000,00 | -17.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 36.150.000,00 | 15.800.000,00 | 8.450.000,00 | -27.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0006 | koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 30.200.000,00 | 19.800.000,00 | 11.000.000,00 | -19.200.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 30.200.000,00 | 19.800.000,00 | 11.000.000,00 | -19.200.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 27.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.450.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0005 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0009 | koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | 8.977.941.000,00 | 8.379.842.000,00 | 8.277.068.000,00 | -700.873.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | - | | | | - | - | 100.500.000,00 | 72.797.000,00 | 71.797.000,00 | -100.500.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | - | | | | - | - | 40.500.000,00 | 12.500.000,00 | 11.500.000,00 | -29.000.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.500.000,00 | 12.500.000,00 | 11.500.000,00 | -29.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0020 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 60.297.000,00 | 60.297.000,00 | 297.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0002 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.297.000,00 | 60.297.000,00 | 297.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | | | | 14 Unit | 14 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0020 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | - | | | | - | - | 6.000.092.000,00 | 6.090.883.000,00 | 6.073.883.000,00 | -6.000.092.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | - | | | | - | - | 640.000.000,00 | 629.160.000,00 | 613.360.000,00 | -26.640.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 280.000.000,00 | 174.220.000,00 | 174.220.000,00 | -105.780.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 14 Unit | 14 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 210.000.000,00 | 234.640.000,00 | 234.640.000,00 | 24.640.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 220.300.000,00 | 204.500.000,00 | 54.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | - | | | | - | - | 1.373.400.000,00 | 1.056.620.000,00 | 1.056.620.000,00 | -316.780.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | | | | 14 Unit | 14 Unit | 800.600.000,00 | 994.820.000,00 | 994.820.000,00 | 194.220.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | 2060 Orang | 2060 Orang | 494.400.000,00 | 61.800.000,00 | 61.800.000,00 | -432.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | | 103 Organisasi | 103 Organisasi | 78.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -78.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.707.302.000,00 | 3.234.603.000,00 | 3.233.403.000,00 | 1.526.101.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 28.800.000,00 | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | -900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | 1832 Orang | 1832 Orang | 843.382.000,00 | 891.593.000,00 | 890.393.000,00 | 47.011.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | 4 Unit | 4 Unit | 810.000.000,00 | 2.287.660.000,00 | 2.287.660.000,00 | 1.477.660.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.120.000,00 | 27.450.000,00 | 27.450.000,00 | 2.330.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | - | | | | - | - | 2.279.390.000,00 | 1.170.500.000,00 | 1.170.500.000,00 | -1.108.890.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 809.390.000,00 | 824.000.000,00 | 824.000.000,00 | 14.610.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah DASHAT di Kampung KB | | | | 103 Unit | 103 Unit | 1.470.000.000,00 | 346.500.000,00 | 346.500.000,00 | -1.123.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | - | | | | - | - | 2.877.349.000,00 | 2.216.162.000,00 | 2.131.388.000,00 | -2.877.349.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | | | | - | - | 2.627.049.000,00 | 2.120.462.000,00 | 2.082.688.000,00 | -544.361.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0015 | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 177.199.000,00 | 44.862.000,00 | 24.013.000,00 | -153.186.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | | | | 20 Unit | 20 Unit | 304.250.000,00 | 135.100.000,00 | 133.400.000,00 | -170.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0022 | Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | | | | 996 Orang | 996 Orang | 2.124.000.000,00 | 1.923.000.000,00 | 1.912.800.000,00 | -211.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | | | | 40 Kelompok | 40 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | | | | 20 Kelompok | 20 Kelompok | 21.600.000,00 | 17.500.000,00 | 12.475.000,00 | -9.125.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | | | | - | - | 250.300.000,00 | 95.700.000,00 | 48.700.000,00 | -201.600.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | 12 laporan | 12 laporan | 250.300.000,00 | 95.700.000,00 | 48.700.000,00 | -201.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | | | | 12 laporan | 12 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | 18.538.535.267,00 | 17.147.012.465,00 | 17.075.299.365,00 | -1.463.235.902,00 | | | | | 24.112.000.000,00 | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 837.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | -837.865.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | 837.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | -837.865.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 1. | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 7.984.544.167,00 | 7.225.426.565,00 | 6.994.591.565,00 | 2.057.455.833,00 | | | | | | | 10.042.000.000,00 | | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 28.752.500,00 | 25.510.000,00 | 19.260.000,00 | -9.492.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 180.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.765.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.025.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.928.755.667,00 | 6.717.401.465,00 | 6.600.276.465,00 | -328.479.202,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 8.262.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 140.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.470.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.325.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.130.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 79.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -79.000.000,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 311.736.000,00 | 208.065.100,00 | 123.905.100,00 | -187.830.900,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 480.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 12 bulan Laporan | 12 bulan Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 185.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -185.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 359.300.000,00 | 163.950.000,00 | 167.150.000,00 | -192.150.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 470.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 347.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -347.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 80.000.000,00 | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 | -10.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 235.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 17.700.670.267,00 | 17.147.012.465,00 | 17.075.299.365,00 | -625.370.902,00 | | | | | | | 24.112.000.000,00 | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 17.700.670.267,00 | 17.147.012.465,00 | 17.075.299.365,00 | -625.370.902,00 | | | | | | | 24.112.000.000,00 | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 28.752.500,00 | 25.510.000,00 | 19.260.000,00 | -9.492.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 180.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 2.270.000,00 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.287.500,00 | 2.315.000,00 | 1.440.000,00 | -847.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 2.575.000,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 2.375.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 2.375.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 2.315.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.825.000,00 | 2.285.000,00 | 1.410.000,00 | -1.415.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.928.755.667,00 | 6.717.401.465,00 | 6.600.276.465,00 | -328.479.202,00 | | | - | - | - | | 8.262.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 91 Orang/bulan | 91 Orang/bulan | 6.783.830.667,00 | 6.532.916.465,00 | 6.416.916.465,00 | -366.914.202,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 8.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 181.320.000,00 | 181.320.000,00 | 181.320.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 1.385.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 0,00 | 1.780.000,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 79.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -79.000.000,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 0 0 | 0 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 10 Orang | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 311.736.000,00 | 208.065.100,00 | 123.905.100,00 | -187.830.900,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 480.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 3.755.000,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | 2.409.500,00 | 2.409.500,00 | -27.590.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 21.347.000,00 | 21.347.000,00 | 21.347.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.736.000,00 | 18.169.600,00 | 12.319.600,00 | -13.416.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 bulan Laporan | 12 bulan Laporan | 0,00 | 4.241.000,00 | 4.241.000,00 | 4.241.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 146.068.000,00 | 78.253.000,00 | 78.253.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 197.000.000,00 | 40.500.000,00 | 14.000.000,00 | -183.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 400.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | - | - | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 147.000.000,00 | 40.500.000,00 | 14.000.000,00 | -133.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 400.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 359.300.000,00 | 163.950.000,00 | 167.150.000,00 | -192.150.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 470.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 161.750.000,00 | 164.950.000,00 | 164.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 450.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 80.000.000,00 | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 | -10.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 235.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 2 Unit | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 1. | 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 63.959.500,00 | 54.468.500,00 | -100.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 63.959.500,00 | 54.468.500,00 | -45.531.500,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0003 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 63.959.500,00 | 54.468.500,00 | -45.531.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | - | | | | - | - | 160.481.500,00 | 135.919.150,00 | 103.355.150,00 | 9.518.500,00 | | | | | | | 170.000.000,00 | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 160.481.500,00 | 135.919.150,00 | 103.355.150,00 | -57.126.350,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 170.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 21.863.500,00 | 8.569.500,00 | -16.430.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | | | | 10 Lokasi | 20 Lokasi | 20.000.000,00 | 6.349.000,00 | 5.329.000,00 | -14.671.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 40.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | - | | | | - | - | 180.000.000,00 | 101.960.000,00 | 50.980.000,00 | -30.000.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 180.000.000,00 | 101.960.000,00 | 50.980.000,00 | -129.020.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Ha | 100 Ha | 180.000.000,00 | 101.960.000,00 | 50.980.000,00 | -129.020.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | - | | | | - | - | 20.800.000,00 | 6.760.000,00 | 5.455.000,00 | 14.200.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.800.000,00 | 6.760.000,00 | 5.455.000,00 | -15.345.000,00 | | | - | - | - | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.800.000,00 | 6.760.000,00 | 5.455.000,00 | -15.345.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | - | | | | - | - | 34.875.000,00 | 27.776.500,00 | 18.599.000,00 | 25.125.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 34.875.000,00 | 27.776.500,00 | 18.599.000,00 | -16.276.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 60.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i> | | | | 48 Badan Usaha | 30 Badan Usaha | 34.875.000,00 | 27.776.500,00 | 18.599.000,00 | -16.276.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 60.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | 2.11.07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 3.566.000,00 | 2.716.000,00 | 15.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 3.566.000,00 | 2.716.000,00 | -12.284.000,00 | | | - | - | - | | 30.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 3.566.000,00 | 2.716.000,00 | -12.284.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | - | | | | - | - | 74.000.000,00 | 15.930.000,00 | 5.330.000,00 | 106.000.000,00 | | | | | | | 180.000.000,00 | |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 74.000.000,00 | 15.930.000,00 | 5.330.000,00 | -68.670.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 180.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.000.000,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | -24.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i> | | | | 30 Orang | 30 Orang | 50.000.000,00 | 6.580.000,00 | 5.330.000,00 | -44.670.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 80.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | - | | | | - | - | 84.740.000,00 | 59.190.000,00 | 11.825.000,00 | 65.260.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 84.740.000,00 | 59.190.000,00 | 11.825.000,00 | -72.915.000,00 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i> | | | | 10 Entitas | 10 Entitas | 84.740.000,00 | 59.190.000,00 | 11.825.000,00 | -72.915.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 9. | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | - | | | | - | - | 9.944.600,00 | 4.198.000,00 | 3.348.000,00 | 10.055.400,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 9.944.600,00 | 4.198.000,00 | 3.348.000,00 | -6.596.600,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i> | | | | 5 Pengaduan | 5 Pengaduan | 9.944.600,00 | 4.198.000,00 | 3.348.000,00 | -6.596.600,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 10. | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | - | | | | - | - | 9.874.150.000,00 | 9.502.326.750,00 | 9.824.631.150,00 | 3.400.850.000,00 | | | | | | | 13.275.000.000,00 | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | - | | | | - | - | 9.874.150.000,00 | 9.502.326.750,00 | 9.824.631.150,00 | -49.518.850,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 13.275.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i> | | | | 30 Kelompok | 30 Kelompok | 136.400.000,00 | 106.400.000,00 | 20.000.000,00 | -116.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i> | | | | 15 Unit | 41 Unit | 3.141.345.000,00 | 2.905.191.750,00 | 3.098.750.150,00 | -42.594.850,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH | - | - | | | 5.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 107.700.000,00 | 4.850.000,00 | 279.000.000,00 | 171.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sampah yang terdaur ulang | | | | 10 Ton | 10 Ton | 32.705.000,00 | 8.135.000,00 | 4.656.000,00 | -28.049.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 40.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | 20000 Ton | 54000 Ton | 6.456.000.000,00 | 6.477.750.000,00 | 6.422.225.000,00 | -33.775.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 8.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN | | | | | | | 18.538.535.267,00 | 17.147.012.465,00 | 17.075.299.365,00 | -1.463.235.902,00 | | | | | 24.112.000.000,00 | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 17.700.670.267,00 | 17.147.012.465,00 | 17.075.299.365,00 | -625.370.902,00 | | | | | | | 24.112.000.000,00 | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 17.700.670.267,00 | 17.147.012.465,00 | 17.075.299.365,00 | -625.370.902,00 | | | | | | | 24.112.000.000,00 | |
| 1. | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | - | | | | - | - | 160.481.500,00 | 135.919.150,00 | 103.355.150,00 | 9.518.500,00 | | | | | | | 170.000.000,00 | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 160.481.500,00 | 135.919.150,00 | 103.355.150,00 | -57.126.350,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 170.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | | | | - | 0 0 | 70.481.500,00 | 70.416.650,00 | 70.416.650,00 | -64.850,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | 37.290.000,00 | 19.040.000,00 | -25.960.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 80.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | 7.657.074.084,00 | 7.386.175.168,00 | 7.386.320.872,00 | -270.753.212,00 | | | | | 7.709.357.032,00 | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 7.657.074.084,00 | 7.386.175.168,00 | 7.386.320.872,00 | -270.753.212,00 | | | | | | | 7.709.357.032,00 | |
| | 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | 7.657.074.084,00 | 7.386.175.168,00 | 7.386.320.872,00 | -270.753.212,00 | | | | | | | 7.709.357.032,00 | |
| 1. | 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 6.468.434.984,00 | 6.241.782.868,00 | 6.237.531.972,00 | -177.470.952,00 | | | | | | | 6.290.964.032,00 | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 31.300.000,00 | 31.449.300,00 | 29.949.300,00 | -1.350.700,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 25.300.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.600.000,00 | 4.699.300,00 | 4.699.300,00 | -1.900.700,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 2.900.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.500.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 2.900.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.650.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 2.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.500.000,00 | -150.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 2.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 3.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.850.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | -750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.400.000,00 | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 5.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 4.200.000,00 | 3.600.000,00 | 2.700.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 3.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.395.425.784,00 | 5.618.540.168,00 | 5.794.340.872,00 | 398.915.088,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 5.317.464.032,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 61 Orang/bulan | 61 Orang/bulan | 5.229.620.784,00 | 5.450.335.168,00 | 5.628.735.872,00 | 399.115.088,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.157.564.032,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 62 Dokumen | 62 Dokumen | 151.200.000,00 | 153.600.000,00 | 153.600.000,00 | 2.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 145.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 4.900.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.705.000,00 | 10.705.000,00 | 8.105.000,00 | -2.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.650.000,00 | 1.199.600,00 | 1.199.600,00 | -2.450.400,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.650.000,00 | 1.199.600,00 | 1.199.600,00 | -2.450.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 81.430.000,00 | 110.415.000,00 | 57.365.000,00 | -24.065.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 56.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 70 Paket | 70 Paket | 28.000.000,00 | 23.750.000,00 | 0,00 | -28.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 70 Dokumen | 70 Dokumen | 3.430.000,00 | 2.565.000,00 | 2.565.000,00 | -865.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 4.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 90 Orang | 90 Orang | 50.000.000,00 | 84.100.000,00 | 54.800.000,00 | 4.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 52.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 298.519.200,00 | 235.135.800,00 | 127.977.200,00 | -170.542.000,00 | | | - | - | - | | 174.200.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 7 Paket | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 32.700.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 7.855.000,00 | 10.355.000,00 | 10.355.000,00 | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 38.084.200,00 | 27.571.800,00 | 19.983.500,00 | -18.100.700,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 34.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 6.550.000,00 | 12.500.000,00 | 8.247.700,00 | 1.697.700,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 8.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 28.000.000,00 | 15.480.000,00 | 14.480.000,00 | -13.520.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 19.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 144.420.000,00 | 167.619.000,00 | 73.301.000,00 | -71.119.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 275.000.000,00 | 110.250.000,00 | 93.500.000,00 | -181.500.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 286.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 160.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | 16.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 45.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 30 Unit | 30 Unit | 215.000.000,00 | 93.500.000,00 | 93.500.000,00 | -121.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 81.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 245.110.000,00 | 94.350.000,00 | 94.350.000,00 | -150.760.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 220.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 11.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 6.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 229.110.000,00 | 78.350.000,00 | 78.350.000,00 | -150.760.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 203.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 138.000.000,00 | 40.443.000,00 | 38.850.000,00 | -99.150.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 211.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 7 Unit | 7 Unit | 40.000.000,00 | 25.993.000,00 | 20.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 29.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 55 Unit | 55 Unit | 28.000.000,00 | 14.450.000,00 | 18.850.000,00 | -9.150.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 160.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 22.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2. | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | - | | | | - | - | 791.194.500,00 | 462.742.300,00 | 458.882.200,00 | -68.131.500,00 | | | | | | | 723.063.000,00 | | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | | | | - | - | 61.134.500,00 | 23.297.400,00 | 27.997.400,00 | -33.137.100,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 54.463.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | 1000 Dokumen | 1000 Dokumen | 8.888.500,00 | 6.430.400,00 | 5.920.400,00 | -2.968.100,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | 140000 Dokumen | 140000 Dokumen | 52.246.000,00 | 16.867.000,00 | 22.077.000,00 | -30.169.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 39.463.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | - | | | | - | - | 730.060.000,00 | 439.444.900,00 | 430.884.800,00 | -299.175.200,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 668.600.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 8000 Dokumen | 8000 Dokumen | 38.610.000,00 | 27.200.000,00 | 21.590.000,00 | -17.020.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.100.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 667.000.000,00 | 403.994.900,00 | 403.994.900,00 | -263.005.100,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 600.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.450.000,00 | 8.250.000,00 | 5.299.900,00 | -19.150.100,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 28.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 3. | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | - | | | | - | - | 95.490.000,00 | 76.780.000,00 | 87.374.900,00 | 85.840.000,00 | | | | | | | 181.330.000,00 | | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | - | | | | - | - | 36.190.000,00 | 30.000.000,00 | 24.999.900,00 | -11.190.100,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 45.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | | | | 2 Layanan | 2 Layanan | 14.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.590.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.03.2.01.0005 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | | | | 5 Paket | 5 Paket | 21.600.000,00 | 30.000.000,00 | 24.999.900,00 | 3.399.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | | | | - | - | 59.300.000,00 | 46.780.000,00 | 62.375.000,00 | 3.075.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 136.330.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0001 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 22.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 85.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 23.550.000,00 | 18.700.000,00 | 41.690.000,00 | 18.140.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 26.100.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.850.000,00 | 28.080.000,00 | 20.685.000,00 | 7.835.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.230.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | - | | | | - | - | 286.954.600,00 | 599.870.000,00 | 597.531.800,00 | 172.045.400,00 | | | | | | | 459.000.000,00 | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | | | | - | - | 30.353.000,00 | 23.388.000,00 | 5.989.800,00 | -24.363.200,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 125.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 6.965.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.965.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 95.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 23.388.000,00 | 23.388.000,00 | 5.989.800,00 | -17.398.200,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | | | | - | - | 247.251.600,00 | 564.582.000,00 | 583.552.000,00 | 336.300.400,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 320.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 220.000.000,00 | 553.330.000,00 | 575.300.000,00 | 355.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 250.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 5.765.600,00 | 5.765.600,00 | 5.765.600,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 45.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 21.486.000,00 | 5.486.400,00 | 2.486.400,00 | -18.999.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | | | | - | - | 9.350.000,00 | 11.900.000,00 | 7.990.000,00 | -1.360.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 14.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.04.0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.350.000,00 | 11.900.000,00 | 7.990.000,00 | -1.360.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 14.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 40.000.000,00 | | | | | | | 55.000.000,00 | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -10.000.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | 8.459.824.528,00 | 8.693.962.865,00 | 7.974.528.365,00 | -485.296.163,00 | | | | | 7.893.176.015,00 | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 8.459.824.528,00 | 8.693.962.865,00 | 7.974.528.365,00 | -485.296.163,00 | | | | | | | 7.893.176.015,00 | |
| | 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | 8.459.824.528,00 | 8.693.962.865,00 | 7.974.528.365,00 | -485.296.163,00 | | | | | | | 7.893.176.015,00 | |
| 1. | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | - | - | | 5.619.109.928,00 | 5.347.493.365,00 | 4.984.169.365,00 | 204.566.087,00 | | | | | | | 5.823.676.015,00 | |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | - | - | | 38.830.000,00 | 26.230.000,00 | 24.275.000,00 | -14.555.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 46.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.600.000,00 | -400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.200.000,00 | -200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | -200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.200.000,00 | -200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | -200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.200.000,00 | -80.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.460.000,00 | 2.750.000,00 | 2.475.000,00 | -2.985.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | 13.000.000,00 | 12.600.000,00 | 6.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 12 Data | 12 Data | 12.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0012 | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | | 10 Subtansi | 10 Subtansi | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.290.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.757.460.928,00 | 4.791.157.865,00 | 4.600.407.865,00 | -157.053.063,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 4.934.476.015,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 56 Orang/b ulan | 56 Orang/b ulan | 4.648.300.928,00 | 4.671.537.865,00 | 4.481.537.865,00 | -166.763.063,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.797.476.015,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 101.860.000,00 | 111.120.000,00 | 111.120.000,00 | 9.260.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.350.000,00 | -150.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.400.000,00 | -200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 2.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | -200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 3.360.000,00 | -310.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 12.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 880.000,00 | -190.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 880.000,00 | -120.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 21.525.000,00 | 18.200.000,00 | 0,00 | -21.525.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 48.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 56 Unit | 56 Unit | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 56 Paket | 56 Paket | 17.525.000,00 | 18.200.000,00 | 0,00 | -17.525.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 331.214.000,00 | 283.665.500,00 | 169.056.500,00 | -162.157.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 374.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 7.382.000,00 | 6.460.000,00 | 5.858.000,00 | -1.524.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 19.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 13.592.500,00 | 10.369.500,00 | 9.700.000,00 | -3.892.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 19.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 32.513.000,00 | 28.161.000,00 | 23.345.500,00 | -9.167.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 32.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 30.957.500,00 | 23.641.000,00 | 18.654.000,00 | -12.303.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 30.000.000,00 | 28.000.000,00 | 13.000.000,00 | -17.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 10 Laporan | 14.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.750.000,00 | -4.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 16.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 169.269.000,00 | 175.034.000,00 | 88.749.000,00 | -80.520.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 180.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 199.850.000,00 | 104.000.000,00 | 64.000.000,00 | -135.850.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 170.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 66.250.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | -66.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 133.600.000,00 | 71.000.000,00 | 64.000.000,00 | -69.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 5.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 196.760.000,00 | 59.570.000,00 | 59.570.000,00 | -137.190.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | 184.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 2.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 3.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 3.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 194.290.000,00 | 57.700.000,00 | 57.700.000,00 | -136.590.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 175.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 69.800.000,00 | 61.000.000,00 | 63.500.000,00 | -6.300.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | 53.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 27.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 25 Unit | 14.800.000,00 | 9.800.000,00 | 12.300.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 5.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 35.000.000,00 | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | -3.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2. | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | - | | | | - | - | 88.635.000,00 | 68.703.500,00 | 33.819.000,00 | 76.365.000,00 | | | | | | | 165.000.000,00 | |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | - | | | | - | - | 88.635.000,00 | 68.703.500,00 | 33.819.000,00 | -54.816.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 165.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | | 2 Desa | 2 Desa | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | | | | 80 Desa | 80 Desa | 14.700.000,00 | 9.600.000,00 | 5.485.000,00 | -9.215.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya | | | | 80 Desa | 80 Desa | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | | | | 80 Desa | 80 Desa | 40.055.000,00 | 43.173.500,00 | 21.804.000,00 | -18.251.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0005 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18.580.000,00 | 9.130.000,00 | 6.530.000,00 | -12.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi | | | | 80 Unit | 80 Unit | 11.900.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | -11.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 3. | 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | - | | | | - | - | 470.053.600,00 | 1.526.325.000,00 | 1.506.605.000,00 | 144.946.400,00 | | | | | | | 615.000.000,00 | |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | - | | | | - | - | 470.053.600,00 | 1.526.325.000,00 | 1.506.605.000,00 | 1.036.551.400,00 | | | - | - | - | | 615.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.725.000,00 | 19.625.000,00 | 14.655.000,00 | -11.070.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.400.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 440.928.600,00 | 1.504.150.000,00 | 1.491.950.000,00 | 1.051.021.400,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 550.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 474.051.000,00 | 297.556.000,00 | 213.440.000,00 | 35.449.000,00 | | | | | | | 509.500.000,00 | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 474.051.000,00 | 297.556.000,00 | 213.440.000,00 | -260.611.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 509.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.100.000,00 | 54.200.000,00 | 47.500.000,00 | -1.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.200.000,00 | 9.800.000,00 | 9.400.000,00 | -3.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.775.000,00 | 9.775.000,00 | 7.500.000,00 | -2.275.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.210.000,00 | 10.210.000,00 | 6.800.000,00 | -3.410.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 80 Orang | 80 Orang | 114.100.000,00 | 59.800.000,00 | 59.000.000,00 | -55.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0007 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.700.000,00 | 9.800.000,00 | 9.000.000,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.100.000,00 | 12.500.000,00 | 12.480.000,00 | -620.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 3.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | 64 Laporan | 64 Laporan | 17.300.000,00 | 8.160.000,00 | 4.250.000,00 | -13.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 65.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0010 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.900.000,00 | 12.500.000,00 | 9.900.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 80 Orang | 80 Orang | 15.900.000,00 | 12.500.000,00 | 9.900.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | | | | 30 Desa | 30 Desa | 90.806.000,00 | 77.121.000,00 | 34.310.000,00 | -56.496.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0016 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 3.400.000,00 | -3.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0017 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 84.710.000,00 | 14.390.000,00 | 0,00 | -84.710.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5. | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | - | | | | - | - | 1.807.975.000,00 | 1.453.885.000,00 | 1.236.495.000,00 | -1.027.975.000,00 | | | | | | | 780.000.000,00 | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.807.975.000,00 | 1.453.885.000,00 | 1.236.495.000,00 | -571.480.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 780.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 166.450.000,00 | 88.150.000,00 | 70.000.000,00 | -96.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 100 Lembaga | 100 Lembaga | 39.180.000,00 | 30.800.000,00 | 30.300.000,00 | -8.880.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 100 Unit | 100 Unit | 35.100.000,00 | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | -18.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | DAERAH | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.850.000,00 | 16.850.000,00 | 13.400.000,00 | -1.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.458.095.000,00 | 1.276.385.000,00 | 1.081.095.000,00 | -377.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 470.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0010 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | | | | 1 Keluarga | 1 Keluarga | 75.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0011 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | 1 Keluarga | 1 Keluarga | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | 11.195.593.500,00 | 16.756.950.850,00 | 19.552.982.350,00 | 8.357.388.850,00 | | | | | | 40.000.000,00 | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 11.195.593.500,00 | 16.756.950.850,00 | 19.552.982.350,00 | 8.357.388.850,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | | |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | 11.195.593.500,00 | 16.756.950.850,00 | 19.552.982.350,00 | 8.357.388.850,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | | |
| 1. | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 6.232.344.500,00 | 6.673.480.350,00 | 6.390.869.350,00 | -6.232.344.500,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 39.760.000,00 | 39.760.000,00 | 32.921.500,00 | -6.838.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 5.396.800,00 | -1.903.200,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.049.700,00 | -1.350.300,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.050.000,00 | -1.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 1.545.000,00 | -1.745.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 2.300.000,00 | -990.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 11.000.000,00 | 500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.928.675.000,00 | 4.461.110.850,00 | 4.503.960.850,00 | 575.285.850,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 200 Orang/ bulan | 200 Orang/ bulan | 3.658.075.000,00 | 4.190.510.850,00 | 4.320.510.850,00 | 662.435.850,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 266.040.000,00 | 266.040.000,00 | 181.080.000,00 | -84.960.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | -860.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.310.000,00 | -690.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.060.000,00 | -640.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 37.201.000,00 | 29.701.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.150.000,00 | -850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 4 0 | 4 0 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 34.551.000,00 | 30.551.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------|--------|---|---------------------|--------------------------------------|------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 323.209.500,00 | 323.209.500,00 | 166.886.000,00 | -156.323.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 32.800.000,00 | 32.800.000,00 | 15.905.000,00 | -16.895.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 7 Paket | 7 Paket | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 92.815.500,00 | 92.815.500,00 | 56.158.000,00 | -36.657.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 8 Paket | 8 Paket | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 19.000.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | -5.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 157.890.000,00 | 157.890.000,00 | 69.819.000,00 | -88.071.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 585.500.000,00 | 585.500.000,00 | 409.500.000,00 | -176.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 318.000.000,00 | 318.000.000,00 | 113.500.000,00 | -204.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 30 Unit | 30 Unit | 267.500.000,00 | 267.500.000,00 | 296.000.000,00 | 28.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.199.200.000,00 | 1.107.900.000,00 | 1.107.900.000,00 | -91.300.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.194.200.000,00 | 1.102.900.000,00 | 1.102.900.000,00 | -91.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 113.500.000,00 | 113.500.000,00 | 132.500.000,00 | 19.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 0 0 | 0 0 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 23.600.000,00 | -24.900.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.900.000,00 | -6.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase layanan angkutan darat | | | | 80 Persen | 80 Persen | 4.956.449.000,00 | 10.076.670.500,00 | 13.158.713.000,00 | -4.916.449.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | 500 Unit | 500 Unit | 2.641.570.000,00 | 7.761.791.500,00 | 11.184.269.000,00 | 8.542.699.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | Masyarakat | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 140 Unit | 140 Unit | 1.919.200.000,00 | 7.039.421.500,00 | 10.260.889.000,00 | 8.341.689.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | 300 Unit | 300 Unit | 722.370.000,00 | 722.370.000,00 | 923.380.000,00 | 201.010.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 3. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | - | | | | - | - | 13.890.000,00 | 13.890.000,00 | 20.570.000,00 | 6.680.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 | 20.120.000,00 | 6.680.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIaan DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | - | | | | - | - | 14.325.000,00 | 14.325.000,00 | 9.970.000,00 | -4.355.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangun Fasilitasi Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 14.325.000,00 | 14.325.000,00 | 9.970.000,00 | -4.355.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | - | | | | - | - | 331.280.000,00 | 331.280.000,00 | 413.740.000,00 | 82.460.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | | | 6 Unit | 6 Unit | 119.600.000,00 | 119.600.000,00 | 233.700.000,00 | 114.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | | | | 5000 Unit | 5000 Unit | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | 8.750.000,00 | -13.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 5000 Dokumen | 5000 Dokumen | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 97.300.000,00 | 22.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.030.000,00 | 10.030.000,00 | 8.460.000,00 | -1.570.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0006 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | 5.500.000,00 | -10.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | | | 11 Unit | 11 Unit | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 49.700.000,00 | -12.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIaan DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 16.560.000,00 | 16.560.000,00 | 7.080.000,00 | -9.480.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 3.250.000,00 | -6.740.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemèn dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.941.864.000,00 | 1.941.864.000,00 | 1.423.104.000,00 | -518.760.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 290.609.000,00 | 290.609.000,00 | 250.889.000,00 | -39.720.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0008 | Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun | | | | 3 Unit | 3 Unit | 138.000.000,00 | 138.000.000,00 | 138.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0010 | Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.905.000,00 | 6.905.000,00 | 1.700.000,00 | -5.205.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | | | | 3 Unit | 3 Unit | 164.100.000,00 | 164.100.000,00 | 289.000.000,00 | 124.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 0,00 | -1.210.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.380.000,00 | 9.380.000,00 | 3.370.000,00 | -6.010.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.313.000.000,00 | 1.313.000.000,00 | 735.000.000,00 | -578.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 5.145.000,00 | -13.515.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 13.520.000,00 | 13.520.000,00 | 107.060.000,00 | 93.540.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 104.000.000,00 | 96.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.120.000,00 | 6.120.000,00 | 3.060.000,00 | -3.060.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3. | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | - | | | | - | - | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 3.400.000,00 | -6.800.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | - | | | | - | - | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 3.400.000,00 | -3.400.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0010 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 1.700.000,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.03.2.13.0011 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia | | | | 2 Unit | 2 Unit | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 1.700.000,00 | -1.700.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | | | | | | | | 18.004.660.723,00 | 13.298.009.438,00 | 11.635.807.438,00 | -6.368.853.285,00 | | | | | | 18.112.900.000,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 18.004.660.723,00 | 13.298.009.438,00 | 11.635.807.438,00 | -6.368.853.285,00 | | | | | | | 18.112.900.000,00 | | |
| | 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | 17.572.150.723,00 | 12.932.158.438,00 | 11.402.170.438,00 | -6.169.980.285,00 | | | | | | | 17.992.900.000,00 | | |
| 1. | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 6.913.947.723,00 | 6.156.437.438,00 | 5.883.813.438,00 | 983.952.277,00 | | | | | | | 7.897.900.000,00 | | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 22.928.900,00 | 19.928.900,00 | 18.563.900,00 | -4.365.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 13.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.652.900,00 | 1.652.900,00 | 1.132.900,00 | -520.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 625.000,00 | -390.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.746.000,00 | 1.746.000,00 | 1.681.000,00 | -65.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.110.000,00 | -390.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.128.947.823,00 | 5.568.852.538,00 | 5.563.492.538,00 | 434.544.715,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 5.547.600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 56 Orang/bulan | 56 Orang/bulan | 4.890.600.823,00 | 5.363.606.438,00 | 5.363.606.438,00 | 473.005.615,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 80.967.000,00 | 19.326.100,00 | 14.326.100,00 | -66.640.900,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 85.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 154.220.000,00 | 182.760.000,00 | 182.760.000,00 | 28.540.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 160.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.500.000,00 | -180.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.300.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.300.000,00 | -180.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.300.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 11.780.000,00 | 11.780.000,00 | 8.380.000,00 | -3.400.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 7.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 6.800.000,00 | -3.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.880.000,00 | 23.130.000,00 | 2.450.000,00 | -8.430.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 9.700.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 22 Paket | 22 Paket | 7.750.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | -7.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.700.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 2.450.000,00 | -680.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 314.667.000,00 | 298.802.000,00 | 132.583.000,00 | -182.084.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 324.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 3.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 4.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 33.409.000,00 | 17.544.000,00 | 16.894.000,00 | -16.515.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 35.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 7.000.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 12.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 238.458.000,00 | 238.458.000,00 | 95.889.000,00 | -142.569.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 1.247.000.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | -1.221.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | 1.725.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 1.229.000.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | -1.203.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 1.700.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 108.544.000,00 | 90.644.000,00 | 75.044.000,00 | -33.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | 175.600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.994.000,00 | 4.994.000,00 | 4.994.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 5.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 102.950.000,00 | 85.050.000,00 | 69.450.000,00 | -33.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 170.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 69.200.000,00 | 117.300.000,00 | 57.300.000,00 | -11.900.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 95.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 95 Unit | 95 Unit | 19.200.000,00 | 77.300.000,00 | 17.300.000,00 | -1.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| 2. | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | - | | | | - | - | 4.686.083.000,00 | 468.601.000,00 | 357.957.000,00 | -221.083.000,00 | | | | | | | 4.465.000.000,00 | |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 4.686.083.000,00 | 468.601.000,00 | 357.957.000,00 | -4.328.126.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 4.465.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | | | | 12 laporan Laporan | 12 laporan Laporan | 4.235.698.000,00 | 1.596.000,00 | 1.206.000,00 | -4.234.492.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.010.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendistribusikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | | | | 14 Komunitas | 14 Komunitas | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 0,00 | -2.860.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0016 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.360.000,00 | 12.360.000,00 | 6.180.000,00 | -6.180.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | | | | 16 Permoh onan | 16 Permoh onan | 23.989.000,00 | 23.989.000,00 | 16.925.000,00 | -7.064.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0020 | Diseminasi Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | | | | 80 Persentase | 80 Persentase | 196.136.000,00 | 206.756.000,00 | 119.136.000,00 | -77.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i> | | | | 2 Media | 2 Media | 187.160.000,00 | 193.160.000,00 | 191.620.000,00 | 4.460.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Konten Informasi Publik</i> | | | | 4 Konten | 4 Konten | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 11.650.000,00 | -3.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan</i> | | | | 5 Orang | 5 Orang | 12.630.000,00 | 12.630.000,00 | 11.240.000,00 | -1.390.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| 3. | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | - | | | | - | - | 5.972.120.000,00 | 6.307.120.000,00 | 5.160.400.000,00 | -342.120.000,00 | | | | | | | 5.630.000.000,00 | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 0,00 | -10.950.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 0,00 | -10.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 5.961.170.000,00 | 6.296.170.000,00 | 5.160.400.000,00 | -800.770.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 5.620.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0014 | Koordinasi penyusunan proses bisnis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo</i> | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 404.300.000,00 | 404.300.000,00 | 1.720.000,00 | -402.580.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i> | | | | 6 Aplikasi | 6 Aplikasi | 322.450.000,00 | 322.450.000,00 | 310.560.000,00 | -11.890.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i> | | | | 39 Perangkat Daerah | 39 Perangkat Daerah | 224.900.000,00 | 2.959.900.000,00 | 2.240.300.000,00 | 2.015.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0029 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan</i> | | | | 39 Aplikasi | 39 Aplikasi | 9.520.000,00 | 9.520.000,00 | 7.820.000,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0030 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i> | | | | 39 Perangkat Daerah | 39 Perangkat Daerah | 5.000.000.000,00 | 2.600.000.000,00 | 2.600.000.000,00 | -2.400.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 5.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | 112.303.000,00 | 75.971.000,00 | 55.526.000,00 | -56.777.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| 1. | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | - | | | | - | - | 112.303.000,00 | 75.971.000,00 | 55.526.000,00 | -62.303.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 112.303.000,00 | 75.971.000,00 | 55.526.000,00 | -56.777.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.2.01.0007 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | | | | 5 Orang | 5 Orang | 33.974.000,00 | 20.068.000,00 | 14.238.000,00 | -19.736.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.2.01.0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | | | | 80 Persentase | 80 Persentase | 36.689.000,00 | 13.923.000,00 | 11.518.000,00 | -25.171.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | | | | 47 Dokumen | 47 Dokumen | 41.640.000,00 | 41.980.000,00 | 29.770.000,00 | -11.870.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | 320.207.000,00 | 289.880.000,00 | 178.111.000,00 | -142.096.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| 1. | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | - | | | | - | - | 320.207.000,00 | 289.880.000,00 | 178.111.000,00 | -250.207.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 308.493.000,00 | 278.166.000,00 | 170.223.000,00 | -138.270.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 60.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 248.080.000,00 | 248.080.000,00 | 147.260.000,00 | -100.820.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | | | | 39 Perangkat Daerah | 39 Perangkat Daerah | 60.413.000,00 | 30.086.000,00 | 22.963.000,00 | -37.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 11.714.000,00 | 11.714.000,00 | 7.888.000,00 | -3.826.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | | | | 39 Perangkat Daerah | 39 Perangkat Daerah | 11.714.000,00 | 11.714.000,00 | 7.888.000,00 | -3.826.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | | 11.480.412.520,00 | 10.129.380.100,00 | 9.415.302.300,00 | -2.065.110.220,00 | | | | | 40.544.194.800,00 | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 9.726.414.520,00 | 8.711.009.100,00 | 8.404.707.300,00 | -1.321.707.220,00 | | | | | | | 22.911.194.800,00 | |
| | 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | 9.726.414.520,00 | 8.711.009.100,00 | 8.404.707.300,00 | -1.321.707.220,00 | | | | | | | 22.911.194.800,00 | |
| 1. | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.401.401.673,00 | 7.935.049.600,00 | 7.620.126.800,00 | 9.160.628.127,00 | | | | | | | 17.562.029.800,00 | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 20.153.500,00 | 27.200.000,00 | 10.200.000,00 | -9.953.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 284.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.911.000,00 | 6.000.000,00 | 2.250.000,00 | -1.661.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.876.000,00 | 6.000.000,00 | 2.250.000,00 | -1.626.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.465.000,00 | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | -965.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.298.000,00 | 600.000,00 | 225.000,00 | -1.073.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.354.500,00 | 600.000,00 | 225.000,00 | -2.129.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.418.000,00 | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 82.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.631.000,00 | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | -131.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.600.000,00 | 2.000.000,00 | 750.000,00 | -850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 12 Data | 12 Data | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0012 | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | | 1 Substansi | 1 Substansi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | | | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 5.754.218.173,00 | 5.659.749.100,00 | 5.658.249.100,00 | -95.969.073,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 6.828.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 64 Orang/bulan | 64 Orang/bulan | 5.588.338.173,00 | 5.471.829.100,00 | 5.471.829.100,00 | -116.509.073,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.500.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 163.680.000,00 | 185.520.000,00 | 185.520.000,00 | 21.840.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 1.600.000,00 | 2.400.000,00 | 900.000,00 | -700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 45.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 2.200.000,00 | 2.400.000,00 | 900.000,00 | -1.300.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 800.000,00 | 2.400.000,00 | 900.000,00 | 100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 600.000,00 | 2.400.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 132.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | 26 Laporan | 26 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | | | | 26 Laporan | 26 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 600.000,00 | 2.400.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | | | 90 Orang | 90 Orang | 65.800.000,00 | 24.795.000,00 | 1.800.000,00 | -64.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 315.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 61.000.000,00 | 19.995.000,00 | 0,00 | -61.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 80.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 64 Dokumen | 64 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 900.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 64 Dokumen | 64 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 900.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 45.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 64 Orang | 64 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 64 Orang | 64 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan | | | | 9 Jenis | 9 Jenis | 476.830.000,00 | 346.005.500,00 | 277.577.700,00 | -199.252.300,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.580.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.583.000,00 | 10.014.000,00 | 10.014.000,00 | -6.569.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 45.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|--|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 100.935.000,00 | 74.018.000,00 | 71.181.500,00 | -29.753.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40.500.000,00 | 44.816.500,00 | 44.810.200,00 | 4.310.200,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 150.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 250.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 300 Laporan | 300 Laporan | 102.000.000,00 | 71.040.000,00 | 54.140.000,00 | -47.860.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 179 Laporan | 179 Laporan | 206.812.000,00 | 136.117.000,00 | 97.432.000,00 | -109.380.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 450.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 65.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 90.000.000,00 | 155.000.000,00 | 42.000.000,00 | -48.000.000,00 | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.881.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 500.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 500.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 90.000.000,00 | 155.000.000,00 | 42.000.000,00 | -48.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 600.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 700.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 531.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 1.738.600.000,00 | 1.576.300.000,00 | 1.576.300.000,00 | -162.300.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | 2.345.029.800,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.000.000,00 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 2.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 21.029.800,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 500.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 24.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.725.600.000,00 | 1.560.700.000,00 | 1.560.700.000,00 | -164.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 1.800.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Berada Dalam Kondisi Baik | | | | 10 Jenis | 10 Jenis | 253.000.000,00 | 141.200.000,00 | 52.200.000,00 | -200.800.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | 3.097.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 19 Unit | 19 Unit | 38.000.000,00 | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 3.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 120 Unit | 120 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 144.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 24 Unit | 24 Unit | 15.000.000,00 | 40.000.000,00 | 11.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 250.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|--------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 2.17.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 15 Unit | 15 Unit | 200.000.000,00 | 51.200.000,00 | 1.200.000,00 | -198.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 520.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 26 Unit | 26 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 520.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 26 Unit | 26 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 520.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | | | | 10000 Ha | 10000 Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 520.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| 2. | 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, | | | | 95 persen | 95 persen | 24.405.000,00 | 21.780.000,00 | 0,00 | 215.595.000,00 | | | | | | | 240.000.000,00 | | | |
| | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha simpan pinjam | | | | 50 Koperasi | 50 Koperasi | 24.405.000,00 | 21.780.000,00 | 0,00 | -24.405.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Koperasi | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 187 Unit Usaha | 187 Unit Usaha | 24.405.000,00 | 21.780.000,00 | 0,00 | -24.405.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin pembukaan | | | | 25 Koperasi | 25 Koperasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4 Unit Usaha | 4 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| 3. | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah | | | | 2,50 persen | 2,50 persen | 98.622.000,00 | 39.670.000,00 | 13.050.000,00 | 130.508.000,00 | | | | | | | 229.130.000,00 | | | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang berkualitas | | | | 50 Koperasi | 50 Koperasi | 98.622.000,00 | 39.670.000,00 | 13.050.000,00 | -85.572.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 229.130.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | 254 Unit Usaha | 254 Unit Usaha | 56.772.000,00 | 18.450.000,00 | 13.050.000,00 | -43.722.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 114.565.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i> | | | | 254 Unit Usaha | 254 Unit Usaha | 41.850.000,00 | 21.220.000,00 | 0,00 | -41.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 114.565.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| 4. | 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi Berkategori Sehat | | | | 72,92 persen | 72,92 persen | 88.605.000,00 | 65.280.000,00 | 21.950.000,00 | 155.430.000,00 | | | | | | | 244.035.000,00 | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang memperoleh sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi</i> | | | | 50 Koperasi | 50 Koperasi | 88.605.000,00 | 65.280.000,00 | 21.950.000,00 | -66.655.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | 244.035.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i> | | | | 254 Unit Usaha | 254 Unit Usaha | 54.305.000,00 | 37.930.000,00 | 0,00 | -54.305.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 114.565.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i> | | | | 353 Unit Usaha | 353 Unit Usaha | 34.300.000,00 | 27.350.000,00 | 21.950.000,00 | -12.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 129.470.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| 5. | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Koperasi Berkinerja Baik | | | | 72,92 Persen | 72,92 Persen | 53.820.000,00 | 25.650.000,00 | 42.125.000,00 | 346.180.000,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Pengurus Koperasi yang di latih</i> | | | | 30 Koperasi | 30 Koperasi | 53.820.000,00 | 25.650.000,00 | 42.125.000,00 | -11.695.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | 400.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i> | | | | 100 Orang | 100 Orang | 53.820.000,00 | 25.650.000,00 | 42.125.000,00 | -11.695.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 400.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| 6. | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi Aktif | | | | 72,92 persen | 72,92 persen | 131.416.000,00 | 84.123.000,00 | 303.124.000,00 | 918.584.000,00 | | | | | | | 1.050.000.000,00 | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan usaha dan pemberdayaan kopeasi</i> | | | | 100 Koperasi | 100 Koperasi | 131.416.000,00 | 84.123.000,00 | 303.124.000,00 | 171.708.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | 1.050.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.06.2.01.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i> | | | | 100 Keluarga | 100 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 90.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan</i> | | | | 100 Kelompok Masyarakat | 100 Kelompok Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 45.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya</i> | | | | 60 Unit Usaha | 103 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 257.500.000,00 | 257.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 125.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i> | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.06.2.01.0006 | Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya</i> | | | | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.06.2.01.0007 | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya</i> | | | | 60 Unit Usaha | 60 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 125.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.06.2.01.0008 | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya</i> | | | | 365 Unit Usaha | 365 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | 125.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|------------------------------------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 131.416.000,00 | 84.123.000,00 | 45.624.000,00 | -85.792.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| 7. | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | | | | 100 persen | 100 persen | 723.959.000,00 | 513.006.500,00 | 379.531.500,00 | 1.282.041.000,00 | | | | | | | 2.006.000.000,00 | | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha. | | | | 150 UKM | 150 UKM | 723.959.000,00 | 513.006.500,00 | 379.531.500,00 | -344.427.500,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 2.006.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | | | | 60 Unit Usaha | 60 Unit Usaha | 145.995.000,00 | 117.995.000,00 | 107.945.000,00 | -38.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 90.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | | | | 1400 Unit Usaha | 1400 Unit Usaha | 182.825.000,00 | 148.295.000,00 | 141.900.000,00 | -40.925.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Lau, Marannu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 90.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 102.050.000,00 | 50.420.000,00 | 50.420.000,00 | -51.630.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 700.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | 100 Orang | 100 Orang | 36.006.000,00 | 21.980.000,00 | 0,00 | -36.006.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Simbang, Sambueja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Simbang, Sambueja Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0008 | Pemulihan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0009 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi | | | | 1400 Unit Usaha | 1400 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0010 | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Alatengae Kab. Maros, Tompobulu, Bonto Manai Kab. Maros, Tompobulu, Toddolimae Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 90.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0011 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 1400 Unit Usaha | 1400 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0012 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 142.863.000,00 | 86.526.500,00 | 10.526.500,00 | -132.336.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 56.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Simbang, Sambueja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|------------------------------------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i> | | | | 1400 Unit Usaha | 1400 Unit Usaha | 67.360.000,00 | 42.715.000,00 | 34.690.000,00 | -32.670.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i> | | | | 100 Orang | 100 Orang | 46.860.000,00 | 45.075.000,00 | 34.050.000,00 | -12.810.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Tanralili, Damai Kab. Maros, Marusu, Bonto Matene Kab. Maros, Marusu, Pabentengang Kab. Maros, Simbang, Sambueja Kab. Maros, Simbang, Simbang Kab. Maros, Lau, Soreang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| 8. | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM Yang Mengalami Peningkatan Permodalan, Jenis Usaha, Nilai Pemasaran, Kualitas dan Kuantitas Produksi. | | | | 75 Persen | 75 Persen | 204.185.847,00 | 26.450.000,00 | 24.800.000,00 | 975.814.153,00 | | | | | | | 1.180.000.000,00 | | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | <i>Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi</i> | | | | 150 UKM | 150 UKM | 204.185.847,00 | 26.450.000,00 | 24.800.000,00 | -179.385.847,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.180.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i> | | | | 120 Unit Usaha | 120 Unit Usaha | 101.435.847,00 | 0,00 | 0,00 | -101.435.847,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.08.2.01.0003 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah yang Difasilitasi</i> | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.08.2.01.0004 | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi</i> | | | | 100 Lembaga | 100 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.08.2.01.0005 | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i> | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 43.350.000,00 | 26.450.000,00 | 24.800.000,00 | -18.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i> | | | | 150 Unit Usaha | 150 Unit Usaha | 59.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Camba, Pattiro Deceng Kab. Maros, Bontoa, Bontole mpangang Kab. Maros, Mallawa, Bentenge Kab. Maros, Mallawa, Uludaya Kab. Maros, Marusu, Marumpa Kab. Maros, Marusu, Pabentengang Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa Kab. Maros, Simbang, Sambueja Kab. Maros, Lau, Maccini Baji Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 700.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 1.753.998.000,00 | 1.418.371.000,00 | 1.010.595.000,00 | -743.403.000,00 | | | | | | | 17.633.000.000,00 | | |
| | 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | 853.990.000,00 | 882.900.000,00 | 755.455.000,00 | -98.535.000,00 | | | | | | | 10.378.000.000,00 | | |
| 1. | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Permohonan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang singkat, Murah, dan Mudah | | | | 100 persen | 100 persen | 37.680.000,00 | 32.200.000,00 | 8.630.000,00 | 537.320.000,00 | | | | | | | 575.000.000,00 | | |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | <i>Jumlah penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</i> | | | | 50 Izin | 50 Izin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.01.0002 | Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | | | | 1 laporan | 1 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bontoa, Salenrang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan | | | | 30 TDP | 30 TDP | 37.680.000,00 | 32.200.000,00 | 8.630.000,00 | -29.050.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 37.680.000,00 | 32.200.000,00 | 8.630.000,00 | -29.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | | | | 20 STPW Luar Negeri | 20 STPW Luar Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03.0001 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03.0003 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik | | | | 35 Dokumen | 35 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03.0004 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik | | | | 35 dokumen | 35 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri | Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri | | | | 20 STPW Luar Negeri | 20 STPW Luar Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 140.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04.0001 | Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04.0004 | Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | | | | 20 dokumen | 20 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat yang diterbitkan | | | | 100 Izin | 100 Izin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.05.0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.05.0002 | Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 100 dokumen | 100 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 50 Gudang | 50 Gudang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 165.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.06.0001 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.06.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat | | | | 100 Persen Persen | 100 Persen Persen | 568.120.000,00 | 702.250.000,00 | 688.100.000,00 | 4.942.880.000,00 | | | | | | | 5.511.000.000,00 | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terbangun dan dikelola | | | | 14 Kecamatan | 14 Kecamatan | 568.120.000,00 | 702.250.000,00 | 688.100.000,00 | 119.980.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 4.300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 26 Unit | 26 Unit | 568.120.000,00 | 702.250.000,00 | 688.100.000,00 | 119.980.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bontoa, Pajukukang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 3.000.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 26 Unit | 26 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 700.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0003 | Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang | | | | 25 Kegiatan | 25 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0004 | Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang | | | | 25 laporan | 25 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah pengelola yang meningkat kapasitasnya | | | | 30 Orang | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.211.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 1.011.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| 3. | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran | | | | 100 100 Persen Persen | 100 100 Persen Persen | 21.440.000,00 | 30.620.000,00 | 6.120.000,00 | 1.182.160.000,00 | | | | | | | 1.203.600.000,00 | | |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia | | | | 11 & 7 Jenis barang kebutuhan pokok & barang penting | 11 & 7 Jenis barang kebutuhan pokok & barang penting | 4.760.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | -4.760.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 398.600.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | 243 Laporan | 243 Laporan | 4.760.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | -4.760.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 130.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 134.300.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 134.300.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Fungsi Pengawasan Stok dan Operasi Pasar | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 11.240.000,00 | 18.720.000,00 | 4.080.000,00 | -7.160.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 410.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | 250 Laporan | 250 Laporan | 7.160.000,00 | 10.220.000,00 | 2.040.000,00 | -5.120.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 130.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.080.000,00 | 8.500.000,00 | 2.040.000,00 | -2.040.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 160.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.440.000,00 | 6.800.000,00 | 2.040.000,00 | -3.400.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 395.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.03.0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.03.0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 130.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | | | | 84 Laporan | 84 Laporan | 5.440.000,00 | 6.800.000,00 | 2.040.000,00 | -3.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 145.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| 4. | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan | | | | 0,99 persen | 0,99 persen | 1.720.000,00 | 5.970.000,00 | 2.040.000,00 | 1.496.180.000,00 | | | | | | | 1.497.900.000,00 | | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan eksportir yang mengikuti pameran produk ekspor | | | | 50 Perusah aan eksportir | 50 Perusah aan eksportir | 1.720.000,00 | 5.970.000,00 | 2.040.000,00 | 320.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.497.900.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | | | | 11 Pelaku Usaha | 11 Pelaku Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | | | | 11 Pelaku Usaha | 11 Pelaku Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | | | | 2 Pelaku Usaha | 2 Pelaku Usaha | 1.720.000,00 | 5.970.000,00 | 2.040.000,00 | 320.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | | | | 11 Produk | 11 Produk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 597.900.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 5. | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen | | | | 95 Persen | 95 Persen | 225.030.000,00 | 111.860.000,00 | 50.565.000,00 | 195.970.000,00 | | | | | | | 421.000.000,00 | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah pedagang/ pemilik UHTP wajib tera dan alat UHTP yang telah melaksanakan metrologi legal | | | | 1500 Pedagang | 1500 Pedagang | 225.030.000,00 | 111.860.000,00 | 50.565.000,00 | -174.465.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 421.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | | | | 943 Unit | 943 Unit | 141.690.000,00 | 72.625.000,00 | 38.665.000,00 | -103.025.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 176.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | | | | 88 Orang | 88 Orang | 83.340.000,00 | 39.235.000,00 | 11.900.000,00 | -71.440.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 115.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0003 | Penyidikan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | | | | 943 Unit | 943 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 130.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 6. | 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern | | | | 85 Persen | 85 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.500.000,00 | | | | | | | 1.169.500.000,00 | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah perusahaan dalam negeri yang melaksanakan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk | | | | 100 Perusa haan | 100 Perusa haan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.169.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 100 UMKM | 100 UMKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | | | | 100 UMKM | 100 UMKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 569.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | 900.008.000,00 | 535.471.000,00 | 255.140.000,00 | -644.868.000,00 | | | | | | | 7.255.000.000,00 | |
| 1. | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri | | | | 100 persen | 100 persen | 854.043.000,00 | 514.731.000,00 | 255.140.000,00 | 5.030.957.000,00 | | | | | | | 5.885.000.000,00 | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 854.043.000,00 | 514.731.000,00 | 255.140.000,00 | -598.903.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 5.885.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 550.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 600.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 550.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 475.765.000,00 | 323.975.000,00 | 111.600.000,00 | -364.165.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 1.200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 378.278.000,00 | 190.756.000,00 | 143.540.000,00 | -234.738.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 285.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 600.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0007 | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 500.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0008 | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 600.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0009 | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 500.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0010 | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 500.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase Pengendalian Usaha Industri | | | | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000.000,00 | | | | | | | 1.200.000.000,00 | |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Indsutri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 600.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 600.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Industri Yang Dimanfaatkan Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Melalui Sistem Informasi Industri Nasional | | | | 95 persen | 95 persen | 45.965.000,00 | 20.740.000,00 | 0,00 | 124.035.000,00 | | | | | | | 170.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUUI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUUI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 45.965.000,00 | 20.740.000,00 | 0,00 | -45.965.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 170.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.965.000,00 | 20.740.000,00 | 0,00 | -45.965.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 80.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 45.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 45.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | 9.802.577.030,00 | 7.261.736.757,00 | 6.538.541.257,00 | -3.264.035.773,00 | | | | | 10.063.750.000,00 | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 9.802.577.030,00 | 7.261.736.757,00 | 6.538.541.257,00 | -3.264.035.773,00 | | | | | | | 10.063.750.000,00 | |
| | 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | 9.802.577.030,00 | 7.261.736.757,00 | 6.538.541.257,00 | -3.264.035.773,00 | | | | | | | 10.063.750.000,00 | |
| 1. | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 9.198.184.030,00 | 6.987.332.757,00 | 6.383.968.757,00 | 283.065.970,00 | | | | | | | 9.481.250.000,00 | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 57.319.000,00 | 57.414.000,00 | 27.650.000,00 | -29.669.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 68.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 9.156.000,00 | 8.418.000,00 | 2.100.000,00 | -7.056.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.989.000,00 | 4.591.000,00 | 2.100.000,00 | -1.889.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.747.000,00 | 4.322.000,00 | 1.500.000,00 | -2.247.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.500.000,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.549.000,00 | 4.881.000,00 | 2.100.000,00 | -1.449.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.938.000,00 | 7.315.000,00 | 3.650.000,00 | -9.288.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 13.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.960.000,00 | 5.419.000,00 | 300.000,00 | -4.660.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.800.000,00 | 14.907.000,00 | 12.000.000,00 | -1.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i> | | | | 3 Data | 3 Data | 2.480.000,00 | 4.861.000,00 | 2.400.000,00 | -80.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.589.553.030,00 | 5.759.774.757,00 | 5.339.386.757,00 | -2.250.166.273,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 7.715.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 100 Orang/bulan | 100 Orang/bulan | 7.410.597.030,00 | 5.586.141.757,00 | 5.209.141.757,00 | -2.201.455.273,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 164.000.000,00 | 166.440.000,00 | 127.680.000,00 | -36.320.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 3.644.000,00 | 1.200.000,00 | -8.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.956.000,00 | 3.549.000,00 | 1.365.000,00 | -3.591.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.740.000,00 | 1.450.000,00 | 1.200.000,00 | -540.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.750.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 1.740.000,00 | 1.450.000,00 | 1.200.000,00 | -540.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | 1.750.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 242.699.000,00 | 23.399.000,00 | 6.900.000,00 | -235.799.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | 285.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 1 Unit | 1 Unit | 176.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -176.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 58.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | -58.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 75.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.899.000,00 | 7.899.000,00 | 6.900.000,00 | -999.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPIN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 628.123.000,00 | 475.395.000,00 | 338.932.000,00 | -289.191.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 690.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 73.420.000,00 | 55.537.000,00 | 51.997.000,00 | -21.423.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 189.803.000,00 | 154.259.000,00 | 129.069.000,00 | -60.734.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 225.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 10.326.000,00 | 10.326.000,00 | -4.674.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 90.000.000,00 | 50.000.000,00 | 31.650.000,00 | -58.350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 249.900.000,00 | 195.273.000,00 | 115.890.000,00 | -134.010.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 658.750.000,00 | 471.650.000,00 | 471.650.000,00 | -187.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 661.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 21.300.000,00 | 21.300.000,00 | 21.300.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 21.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 264.000.000,00 | 264.000.000,00 | 264.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 265.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 373.450.000,00 | 186.350.000,00 | 186.350.000,00 | -187.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 375.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 198.250.000,00 | 198.250.000,00 | 178.250.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 53.250.000,00 | 53.250.000,00 | 53.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---|------------------------------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 3. | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | - | | | | - | - | 0,00 | 5.700.000,00 | 2.490.000,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 5.700.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 5.700.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 4. | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | - | | | | - | - | 144.933.000,00 | 96.385.000,00 | 38.581.100,00 | 5.067.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | - | | | | - | - | 144.933.000,00 | 96.385.000,00 | 38.581.100,00 | -106.351.900,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 8600 Pelaku Usaha | 8600 Pelaku Usaha | 45.370.000,00 | 33.275.000,00 | 15.125.000,00 | -30.245.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 1600 Pelaku Usaha | 1600 Pelaku Usaha | 49.563.000,00 | 28.983.000,00 | 10.540.000,00 | -39.023.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | | | | 30 Kegiatan Usaha | 30 Kegiatan Usaha | 50.000.000,00 | 34.127.000,00 | 12.916.100,00 | -37.083.900,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 5. | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | - | | | | - | - | 409.460.000,00 | 144.300.000,00 | 98.406.400,00 | -26.960.000,00 | | | | | | | 382.500.000,00 | | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 409.460.000,00 | 144.300.000,00 | 98.406.400,00 | -311.053.600,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 382.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | 18 Kegiatan Usaha. | 18 Kegiatan Usaha. | 57.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.261.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 57.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 150 Pelaku Usaha | 150 Pelaku Usaha | 237.678.000,00 | 74.530.100,00 | 73.760.000,00 | -163.918.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 210.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku : serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | | | | 18 Kegiatan Usaha | 18 Kegiatan Usaha | 114.521.000,00 | 69.769.900,00 | 24.646.400,00 | -89.874.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 115.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 6. | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 28.019.000,00 | 15.095.000,00 | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 28.019.000,00 | 15.095.000,00 | -34.905.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 28.019.000,00 | 15.095.000,00 | -34.905.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | 10.960.247.678,00 | 8.035.674.984,00 | 7.249.113.084,00 | -3.711.134.594,00 | | | | | | 8.519.395.063,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 10.960.247.678,00 | 8.035.674.984,00 | 7.249.113.084,00 | -3.711.134.594,00 | | | | | | | 8.519.395.063,00 | |
| | 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | 10.645.769.678,00 | 7.756.999.984,00 | 7.118.945.984,00 | -3.526.823.694,00 | | | | | | | 8.214.596.595,00 | |
| 1. | 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 8.328.804.178,00 | 6.000.291.984,00 | 5.428.595.984,00 | -1.403.472.233,00 | | | | | | | 6.925.331.945,00 | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 19.610.000,00 | 17.800.000,00 | 5.040.000,00 | -14.570.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 19.685.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 2 Dokumen | 2.885.000,00 | 4.000.000,00 | 1.260.000,00 | -1.625.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.885.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.675.000,00 | 2.300.000,00 | 630.000,00 | -2.045.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.750.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 2 Laporan Dokumen | 1 Dokumen | 2.810.000,00 | 2.300.000,00 | 630.000,00 | -2.180.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.810.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 2 Laporan Dokumen | 2 Laporan Dokumen | 2.810.000,00 | 2.300.000,00 | 630.000,00 | -2.180.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.810.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 2 Laporan Dokumen | 1 Laporan Dokumen | 2.810.000,00 | 2.300.000,00 | 630.000,00 | -2.180.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.810.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Laporan Laporan | 4 Laporan Laporan | 2.810.000,00 | 2.300.000,00 | 630.000,00 | -2.180.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 2.810.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2 Laporan Laporan | 2 Laporan Laporan | 2.810.000,00 | 2.300.000,00 | 630.000,00 | -2.180.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.810.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.723.407.178,00 | 5.088.246.984,00 | 4.850.046.984,00 | -1.873.360.194,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 5.202.885.945,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 55 Orang/b ulan | 55 Orang/b ulan | 6.575.007.178,00 | 4.938.646.984,00 | 4.706.646.984,00 | -1.868.360.194,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBYAKUAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.061.085.945,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 150 Dokumen | 12 Dokumen | 136.400.000,00 | 141.600.000,00 | 141.600.000,00 | 5.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 129.800.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 12 Laporan | 2 Laporan | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.800.000,00 | -6.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 11.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 33 Paket | 40 Paket | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 332.587.000,00 | 269.917.000,00 | 181.209.000,00 | -151.378.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 276.961.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 182 pcs Paket | 11 Paket | 10.586.000,00 | 14.768.000,00 | 14.768.000,00 | 4.182.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.196.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 6 Paket | 60.913.000,00 | 62.413.000,00 | 55.355.000,00 | -5.558.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 42.275.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 50 Paket | 4 Paket | 11.500.000,00 | 9.750.000,00 | 5.850.000,00 | -5.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.750.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24 Laporan | 12 bulan Laporan | 41.980.000,00 | 37.740.000,00 | 24.740.000,00 | -17.240.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 38.030.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 65 Laporan | 12 bulan Laporan | 197.608.000,00 | 135.246.000,00 | 70.496.000,00 | -127.112.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 167.710.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 853.500.000,00 | 314.528.000,00 | 97.000.000,00 | -756.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.009.300.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 116 Unit | 7 Unit | 191.000.000,00 | 42.528.000,00 | 0,00 | -191.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 160.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 32 Unit | 6 dokumen Unit | 476.600.000,00 | 266.000.000,00 | 91.000.000,00 | -385.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 417.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 1 Unit | 185.900.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -179.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 431.800.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 284.700.000,00 | 162.400.000,00 | 177.900.000,00 | -106.800.000,00 | | | - | - | - | | 290.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 700.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 18.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 34.000.000,00 | 29.000.000,00 | 44.500.000,00 | 10.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 231.400.000,00 | 132.100.000,00 | 132.100.000,00 | -99.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 241.800.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 105.000.000,00 | 127.400.000,00 | 117.400.000,00 | 12.400.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 115.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 75.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 30.000.000,00 | 102.400.000,00 | 92.400.000,00 | 62.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 85.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| 2. | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | - | | | | - | - | 2.209.645.500,00 | 1.630.358.000,00 | 1.597.470.000,00 | -1.000.825.850,00 | | | | | | | 1.208.819.650,00 | | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.058.708.250,00 | 805.105.000,00 | 806.775.000,00 | -251.933.250,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 403.277.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | | 30 Perpustakaan | 0 Perpustakaan | 20.744.450,00 | 0,00 | 0,00 | -20.744.450,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi | | | | 5 Layanan | 5 Layanan | 138.804.000,00 | 75.100.000,00 | 53.020.000,00 | -85.784.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 60 Orang | 100 Orang | 670.574.400,00 | 61.570.000,00 | 40.770.000,00 | -629.804.400,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 85.871.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 94.429.400,00 | 59.620.000,00 | 59.620.000,00 | -34.809.400,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.400.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | 2000 Eksemplar | 2000 Eksemplar | 74.156.000,00 | 264.180.000,00 | 363.730.000,00 | 289.574.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 24.006.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | | 250 Eksemplar | 250 Eksemplar | 25.000.000,00 | 308.935.000,00 | 283.935.000,00 | 258.935.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 35.000.000,00 | 35.700.000,00 | 5.700.000,00 | -29.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.150.937.250,00 | 825.253.000,00 | 790.695.000,00 | -360.242.250,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 805.542.250,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | | | | 15 Perpustakaan | 15 Perpustakaan | 943.553.650,00 | 392.868.000,00 | 362.960.000,00 | -580.593.650,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 648.452.650,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | | | | 21 Orang | 21 Orang | 112.367.650,00 | 271.810.000,00 | 267.160.000,00 | 154.792.350,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.396.650,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | 3 Lokasi | 3 Lokasi | 95.015.950,00 | 160.575.000,00 | 160.575.000,00 | 65.559.050,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 56.692.950,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3. | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | - | | | | - | - | 107.320.000,00 | 126.350.000,00 | 92.880.000,00 | -26.875.000,00 | | | | | | | 80.445.000,00 | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 51.320.000,00 | 73.350.000,00 | 67.880.000,00 | 16.560.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 27.445.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | | | | 10 Orang | 10 Orang | 45.350.000,00 | 67.880.000,00 | 67.880.000,00 | 22.530.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 21.475.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | | | | 5 Eksemplar | 5 Eksemplar | 5.970.000,00 | 5.470.000,00 | 0,00 | -5.970.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.970.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.02 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 56.000.000,00 | 53.000.000,00 | 25.000.000,00 | -31.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 53.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.02.0003 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 500 Eksemplar | 500 Eksemplar | 53.000.000,00 | 51.500.000,00 | 25.000.000,00 | -28.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.02.0004 | Pengolahan dan Penyngangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan penyngangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 500 Eksemplar | 500 Eksemplar | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | 314.478.000,00 | 278.675.000,00 | 130.167.100,00 | -184.310.900,00 | | | | | | | 304.798.468,00 | |
| 1. | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | - | | | | - | - | 173.979.000,00 | 207.450.000,00 | 112.065.100,00 | -4.145.532,00 | | | | | | | 169.833.468,00 | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 89.632.000,00 | 77.423.000,00 | 36.220.100,00 | -53.411.900,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 91.078.468,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | | | | 50 Berkas | 50 Berkas | 33.362.000,00 | 21.475.000,00 | 13.032.100,00 | -20.329.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.352.468,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | | | | 50 Berkas | 50 Berkas | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | -3.720.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.720.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 27.435.000,00 | 33.993.000,00 | 18.093.000,00 | -9.342.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 26.928.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0009 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 25.115.000,00 | 18.235.000,00 | 5.095.000,00 | -20.020.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.078.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 58.092.000,00 | 58.144.000,00 | 38.077.000,00 | -20.015.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 52.722.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0001 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI | | | | 50 Arsip | 50 Arsip | 36.232.000,00 | 46.784.000,00 | 32.212.000,00 | -4.020.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 33.362.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | | | | 100 Arsip | 100 Arsip | 21.860.000,00 | 11.360.000,00 | 5.865.000,00 | -15.995.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 19.360.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 26.255.000,00 | 71.883.000,00 | 37.768.000,00 | 11.513.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 26.033.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 26.255.000,00 | 71.883.000,00 | 37.768.000,00 | 11.513.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 26.033.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | - | | | | - | - | 101.450.000,00 | 59.700.000,00 | 18.102.000,00 | -2.273.000,00 | | | | | | | 99.177.000,00 | |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | - | | | | - | - | 17.470.000,00 | 8.260.000,00 | 4.315.000,00 | -13.155.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 17.470.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | 100 Arsip | 100 Arsip | 17.470.000,00 | 8.260.000,00 | 4.315.000,00 | -13.155.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 17.470.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 62.230.000,00 | 34.930.000,00 | 13.787.000,00 | -48.443.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 61.641.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | | | | 60 Arsip | 60 Arsip | 31.115.000,00 | 17.035.000,00 | 13.787.000,00 | -17.328.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.808.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | 60 Arsip | 60 Arsip | 31.115.000,00 | 17.895.000,00 | 0,00 | -31.115.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.833.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05 | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | - | | | | - | - | 21.750.000,00 | 16.510.000,00 | 0,00 | -21.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 20.066.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | | | | 40 Arsip | 40 Arsip | 8.415.000,00 | 5.595.000,00 | 0,00 | -8.415.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.098.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05.0002 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | | | 40 Arsip | 40 Arsip | 7.815.000,00 | 5.595.000,00 | 0,00 | -7.815.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.348.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05.0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | | | | 40 Arsip | 40 Arsip | 5.520.000,00 | 5.320.000,00 | 0,00 | -5.520.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.620.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3. | 2.24.04 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | - | | | | - | - | 39.049.000,00 | 11.525.000,00 | 0,00 | -3.261.000,00 | | | | | | | 35.788.000,00 | |
| | 2.24.04.2.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 39.049.000,00 | 11.525.000,00 | 0,00 | -39.049.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 35.788.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.04.2.01.0003 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | | | | 2 SOP | 2 SOP | 10.415.000,00 | 6.945.000,00 | 0,00 | -10.415.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERP DAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.218.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.24.04.2.01.0004 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | 20 Arsip | 20 Arsip | 28.634.000,00 | 4.580.000,00 | 0,00 | -28.634.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 26.570.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | DINAS PERIKANAN DAERAH | | | | | | | | 18.800.719.110,00 | 22.120.645.059,00 | 9.540.660.197,00 | -9.260.058.913,00 | | | | | 18.972.100.000,00 | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 18.800.719.110,00 | 22.120.645.059,00 | 9.540.660.197,00 | -9.260.058.913,00 | | | | | | | 18.972.100.000,00 | |
| | 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | 18.800.719.110,00 | 22.120.645.059,00 | 9.540.660.197,00 | -9.260.058.913,00 | | | | | | | 18.972.100.000,00 | |
| 1. | 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 7.724.617.372,00 | 7.987.759.321,00 | 6.926.037.959,00 | 292.482.628,00 | | | | | | | 8.017.100.000,00 | |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 4.175.000,00 | -9.125.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 18.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 475.000,00 | -1.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 475.000,00 | -1.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 475.000,00 | -1.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 475.000,00 | -1.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 475.000,00 | -1.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 475.000,00 | -1.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 375.000,00 | -925.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 475.000,00 | -1.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 3 Data | 3 Data | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 475.000,00 | -1.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | | | 37 Dokumen | 37 Dokumen | 6.484.789.372,00 | 6.645.237.059,00 | 6.111.312.059,00 | -373.477.313,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 6.523.600.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 75 Orang/bulan | 75 Orang/bulan | 6.315.299.372,00 | 6.453.017.059,00 | 5.920.017.059,00 | -395.282.313,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.350.000.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 168.190.000,00 | 190.920.000,00 | 190.920.000,00 | 22.730.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 171.600.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 375.000,00 | -925.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 375.000,00 | -925.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 375.000,00 | -925.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | | | 75 Orang | 75 Orang | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 475.000,00 | -13.525.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 52.000.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 475.000,00 | -1.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | | | | - | 7 Jenis | 463.628.000,00 | 470.078.000,00 | 249.950.900,00 | -213.677.100,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 483.000.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.500.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.727.500,00 | 6.727.500,00 | 6.727.500,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.500.000,00 | DINAS PERIKERANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 79.230.500,00 | 80.835.500,00 | 50.610.400,00 | -28.620.100,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 80.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 10.400.000,00 | 6.240.000,00 | 1.240.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 354.270.000,00 | 355.965.000,00 | 180.223.000,00 | -174.047.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 360.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2 Jenis | 3 Jenis | 267.500.000,00 | 252.250.000,00 | 52.000.000,00 | -215.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 450.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 29 Unit | 29 Unit | 76.000.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | -76.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 146.500.000,00 | 174.250.000,00 | 52.000.000,00 | -94.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 120.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 381.000.000,00 | 257.900.000,00 | 257.900.000,00 | -123.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 408.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 368.700.000,00 | 245.600.000,00 | 245.600.000,00 | -123.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 400.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 99.100.000,00 | 333.694.262,00 | 249.850.000,00 | 150.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Aparatur | | 80.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadade | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadade | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 17 Unit | 17 Unit | 19.100.000,00 | 19.850.000,00 | 19.850.000,00 | 750.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | 283.844.262,00 | 200.000.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadade | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| 2. | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | | | | 2,25 Persen | 2,25 Persen | 5.320.728.238,00 | 5.451.498.238,00 | 855.322.238,00 | 199.271.762,00 | | | | | | | 5.520.000.000,00 | |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya | | | | 3400 Ton | 3400 Ton | 1.697.800.000,00 | 200.000.000,00 | 500.000.000,00 | -1.197.800.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Kelompok Usaha Bersama (KUB), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 3.800.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | | | | 5 Unit | 2 Unit | 1.587.800.000,00 | 200.000.000,00 | 500.000.000,00 | -1.087.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | | | | 10 Unit | 10 Unit | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapasitasnya | | | | 240 Orang | 240 Orang | 3.575.642.500,00 | 5.226.212.500,00 | 336.272.500,00 | -3.239.370.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Kelompok Usaha Bersama (KUB), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 1.660.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | | | | 180 Orang | 240 Orang | 43.247.500,00 | 42.247.500,00 | 9.472.500,00 | -33.775.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | | | | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 38.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.620.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 200.365.000,00 | 101.165.000,00 | 0,00 | -200.365.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 115.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.02.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | | | | 10 Unit | 10 Unit | 3.293.410.000,00 | 5.082.800.000,00 | 326.800.000,00 | -2.966.610.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| 3. | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | | | | 5,4 Persen | 5,4 Persen | 4.255.348.500,00 | 7.593.352.500,00 | 1.467.810.000,00 | -430.348.500,00 | | | | | | | 3.825.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan | | | | 15 Kelompok | 15 Kelompok | 67.563.500,00 | 22.135.000,00 | 9.472.500,00 | -58.091.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan dan Aparatur | | 165.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | | | | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 9.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.617.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | | | | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 34.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | -34.785.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | | | | 4 Kelompok | 4 Kelompok | 1.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.026.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | 15 Kelompok | 15 Kelompok | 22.135.000,00 | 22.135.000,00 | 9.472.500,00 | -12.662.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar | | | | 50 Kelompok | 50 Kelompok | 4.187.785.000,00 | 7.571.217.500,00 | 1.458.337.500,00 | -2.729.447.500,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan dan Aparatur | | 3.660.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 6 Unit | 4 Unit | 1.547.800.000,00 | 6.042.300.000,00 | 856.400.000,00 | -691.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.617.500,00 | 9.617.500,00 | 0,00 | -9.617.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 25.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 30 Unit | 20 Unit | 2.518.000.000,00 | 1.412.500.000,00 | 497.137.500,00 | -2.020.862.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 500.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 9.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.617.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 15.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| 4. | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | | | | 0,97 Persen | 0,97 Persen | 1.500.025.000,00 | 1.088.035.000,00 | 291.490.000,00 | 109.975.000,00 | | | | | | | 1.610.000.000,00 | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang diterbitkan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 40.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.01.0004 | Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | | | | 20 Rekome ndasi | 20 Rekome ndasi | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan | | | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 390.685.000,00 | 138.235.000,00 | 94.945.000,00 | -295.740.000,00 | | | - | - | Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Keluarga Beresiko Stunting, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 120.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 390.685.000,00 | 138.235.000,00 | 94.945.000,00 | -295.740.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 120.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah jenis bahan baku industri yang tersedia dan disalurkan | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 1.106.640.000,00 | 949.800.000,00 | 196.545.000,00 | -910.095.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), keluarga beresiko stunting, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 1.450.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 295 Ton | 295 Ton | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | | | | 7 Pelaku Usaha | 7 Pelaku Usaha | 1.105.290.000,00 | 949.800.000,00 | 196.545.000,00 | -908.745.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN | | | | | | | 18.800.719.110,00 | 22.120.645.059,00 | 9.540.660.197,00 | -9.260.058.913,00 | | | | | 18.972.100.000,00 | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 18.800.719.110,00 | 22.120.645.059,00 | 9.540.660.197,00 | -9.260.058.913,00 | | | | | | | 18.972.100.000,00 | |
| | 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | 18.800.719.110,00 | 22.120.645.059,00 | 9.540.660.197,00 | -9.260.058.913,00 | | | | | | | 18.972.100.000,00 | |
| 1. | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | | | | 2,25 Persen | 2,25 Persen | 5.320.728.238,00 | 5.451.498.238,00 | 855.322.238,00 | 199.271.762,00 | | | | | | | 5.520.000.000,00 | |
| | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola dan menyelenggarakan kegiatan sesuai fungsinya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 47.285.738,00 | 25.285.738,00 | 19.049.738,00 | -28.236.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | Masyarakat dan Aparatur | | 60.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | 2 Layanan | 2 Layanan | 47.285.738,00 | 25.285.738,00 | 19.049.738,00 | -28.236.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | UPTD BALAI BENIH IKAN | | | | | | | 18.800.719.110,00 | 22.120.645.059,00 | 9.540.660.197,00 | -9.260.058.913,00 | | | | | 18.972.100.000,00 | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 18.800.719.110,00 | 22.120.645.059,00 | 9.540.660.197,00 | -9.260.058.913,00 | | | | | | | 18.972.100.000,00 | |
| | 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | 18.800.719.110,00 | 22.120.645.059,00 | 9.540.660.197,00 | -9.260.058.913,00 | | | | | | | 18.972.100.000,00 | |
| 1. | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | | | | 5,4 Persen | 5,4 Persen | 4.255.348.500,00 | 7.593.352.500,00 | 1.467.810.000,00 | -430.348.500,00 | | | | | | | 3.825.000.000,00 | |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar | | | | 20 Kelompok | 20 Kelompok | 4.187.785.000,00 | 7.571.217.500,00 | 1.458.337.500,00 | -2.729.447.500,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dan Aparatur | | 3.660.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.750.000,00 | 106.800.000,00 | 104.800.000,00 | 2.050.000,00 | Kab. Maros, Santimurung, Minasa Baji Kab. Maros, Tanralili, Kurusumange | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 120.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | | | | 17.357.969.247,00 | 16.328.386.919,00 | 15.205.696.919,00 | -2.152.272.328,00 | | | | | 9.337.500.000,00 | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 13.530.823.247,00 | 13.664.679.919,00 | 12.766.804.575,00 | -764.018.672,00 | | | | | | | 5.337.500.000,00 | |
| | 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | 13.530.823.247,00 | 13.664.679.919,00 | 12.766.804.575,00 | -764.018.672,00 | | | | | | | 5.337.500.000,00 | |
| 1. | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | - | | | | - | - | 1.337.975.000,00 | 1.095.090.000,00 | 896.305.000,00 | -302.975.000,00 | | | | | | | 1.035.000.000,00 | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 626.685.000,00 | 562.590.000,00 | 468.205.000,00 | -158.480.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 720.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | | | | 200 Orang | 200 Orang | 48.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | -48.715.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 185.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 128.805.000,00 | 184.390.000,00 | 150.000.000,00 | 21.195.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | | | | 35 Orang | 35 Orang | 320.130.000,00 | 303.200.000,00 | 243.205.000,00 | -76.925.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 350.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | | | | 50 Orang | 50 Orang | 129.035.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | -54.035.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 65.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 711.290.000,00 | 532.500.000,00 | 428.100.000,00 | -283.190.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 315.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | | | | 3 Organisasi | 3 Organisasi | 691.800.000,00 | 508.100.000,00 | 425.100.000,00 | -266.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 250.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | 50 Orang | 50 Orang | 19.490.000,00 | 24.400.000,00 | 3.000.000,00 | -16.490.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 65.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| 2. | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | - | | | | - | - | 2.661.645.000,00 | 3.466.540.000,00 | 3.310.590.000,00 | -861.645.000,00 | | | | | | | 1.800.000.000,00 | | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 132.845.000,00 | 131.945.000,00 | 115.495.000,00 | -17.350.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 370.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 250.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 132.845.000,00 | 131.945.000,00 | 115.495.000,00 | -17.350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.000.000,00 | 148.200.000,00 | 87.850.000,00 | -62.150.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 550.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 150.000.000,00 | 148.200.000,00 | 87.850.000,00 | -62.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 250.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | | | | 150 Orang | 150 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 90.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | | | | 35 Orang | 35 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 210.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | - | | | | - | - | 2.098.900.000,00 | 2.034.695.000,00 | 2.017.695.000,00 | -81.205.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.098.900.000,00 | 2.034.695.000,00 | 2.017.695.000,00 | -81.205.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | - | | | | - | - | 279.900.000,00 | 1.151.700.000,00 | 1.089.550.000,00 | 809.650.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 520.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 77.425.000,00 | 77.425.000,00 | 77.225.000,00 | -200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 45.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana dan Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 250.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 127.050.000,00 | 62.350.000,00 | 26.600.000,00 | -100.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 80.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 40.000.000,00 | 995.000.000,00 | 970.000.000,00 | 930.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 75.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 35.425.000,00 | 16.925.000,00 | 15.725.000,00 | -19.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 70.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3. | 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | - | | | | - | - | 581.750.000,00 | 585.650.000,00 | 426.125.000,00 | -22.750.000,00 | | | | | | | 559.000.000,00 | |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | | | | - | - | 581.750.000,00 | 585.650.000,00 | 426.125.000,00 | -155.625.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 559.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 24.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | | | | 50 Organisasi | 50 Organisasi | 569.750.000,00 | 573.650.000,00 | 414.125.000,00 | -155.625.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | | | | 30 Orang | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Simbang, Simbang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | 10 Organisasi | 10 Organisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 185.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| 4. | 3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 8.949.453.247,00 | 8.517.399.919,00 | 8.133.784.575,00 | -7.005.953.247,00 | | | | | | | 1.943.500.000,00 | | |
| | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.075.000,00 | 16.075.000,00 | 16.075.000,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 25.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.825.000,00 | 2.825.000,00 | 2.825.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.561.750.547,00 | 7.610.513.919,00 | 7.366.778.919,00 | -194.971.628,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 194.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 92 Orang/b ulan | 92 Orang/b ulan | 7.382.480.547,00 | 7.415.683.919,00 | 7.175.298.919,00 | -207.181.628,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 174.510.000,00 | 190.070.000,00 | 186.720.000,00 | 12.210.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 185.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 693.427.700,00 | 387.080.000,00 | 283.598.000,00 | -409.829.700,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 810.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22.179.700,00 | 13.435.000,00 | 3.150.000,00 | -19.029.700,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 136.162.000,00 | 87.622.000,00 | 36.518.000,00 | -99.644.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 115.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 23.000.000,00 | 14.750.000,00 | 14.750.000,00 | -8.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.000.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | -47.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 380.086.000,00 | 174.773.000,00 | 132.680.000,00 | -247.406.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 540.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |
| | 3.26.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 72.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -72.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.26.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 72.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -72.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 498.200.000,00 | 445.550.000,00 | 451.070.000,00 | -47.130.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 638.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 14.500.000,00 | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | -2.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 18.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 483.700.000,00 | 433.250.000,00 | 438.770.000,00 | -44.930.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 620.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 108.000.000,00 | 48.181.000,00 | 16.262.656,00 | -91.737.344,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 155.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 45 Unit | 45 Unit | 88.000.000,00 | 36.646.000,00 | 6.250.000,00 | -81.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 85.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 11.535.000,00 | 10.012.656,00 | -9.987.344,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 3.827.146.000,00 | 2.663.707.000,00 | 2.438.892.344,00 | -1.388.253.656,00 | | | | | | | 4.000.000.000,00 | |
| | 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | 3.827.146.000,00 | 2.663.707.000,00 | 2.438.892.344,00 | -1.388.253.656,00 | | | | | | | 4.000.000.000,00 | |
| 1. | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | - | | | | - | - | 1.569.810.000,00 | 986.950.000,00 | 1.545.347.344,00 | 845.190.000,00 | | | | | | | 2.415.000.000,00 | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 422.825.000,00 | 180.000.000,00 | 150.000.000,00 | -272.825.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 315.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.01.0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 272.825.000,00 | 180.000.000,00 | 150.000.000,00 | -122.825.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 215.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.01.0009 | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.146.985.000,00 | 806.950.000,00 | 1.395.347.344,00 | 248.362.344,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)</i> | | | | 3 Lokasi | 3 Lokasi | 119.635.000,00 | 115.850.000,00 | 156.547.344,00 | 36.912.344,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i> | | | | 3 Unit | 3 Unit | 1.027.350.000,00 | 691.100.000,00 | 1.238.800.000,00 | 211.450.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 1.350.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.02.2.03.0009 | Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| 2. | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | - | | | | - | - | 984.651.000,00 | 880.237.000,00 | 291.900.000,00 | -109.651.000,00 | | | | | | | 875.000.000,00 | | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 984.651.000,00 | 880.237.000,00 | 291.900.000,00 | -692.751.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 875.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i> | | | | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 28.500.000,00 | 712.237.000,00 | 126.900.000,00 | 98.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 840.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i> | | | | 7 Promosi | 7 Promosi | 956.151.000,00 | 168.000.000,00 | 165.000.000,00 | -791.151.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 35.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| 3. | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | - | | | | - | - | 734.495.000,00 | 496.520.000,00 | 301.645.000,00 | -354.495.000,00 | | | | | | | 380.000.000,00 | | |
| | 3.26.04.2.01 | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.04.2.01.0001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | - | | | | - | - | 704.495.000,00 | 466.520.000,00 | 271.645.000,00 | -432.850.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 330.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.04.2.02.0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 704.495.000,00 | 466.520.000,00 | 271.645.000,00 | -432.850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 250.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.04.2.02.0014 | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual</i> | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 80.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| 4. | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | - | | | | - | - | 538.190.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | -208.190.000,00 | | | | | | | 330.000.000,00 | | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | | | | - | - | 386.190.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | -86.190.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 165.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i> | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 316.190.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | -16.190.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 125.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i> | | | | 30 Orang | 30 Orang | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | - | | | | - | - | 152.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -152.000.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 165.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | 120 Orang | 120 Orang | 64.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -64.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 130.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.02.0002 | Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 87.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -87.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 35.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | | | | | | | | 27.800.129.400,00 | 23.617.460.717,00 | 23.999.854.647,00 | -3.800.274.753,00 | | | | | 28.780.890.500,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 787.282.400,00 | 378.017.900,00 | 323.190.300,00 | -464.092.100,00 | | | | | | | 582.070.000,00 | |
| | 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | 787.282.400,00 | 378.017.900,00 | 323.190.300,00 | -464.092.100,00 | | | | | | | 582.070.000,00 | |
| 1. | 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | - | | | | - | - | 2.391.300,00 | 2.391.300,00 | 2.391.300,00 | 55.608.700,00 | | | | | | | 58.000.000,00 | |
| | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.391.300,00 | 2.391.300,00 | 2.391.300,00 | 0,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 58.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | | | | 1 Unit | 1 Unit | 2.391.300,00 | 2.391.300,00 | 2.391.300,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 6.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.02.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.02.2.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | | | | 1 unit | 1 unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 52.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 2. | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 224.363.900,00 | 255.484.400,00 | 212.330.800,00 | 88.767.100,00 | | | | | | | 313.131.000,00 | |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | | | | - | - | 117.327.400,00 | 95.410.400,00 | 72.878.400,00 | -44.449.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 156.131.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.827.400,00 | 22.107.400,00 | 9.497.400,00 | -14.330.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0006 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 6.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.837.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 1.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 1 Keluarga | 1 Keluarga | 15.367.000,00 | 13.217.000,00 | 7.021.000,00 | -8.346.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | 2 laporan | 2 laporan | 8.754.000,00 | 6.174.000,00 | 6.174.000,00 | -2.580.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota</i> | | | | 2 Laporan Laporan | 2 Laporan Laporan | 50.090.000,00 | 47.510.000,00 | 44.082.000,00 | -6.008.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 52.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i> | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 12.452.000,00 | 6.402.000,00 | 6.104.000,00 | -6.348.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.631.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 11.209.000,00 | 70.726.500,00 | 69.026.500,00 | 57.817.500,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 53.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Rencana Kebutuhan Pangan Lokal</i> | | | | 1 Dokumen Dokumen | 1 Dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 21.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i> | | | | 45 Ton | 0,386 Ton | 11.209.000,00 | 70.726.500,00 | 69.026.500,00 | 57.817.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 32.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.03 | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 24.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 24.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | - | | | | - | - | 95.827.500,00 | 89.347.500,00 | 70.425.900,00 | -25.401.600,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 80.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.417.200,00 | 24.127.200,00 | 13.596.900,00 | -11.820.300,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 54.242.400,00 | 51.432.400,00 | 48.163.600,00 | -6.078.800,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.167.900,00 | 13.787.900,00 | 8.665.400,00 | -7.502.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| 3. | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | - | | | | - | - | 539.264.000,00 | 103.139.000,00 | 91.726.000,00 | -363.325.000,00 | | | | | | | 175.939.000,00 | | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | - | | | | - | - | 18.766.000,00 | 13.466.000,00 | 9.656.000,00 | -9.110.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.766.000,00 | 13.466.000,00 | 9.656.000,00 | -9.110.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 520.498.000,00 | 89.673.000,00 | 82.070.000,00 | -438.428.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 160.939.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 337.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | -337.990.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.655.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.655.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.04.2.02.0004 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i> | | | | 1 Laporan Dokumen | 1 Laporan Dokumen | 166.853.000,00 | 89.673.000,00 | 82.070.000,00 | -84.783.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 95.284.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| 4. | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | - | | | | - | - | 21.263.200,00 | 17.003.200,00 | 16.742.200,00 | 13.736.800,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 21.263.200,00 | 17.003.200,00 | 16.742.200,00 | -4.521.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.263.200,00 | 17.003.200,00 | 16.742.200,00 | -4.521.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 27.012.847.000,00 | 23.239.442.817,00 | 23.676.664.347,00 | -3.336.182.653,00 | | | | | | | 28.198.820.500,00 | | |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | 27.012.847.000,00 | 23.239.442.817,00 | 23.676.664.347,00 | -3.336.182.653,00 | | | | | | | 28.198.820.500,00 | | |
| 1. | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 22.653.999.500,00 | 21.192.717.117,00 | 20.434.666.517,00 | 695.138.000,00 | | | | | | | 23.349.137.500,00 | | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 27.146.500,00 | 27.156.700,00 | 24.805.300,00 | -2.341.200,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 31.800.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.530.100,00 | -469.900,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.025.000,00 | 1.229.000,00 | 929.000,00 | -96.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.229.000,00 | 1.035.200,00 | 565.200,00 | -663.800,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 999.000,00 | 999.000,00 | 759.000,00 | -240.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.672.000,00 | 9.672.000,00 | 9.672.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 1.646.500,00 | 1.646.500,00 | 775.000,00 | -871.500,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai Kab. Maros, Maros Baru, Baju Bodoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 1 Data | 1 Data | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 800.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.633.659.500,00 | 20.141.953.717,00 | 19.660.423.717,00 | -973.235.783,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 21.642.329.500,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 208 Orang/bulan | 208 Orang/bulan | 20.414.329.500,00 | 19.939.633.717,00 | 19.459.633.717,00 | -954.695.783,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJUKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 21.414.329.500,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 216.330.000,00 | 199.320.000,00 | 199.320.000,00 | -17.010.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 225.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 460.000,00 | -540.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 460.000,00 | -540.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 550.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 460.000,00 | -540.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 460.000,00 | -540.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 85.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 85.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 557.993.500,00 | 415.256.700,00 | 218.967.500,00 | -339.026.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 508.008.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 900.000,00 | -600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 11.324.000,00 | 11.324.000,00 | 11.324.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 35.966.500,00 | 34.474.000,00 | 23.235.000,00 | -12.731.500,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 19.345.000,00 | 21.169.700,00 | 12.724.500,00 | -6.620.500,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 0 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.000.000,00 | 33.400.000,00 | 19.215.000,00 | -15.785.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 433.758.000,00 | 297.289.000,00 | 140.469.000,00 | -293.289.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 423.008.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 449.850.000,00 | 161.500.000,00 | 107.200.000,00 | -342.650.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 350.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 249.850.000,00 | 55.000.000,00 | 28.050.000,00 | -221.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | 106.500.000,00 | 79.150.000,00 | -120.850.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 779.850.000,00 | 310.350.000,00 | 302.310.000,00 | -477.540.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 639.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 765.850.000,00 | 301.350.000,00 | 293.310.000,00 | -472.540.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 625.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 189.500.000,00 | 120.500.000,00 | 120.500.000,00 | -69.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 92.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 4 Unit | 4 Unit | 75.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | -35.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 29.500.000,00 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | -14.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 85.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 2. | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - | | | | - | - | 805.016.500,00 | 630.189.800,00 | 672.496.800,00 | -249.916.500,00 | | | | | | | 555.100.000,00 | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | - | | | | - | - | 88.076.000,00 | 101.179.300,00 | 70.243.300,00 | -17.832.700,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 105.100.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 34.966.000,00 | 23.028.000,00 | 10.496.000,00 | -24.470.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.910.000,00 | 24.241.300,00 | 11.977.300,00 | -12.932.700,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0006 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.700.000,00 | 41.970.000,00 | 41.970.000,00 | 28.270.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mallawa, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.02.2.01.0007 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura</i> | | | | 0 Laporan | 1 Laporan | 7.250.000,00 | 5.970.000,00 | 2.900.000,00 | -4.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.02.2.01.0014 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.250.000,00 | 5.970.000,00 | 2.900.000,00 | -4.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 5.100.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 227.272.000,00 | 192.932.000,00 | 183.580.000,00 | -43.692.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 227.272.000,00 | 192.932.000,00 | 183.580.000,00 | -43.692.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 159.100.500,00 | 157.317.500,00 | 152.420.500,00 | -6.680.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.02.2.05.0008 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah benih/bibit ternak yang beredar</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 159.100.500,00 | 157.317.500,00 | 152.420.500,00 | -6.680.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | - | | | | - | - | 330.568.000,00 | 178.761.000,00 | 266.253.000,00 | -64.315.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.02.2.06.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i> | | | | 10 Ton | 10 Ton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i> | | | | 704 Ekor | 704 Ekor | 330.568.000,00 | 178.761.000,00 | 266.253.000,00 | -64.315.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| 3. | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | - | | | | - | - | 1.017.318.500,00 | 475.791.500,00 | 1.033.896.230,00 | 602.681.500,00 | | | | | | | 1.620.000.000,00 | | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | - | | | | - | - | 186.968.500,00 | 285.791.500,00 | 275.374.500,00 | 88.406.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 36.968.500,00 | 25.791.500,00 | 15.374.500,00 | -21.594.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.03.2.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 110.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | - | | | | - | - | 830.350.000,00 | 190.000.000,00 | 758.521.730,00 | -71.828.270,00 | | | - | - | - | | 1.420.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i> | | | | 1 Unit | 2 Unit | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i> | | | | 1 Unit | 5 Unit | 0,00 | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i> | | | | - | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 568.521.730,00 | 568.521.730,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 550.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i> | | | | 3 Unit | 6 Unit | 630.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -630.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 120.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| 4. | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | - | | | | - | - | 1.043.196.800,00 | 252.777.000,00 | 238.208.000,00 | 155.372.200,00 | | | | | | | 1.198.569.000,00 | | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 425.789.800,00 | 56.880.000,00 | 47.478.000,00 | -378.311.800,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 533.669.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 90.355.000,00 | 56.880.000,00 | 47.478.000,00 | -42.877.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 86.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 10.750.000,00 | 8.350.000,00 | 7.300.000,00 | -3.450.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i> | | | | 1 laporan | 1 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.02.0005 | Pengawasan Peredaran Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.750.000,00 | 8.350.000,00 | 7.300.000,00 | -3.450.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baju Bodoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.02.0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya</i> | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 132.000.000,00 | 152.390.000,00 | 150.690.000,00 | 18.690.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 25.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i> | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 120.000.000,00 | 146.390.000,00 | 144.690.000,00 | 24.690.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 18.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | - | | | | - | - | 468.647.000,00 | 29.147.000,00 | 27.130.000,00 | -441.517.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 533.900.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.04.0007 | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | | | | 10 Orang | 10 Orang | 241.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | -241.565.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.04.0009 | Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan | | | | 1 Produk | 1 Produk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik | | | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 29.495.000,00 | 29.147.000,00 | 27.130.000,00 | -2.365.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | - | | | | - | - | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 5.610.000,00 | -400.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 6.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.05.0003 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 5.610.000,00 | -400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 6.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| 5. | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | - | | | | - | - | 837.162.200,00 | 518.535.700,00 | 467.858.400,00 | -139.292.200,00 | | | | | | | 697.870.000,00 | | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 837.162.200,00 | 518.535.700,00 | 467.858.400,00 | -369.303.800,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 697.870.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | | 100 Ha | 100 Ha | 457.498.600,00 | 297.197.600,00 | 285.512.600,00 | -171.986.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 310.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | | | | 100 Ha | 100 Ha | 237.368.000,00 | 95.388.500,00 | 76.222.200,00 | -161.145.800,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 172.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.05.2.01.0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | 50 Ha | 50 Ha | 124.865.600,00 | 118.302.600,00 | 102.114.600,00 | -22.751.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 153.870.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.05.2.01.0004 | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | | | | 1 laporan | 1 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.05.2.01.0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 17.430.000,00 | 7.647.000,00 | 4.009.000,00 | -13.421.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 32.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| 6. | 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | - | | | | - | - | 8.628.000,00 | 8.311.500,00 | 2.705.500,00 | 112.956.000,00 | | | | | | | 121.584.000,00 | | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 25.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.06.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | - | | | | - | - | 8.628.000,00 | 8.311.500,00 | 2.705.500,00 | -5.922.500,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 96.584.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.06.2.02.0001 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.628.000,00 | 8.311.500,00 | 2.705.500,00 | -5.922.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 11.584.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.06.2.02.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 85.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 7. | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | - | | | | - | - | 647.525.500,00 | 161.120.200,00 | 826.832.900,00 | 9.034.500,00 | | | | | | | 656.560.000,00 | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | | | | - | - | 647.525.500,00 | 161.120.200,00 | 826.832.900,00 | 179.307.400,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 656.560.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 14 Unit | 14 Unit | 210.290.000,00 | 35.377.000,00 | 33.642.500,00 | -176.647.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 210.290.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 14 Unit | 14 Unit | 133.919.500,00 | 109.432.200,00 | 66.853.400,00 | -67.066.100,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 127.270.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | 14 Unit | 14 Unit | 57.225.000,00 | 1.700.000,00 | 850.000,00 | -56.375.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | | | | 14 Unit | 14 Unit | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | | | | 120 Orang | 123 Orang | 16.091.000,00 | 14.611.000,00 | 725.487.000,00 | 709.396.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P PERTANIAN-PERTANIAN DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 9.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | | UPTD PUSKESWAN | | | | | | | 27.800.129.400,00 | 23.617.460.717,00 | 23.999.854.647,00 | -3.800.274.753,00 | | | | | | 28.780.890.500,00 | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 27.012.847.000,00 | 23.239.442.817,00 | 23.676.664.347,00 | -3.336.182.653,00 | | | | | | | 28.198.820.500,00 | |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | 27.012.847.000,00 | 23.239.442.817,00 | 23.676.664.347,00 | -3.336.182.653,00 | | | | | | | 28.198.820.500,00 | |
| 1. | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | - | | | | - | - | 1.043.196.800,00 | 252.777.000,00 | 238.208.000,00 | 155.372.200,00 | | | | | | | 1.198.569.000,00 | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 425.789.800,00 | 56.880.000,00 | 47.478.000,00 | -378.311.800,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 533.669.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kader zoonosis | | | | 0 Orang | 0 Orang | 40.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.728.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 45.850.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | | | | 14 Wilayah | 14 Wilayah | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 17.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.400.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 274.306.800,00 | 0,00 | 0,00 | -274.306.800,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 381.419.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | - | | | | - | - | 468.647.000,00 | 29.147.000,00 | 27.130.000,00 | -441.517.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 533.900.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.04.0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.900.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.04.0006 | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | 3.27.04.2.04.0007 | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | | | | 0 Orang | 0 Orang | 197.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | -197.587.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 43.320.900.186,00 | 45.591.005.938,00 | 44.481.102.938,00 | 1.160.202.752,00 | | | | | 45.744.805.100,00 | | | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 43.320.900.186,00 | 45.591.005.938,00 | 44.481.102.938,00 | 1.160.202.752,00 | | | | | | | 45.744.805.100,00 | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 43.320.900.186,00 | 45.591.005.938,00 | 44.481.102.938,00 | 1.160.202.752,00 | | | | | | | 45.744.805.100,00 | | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 35.858.529.186,00 | 40.533.504.938,00 | 40.005.127.938,00 | 4.138.225.914,00 | | | | | | | 39.996.755.100,00 | | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 23.100.000,00 | 15.375.000,00 | 15.375.000,00 | -7.725.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 26.780.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | 3.875.000,00 | 3.875.000,00 | -2.125.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.260.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.300.000,00 | 3.875.000,00 | 3.875.000,00 | -2.425.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.300.000,00 | 3.875.000,00 | 3.875.000,00 | -2.425.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.050.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | -375.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.235.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | -375.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.235.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.207.748.462,00 | 19.985.167.938,00 | 19.985.167.938,00 | 3.777.419.476,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 17.861.800.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 192 Orang/ bulan | 192 Orang/ bulan | 15.674.088.462,00 | 19.442.247.938,00 | 19.442.247.938,00 | 3.768.159.476,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 17.271.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 511.560.000,00 | 535.320.000,00 | 535.320.000,00 | 23.760.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 580.800.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | -1.325.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i> | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 17.100.000,00 | 3.925.000,00 | 3.925.000,00 | -13.175.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 385.950.000,00 | 388.480.000,00 | 388.480.000,00 | 2.530.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 550.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 340 Paket | 340 Paket | 385.950.000,00 | 388.480.000,00 | 388.480.000,00 | 2.530.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 550.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.413.863.400,00 | 4.264.020.400,00 | 3.383.323.400,00 | -1.030.540.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 5.518.015.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Paket | 12 Paket | 417.294.400,00 | 417.685.400,00 | 399.190.400,00 | -18.104.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 518.015.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.790.000.000,00 | 1.834.000.000,00 | 1.834.000.000,00 | 44.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.206.569.000,00 | 2.012.335.000,00 | 1.150.133.000,00 | -1.056.436.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 781.440.000,00 | 982.840.000,00 | 1.434.500.000,00 | 653.060.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 910.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 35 Unit | 35 Unit | 41.800.000,00 | 154.000.000,00 | 256.000.000,00 | 214.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 350.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 19 Unit | 19 Unit | 739.640.000,00 | 828.840.000,00 | 1.178.500.000,00 | 438.860.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 560.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 2.953.490.000,00 | 2.593.300.000,00 | 2.603.300.000,00 | -350.190.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 3.313.700.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 142.200.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 20.000.000,00 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 181.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.867.490.000,00 | 2.487.300.000,00 | 2.487.300.000,00 | -380.190.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.990.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.721.400.000,00 | 3.119.900.000,00 | 3.059.285.000,00 | 1.337.885.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.658.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 1.006.500.000,00 | 930.000.000,00 | 1.034.285.000,00 | 27.785.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 845.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 8 Unit | 8 Unit | 714.900.000,00 | 2.189.900.000,00 | 2.025.000.000,00 | 1.310.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 813.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | | | | - | - | 1.420.491.324,00 | 1.447.821.600,00 | 1.447.821.600,00 | 27.330.276,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.712.100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 168.541.324,00 | 162.871.600,00 | 162.871.600,00 | -5.669.724,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 193.600.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 399.950.000,00 | 434.950.000,00 | 434.950.000,00 | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 544.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang | 2 Orang | 252.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 314.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 660.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | - | | | | - | - | 1.860.000.000,00 | 1.620.000.000,00 | 1.620.000.000,00 | -240.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.082.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 990.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 720.000.000,00 | 720.000.000,00 | 720.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 792.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 523.446.000,00 | 381.500.000,00 | 332.775.000,00 | -190.671.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 733.860.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 129.500.000,00 | 79.500.000,00 | 50.875.000,00 | -78.625.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 207.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 33.500.000,00 | 27.200.000,00 | 13.200.000,00 | -20.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 80.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 104.100.000,00 | 45.100.000,00 | 24.600.000,00 | -79.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 350.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 71.800.000,00 | 87.000.000,00 | 127.600.000,00 | 55.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 56.860.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 184.546.000,00 | 142.700.000,00 | 116.500.000,00 | -68.046.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - | | | | - | - | 5.567.600.000,00 | 5.735.100.000,00 | 5.735.100.000,00 | 167.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 5.630.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.646.200.000,00 | 1.641.200.000,00 | 1.622.100.000,00 | -24.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.913.900.000,00 | 4.086.400.000,00 | 4.105.500.000,00 | 191.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | - | | | | - | - | 4.209.859.000,00 | 3.805.009.000,00 | 3.308.388.000,00 | -1.577.809.000,00 | | | | | | | 2.632.050.000,00 | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | - | | | | - | - | 762.969.000,00 | 742.734.000,00 | 693.878.000,00 | -69.091.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 765.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | 46 Dokumen | 46 Dokumen | 66.635.000,00 | 51.150.000,00 | 31.150.000,00 | -35.485.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 85.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 273.200.000,00 | 268.450.000,00 | 258.450.000,00 | -14.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 290.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 423.134.000,00 | 423.134.000,00 | 404.278.000,00 | -18.856.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 390.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - | | | | - | - | 2.949.750.000,00 | 2.580.135.000,00 | 2.156.650.000,00 | -793.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.430.100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 1.856.800.000,00 | 1.519.400.000,00 | 1.169.750.000,00 | -687.050.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.088.950.000,00 | 1.006.035.000,00 | 948.600.000,00 | -140.350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.094.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 54.700.000,00 | 38.300.000,00 | 34.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 36.100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - | | | | - | - | 497.140.000,00 | 482.140.000,00 | 457.860.000,00 | -39.280.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 436.950.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | | 1600 Dokumen | 1600 Dokumen | 60.960.000,00 | 60.240.000,00 | 56.470.000,00 | -4.490.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 80.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | 10 Kasus | 10 Kasus | 408.980.000,00 | 395.320.000,00 | 379.590.000,00 | -29.390.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 320.650.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | | 1600 Dokumen | 1600 Dokumen | 27.200.000,00 | 26.580.000,00 | 21.800.000,00 | -5.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 36.300.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 3. | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | - | | | | - | - | 3.252.512.000,00 | 1.252.492.000,00 | 1.167.587.000,00 | -136.512.000,00 | | | | | | | 3.116.000.000,00 | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - | | | | - | - | 257.200.000,00 | 296.080.000,00 | 279.580.000,00 | 22.380.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 372.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 4.500.000,00 | -7.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 22.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 212.300.000,00 | 212.300.000,00 | 203.300.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 280.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 32.900.000,00 | 71.780.000,00 | 71.780.000,00 | 38.880.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEBKAU (CHT) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - | | | | - | - | 371.850.000,00 | 382.050.000,00 | 344.895.000,00 | -26.955.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 302.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.800.000,00 | 60.200.000,00 | 58.075.000,00 | -2.725.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 181.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 171.400.000,00 | 272.400.000,00 | 267.370.000,00 | 95.970.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 139.650.000,00 | 49.450.000,00 | 19.450.000,00 | -120.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | | | | - | - | 2.623.462.000,00 | 574.362.000,00 | 543.112.000,00 | -2.080.350.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.441.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 700 Dokumen | 700 Dokumen | 2.303.000.000,00 | 301.000.000,00 | 278.500.000,00 | -2.024.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 192.532.000,00 | 194.782.000,00 | 188.532.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 99.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 5 Orang | 5 Orang | 127.930.000,00 | 78.580.000,00 | 76.080.000,00 | -51.850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 242.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | 43.043.640.789,00 | 44.412.213.187,00 | 41.536.393.687,00 | -1.507.247.102,00 | | | | | | 44.150.200.000,00 | | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 43.043.640.789,00 | 44.412.213.187,00 | 41.536.393.687,00 | -1.507.247.102,00 | | | | | | | 44.150.200.000,00 | |
| | 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | 43.043.640.789,00 | 44.412.213.187,00 | 41.536.393.687,00 | -1.507.247.102,00 | | | | | | | 44.150.200.000,00 | |
| 1. | 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | - | - | | 31.100.554.789,00 | 32.526.242.187,00 | 33.226.923.187,00 | -903.054.789,00 | | | | | | | 30.197.500.000,00 | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | - | - | | 48.000.000,00 | 45.600.000,00 | 23.100.000,00 | -24.900.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 27.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.250.000,00 | -3.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.875.000,00 | -3.125.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.250.000,00 | -3.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 12.600.000,00 | 10.725.000,00 | -4.275.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | - | - | | 5.045.176.883,00 | 5.376.278.187,00 | 5.376.278.187,00 | 331.101.304,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 4.175.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 59 Orang/b ulan | 61 Orang/b ulan | 4.836.936.883,00 | 5.172.038.187,00 | 5.172.038.187,00 | 335.101.304,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 180.240.000,00 | 180.240.000,00 | 180.240.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 157.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 38.500.000,00 | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 2.900.000,00 | | | - | - | - | | 75.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 38.500.000,00 | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 2.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 75.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.096.444.000,00 | 1.966.259.000,00 | 1.252.563.000,00 | -843.881.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.615.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.125.000,00 | 18.125.000,00 | 18.125.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 267.170.000,00 | 262.045.000,00 | 212.045.000,00 | -55.125.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 435.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 463.020.000,00 | 463.031.000,00 | 294.814.500,00 | -168.205.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroda | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 172.100.000,00 | 137.645.000,00 | 88.825.500,00 | -83.274.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 47.500.000,00 | 12.500.000,00 | 6.250.000,00 | -41.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 32.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 92.500.000,00 | 92.500.000,00 | 60.000.000,00 | -32.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 500.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 381.700.000,00 | 381.700.000,00 | 347.500.000,00 | -34.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 350.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 654.329.000,00 | 598.713.000,00 | 225.003.000,00 | -429.326.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 700.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 2.213.200.000,00 | 900.000.000,00 | 1.741.777.000,00 | -471.423.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 805.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.988.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.988.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 861.777.000,00 | 786.777.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 150.000.000,00 | 825.000.000,00 | 880.000.000,00 | 730.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 787.400.000,00 | 821.600.000,00 | 779.200.000,00 | -8.200.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 979.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2500 Laporan | 2500 Laporan | 43.300.000,00 | 43.300.000,00 | 43.300.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 37.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 42.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 702.100.000,00 | 736.300.000,00 | 693.900.000,00 | -8.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 900.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 744.663.600,00 | 1.063.670.000,00 | 1.683.670.000,00 | 939.006.400,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.120.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 4 Unit | 4 Unit | 299.270.000,00 | 229.270.000,00 | 229.270.000,00 | -70.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 4 Unit | 4 Unit | 113.393.600,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | -48.393.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 160.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i> | | | | 2 Unit | 2 Unit | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 20 Unit | 20 Unit | 167.000.000,00 | 139.400.000,00 | 139.400.000,00 | -27.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 135.000.000,00 | 610.000.000,00 | 1.225.000.000,00 | 1.090.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroad | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | - | | | | - | - | 18.261.920.306,00 | 20.446.185.000,00 | 20.463.685.000,00 | 2.201.764.694,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 18.510.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i> | | | | 35 Orang/B ulan | 35 Orang/B ulan | 17.668.170.306,00 | 19.966.685.000,00 | 19.966.685.000,00 | 2.298.514.694,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 18.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 393.750.000,00 | 339.500.000,00 | 357.000.000,00 | -36.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i> | | | | 35 Orang | 35 Orang | 200.000.000,00 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | -60.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | - | | | | - | - | 1.865.250.000,00 | 1.865.250.000,00 | 1.865.250.000,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.891.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 61.250.000,00 | 61.250.000,00 | 61.250.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 87.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 3 Paket | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.800.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | - | | | | - | - | 11.943.086.000,00 | 11.885.971.000,00 | 8.309.470.500,00 | 2.009.614.000,00 | | | | | | | 13.952.700.000,00 | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | - | | | | - | - | 196.150.000,00 | 196.150.000,00 | 133.150.000,00 | -63.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 265.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.750.000,00 | 7.750.000,00 | 7.750.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 65.600.000,00 | 65.600.000,00 | 65.600.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 8.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 1.800.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | - | | | | - | - | 148.050.000,00 | 158.050.000,00 | 158.050.000,00 | 10.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 165.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.200.000,00 | 33.450.000,00 | 33.450.000,00 | 3.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 36.200.000,00 | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroad | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 29.450.000,00 | 38.200.000,00 | 38.200.000,00 | 8.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 28.200.000,00 | 28.200.000,00 | 28.200.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | - | | | | - | - | 78.800.000,00 | 78.800.000,00 | 66.800.000,00 | -12.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 90.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | - | | | | - | - | 1.685.315.000,00 | 1.929.490.000,00 | 2.734.276.000,00 | 1.048.961.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.401.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | | | | 35 Dokumen | 35 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroda | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.466.940.000,00 | 1.689.340.000,00 | 2.502.676.000,00 | 1.035.736.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 3 Orang | 3 Orang | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | 7 Orang | 7 Orang | 109.200.000,00 | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | -15.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 109.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.550.000,00 | 6.550.000,00 | 3.000.000,00 | -3.550.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 157.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.625.000,00 | 50.000.000,00 | 45.000.000,00 | 32.375.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | | | | - | - | 2.627.500.000,00 | 2.086.250.000,00 | 1.603.850.000,00 | -1.023.650.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.544.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 42.500.000,00 | 42.500.000,00 | 30.600.000,00 | -11.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | | | | 35 Dokumen | 35 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | 35 Dokumen | 35 Dokumen | 2.581.000.000,00 | 2.039.750.000,00 | 1.571.750.000,00 | -1.009.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | - | | | | - | - | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 9.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | - | | | | - | - | 461.000.000,00 | 717.120.000,00 | 726.620.000,00 | 265.620.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 436.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 1.500.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 455.500.000,00 | 711.620.000,00 | 725.120.000,00 | 269.620.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 430.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | - | | | | - | - | 6.738.871.000,00 | 6.712.711.000,00 | 2.879.324.500,00 | -3.859.546.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 8.042.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.964.331.000,00 | 5.964.331.000,00 | 2.549.698.000,00 | -3.414.633.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 602.540.000,00 | 576.380.000,00 | 229.554.000,00 | -372.986.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 700.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | 4.02.02.2.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 88.072.500,00 | -71.927.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 320.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | | | | 12.014.916.170,00 | 8.173.302.940,00 | 7.132.951.090,00 | -4.881.965.080,00 | | | | | | 9.865.152.000,00 | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 12.014.916.170,00 | 8.173.302.940,00 | 7.132.951.090,00 | -4.881.965.080,00 | | | | | | | 9.865.152.000,00 | | |
| | 5.01 | PERENCANAAN | | | | | | | 10.981.539.170,00 | 7.657.536.940,00 | 6.838.711.090,00 | -4.142.828.080,00 | | | | | | | 9.148.152.000,00 | | |
| 1. | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 0 % % | 8.536.131.670,00 | 5.998.045.740,00 | 5.581.682.740,00 | -2.013.931.670,00 | | | | | | | 6.522.200.000,00 | | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | - | 7 Dokumen | 19.000.000,00 | 2.380.000,00 | 6.265.000,00 | -12.735.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN Bapperida | | 12.600.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.300.000,00 | 1.550.000,00 | 2.475.000,00 | -3.825.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.100.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | -3.110.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.300.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | -3.470.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.300.000,00 | 0,00 | 1.970.000,00 | -2.330.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.100.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Target Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 6.490.977.370,00 | 5.216.210.340,00 | 4.995.210.340,00 | -1.495.767.030,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN Bapperida | | 5.129.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 75 Orang/bulan | 75 Orang/bulan | 6.306.074.570,00 | 5.071.299.940,00 | 4.850.299.940,00 | -1.455.774.630,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 167.420.000,00 | 140.400.000,00 | 140.400.000,00 | -27.020.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.700.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 14.782.800,00 | 4.510.400,00 | 4.510.400,00 | -10.272.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Target Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | - | 100 % | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN Bapperida | | 400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Target Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | | | | - | 100 % | 38.250.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | -38.250.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 45 Paket | 45 Paket | 38.250.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | -38.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 % | 579.774.300,00 | 427.705.400,00 | 296.947.400,00 | -282.826.900,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN Bapperida | | 545.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 8 Paket | 17.410.000,00 | 13.070.000,00 | 13.070.000,00 | -4.340.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|---|--------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 36.805.500,00 | 31.695.500,00 | 24.835.500,00 | -11.970.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 23.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 145.283.800,00 | 105.300.600,00 | 105.166.600,00 | -40.117.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 160.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 16.525.000,00 | 10.358.300,00 | 10.358.300,00 | -6.166.700,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.175.000,00 | 8.175.000,00 | 13.175.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 294.575.000,00 | 202.106.000,00 | 91.342.000,00 | -203.233.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 273.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | 39.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 % | 322.000.000,00 | 93.000.000,00 | 73.500.000,00 | -248.500.000,00 | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 143.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | |
| | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 200.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 122.000.000,00 | 28.000.000,00 | 73.500.000,00 | -48.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 58.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 % | 869.200.000,00 | 121.950.000,00 | 124.960.000,00 | -744.240.000,00 | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN Bapperida | | 222.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | |
| | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 20.210.000,00 | -2.990.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 22.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 846.000.000,00 | 98.750.000,00 | 104.750.000,00 | -741.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Target Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik | | | | - | 100 % | 216.630.000,00 | 114.500.000,00 | 84.500.000,00 | -132.130.000,00 | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 320.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 33.630.000,00 | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | -18.630.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 23 Unit | 23 Unit | 83.000.000,00 | 49.500.000,00 | 19.500.000,00 | -63.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | 45.000.000,00 | 50.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| 2. | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Target Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan | | | | 100 Persen | 100 % | 1.939.738.050,00 | 1.387.587.750,00 | 1.090.121.750,00 | 167.213.950,00 | | | | | | | 2.106.952.000,00 | | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | | | - | 100 % | 845.447.000,00 | 728.947.000,00 | 601.961.000,00 | -243.486.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Perangkat Daerah, Kelompok Masyarakat | | 801.952.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 69.952.000,00 | 55.122.000,00 | 37.232.000,00 | -32.720.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 69.952.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 36.182.000,00 | 33.177.000,00 | 23.827.000,00 | -12.355.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 36.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 127.182.000,00 | 109.796.000,00 | 88.339.000,00 | -38.843.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 99.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | | | | 1550 Usulan | 1550 Usulan | 82.404.000,00 | 39.431.000,00 | 17.191.000,00 | -65.213.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 78.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 529.727.000,00 | 491.421.000,00 | 435.372.000,00 | -94.355.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | | | 518.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | | | - | 100 % | 364.334.300,00 | 248.622.000,00 | 196.111.000,00 | -168.223.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Perangkat Daerah | | 420.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 150.000.000,00 | 144.000.000,00 | 118.694.000,00 | -31.306.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 175.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | | | | 100 Orang | 100 Orang | 150.000.000,00 | 104.622.000,00 | 77.417.000,00 | -72.583.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 175.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | | | | 1 Buku | 1 Buku | 64.334.300,00 | 0,00 | 0,00 | -64.334.300,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Capaian Target Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | - | 100 % | 590.000.000,00 | 316.476.000,00 | 229.134.000,00 | -360.866.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Perangkat Daerah | | 750.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 150.000.000,00 | 126.713.000,00 | 77.661.000,00 | -72.339.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 360.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 440.000.000,00 | 189.763.000,00 | 151.473.000,00 | -288.527.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 390.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Persentase Capaian Target Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | - | 100 % | 139.956.750,00 | 93.542.750,00 | 62.915.750,00 | -77.041.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Perangkat Daerah | | 135.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | 56.493.000,00 | 26.132.000,00 | -43.868.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 69.956.750,00 | 37.049.750,00 | 36.783.750,00 | -33.173.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 65.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 3. | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | | | 100 Persen | 100 Persen | 505.669.450,00 | 271.903.450,00 | 166.906.600,00 | 13.330.550,00 | | | | | | | 519.000.000,00 | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Capaian Target Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | - | 100 % | 196.495.450,00 | 119.838.450,00 | 93.788.200,00 | -102.707.250,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Perangkat Daerah | | 252.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 27.815.250,00 | 23.515.250,00 | 14.600.000,00 | -13.215.250,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 37.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 108.680.200,00 | 96.323.200,00 | 79.188.200,00 | -29.492.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 155.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Capaian Target Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | | | - | 100 % | 110.000.000,00 | 57.093.000,00 | 25.293.400,00 | -84.706.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Perangkat Daerah | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 35.000.000,00 | 30.650.000,00 | 13.736.000,00 | -21.264.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 35.000.000,00 | 26.443.000,00 | 11.557.400,00 | -23.442.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Capaian Target Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | - | 100 % | 199.174.000,00 | 94.972.000,00 | 47.825.000,00 | -151.349.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Perangkat Daerah | | 197.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 84.652.500,00 | 50.706.500,00 | 28.941.000,00 | -55.711.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 84.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 69.521.500,00 | 44.265.500,00 | 18.884.000,00 | -50.637.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 68.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | 1.033.377.000,00 | 515.766.000,00 | 294.240.000,00 | -739.137.000,00 | | | | | | | 717.000.000,00 | |
| 1. | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | | | | - | 70 % | 1.033.377.000,00 | 515.766.000,00 | 294.240.000,00 | -316.377.000,00 | | | | | | | 717.000.000,00 | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase Capain Target Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | - | 70 % | 280.977.000,00 | 185.816.000,00 | 170.610.000,00 | -110.367.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat | | 90.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 95.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.161.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.01.0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 92.611.000,00 | 92.611.000,00 | 85.308.000,00 | -7.303.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.01.0006 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 93.205.000,00 | 93.205.000,00 | 85.302.000,00 | -7.903.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase Capain Target Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | - | 70 % | 177.481.000,00 | 177.481.000,00 | 84.985.000,00 | -92.496.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 172.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 88.588.000,00 | 88.588.000,00 | 84.985.000,00 | -3.603.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 86.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 88.893.000,00 | 88.893.000,00 | 0,00 | -88.893.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 86.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase Capain Target Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | - | 70 % | 544.074.000,00 | 113.124.000,00 | 20.000.000,00 | -524.074.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat | | 430.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 93.124.000,00 | 93.124.000,00 | 0,00 | -93.124.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 89.478.000,00 | 0,00 | 0,00 | -89.478.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 87.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 91.746.000,00 | 0,00 | 0,00 | -91.746.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.03.0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.121.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90.905.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -70.905.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 87.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 88.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | - | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | - | | | | - | - | 30.845.000,00 | 39.345.000,00 | 18.645.000,00 | -12.200.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.845.000,00 | 39.345.000,00 | 18.645.000,00 | -12.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | 227.898.929.851,00 | 252.427.785.821,00 | 253.085.141.875,00 | 25.186.212.024,00 | | | | | 123.936.388.182,00 | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 227.898.929.851,00 | 252.427.785.821,00 | 253.085.141.875,00 | 25.186.212.024,00 | | | | | | | 123.936.388.182,00 | |
| | 5.02 | KEUANGAN | | | | | | | 227.898.929.851,00 | 252.427.785.821,00 | 253.085.141.875,00 | 25.186.212.024,00 | | | | | | | 123.936.388.182,00 | |
| 1. | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 59.557.844.499,00 | 62.494.714.057,00 | 62.630.110.791,00 | 54.804.188.050,00 | | | | | | | 114.362.032.549,00 | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 49.625.000,00 | 47.225.000,00 | 35.376.000,00 | -14.249.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 52.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.635.000,00 | 6.635.000,00 | 6.285.000,00 | -350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.715.000,00 | 4.715.000,00 | 1.551.000,00 | -3.164.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.430.000,00 | 4.430.000,00 | 2.730.000,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.130.000,00 | 4.130.000,00 | 3.180.000,00 | -950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.285.000,00 | 4.285.000,00 | 2.830.000,00 | -1.455.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 3.680.000,00 | -480.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.660.000,00 | 4.660.000,00 | 3.110.000,00 | -1.550.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.400.000,00 | 11.000.000,00 | 9.600.000,00 | -3.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 1 Data | 1 Data | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 2.410.000,00 | -800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 26.671.610.424,00 | 31.283.209.482,00 | 31.658.801.960,00 | 4.987.191.536,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 78.319.321.875,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 62 Orang/bulan | 62 Orang/bulan | 25.486.862.169,00 | 30.206.036.227,00 | 30.699.716.705,00 | 5.212.854.536,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 77.172.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 137.434.810,00 | 109.088.810,00 | 106.588.810,00 | -30.846.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 135.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 872.640.000,00 | 851.280.000,00 | 782.400.000,00 | -90.240.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 810.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 49.266.500,00 | 34.737.500,00 | 17.337.500,00 | -31.929.000,00 | Kab. Maros, Toppobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 41.674.500,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 38.309.500,00 | 26.309.500,00 | 16.300.000,00 | -22.009.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.493.000,00 | 23.388.000,00 | 15.079.000,00 | -17.414.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 45.147.375,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 47.592.445,00 | 25.992.445,00 | 17.434.445,00 | -30.158.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.012.000,00 | 6.377.000,00 | 3.945.500,00 | -3.066.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 51.300.500,00 | 34.455.500,00 | 23.779.500,00 | -27.521.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 46.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.824.000,00 | 6.609.000,00 | 4.357.000,00 | -5.467.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.987.500,00 | 7.047.500,00 | 5.800.500,00 | -4.187.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.255.000,00 | 6.965.000,00 | 3.425.000,00 | -5.830.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.280.000,00 | 6.880.000,00 | 3.935.000,00 | -5.345.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.954.000,00 | 6.954.000,00 | 6.262.000,00 | -6.692.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 57.034.500,00 | 29.655.000,00 | 5.855.000,00 | -51.179.500,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 168.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 80 Paket | 80 Paket | 45.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | -45.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 80.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.034.500,00 | 9.655.000,00 | 5.855.000,00 | -6.179.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i> | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah ASN yang dipindahtugaskan</i> | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 857.156.375,00 | 447.089.375,00 | 225.460.375,00 | -631.696.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.198.210.674,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 10 Paket | 10 Paket | 11.356.125,00 | 11.356.125,00 | 8.956.125,00 | -2.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 33.046.500,00 | 33.046.500,00 | 32.646.500,00 | -400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 35.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 29 Paket | 29 Paket | 99.926.750,00 | 71.136.750,00 | 45.721.750,00 | -54.205.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 135.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 7 Paket | 7 Paket | 21.850.000,00 | 18.850.000,00 | 11.350.000,00 | -10.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | | | | 2500 Laporan | 2500 Laporan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 50.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 160.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 560 Laporan | 560 Laporan | 620.977.000,00 | 252.700.000,00 | 76.786.000,00 | -544.191.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 698.710.674,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Tanralilli, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 496.350.000,00 | 217.450.000,00 | 258.100.000,00 | -238.250.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.370.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 2 Unit | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 500.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | | | | 9 Unit | 9 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 7 Unit | 7 Unit | 81.350.000,00 | 202.450.000,00 | 258.100.000,00 | 176.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 150.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 200.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 170.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 27.759.095.200,00 | 27.077.657.200,00 | 27.049.213.008,00 | -709.882.192,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 29.963.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 480 Laporan | 480 Laporan | 39.500.000,00 | 43.242.000,00 | 34.220.000,00 | -5.280.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 56.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 24.800.000.000,00 | 23.700.000.000,00 | 23.750.577.808,00 | -1.049.422.192,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 26.700.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 2.919.595.200,00 | 3.334.415.200,00 | 3.264.415.200,00 | 344.820.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 3.200.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 3.615.672.500,00 | 3.357.972.500,00 | 3.373.524.948,00 | -242.147.552,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 3.245.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 2.726.333.500,00 | 2.725.183.500,00 | 2.756.171.000,00 | 29.837.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 2.350.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 450 Unit | 450 Unit | 785.839.000,00 | 529.289.000,00 | 568.253.948,00 | -217.585.052,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 670.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 31 Unit | 31 Unit | 53.500.000,00 | 53.500.000,00 | 49.100.000,00 | -4.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 150.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 2. | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | - | | | | - | - | 160.743.505.352,00 | 174.262.876.450,00 | 174.003.841.950,00 | -157.969.849.719,00 | | | | | | | 2.773.655.633,00 | | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | | | | - | - | 856.783.500,00 | 700.361.500,00 | 521.146.500,00 | -335.637.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 830.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.560.000,00 | 16.534.000,00 | 10.760.000,00 | -4.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 17.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 14.289.500,00 | 11.780.000,00 | 8.540.000,00 | -5.749.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 17.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 9.626.000,00 | 3.757.000,00 | 1.446.000,00 | -8.180.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 8.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 8.826.000,00 | 6.724.000,00 | 2.590.000,00 | -6.236.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 8.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 9.576.000,00 | 2.833.000,00 | 1.129.000,00 | -8.447.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 9.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 9.576.000,00 | 5.861.000,00 | 2.417.000,00 | -7.159.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 9.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 276.706.000,00 | 258.881.500,00 | 209.082.500,00 | -67.623.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 286.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 308.206.000,00 | 287.571.000,00 | 230.473.000,00 | -77.733.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 329.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.430.000,00 | 24.105.000,00 | 14.574.500,00 | -9.855.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 24.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 86.921.000,00 | 42.069.000,00 | 15.831.500,00 | -71.089.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 83.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.004.000,00 | 19.958.000,00 | 14.891.000,00 | -5.113.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.500.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 40 Orang | 40 Orang | 73.063.000,00 | 20.288.000,00 | 9.412.000,00 | -63.651.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | | | | - | - | 662.671.750,00 | 281.727.750,00 | 163.614.000,00 | -499.057.750,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 573.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.917.500,00 | 35.917.500,00 | 35.725.000,00 | -10.192.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 19.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 9.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.523.750,00 | 17.523.750,00 | 0,00 | -17.523.750,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 8.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 61.685.000,00 | 44.296.000,00 | 28.631.000,00 | -33.054.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordniasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 410.439.000,00 | 76.449.000,00 | 27.550.000,00 | -382.889.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 197.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 27.394.000,00 | 17.110.000,00 | 9.068.000,00 | -18.326.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 65.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 65.192.500,00 | 61.931.500,00 | 45.980.000,00 | -19.212.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 60.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 34.520.000,00 | 28.500.000,00 | 16.660.000,00 | -17.860.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 15.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 40 Orang | 40 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 70.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | - | | | | - | - | 908.754.000,00 | 901.704.000,00 | 744.570.750,00 | -164.183.250,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 1.095.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 27.338.000,00 | 24.538.000,00 | 16.859.000,00 | -10.479.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 35.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 14.696.000,00 | 10.977.000,00 | 8.484.000,00 | -6.212.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 66.716.000,00 | 47.105.000,00 | 42.262.000,00 | -24.454.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 95.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 338.886.500,00 | 429.404.500,00 | 458.214.500,00 | 119.328.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 350.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 59.773.500,00 | 44.733.500,00 | 36.310.250,00 | -23.463.250,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 90.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 0,00 | -2.388.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 177.571.000,00 | 169.451.000,00 | 158.959.000,00 | -18.612.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 180.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.602.000,00 | 2.602.000,00 | 0,00 | -2.602.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 64.442.000,00 | 33.742.000,00 | 12.311.000,00 | -52.131.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 70.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34.978.000,00 | 37.478.000,00 | 11.171.000,00 | -23.807.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 40.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 80 Orang | 80 Orang | 87.767.000,00 | 79.967.000,00 | 0,00 | -87.767.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 110.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | | | | 15 Lembaga | 15 Lembaga | 30.378.000,00 | 18.100.000,00 | 0,00 | -30.378.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 65.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0013 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | -1.218.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | | | | - | - | 158.315.296.102,00 | 172.379.083.200,00 | 172.574.510.700,00 | 14.259.214.598,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 238.155.633,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04.0001 | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04.0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04.0003 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04.0005 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 600 Laporan | 600 Laporan | 153.790.491.102,00 | 165.865.016.200,00 | 164.747.779.700,00 | 10.957.288.598,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 179.155.633,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.524.805.000,00 | 6.514.067.000,00 | 7.826.731.000,00 | 3.301.926.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 37.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 40 Orang | 40 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 3. | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | - | | | | - | - | 7.597.580.000,00 | 15.670.195.314,00 | 16.451.189.134,00 | -796.880.000,00 | | | | | | | 6.800.700.000,00 | | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | | | | - | - | 7.597.580.000,00 | 15.670.195.314,00 | 16.451.189.134,00 | 8.853.609.134,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 6.800.700.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 81.413.000,00 | 58.263.000,00 | 50.870.000,00 | -30.543.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.864.500,00 | 31.972.000,00 | 19.291.000,00 | -31.573.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.199.500,00 | 23.199.500,00 | 12.956.500,00 | -10.243.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 7.571.000,00 | 7.571.000,00 | 5.198.500,00 | -2.372.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 10.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 92.519.000,00 | 21.049.000,00 | 15.177.500,00 | -77.341.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 70.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 34.842.500,00 | 17.042.500,00 | 7.610.000,00 | -27.232.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 25.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 93.616.500,00 | 70.016.500,00 | 60.554.500,00 | -33.062.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 27.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 3.725.241.000,00 | 10.958.106.414,00 | 11.835.393.234,00 | 8.110.152.234,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 3.200.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 24.284.000,00 | 10.308.000,00 | 21.953.000,00 | -2.331.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 3.260.331.000,00 | 4.273.044.400,00 | 4.257.045.400,00 | 996.714.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 3.200.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 29.475.000,00 | 26.075.000,00 | 19.832.500,00 | -9.642.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 39.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 143.720.000,00 | 84.220.000,00 | 53.307.000,00 | -90.413.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 77.700.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 40 Orang | 40 Orang | 30.503.000,00 | 89.328.000,00 | 92.000.000,00 | 61.497.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 37.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | 18.540.830.701,00 | 16.421.631.051,00 | 16.841.610.401,00 | -1.699.220.300,00 | | | | | | 0,00 | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 18.540.830.701,00 | 16.421.631.051,00 | 16.841.610.401,00 | -1.699.220.300,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 5.02 | KEUANGAN | | | | | | | 18.540.830.701,00 | 16.421.631.051,00 | 16.841.610.401,00 | -1.699.220.300,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 17.071.715.701,00 | 14.928.537.551,00 | 15.014.419.001,00 | -17.071.715.701,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.060.000,00 | 8.060.000,00 | 7.180.000,00 | -880.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.210.000,00 | -240.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.120.000,00 | -180.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.030.000,00 | -120.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.030.000,00 | -180.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 850.000,00 | 850.000,00 | 730.000,00 | -120.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.360.000,00 | -40.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 14.739.546.251,00 | 13.912.507.551,00 | 13.917.503.301,00 | -822.042.950,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bul an | 0 Orang/bul an | 14.447.205.251,00 | 13.604.105.601,00 | 13.633.098.301,00 | -814.106.950,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 82.071.000,00 | 82.071.000,00 | 58.552.700,00 | -23.518.300,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 206.900.000,00 | 222.960.000,00 | 222.960.000,00 | 16.060.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 1.762.000,00 | -358.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 1.250.000,00 | 1.250.950,00 | 1.130.300,00 | -119.700,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 709.809.450,00 | 313.070.000,00 | 197.152.500,00 | -512.656.950,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 2.201.450,00 | 2.201.500,00 | 2.201.500,00 | 50,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 4.206.000,00 | 4.206.000,00 | 4.200.000,00 | -6.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 131.947.000,00 | 41.455.500,00 | 55.546.500,00 | -76.400.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 43.965.000,00 | 24.915.000,00 | 18.475.500,00 | -25.489.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.290.000,00 | -7.710.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 512.490.000,00 | 225.292.000,00 | 109.439.000,00 | -403.051.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 855.000.000,00 | 81.000.000,00 | 187.750.000,00 | -667.250.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 35.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 820.000.000,00 | 70.000.000,00 | 187.750.000,00 | -632.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 603.400.000,00 | 523.000.000,00 | 504.050.000,00 | -99.350.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 601.200.000,00 | 520.800.000,00 | 501.850.000,00 | -99.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 140.900.000,00 | 75.900.000,00 | 200.783.200,00 | 59.883.200,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 90.900.000,00 | 55.900.000,00 | 65.783.200,00 | -25.116.800,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 135.000.000,00 | 85.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2. | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | - | | | | - | - | 1.469.115.000,00 | 1.493.093.500,00 | 1.827.191.400,00 | -1.469.115.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | | | | - | - | 1.469.115.000,00 | 1.493.093.500,00 | 1.827.191.400,00 | 358.076.400,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 125.500.000,00 | 440.225.000,00 | 221.155.000,00 | 95.655.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 21.500.000,00 | 4.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 0 Unit | 0 Unit | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 0,00 | -18.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 160.140.000,00 | 160.140.000,00 | 0,00 | -160.140.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 858.500.000,00 | 230.600.000,00 | 1.151.500.000,00 | 293.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya | | | | 0 Obyek Pajak | 0 Obyek Pajak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 250.925.000,00 | 449.903.500,00 | 351.396.400,00 | 100.471.400,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 0 Layanan | 0 Layanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 38.400.000,00 | 176.575.000,00 | 81.640.000,00 | 43.240.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | 8.808.894.781,00 | 8.642.001.718,00 | 7.996.578.918,00 | -812.315.863,00 | | | | | | 9.089.933.583,00 | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 8.808.894.781,00 | 8.642.001.718,00 | 7.996.578.918,00 | -812.315.863,00 | | | | | | | 9.089.933.583,00 | |
| | 5.03 | KEPEGAWAIAN | | | | | | | 8.229.123.781,00 | 8.016.680.718,00 | 7.446.904.918,00 | -782.218.863,00 | | | | | | | 8.375.787.583,00 | |
| 1. | 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 6.172.811.781,00 | 6.269.138.718,00 | 5.964.246.918,00 | 754.103.802,00 | | | | | | | 6.926.915.583,00 | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 62.104.400,00 | 50.775.000,00 | 46.775.000,00 | -15.329.400,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 52.069.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 11.400.000,00 | 8.710.000,00 | 8.710.000,00 | -2.690.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.069.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.150.000,00 | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.592.000,00 | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | -2.317.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen Dokumen | 1 Dokumen Dokumen | 7.795.000,00 | 6.095.000,00 | 6.095.000,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.330.000,00 | 4.590.000,00 | 4.590.000,00 | -1.740.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.262.400,00 | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 2.867.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | -1.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.575.000,00 | 14.475.000,00 | 10.475.000,00 | -6.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.444.771.845,00 | 5.486.209.018,00 | 5.293.959.018,00 | -150.812.827,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 6.168.290.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 720 Orang/ bulan | 720 Orang/ bulan | 5.243.549.045,00 | 5.303.121.718,00 | 5.135.121.718,00 | -108.427.327,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 163.080.000,00 | 164.400.000,00 | 141.480.000,00 | -21.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 147.290.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 32.542.800,00 | 13.087.300,00 | 11.757.300,00 | -20.785.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 16.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | -2.600.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.300.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | -2.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.300.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 90.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -90.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 111.420.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 18.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 18.420.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 60 Orang | 60 Orang | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 75.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 300.745.536,00 | 368.879.700,00 | 248.026.900,00 | -52.718.636,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 321.741.900,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.660.000,00 | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | -1.530.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.230.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.636.000,00 | 17.256.000,00 | 0,00 | -2.636.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.430.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 67.171.536,00 | 80.605.000,00 | 46.779.300,00 | -20.392.236,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 42.409.900,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.135.000,00 | 9.107.700,00 | 6.823.600,00 | -5.311.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.435.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 32.000.000,00 | 43.210.000,00 | 40.210.000,00 | 8.210.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 31.525.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 177.143.000,00 | 210.571.000,00 | 151.084.000,00 | -26.059.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 205.712.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 69.000.000,00 | 195.885.000,00 | 233.046.000,00 | 164.046.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 44.354.683,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 69.000.000,00 | 195.885.000,00 | 233.046.000,00 | 164.046.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 44.354.683,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 153.740.000,00 | 80.390.000,00 | 80.390.000,00 | -73.350.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 158.740.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Raya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.940.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 148.800.000,00 | 75.450.000,00 | 75.450.000,00 | -73.350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 153.800.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 49.850.000,00 | 69.400.000,00 | 62.050.000,00 | 12.200.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 68.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 12.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 18.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 80 Unit | 80 Unit | 14.850.000,00 | 14.400.000,00 | 19.550.000,00 | 4.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | - | | | | - | - | 2.056.312.000,00 | 1.747.542.000,00 | 1.482.658.000,00 | -607.440.000,00 | | | | | | | 1.448.872.000,00 | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | - | | | | - | - | 638.157.000,00 | 547.810.000,00 | 466.248.000,00 | -171.909.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 563.650.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.190.000,00 | 16.365.000,00 | 8.600.000,00 | -15.590.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.450.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 103.118.000,00 | 84.274.000,00 | 62.220.000,00 | -40.898.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 71.650.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.845.000,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | -9.945.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 28.550.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 72.660.000,00 | 52.987.000,00 | 37.488.000,00 | -35.172.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 63.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 57.122.000,00 | 25.739.000,00 | 11.250.000,00 | -45.872.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 59.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 108.222.000,00 | 55.545.000,00 | 33.790.000,00 | -74.432.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 81.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | - | | | | - | - | 336.678.000,00 | 387.798.000,00 | 190.092.000,00 | -146.586.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 222.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 89.942.000,00 | 53.160.000,00 | 23.275.000,00 | -66.667.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 69.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 157.583.000,00 | 125.012.000,00 | 112.252.000,00 | -45.331.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 133.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 89.153.000,00 | 209.626.000,00 | 54.565.000,00 | -34.588.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | - | | | | - | - | 571.468.000,00 | 490.055.000,00 | 545.014.000,00 | -26.454.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 333.130.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 448.622.000,00 | 423.935.000,00 | 485.184.000,00 | 36.562.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 271.590.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 63.376.000,00 | 31.780.000,00 | 27.990.000,00 | -35.386.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.540.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | | | | 300 Orang | 300 Orang | 59.470.000,00 | 34.340.000,00 | 31.840.000,00 | -27.630.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 31.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - | | | | - | - | 510.009.000,00 | 321.879.000,00 | 281.304.000,00 | -228.705.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 330.092.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 41.050.000,00 | 46.950.000,00 | 24.960.000,00 | -16.090.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 26.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45.197.000,00 | 14.220.000,00 | 28.200.000,00 | -16.997.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 45.772.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 58.492.000,00 | 32.374.000,00 | 14.620.000,00 | -43.872.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA Pemerintahan yang BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 51.350.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | | | | 200 Orang | 200 Orang | 131.400.000,00 | 123.150.000,00 | 123.150.000,00 | -8.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Raya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 103.900.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | | | | 200 Orang | 200 Orang | 65.608.000,00 | 31.785.000,00 | 20.724.000,00 | -44.884.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 37.001.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | -25.601.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 43.820.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 70.120.000,00 | 34.710.000,00 | 30.960.000,00 | -39.160.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 44.950.000,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | -21.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.850.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0010 | Evaluasi Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.191.000,00 | 4.290.000,00 | 4.290.000,00 | -11.901.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.800.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | 579.771.000,00 | 625.321.000,00 | 549.674.000,00 | -30.097.000,00 | | | | | | | 714.146.000,00 | |
| 1. | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | - | | | | - | - | 579.771.000,00 | 625.321.000,00 | 549.674.000,00 | 134.375.000,00 | | | | | | | 714.146.000,00 | |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | - | | | | - | - | 579.771.000,00 | 625.321.000,00 | 549.674.000,00 | -30.097.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 714.146.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 496.117.000,00 | 390.891.000,00 | 380.976.000,00 | -115.141.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 528.992.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 83.654.000,00 | 234.430.000,00 | 168.698.000,00 | 85.044.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 185.154.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | INSPEKTORAT KABUPATEN | | | | | | | 17.100.500.000,00 | 24.338.231.260,00 | 23.205.077.574,00 | 6.104.577.574,00 | | | | | | | 11.134.853.578,00 | |
| | 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 17.100.500.000,00 | 24.338.231.260,00 | 23.205.077.574,00 | 6.104.577.574,00 | | | | | | | 11.134.853.578,00 | |
| | 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | 17.100.500.000,00 | 24.338.231.260,00 | 23.205.077.574,00 | 6.104.577.574,00 | | | | | | | 11.134.853.578,00 | |
| 1. | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 16.113.373.000,00 | 19.026.796.260,00 | 20.348.248.574,00 | -7.267.637.422,00 | | | | | | | 8.845.735.578,00 | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 19.353.000,00 | 21.453.000,00 | 6.450.000,00 | -12.903.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 19.353.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.265.000,00 | 4.565.000,00 | 1.350.000,00 | -1.915.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPIMPINAN PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.153.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.044.500,00 | 3.244.500,00 | 750.000,00 | -2.294.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.244.500,00 | 2.444.500,00 | 450.000,00 | -1.794.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.200.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | 2.800.000,00 | 975.000,00 | -1.625.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.999.000,00 | 3.199.000,00 | 975.000,00 | -2.024.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 975.000,00 | -1.625.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 975.000,00 | -1.625.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 13.360.787.025,00 | 12.068.751.260,00 | 12.228.751.260,00 | -1.132.035.765,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 8.120.487.025,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 73 Orang/b ulan | 73 Orang/b ulan | 13.227.797.025,00 | 11.916.471.260,00 | 12.076.471.260,00 | -1.151.325.765,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.987.497.025,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 132.990.000,00 | 152.280.000,00 | 152.280.000,00 | 19.290.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 132.990.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 898.550.475,00 | 713.800.000,00 | 597.800.000,00 | -300.750.475,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 898.550.475,00 | 713.800.000,00 | 597.800.000,00 | -300.750.475,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 371.640.000,00 | 282.650.000,00 | 270.850.000,00 | -100.790.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 171.550.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 93.000.000,00 | 101.850.000,00 | 101.850.000,00 | 8.850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 56.150.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 264.440.000,00 | 166.600.000,00 | 154.800.000,00 | -109.640.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 103.400.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 40.000.000,00 | 3.611.192.686,00 | 6.070.000.000,00 | 6.030.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 15.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000,00 | 3.611.192.686,00 | 6.070.000.000,00 | 6.030.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 2. | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | - | | | | - | - | 669.270.000,00 | 3.879.900.000,00 | 1.944.974.000,00 | 1.454.810.000,00 | | | | | | | 2.124.080.000,00 | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | | | | - | - | 579.870.000,00 | 3.318.920.000,00 | 1.695.434.000,00 | 1.115.564.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.860.430.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 17.000.000,00 | 699.890.000,00 | 292.060.000,00 | 275.060.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 255.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 71.400.000,00 | 1.898.730.000,00 | 918.000.000,00 | 846.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.204.110.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | | 12 Kesepakatan | 12 Kesepakatan | 0,00 | 214.030.000,00 | 67.320.000,00 | 67.320.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 491.470.000,00 | 506.270.000,00 | 418.054.000,00 | -73.416.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 401.320.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - | | | | - | - | 89.400.000,00 | 560.980.000,00 | 249.540.000,00 | 160.140.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 263.650.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 18.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 71.400.000,00 | 542.980.000,00 | 231.540.000,00 | 160.140.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 245.650.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| 3. | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | - | | | | - | - | 317.857.000,00 | 1.431.535.000,00 | 911.855.000,00 | -152.819.000,00 | | | | | | | 165.038.000,00 | | |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | - | | | | - | - | 317.857.000,00 | 1.431.535.000,00 | 911.855.000,00 | 593.998.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 165.038.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 48 perangkat daerah | 48 perangkat daerah | 204.758.000,00 | 656.105.000,00 | 580.300.000,00 | 375.542.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.404.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 48 perangkat daerah | 48 perangkat daerah | 39.034.000,00 | 59.340.000,00 | 39.415.000,00 | 381.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.270.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 17.099.000,00 | 270.524.000,00 | 54.940.000,00 | 37.841.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 23.164.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 2 perangkat daerah | 2 perangkat daerah | 56.966.000,00 | 445.566.000,00 | 237.200.000,00 | 180.234.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 46.200.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | KECAMATAN MAROS BARU | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | 7.169.026.065,00 | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 5.314.576.065,00 | 4.968.701.087,00 | 4.858.086.087,00 | 0,00 | | | | | | | 5.314.576.065,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.400.000,00 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | -5.700.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 8.400.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | -300.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | -300.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | -300.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.809.906.065,00 | 4.779.213.087,00 | 4.699.213.087,00 | -110.692.978,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 4.809.906.065,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12 Orang/b ulan | 12 Orang/b ulan | 4.740.166.065,00 | 4.707.213.087,00 | 4.627.213.087,00 | -112.952.978,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.740.166.065,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 69.740.000,00 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 2.260.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 69.740.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 13.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 13.750.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.750.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 13.750.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 226.675.000,00 | 94.138.000,00 | 69.723.000,00 | -156.952.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 226.675.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.410.000,00 | 3.810.000,00 | 1.810.000,00 | -5.600.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.410.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 75.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -57.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.286.000,00 | 3.653.000,00 | 2.338.000,00 | -8.948.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.286.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 29.625.000,00 | 10.030.000,00 | 10.030.000,00 | -19.595.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 29.625.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.503.000,00 | -5.997.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 26.000.000,00 | 16.660.000,00 | 16.660.000,00 | -9.340.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 26.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 69.854.000,00 | 37.485.000,00 | 19.382.000,00 | -50.472.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 69.854.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 25.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 192.850.000,00 | 76.750.000,00 | 76.750.000,00 | -116.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 192.850.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.100.000,00 | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 | -550.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.100.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 182.750.000,00 | 67.200.000,00 | 67.200.000,00 | -115.550.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | | | 182.750.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 37.995.000,00 | 12.300.000,00 | 9.700.000,00 | -28.295.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | - | | 37.995.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 27.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 12 Unit | 12 Unit | 10.995.000,00 | 5.300.000,00 | 2.700.000,00 | -8.295.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | | | 10.995.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 940.300.000,00 | 919.250.000,00 | 886.450.000,00 | 0,00 | | | | | | | 940.300.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 187.150.000,00 | 176.150.000,00 | 149.650.000,00 | -37.500.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 187.150.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.150.000,00 | 5.150.000,00 | 2.650.000,00 | -4.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 7.150.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 743.700.000,00 | 736.800.000,00 | 736.800.000,00 | -6.900.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | - | | 743.700.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | | | 3.150.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 740.550.000,00 | 736.800.000,00 | 736.800.000,00 | -3.750.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | | | 740.550.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 9.450.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | -9.450.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | - | | 9.450.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | -3.150.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | | | 3.150.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | | | 3.150.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | -3.150.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPEK | | | 3.150.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 796.800.000,00 | 754.235.000,00 | 707.350.000,00 | -55.000.000,00 | | | | | | | 741.800.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 196.800.000,00 | 140.735.000,00 | 93.850.000,00 | -102.950.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 196.800.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.600.000,00 | 25.100.000,00 | 18.550.000,00 | -42.050.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 60.600.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 46.200.000,00 | 30.135.000,00 | 1.800.000,00 | -44.400.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 46.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | | | | | | | 3.100.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 3.100.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 3.100.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 167.450.000,00 | 87.300.000,00 | 62.700.000,00 | 0,00 | | | | | | | 167.450.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 167.450.000,00 | 87.300.000,00 | 62.700.000,00 | -104.750.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 167.450.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 400 Orang | 400 Orang | 84.300.000,00 | 45.800.000,00 | 29.800.000,00 | -54.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 84.300.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 400 Orang | 400 Orang | 83.150.000,00 | 41.500.000,00 | 32.900.000,00 | -50.250.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 83.150.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | | | | | | | 1.800.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 700.000,00 | -1.100.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 1.800.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 700.000,00 | -1.100.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 1.800.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | KELURAHAN BAJU BODOA | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 940.300.000,00 | 919.250.000,00 | 886.450.000,00 | 0,00 | | | | | | | 940.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 187.150.000,00 | 176.150.000,00 | 149.650.000,00 | -37.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 187.150.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baju Bodoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 796.800.000,00 | 754.235.000,00 | 707.350.000,00 | -55.000.000,00 | | | | | | | 741.800.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 600.000.000,00 | 613.500.000,00 | 613.500.000,00 | 13.500.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 545.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baju Bodoa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 175.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 29.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 175.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baju Bodoa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baju Bodoa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | KELURAHAN BAJI PAMAI | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 940.300.000,00 | 919.250.000,00 | 886.450.000,00 | 0,00 | | | | | | | 940.300.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 187.150.000,00 | 176.150.000,00 | 149.650.000,00 | -37.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 187.150.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 796.800.000,00 | 754.235.000,00 | 707.350.000,00 | -55.000.000,00 | | | | | | | 741.800.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 600.000.000,00 | 613.500.000,00 | 613.500.000,00 | 13.500.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 545.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 10 | 10 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | - | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 155.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 49.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | KELURAHAN PALLANTIKANG | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 7.224.026.065,00 | 6.734.386.087,00 | 6.518.386.087,00 | -705.639.978,00 | | | | | | | 7.169.026.065,00 | | |
| 1. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 796.800.000,00 | 754.235.000,00 | 707.350.000,00 | -55.000.000,00 | | | | | | | 741.800.000,00 | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 196.800.000,00 | 140.735.000,00 | 93.850.000,00 | -102.950.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 196.800.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 600.000.000,00 | 613.500.000,00 | 613.500.000,00 | 13.500.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 545.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Pallantikang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 188.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 16.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Pallantikang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 188.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Pallantikang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Pallantikang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | KECAMATAN BANTIMURUNG | | | | | | | 6.003.872.804,00 | 5.462.438.758,00 | 5.134.438.758,00 | -869.434.046,00 | | | | | | | 6.052.322.804,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 6.003.872.804,00 | 5.462.438.758,00 | 5.134.438.758,00 | -869.434.046,00 | | | | | | | 6.052.322.804,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 6.003.872.804,00 | 5.462.438.758,00 | 5.134.438.758,00 | -869.434.046,00 | | | | | | | 6.052.322.804,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 4.640.172.804,00 | 4.226.350.758,00 | 3.974.738.758,00 | 0,00 | | | | | | | 4.640.172.804,00 | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 35.000.000,00 | 6.580.000,00 | 6.580.000,00 | -28.420.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -3.900.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -3.900.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -3.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | -4.210.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | -4.210.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | -4.150.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.000.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | -4.150.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.958.422.804,00 | 4.002.252.758,00 | 3.798.252.758,00 | -160.170.046,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 3.958.422.804,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 60 Orang/b ulan | 60 Orang/b ulan | 3.901.992.804,00 | 3.951.612.758,00 | 3.747.612.758,00 | -154.380.046,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.901.992.804,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 56.430.000,00 | 50.640.000,00 | 50.640.000,00 | -5.790.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 56.430.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 290.000.000,00 | 127.387.000,00 | 89.775.000,00 | -200.225.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 290.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.000.000,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | -4.930.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 7.872.000,00 | 7.872.000,00 | -2.128.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 58.000.000,00 | 25.414.000,00 | 18.265.000,00 | -39.735.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 58.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 90.000.000,00 | 40.575.000,00 | 28.000.000,00 | -62.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 124.000.000,00 | 50.456.000,00 | 32.568.000,00 | -91.432.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 124.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 110.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 110.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 202.600.000,00 | 59.520.000,00 | 59.520.000,00 | -143.080.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 202.600.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.320.000,00 | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.320.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 192.280.000,00 | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 | -140.080.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 192.280.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 44.150.000,00 | 30.611.000,00 | 20.611.000,00 | -23.539.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 44.150.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 22 Unit | 22 Unit | 29.150.000,00 | 24.800.000,00 | 14.800.000,00 | -14.350.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 29.150.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 15.000.000,00 | 5.811.000,00 | 5.811.000,00 | -9.189.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 624.200.000,00 | 628.000.000,00 | 600.800.000,00 | 0,00 | | | | | | | 624.200.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 190.000.000,00 | 175.100.000,00 | 151.100.000,00 | -38.900.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | Masyarakat | | 190.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | -5.900.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 408.200.000,00 | 440.300.000,00 | 440.300.000,00 | 32.100.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 408.200.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | -3.900.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 400.200.000,00 | 436.200.000,00 | 436.200.000,00 | 36.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 400.200.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 26.000.000,00 | 12.600.000,00 | 9.400.000,00 | -16.600.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 26.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | -3.700.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kowenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | -4.900.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 514.200.000,00 | 476.013.000,00 | 451.875.000,00 | 48.450.000,00 | | | | | | | 562.650.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 107.200.000,00 | 65.363.000,00 | 41.225.000,00 | -65.975.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 107.200.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 36.075.000,00 | 36.075.000,00 | -13.925.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 57.200.000,00 | 29.288.000,00 | 5.150.000,00 | -52.050.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 57.200.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 407.000.000,00 | 410.650.000,00 | 410.650.000,00 | 3.650.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 455.450.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | -5.350.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 8.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 8.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | -3.900.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | -3.900.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 209.800.000,00 | 125.675.000,00 | 100.625.000,00 | 0,00 | | | | | | | 209.800.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 209.800.000,00 | 125.675.000,00 | 100.625.000,00 | -109.175.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 209.800.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2000 Orang | 2000 Orang | 111.800.000,00 | 56.450.000,00 | 45.450.000,00 | -66.350.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 111.800.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 250 Orang | 250 Orang | 8.000.000,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 800 Orang | 800 Orang | 90.000.000,00 | 65.175.000,00 | 55.175.000,00 | -34.825.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 7.500.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 7.500.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -5.200.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 7.500.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 7.500.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -5.200.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | KELURAHAN LEANG - LEANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 6.003.872.804,00 | 5.462.438.758,00 | 5.134.438.758,00 | -869.434.046,00 | | | | | | | 6.052.322.804,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 6.003.872.804,00 | 5.462.438.758,00 | 5.134.438.758,00 | -869.434.046,00 | | | | | | | 6.052.322.804,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 624.200.000,00 | 628.000.000,00 | 600.800.000,00 | 0,00 | | | | | | | 624.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 190.000.000,00 | 175.100.000,00 | 151.100.000,00 | -38.900.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 190.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 514.200.000,00 | 476.013.000,00 | 451.875.000,00 | 48.450.000,00 | | | | | | | 562.650.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 407.000.000,00 | 410.650.000,00 | 410.650.000,00 | 3.650.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 455.450.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 0 0 | 2 0 | 12.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.745.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 16.380.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 54.500.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 171.760.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 10 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 33.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.730.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.525.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | KELURAHAN KALABIRANG | | | | | | | | 6.003.872.804,00 | 5.462.438.758,00 | 5.134.438.758,00 | -869.434.046,00 | | | | | 6.052.322.804,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 6.003.872.804,00 | 5.462.438.758,00 | 5.134.438.758,00 | -869.434.046,00 | | | | | | | 6.052.322.804,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 6.003.872.804,00 | 5.462.438.758,00 | 5.134.438.758,00 | -869.434.046,00 | | | | | | | 6.052.322.804,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 624.200.000,00 | 628.000.000,00 | 600.800.000,00 | 0,00 | | | | | | | 624.200.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 190.000.000,00 | 175.100.000,00 | 151.100.000,00 | -38.900.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 190.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 514.200.000,00 | 476.013.000,00 | 451.875.000,00 | 48.450.000,00 | | | | | | | 562.650.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 407.000.000,00 | 410.650.000,00 | 410.650.000,00 | 3.650.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 455.450.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 8 Lembaga katan | 8 Lembaga katan | 12.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.745.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabirang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 18.850.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 54.500.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 154.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 10 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 33.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.730.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 0 0 | 0 0 | 3.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.525.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KERBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 12.460.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | KECAMATAN CAMBA | | | | | | | | 5.552.615.775,00 | 5.034.979.881,00 | 4.505.079.881,00 | -1.047.535.894,00 | | | | | | 6.131.056.562,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 5.552.615.775,00 | 5.034.979.881,00 | 4.505.079.881,00 | -1.047.535.894,00 | | | | | | | 6.131.056.562,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 5.552.615.775,00 | 5.034.979.881,00 | 4.505.079.881,00 | -1.047.535.894,00 | | | | | | | 6.131.056.562,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 4.313.680.775,00 | 3.860.351.881,00 | 3.399.539.881,00 | 367.375.787,00 | | | | | | | 4.681.056.562,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.400.000,00 | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | -3.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 13.550.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.100.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.050.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.050.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.050.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.050.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.050.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.050.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.050.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.881.094.775,00 | 3.603.372.881,00 | 3.197.472.881,00 | -683.621.894,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 4.192.506.562,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 58 Orang/bulan | 58 Orang/bulan | 3.804.534.775,00 | 3.544.092.881,00 | 3.138.192.881,00 | -666.341.894,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.112.506.562,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 76.560.000,00 | 59.280.000,00 | 59.280.000,00 | -17.280.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.750.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | -7.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 31 Paket | 31 Paket | 7.750.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | -7.750.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 204.156.000,00 | 130.179.000,00 | 90.767.000,00 | -113.389.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 240.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.545.000,00 | 3.065.000,00 | 3.065.000,00 | -480.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.354.000,00 | 8.544.000,00 | 8.544.000,00 | -810.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 42.869.000,00 | 22.853.000,00 | 23.117.000,00 | -19.752.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 21.500.000,00 | 11.610.000,00 | 11.610.000,00 | -9.890.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.888.000,00 | 84.107.000,00 | 44.431.000,00 | -82.457.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 157.700.000,00 | 70.920.000,00 | 70.920.000,00 | -86.780.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 165.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.300.000,00 | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 | -4.980.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 145.400.000,00 | 63.600.000,00 | 63.600.000,00 | -81.800.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 54.580.000,00 | 35.730.000,00 | 35.730.000,00 | -18.850.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 60.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 12 Unit | 46.500.000,00 | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 8.080.000,00 | 4.230.000,00 | 4.230.000,00 | -3.850.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 590.000.000,00 | 605.800.000,00 | 581.750.000,00 | 71.000.000,00 | | | | | | | 661.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 186.500.000,00 | 176.500.000,00 | 152.500.000,00 | -34.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 208.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 389.900.000,00 | 418.300.000,00 | 418.300.000,00 | 28.400.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 438.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.100.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | -1.600.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 382.800.000,00 | 412.800.000,00 | 412.800.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 430.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 13.600.000,00 | 11.000.000,00 | 10.950.000,00 | -2.650.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.100.000,00 | 5.500.000,00 | 5.450.000,00 | -1.650.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 486.035.000,00 | 476.228.000,00 | 465.290.000,00 | 124.965.000,00 | | | | | | | 611.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 82.035.000,00 | 64.628.000,00 | 56.290.000,00 | -25.745.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 90.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 44.090.000,00 | 36.190.000,00 | 36.190.000,00 | -7.900.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 37.945.000,00 | 28.438.000,00 | 20.100.000,00 | -17.845.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 404.000.000,00 | 411.600.000,00 | 409.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 521.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.000.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 7.100.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 7.100.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | -7.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.100.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | -7.100.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 150.400.000,00 | 84.600.000,00 | 56.000.000,00 | 12.600.000,00 | | | | | | | 163.000.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 150.400.000,00 | 84.600.000,00 | 56.000.000,00 | -94.400.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 163.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 525 Orang | 525 Orang | 68.650.000,00 | 34.250.000,00 | 34.250.000,00 | -34.400.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 100 Orang | 100 Orang | 7.050.000,00 | 5.450.000,00 | 0,00 | -7.050.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 350 Orang | 350 Orang | 74.700.000,00 | 44.900.000,00 | 21.750.000,00 | -52.950.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 5.400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.600.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 5.400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -2.900.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 5.400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -2.900.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | KELURAHAN CEMPANIGA | | | | | | | 5.552.615.775,00 | 5.034.979.881,00 | 4.505.079.881,00 | -1.047.535.894,00 | | | | | | | 6.131.056.562,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 5.552.615.775,00 | 5.034.979.881,00 | 4.505.079.881,00 | -1.047.535.894,00 | | | | | | | 6.131.056.562,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 5.552.615.775,00 | 5.034.979.881,00 | 4.505.079.881,00 | -1.047.535.894,00 | | | | | | | 6.131.056.562,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 590.000.000,00 | 605.800.000,00 | 581.750.000,00 | 71.000.000,00 | | | | | | | 661.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 186.500.000,00 | 176.500.000,00 | 152.500.000,00 | -34.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 208.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Camba, Cempniga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 486.035.000,00 | 476.228.000,00 | 465.290.000,00 | 124.965.000,00 | | | | | | | 611.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 404.000.000,00 | 411.600.000,00 | 409.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 521.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 5 Lembaga Kemasya katan | 5 Lembaga Kemasya katan | 11.791.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.791.000,00 | Kab. Maros, Camba, Cempniga | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 54.500.000,00 | Kab. Maros, Camba, Cempniga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 2 0 | 2 0 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Camba, Cempniga | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.209.000,00 | - | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | KELURAHAN MARIO PULANA | | | | | | | 5.552.615.775,00 | 5.034.979.881,00 | 4.505.079.881,00 | -1.047.535.894,00 | | | | | | | 6.131.056.562,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 5.552.615.775,00 | 5.034.979.881,00 | 4.505.079.881,00 | -1.047.535.894,00 | | | | | | | 6.131.056.562,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 5.552.615.775,00 | 5.034.979.881,00 | 4.505.079.881,00 | -1.047.535.894,00 | | | | | | | 6.131.056.562,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 590.000.000,00 | 605.800.000,00 | 581.750.000,00 | 71.000.000,00 | | | | | | | 661.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 186.500.000,00 | 176.500.000,00 | 152.500.000,00 | -34.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 208.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Camba, Mario Pulana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 486.035.000,00 | 476.228.000,00 | 465.290.000,00 | 124.965.000,00 | | | | | | | 611.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 404.000.000,00 | 411.600.000,00 | 409.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 521.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 5 Lembaga Kemasyara katan | 5 Lembaga Kemasyara katan | 11.791.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.791.000,00 | Kab. Maros, Camba, Mario Pulana | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 54.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Camba, Mario Pulana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Mario Pulana | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.209.000,00 | - | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | KECAMATAN MALLAWA | | | | | | | 4.115.652.253,00 | 3.621.212.579,00 | 3.382.212.579,00 | -733.439.674,00 | | | | | 4.770.602.253,00 | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.115.652.253,00 | 3.621.212.579,00 | 3.382.212.579,00 | -733.439.674,00 | | | | | | | 4.770.602.253,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.115.652.253,00 | 3.621.212.579,00 | 3.382.212.579,00 | -733.439.674,00 | | | | | | | 4.770.602.253,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 3.350.817.253,00 | 3.019.673.579,00 | 2.832.403.579,00 | 2.700.000,00 | | | | | | | 3.353.517.253,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 14.000.000,00 | 6.940.000,00 | 6.290.000,00 | -7.710.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 14.700.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | -1.250.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.100.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 850.000,00 | 750.000,00 | -1.250.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.100.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 850.000,00 | 750.000,00 | -1.250.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.100.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 850.000,00 | 750.000,00 | -1.250.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.100.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 850.000,00 | 750.000,00 | -1.250.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.100.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | -750.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.100.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | -710.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.100.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.573.296.753,00 | 2.734.472.579,00 | 2.607.472.579,00 | 34.175.826,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.573.296.753,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 37 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | 2.525.336.753,00 | 2.682.632.579,00 | 2.555.632.579,00 | 30.295.826,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.525.336.753,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | - | - | 47.960.000,00 | 51.840.000,00 | 51.840.000,00 | 3.880.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 47.960.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 22.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 40 Paket | 40 Paket | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 258.760.500,00 | 128.956.000,00 | 87.006.000,00 | -171.754.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 258.760.500,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 20 Paket | 20 Paket | 6.025.000,00 | 2.192.000,00 | 2.192.000,00 | -3.833.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.025.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 4 Paket | 4 Paket | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.578.000,00 | 10.222.000,00 | 5.840.000,00 | -5.738.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.578.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 26.352.500,00 | 17.224.000,00 | 17.224.000,00 | -9.128.500,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 26.352.500,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.000.000,00 | 2.516.000,00 | 2.516.000,00 | -8.484.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 48.400.000,00 | 22.150.000,00 | 22.150.000,00 | -26.250.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 48.400.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 95.405.000,00 | 74.652.000,00 | 37.084.000,00 | -58.321.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 95.405.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 226.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -226.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 226.750.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 54 Unit | 54 Unit | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 16 Unit | 16 Unit | 186.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -186.750.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 186.750.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 187.010.000,00 | 92.250.000,00 | 92.250.000,00 | -94.760.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 187.010.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.600.000,00 | 10.650.000,00 | 10.650.000,00 | -950.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.600.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 175.410.000,00 | 81.600.000,00 | 81.600.000,00 | -93.810.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 175.410.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 71.000.000,00 | 42.055.000,00 | 39.385.000,00 | -31.615.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 71.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 26 Unit | 26 Unit | 43.000.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 43.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 28.000.000,00 | 5.055.000,00 | 2.385.000,00 | -25.615.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 28.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 270.550.000,00 | 266.980.000,00 | 243.900.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | 270.750.000,00 | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 99.400.000,00 | 88.550.000,00 | 73.500.000,00 | -25.900.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 99.500.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.400.000,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | -9.400.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAINIG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 9.500.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 155.550.000,00 | 170.400.000,00 | 170.400.000,00 | 14.850.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 155.550.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.150.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 152.400.000,00 | 170.400.000,00 | 170.400.000,00 | 18.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 152.400.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 15.600.000,00 | 8.030.000,00 | 0,00 | -15.600.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 15.700.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.200.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | -5.200.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.300.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.200.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | -5.200.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.200.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.200.000,00 | 2.730.000,00 | 0,00 | -5.200.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.200.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 312.185.000,00 | 255.009.000,00 | 229.009.000,00 | 0,00 | | | | | | | 312.185.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 112.185.000,00 | 50.509.000,00 | 24.509.000,00 | -87.676.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 112.185.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.090.000,00 | 29.559.000,00 | 24.509.000,00 | -14.581.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 39.090.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.095.000,00 | 20.950.000,00 | 0,00 | -73.095.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 73.095.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 5.600.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 5.600.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 5.600.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | -5.600.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 5.600.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.600.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | -5.600.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 5.600.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 169.350.000,00 | 76.900.000,00 | 76.900.000,00 | 652.050.000,00 | | | | | | | 821.400.000,00 | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 169.350.000,00 | 76.900.000,00 | 76.900.000,00 | -92.450.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 821.400.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republiik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | | | | 600 Orang | 600 Orang | 84.650.000,00 | 40.700.000,00 | 49.700.000,00 | -34.950.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 84.650.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i> | | | | 100 Orang | 100 Orang | 5.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.150.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.150.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i> | | | | 300 Orang | 300 Orang | 72.450.000,00 | 36.200.000,00 | 27.200.000,00 | -45.250.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 724.500.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.100.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.100.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 7.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 7.150.000,00 | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 7.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.150.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 7.150.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i> | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.150.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KELURAHAN SABILA | | | | | | | | 4.115.652.253,00 | 3.621.212.579,00 | 3.382.212.579,00 | -733.439.674,00 | | | | | | | 4.770.602.253,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.115.652.253,00 | 3.621.212.579,00 | 3.382.212.579,00 | -733.439.674,00 | | | | | | | 4.770.602.253,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.115.652.253,00 | 3.621.212.579,00 | 3.382.212.579,00 | -733.439.674,00 | | | | | | | 4.770.602.253,00 | | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 270.550.000,00 | 266.980.000,00 | 243.900.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | 270.750.000,00 | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 99.400.000,00 | 88.550.000,00 | 73.500.000,00 | -25.900.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 99.500.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Mallawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA | |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 312.185.000,00 | 255.009.000,00 | 229.009.000,00 | 0,00 | | | | | | | 312.185.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 4.500.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | - | 0 0 | 200.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 4.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | | KECAMATAN TANRALILI | | | | | | | 4.604.663.300,00 | 4.089.363.246,00 | 4.177.363.246,00 | -427.300.054,00 | | | | | | 4.586.383.300,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.604.663.300,00 | 4.089.363.246,00 | 4.177.363.246,00 | -427.300.054,00 | | | | | | | 4.586.383.300,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.604.663.300,00 | 4.089.363.246,00 | 4.177.363.246,00 | -427.300.054,00 | | | | | | | 4.586.383.300,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 3.868.838.300,00 | 3.501.888.246,00 | 3.655.888.246,00 | -9.050.000,00 | | | | | | | 3.859.788.300,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 14.000.000,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | -6.400.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 14.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -800.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -800.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -800.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.295.009.300,00 | 3.295.442.246,00 | 3.495.442.246,00 | 200.432.946,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 3.295.009.300,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 658 Orang/ bulan | 658 Orang/ bulan | 3.237.479.300,00 | 3.243.602.246,00 | 3.443.602.246,00 | 206.122.946,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.237.479.300,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 57.530.000,00 | 51.840.000,00 | 51.840.000,00 | -5.690.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 57.530.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 206.699.000,00 | 98.096.000,00 | 62.096.000,00 | -144.603.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 194.199.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.530.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -3.030.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.530.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22.500.000,00 | 10.076.000,00 | 10.076.000,00 | -12.424.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.802.000,00 | -3.198.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | -13.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 28.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 130.669.000,00 | 46.520.000,00 | 26.718.000,00 | -103.951.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 130.669.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 143.500.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -128.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 143.500.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 8 Unit | 8 Unit | 143.500.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -128.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 143.500.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 142.750.000,00 | 62.250.000,00 | 62.250.000,00 | -80.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 146.200.000,00 | KECAMATAN TANRALILI | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.200.000,00 | 10.650.000,00 | 10.650.000,00 | -550.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.200.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 131.550.000,00 | 51.600.000,00 | 51.600.000,00 | -79.950.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 135.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 66.880.000,00 | 23.500.000,00 | 13.500.000,00 | -53.380.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 66.880.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 40.250.000,00 | 16.500.000,00 | 6.500.000,00 | -33.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.250.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 26.630.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | -19.630.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 26.630.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 219.400.000,00 | 215.650.000,00 | 191.100.000,00 | 0,00 | | | | | | | 219.400.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 101.950.000,00 | 90.600.000,00 | 73.500.000,00 | -28.450.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 101.950.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.950.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | -11.950.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 11.950.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 99.600.000,00 | 117.600.000,00 | 117.600.000,00 | 18.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 99.600.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 99.600.000,00 | 117.600.000,00 | 117.600.000,00 | 18.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 99.600.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 17.850.000,00 | 7.450.000,00 | 0,00 | -17.850.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 17.850.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.950.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.950.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.950.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | -5.950.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.950.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.950.000,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | -5.950.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.950.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 291.925.000,00 | 272.675.000,00 | 241.275.000,00 | 5.720.000,00 | | | | | | | 297.645.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 97.645.000,00 | 68.175.000,00 | 36.775.000,00 | -60.870.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 97.645.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45.500.000,00 | 39.775.000,00 | 31.725.000,00 | -13.775.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 45.500.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 52.145.000,00 | 28.400.000,00 | 5.050.000,00 | -47.095.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 52.145.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 6.000.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | -800.000,00 | | | | | | | 5.200.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 6.000.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 5.200.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.200.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 204.200.000,00 | 90.100.000,00 | 89.100.000,00 | -14.150.000,00 | | | | | | | 190.050.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 204.200.000,00 | 90.100.000,00 | 89.100.000,00 | -115.100.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 190.050.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 500 Orang | 500 Orang | 108.000.000,00 | 45.800.000,00 | 44.800.000,00 | -63.200.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 93.850.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 96.200.000,00 | 44.300.000,00 | 44.300.000,00 | -51.900.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 96.200.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 14.300.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 14.300.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 14.300.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | -14.300.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 14.300.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 14.300.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | -14.300.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 14.300.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | KELURAHAN BORONG | | | | | | | 4.604.663.300,00 | 4.089.363.246,00 | 4.177.363.246,00 | -427.300.054,00 | | | | | | | 4.586.383.300,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.604.663.300,00 | 4.089.363.246,00 | 4.177.363.246,00 | -427.300.054,00 | | | | | | | 4.586.383.300,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.604.663.300,00 | 4.089.363.246,00 | 4.177.363.246,00 | -427.300.054,00 | | | | | | | 4.586.383.300,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 219.400.000,00 | 215.650.000,00 | 191.100.000,00 | 0,00 | | | | | | | 219.400.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 101.950.000,00 | 90.600.000,00 | 73.500.000,00 | -28.450.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 101.950.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 291.925.000,00 | 272.675.000,00 | 241.275.000,00 | 5.720.000,00 | | | | | | | 297.645.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 194.280.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 10.220.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 200.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 6 Lembaga Kemasya- katan | 6 Lembaga Kemasya- katan | 12.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.550.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 12.550.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 54.500.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 27.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.505.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 34.050.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 10 | 10 | 4.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.225.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.400.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | KECAMATAN BONTOA | | | | | | | 4.592.377.203,00 | 4.010.401.302,00 | 4.008.401.302,00 | -583.975.901,00 | | | | | | | 4.592.377.203,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.592.377.203,00 | 4.010.401.302,00 | 4.008.401.302,00 | -583.975.901,00 | | | | | | | 4.592.377.203,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.592.377.203,00 | 4.010.401.302,00 | 4.008.401.302,00 | -583.975.901,00 | | | | | | | 4.592.377.203,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 3.650.477.203,00 | 3.164.496.302,00 | 3.253.796.302,00 | 0,00 | | | | | | | 3.650.477.203,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 9.600.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.600.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.003.127.203,00 | 2.932.646.302,00 | 3.042.646.302,00 | 39.519.099,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 3.003.127.203,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 45 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 2.953.407.203,00 | 2.878.406.302,00 | 2.988.406.302,00 | 34.999.099,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.953.407.203,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 49.720.000,00 | 54.240.000,00 | 54.240.000,00 | 4.520.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 49.720.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 33.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 33.750.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 45 Paket | 45 Paket | 33.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.750.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 33.750.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 140.150.000,00 | 107.639.000,00 | 74.084.000,00 | -66.066.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 140.150.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 5.960.000,00 | 5.960.000,00 | -40.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.240.000,00 | 25.134.000,00 | 23.234.000,00 | -2.006.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.240.000,00 | KECAMATAN BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 13.925.000,00 | -13.575.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 27.500.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 76.410.000,00 | 44.045.000,00 | 25.965.000,00 | -50.445.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 76.410.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 250.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 185.550.000,00 | 101.400.000,00 | 101.400.000,00 | -84.150.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 185.550.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 173.550.000,00 | 89.400.000,00 | 89.400.000,00 | -84.150.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 173.550.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 28.300.000,00 | 13.211.000,00 | 26.066.000,00 | -2.234.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 28.300.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 25.300.000,00 | 10.211.000,00 | 23.066.000,00 | -2.234.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.300.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 394.650.000,00 | 388.750.000,00 | 376.750.000,00 | 0,00 | | | | | | | 394.650.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 382.450.000,00 | 377.950.000,00 | 365.950.000,00 | -16.500.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 382.450.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 292.450.000,00 | 292.450.000,00 | 292.450.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 292.450.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 12.200.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | -1.400.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERTAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 12.200.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i> | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 3.100.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | -175.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.100.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.100.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | -175.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.100.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | -1.050.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 327.200.000,00 | 281.375.000,00 | 259.600.000,00 | 0,00 | | | | | | | 327.200.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 127.200.000,00 | 76.875.000,00 | 55.100.000,00 | -72.100.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 127.200.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 47.150.000,00 | 45.150.000,00 | 45.150.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 47.150.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 80.050.000,00 | 31.725.000,00 | 9.950.000,00 | -70.100.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 80.050.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 4.600.000,00 | 3.825.000,00 | 3.825.000,00 | 0,00 | | | | | | | 4.600.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 4.600.000,00 | 3.825.000,00 | 3.825.000,00 | -775.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 4.600.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.600.000,00 | 3.825.000,00 | 3.825.000,00 | -775.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.600.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 193.050.000,00 | 166.775.000,00 | 109.250.000,00 | 0,00 | | | | | | | 193.050.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 193.050.000,00 | 166.775.000,00 | 109.250.000,00 | -83.800.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 193.050.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | | | | 300 Orang | 300 Orang | 100.050.000,00 | 73.925.000,00 | 63.300.000,00 | -36.750.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.050.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i> | | | | 75 Orang | 75 Orang | 4.600.000,00 | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | -150.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 4.600.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 200 Orang | 200 Orang | 88.400.000,00 | 88.400.000,00 | 41.500.000,00 | -46.900.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 88.400.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 22.400.000,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | 0,00 | | | | | | | 22.400.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 22.400.000,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | -17.220.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 22.400.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 22.400.000,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | -17.220.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 22.400.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | KELURAHAN BONTOA | | | | | | | 4.592.377.203,00 | 4.010.401.302,00 | 4.008.401.302,00 | -583.975.901,00 | | | | | | | 4.592.377.203,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.592.377.203,00 | 4.010.401.302,00 | 4.008.401.302,00 | -583.975.901,00 | | | | | | | 4.592.377.203,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.592.377.203,00 | 4.010.401.302,00 | 4.008.401.302,00 | -583.975.901,00 | | | | | | | 4.592.377.203,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 394.650.000,00 | 388.750.000,00 | 376.750.000,00 | 0,00 | | | | | | | 394.650.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 382.450.000,00 | 377.950.000,00 | 365.950.000,00 | -16.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 382.450.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 327.200.000,00 | 281.375.000,00 | 259.600.000,00 | 0,00 | | | | | | | 327.200.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 4.500.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 200.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 5 Unit | 5 Unit | 200.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | KECAMATAN TURIKALE | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 9.308.633.025,00 | 8.979.993.742,00 | 8.741.965.742,00 | 687.956.975,00 | | | | | | | 9.996.590.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 21.000.000,00 | 10.822.000,00 | 14.027.000,00 | -6.973.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 21.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | -910.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.081.000,00 | 2.081.000,00 | -919.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 1.030.000,00 | 2.010.000,00 | -990.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.081.000,00 | 2.081.000,00 | -919.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 1.280.000,00 | 2.165.000,00 | -835.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 1.030.000,00 | 1.800.000,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.000.000,00 | 1.230.000,00 | 1.800.000,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.501.413.025,00 | 8.764.265.742,00 | 8.564.265.742,00 | 62.852.717,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 9.096.970.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 118 Orang/ bulan | 118 Orang/ bulan | 8.404.443.025,00 | 8.712.425.742,00 | 8.512.425.742,00 | 107.982.717,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.000.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 90.970.000,00 | 51.840.000,00 | 51.840.000,00 | -39.130.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.970.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 340.500.000,00 | 99.266.000,00 | 73.318.000,00 | -267.182.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 370.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 2.677.000,00 | 2.593.000,00 | -7.407.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 17 Paket | 17 Paket | 20.000.000,00 | 7.188.000,00 | 3.726.000,00 | -16.274.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 60.000.000,00 | 28.934.000,00 | 17.929.000,00 | -42.071.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 70.000.000,00 | 23.100.000,00 | 35.275.000,00 | -34.725.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 177.350.000,00 | 37.367.000,00 | 13.795.000,00 | -163.555.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 71.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -71.300.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 61.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -61.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 299.420.000,00 | 78.240.000,00 | 76.700.000,00 | -222.720.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 313.620.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.620.000,00 | 11.640.000,00 | 10.100.000,00 | -3.520.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 13.620.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 285.800.000,00 | 66.600.000,00 | 66.600.000,00 | -219.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 45.000.000,00 | 19.400.000,00 | 13.655.000,00 | -31.345.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 45.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelithara | | | | 24 Unit | 24 Unit | 30.000.000,00 | 16.000.000,00 | 12.250.000,00 | -17.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 3.400.000,00 | 1.405.000,00 | -13.595.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 2.850.200.000,00 | 2.752.350.000,00 | 2.665.350.000,00 | 314.800.000,00 | | | | | | | 3.165.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 645.000.000,00 | 602.700.000,00 | 517.500.000,00 | -127.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 645.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 4.200.000,00 | 3.000.000,00 | -12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 2.190.200.000,00 | 2.143.200.000,00 | 2.143.200.000,00 | -47.000.000,00 | | | - | - | - | | 2.505.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | - | - | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 84 Laporan | 84 Laporan | 2.185.200.000,00 | 2.143.200.000,00 | 2.143.200.000,00 | -42.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.500.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 6.450.000,00 | 4.650.000,00 | -10.350.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 2.150.000,00 | 1.550.000,00 | -3.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 2.150.000,00 | 1.550.000,00 | -3.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 2.150.000,00 | 1.550.000,00 | -3.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 1.572.795.000,00 | 1.479.722.000,00 | 1.459.600.000,00 | 1.405.205.000,00 | | | | | | | 2.978.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 132.795.000,00 | 45.822.000,00 | 27.100.000,00 | -105.695.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 180.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------------|--------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 70.000.000,00 | 22.050.000,00 | 20.850.000,00 | -49.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 62.795.000,00 | 23.772.000,00 | 6.250.000,00 | -56.545.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 1.440.000.000,00 | 1.433.900.000,00 | 1.432.500.000,00 | -7.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.798.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 10 Lembaga K emasyarak atan | 10 Lembaga K emasyarak atan | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 2.400.000,00 | 1.000.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | -7.650.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | -7.650.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 120.000.000,00 | 44.750.000,00 | 5.900.000,00 | 40.000.000,00 | | | | | | | 160.000.000,00 | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 120.000.000,00 | 44.750.000,00 | 5.900.000,00 | -114.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 160.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 500 Orang | 500 Orang | 50.000.000,00 | 13.900.000,00 | 2.300.000,00 | -47.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 620 Orang | 620 Orang | 60.000.000,00 | 30.850.000,00 | 3.600.000,00 | -56.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | KELURAHAN PETTUADAE | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 2.850.200.000,00 | 2.752.350.000,00 | 2.665.350.000,00 | 314.800.000,00 | | | | | | | 3.165.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 645.000.000,00 | 602.700.000,00 | 517.500.000,00 | -127.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 645.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 1.572.795.000,00 | 1.479.722.000,00 | 1.459.600.000,00 | 1.405.205.000,00 | | | | | | | 2.978.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 1.440.000.000,00 | 1.433.900.000,00 | 1.432.500.000,00 | -7.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.798.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 5 Lembaga Kemasya- katan | 5 Lembaga Kemasyara- katan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 121.000.000,00 | 179.500.000,00 | 179.500.000,00 | 58.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 67.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -42.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 0 | 1 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadæ | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | KELURAHAN RAYA | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | 16.309.590.000,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 2.850.200.000,00 | 2.752.350.000,00 | 2.665.350.000,00 | 314.800.000,00 | | | | | | | 3.165.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 645.000.000,00 | 602.700.000,00 | 517.500.000,00 | -127.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 645.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Raya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 1.572.795.000,00 | 1.479.722.000,00 | 1.459.600.000,00 | 1.405.205.000,00 | | | | | | | 2.978.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 1.440.000.000,00 | 1.433.900.000,00 | 1.432.500.000,00 | -7.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.798.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 5 Lembaga Kemasya- katan | 5 Lembaga Kemasyara- katan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Raya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 5 Unit | 5 Unit | 145.000.000,00 | 179.500.000,00 | 179.500.000,00 | 34.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Raya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 43.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Raya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Raya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | KELURAHAN TAROAD | | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 2.850.200.000,00 | 2.752.350.000,00 | 2.665.350.000,00 | 314.800.000,00 | | | | | | | 3.165.000.000,00 | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 645.000.000,00 | 602.700.000,00 | 517.500.000,00 | -127.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 645.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroad | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 1.572.795.000,00 | 1.479.722.000,00 | 1.459.600.000,00 | 1.405.205.000,00 | | | | | | | 2.978.000.000,00 | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 1.440.000.000,00 | 1.433.900.000,00 | 1.432.500.000,00 | -7.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.798.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | - | 0 0 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroad | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 5 Unit | 5 Unit | 139.000.000,00 | 179.500.000,00 | 179.500.000,00 | 40.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroad | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 49.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -24.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 0 | 1 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroad | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | KELURAHAN ADATONGENG | | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 2.850.200.000,00 | 2.752.350.000,00 | 2.665.350.000,00 | 314.800.000,00 | | | | | | | 3.165.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 645.000.000,00 | 602.700.000,00 | 517.500.000,00 | -127.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 645.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 1.572.795.000,00 | 1.479.722.000,00 | 1.459.600.000,00 | 1.405.205.000,00 | | | | | | | 2.978.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 1.440.000.000,00 | 1.433.900.000,00 | 1.432.500.000,00 | -7.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.798.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | - | 0 0 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 5 Unit | 5 Unit | 145.000.000,00 | 179.500.000,00 | 179.500.000,00 | 34.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 43.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | KELURAHAN TURIKALE | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | 16.309.590.000,00 | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 2.850.200.000,00 | 2.752.350.000,00 | 2.665.350.000,00 | 314.800.000,00 | | | | | | | 3.165.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 645.000.000,00 | 602.700.000,00 | 517.500.000,00 | -127.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 645.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 1.572.795.000,00 | 1.479.722.000,00 | 1.459.600.000,00 | 1.405.205.000,00 | | | | | | | 2.978.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 1.440.000.000,00 | 1.433.900.000,00 | 1.432.500.000,00 | -7.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.798.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | - | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 5 Unit | 5 Unit | 145.000.000,00 | 179.500.000,00 | 179.500.000,00 | 34.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 43.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | KELURAHAN ALLIRITENGGA | | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 2.850.200.000,00 | 2.752.350.000,00 | 2.665.350.000,00 | 314.800.000,00 | | | | | | | 3.165.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 645.000.000,00 | 602.700.000,00 | 517.500.000,00 | -127.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 645.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 1.572.795.000,00 | 1.479.722.000,00 | 1.459.600.000,00 | 1.405.205.000,00 | | | | | | | 2.978.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 1.440.000.000,00 | 1.433.900.000,00 | 1.432.500.000,00 | -7.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.798.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 5 Lembaga Kemasya- katan | 5 Lembaga Kemasya- katan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 5 Unit | 5 Unit | 145.000.000,00 | 179.500.000,00 | 179.500.000,00 | 34.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 43.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | KELURAHAN BORIBELLAYYA | | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 13.861.628.025,00 | 13.259.165.742,00 | 12.875.165.742,00 | -986.462.283,00 | | | | | | | 16.309.590.000,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 2.850.200.000,00 | 2.752.350.000,00 | 2.665.350.000,00 | 314.800.000,00 | | | | | | | 3.165.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 645.000.000,00 | 602.700.000,00 | 517.500.000,00 | -127.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 645.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 1.572.795.000,00 | 1.479.722.000,00 | 1.459.600.000,00 | 1.405.205.000,00 | | | | | | | 2.978.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 1.440.000.000,00 | 1.433.900.000,00 | 1.432.500.000,00 | -7.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.798.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 5 Lembaga Kemasya katan | 5 Lembaga Kemasya katan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 5 Unit | 5 Unit | 115.000.000,00 | 179.500.000,00 | 179.500.000,00 | 64.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 73.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -48.000.000,00 | - | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | KECAMATAN MARUSU | | | | | | | | 3.429.092.856,00 | 2.927.140.873,00 | 2.907.140.873,00 | -521.951.983,00 | | | | | 3.829.700.000,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 3.429.092.856,00 | 2.927.140.873,00 | 2.907.140.873,00 | -521.951.983,00 | | | | | | | 3.829.700.000,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 3.429.092.856,00 | 2.927.140.873,00 | 2.907.140.873,00 | -521.951.983,00 | | | | | | | 3.829.700.000,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 3.194.092.856,00 | 2.782.435.873,00 | 2.811.920.873,00 | 376.607.144,00 | | | | | | | 3.570.700.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.460.000,00 | 5.400.000,00 | 2.700.000,00 | -7.760.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 13.700.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.500.000,00 | 750.000,00 | 300.000,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 990.000,00 | 840.000,00 | 540.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 990.000,00 | 840.000,00 | 540.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 990.000,00 | 840.000,00 | 540.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 990.000,00 | 840.000,00 | 540.000,00 | -450.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.600.000,00 | 780.000,00 | 180.000,00 | -2.420.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.400.000,00 | 510.000,00 | 60.000,00 | -2.340.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.700.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.727.222.856,00 | 2.585.422.873,00 | 2.665.422.873,00 | -61.799.983,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 3.060.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 2.659.682.856,00 | 2.526.142.873,00 | 2.606.142.873,00 | -53.539.983,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 67.540.000,00 | 59.280.000,00 | 59.280.000,00 | -8.260.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 30.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 190.650.000,00 | 100.453.000,00 | 70.638.000,00 | -120.012.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 203.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 3.585.000,00 | 3.585.000,00 | -1.415.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 7.411.000,00 | 6.861.000,00 | -3.139.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 40.300.000,00 | 26.245.000,00 | 22.461.000,00 | -17.839.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 41.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 27.500.000,00 | 24.690.000,00 | 18.240.000,00 | -9.260.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 627 Laporan | 627 Laporan | 88.850.000,00 | 38.522.000,00 | 19.491.000,00 | -69.359.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 70.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 6 Unit | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 129.760.000,00 | 59.160.000,00 | 59.160.000,00 | -70.600.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 139.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 113.200.000,00 | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | -55.600.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 120.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 41.000.000,00 | 21.000.000,00 | 14.000.000,00 | -27.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 30.000.000,00 | 16.000.000,00 | 9.000.000,00 | -21.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 11.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 24.020.000,00 | 13.600.000,00 | 9.850.000,00 | 2.980.000,00 | | | | | | | 27.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 7.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | -2.800.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 7.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 17.020.000,00 | 9.400.000,00 | 5.650.000,00 | -11.370.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 19.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.100.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | -5.100.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 5.100.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.820.000,00 | 4.800.000,00 | 3.350.000,00 | -3.470.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 80.000.000,00 | 40.445.000,00 | 25.540.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | | | 90.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 80.000.000,00 | 40.445.000,00 | 25.540.000,00 | -54.460.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | 23.540.000,00 | 21.950.000,00 | -13.050.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 45.000.000,00 | 16.905.000,00 | 3.590.000,00 | -41.410.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 8.500.000,00 | 3.750.000,00 | 1.050.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 8.500.000,00 | 3.750.000,00 | 1.050.000,00 | -7.450.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 9.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.500.000,00 | 3.750.000,00 | 1.050.000,00 | -7.450.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 115.000.000,00 | 82.150.000,00 | 56.400.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | | | 125.000.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 115.000.000,00 | 82.150.000,00 | 56.400.000,00 | -58.600.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 125.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | | | | 600 Orang | 600 Orang | 55.000.000,00 | 30.750.000,00 | 15.000.000,00 | -40.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i> | | | | 600 Orang | 600 Orang | 60.000.000,00 | 51.400.000,00 | 41.400.000,00 | -18.600.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 7.480.000,00 | 4.760.000,00 | 2.380.000,00 | 520.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 7.480.000,00 | 4.760.000,00 | 2.380.000,00 | -5.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i> | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7.480.000,00 | 4.760.000,00 | 2.380.000,00 | -5.100.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU | |
| | | KECAMATAN LAU | | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 6.873.448.337,00 | 6.529.922.713,00 | 6.232.782.713,00 | -6.873.448.337,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 9.740.000,00 | 5.181.000,00 | 0,00 | -9.740.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.525.000,00 | 1.525.000,00 | 0,00 | -1.525.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.600.000,00 | 636.000,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 750.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.625.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | -1.625.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1.700.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | -1.700.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 1.790.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | -1.790.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 750.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.430.746.737,00 | 6.326.343.713,00 | 6.035.343.713,00 | -395.403.024,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 6.383.226.737,00 | 6.274.503.713,00 | 5.983.503.713,00 | -399.723.024,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 47.520.000,00 | 51.840.000,00 | 51.840.000,00 | 4.320.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 191.241.600,00 | 88.012.000,00 | 87.053.000,00 | -104.188.600,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 8.215.000,00 | 1.567.000,00 | 885.000,00 | -7.330.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 23.006.500,00 | 5.588.500,00 | 4.103.000,00 | -18.903.500,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 29.885.100,00 | 15.072.500,00 | 14.765.000,00 | -15.120.100,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 15.135.000,00 | 5.600.000,00 | 4.930.000,00 | -10.205.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 27.000.000,00 | 18.000.000,00 | 26.400.000,00 | -600.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 88.000.000,00 | 42.184.000,00 | 35.970.000,00 | -52.030.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 192.720.000,00 | 74.686.000,00 | 74.686.000,00 | -118.034.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 10.950.000,00 | 9.286.000,00 | 9.286.000,00 | -1.664.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 181.770.000,00 | 65.400.000,00 | 65.400.000,00 | -116.370.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 49.000.000,00 | 35.700.000,00 | 35.700.000,00 | -13.300.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 34.000.000,00 | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 | -13.300.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 1.686.075.000,00 | 1.669.300.000,00 | 1.616.450.000,00 | -1.686.075.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 1.314.000.000,00 | 1.320.000.000,00 | 1.320.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 1.314.000.000,00 | 1.320.000.000,00 | 1.320.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 12.075.000,00 | 7.300.000,00 | 2.450.000,00 | -9.625.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 4.725.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | -4.725.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 3.675.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | -3.675.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 3.675.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | -1.225.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 882.983.000,00 | 874.051.000,00 | 881.754.844,00 | -882.983.000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 82.983.000,00 | 56.051.000,00 | 43.751.000,00 | -39.232.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 45.883.000,00 | 35.501.000,00 | 35.501.000,00 | -10.382.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 37.100.000,00 | 20.550.000,00 | 8.250.000,00 | -28.850.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 4.825.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | -4.825.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 4.825.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | -4.825.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 4.825.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | -4.825.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 173.125.000,00 | 130.550.000,00 | 58.750.000,00 | -173.125.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 173.125.000,00 | 130.550.000,00 | 58.750.000,00 | -114.375.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kabangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 0 Orang | 0 Orang | 79.150.000,00 | 55.400.000,00 | 58.750.000,00 | -20.400.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 0 Orang | 0 Orang | 5.050.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | -5.050.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 0 Orang | 0 Orang | 88.925.000,00 | 72.400.000,00 | 0,00 | -88.925.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 8.650.000,00 | 2.620.000,00 | 1.260.000,00 | -8.650.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 8.650.000,00 | 2.620.000,00 | 1.260.000,00 | -7.390.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 8.650.000,00 | 2.620.000,00 | 1.260.000,00 | -7.390.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | KELURAHAN ALLEPOLEA | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 1.686.075.000,00 | 1.669.300.000,00 | 1.616.450.000,00 | -1.686.075.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 360.000.000,00 | 342.000.000,00 | 294.000.000,00 | -66.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Allepolea | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 882.983.000,00 | 874.051.000,00 | 881.754.844,00 | -882.983.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 800.000.000,00 | 818.000.000,00 | 838.003.844,00 | 38.003.844,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | | | | 0 Unit | 0 Unit | 200.000.000,00 | 204.500.000,00 | 224.503.844,00 | 24.503.844,00 | Kab. Maros, Lau, Allepolea | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | KELURAHAN SOREANG | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 1.686.075.000,00 | 1.669.300.000,00 | 1.616.450.000,00 | -1.686.075.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 360.000.000,00 | 342.000.000,00 | 294.000.000,00 | -66.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Soreang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 882.983.000,00 | 874.051.000,00 | 881.754.844,00 | -882.983.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 800.000.000,00 | 818.000.000,00 | 838.003.844,00 | 38.003.844,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | | | | 0 Unit | 0 Unit | 200.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Soreang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | KELURAHAN MATTIRODECENG | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 1.686.075.000,00 | 1.669.300.000,00 | 1.616.450.000,00 | -1.686.075.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 360.000.000,00 | 342.000.000,00 | 294.000.000,00 | -66.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Mattirodeceng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 882.983.000,00 | 874.051.000,00 | 881.754.844,00 | -882.983.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 800.000.000,00 | 818.000.000,00 | 838.003.844,00 | 38.003.844,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 0 Unit | 0 Unit | 200.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Mattirodeceng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | KELURAHAN MACCINI BAJI | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 9.629.106.337,00 | 9.209.993.713,00 | 8.790.997.557,00 | -838.108.780,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 1.686.075.000,00 | 1.669.300.000,00 | 1.616.450.000,00 | -1.686.075.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 360.000.000,00 | 342.000.000,00 | 294.000.000,00 | -66.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 882.983.000,00 | 874.051.000,00 | 881.754.844,00 | -882.983.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 800.000.000,00 | 818.000.000,00 | 838.003.844,00 | 38.003.844,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 0 Unit | 0 Unit | 200.000.000,00 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | 4.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | KECAMATAN CENRANA | | | | | | | 3.116.077.114,00 | 2.562.789.632,00 | 2.667.789.632,00 | -448.287.482,00 | | | | | | | 3.119.977.114,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 3.116.077.114,00 | 2.562.789.632,00 | 2.667.789.632,00 | -448.287.482,00 | | | | | | | 3.119.977.114,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 3.116.077.114,00 | 2.562.789.632,00 | 2.667.789.632,00 | -448.287.482,00 | | | | | | | 3.119.977.114,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 2.813.107.114,00 | 2.358.201.632,00 | 2.510.289.632,00 | 0,00 | | | | | | | 2.813.107.114,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 18.200.000,00 | 7.540.000,00 | 7.540.000,00 | -10.660.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 18.200.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.400.000,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | -1.910.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.400.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | -1.150.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | -1.150.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | -1.150.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | -1.150.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.400.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | -2.050.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.400.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.400.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | -2.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.400.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.206.319.114,00 | 2.036.998.632,00 | 2.241.998.632,00 | 35.679.518,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.166.319.114,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Dokumen Orang/bula n | 14 Dokumen Orang/bula n | 2.155.499.114,00 | 1.986.358.632,00 | 2.191.358.632,00 | 35.859.518,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.115.499.114,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.820.000,00 | 50.640.000,00 | 50.640.000,00 | -180.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.820.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 241.538.000,00 | 139.793.000,00 | 110.881.000,00 | -130.657.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 241.538.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.400.000,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | -1.350.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.400.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.280.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -5.280.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.280.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 42.770.000,00 | 41.217.000,00 | 36.203.000,00 | -6.567.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 42.770.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 68.250.000,00 | 35.380.000,00 | 35.380.000,00 | -32.870.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 68.250.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 109.838.000,00 | 49.146.000,00 | 25.248.000,00 | -84.590.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 109.838.000,00 | KECAMATAN CENRANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 160.500.000,00 | 48.000.000,00 | 24.000.000,00 | -136.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 200.500.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 75.000.000,00 | 48.000.000,00 | 24.000.000,00 | -51.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 115.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 85.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -85.500.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 85.500.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 123.070.000,00 | 75.240.000,00 | 75.240.000,00 | -47.830.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 123.070.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.640.000,00 | 11.640.000,00 | 11.640.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.640.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 111.430.000,00 | 63.600.000,00 | 63.600.000,00 | -47.830.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 111.430.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 63.480.000,00 | 50.630.000,00 | 50.630.000,00 | -12.850.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 63.480.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 22 unit Unit | 22 unit Unit | 50.900.000,00 | 46.400.000,00 | 46.400.000,00 | -4.500.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.900.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 12.580.000,00 | 4.230.000,00 | 4.230.000,00 | -8.350.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 12.580.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 40.525.000,00 | 16.100.000,00 | 14.000.000,00 | 3.900.000,00 | | | | | | | 44.425.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 10.250.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -6.250.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 10.250.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.250.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -6.250.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.250.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 7.925.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -4.925.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 7.925.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.925.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -4.925.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.925.000,00 | KECAMATAN CENRANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 22.350.000,00 | 9.100.000,00 | 7.000.000,00 | -15.350.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 26.250.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.050.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -5.050.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.050.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.200.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | -6.200.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.200.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.100.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -4.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 74.295.000,00 | 57.388.000,00 | 31.600.000,00 | 0,00 | | | | | | | 74.295.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 74.295.000,00 | 57.388.000,00 | 31.600.000,00 | -42.695.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 74.295.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 37.950.000,00 | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | -11.350.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 37.950.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 36.345.000,00 | 30.788.000,00 | 5.000.000,00 | -31.345.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 36.345.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 8.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 8.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -5.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -5.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 168.150.000,00 | 119.400.000,00 | 105.400.000,00 | 0,00 | | | | | | | 168.150.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 168.150.000,00 | 119.400.000,00 | 105.400.000,00 | -62.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 168.150.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 400 Orang | 400 Orang | 81.750.000,00 | 61.350.000,00 | 50.350.000,00 | -31.400.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 81.750.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Pembinaan (Birtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 150 Orang | 150 Orang | 7.900.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | -7.900.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.900.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 450 Orang | 450 Orang | 70.500.000,00 | 55.050.000,00 | 55.050.000,00 | -15.450.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 70.500.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 12.000.000,00 | 8.700.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 12.000.000,00 | 8.700.000,00 | 3.500.000,00 | -8.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 7 0 | 7 0 | 12.000.000,00 | 8.700.000,00 | 3.500.000,00 | -8.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | KECAMATAN MONCONGLOE | | | | | | | | 3.291.320.926,00 | 2.763.566.313,00 | 2.448.366.313,00 | -842.954.613,00 | | | | | | 3.293.857.926,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 3.291.320.926,00 | 2.763.566.313,00 | 2.448.366.313,00 | -842.954.613,00 | | | | | | | 3.293.857.926,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 3.291.320.926,00 | 2.763.566.313,00 | 2.448.366.313,00 | -842.954.613,00 | | | | | | | 3.293.857.926,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.941.115.926,00 | 2.603.416.313,00 | 2.309.256.313,00 | 2.535.000,00 | | | | | | | 2.943.650.926,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 17.500.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | -3.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | APARATUR | | 17.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -500.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -500.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -500.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -500.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -500.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -500.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -500.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.434.452.826,00 | 2.294.793.313,00 | 2.079.593.313,00 | -354.859.513,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 2.434.450.926,00 | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 2.381.322.826,00 | 2.242.953.313,00 | 2.027.753.313,00 | -353.569.513,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.381.320.926,00 | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 53.130.000,00 | 51.840.000,00 | 51.840.000,00 | -1.290.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 53.130.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 16.070.000,00 | 6.937.000,00 | -23.063.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 60 Paket | 60 Paket | 15.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | 7.070.000,00 | 6.937.000,00 | -8.063.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 195.013.500,00 | 132.378.000,00 | 96.576.000,00 | -98.437.500,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 198.050.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 7.000.000,00 | 4.967.000,00 | 4.967.000,00 | -2.033.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 15 Paket | 15 Paket | 8.975.500,00 | 5.083.000,00 | 5.083.000,00 | -3.892.500,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 100 Paket | 100 Paket | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.000.000,00 | 45.000.000,00 | 49.000.000,00 | -11.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 104.038.000,00 | 67.328.000,00 | 29.526.000,00 | -74.512.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 104.050.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 55.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 55.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 55.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 162.600.000,00 | 95.150.000,00 | 95.150.000,00 | -67.450.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 162.600.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 13.400.000,00 | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | -1.650.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 13.400.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 149.200.000,00 | 83.400.000,00 | 83.400.000,00 | -65.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 149.200.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 46.549.600,00 | 26.025.000,00 | 17.000.000,00 | -29.549.600,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 46.550.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 5 Unit | 46.549.600,00 | 26.025.000,00 | 17.000.000,00 | -29.549.600,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 46.550.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Moncongloe | | | | 100 100 persen Persen | 100 100 persen Persen | 87.365.000,00 | 48.400.000,00 | 35.410.000,00 | 0,00 | | | | | | | 87.365.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 30.000.000,00 | 16.500.000,00 | 11.910.000,00 | -18.090.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | 10.500.000,00 | 6.910.000,00 | -13.090.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 29.425.000,00 | 18.300.000,00 | 14.100.000,00 | -15.325.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 29.425.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.400.000,00 | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | -4.300.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 18.400.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.025.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 6.025.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 27.940.000,00 | 13.600.000,00 | 9.400.000,00 | -18.540.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 27.940.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | -9.200.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 9.200.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 9.200.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.540.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | -4.340.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 9.540.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 101.300.000,00 | 29.550.000,00 | 24.550.000,00 | 0,00 | | | | | | | 101.300.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 101.300.000,00 | 29.550.000,00 | 24.550.000,00 | -76.750.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 101.300.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 19.550.000,00 | 24.550.000,00 | -25.450.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 51.300.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -51.300.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 51.300.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | - | - | | 8.700.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | | | | | | | 8.700.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritiban Umum | - | | | - | - | | 8.700.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | -3.100.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 8.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.700.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | -3.100.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 8.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | - | - | | 104.700.000,00 | 75.550.000,00 | 69.050.000,00 | 0,00 | | | | | | | 104.700.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | - | - | | 104.700.000,00 | 75.550.000,00 | 69.050.000,00 | -35.650.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 104.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 800 Orang | 800 Orang | 51.000.000,00 | 36.050.000,00 | 36.050.000,00 | -14.950.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 51.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 80 Orang | 80 Orang | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.950.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 2.950.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 50.750.000,00 | 39.500.000,00 | 33.000.000,00 | -17.750.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 50.750.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | - | - | | 48.140.000,00 | 1.050.000,00 | 4.500.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | 48.142.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | - | - | | 48.140.000,00 | 1.050.000,00 | 4.500.000,00 | -43.640.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 48.142.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | 1.050.000,00 | 4.500.000,00 | -5.500.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.140.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 13.142.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | | KECAMATAN TOMPOBULU | | | | | | | 3.035.209.412,00 | 2.955.462.943,00 | 2.955.462.943,00 | -79.746.469,00 | | | | | | | 3.466.047.893,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 3.035.209.412,00 | 2.955.462.943,00 | 2.955.462.943,00 | -79.746.469,00 | | | | | | | 3.466.047.893,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 3.035.209.412,00 | 2.955.462.943,00 | 2.955.462.943,00 | -79.746.469,00 | | | | | | | 3.466.047.893,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.728.684.412,00 | 2.794.142.943,00 | 2.859.162.943,00 | 430.838.481,00 | | | | | | | 3.159.522.893,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 8.400.000,00 | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | -5.940.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | ASN Kecamatan Tompobulu | | 8.400.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.200.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | -585.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | -585.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | -585.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | -585.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.125.844.412,00 | 2.608.543.943,00 | 2.708.543.943,00 | 582.699.531,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.556.682.893,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | 2.068.314.412,00 | 2.556.703.943,00 | 2.656.703.943,00 | 588.389.531,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.499.152.893,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 57.530.000,00 | 51.840.000,00 | 51.840.000,00 | -5.690.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 57.530.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 246.939.000,00 | 96.489.000,00 | 61.509.000,00 | -185.430.000,00 | | | - | - | - | | 246.939.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 4.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.332.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | -4.832.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.332.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 5 Paket | 5 Paket | 27.063.000,00 | 14.774.000,00 | 14.774.000,00 | -12.289.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 27.063.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 7 Paket | 7 Paket | 9.500.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | -9.500.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 9.500.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i> | | | | 1000 Laporan | 1000 Laporan | 71.500.000,00 | 20.855.000,00 | 17.035.000,00 | -54.465.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 71.500.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 125.344.000,00 | 50.610.000,00 | 25.200.000,00 | -100.144.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 125.344.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 170.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 9 Unit | 9 Unit | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 170.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 134.820.000,00 | 61.150.000,00 | 61.150.000,00 | -73.670.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 134.820.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 10.320.000,00 | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 | -770.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.320.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 124.500.000,00 | 51.600.000,00 | 51.600.000,00 | -72.900.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 124.500.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 42.681.000,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | -17.181.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 42.681.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 3 Unit | 3 Unit | 33.800.000,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | -8.300.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 33.800.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 2 Unit | 2 Unit | 8.881.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.881.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.881.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 34.575.000,00 | 10.100.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | | | | | | | 34.575.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 8.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.550.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 8.550.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.550.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 8.550.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 6.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.025.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 6.025.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.025.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 6.025.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 10.100.000,00 | 3.450.000,00 | -16.550.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 6.025.000,00 | 5.050.000,00 | 3.450.000,00 | -2.575.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 6.025.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.950.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 5.950.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.025.000,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | -8.025.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 8.025.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 77.275.000,00 | 50.720.000,00 | 42.400.000,00 | 0,00 | | | | | | | 77.275.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 77.275.000,00 | 50.720.000,00 | 42.400.000,00 | -34.875.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 77.275.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 37.200.000,00 | 33.995.000,00 | 29.845.000,00 | -7.355.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 37.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.075.000,00 | 16.725.000,00 | 12.555.000,00 | -27.520.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 40.075.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 6.000.000,00 | 4.950.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 6.000.000,00 | 4.950.000,00 | 4.350.000,00 | -1.650.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 4.950.000,00 | 4.350.000,00 | -1.650.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 175.925.000,00 | 88.750.000,00 | 43.600.000,00 | 0,00 | | | | | | | 175.925.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 175.925.000,00 | 88.750.000,00 | 43.600.000,00 | -132.325.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 175.925.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 1200 Orang | 1200 Orang | 78.350.000,00 | 46.350.000,00 | 35.350.000,00 | -43.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 78.350.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 100 Orang | 100 Orang | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.050.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 6.050.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 500 Orang | 500 Orang | 91.525.000,00 | 42.400.000,00 | 8.250.000,00 | -83.275.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 91.525.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 12.750.000,00 | 6.800.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | | | | | | | 12.750.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 12.750.000,00 | 6.800.000,00 | 2.500.000,00 | -10.250.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 12.750.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 12.750.000,00 | 6.800.000,00 | 2.500.000,00 | -10.250.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 12.750.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | KECAMATAN SIMBANG | | | | | | | 766.358.000,00 | 2.824.827.811,00 | 2.653.827.811,00 | 1.887.469.811,00 | | | | | | 3.039.871.988,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 766.358.000,00 | 2.824.827.811,00 | 2.653.827.811,00 | 1.887.469.811,00 | | | | | | | 3.039.871.988,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 766.358.000,00 | 2.824.827.811,00 | 2.653.827.811,00 | 1.887.469.811,00 | | | | | | | 3.039.871.988,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 470.813.000,00 | 2.694.377.811,00 | 2.574.452.811,00 | 2.347.313.988,00 | | | | | | | 2.818.126.988,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.400.000,00 | 3.285.000,00 | 3.285.000,00 | -5.115.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa Kab. Maros, Simbang, Samangki | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.200.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | -315.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 49.720.000,00 | 2.464.384.811,00 | 2.393.384.811,00 | 2.343.664.811,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 2.637.154.988,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | - | 0 0 | 0,00 | 2.410.144.811,00 | 2.339.144.811,00 | 2.339.144.811,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.587.434.988,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 49.720.000,00 | 54.240.000,00 | 54.240.000,00 | 4.520.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa Kab. Maros, Simbang, Samangki | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 49.720.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.750.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 7.750.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 31 Paket | 31 Paket | 7.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.750.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.750.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 193.223.000,00 | 121.628.000,00 | 77.703.000,00 | -115.520.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 7.382.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 7.382.000,00 | 2.508.000,00 | 2.508.000,00 | -4.874.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.382.000,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 3.438.500,00 | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | -1.716.500,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 35.806.500,00 | 25.950.000,00 | 17.664.000,00 | -18.142.500,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 10.500.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | -4.300.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 750 Laporan | 750 Laporan | 34.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | -12.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 352 Laporan | 352 Laporan | 102.096.000,00 | 63.248.000,00 | 27.609.000,00 | -74.487.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 69.000.000,00 | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | -39.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 69.000.000,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 7 Unit | 7 Unit | 69.000.000,00 | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | -39.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 69.000.000,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 106.720.000,00 | 56.680.000,00 | 56.680.000,00 | -50.040.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 96.840.000,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1000 Laporan | 1000 Laporan | 9.880.000,00 | 6.880.000,00 | 6.880.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 96.840.000,00 | 49.800.000,00 | 49.800.000,00 | -47.040.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 96.840.000,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 36.000.000,00 | 18.900.000,00 | 13.900.000,00 | -22.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 12 Unit | 31.000.000,00 | 13.900.000,00 | 8.900.000,00 | -22.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 21.900.000,00 | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | | | | | | | 21.900.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 7.200.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | -4.150.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 7.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 0 | 1 0 | 7.200.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | -4.150.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 14.700.000,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | -10.850.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 14.700.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.300.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.200.000,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | -1.350.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 115.445.000,00 | 32.050.000,00 | 30.675.000,00 | 0,00 | | | | | | | 115.445.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 115.445.000,00 | 32.050.000,00 | 30.675.000,00 | -84.770.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 115.445.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 55.600.000,00 | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | -29.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 55.600.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 59.845.000,00 | 5.450.000,00 | 4.075.000,00 | -55.770.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 59.845.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 5.200.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | | | | | | | 5.200.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 5.200.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | -2.150.000,00 | | | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | - | | 5.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 5.200.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | -2.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. PENINGKATAN KETAHANAN KETAHANAN EKOLOGI, KETAHANAN BENCANA DAN KELESTRAIAN LINGKUNGAN | | | 5.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 148.100.000,00 | 85.650.000,00 | 37.350.000,00 | -68.900.000,00 | | | | | | | 79.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 148.100.000,00 | 85.650.000,00 | 37.350.000,00 | -110.750.000,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 79.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2150 Orang | 2150 Orang | 72.000.000,00 | 45.450.000,00 | 27.950.000,00 | -44.050.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 72.000.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 200 Orang | 200 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 7.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 400 Orang | 400 Orang | 68.900.000,00 | 40.200.000,00 | 9.400.000,00 | -59.500.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 4.900.000,00 | 2.800.000,00 | 1.400.000,00 | -4.900.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 4.900.000,00 | 2.800.000,00 | 1.400.000,00 | -3.500.000,00 | | | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | - | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 4.900.000,00 | 2.800.000,00 | 1.400.000,00 | -3.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 0,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | | KECAMATAN MANDAI | | | | | | | 7.717.773.049,00 | 7.195.664.059,00 | 6.820.664.059,00 | -897.108.990,00 | | | | | | | 7.731.544.049,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 7.717.773.049,00 | 7.195.664.059,00 | 6.820.664.059,00 | -897.108.990,00 | | | | | | | 7.731.544.049,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 7.717.773.049,00 | 7.195.664.059,00 | 6.820.664.059,00 | -897.108.990,00 | | | | | | | 7.731.544.049,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 5.592.373.049,00 | 5.185.031.059,00 | 4.896.814.059,00 | 12.236.000,00 | | | | | | | 5.604.609.049,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 35.000.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | -27.200.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | -3.850.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | -3.850.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | -3.850.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | -3.850.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | -3.850.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | -4.450.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -3.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.624.706.049,00 | 4.975.792.059,00 | 4.724.792.059,00 | 100.086.010,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 4.624.706.049,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 60 Orang/bulan | 60 Orang/bulan | 4.574.986.049,00 | 4.923.952.059,00 | 4.672.952.059,00 | 97.966.010,00 | Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.574.986.049,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 49.720.000,00 | 51.840.000,00 | 51.840.000,00 | 2.120.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 49.720.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 200.167.000,00 | 105.964.000,00 | 71.802.000,00 | -128.365.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 207.103.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 8 Paket | 5.064.000,00 | 2.083.500,00 | 2.083.500,00 | -2.980.500,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 5.587.000,00 | 5.587.000,00 | -4.413.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 15.000.000,00 | 15.697.500,00 | 10.573.500,00 | -4.426.500,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.700.000,00 | -20.300.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 130.103.000,00 | 62.596.000,00 | 33.858.000,00 | -96.245.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 130.103.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 488.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.500.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 488.500.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 45 Unit | 45 Unit | 488.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -488.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 488.500.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 207.400.000,00 | 76.920.000,00 | 76.920.000,00 | -130.480.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 207.700.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.200.000,00 | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 | -880.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 8.500.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 199.200.000,00 | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | -129.600.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 199.200.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 36.600.000,00 | 18.555.000,00 | 15.500.000,00 | -21.100.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 41.600.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 39 Unit | 39 Unit | 26.600.000,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | -16.100.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 26.600.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 8.055.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 1.476.625.000,00 | 1.456.820.000,00 | 1.418.400.000,00 | 160.000,00 | | | | | | | 1.476.785.000,00 | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 191.995.000,00 | 176.000.000,00 | 147.000.000,00 | -44.995.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 191.995.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.995.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -11.995.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 11.995.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 1.271.400.000,00 | 1.271.400.000,00 | 1.271.400.000,00 | 0,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.271.400.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.271.400.000,00 | 1.271.400.000,00 | 1.271.400.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.271.400.000,00 | KECAMATAN MANDAI | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 13.230.000,00 | 9.420.000,00 | 0,00 | -13.230.000,00 | | | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | - | | 13.390.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.140.000,00 | 3.140.000,00 | 0,00 | -4.140.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI EKONOMI WILAYAH | | | 4.140.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.095.000,00 | 3.140.000,00 | 0,00 | -4.095.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 4.250.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.995.000,00 | 3.140.000,00 | 0,00 | -4.995.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 481.770.000,00 | 455.933.000,00 | 435.345.000,00 | 730.000,00 | | | | | | | 482.500.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 81.770.000,00 | 46.933.000,00 | 26.345.000,00 | -55.425.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 82.500.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 54.500.000,00 | 23.405.000,00 | 18.305.000,00 | -36.195.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 54.500.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 27.270.000,00 | 23.528.000,00 | 8.040.000,00 | -19.230.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 28.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | | | | - | - | 5.980.000,00 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 5.980.000,00 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | -2.900.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.980.000,00 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | -2.900.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | | | | - | - | 156.025.000,00 | 90.625.000,00 | 67.025.000,00 | 125.000,00 | | | | | | | 156.150.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 156.025.000,00 | 90.625.000,00 | 67.025.000,00 | -89.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 156.150.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 550 Orang | 550 Orang | 89.875.000,00 | 45.000.000,00 | 26.400.000,00 | -63.475.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i> | | | | 800 Orang | 800 Orang | 66.150.000,00 | 45.625.000,00 | 40.625.000,00 | -25.525.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 66.150.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 4.175.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 4.175.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i> | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.000.000,00 | 4.175.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | | KELURAHAN HASANUDDIN | | | | | | | 7.717.773.049,00 | 7.195.664.059,00 | 6.820.664.059,00 | -897.108.990,00 | | | | | | 7.731.544.049,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 7.717.773.049,00 | 7.195.664.059,00 | 6.820.664.059,00 | -897.108.990,00 | | | | | | | 7.731.544.049,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 7.717.773.049,00 | 7.195.664.059,00 | 6.820.664.059,00 | -897.108.990,00 | | | | | | | 7.731.544.049,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 1.476.625.000,00 | 1.456.820.000,00 | 1.418.400.000,00 | 160.000,00 | | | | | | | 1.476.785.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 191.995.000,00 | 176.000.000,00 | 147.000.000,00 | -44.995.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 191.995.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 481.770.000,00 | 455.933.000,00 | 435.345.000,00 | 730.000,00 | | | | | | | 482.500.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 400.000.000,00 | 409.000.000,00 | 409.000.000,00 | 9.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 400.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.350.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 2.350.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | | | | 5 Unit | 5 Unit | 177.000.000,00 | 188.500.000,00 | 188.500.000,00 | 11.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | | | 177.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | | | | 10 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 17.195.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -1.195.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 17.195.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i> | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.455.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | | | 3.455.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | | KELURAHAN BONTOA | | | | | | | 7.717.773.049,00 | 7.195.664.059,00 | 6.820.664.059,00 | -897.108.990,00 | | | | | | 7.731.544.049,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 7.717.773.049,00 | 7.195.664.059,00 | 6.820.664.059,00 | -897.108.990,00 | | | | | | | 7.731.544.049,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 7.717.773.049,00 | 7.195.664.059,00 | 6.820.664.059,00 | -897.108.990,00 | | | | | | | 7.731.544.049,00 | |
| 1. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | | | | - | - | 1.476.625.000,00 | 1.456.820.000,00 | 1.418.400.000,00 | 160.000,00 | | | | | | | 1.476.785.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 191.995.000,00 | 176.000.000,00 | 147.000.000,00 | -44.995.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 191.995.000,00 | KECAMATAN MANDAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | 85.500.000,00 | 73.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | | | | - | - | 481.770.000,00 | 455.933.000,00 | 435.345.000,00 | 730.000,00 | | | | | | | 482.500.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 400.000.000,00 | 409.000.000,00 | 409.000.000,00 | 9.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 400.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 10 Lembaga K emasyarak atan | 10 Lembaga K emasyarak atan | 27.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.611.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Bontoa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 27.611.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 5 Unit | 5 Unit | 154.000.000,00 | 188.500.000,00 | 204.500.000,00 | 50.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KEBERMANFAATAN INFRSTRUKTUR DASAR WILAYAH SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | 154.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 10 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 14.463.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | -14.463.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Bontoa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 14.463.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.926.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.926.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Bontoa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.926.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | 8.443.497.590,00 | 6.381.311.887,00 | 6.580.266.118,00 | -1.863.231.472,00 | | | | | | 8.486.500.000,00 | | |
| | 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | 8.443.497.590,00 | 6.381.311.887,00 | 6.580.266.118,00 | -1.863.231.472,00 | | | | | | | 8.486.500.000,00 | |
| | 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | 8.443.497.590,00 | 6.381.311.887,00 | 6.580.266.118,00 | -1.863.231.472,00 | | | | | | | 8.486.500.000,00 | |
| 1. | 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 3.977.492.729,00 | 3.288.100.340,00 | 3.391.000.571,00 | -135.492.729,00 | | | | | | | 3.842.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 63.879.500,00 | 46.852.100,00 | 24.846.800,00 | -39.032.700,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 70.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.521.500,00 | 3.051.500,00 | 0,00 | -4.521.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.445.500,00 | 2.852.100,00 | 2.852.100,00 | -1.593.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.781.500,00 | 4.781.500,00 | 1.190.000,00 | -3.591.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.693.000,00 | 3.051.500,00 | 2.371.500,00 | -2.321.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.215.500,00 | 4.216.500,00 | 2.334.200,00 | -2.881.300,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.809.500,00 | 23.487.500,00 | 12.854.000,00 | -17.955.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 3.640.000,00 | 2.095.000,00 | -2.905.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.413.000,00 | 1.771.500,00 | 1.150.000,00 | -3.263.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 1 Data | 1 Data | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.01.0012 | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | | 1 Subtansi | 1 Subtansi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.008.002.149,00 | 2.939.692.887,00 | 3.154.542.218,00 | 146.540.069,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 3.201.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 45 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 2.854.122.149,00 | 2.786.163.887,00 | 3.001.013.218,00 | 146.891.069,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 3.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 132.880.000,00 | 144.960.000,00 | 144.960.000,00 | 12.080.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 180.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 2.983.600,00 | 2.983.600,00 | -3.016.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 5.585.400,00 | 5.585.400,00 | -4.414.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 44.438.400,00 | 0,00 | 0,00 | -44.438.400,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.466.500,00 | 0,00 | 0,00 | -39.466.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.971.900,00 | 0,00 | 0,00 | -4.971.900,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 33.015.500,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | -33.015.500,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 35.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 45 Paket | 45 Paket | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.915.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.915.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 552.095.180,00 | 238.655.353,00 | 163.011.553,00 | -389.083.627,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 291.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 5.983.680,00 | 1.929.853,00 | 1.929.853,00 | -4.053.827,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 6.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 178.700.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | -128.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.607.000,00 | 5.607.000,00 | 5.607.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 79.964.500,00 | 4.737.500,00 | 4.737.500,00 | -75.227.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 85.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.075.000,00 | 4.675.000,00 | 1.946.200,00 | -3.128.800,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.000.000,00 | 5.500.000,00 | 3.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 253.715.000,00 | 156.156.000,00 | 85.741.000,00 | -167.974.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 36.062.000,00 | 38.900.000,00 | 38.600.000,00 | 2.538.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 40.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.512.000,00 | 1.950.000,00 | 1.650.000,00 | -1.862.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.950.000,00 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | -1.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 27.600.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 240.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -230.000.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 195.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 25.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 2. | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | - | | | | - | - | 1.902.064.000,00 | 1.406.117.900,00 | 1.231.866.900,00 | -597.564.000,00 | | | | | | | 1.304.500.000,00 | | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | - | | | | - | - | 1.902.064.000,00 | 1.406.117.900,00 | 1.231.866.900,00 | -670.197.100,00 | | | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | - | | 1.304.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | | | | 2 Dokumen Dokumen | 2 Dokumen Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 28.500.000,00 | 27.055.100,00 | 20.000.000,00 | -8.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 28.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 80 Orang | 80 Orang | 15.000.000,00 | 7.859.400,00 | 4.320.000,00 | -10.680.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF | | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 20.000.000,00 | 3.428.400,00 | 3.527.000,00 | -16.473.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | 100 Keluarga | 100 Keluarga | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 132.999.900,00 | 151.600.000,00 | 150.000.000,00 | 17.000.100,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 35.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paskibraka | | | | 130 Orang | 130 Orang | 1.598.564.100,00 | 1.216.175.000,00 | 1.054.019.900,00 | -544.544.200,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 1.100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|------------------------------|--------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 26.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 25.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | 50 Orang | 50 Orang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 3. | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | - | | | | - | - | 1.195.284.261,00 | 901.638.247,00 | 887.456.747,00 | 759.715.739,00 | | | | | | | 1.955.000.000,00 | | | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | - | | | | - | - | 1.195.284.261,00 | 901.638.247,00 | 887.456.747,00 | -307.827.514,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.955.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | |
| | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.700.000,00 | 7.700.000,00 | 6.000.000,00 | -3.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.520.000,00 | -480.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 1.134.954.761,00 | 874.726.747,00 | 874.726.747,00 | -260.228.014,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 1.900.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 75 Orang | 75 Orang | 14.000.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | -14.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.933.000,00 | 4.661.500,00 | 2.210.000,00 | -7.723.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| | 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 21.696.500,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | -21.696.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 4. | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | - | | | | - | - | 79.354.400,00 | 22.563.600,00 | 13.143.500,00 | 5.645.600,00 | | | | | | | 85.000.000,00 | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | - | | | | - | - | 79.354.400,00 | 22.563.600,00 | 13.143.500,00 | -66.210.900,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 85.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.621.500,00 | 6.621.500,00 | 5.700.000,00 | -921.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.472.900,00 | 2.608.600,00 | 0,00 | -9.472.900,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 100 Orang | 100 Orang | 43.460.000,00 | 6.933.500,00 | 6.933.500,00 | -36.526.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 80 Orang | 80 Orang | 9.900.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | -9.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.900.000,00 | 2.700.000,00 | 510.000,00 | -9.390.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | - | | | | - | - | 238.797.100,00 | 174.956.900,00 | 161.215.300,00 | -13.797.100,00 | | | | | | | 225.000.000,00 | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | - | | | | - | - | 238.797.100,00 | 174.956.900,00 | 161.215.300,00 | -77.581.800,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 225.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.027.600,00 | 0,00 | 0,00 | -5.027.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.612.600,00 | 0,00 | 0,00 | -8.612.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 100 Orang | 100 Orang | 165.156.900,00 | 157.216.900,00 | 150.965.300,00 | -14.191.600,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 150.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 100 Orang | 100 Orang | 50.000.000,00 | 13.470.000,00 | 8.740.000,00 | -41.260.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.000.000,00 | 4.270.000,00 | 1.510.000,00 | -8.490.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6. | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | - | | | | - | - | 1.050.505.100,00 | 587.934.900,00 | 895.583.100,00 | 24.494.900,00 | | | | | | | 1.075.000.000,00 | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | | | | - | - | 1.050.505.100,00 | 587.934.900,00 | 895.583.100,00 | -154.922.000,00 | | | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | - | | 1.075.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 6.737.600,00 | 3.010.000,00 | -6.990.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 100 Orang | 100 Orang | 87.736.600,00 | 22.427.600,00 | 16.482.600,00 | -71.254.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 80 Orang | 80 Orang | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.000.000,00 | 9.179.200,00 | 6.900.000,00 | -8.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 912.768.500,00 | 539.590.500,00 | 859.190.500,00 | -53.578.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERPANGKAP PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK | | | 925.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | J U M L A H | | | | | | 1.726.036.847.248,00 | 1.655.120.892.000,00 | 1.653.150.439.239,00 | -72.886.408.009,00 | | | | | | | 1.848.498.223.151,00 | |

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah , yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh stake holder pembangunan, pemerintah daerah sendiri beserta pihak-pihak terkait lainnya. Indikator makro pembangunan secara umum terdiri atas: 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Kemiskinan, 3) Tingkat Pengangguran Terbuka, 4) Gini Ratio; 5) Indeks Pembangunan Manusia; 6) PDRB Perkapita. Berikut gambaran pencapaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Penetapan Perubahan Target Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 6.1
Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan
Penetapan Perubahan Target Indikator Makro Tahun 2025

| NO | INDIKATOR MAKRO | Satuan | CAPAIAN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,79 | 6,24 | 5,08 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 9,32 | 7,14 | 9,08 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,34 | 3,50 | 4,13 |
| 4 | Gini Rasio | Rasio | 0,349 | 0,368 | 0,362 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 74,04 | 73,91 | 74,62 |
| 6 | PDRD Perkapita | Juta/Jiwa | 69,21 | 72,22 | 75,05 |

Sumber : Bapperida Kab.Maros

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selain itu memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan

sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Berikut gambaran pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Penetapan Perubahan Target Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 6.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan
Perubahan Target Indikator Makro Tahun 2025

| No | TOLOK UKUR | SATUAN | CAPAIN REALISAI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|--|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai Indeks | 0.00 | BB (67) | BB (67) |
| 2 | Nilai SAKIP | Nilai Level | A(64.83) | A (80.00) | A (80.00) |
| 3 | Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah | | 0.00 | Sedang | Sedang |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Indeks | A (3.15) | A (3,26) | A (3,26) |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Nilai Indeks | 74.04 | 73,91 | 74,62 |
| 6 | Indeks Pendidikan | Nilai Indeks | 64.36 | 64,97 | 65,01 |
| 7 | Indeks Kesehatan | Nilai Indeks | 82.72 | 76,28 | 80,05 |
| 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan | Nilai Indeks | A(3.77) | A (3,26) | A (3,26) |
| 9 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4.34 | 4,35 | 4,13 |
| 10 | Indeks Pembangunan Gender | Nilai Indeks | 89.50 | 90,58 | 90,58 |
| 11 | Inflasi | Persen | 1.74 | 3,03 | 3,03 |
| 12 | Indeks Harga Konsumen | Nilai Indeks | 106.13 | 100,93 | 100,93 |
| 13 | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar | Nilai Indeks | 0.00 | A(3,26) | A(3,26) |
| 14 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,79 | 6,24 | 5,08 |
| 15 | Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah | Persen | 0.00 | 7,04 | 7,04 |
| 16 | PDRB PerKapita | Juta Rp/jiwa | 69,21 | 72,22 | 75,05 |
| 17 | Angka kemiskinan | Persen | 9.32 | 7,14 | 9,08 |
| 18 | Gini Rasio | Nilai Rasio | 0,349 | 0,368 | 0,362 |
| 19 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Nilai Indeks | A (3.14) | A(3,26) | A(3,26) |
| 20 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai Indeks | 64.72 | 63,87 | 63,87 |
| 21 | Indeks Kualitas Udara | Nilai Indeks | 93.40 | 87,90 | 87,90 |

| No | TOLOK UKUR | SATUAN | CAPAIN REALISAI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 22 | Indeks Kualitas Air | Nilai Indeks | 60.00 | 50,50 | 50,50 |
| 23 | Indeks Kualitas Lahan | Nilai Indeks | 53.55 | 54,70 | 54,70 |
| 24 | Indeks Resiko Bencana | Nilai Indeks | 0.00 | 108,06 | 108,06 |
| 25 | Indeks Ancaman Bencana | Nilai Indeks | 16.30 | 13,72 | 13,72 |
| 26 | Indeks Kerugian | Nilai Indeks | 6.45 | 5,95 | 5,95 |
| 27 | Indeks Kapasitas | Nilai Indeks | 0.28 | 0.73 | 0.73 |

Sumber : Bapperida Kab. Maros,

6.3 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan daerah. Berikut gambaran pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 dan Penetapan Perubahan Target Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 6.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 dan
Perubahan Target Indikator Makro Tahun 2025

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pertumbuhan PDRB | Persen | 3.79 | 6,24 | 5,08 |
| 2 | Laju Inflasi | Persen | 1.23 | 1,33 | 1,33 |
| 3 | PDRB PerKapita | Rp Juta/Jiwa | 69,21 | 72,22 | 75,05 |
| 4 | Indeks Gini | Nilai Indeks | 0.349 | 0,368 | 0,368 |
| 5 | Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan | Persen | 90.68 | 91,99 | 91,99 |
| 6 | Rasio Kesenjangan Kemiskinan | Rasio | 0.08 | 0,07 | 0,07 |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia | Nilai Indeks | 104,14 | 73,91 | 74,62 |
| 8 | Angka Melek Huruf | Persen | 74.04 | 91,03 | 91,03 |
| 9 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8.05 | 8,32 | 8,32 |
| 10 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 73.77 | 69,49 | 69,49 |
| 11 | Persentase Balita Gizi Buruk | Persen | 0.63 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Prevelensi Balita Gizi Kurang | Persen | 4.65 | 0,38 | 0,38 |
| 13 | Cakupan Desa Siaga Aktif | Persen | 100.00 | 99,03 | 99,03 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 14 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | 61.70 | 69,62 | 69,62 |
| 15 | Tingkat Aprtisipasi Angkatan Kerja | Persen | 61.55 | 60,95 | 60,95 |
| 16 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4.34 | 3,50 | 4,13 |
| 17 | Rasio Penduduk Bekerja | Rasio | 4.34 | 0,85 | 0,85 |
| 18 | Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja | Persen | 80.74 | 47,83 | 47,83 |
| 19 | Rasio Kesempatan Kerja Terhadap penduduk Usia 15 Tahun Ke atas | Rasio | 1.05 | 0,96 | 0,96 |
| 20 | Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebeas Keluarga Terhadap Total Kesempatan kerja | Persen | 27.39 | 50,38 | 50,38 |
| 21 | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | Persen | 4.50 | 12,42 | 12,42 |
| 22 | Indeks Kepuasan Maysarakat | Nilain Indeks | 0.00 | 3,25 | 3,25 |
| 23 | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | Persen | 19.84 | 20,19 | 20,19 |
| 24 | Opini BPK | Opini | | WTP | WTP |
| 26 | Penguatan Cadangan Pangan | Persen | 174.00 | 151.903,47 | 151.903,47 |
| 27 | Kontrbusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB | Persen | 0.42 | 1,00 | 1,00 |
| 28 | Produksi Sektor Pertanian | Ton | 423,321.32 | 486.151,85 | 486.151,85 |
| 29 | Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras Terhadap PDRB | Persen | 0.00 | 0,006 | 0,006 |
| 30 | Porduksi Sektor Perkebunan | Ton | 2,317.00 | 4.301,94 | 4.301,94 |
| 31 | Kontibusi Produksi Kelompok Tani Terhadap PDRB | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | Persen | 0.76 | 1,22 | 1,22 |
| 33 | Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB | Persen | 4.14 | 7,00 | 7,00 |
| 34 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | Persen | 2.93 | 5,28 | 5,28 |
| 35 | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB | Persen | 14.79 | 23,93 | 23,93 |
| 36 | Pertumbuhan Industri | Persen | 81.33 | 11,05 | 11,05 |
| I | Pendidikan | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|---|--------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 96.93 | 78,58 | 78,58 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Persen | 102.91 | 91,55 | 91,55 |
| 3 | Angka Pendidikan di Tamatkan | Persen | 52.7 | 58,37 | 58,37 |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) | | | | |
| 3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Persen | 102.92 | 98,41 | 98,41 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Persen | 102.34 | 82,26 | 82,26 |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | | |
| 5 | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A | Persen | 102.92 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B | Persen | 102.34 | 70,67 | 70,67 |
| | Angka Putus Sekolah (APT) | | | | |
| 7 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Persen | 0.03 | 0,12 | 0,12 |
| 8 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Persen | 0.06 | 0,06 | 0,06 |
| | Angka Kelulusan (AL) | | | | |
| 9 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Angka Melanjutkan (AM) | | | | |
| 11 | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Ke SMP/MTs | Persen | 103.71 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 101.84 | 95,66 | 95,66 |
| | Fasilitas Pendidikan | | | | |
| 13 | Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik | Persen | 97.46 | 97,95 | 97,95 |
| 14 | Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik | Persen | 98.4 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar | Rasio | 174.11 | 0,0056 | 0,0056 |
| 16 | Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar | Rasio | 22.29 | 0,069 | 0,069 |
| 17 | Rasio Guru/Murid Terhadap Murid Per Kelas rata-Rata | Rasio | 0.63 | 0,049 | 0,049 |
| 18 | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 | Persen | 100 | 99,60 | 99,60 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Tahun Perempuan dan laki-laki | | | | |
| 19 | Penduduk Yang Berusia > 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) | Persen | 99.97 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | Persen | 0.00 | 93,31 | 93,31 |
| II | Kesehatan | | | | |
| 1 | Angka Kematian bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup | Per 1000 penduduk | 11.49 | 1,05 | 1,05 |
| 2 | Angka Kelangsungan Hidup bayi | Per 1000 kelahiran hidup | 988.51 | 998,93 | 998,93 |
| 3 | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup | Per 1000 kelahiran hidup | 11.86 | 1,02 | 1,02 |
| 4 | Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup | Per 1000 kelahiran hidup | 10.56 | 1,04 | 1,04 |
| 5 | Angka Kematian Ibu Per 100000 Kelahiran Hidup | Per 10000 kelahiran hidup | 0.00 | 41,40 | 41,40 |
| 6 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | Rasio | 14.13 | 17,94 | 17,94 |
| 7 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk | Rasio | 0.17 | 0,14 | 0,14 |
| 8 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | Rasio | 0.00 | 0,007 | 0,007 |
| 9 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan penduduk | Rasio | 0.44 | 1,08 | 1,08 |
| 10 | Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan | Persen | 108.04 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persen | 95.15 | 77,67 | 77,67 |
| 13 | Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak | Persen | 107.33 | 98,63 | 98,63 |
| 15 | Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk | Persen | 0.01 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani | Persen | 30.20 | 20,71 | 20,71 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 17 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | Persen | 100 | 44,95 | 44,95 |
| 18 | Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) | Per 100.000 penduduk | 261.11 | 96,90 | 96,90 |
| 19 | Tingkat kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) | Per 100.000 penduduk | 12.26 | 2,97 | 2,97 |
| 20 | Proporsi jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS | Persen | 20.75 | 78,73 | 78,73 |
| 21 | Proporsi Kasus Tuberklosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS | Persen | 20.75 | 49,36 | 49,36 |
| 22 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Penderita Diare Yang Ditangani | Persen | 56.33 | 72,89 | 72,89 |
| 24 | Angka Kejadian malaria | Persen | 20.28 | 13,86 | 13,86 |
| 25 | Proporsi Anak balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida | Persen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Doibati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi | Persen | 0.01 | 0,004 | 0,004 |
| 28 | Cakupan penjangrian kesehatan siswa SD dan setingkat | Persen | | 94,12 | 94,12 |
| 29 | Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS | Persen | 0.00 | 10,42 | 10,42 |
| 30 | Cakupan Kunjungan Bayi | Persen | 115.36 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Cakupan Puskesmas | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Cakupan Puskesmas Pembantu | Persen | 26.21 | 59,91 | 59,91 |
| 33 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | Persen | 103.87 | 94,78 | 94,78 |
| 34 | Cakupan Pelayanan Nifas | Persen | 107.36 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Usia 6-24 Bulan Keluarga | Persen | 90.29 | 100,00 | 100,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|-------|---|--------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 36 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidomologi < 24 Jam | Persen | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| 37 | Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang DI Tangani | Persen | 100,00 | 93,75 | 93,75 |
| 38 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | Persen | 86.72 | 100,00 | 100,00 |
| III | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| III.1 | Pekerjaan Umum | | | | |
| 1 | Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Rasio | 0.68 | 0,95 | 0,95 |
| 2 | Rasio Panjang jalan Dengan Jumlah Penduduk | Rasio | 0.00292 | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum dapat Dilalui Roda 4 | Persen | 0.00 | 5,82 | 5,82 |
| 4 | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam) | Persen | 74.56 | 99,75 | 99,75 |
| 5 | Persentase Jalan Yang memiliki trotoar dan darinase/saluran pembuang air (min 1,5 m) | Persen | 0.36 | 1,74 | 1,74 |
| 6 | Persentase sempadan jalan yang dipakai kaki lima atau bangunan liar | Persen | 12.53 | 14,47 | 14,47 |
| 7 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 97.51 | 98,17 | 98,17 |
| 8 | Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | Persen | 5.45 | 3,22 | 3,22 |
| 9 | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat | Persen | 0.01 | 70,00 | 70,00 |
| 11 | Persentase bangunan turap di wilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor | Persen | 25.08 | 45,19 | 45,19 |
| 12 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 72.97 | 95,77 | 95,77 |
| 13 | Rasio jaringan irigasi | Persen | 0.01 | 0,006 | 0,006 |
| 14 | Persemtase Penduduk berakses air minum | Persen | 76.68 | 94,62 | 94,62 |
| 15 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air | Persen | 46.32 | 80,86 | 80,86 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|--------------|---|--------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | minum layak perkotaan dan perdesaan | | | | |
| 16 | Persentase areal kawasan kumuh | Persen | 4.32 | 6,07 | 6,07 |
| 17 | Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | Persen | 0.26 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | Rasio | 0.00 | 0,15 | 0,15 |
| 19 | Rasio Tempat ibadah per satuan penduduk | Rasio | 0.00 | 0,003 | 0,003 |
| III.2 | Penataan Ruang | | | | |
| 1 | Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | Rasio | 1.88 | 1,80 | 1,80 |
| 2 | Luas RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | Persen | 1.30 | 3,46 | 3,46 |
| 3 | Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan | Rasio | | 0,67 | 0,67 |
| 4 | Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya | Persen | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ketaatan Terhadap RTRW | Persen | 10.81 | 9,18 | 9,18 |
| IV | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| 1 | Rasio rumah layak huni | Rasio | 0.17 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Rasio Pemukiman layak huni | Rasio | 0.99 | 0,99 | 0,99 |
| 3 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Persen | 78.30 | 59,38 | 59,38 |
| 4 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | Persen | 22.03 | 23,78 | 23,78 |
| 5 | Persentase pemukiman yang tertata | Persen | 98.86 | 99,48 | 99,48 |
| 6 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | Persen | 0.05 | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Persentase luasan pemukiman kumuh kawasan perkotaan | Persen | 15.43 | 81,43 | 81,43 |
| 8 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU | Persen | 2.75 | 75,00 | 75,00 |
| V | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM , DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|---|--------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan eilayah manajemen kebakaran (WMK) | Persen | 0.00 | 89,86 | 89,86 |
| 4 | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| VI | SOSIAL | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 14.10 | 76,92 | 76,92 |
| 2 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 14.10 | 76,92 | 76,92 |
| 3 | Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar' | Persen | 14.10 | 76,92 | 76,92 |
| 4 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha KUBE atau kelompok sosial ekoomi sejenis lainnya | Persen | 0.00 | 86,67 | 86,67 |
| 5 | Persetase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | Persen | 100.00 | 86,67 | 86,67 |
| 6 | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| I | Tenaga Kerja | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|--|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun | Persen | 23.26 | 44,44 | 44,44 |
| 2 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) | Persen | 8.33 | 76,19 | 76,19 |
| 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | 34.31 | 25,35 | 25,35 |
| 4 | Keselamatan dan perlindungan | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek | Persen | 5.12 | 94,24 | 94,24 |
| 6 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Besaran pemeriksaan perusahaan | Persen | 0.00 | 84,62 | 84,62 |
| 8 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 72.00 | 65,34 | 65,34 |
| 9 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | Persen | 25.00 | 72,35 | 72,35 |
| 10 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan | Persen | 0.00 | 69,08 | 69,08 |
| 11 | Rasio lulusan S1/S2/S3 | Rasio | 0.10 | 0,06 | 0,06 |
| II | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 0.00 | 45,54 | 45,54 |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | Persen | 25.71 | 28,57 | 28,57 |
| 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 0.00 | 74,72 | 74,72 |
| 4 | Rasio KDRT | Rasio | 0.00 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur | Persentase | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Persen | 26.47 | 48,39 | 48,39 |
| 7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|-----|---|--------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 8 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 100.00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | Rasio | 1.00 | 1,09 | 1,09 |
| 15 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP | Rasio | 0.95 | 1,09 | 1,09 |
| 17 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | Rasio | 1.00 | 1,00 | 1,00 |
| 18 | Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian | Persen | 0.00 | 97,00 | 97,00 |
| III | Pangan | | | | |
| 1 | Ketersediaan pangan utama | Persen | 44,543.64 | 44,050 | 44,050 |
| 2 | Ketersedian energi dan protein perkapita | Persen | 0.00 | 178543 | 178543 |
| 3 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen | | 100,00 | 100,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|---|--------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| IV | Pertanahan | | | | |
| 1 | Persentase luas lahan bersertifikat | Persen | 24.62 | 40,31 | 40,31 |
| 2 | Penyelesaian kasus tanah negara | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Penyelesaian izin lokasi | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| V | Lingkungan Hidup | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| 2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Ada/Tidak | TIDAK ADA | ADA | ADA |
| 3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat daerah | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| 4 | Hasil pengukuran indeks kualitas air | Nilai Indeks | 60.00 | 50,50 | 50,50 |
| 5 | Hasil pengukuran indeks kaulitas tutupan udara | Nilai Indeks | 93.04 | 87,90 | 87,90 |
| 6 | Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan | Nilai Indeks | 47.01 | 54,70 | 54,70 |
| 7 | Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Persen | 100.00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas daerah (PPLHD) di kabupaten/kota | Persen | 0.00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup | Persen | 100.00 | ADA | ADA |
| 10 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oelh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Timbunan sampah yang ditangani | Persen | 56.33 | 95,21 | 95,21 |
| 12 | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R | Persen | 17.61 | 0,50 | 0,50 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|------|---|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 13 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persen | 53.89 | 9,52 | 9,52 |
| 14 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | Persen | 0.00 | 89,79 | 89,79 |
| 15 | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | Persen | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | Persen | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil | | | | |
| 1 | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | Rasio | 1.00 | 0,95 | 0,95 |
| 2 | Rasio bayi berakte lahir | Rasio | 1.00 | 1,26 | 1,26 |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah | Rasio | 0.49 | 4,11 | 4,11 |
| 4 | Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| 5 | Penerapan KTP nasional berbasis NIK | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| 6 | Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP) | Persen | 100.00 | 89,33 | 89,33 |
| 7 | Cakupan penertiban akta kelahiran | Persen | 99.68 | 95,48 | 95,48 |
| VII | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | |
| 1 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen | 93.75 | 92,50 | 92,50 |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan msyarakat | Kelompok | 1.00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 17.15 | 9,58 | 9,58 |
| 4 | Persentase LSM Aktif | Persen | 56.22 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Persentase LPM berprestasi | Persen | 60.87 | 23,21 | 23,21 |
| 6 | Persentase PKK Aktif | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Persentase posyandu aktif | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| VIII | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan penduduk | Persen | 0.70 | 1,58 | 1,58 |
| 2 | Total Fertility Rate (TFR) | Jiwa | 2.26 | 2,27 | 2,27 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 | Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | Persen | 100.00 | 38,46 | 38,46 |
| 4 | Persentase perangkat daerah (dinas/Badan) yang memyusun dan memanfaatkan rencanagan induk pengendalian penduduk | Persen | 0.00 | 41,03 | 41,03 |
| 5 | Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tenatng pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Kebijakan | 1.00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Sektor | 7.00 | 7,00 | 7,00 |
| 7 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Kegiatan | 14.00 | 14,00 | 14,00 |
| 8 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Jiwa | 1.33 | 1,44 | 1,44 |
| 9 | Ratio akseptor KB | Rasio | 63.17 | 87,70 | 87,70 |
| 10 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun | Persen | 63.17 | 48,40 | 48,40 |
| 11 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) tahun | Per 1.000 penduduk | 37.01 | 552,34 | 552,34 |
| 12 | Cakupan pasangan usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | Persen | 0.67 | 0,12 | 0,12 |
| 13 | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 9.93 | 8,03 | 8,03 |
| 14 | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | Persen | 23.23 | 42,57 | 42,57 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|--|--------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 15 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 15.72 | 42,12 | 42,12 |
| 16 | Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) Ber-KB | Persen | 5.98 | 24,87 | 24,87 |
| 17 | Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB | Persen | 3.15 | 29,51 | 29,51 |
| 18 | Cakupan bina keluarga lansia (BKL) ber-KB | Persen | 0.73 | 7,22 | 7,22 |
| 19 | Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan | Persen | 100.00 | 85,71 | 85,71 |
| 20 | Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa | Persen | 33.17 | 46,74 | 46,74 |
| 21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri | Persen | 29.03 | 76,83 | 76,83 |
| 23 | Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | Rasio | 100.00 | 1,00 | 1,00 |
| 24 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persen | 98.67 | 86,48 | 86,48 |
| 25 | Persentase faskers dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | Persen | 60.39 | 100,00 | 100,00 |
| 26 | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Persentase remaja yang terkena infeksi penyakit infeksi menular seksual (IMS) | Persen | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan | Persen | 100 | 75,00 | 75,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|-----------|---|--------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | | | | |
| 29 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persen | 6.89 | 21,96 | 21,96 |
| 30 | Rata-rata usia kawin pertama | Tahun | 27.24 | 30,28 | 30,28 |
| 31 | Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes | Persen | 0.403035348 | 2,00 | 2,00 |
| IX | Perhubungan | | | | |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Jiwa | 0.00 | 1.945.966,23 | 1.945.966,23 |
| 2 | Rasio ijin trayek | Rasio | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jumlah uji kir angkutan umum | Unit | 206.00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis | Unit | 3.00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 29.77 | 51,87 | 51,87 |
| 6 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 55.98 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Pemasangan rambu-rambu | Persen | 82.50 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 0.04 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | Jiwa | 0.00 | 2.297.778,97 | 2.297.778,97 |
| 10 | Jumlah barang yang terangkut angkutan umum | Ton | 0.00 | 338.234.488,70 | 338.234.488,70 |
| 11 | Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | Jiwa | 10,573,677.00 | 1.658.589,19 | 1.658.589,19 |
| 12 | Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | Ton | 94,551,193.00 | 338.234.908,72 | 338.234.908,72 |
| X | Komunikasi dan Informatika | | | | |
| 1 | cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Cakupan layanan telekomunikasi | Persen | 48.38 | 92,74 | 92,74 |
| 3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | Persen | 64.04 | 74,93 | 74,93 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|-------------|---|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 4 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | Persen | 0.58 | 0,79 | 0,79 |
| 5 | Proporsi rumah atngga yang memiliki komputer pribadi | Persen | 0.10 | 0,97 | 0,97 |
| XI | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | |
| 1 | Persentase koperasi aktif | Persen | 46.61 | 72,92 | 72,92 |
| 2 | Persentase UKM non BPR/LKM Aktif | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Persentase BPR/LKM Aktif | Persen | 100.00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | Persen | 99.77 | 100,00 | 100,00 |
| XII | Penanaman Modal | | | | |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 470.00 | 82,56 | 82,56 |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp | 112,033,458,259,695.00 | 10.026.621,29 | 10.026.621,29 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | Rasio | 37.92 | 5,61 | 5,61 |
| 4 | Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah) | Persen | 24.47 | 12,06 | 12,06 |
| XIII | Pemuda dan Olahraga | | | | |
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Persentase wirausaha muda | Persen | 8.67 | 10,91 | 10,91 |
| 3 | Cakupan pembinaan olahraga | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Cakupan pelatoh yang bersertifikasi | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Cakupan pembinaan atlit muda | Persen | 15.63 | 11,79 | 11,79 |
| 6 | Jumlah atlet berprestasi | Orang | 0.00 | 52,00 | 52,00 |
| 7 | Jumlah prestasi olahraga | Orang | 23.08 | 48,15 | 48,15 |
| XIV | Statistik | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| 2 | Buku " kabupaten dalam angka " | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| 3 | Buku " PDRB " | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| XV | Persandian | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|--------------|--|----------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 |
| XVI | Kebudayaan | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kegiatan | 9.00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Unit | 69.72 | 79,34 | 79,34 |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Unit | 7.00 | 9,00 | 9,00 |
| 4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Unit | 251 | 110,62 | 110,62 |
| XVII | Perpustakaan | | | | |
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Orang | 0.23 | 0,11 | 0,11 |
| 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Buku | 0.46 | 0,49 | 0,49 |
| 3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Rasio | 1.24 | 0,93 | 0,93 |
| 4 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | Orang | 168.00 | 88,71 | 88,71 |
| 5 | Jumlah koleksi buku perpustakaan | Buku | 33,917 | 17.061 | 17.061 |
| 6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 100 | 6,00 | 6,00 |
| XVIII | Kearsipan | | | | |
| 1 | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | Persen | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Kegiatan | 5 | 5 | 5 |
| I | Pariwisata | | | | |
| 1 | Kunjungan wisata | Persen | 120.32 | 43,81 | 43,81 |
| 2 | Lama kunjungan wisata | Hari | 1 | 2 | 2 |
| 3 | PAD Sektor Pariwisata | Persen | 1.29 | 2,35 | 2,35 |
| II | Pertanian | | | | |
| 1 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | Persen | 0.42 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | Persen | 0.00 | 0,01 | 0,01 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 5 | Kontribusi sektor kelompok tani terhadap PDRB | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Ton/Ha | 6.58 | 27,43 | 27,43 |
| 8 | Cakupan bina kelompok tani | Persen | 10.51 | 11,16 | 11,16 |
| III | Pergdagangan | | | | |
| 1 | Ekspor bersih perdagangan | Rp | 1,937,701,569,141 | 69.807.987.474 | 69.807.987.474 |
| 2 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi | Persen | 100.00 | 85,89 | 85,89 |
| IV | Perindutsrian | | | | |
| 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| V | Transmigrasi | | | | |
| 1 | Persentase Transmigran swakarsa | Persen | 60.00 | 66,67 | 66,67 |
| VI | Kelautan dan Perikanan | | | | |
| 1 | Produksi perikanan | Persen | 114.96 | 160,93 | 160,93 |
| 2 | Konsumsi ikan | Persen | 117.99 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Cakupan bina kelompok nelayan | Persen | 61.40 | 75,89 | 75,89 |
| 4 | Produksi perikanan kelompok nelayan | Persen | 31.40 | 51,31 | 51,31 |
| 5 | Proporsi Tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | Persen | 75.00 | 94,93 | 94,93 |
| I | Perencanaan Pembangunan | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| 2 | Tersedianya dokume perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| 3 | Tersedianya dokumen perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|-----|---|-------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 5 | Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD | Persen | 92.50 | 99,63 | 99,63 |
| 6 | Penjbaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD | Persen | 91.28 | 94,80 | 94,80 |
| II | Keuangan | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Nilai Opini | WTP | C&C | C&C |
| 2 | Persetase SILPA | Persen | 5.80 | 8,32 | 8,32 |
| 3 | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 5.80 | 8,32 | 8,32 |
| 4 | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | Persen | 4.14 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Persentase belanja pendidikan (20 %) | Persen | 27.92 | 26,75 | 26,75 |
| 6 | Persentase belanja kesehatan (10 %) | Persen | 20.00 | 13,99 | 13,99 |
| 7 | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | Rasio | 9.54 | 0,77 | 0,77 |
| 8 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | Persen | 4.55 | 5,96 | 5,96 |
| 9 | Penetapan APBD | Tepat/Tidak | TEPAT | 100 | 100 |
| III | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | |
| 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Jam | 20.00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persen | 91.77 | 69,60 | 69,60 |
| 3 | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | 90.18 | 50,76 | 50,76 |
| 4 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Jabatan | 33.00 | 25,00 | 25,00 |
| 5 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Jabatan | 167.00 | 175,00 | 175,00 |
| 6 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 4636.00 | 3140,42 | 3140,42 |
| IV | Penelitian dan Pengembangan | | | | |
| 1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Persen | 57.14 | 67,07 | 67,07 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | CAPAIN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|-------------------------|---|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Perentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | Persen | 100.00 | 10,26 | 10,26 |
| 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | Persentase | 100 | 100,00 | 100,00 |
| V | Pengawasan | | | | |
| 1 | Persentase tindak lanjut temuan | Persen | 65.68 | 91,54 | 91,54 |
| 2 | Persentase pelanggaran pegawai | Persen | 5.78 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Jumlah temuan BPK | Temuan | 32.00 | 12,02 | 12,02 |
| VI | Sekretariat Dewan | | | | |
| 1 | Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD | Ada/Tidak | ADA | ADA | ADA |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita | Rp | 1,154,743.00 | 1.477.500,38 | 1.477.500,38 |
| 2 | Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita | Persen | 48.96 | 51,37 | 51,37 |
| 3 | Produktivitas Total Daerah | Persen | 84.51 | 74,30 | 74,30 |
| 4 | Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa | Persen | 70.00 | 8,24 | 8,24 |
| 5 | Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) | Rasio | 0.13 | 0,19 | 0,19 |
| 6 | Angka Kriminalitas Yang tertangani | Persen | 0.02 | 0,21 | 0,21 |
| 7 | Rasio Ketergantungan | Rasio | 45.87 | 0,50 | 0,50 |

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berikut gambaran pencapaian SPM Kabupaten Maros Tahun 2024 dan penetapan target Perubahan RKPD Tahun 2025

Tabel 6.4
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupata Maros Tahun 2024-2025

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | CAPAIAN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|-----|---|--------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Pendidikan | | | | |
| 1.1 | Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar | Persen | 99.02 | 100 | 100 |
| 1.2 | Jumlah penduduk usia 7 s/d 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 96.43 | 100 | 100 |
| 1.3 | Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | Persen | 98.94 | 100 | 100 |
| 2 | Kesehatan | | | | |
| 2.1 | Jumlah ibu hamil Yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Jumlah ibu bersalin Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Jumlah bayi baru lahir Yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Jumlah anak Pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 97.78 | 100 | 100 |
| 2.6 | Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Persen | 98.95 | 100 | 100 |
| 2.7 | Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatakan Pelayanan Kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi Usia 15 Tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | CAPAIAN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|------|---|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2.9 | Jumlah Warganegara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 93.33 | 100 | 100 |
| 2.11 | Jumlah Warga Negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 98.67 | 100 | 100 |
| 2.12 | Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 96.00 | 100 | 100 |
| 3 | Pekerjaan Umum | | | | |
| 3.1 | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan layanan pengelolaan air limbah domestik | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Perumahan Rakyat | | | | |
| 4.1 | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan PERlindungan Masyarakat | | | | |
| 5.1 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkara kabupaten/kota | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Jumlah warganegara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapan terhadap bencana | Persen | 90.00 | 100 | 100 |
| 5.4 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | 92.00 | 100 | 100 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | CAPAIAN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|-----|--|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 5.5 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Sosial | | | | |
| 6.1 | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti | Persen | 95.38 | 100 | 100 |
| 6.2 | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 98.33 | 100 | 100 |
| 6.3 | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 93.85 | 100 | 100 |
| 6.4 | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | Persen | 98.33 | 100 | 100 |
| 6.5 | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Persen | 100 | 100 | 100 |

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sebagai amanat pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator TPB kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global.

TPB bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.5
Capaian dan Target Perubahan Indikator TPB/SDG's
Tahun 2024 –2025

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | CAPAIAN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|------|--|--------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun | | | | |
| 1.1 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | Persen | 0.00 | 7,74 | 7,74 |
| 1.2 | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan | Persen | 0.00 | 97,75 | 97,75 |
| 1.4 | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas | Persen | 0.00 | 21,5 | 21,5 |
| 1.5 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan | RT | 0.00 | 7.308 | 7.308 |
| 1.6 | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang diproses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | Persen | 0.00 | 100 | 100 |
| 1.7 | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | Persen | 0.00 | 98,78 | 98,78 |
| 1.8 | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | Persen | 0.00 | 48,40 | 48,40 |
| 1.9 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak berkelanjutan | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.10 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | Persen | 0.00 | 100 | 100 |
| 1.11 | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan | Persen | 0.00 | 100 | 100 |
| 1.12 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat | Persen | 0.00 | 94,10 | 94,10 |
| 1.13 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat | Persen | 0.00 | 94,95 | 94,95 |
| 1.14 | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran | Persen | 0.00 | 95,48 | 95,48 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | CAPAIAN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.16 | Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah | Kecamatan | 0.00 | 14 Kecamatan | 14 Kecamatan |
| 1.17 | Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | Dokumen | 0.00 | 1 dokumen | 1 dokumen |
| 2 | Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian yang Berkelanjutan | | | | |
| 2.1 | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita | Persen | 0.00 | 0,38 | 0,38 |
| 3 | Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | | | | |
| 3.1 | Angka Kematian Ibu (AKI) | Per 100000 kelahiran hidup | 0.00 | 41,40 | 41,40 |
| 3.2 | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | Persen | 0.00 | 100 | 100 |
| 3.5 | Prevalensi HIV pada populasi dewasa | Persen | 0.00 | 0,004 | 0,004 |
| 3.6 | Insiden Tuberkulosis per 100.000 penduduk | Per 100000 penduduk | 0.00 | 96,9 | 96,9 |
| 3.8 | Prevalensi tekanan darah tinggi | Persen | 0.00 | 14,65 | 14,65 |
| 3.9 | Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun | Persen | 0.00 | 0,49 | 0,49 |
| 3.10 | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern | Persen | 0.00 | 66,84 | 66,84 |
| 3.11 | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | Persen | 0.00 | 48,40 | 48,40 |
| 3.12 | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern | Persen | 0.00 | 42,57 | 42,57 |
| 3.13 | Total Fertility Rate (TFR) | Jiwa | 0.00 | 2,27 | 2,27 |
| 3.14 | Unmet need pelayanan kesehatan | Persen | 0.00 | 8,03 | 8,03 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | CAPAIAN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|-----|--|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 4 | Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua | | | | |
| 4.1 | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B | Persen | 0.00 | 99,62 | 99,62 |
| 4.2 | Persentase SMP/Mts berakreditasi minimal B | Persen | 0.00 | 93,25 | 93,25 |
| 4.3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | Persen | 0.00 | 100 | 100 |
| 4.4 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | Persen | 0.00 | 83,10 | 83,10 |
| 4.5 | Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun | Tahun | 0.00 | 8,32 | 8,32 |
| 4.6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 0.00 | 78,58 | 78,58 |
| 4.7 | Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Tujuan 5 : Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | | | | |
| 5.1 | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan | Persen | 0.00 | 0,01 | 0,01 |
| 5.2 | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | Persen | 0.00 | 100 | 100 |
| 5.3 | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin 25-49 Tahun | Persen | 0.00 | 30,28 | 30,28 |
| 5.4 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah | Persen | 0.00 | 25,71 | 25,71 |
| 6 | Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak Yang Berkelanjutan Untuk Semua | | | | |
| 6.1 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.2 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | Persen | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua | | | | |
| | | N/a | N/a | N/a | N/a |
| 8 | Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua | | | | |
| 8.1 | Laju pertumbuhan PDB Perkapita | Persen | 0.00 | 2,18 | 2,18 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | CAPAIAN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|------|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 8.2 | PDB Perkapita | Rp Juta/Jiwa | 0.00 | 55,52 | 55,52 |
| 8.3 | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | Persen | 0.00 | 4,35 | 4,35 |
| 8.5 | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB | Persen | 0.00 | 1,22 | 1,22 |
| 8.6 | Jumlah wisatawan mancanegara | Orang | 0.00 | 576 | 576 |
| 8.7 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | Orang | 0.00 | 408.822 | 408.822 |
| 9 | Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi | | | | |
| | | N/a | N/a | N/a | N/a |
| 10 | Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara | | | | |
| 10.1 | Koefisien Gini | Nilai Indeks | 0.00 | 0,354 | 0,354 |
| 10.2 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | Persen | 0.00 | 7,74 | 7,74 |
| 11 | Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | | | | |
| 11.2 | Persentase sampah perkotaan yang tertangani | Persen | 0.00 | 94,3 | 94,3 |
| 12 | Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | | | | |
| 12.1 | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang | Ton/Hari | 0.00 | 1.110,20 | 1.110,20 |
| 13 | Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | | | | |
| | | N/a | N/a | N/a | N/a |
| 14 | Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumberdaya Kelautan dan Samudra untuk Berkelanjutan | | | | |
| | | N/a | N/a | N/a | N/a |
| 15 | Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daeratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggusuran, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | | | | |
| | | N/a | N/a | N/a | N/a |
| 16 | Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | | | | |
| 16.1 | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dan Pemerintah Daerah | Persen | 0.00 | 100 | 100 |
| 16.2 | Persentase keterwakilan perempuan di DPRD | Persen | 0.00 | 28,57 | 28,57 |
| 16.3 | Persentasase anak yang memiliki akte kelahiran | Persen | 0.00 | 100 | 100 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | CAPAIAN REALISASI TAHUN 2024 | TARGET RKPD POKOK 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|----|---|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 17 | Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | | | | |
| | | N/a | N/a | N/a | N/a |

BAB VII

PENUTUP

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah mekanisme adaptif yang responsif terhadap dinamika pembangunan. Dengan demikian, segala penyesuaian yang dilakukan—baik karena faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional maupun kondisi internal seperti keadaan mendesak—akan selalu selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Diharapkan, dengan memegang teguh kaidah-kaidah ini, setiap perubahan yang terjadi akan semakin memperkuat fondasi pembangunan, membawa dampak positif yang berkelanjutan, dan pada akhirnya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik."

7. 2. Kesimpulan

Dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan, maka pada perubahan RKPD ini dilakukan penyesuaian dan penajaman terhadap Capaian target maupun anggaran yang bersumber dari Pemerintah provinsi yang bersumber dari bantuan keuangan maupun Pemerintah Pusat melalui DAK, Dana Earmarking, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 diubah sesuai analisis terhadap perubahan Asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan capaian makro maupun laporan pelaksanaan RKPD Triwulan I. Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman, dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), dan RAPBD-P Tahun Anggaran 2025.

BUPATI MAROS,

ttd

A.S.CHAIDIR SYAM